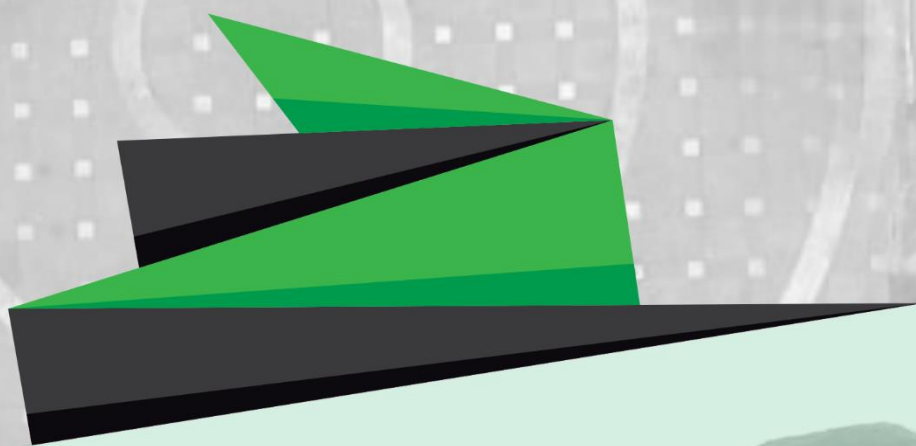


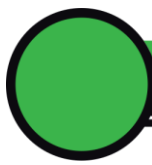


PEMERINTAH
KOTA CILEGON

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALI KOTA CILEGON



2020



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Cilegon Tahun 2020 ini dapat disusun dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Penyusunan dan penyampaian LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2020 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cilegon Tahun 2020 merupakan representasi tertulis yang terhadap pencapaian kinerja dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Cilegon dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2020. Adapun evaluasi hasil kinerja dalam LKPJ didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2020 yang merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

Sistematika dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun substansi dokumen LKPJ yang diatur terdiri dari visi, misi dan data umum daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah, kebijakan Perubahan enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Kami berharap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun anggaran 2020 yang tertuang dalam dokumen LKPJ ini tergambarkan dengan baik dan digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon di masa mendatang, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 mendatang.

Cilegon, Maret 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
Bab 1: Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kota Cilegon.....	2
1.2.1 Visi Kota Cilegon	2
1.2.2 Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021	3
1.3 Data Umum Daerah.....	3
1.3.1 Data Geografis.....	3
1.3.2 Data Kependudukan.....	6
1.3.3 Data Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)	12
1.4 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah.....	15
1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	15
1.4.2 Tingkat Kemiskinan	21
1.4.3 Ketenagakerjaan.....	23
1.4.4 Perekonomian.....	25
1.4.5 Perkembangan Investasi.....	27
1.4.6 Tingkat Inflasi	28
1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	29
1.5.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	30
1.5.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	30
1.5.1.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020	31
A. Pendapatan Asli Daerah	32
1. Hasil Pajak Daerah.....	33
2. Hasil Retribusi Daerah	35
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	41
B. Dana Perimbangan.....	44
1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46
2. Dana Alokasi Umum	48
3. Dana Alokasi Khusus	48
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	49
1.5.1.3 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.....	59
A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020	59
1. Intensifikasi Pajak Daerah.....	59
2. Intensifikasi Retribusi Daerah.....	61
3. Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah.....	64
4. Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	65
B. Intensifikasi Dana Perimbangan Tahun 2020	65
1. Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	66
2. Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)	66

3.	Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	66
C.	Intensifikasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020	67
1.	Pendapatan Hibah	67
2.	Bagi Hasil Pajak Provinsi.....	67
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67
4.	Bantuan Keuangan Provinsi Banten.....	67
D.	Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2020	68
1.	Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	68
2.	Ekstensifikasi Dana Perimbangan	70
3.	Ekstensifikasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya.....	71
1.5.1.4	Permasalahan dan Solusi	71
A.	Permasalahan	71
B.	Solusi	75
1.5.2	Pengelolaan Belanja Daerah.....	78
1.5.2.1	Target dan Realisasi Belanja	78
A.	Belanja Tidak Langsung.....	79
A.1	Belanja Pegawai.....	80
A.2	Belanja Hibah.....	81
A.3	Belanja Bantuan Sosial	82
A.4	Belanja Bantuan Keuangan	83
A.5	Belanja Tidak Terduga.....	83
B.	Belanja Langsung.....	84
B.1.	Belanja Langsung berdasar Jenis Belanja.....	84
B.2.	Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan	88
1.5.2.2	Permasalahan dan Solusi	91
A.	Permasalahan	91
B.	Solusi.....	91
2.1	Perubahan Perwal APBD sebelum dan sesudah Perubahan Perda APBD Tahun 2020.....	92
2.2	Perubahan Perda APBD	94
2.2.1	Latar Belakang.....	94
2.2.2	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	94
2.2.3	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	95
2.2.3.1	Rasionalisasi Belanja Pada APBD Tahun 2020.....	96
2.2.3.2	...Prioritas Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid- 19	97
2.2.3.3	Perubahan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020	98
2.2.3.4	Prioritas belanja lainnya di triwulan 3 dan 4 tahun 2020	99
2.2.4	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	99
Bab 3:	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	100
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	100
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100
3.1.1.1	Urusan Pendidikan.....	100
A.	DINAS PENDIDIKAN DAN SMPN	100
3.1.1.2	Urusan Kesehatan.....	128

A.	DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSKESMAS, LABKESDA, P2KT DAN JAMKESMAS.....	128
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.....	219
3.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	223
A.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN UPTD PERBENGKELAN, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM.....	223
3.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	248
A.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CILEGON.....	248
3.1.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	258
A.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	258
B.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	264
3.1.1.6	Sosial.....	269
A.	DINAS SOSIAL DAN UPTD DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL.....	269
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	286
3.1.2.1	Tenaga Kerja	286
A.	DINAS TENAGA KERJA DAN UPTD LATIHAN KERJA	286
3.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	299
A.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	299
3.1.2.3	Pangan.....	327
A.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.....	327
3.1.2.4	Pertanahan.....	335
A.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CILEGON.....	335
3.1.2.5	Lingkungan Hidup.....	336
A.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I-IV, DAN UPTD TPSA	336
3.1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	353
A.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	353
3.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	374
A.	DINAS SOSIAL	374
3.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	379
A.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD KELUARGA BERENCANA	379
3.1.2.9	Perhubungan.....	399
A.	DINAS PERHUBUNGAN, UPTD PENGELOLAAN SARPRAS PERHUBUNGAN, UPTD PARKIR	399
3.1.2.10	Komunikasi dan Informatika	421
A.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	421
3.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	435
A.	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR	435
3.1.2.12	Penanaman Modal.....	445

A.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	445
3.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	454
A.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, UPTD PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAHRAGA BINAAN	454
3.1.2.14	Statistik.....	473
A.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	473
3.1.2.15	Persandian	477
A.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK	477
3.1.2.16	Kebudayaan.....	480
A.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAN UPTD BALAI BUDAYA..	480
3.1.2.17	Perpustakaan.....	487
A.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.....	487
3.1.2.18	Kearsipan.....	493
A.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.....	493
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	499
3.1.3.1	Kelautan dan Perikanan	499
A.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU).....	499
3.1.3.2	Pariwisata.....	503
A.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.....	503
3.1.3.3	Pertanian	509
A.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN, DAN UPT KAWASAN PERTANIAN TERPADU	509
3.1.3.4	Perdagangan	521
A.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	521
3.1.3.5	Perindustrian.....	533
A.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	533
3.1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	541
3.1.4.1	Administrasi Pemerintahan.....	541
A.	SEKRETARIAT DAERAH	541
1.	Bagian Pemerintahan.....	541
2.	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	544
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	550
4.	Bagian Perekonomian dan Pembangunan.....	559
5.	Bagian Sosial Kemasyarakatan.....	564
6.	Bagian Program dan Keuangan.....	568
7.	Bagian Hukum dan HAM	570
8.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	572
9.	Bagian Umum.....	577
B.	SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON	583
C.	KECAMATAN CILEGON	610
1.	KELURAHAN CIWADUK.....	614
2.	KELURAHAN BENDUNGAN.....	619



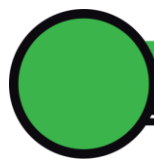
3.	KELURAHAN BAGENDUNG	623
4.	KELURAHAN KETILENG	628
5.	KELURAHAN CIWEDUS	636
D.	KECAMATAN CIWANDAN	654
1.	KELURAHAN RANDAKARI	659
2.	KELURAHAN KEPUH	665
3.	KELURAHAN GUNUNG SUGIH	670
4.	KELURAHAN BANJARNEGARA	677
5.	KELURAHAN TEGAL RATU	682
6.	KELURAHAN KUBANGSARI	687
E.	KECAMATAN CIBEBER	692
1.	KELURAHAN KEDALEMAN	695
2.	KELURAHAN KALITIMBANG	700
3.	KELURAHAN KARANGASEM	704
4.	KELURAHAN CIKERAJ	709
5.	KELURAHAN BULAKAN	713
6.	KELURAHAN CIBEBER	718
F.	KECAMATAN GROGOL	732
1.	KELURAHAN KOTASARI	737
2.	KELURAHAN GROGOL	741
3.	KELURAHAN RAWA ARUM	746
4.	KELURAHAN GEREM	750
G.	KECAMATAN PULOMERAK	755
1.	KELURAHAN LEBAK GEDE	759
2.	KELURAHAN TAMAN SARI	764
3.	KELURAHAN MEKARSARI	770
4.	KELURAHAN SURALAYA	776
H.	KECAMATAN JOMBANG	780
1.	KELURAHAN JOMBANG WETAN	783
2.	KELURAHAN MASIGIT	787
3.	KELURAHAN SUKMAJAYA	791
4.	KELURAHAN PANGGUNRAWI	795
5.	KELURAHAN GEDONG DALEM	798
I.	KECAMATAN CITANGKIL	811
1.	KELURAHAN CITANGKIL	817
2.	KELURAHAN KEBONSARI	821
3.	KELURAHAN WARNASARI	827
4.	KELURAHAN SAMANGRAYA	831
5.	KELURAHAN LEBAK DENOK	836
6.	KELURAHAN TAMANBARU	840
7.	KELURAHAN DRINGO	845
J.	KECAMATAN PURWAKARTA	850
1.	KELURAHAN RAMANUJU	857
2.	KELURAHAN KEBONDALEM	861
3.	KELURAHAN KOTABUMI	866
4.	KELURAHAN PABEAN	871

5.	KELURAHAN TEGAL BUNDER.....	876
6.	KELURAHAN PURWAKARTA.....	880
K.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	884
L.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	893
3.1.4.2	Pengawasan.....	901
A.	INSPEKTORAT DAERAH.....	901
3.1.4.3	Perencanaan.....	907
A.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	907
3.1.4.4	Keuangan.....	919
A.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, UPTD PAJAK WILAYAH I-IV	919
3.1.4.5	Kepegawaian.....	956
A.	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UPTD DATA DAN INFORMASI PEGAWAI	956
B.	SEKRETARIAT KORPRI.....	966
3.1.4.6	Pendidikan dan Pelatihan.....	971
A.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	971
3.1.4.7	Penelitian dan Pengembangan.....	975
A.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	975
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	977
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	983
Bab 4 :	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan & Penugasan.....	1009
Bab 5 :	Penutup.....	1010

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan	4
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019 dan 2020	6
Tabel 1.3 Rata-rata Pertambahan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2017-2020.....	8
Tabel 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2019 dan 2020	9
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2020	12
Tabel 1.6 Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2020	13
Tabel 1.7 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, Tahun 2020.....	13
Tabel 1.8 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2020	14
Tabel 1.9 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2016 – 2020.....	16
Tabel 1.10 Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2016-2020	20
Tabel 1.11 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah	31
Tabel 1.12 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	31
Tabel 1.13 Rencana dan Realisasi PAD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	33
Tabel 1.14 Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	34
Tabel 1.15 Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2020	37
Tabel 1.14 Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	40
Tabel 1.15 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	42
Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	42
Tabel 1.16 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	45
Tabel 1.17 Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	47
Tabel 1.18 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	50
Tabel 1.19 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	51
Tabel 1.20 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	79
Tabel 1.21 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	79
Tabel 1.22 Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	80
Tabel 1.23 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	81
Tabel 1.24 Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	82
Tabel 1.25 Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	84
Tabel 1.26 Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	85
Tabel 1.27 Rencana dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	85
Tabel 1.28 Rencana dan Realisasi Belanja Modal Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	86
Tabel 1.29 Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020.....	89
Tabel 1.30 Target dan Realisasi Kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020.....	89
Tabel 1.31 Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020.....	90
Tabel 3.1.1.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan.....	100
Tabel 3.1.1.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)	128

Tabel 3.1.1.2b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan).....	133
Tabel 3.1.1.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat).....	173
Tabel 3.1.1.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit).....	196
Tabel 3.1.1.2e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan RSUD).....	219
Tabel 3.1.1.2e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Pelayanan RSUD).....	221
Tabel 3.1.1.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	223
Tabel 3.1.1.3a.1 Target Dan Realisasi Indikator Program Penataan, Pengendalian, Dan Pemanfaatan Ruang.....	230
Tabel 3.1.1.3a.2 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame.....	233
Tabel 3.1.1.3a.3 Bobot Tujuh Layanan Informasi.....	234
Tabel 3.1.1.3a.4 Ketersediaan Jasa Layanan Informasi.....	235
Tabel 3.1.1.3a.5 Target dan Realisasi Indikator Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi.....	236
Tabel 3.1.1.3a.6 Kemantapan Jalan Kota Cilegon Tahun 2020.....	237
Tabel 3.1.1.3a.7 Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kota Cilegon Tahun 2020.....	237
Tabel 3.1.1.3a.8 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	239
Tabel 3.1.1.3a.9 Data Dasar Lokasi Banjir / Genangan Di Kota Cilegon.....	240
Tabel 3.1.1.3a.10 Lokasi Penanganan Banjir/Genangan Tahun 2020.....	245
Tabel 3.1.1.3a.11 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air.....	246
Tabel 3.1.1.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	248
Tabel 3.1.1.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP).....	258
Tabel 3.1.1.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).....	264
Tabel 3.1.1.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial.....	269
Tabel 3.1.2.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Tenaga Kerja.....	286
Tabel 3.1.2.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan).....	299
Tabel 3.1.2.2b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).....	305
Tabel 3.1.2.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).....	317
Tabel 3.1.2.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan.....	327
Tabel 3.1.2.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan.....	335
Tabel 3.1.2.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup.....	336
Tabel 3.1.2.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Dukungan Layanan Pemerintahan).....	353



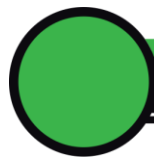
Tabel 3.1.2.6b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk).....	356
Tabel 3.1.2.6c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil).....	360
Tabel 3.1.2.6d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)	365
Tabel 3.1.2.6e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)	368
Tabel 3.1.2.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	374
Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk).....	379
Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Bina Keluarga Sejahtera)	384
Tabel 3.1.2.9a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)	399
Tabel 3.1.2.9b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan)	400
Tabel 3.1.2.9b.1 Nilai IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	406
Tabel 3.1.2.9b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut)	409
Tabel 3.1.2.9c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).....	411
Tabel 3.1.2.9d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas).....	417
Tabel 3.1.2.9d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (UPTD Parkir)	419
Tabel 3.1.2.9e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)	420
Tabel 3.1.2.10a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika (Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah)	421
Tabel 3.1.2.10b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika (Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi)	428
Tabel 3.1.2.11a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	435
Tabel 3.1.2.11a.1 Jumlah UMK Kota Cilegon Th 2020 Berdasarkan Kecamatan.....	441
Tabel 3.1.2.11a.2 Jumlah UMK Kota Cilegon Th 2020 berdasarkan Lapangan Usaha.....	441
Tabel 3.1.2.11a.3 Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi	442
Tabel 3.1.2.12a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal.....	445
Tabel 3.1.2.13a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	454
Tabel 3.1.2.14a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik.....	473
Tabel 3.1.2.15a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian	477
Tabel 3.1.2.16a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan.....	480
Tabel 3.1.2.17a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan.....	487
Tabel 3.1.2.18a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan.....	493



Tabel 3.1.3.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan.....	499
Tabel 3.1.3.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata	503
Tabel 3.1.3.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata	509
Tabel 3.1.3.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan	521
Tabel 3.1.3.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perindustrian	533
Tabel 3.1.4.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Pemerintahan).....	541
Tabel 3.1.4.1b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Organisasi dan RB)	544
Tabel 3.1.4.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	550
Tabel 3.1.4.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Perekonomian dan Pembangunan).....	559
Tabel 3.1.4.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Sosial Kemasyarakatan).....	564
Tabel 3.1.4.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Program dan Keuangan).....	568
Tabel 3.1.4.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Hukum dan HAM)	570
Tabel 3.1.4.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	572
Tabel 3.1.4.1i Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Umum).....	577
Tabel 3.1.4.1j Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD).....	584
Tabel 3.1.4.1k Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Cilegon)	610
Tabel 3.1.4.1k.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ciwaduk)	614
Tabel 3.1.4.1k.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bendungan)	619
Tabel 3.1.4.1k.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bagendung).....	623
Tabel 3.1.4.1k.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ketileng).....	628
Tabel 3.1.4.1k.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ciwedus)	636
Tabel 3.1.4.1l Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Ciwandan).....	654
Tabel 3.1.4.1l.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Randakari).....	659
Tabel 3.1.4.1l.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kepuh)	665
Tabel 3.1.4.1l.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gunung Sugih)	670
Tabel 3.1.4.1l.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Banjarnegara).....	677

Tabel 3.1.4.1l.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tegal Ratu)	682
Tabel 3.1.4.1l.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kubangsari)	687
Tabel 3.1.4.1m Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Cibeber).....	692
Tabel 3.1.4.1m.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kedaleman).....	695
Tabel 3.1.4.1m.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kalitimbang).....	700
Tabel 3.1.4.1m.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Karangasem)	704
Tabel 3.1.4.1m.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Cikerai).....	709
Tabel 3.1.4.1m.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bulakan)	713
Tabel 3.1.4.1m.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Cibeber)	718
Tabel 3.1.4.1n Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Grogol)	732
Tabel 3.1.4.1n.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kotasari).....	737
Tabel 3.1.4.1n.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Grogol)	741
Tabel 3.1.4.1n.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Rawa Arum).....	746
Tabel 3.1.4.1n.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gerem).....	750
Tabel 3.1.4.1o Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Pulomerak).....	755
Tabel 3.1.4.1o.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Lebak Gede)	759
Tabel 3.1.4.1o.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Taman Sari)	764
Tabel 3.1.4.1o.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Mekarsari).....	770
Tabel 3.1.4.1o.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Suralaya)	776
Tabel 3.1.4.1p Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Jombang)	780
Tabel 3.1.4.1p.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Jombang Wetan).....	783
Tabel 3.1.4.1p.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Masigit)	787
Tabel 3.1.4.1p.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Sukmajaya)	791

Tabel 3.1.4.1p.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Panggungrawi).....	795
Tabel 3.1.4.1p.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gedong Dalem).....	798
Tabel 3.1.4.1q Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Citangkil)	811
Tabel 3.1.4.1q.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Citangkil).....	817
Tabel 3.1.4.1q.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kebonsari).....	821
Tabel 3.1.4.1q.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Warnasari)	827
Tabel 3.1.4.1q.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Samangraya)	831
Tabel 3.1.4.1q.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Lebak Denok).....	836
Tabel 3.1.4.1q.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tamanbaru).....	840
Tabel 3.1.4.1q.7 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Dringo).....	845
Tabel 3.1.4.1r Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Purwakarta).....	850
Tabel 3.1.4.1r.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ramanuju).....	857
Tabel 3.1.4.1r.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kebondalem).....	861
Tabel 3.1.4.1r.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kotabumi).....	866
Tabel 3.1.4.1r.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Pabean).....	871
Tabel 3.1.4.1r.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tegal Bunder).....	876
Tabel 3.1.4.1r.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Purwakarta)	880
Tabel 3.1.4.1s Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Badan Kesbangpol).....	884
Tabel 3.1.4.1t Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (BPBD)	893
Tabel 3.1.4.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan	901
Tabel 3.1.4.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan	907
Tabel 3.1.4.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Keuangan.....	919
Tabel 3.1.4.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)	956
Tabel 3.1.4.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara; Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA))	957



Tabel 3.1.4.5c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Sekretariat KORPRI)	966
Tabel 3.1.4.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan	971
Tabel 3.1.4.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan	975



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Cilegon.....	5
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2020	6
Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019-2020.....	7
Gambar 1.4 Rata-rata pertambahan penduduk dan Jumlah Penduduk tahun 2017-2020	8
Gambar 1.5 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Cilegon berdasarkan Kecamatan tahun 2020	9
Gambar 1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2020	10
Gambar 1.7 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020.....	11
Gambar 1.8 Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020	11
Gambar 1.9 Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2020	13
Gambar 1.10 Infografis Perkembangan SPM Kota Cilegon Tahun 2016-2020	15
Gambar 1.11 Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2016-2020.....	16
Gambar 1.12 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Cilegon Tahun 2016-2020.....	17
Gambar 1.13 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020.	17
Gambar 1.14 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2020	18
Gambar 1.15 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020	18
Gambar 1.16 Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2020	19
Gambar 1.17 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020	19
Gambar 1.18 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Cilegon Tahun 2016-2020	20
Gambar 1.19 Capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020	20
Gambar 1.20 Grafik IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020	21
Gambar 1.21 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional	21
Gambar 1.22 Tingkat Kemiskinan (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020	22
Gambar 1.23. Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2020.....	22
Gambar 1.24 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Nasional, Banten dan Cilegon	23
Gambar 1.25 Piramida Penduduk Kota Cilegon	23
Gambar 1.26 Angka Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2015-2020	24
Gambar 1.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2020	24
Gambar 1.28 Rata-rata Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2016-2020	25
Gambar 1.29 PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2016-2020.....	26
Gambar 1.30 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2016-2020	26
Gambar 1.31 Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2020	27
Gambar 1.32 Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2020 di Kota Cilegon.....	27
Gambar 1.33 Grafik Dinamika Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2016 -2020	28
Gambar 1.34 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten	28
Gambar 1.35 Grafik Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2020	32
Gambar 1.36 Capaian PAD beserta Komponennya.....	33
Gambar 1.37 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	33
Gambar 1.38 Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah.....	35
Gambar 1.39 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah	35



Gambar 1.40 Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2020	38
Gambar 1.41 Capaian Komponen Retribusi Jasa Umum.....	38
Gambar 1.42 Capaian Komponen Retribusi Jasa Usaha	39
Gambar 1.43 Capaian Komponen Retribusi Perizinan Tertentu	39
Gambar 1.44 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40
Gambar 1.45 Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah	43
Gambar 1.46 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44
Gambar 1.47 Realisasi Total Pendapatan BLUD	44
Gambar 1.48 Capaian Komponen Dana Perimbangan	45
Gambar 1.49 Target & Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.....	47
Gambar 1.50 Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak.....	48
Gambar 1.51 Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	48
Gambar 1.52 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 2020	49
Gambar 1.53 Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	50
Gambar 1.54 Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten.....	51
Gambar 1.55 Diagram Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2020	57
Gambar 1.56 Diagram Persentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2020	58
Gambar 1.57 Diagram Rasio Realisasi Komponen Pendapatan Daerah.....	59
Gambar 1.58 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	79
Gambar 1.59 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	80
Gambar 1.60 Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	81
Gambar 1.61 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.....	82
Gambar 1.62 Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	83
Gambar 1.63 Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020	84

Bab 1: Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

1.1 Dasar Hukum

LKPJ Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 4).
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2020
19. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 88 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2020
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2021
21. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2021

1.2 Visi dan Misi Kota Cilegon

1.2.1 Visi Kota Cilegon

Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 merupakan perwujudan dari tahapan ke 3 RPJPD kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode ketiga (2016-2020), arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan pada

upaya penguatan kapasitas keunggulan daerah melalui optimalisasi fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, peningkatan kompetensi SDM, dan akselerasi potensi ekonomi daerah berbasis industri, perdagangan, dan jasa, disertai penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2016-2021 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”**.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: “CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA”, serta juga merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015).

Adapun indikasi wujud pencapaian **sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021** adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; Menurunnya kemiskinan; Menurunnya pengangguran; Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian; serta Meningkatnya pelayanan publik.

1.2.2 Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi : 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu (Kabupaten Serang)

Kota ini merupakan bandar dagang, pusat industri baja dan kimia di Pulau Jawa.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Cilegon memiliki luas wilayah ± 16.259 Ha terbagi atas 8 (delapan) Kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon; • Kecamatan Ciwandan; Kecamatan Pulomerak; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Grogol; Kecamatan Purwakarta; Kecamatan Citangkil; dan Kecamatan Jombang.

Tabel 1.1 Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Luas		Jumlah Kelurahan
			Ha	%	
1	Ciwandan	Tegal Ratu	3.335,90	20,52%	6
2	Citangkil	Kebonsari	2.589,81	15,93%	7
3	Pulomerak	Tamansari	2.569,67	15,81%	4
4	Purwakarta	Purwakarta	1.659,95	10,21%	6
5	Grogol	Grogol	2.371,45	14,59%	4
6	Cilegon	Ciwaduk	821,04	5,05%	5
7	Jombang	Jombang Wetan	1.031,19	6,34%	5
8	Cibeber	Kalitimbang	1.879,54	11,56%	6
Kota Cilegon			16.258,53	100,00	43

Sumber : RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara “lurus” adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km², atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan. **Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau**, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung. Pulau-pulau yang berada di perairan Kota Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadaannya secara ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang kehidupan lainnya.

Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan dan pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga

Gambar : Peta Kota Cilegon

Sumber : RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040

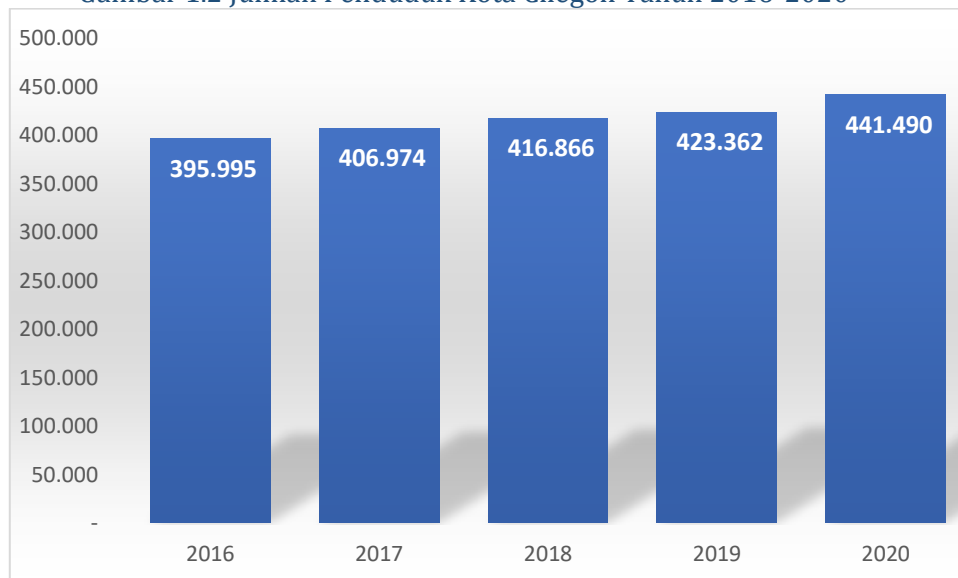
1.3.2 Data Kependudukan

A. Jumlah Penduduk & Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk dapat terjadi karena disebabkan oleh penambahan dan pengurangan jumlah penduduk akibat dari adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian adalah faktor pertumbuhan alami, sedangkan perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan yang non alami.

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Cilegon mengalami penambahan. Jumlah penduduk Kota Cilegon pada tahun 2020 berdasarkan basis data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 441.490 Jiwa dengan komposisi 223.875 Jiwa Penduduk Laki-laki dan 217.615 Jiwa Penduduk Perempuan, kondisi ini bertambah sebanyak 18.128 jiwa dari tahun 2019 (423.362) dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2020 sebesar 4,28%, cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2019-2020 boleh jadi merupakan dampak Pandemi COVID-19, yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat Kota Cilegon di kota-kota besar sehingga kembali bermigrasi ke kota Cilegon ataupun juga dampak kebijakan pembatasan sosial yang menyebabkan masyarakat lebih sering berada di rumah yang berpotensi berpengaruh terhadap faktor pertumbuhan alami penduduk.

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon (2020)

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019 dan 2020

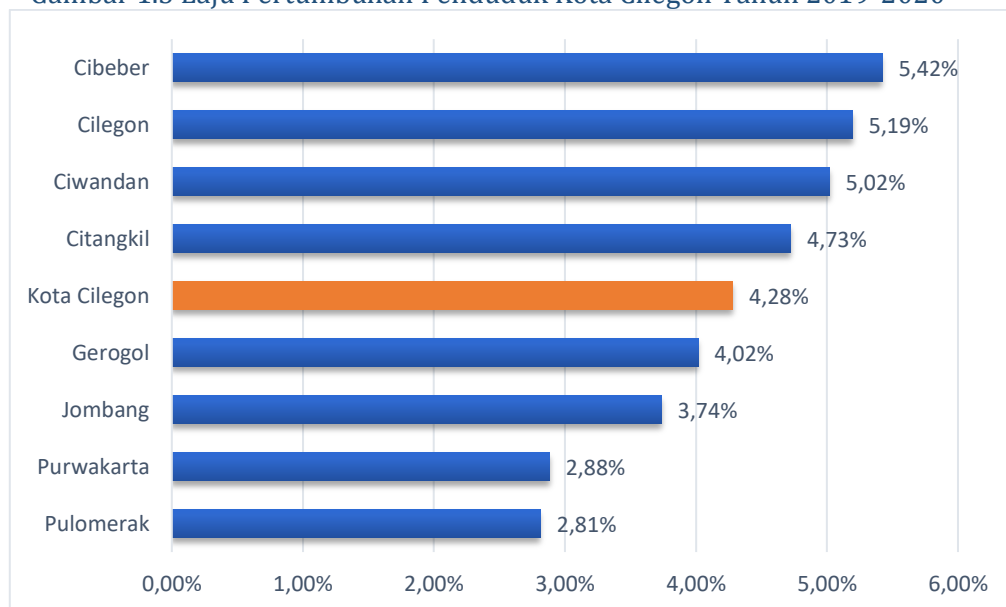
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (2019-2020) (%)
		2019	2020	
1	Cibeber	55.767	58.791	5,42%
2	Cilegon	45.780	48.158	5,19%

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (2019-2020) (%)
		2019	2020	
3	Pulomerak	47.517	48.854	2,81%
4	Ciwandan	48.418	50.848	5,02%
5	Jombang	65.808	68.267	3,74%
6	Gerogol	42.132	43.824	4,02%
7	Purwakarta	41.499	42.695	2,88%
8	Citangkil	76.441	80.053	4,73%
Kota Cilegon		423.362	441.490	4,28%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Pada tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk periode tahun 2019-2020 sangat bervariasi dimana empat kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi melebihi pertumbuhan Kota yaitu paling tinggi pada Kecamatan Cibeber (5,42%), Cilegon (5,19%), Ciwandan (5,02%), dan Citangkil (4,73%). Sedangkan empat kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya dibawah laju pertumbuhan Kota Cilegon adalah Kecamatan Gerogol (4,02%), Jombang (3,74%), Purwakarta (2,88%), dan Pulomerak (2,81%).

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2019-2020



Sumber : DKPS Kota Cilegon

Apabila dilihat dalam kurun waktu 2017-2020, terjadi pertambahan penduduk sebesar 34.516 jiwa dari tahun 2017, sehingga rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari 2017 ke 2020 per tahunnya adalah sebesar 2,83 persen. Pertumbuhan penduduk ini merupakan implikasi dari migrasi penduduk (pergi dan pindah datang) dan juga kematian serta kelahiran alamiah penduduk. Secara rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

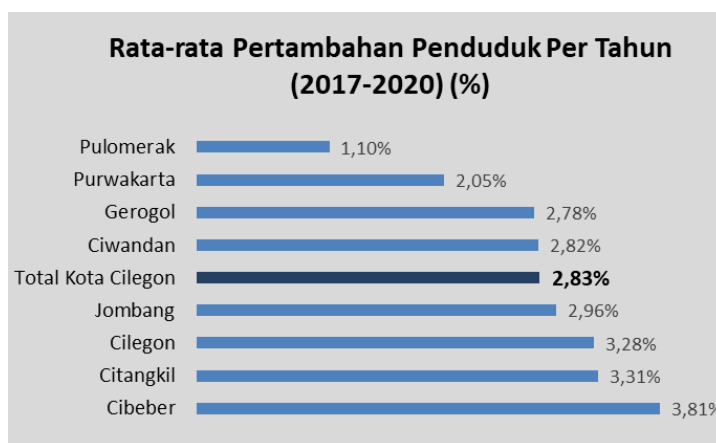
Tabel 1.3 Rata-rata Pertambahan Penduduk Kota Cilegon Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk per Tahun				Rata-rata Pertambahan Penduduk Per Tahun (2017-2020) (%)
		2017	2018	2019	2020	
1	Cibeber	52.754	54.378	55.767	58.791	3,81%
2	Cilegon	43.849	45.062	45.780	48.158	3,28%
3	Pulomerak	47.292	47.538	47.517	48.854	1,10%
4	Ciwandan	46.887	47.899	48.418	50.848	2,82%
5	Jombang	62.694	64.401	65.808	68.267	2,96%
6	Gerogol	40.447	41.863	42.132	43.824	2,78%
7	Purwakarta	40.226	41.262	41.499	42.695	2,05%
8	Citangkil	72.825	74.463	76.441	80.053	3,31%
	Total Kota Cilegon	406.974	416.866	423.362	441.490	2,83%

Sumber : DKPS Kota Cilegon, diolah

Berdasarkan kecamatan laju pertumbuhan penduduk Kota Cilegon dari Tahun 2017-2020, rata-rata pertumbuhan penambahan jumlah penduduk di Kecamatan Cibeber (3,81%), kecamatan Citangkil (3,31%), kecamatan Cilegon (3,28%), kecamatan Jombang (2,96%), kecamatan Ciwandan (2,82%), kecamatan Grogol (2,78%), kecamatan Purwakarta (2,05%), dan yang terkecil adalah kecamatan Pulomerak (1,10%). Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Cibeber.

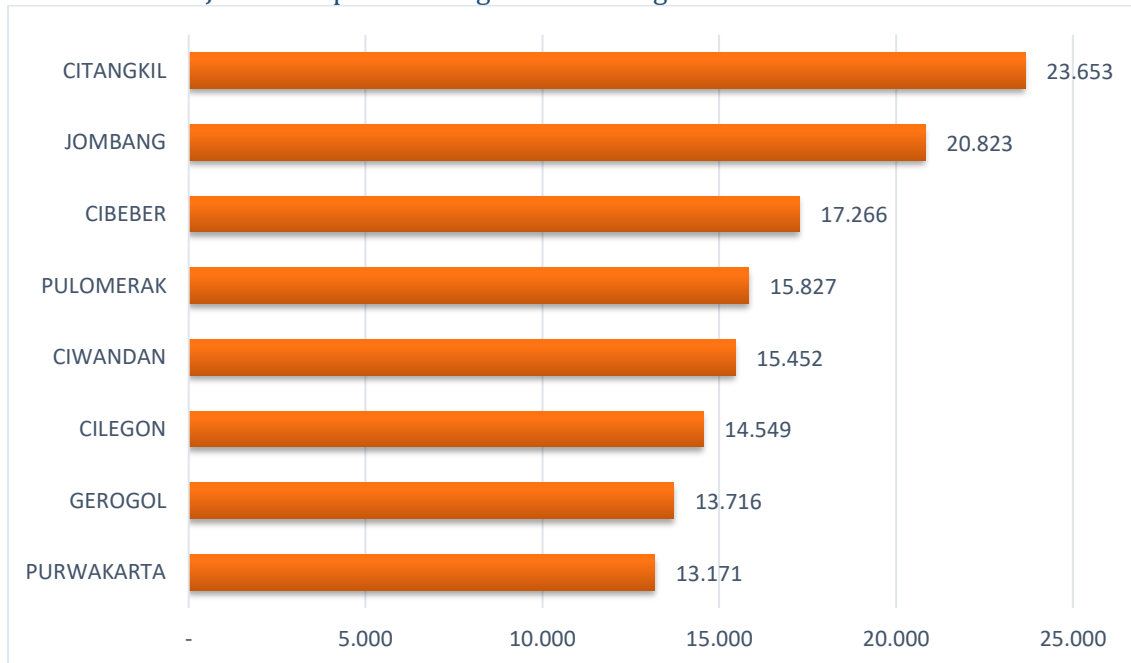
Gambar 1.4 Rata-rata pertambahan penduduk dan Jumlah Penduduk tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah

Apabila dilihat dari tabel dan grafik di atas, Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Citangkil dan paling sedikit di Kecamatan Purwakarta, hal tersebut juga dapat terlihat berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kota Cilegon, dimana Jumlah Kepala Keluarga terbanyak berada di Kecamatan Citangkil dan yang paling sedikit berada di Kecamatan Purwakarta, seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.5 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Cilegon berdasarkan Kecamatan tahun 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah

B. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kota Cilegon memiliki luas sebesar 162,58 Km² dengan jumlah kecamatan sebanyak 8 kecamatan serta 43 kelurahan. Sebesar 20,52 persen porsi luas Kota Cilegon berada di Kecamatan Ciwandan dengan luas sebesar 33,36 Km². Sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Cilegon yaitu 8,21 km² (5,05 %).

Hubungan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk dapat dilihat melalui kepadatan penduduk. Secara matematis kepadatan penduduk didapatkan melalui jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut. Kepadatan penduduk menggambarkan banyaknya penduduk (jiwa) yang berada pada suatu wilayah tiap satu km². Semakin tinggi kepadatan penduduk menunjukkan semakin padat/ banyak jiwa yang ada di wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah kepadatan penduduknya menunjukkan semakin jarang penduduknya.

Kepadatan penduduk di Kota Cilegon tahun 2020 mencapai 2.715 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan 6.620 jiwa/km².

Tabel 1.4 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Cilegon Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Cibeber	55.767	2.967	58.791	3.128
2	Cilegon	45.780	5.576	48.158	5.865
3	Pulomerak	47.517	1.849	48.854	1.901
4	Ciwandan	48.418	1.451	50.848	1.524
5	Jombang	65.808	6.382	68.267	6.620
6	Gerogol	42.132	1.777	43.824	1.848

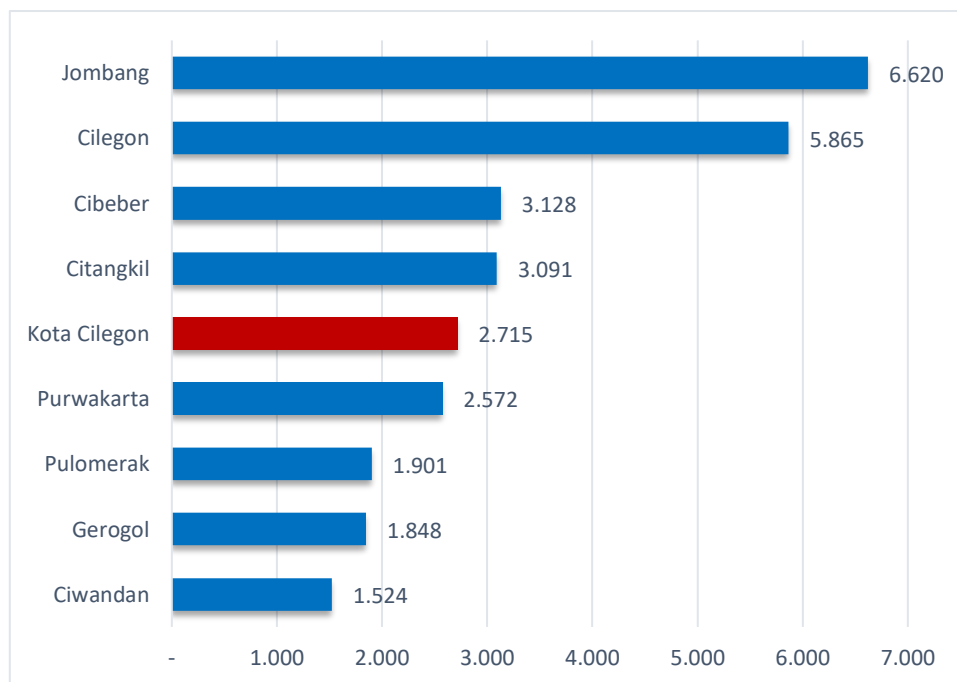
No	Kecamatan	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²)
7	Purwakarta	41.499	2.500	42.695	2.572
8	Citangkil	76.441	2.952	80.053	3.091
	Kota Cilegon	423.362	2.604	441.490	2.715

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah

Perkembangan nilai kepadatan penduduk di Kota Cilegon pada tahun 2019-2020 memiliki tren meningkat sebanyak 111 jiwa/km² dari 2.604 jiwa/km² pada tahun 2019 menjadi 2.715 jiwa/km² pada tahun 2020. Konsentrasi kepadatan penduduk pada tahun 2020 tertinggi terjadi di Kecamatan Jombang yang mencapai sebesar 6.620 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Ciwandan merupakan kecamatan yang terendah kepadatan penduduknya yakni mencapai sekitar 1.524 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Jombang dikarenakan kecamatan ini memiliki luas wilayah yang cukup kecil serta sesuai dengan karakteristik kawasannya sebagai kawasan pusat permukiman penduduk dan salah satu sentra perdagangan barang dan jasa di Kota Cilegon, sebaliknya Kecamatan Ciwandan yang kepadatannya rendah dikarenakan kecamatan ini wilayahnya paling luas serta didominasi oleh kawasan perindustrian yang minim permukiman

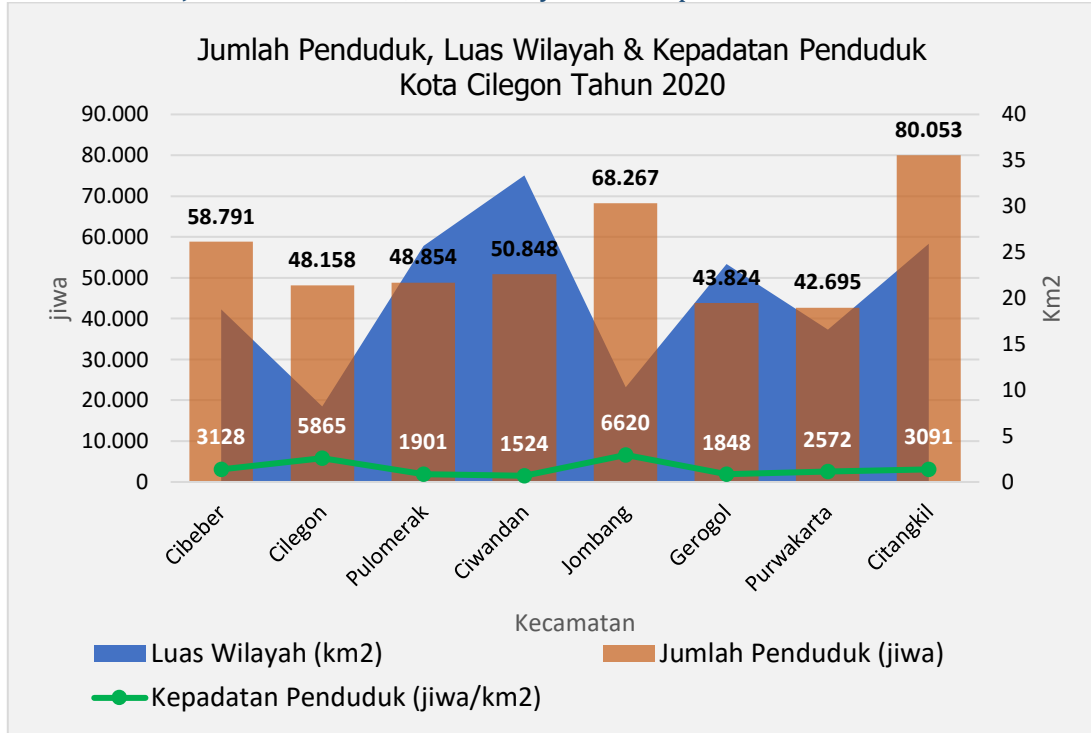
Secara peringkat, kepadatan penduduk dari kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi hingga ke rendah adalah sebagai berikut :

Gambar 1.6 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Cilegon Tahun 2020



Sedangkan Perbandingan antara Jumlah Penduduk, Luas Wilayah & Kepadatan Penduduk pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

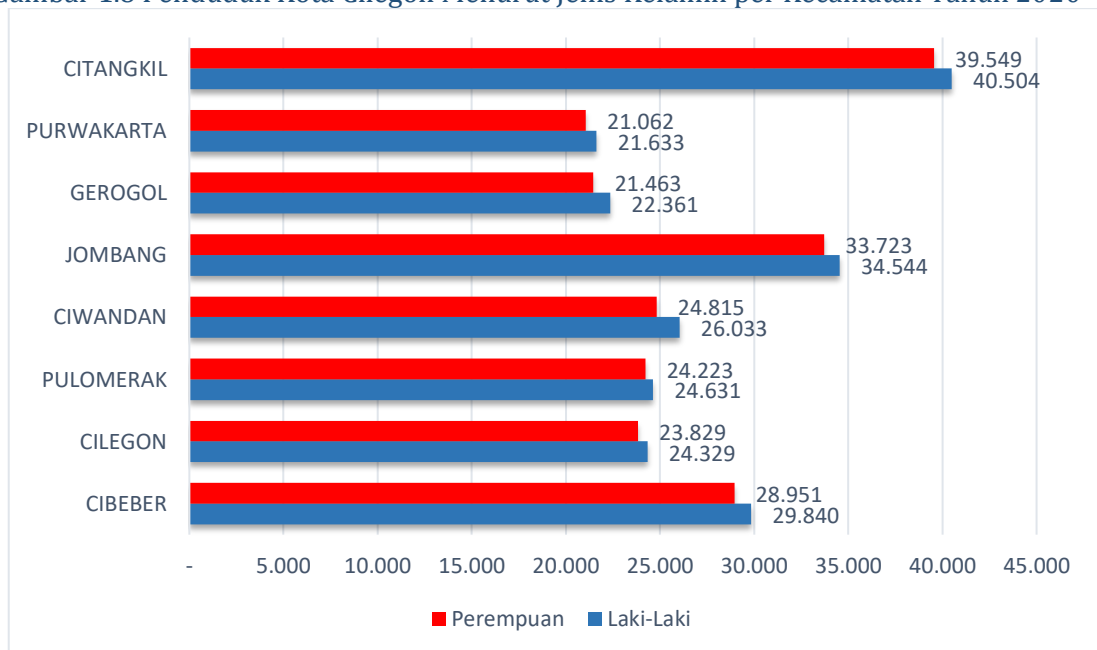
Gambar 1.7 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020



C. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2020 jumlah Penduduk di Kota Cilegon masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 223.875 jiwa dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 217.615 jiwa. Pola demikian juga terjadi di dalam setiap kecamatan di Kota Cilegon sebagaimana terdeskripsi dalam gambar berikut.

Gambar 1.8 Penduduk Kota Cilegon Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jika diperhatikan dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan (sex ratio) di Kota Cilegon, terlihat bahwa pada tahun 2020 sex rasionya sebesar 103, yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Ciwandan dan Gerogol yakni sebesar 105 dan 104, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Cilegon Tahun 2020

KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			SEX RATIO (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Cibeber	29.840	28.951	58.791	103
2	Cilegon	24.329	23.829	48.158	102
3	Pulomerak	24.631	24.223	48.854	102
4	Ciwandan	26.033	24.815	50.848	105
5	Jombang	34.544	33.723	68.267	102
6	Gerogol	22.361	21.463	43.824	104
7	Purwakarta	21.633	21.062	42.695	103
8	Citangkil	40.504	39.549	80.053	102
KOTA CILEGON		223.875	217.615	441.490	103

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS)

Secara sex ratio, laki-laki masih menjadi penduduk dominan di Kota Cilegon.

1.3.3 Data Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/ wilayah/Negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu. Kota Cilegon sebagai salah satu kota di Provinsi Banten, mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten/ kota lainnya. Unit pemerintahan di bawah kabupaten/ kota adalah kecamatan. Sedangkan kecamatan terbagi habis dalam beberapa kelurahan.

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1999. Sebagai kota yang secara geografis berada pada ujung barat Pulau Jawa, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kota Cilegon merupakan lokasi bagi kegiatan industri, baik industri berat maupun menengah.

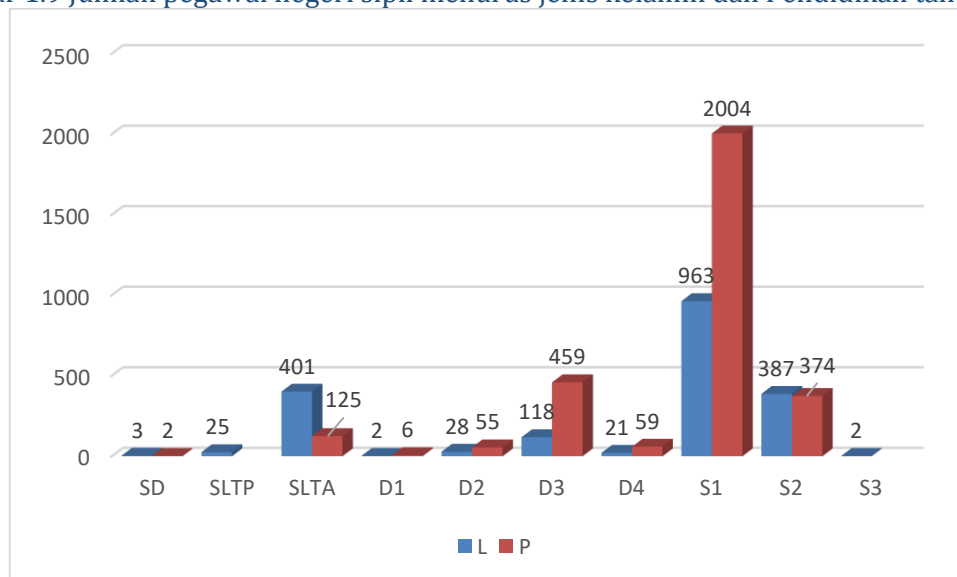
Kota Cilegon terbagi atas 8 (delapan) kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 15 Tahun 2002, tentang Pembentukan 4 (empat) Kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula terdiri dari 4 (empat) kecamatan berubah menjadi 8 (delapan) Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pemerintah Kota Cilegon adalah daerah otonomi berupa Kota Administratif yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai jabatan politis. Jabatan eksekutif tertinggi dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah (walikota). Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kota Cilegon akan berubah mengikuti ketentuan baru sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Cilegon No. 20 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 1.6 Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2020

Tingkat Pendidikan	L	P	Total
SD	3	2	5
SLTP	25		25
SLTA	401	125	526
D1	2	6	8
D2	28	55	83
D3	118	459	577
D4	21	59	80
S1	963	2.004	2.967
S2	387	374	761
S3	2		2
Jumlah	1.950	3.084	5.034

Gambar 1.9 Jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin dan Pendidikan tahun 2020



Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2020

Seperti dapat terlihat pada grafik, Kota Cilegon memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didominasi oleh Perempuan, dari total 5.034 orang ASN di Kota Cilegon sebanyak 3.084 orang (61,26%) ASN perempuan dan sisanya sebanyak 1.950 orang (38,73%) merupakan ASN laki-laki. Apabila dilihat berdasarkan Pendidikan tertinggi, mayoritas ASN di Kota Cilegon berpendidikan S1 sebanyak 2.967 (58,93%). Dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah pada Jenjang S3 yang hanya terdapat 2 orang ASN.

Tabel 1.7 Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, Tahun 2020

Jabatan	2020		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Fungsional Tertentu	581	2.207	2.788
Fungsional Umum	798	441	1.239
Struktural	521	303	824
Eselon II	23	7	30
Eselon III	102	35	137
Eselon IV	396	261	657

Jabatan	2020		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah	1.950	3.084	5.034

Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2020

Komposisi ASN Kota Cilegon apabila dilihat berdasarkan Jabatan, terbanyak pada Jenis Jabatan Fungsional Tertentu khususnya pada Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan, hal ini tentunya sangat wajar dikarenakan Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar minimal yang masuk ke dalam Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah. Berdasarkan tabel di atas, Jabatan Fungsional tertentu adalah sebanyak 2.788 orang (57,53%) dari total keseluruhan ASN Kota Cilegon.

Tabel 1.8 Jumlah PNS Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Cilegon, 2020

Pangkat/ Golongan Ruang	2020		Total
	Laki-laki	Perempuan	
I/a (Juru Muda)	0	0	0
I/b (Juru Muda Tk. I)	1	1	2
I/c (Juru)	2	0	2
I/d (Juru Tk. I)	17	0	17
Golongan I	20	1	21
II/a (Pengatur Muda)	13	0	13
II/b (Pengatur Muda Tk. I)	108	22	130
II/c (Pengatur)	147	113	260
II/d (Pengatur Tk. I)	140	81	221
Golongan II	408	216	624
III/a (Penata Muda)	141	282	423
III/b (Penata Muda Tk. I)	342	688	1030
III/c (Penata)	404	692	1096
III/d (Penata Tk. I)	302	461	763
Golongan III	1189	2123	3312
IV/a (Pembina)	189	357	546
IV/b (Pembina Tk. I)	122	373	495
IV/c (Pembina Utama Muda)	21	12	33
IV/d (Pembina Utama Madya)	0	0	0
IV/e (Pembina Utama)	1	2	3
Golongan IV	333	744	1077
Jumlah	1950	3084	5034

Sumber : BKPP Kota Cilegon, 2020

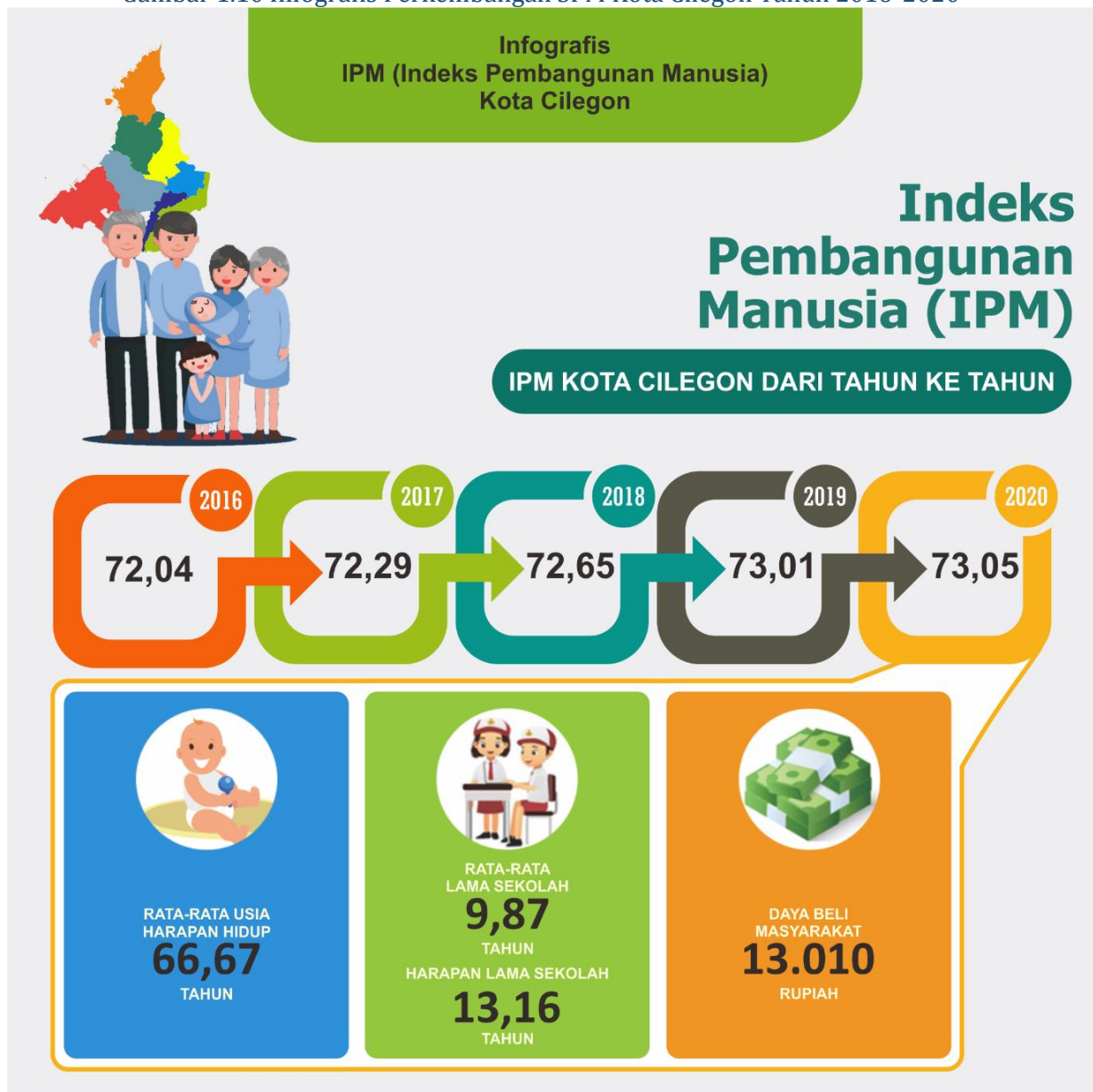
Apabila dilihat dari status kepangkatan dan golongan ruang, Jumlah ASN Kota Cilegon paling banyak memiliki golongan ruang, golongan III sejumlah 3.312 orang (65,79%) hal tersebut berkorelasi dengan tingkat pendidikan ASN Kota Cilegon yang mayoritas berpendidikan S1 yang notabene merupakan syarat minimal bagi seorang ASN untuk ditempatkan kedalam golongan ruang III/a, golongan terbanyak kedua yaitu pada golongan IV dikarenakan mayoritas jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan yang memiliki waktu pensiun lebih lama, serta memiliki masa kerja yang cukup untuk dapat mengumpulkan angka kredit semaksimal mungkin dalam proses kenaikan pangkatnya.

1.4 Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

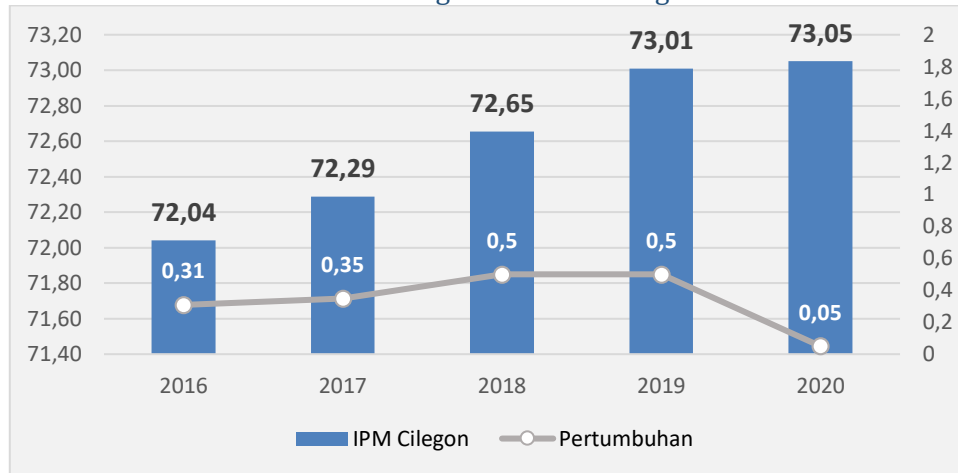
1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kota Cilegon secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020, IPM Kota Cilegon telah mencapai 73,05, atau meningkat 1,01 poin dibandingkan tahun 2016.

Gambar 1.10 Infografis Perkembangan SPM Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Gambar 1.11 Grafik Perkembangan IPM Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Secara umum pembangunan manusia Kota Cilegon selama lima tahun terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Kota Cilegon meningkat dari 72,04 pada tahun 2016 menjadi 73,05 pada tahun 2020. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.9 Perkembangan Komponen IPM Kota Cilegon Tahun 2016 – 2020

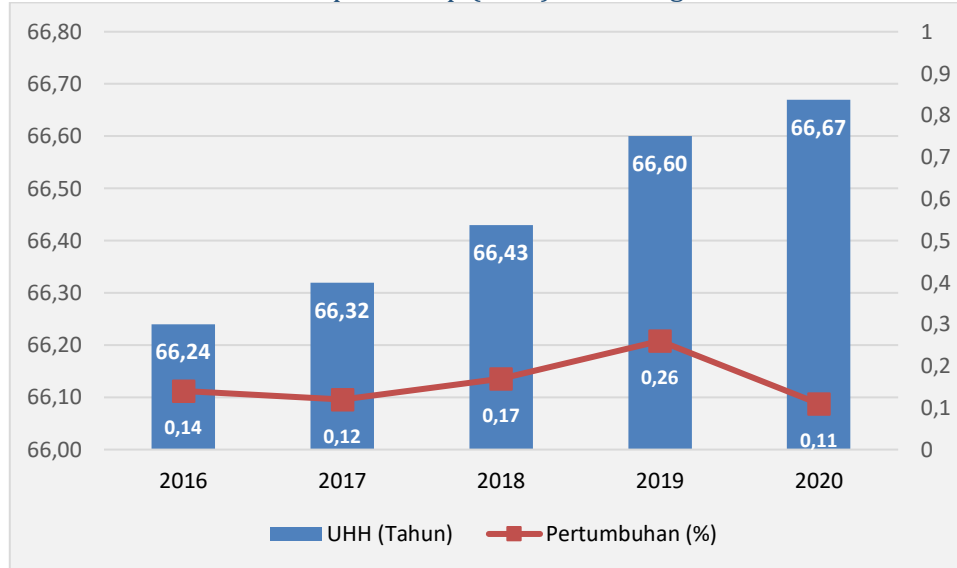
Indikator/ Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup Saat lahir (tahun)	66,24	66,32	66,43	66,60	66,67
Indeks angka harapan hidup (poin)	71,14	71,26	71,43	71,69	71,73
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,11	13,12	13,13	13,15	13,16
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,68	9,69	9,73	9,74	9,87
Indeks pendidikan (poin)	68,68	68,74	68,91	68,99	71,31
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	12.326	12.562	12.900	13.230	13.010
Indeks daya beli (poin)	76,53	77,11	77,92	78,69	78,18
IPM Cilegon	72,04	72,29	72,65	73,01	73,05

Sumber : BPS Kota Cilegon

Umur Harapan Hidup (UHH)

Dalam periode 2016 hingga 2020, Pemerintah Kota Cilegon telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,43 tahun. Sayangnya, pertumbuhan UHH nya dalam setahun terakhir ini mengalami penurunan yaitu dari 0,26 persen ditahun 2019 menjadi 0,11 persen di tahun 2020. Adapun Umur Harapan Hidup Kota Cilegon pada tahun 2020 ini, mencapai 66,67 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Cilegon yang lahir pada tahun 2020 dapat berharap untuk hidup sampai usia 66 tahun 8 bulan.

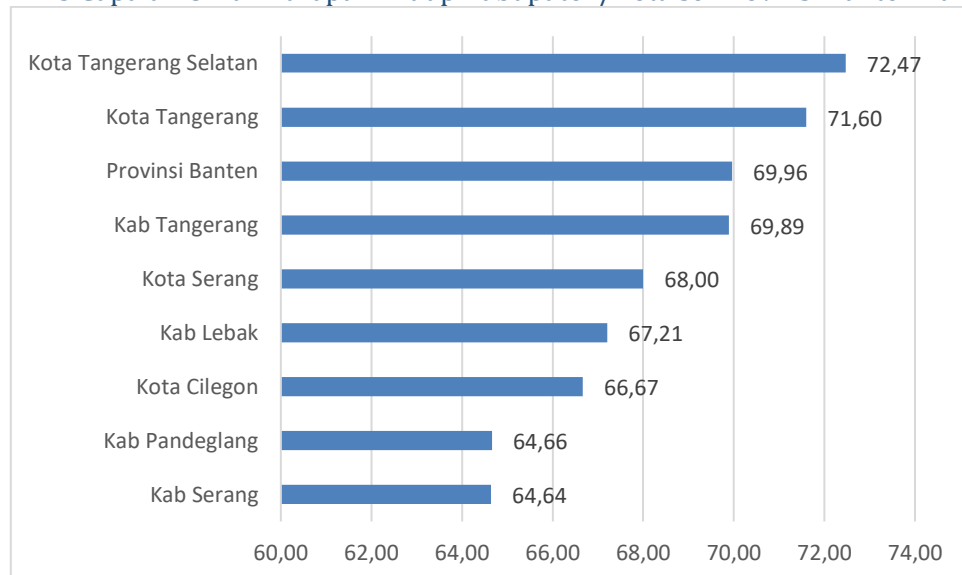
Gambar 1.12 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Cilegon

Kondisi Umur Harapan Hidup Kota Cilegon saat ini berada dibawah angka UHH Provinsi Banten (69,96 tahun), jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keenam

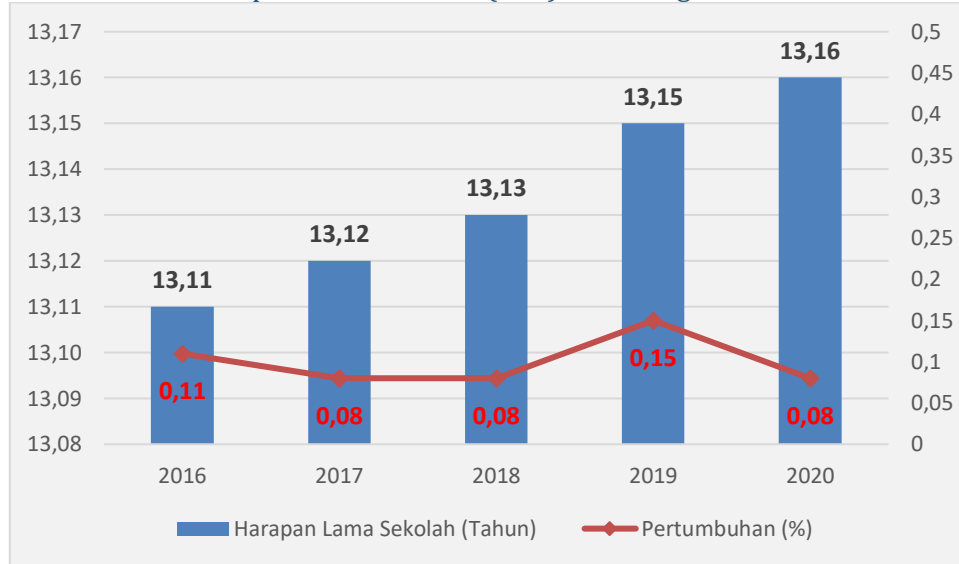
Gambar 1.13 Capaian Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020



Harapan Lama Sekolah

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah telah meningkat. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah ini menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Kota Cilegon. Kondisi yang demikian sekaligus juga menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah. Sayangnya, selama setahun terakhir ini peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah, relatif lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 13,16 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2018, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester III di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

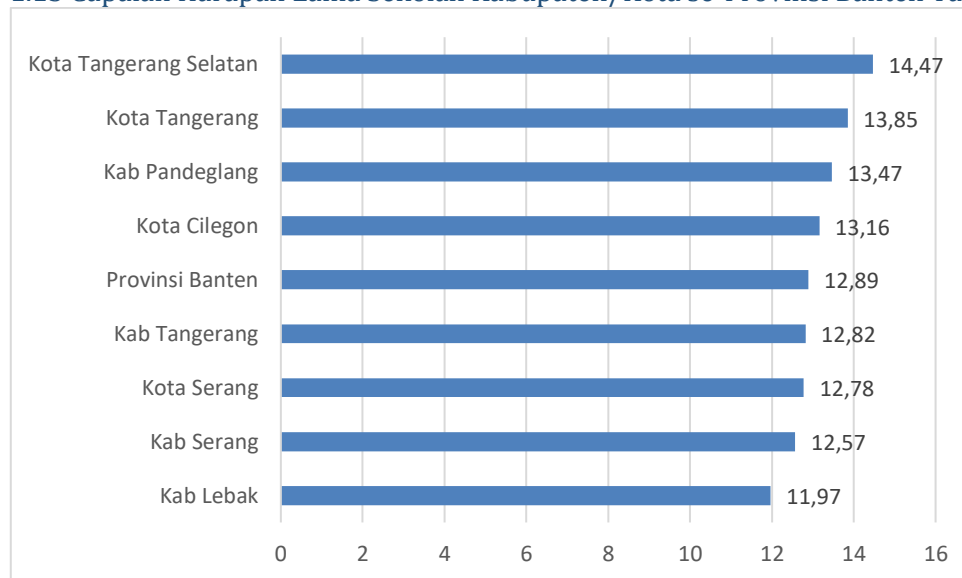
Gambar 1.14 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Cilegon

Kondisi Harapan Lama Sekolah saat ini sudah berada diatas angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Banten (12,89 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.

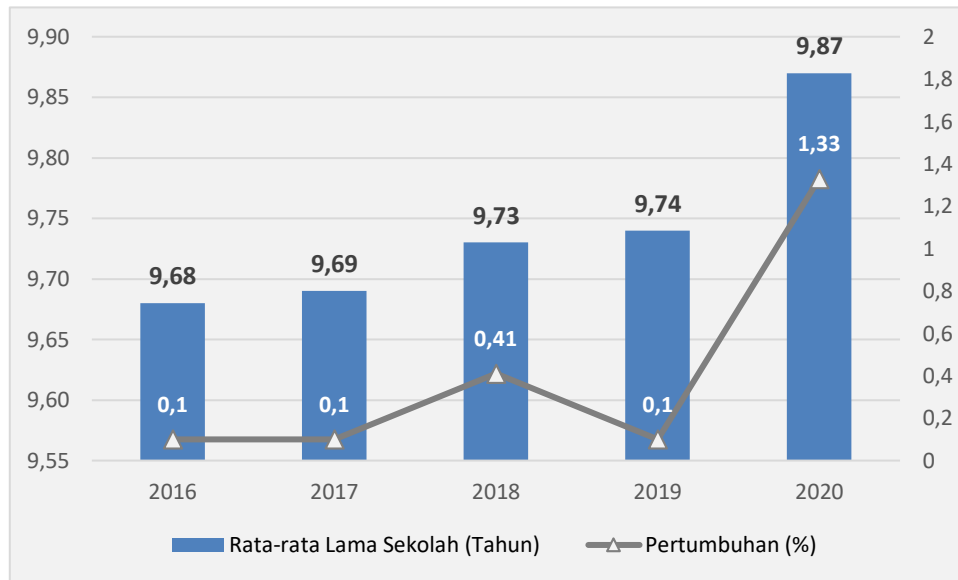
Gambar 1.15 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cilegon pada tahun 2020 telah mencapai 9,87 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2018 telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Cilegon terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

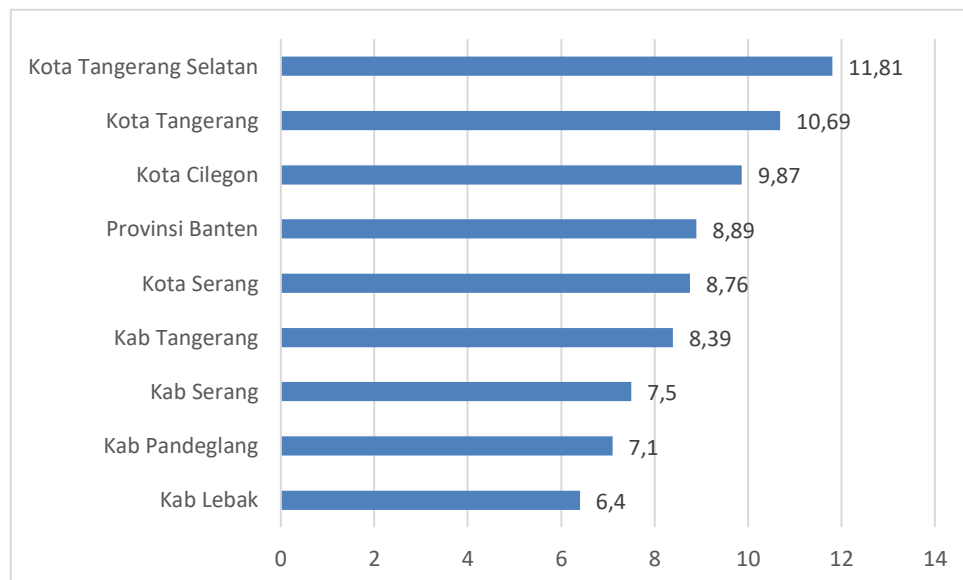
Gambar 1.16 Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Cilegon

Kondisi Rata-rata Lama Sekolah saat ini sudah berada diatas angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Banten (8,89 tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat ketiga.

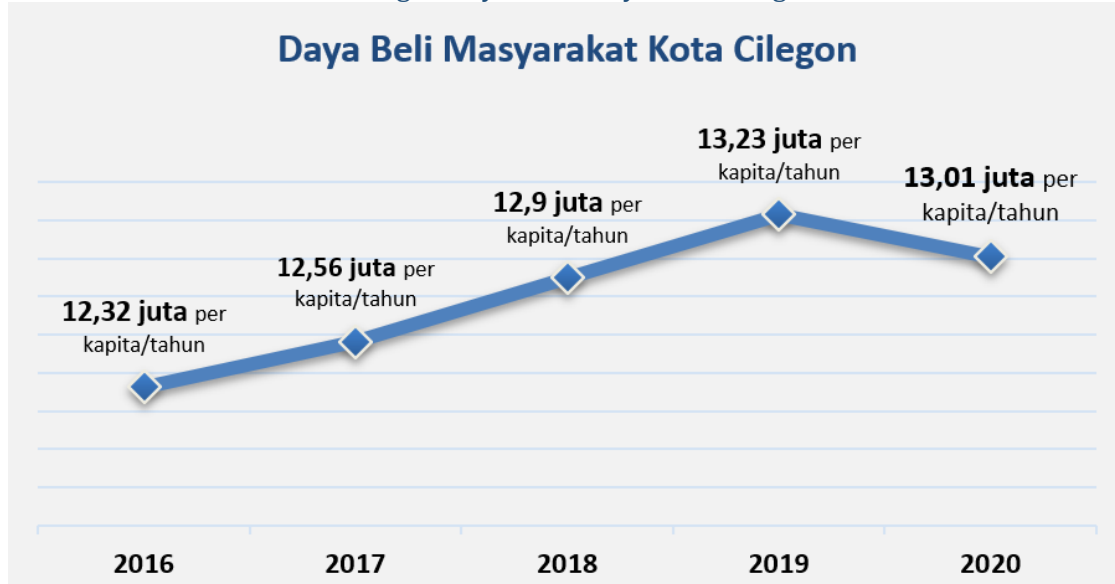
Gambar 1.17 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020



Daya Beli Masyarakat Kota Cilegon

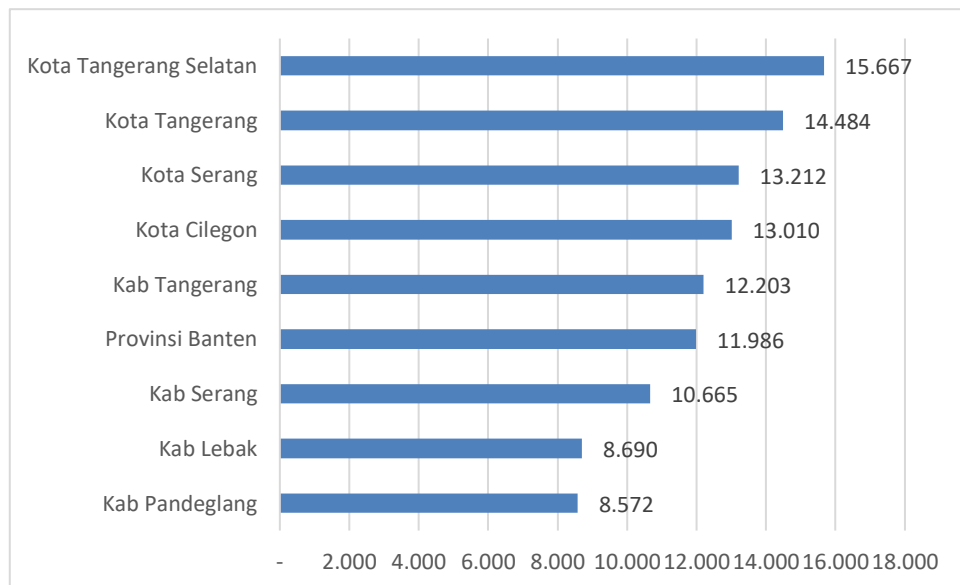
Daya beli yang dalam hal ini diukur dari pengeluaran perkapita 96 jenis komoditas, menunjukan peningkatan hingga tahun 2019, dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar Rp 102 ribu rupiah. Di tahun 2020, daya beli masyarakat menurun sebesar Rp 220 ribu di bandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai Rp. 13.01 juta/tahun/kapita. Dibandingkan dengan Provinsi Banten, daya beli Kota Cilegon berada di atas Provinsi Banten yang mencapai Rp 11,5 juta dan cukup jauh di atas rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia yang baru mencapai Rp 10,4 juta. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan ekonomi penduduk Cilegon lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional. Dari sisi ketimpangan ekonomi, indeks gini rasio Kota Cilegon di tahun 2018 mencapai 0,3508 yang menyatakan ketimpangan yang rendah.

Gambar 1.18 Perkembangan Daya Beli Masyarakat Cilegon Tahun 2016-2020



Kondisi pengeluaran per kapita saat ini sudah berada diatas angka pengeluaran per kapita Provinsi Banten (11.986 juta per tahun). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten, Kota Cilegon menduduki peringkat keempat.

Gambar 1.19 Capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2020



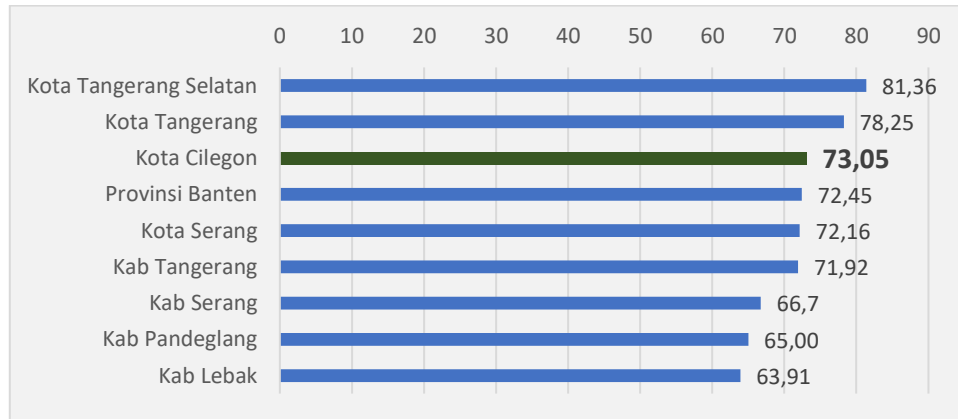
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, IPM Kota Cilegon menempati urutan ke-3 tertinggi di Provinsi Banten. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cilegon di antara 8 Kota di Provinsi Banten :

Tabel 1.10 Perkembangan IPM Kota Cilegon dan Banten Tahun 2016-2020

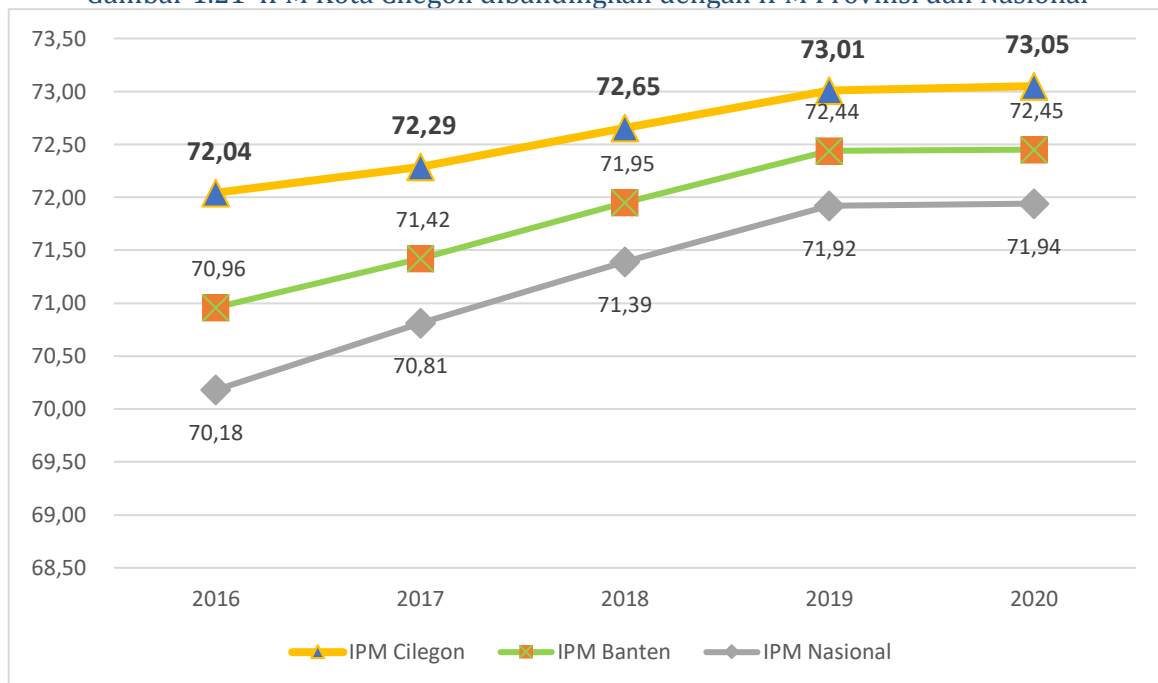
Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tangerang Selatan	80,11	80,84	81,17	81,48	81,36
Kota Tangerang	76,81	77,01	77,92	78,43	78,25
Kota Cilegon	72,04	72,29	72,65	73,01	73,05
Provinsi Banten	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45
Kota Serang	71,09	71,31	71,68	72,10	72,16

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Tangerang	70,44	70,97	71,59	71,93	71,92
Kab Serang	65,12	65,6	65,93	66,38	66,7
Kab Pandeglang	63,4	63,82	64,34	64,91	65,00
Kab Lebak	62,78	62,95	63,37	63,88	63,91

Gambar 1.20 Grafik IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020



Gambar 1.21 IPM Kota Cilegon dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional



Sumber : BPS Banten

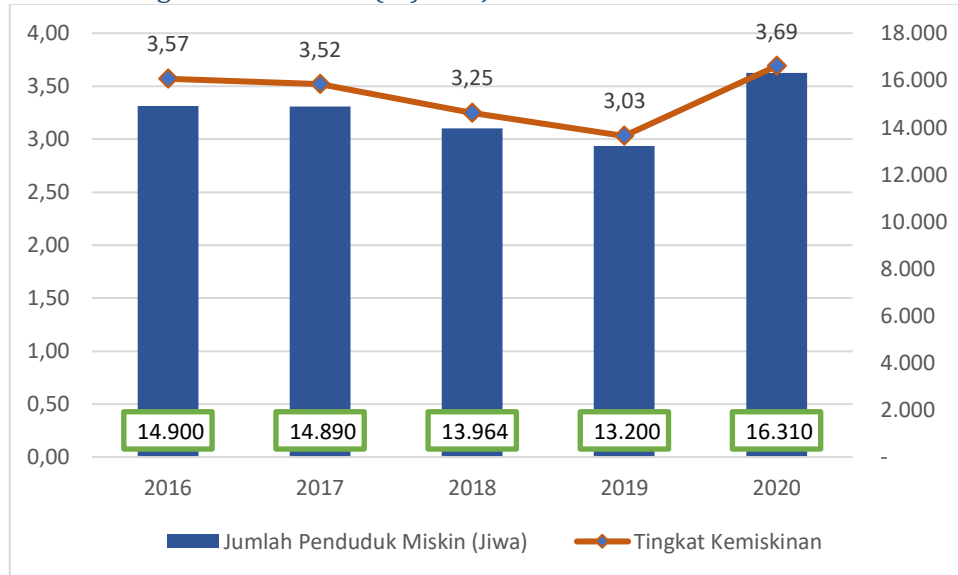
1.4.2 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode 2016–2019 tingkat kemiskinan di Kota Cilegon menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, Tahun 2016 tingkat kemiskinan pada angka 3,57% hingga tahun 2019 menurun menjadi 3,03%, Penurunan angka kemiskinan merupakan implikasi dari berbagai program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah kota Cilegon melalui intervensi di berbagai sektor (lintas OPD) diantaranya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), JSCM, Santunan Kematian, Beasiswa pendidikan untuk RTS, jaminan kesehatan untuk RTS, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kube, penumbuhan UMK dan lain sebagainya yang semuanya merupakan instrumen-instrumen untuk menjaga “daya

beli” masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, khususnya dalam pemenuhan kalori (kebutuhan pangan) berdasarkan garis kemiskinan nasional.

Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19, yang mana hal inipun terjadi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon pada tahun 2020 berada pada angka 3,69%, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 16.310 Jiwa.

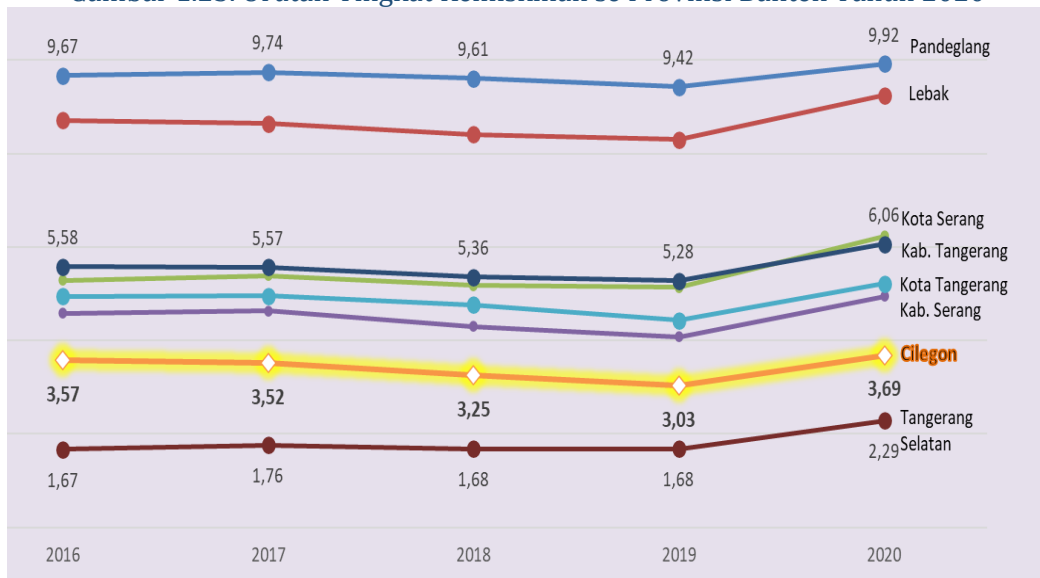
Gambar 1.22 Tingkat Kemiskinan (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

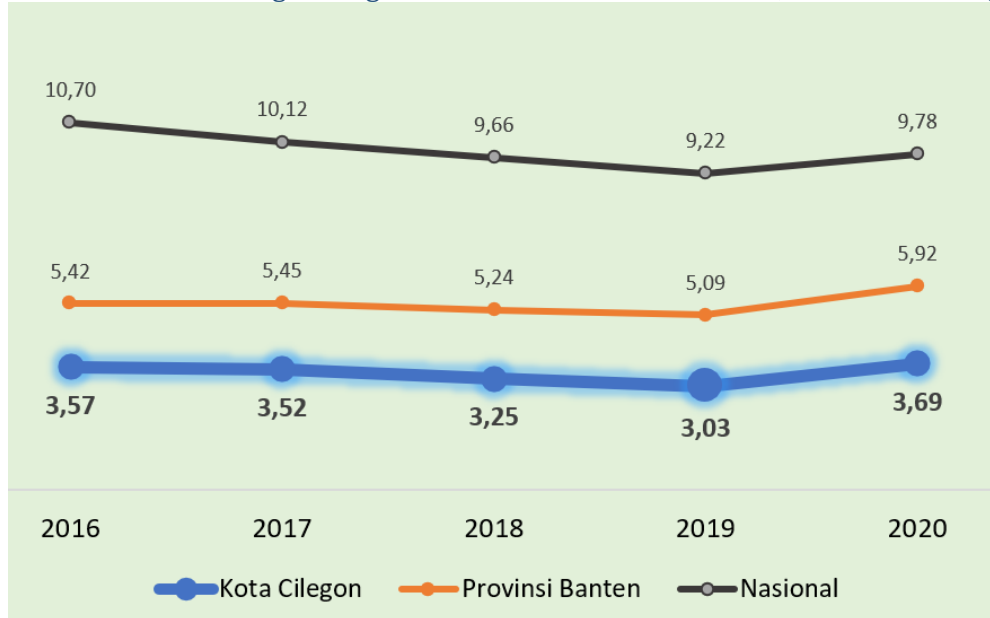
Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, tingkat kemiskinan Kota Cilegon menempati peringkat kedua terendah setelah Kota Tangerang selatan dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,29%.

Gambar 1.23. Urutan Tingkat Kemiskinan se Provinsi Banten Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.24 Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Nasional, Banten dan Cilegon

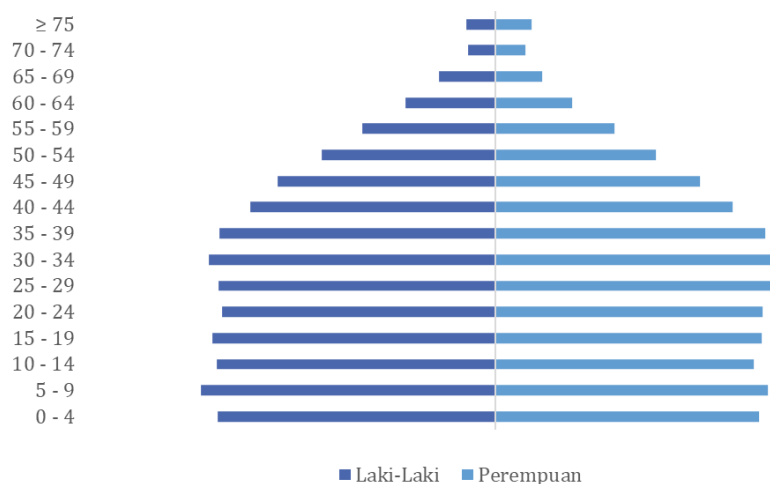


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

1.4.3 Ketenagakerjaan

Dari aspek demografi, Komposisi piramida penduduk Kota Cilegon (penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur) menunjukkan bahwa Kota Cilegon merupakan wilayah dengan penduduk ekspansif (penduduk muda). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya banyak terjadi “transisi” dari penduduk bukan usia kerja ke penduduk usia kerja. Sehingga potensi terjadi penambahan angkatan kerja per tahun sangat besar. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Cilegon, bagaimana menjadikan masyarakat usia kerja yang produktif di dalam pembangunan, serta menciptakan generasi muda produktif yang berkualitas dalam menghadapi perekonomian global.

Gambar 1.25 Piramida Penduduk Kota Cilegon

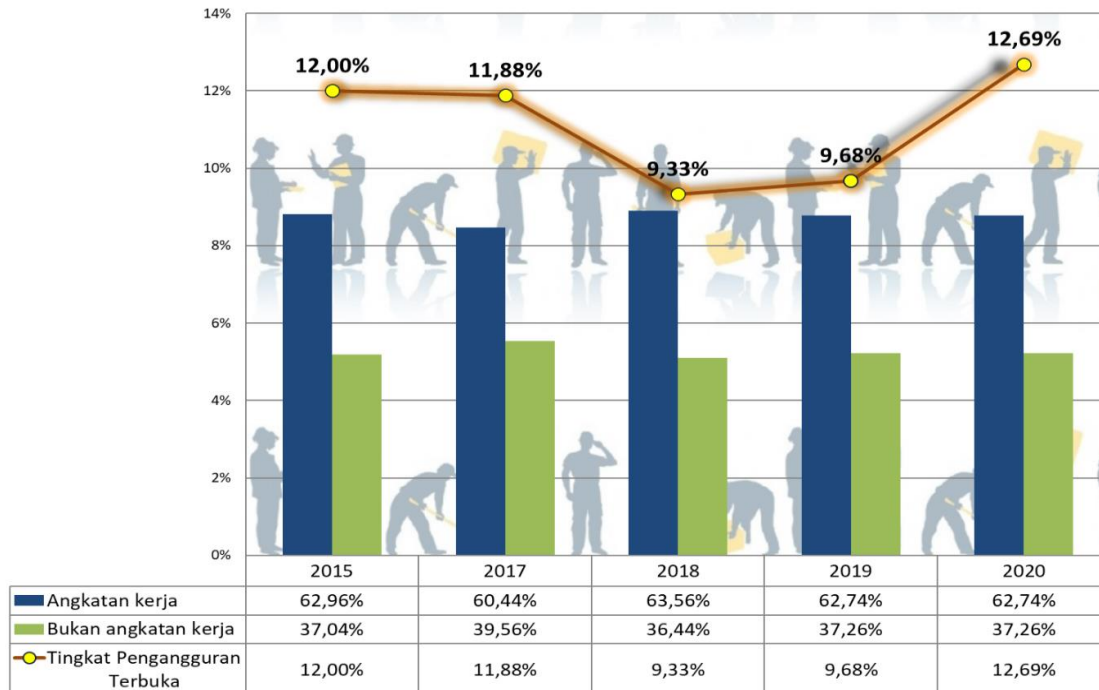


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari aspek tingkat pengangguran terbuka (TPT), Kota Cilegon sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018, namun kembali mengalami fluktuasi/kenaikan dikarenakan

berbagai dinamika di beberapa sektor perekonomian strategis. Di sisi lain, upah minimum kota (UMK) Kota Cilegon yang tinggi menjadi magnet bagi para pencari kerja dari luar daerah untuk migrasi ke Kota Cilegon sehingga pasar kebutuhan tenaga kerja di Kota Cilegon menjadi cukup “sesak”.

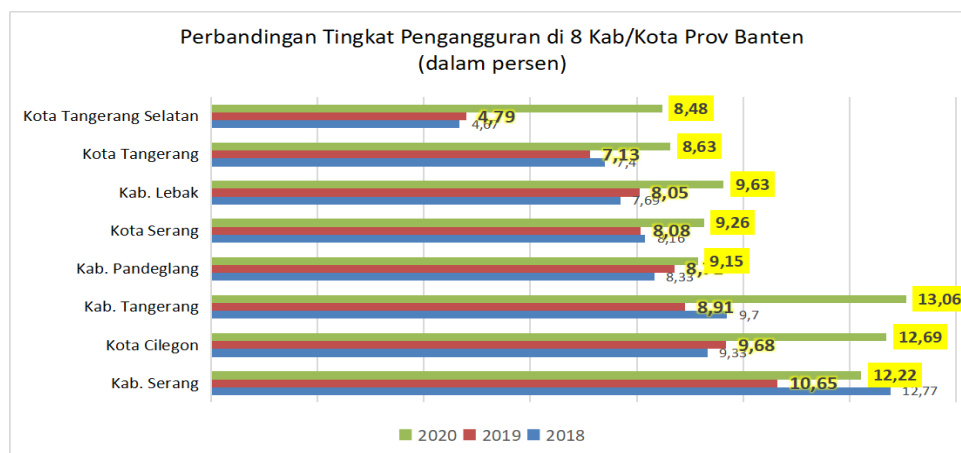
Gambar 1.26 Angka Pengangguran Terbuka di Kota Cilegon Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020, merupakan fenomena yang terjadi di hampir di seluruh Indonesia, bahkan dunia dimana baik secara langsung maupun atau tidak langsung disebabkan oleh terjadinya pandemi covid-19. Karena dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun di tahun 2020 yang juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Di lingkup provinsi Banten, seluruh Kabupaten/kota mengalami peningkatan TPT yang cukup signifikan di tahun 2020, yang mana TPT Kota Cilegon menempati urutan kedua terbesar di Provinsi Banten.

Gambar 1.27 Perbandingan Tingkat Pengangguran di 8 Kab/Kota Prov Banten Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

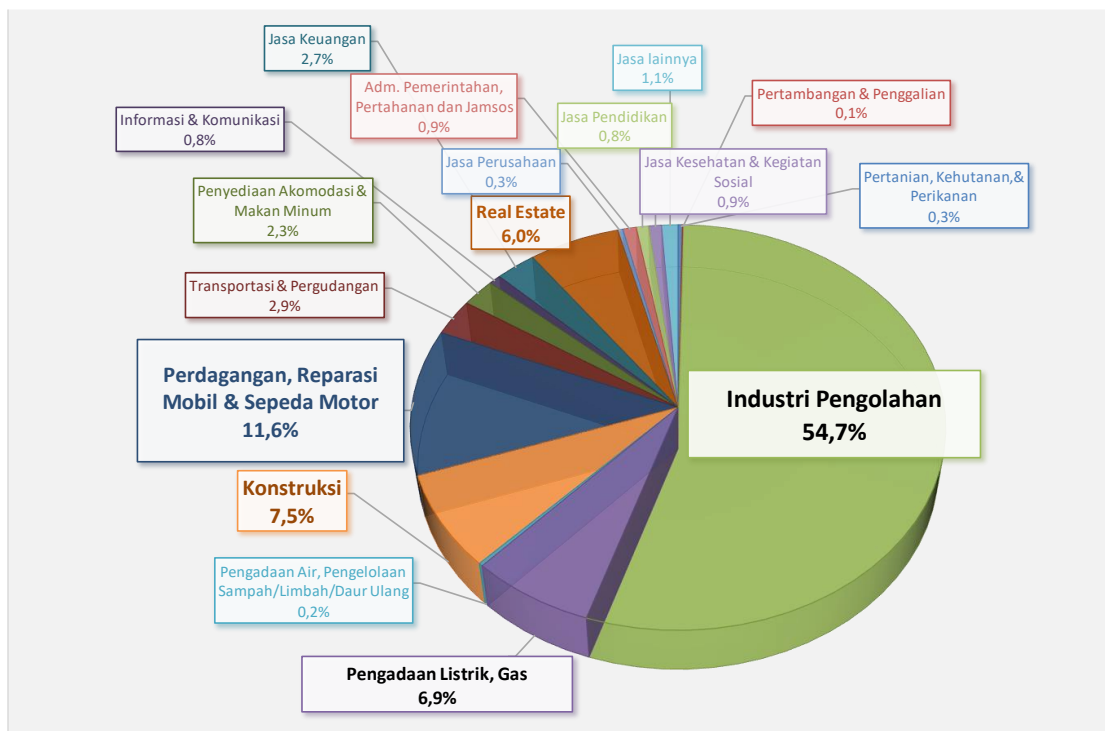
Publikasi ketenagakerjaan BPS menyatakan bahwa dari sisi tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kota Cilegon didominasi oleh lulusan pendidikan sekolah menengah (47%) dan hanya sekitar 15% yang berpendidikan diploma dan universitas. Sedangkan dari sisi komposisi penduduk yang tidak bekerja, sekitar 43% adalah lulusan sekolah menengah (umum dan kejuruan). Hal ini menunjukkan bahwa ke depan diperlukan dukungan yang lebih besar bagi lulusan-lulusan sekolah menengah untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta memfasilitasi kewirausahaan bagi anak-anak sekolah kejuruan. Rilis BPS di bulan agustus tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Cilegon sebanyak 204.697 orang atau sekitar 62,74% dari jumlah penduduk. Sekitar 25.976 orang diantaranya belum memiliki pekerjaan, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode ini mencapai 12,69%. TPT yang telah menurun cukup signifikan di tahun 2015, kembali meningkat sangat tajam dengan capaian bahkan lebih besar dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 12%. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya pandemi covid-19 yang memberikan pukulan baik pada aspek sosial maupun ekonomi di seluruh wilayah, baik nasional maupun internasional.

1.4.4 Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

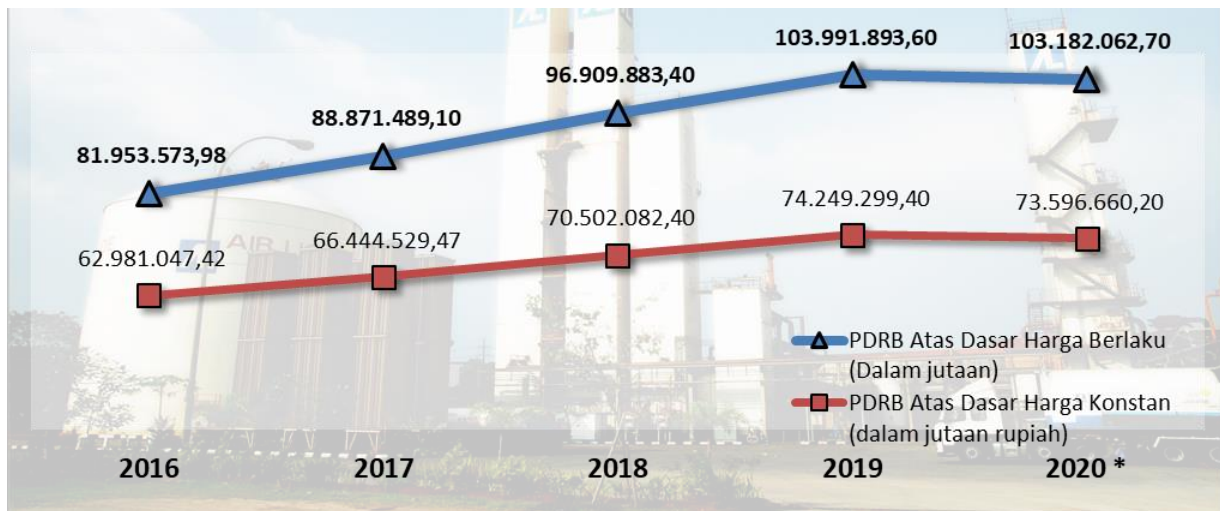
Pada pendekatan produksi, Cilegon sebagai kota industri tercermin dari dominasi industri pengolahan pada struktur PDRB Kota Cilegon. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 50 persen. Patut diketahui bahwa status Kota Cilegon sebagai daerah Industri yang relatif besar khususnya bagi petrokimia dan logam, perekonomiannya cukup dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian nasional maupun global.

Gambar 1.28 Rata-rata Kontribusi Sektor PDRB ADHB Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

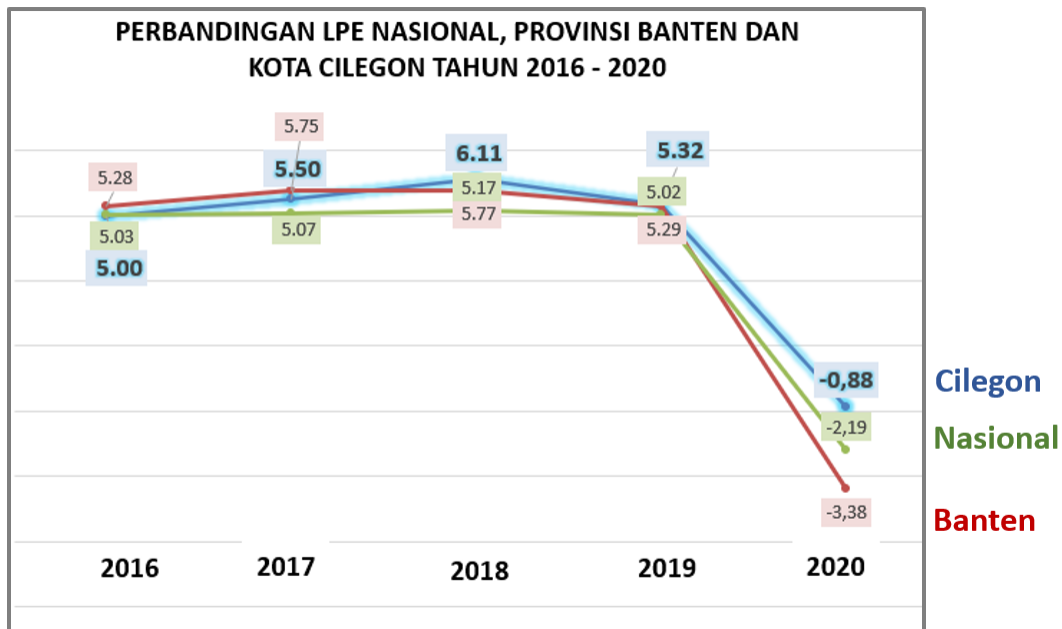
Gambar 1.29 PDRB ADHB & ADHK Kota Cilegon Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara umum, ekonomi Kota Cilegon tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,88 persen dibanding tahun 2019 sebesar 5,32 persen. Hal ini akibat adanya pandemi *covid-19*, ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung sepanjang tahun 2020, membuat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagian besar wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Cilegon turut melambat.

Gambar 1.30 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Banten dan Kota Cilegon Tahun 2016-2020

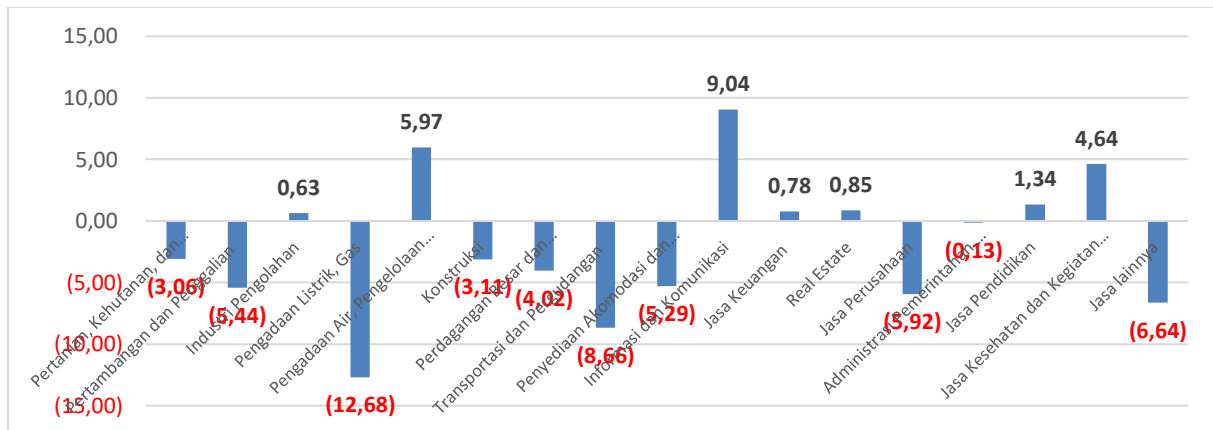


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Namun beberapa lapangan usaha lainnya mampu tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan komunikasi sebesar 9,04 persen, diikuti Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,97 persen, dan Jasa Kesehatan dan kegiatan social sebesar 4,64 persen. Sedangkan pertumbuhan negative terdalam berasal dari Pengadaan listrik, gas sebesar negative 12,68 persen, diikuti transportasi dan pergudangan

sebesar negatif 8,66 persen, Jasa perusahaan sebesar negatif 5,92 persen, pertambangan dan penggalan sebesar negatif 5,44 persen. Adapun grafiknya sebagai berikut :

Gambar 1.31 Laju sektoral PDRB ADHK Tahun 2020

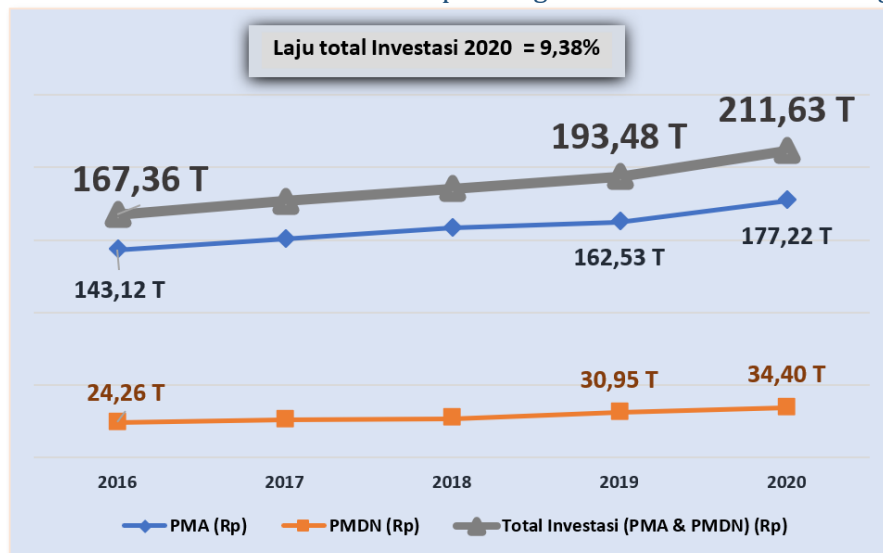


1.4.5 Perkembangan Investasi

Realisasi investasi merupakan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN yang didahului oleh izin prinsip, yang saat ini diubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan maupun yang sudah komersil. Dari data tersebut dapat diketahui nilai realisasi investasi PMA dan PMDN baik investasi baru maupun perluasan.

Total Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Cilegon hingga tahun 2020 (secara akumulasi) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi investasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,38% atau sebesar Rp. 18.143.836.300.000,- meliputi realisasi Penanaman Modal Asing sebesar 14.685.571.800.000,- dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 3.458.264.500.000,-. Sehingga total realisasi investasi (akumulasi) hingga tahun 2020 sebesar 211.632.971.829.500,- meliputi total realisasi investasi PMA sebanyak Rp. 177.224.265.429.500,- dan PMDN sebesar Rp. 34.408.706.400.000,-.

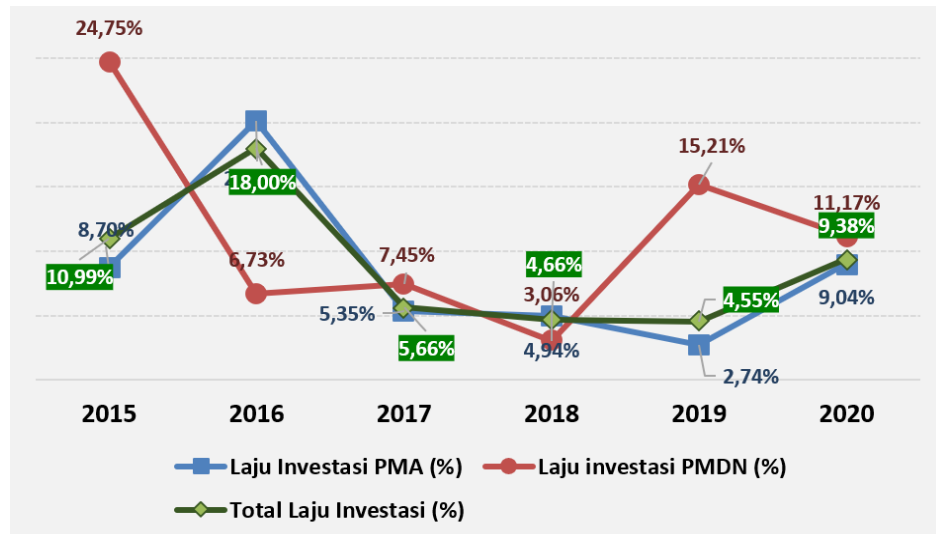
Gambar 1.32 Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2020 di Kota Cilegon



Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon

Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi di Kota Cilegon sangatlah baik sebesar 18,14 Trilyun yang meliputi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp. 14,68 Trilyun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 3,46 Trilyun. Pencapaian total realisasi tahun 2020 sebesar 9,38%. Nilai investasi Kota Cilegon di 2020 merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu peringkat ke-2 setelah Kabupaten Tangerang.

Gambar 1.33 Grafik Dinamika Laju Peningkatan Investasi Kota Cilegon 2016 -2020

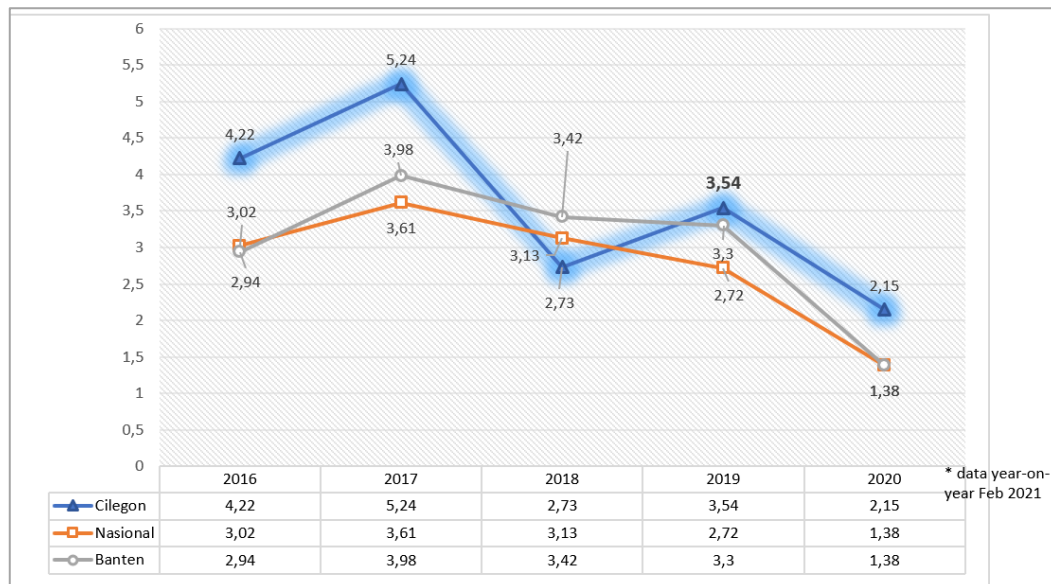


Sumber : DPMPTSP Kota Cilegon, hasil olah Bappeda Kota Cilegon

1.4.6 Tingkat Inflasi

Sebagai kota basis industri dengan indeks daya beli masyarakat yang tinggi, Kota Cilegon cenderung mengalami inflasi yang di atas rata-rata nasional dan provinsi dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, Inflasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan implikasi dari kondisi daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang 2020, sehingga indeks harga di beberapa barang konsumsi cenderung tidak mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2020.

Gambar 1.34 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

1.5 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah urusan pemerintahan konkuren. Pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggungjawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Pendapatan Daerah sebagai bagian dari keuangan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan optimalisasi pendapatan antara lain dengan cara perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif dengan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan potensi daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah tercermin pada APBD setiap tahun yang secara rinci akan dijelaskan dalam bentuk rekapitulasi APBD Tahun 2020 yang memuat pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan.

APBD Tahun 2020 ini dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD sehingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Peraturan daerah ini selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Walikota Cilegon No. 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Cilegon No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Hal yang mendasari Perubahan APBD Kota Cilegon Tahun 2020 adalah hasil evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD sampai Triwulan 2. Substansi Perubahan APBD Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah
- b. Perubahan kebijakan pusat
- c. Penyesuaian sasaran dan hasil yang akan dicapai
- d. Penyesuaian standar satuan harga
- e. Penjadwalan ulang beberapa kegiatan; dan
- f. Permasalahan aktual yang berkembang

1.5.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagai tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk kelompok *Pendapatan Asli Daerah* dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kelompok pendapatan *Dana Perimbangan* dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun kelompok pendapatan *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah* dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari:

- a. Dana Hibah (BOS SD dan SMP)
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur serta perbaikan administrasi;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai.

1.5.1.1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Capaian penerimaan realisasi Pendapatan Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2016 – 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun lebih dari 6%.

Terhitung sejak tahun 2016 realisasi Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 1,6 triliun**, terjadi peningkatan di tahun 2017 sebesar **Rp. 90,26 miliar** sehingga realisasi menjadi **Rp. 1,71 triliun,-**, terjadi peningkatan di tahun 2018 sebesar **Rp. 11,45 miliar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,63 triliun,-** di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 148,41 miliar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,77 triliun,-** dan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar **Rp. 142,6 miliar** sehingga total penerimaan menjadi **Rp. 1,76 triliun** Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.11 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Keterangan
2016	1.618.573.368.773	0	0	
2017	1.708.838.034.694	90.264.665.921	5,58%	2017 - 2016
2018	1.630.020.024.950	11.446.656.177	0,71%	2018 - 2016
2019	1.766.980.559.475	148.407.190.702	9,17%	2019 - 2016
2020*	1.761.192.008.114	142.618.639.341	8,81%	2020 - 2016
		- 5.788.551.361	-0,33%	2020 - 2019

* Data LRA 2020 Unaudited

Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Perbandingan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2020 terhadap tahun 2015 mencapai **8,81%** atau terdapat peningkatan sebesar **Rp. 142,6 miliar**. Sedangkan laju pertumbuhan penerimaan Pendapatan Daerah dari tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami penurunan sebesar **-0,33%** atau sebesar **(Rp. 5,8 miliar)**.

1.5.1.2 Deskripsi Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 1.644.437.995.416,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 1.761.192.008.114,-** atau mencapai **107,1%**, dengan sisa anggaran pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 116.754.012.698,-**.

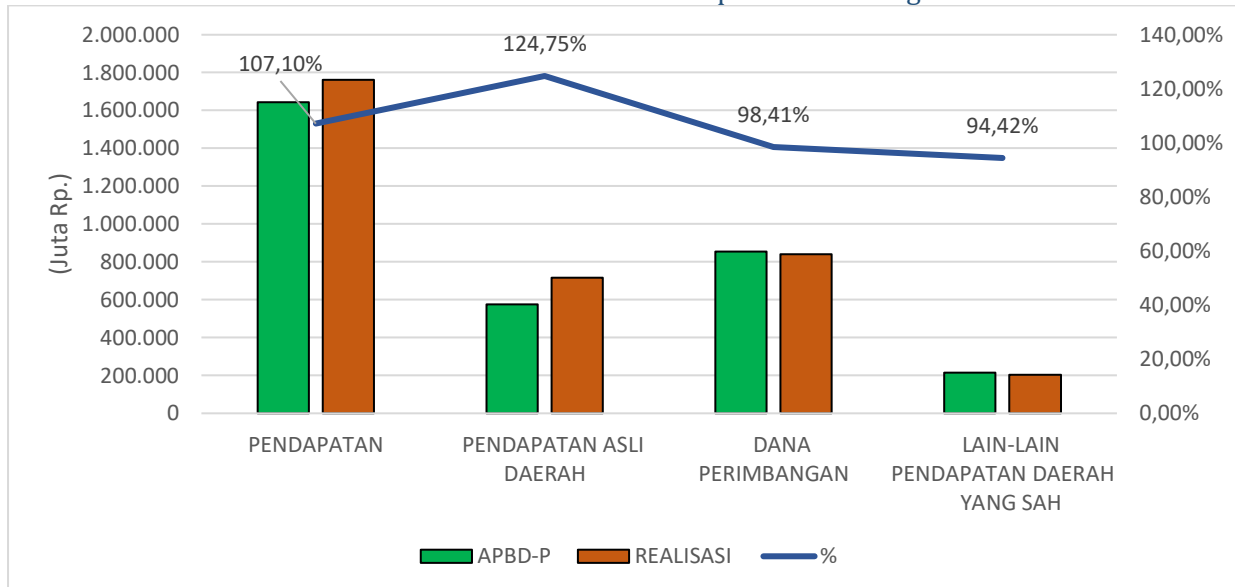
Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar **124,75%** atau melampaui target sebesar **Rp. 142.323.129.929,-**, sektor Dana Perimbangan dengan capaian sebesar **98,41%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 13.584.500.423,-)**, dan Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian sebesar **94,42%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 11.984.616.808,-)**. Adapun rincian rencana dan realisasi Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.12 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

URAIAN	2020 (Unaudited)		
	APBD-P	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
PENDAPATAN	1.644.437.995.416	1.761.192.008.114	107,10%
Pendapatan Asli Daerah	575.077.485.635	717.400.615.564	124,75%
Dana Perimbangan	854.469.618.820	840.885.118.397	98,41%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	214.890.890.961	202.906.274.153	94,42%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.35 Grafik Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 575.077.485.635,-** adapun realisasi sebesar **Rp. 717.400.615.564,-** atau mencapai **124,75%**, sehingga melampaui target sebesar **Rp. 142.323.129.929,-** hal tersebut disebabkan :

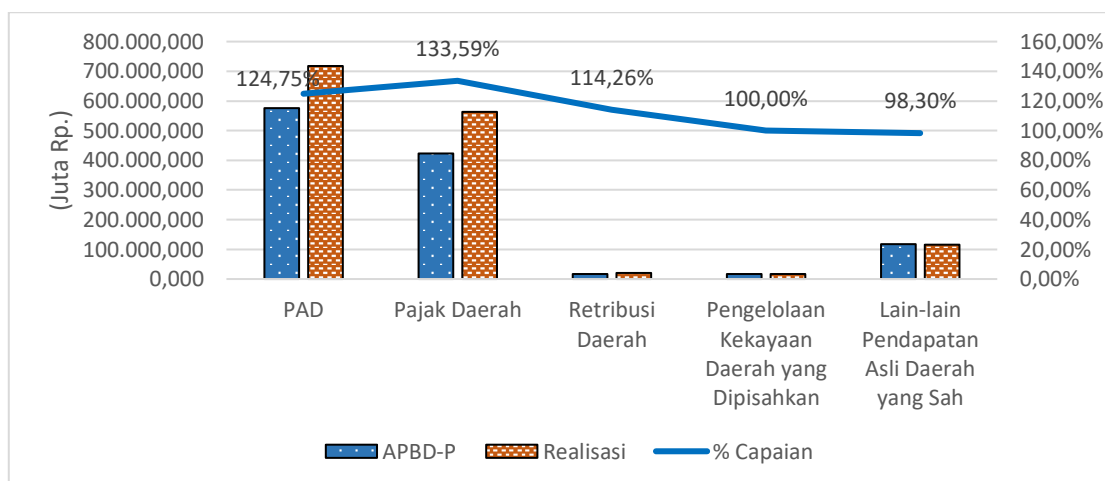
1. Capaian Pajak Daerah sebesar **133,59%** atau melampaui sebesar **Rp. 141.847.860.751**. Hal ini merupakan hasil intensifikasi dan ekstensifikasi dalam meningkatkan pajak daerah, antara lain pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengendalian terhadap wajib pajak, penagihan langsung kepada wajib pajak serta memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang patuh dalam melakukan pembayaran dan melaporkan tepat pada waktunya.
 2. Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar **114,26%** melampaui target sebesar **Rp. 2.477.112.670**. Hal ini merupakan hasil peningkatan Retribusi Daerah dengan cara sosialisasi regulasi retribusi daerah, peningkatan pelayanan pemungutan retribusi dan meningkatkan koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi.
 3. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai **100%** dari target sebesar **Rp 17.414.052.532**. Hasil audit Independen BUMD.
 4. Capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar **98,30%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 2.001.878.492,-)**. Hal ini dikarenakan mengingat terdapat kendala penerimaan atas penurunan Lain-lain PAD pada komponen Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan penurunan tingkat kunjungan pelayanan kesehatan pada RSUD Cilegon.
- Adapun rincian rencana dan realisasi PAD sebagai berikut :

Tabel 1.13 Rencana dan Realisasi PAD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	575.077.485.635	717.400.615.564	142.323.129.929	124,75%
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	422.247.075.762	564.094.936.513	141.847.860.751	133,59%
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	17.374.058.827	19.851.171.497	2.477.112.670	114,26%
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.414.052.532	17.414.087.532	35.000	100,00%
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.042.298.514	116.040.420.022	-2.001.878.492	98,30%

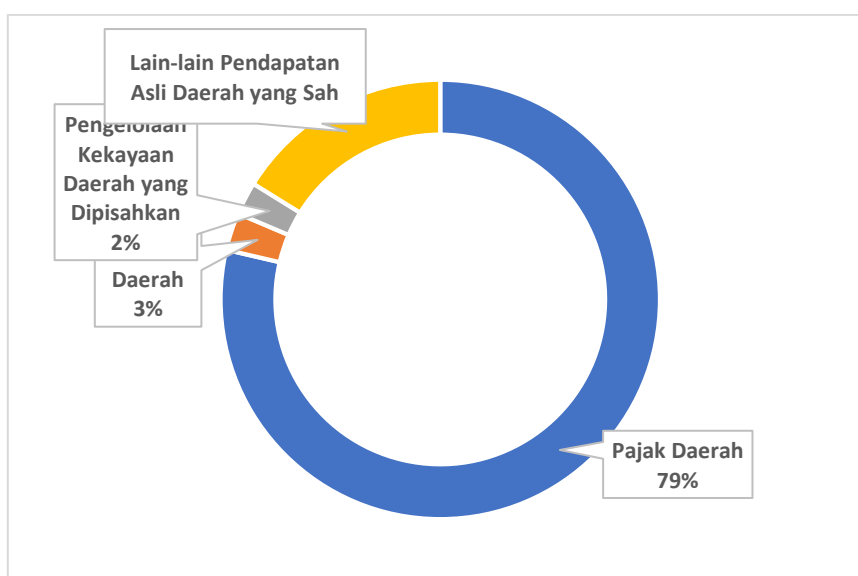
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.36 Capaian PAD beserta Komponennya



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.37 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Deskripsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

1. Hasil Pajak Daerah

Target Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Kota Cilegon dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 sebesar **Rp. 422.247.075.762,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 564.094.936.513,-** atau mencapai **133,59%** artinya melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 141.847.860.751,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari capaian :

1. Realisasi Pajak Hotel mencapai **146,90%** atau melampaui target sebesar **Rp. 2.110.328.358,-**,
2. Realisasi Pajak Restoran mencapai **108,63%** atau melampaui target sebesar **Rp. 1.725.555.744,-**,
3. Realisasi Pajak Hiburan mencapai **108,42%** atau melampaui target sebesar **Rp. 151.493.825,-**,
4. Realisasi Pajak Reklame mencapai **122,20%** atau melampaui target sebesar **Rp. 310.746.253,-**,
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan mencapai **132,07%** atau melampaui target sebesar **Rp. 51.311.964.438,-**,
6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar **110,18%** atau melampaui target sebesar **Rp. 458.311.800,-**,
7. Realisasi Pajak Parkir mencapai **100,59%** atau melampaui target sebesar **Rp. 8.824.767,-**,
8. Realisasi Pajak Air Tanah mencapai **115,97%** atau melampaui target sebesar **Rp. 207.580.869,-**,
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, dan Perkotaan mencapai **119,75%** atau melampaui target sebesar **Rp. 15.800.618.164,-**,
10. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar **147,38%** atau melampaui target sebesar **Rp. 69.762.436.533,-**.

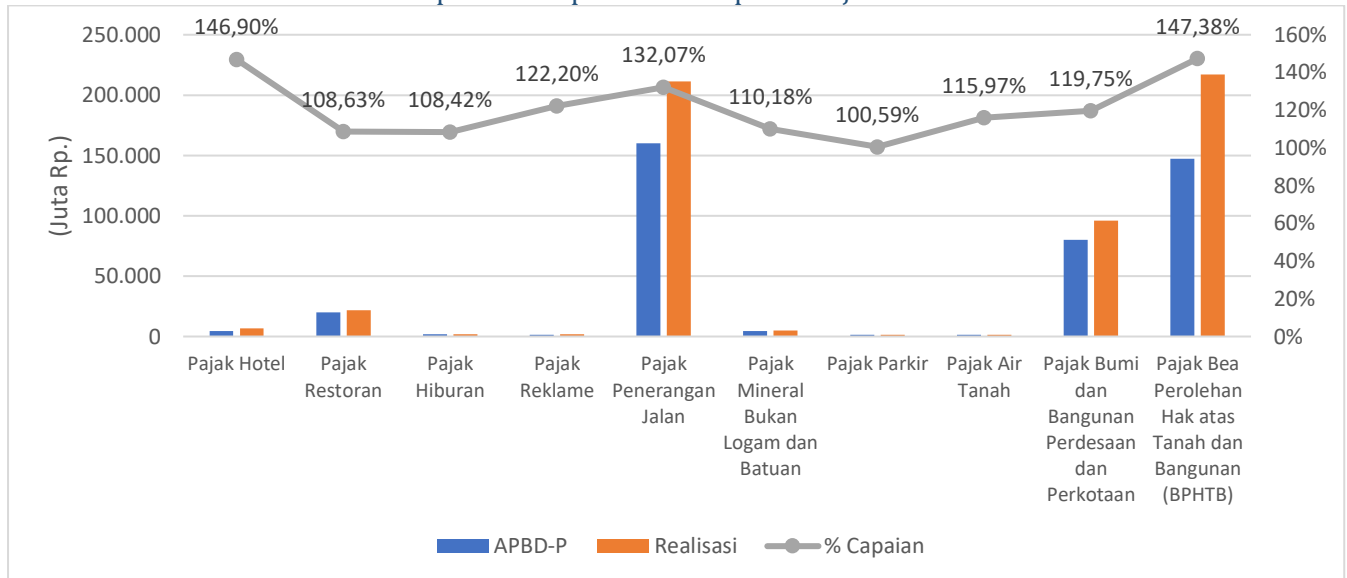
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.14 Rencana dan Realisasi Hasil Pajak Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	422.247.075.762	564.094.936.513	141.847.860.751	133,59%
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	4.500.000.000	6.610.328.358	2.110.328.358	146,90%
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	20.000.000.000	21.725.555.744	1.725.555.744	108,63%
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	1.800.000.000	1.951.493.825	151.493.825	108,42%
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.400.000.000	1.710.746.253	310.746.253	122,20%
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	160.000.000.000	211.311.964.438	51.311.964.438	132,07%
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000	4.958.311.800	458.311.800	110,18%
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	1.500.000.000	1.508.824.767	8.824.767	100,59%
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	1.300.000.000	1.507.580.869	207.580.869	115,97%
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000	95.800.618.164	15.800.618.164	119,75%
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	147.247.075.762	217.009.512.295	69.762.436.533	147,38%

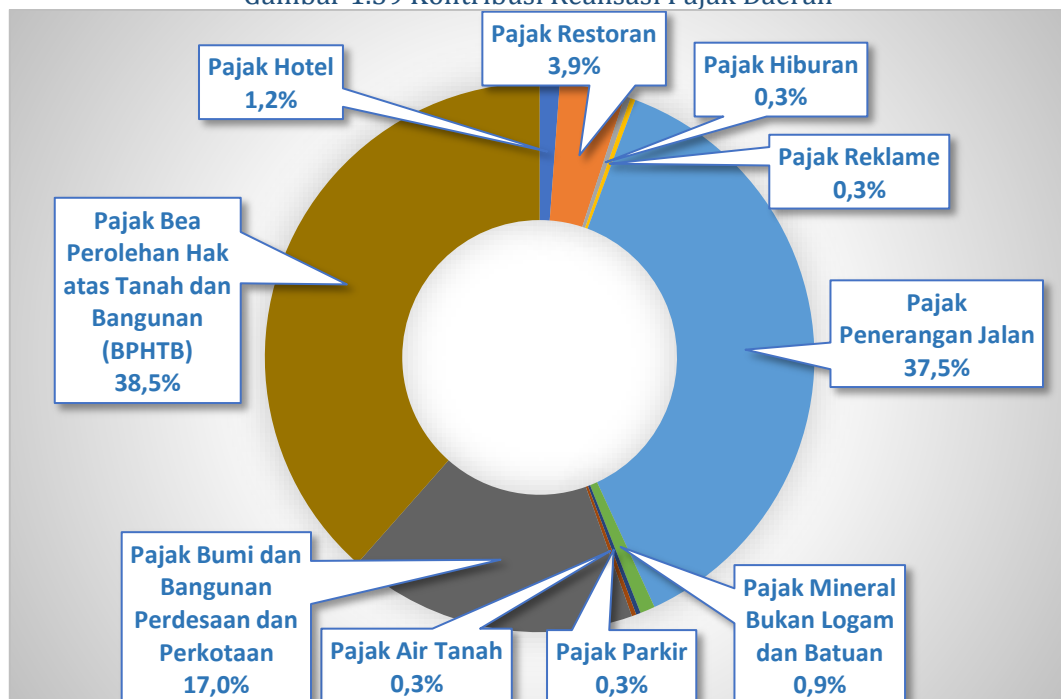
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.38 Capaian Komponen Pendapatan Pajak Daerah



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.39 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

2. Hasil Retribusi Daerah

Target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah Kota Cilegon dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 17.374.058.827,-** dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar **Rp. 19.851.171.497,-** atau mencapai **114,26%**, yang bersumber dari komponen berikut ini :

1. Capaian Retribusi Jasa Umum sebesar **107,71%**, atau melampaui sebesar **Rp. 238.971.369,-** atau terealisasi sebesar **Rp. 3.339.310.196,-** dari target sebesar **Rp. 3.100.338.827,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari :
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai **94,28%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 57.192.850,-)**. Hal ini dikarenakan penurunan tingkat kunjungan pasien di puskesmas Kota Cilegon dan adanya Peraturan terkait berobat gratis untuk masyarakat Kota Cilegon, sehingga pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan diperoleh dari kunjungan masyarakat yang tidak memiliki KTP Cilegon.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai **85,37%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 93.942.204,-)**. Hal ini dikarenakan penurunan pengurangan kapasitas persampahan yang terjadi karena terdapat Bank Sampah yang dikelola oleh warga, pengenaan tarif retribusi persampahan yang sudah tidak relevan, dan alat timbang yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Banten pada tempat pembuangan akhir kondisi saat ini tidak dapat difungsikan atau rusak.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum mencapai **76,04%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 58.953.000,-)**. Hal ini dikarenakan terdapat titik parkir yang diluar kewenangan pengelolaan UPT Parkir Kota Cilegon karena titik parkir tersebut berada di sepanjang Jalan Negara.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar mencapai **128,09%** atau melampaui target sebesar **Rp. 126.887.000,-**, sesuai dengan potensi penerimaan tahun 2020.
 - Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai **70,71%** kurang dari target sebesar **(Rp. 88.044.623,-)**. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pemilik angkutan umum yang masih perlu ditingkatkan
 - Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran mencapai **122,6%** atau melampaui target sebesar **Rp. 13.558.000,-**.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang mencapai **199,12%** atau melampaui target sebesar **Rp. 396.659.046,-**.
2. Capaian Retribusi Jasa Usaha mencapai **101,41%** atau melampaui target sebesar **Rp. 51.846.725,-** dari target sebesar **Rp. 3.681.860.000,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 3.733.706.725,-**. Adapun komponen yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah :
 - Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai **140,99%** atau melampaui target sebesar **Rp. 1.022.780.900,-**.
 - Realisasi Retribusi Terminal mencapai **103,77%** atau melampaui target sebesar **Rp. 1.536.000,-**.
 - Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir mencapai **105,16%** atau melampaui target sebesar **Rp. 5.157.900,-**.
 - Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai **118,84%** atau melampaui target sebesar **Rp. 8.680.000,-**.
 - Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mencapai **1,37%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 986.308.075,-)**. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kepelabuhanan hingga akhir Desember 2020 pemungutan belum berlaku efektif dikarenakan masih dalam tahap revisi, sejak

diberlakukan Mei 2013 tidak bisa dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya masih multitafsir, belum spesifik mengatur objek retribusi sehingga perlu di revisi.

3. Capaian Retribusi Perizinan Tertentu mencapai **120,64%** atau melampaui sebesar **Rp. 2.186.294.576,-** dari target sebesar **Rp. 10.591.860.000,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 12.778.154.576,-**. Adapun komponen yang mempengaruhi capaian retribusi perizinan tertentu yakni :
 - Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai **109,96%** atau melampaui target sebesar **Rp. 454.091.100,-**.
 - Realisasi Retribusi Izin Trayek mencapai **43,86%** atau tidak terlampaui target sebesar **(Rp. 17.886.000,-)**. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib retribusi (angkutan umum) dalam melaksanakan kewajiban membayar Retribusi Izin Trayek.
 - Realisasi pada Retribusi IMTA mencapai **129,17%** atau melampaui target sebesar **Rp. 1.750.089.476,-**. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 569/424/SJ sehingga Retribusi IMTA menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah, dan hasil optimalisasi monitoring dan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di wilayah Kota Cilegon.

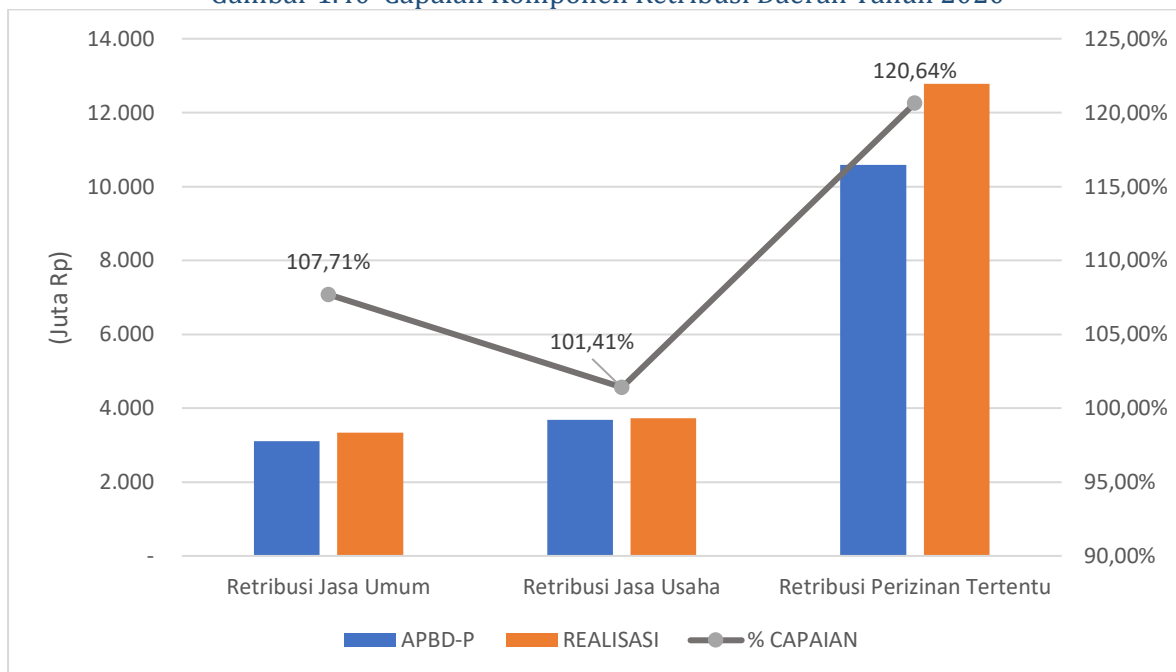
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor retribusi daerah sebagai berikut :

Tabel 1.15 Rencana dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Kota Cilegon Tahun 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	17.374.058.827	19.851.171.497	4.954.225.340	114,26%
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	3.100.338.827	3.339.310.196	238.971.369	107,71%
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	942.807.150	-57.192.850	94,28%
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	641.901.204	547.959.000	-93.942.204	85,37%
	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	246.000.000	187.047.000	-58.953.000	76,04%
	Retribusi Pelayanan Pasar	451.650.000	578.537.000	126.887.000	128,09%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.587.623	212.543.000	-88.044.623	70,71%
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000	73.558.000	13.558.000	122,60%
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.200.000	796.859.046	396.659.046	199,12%
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	3.681.860.000	3.733.706.725	51.846.725	101,41%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.495.040.000	3.517.820.900	1.022.780.900	140,99%
	Retribusi Terminal	40.740.000	42.276.000	1.536.000	103,77%
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000	105.157.900	5.157.900	105,16%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	46.080.000	54.760.000	8.680.000	118,84%
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.000.000.000	13.691.925	-986.308.075	1,37%
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	10.591.860.000	12.778.154.576	2.186.294.576	120,64%
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.560.000.000	5.014.091.100	454.091.100	109,96%
	Retribusi Izin Trayek	31.860.000	13.974.000	-17.886.000	43,86%
	Retribusi IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing)	6.000.000.000	7.750.089.476	1.750.089.476	129,17%

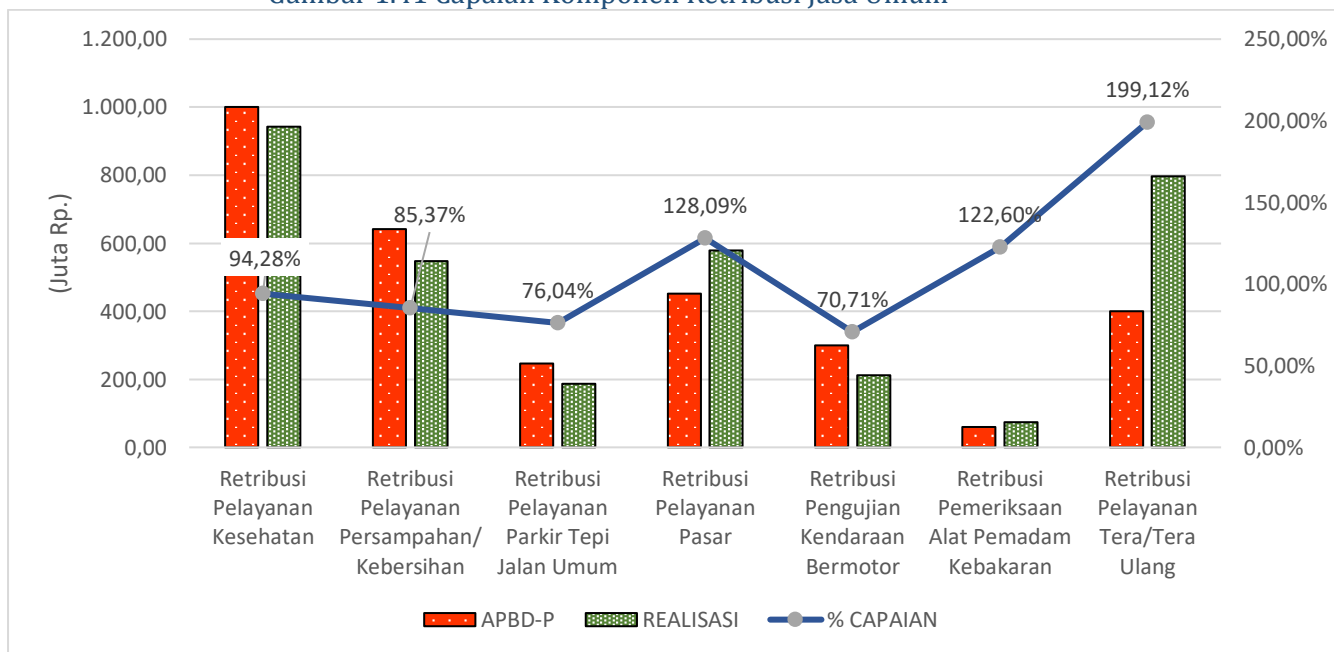
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.40 Capaian Komponen Retribusi Daerah Tahun 2020



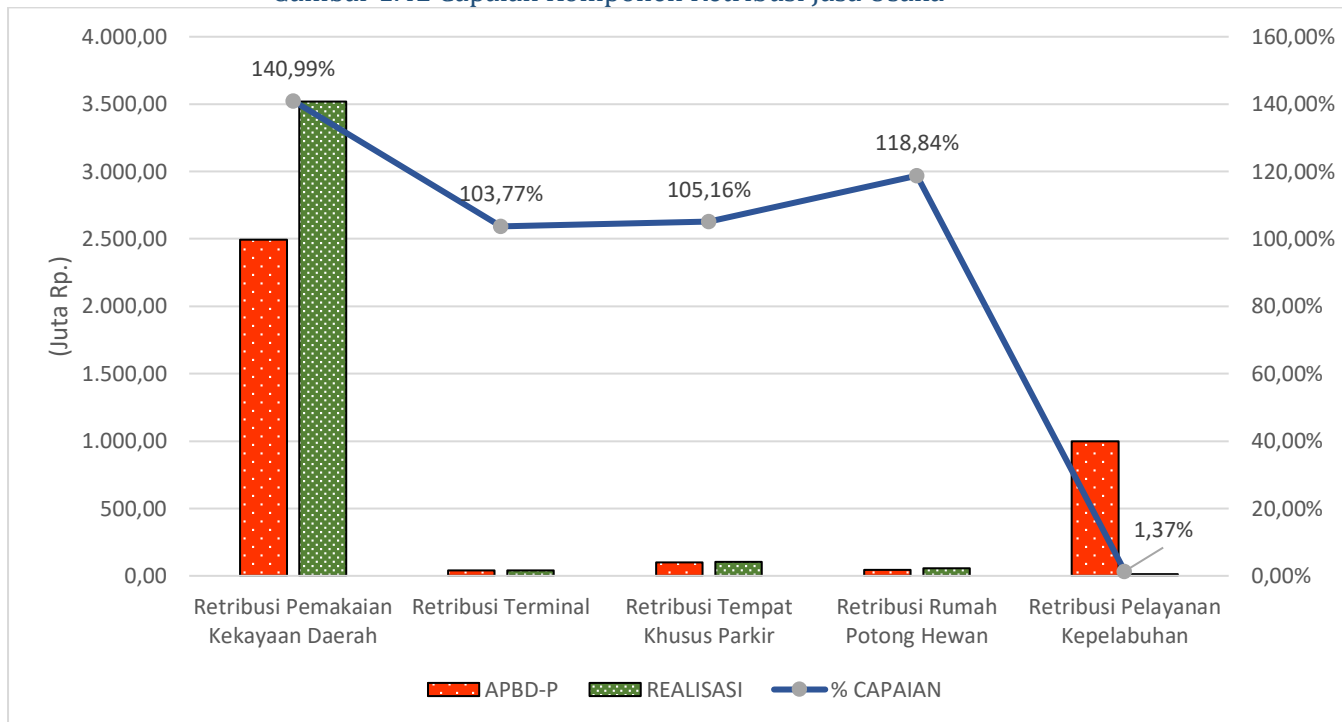
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.41 Capaian Komponen Retribusi Jasa Umum



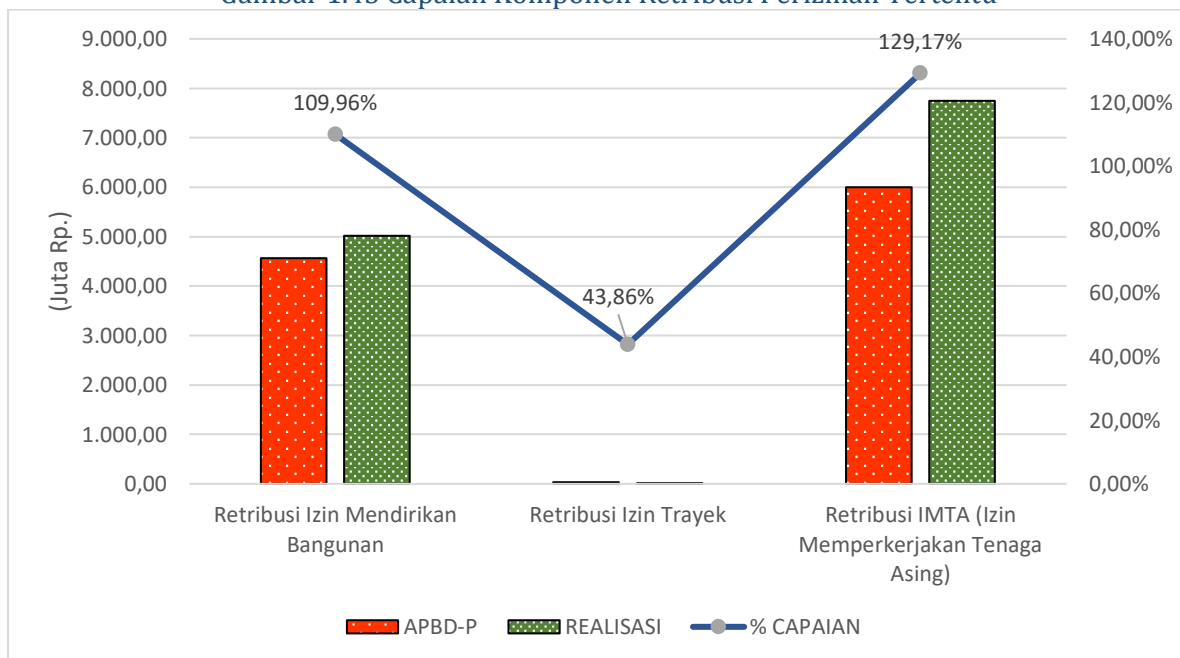
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.42 Capaian Komponen Retribusi Jasa Usaha



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.43 Capaian Komponen Retribusi Perizinan Tertentu



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dengan penerimaan mencapai **100,00%** atau melampaui sebesar **Rp 35.000,-** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp.**

17.414.052.532,- adapun realisasi sebesar **Rp. 17.414.087.532,-** tersebut merupakan hasil audit independen masing-masing BUMD Kota Cilegon.

- **Laba Bank Jabar Banten Cabang Kota Cilegon telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.700.580.964,-.** Adapun realisasi tersebut berdasarkan Keputusan RUPS omor 265/Dir-CSE/2020.
- Realisasi Bagi Hasil Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah **PT. BPRS Cilegon Mandiri** telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 240.898.694,-** atau **100%**. Adapun realisasi tersebut berdasarkan Keputusan RUPS Nomor 45 Tanggal 15 Juli 2020.
- **PDAM Cilegon Mandiri** memperoleh laba pada tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 3.454.966.581,-** dari proyeksi anggaran perusahaan sebesar **Rp. 3.454.966.581,-** atau terealisasi sebesar **100%**.
- **Laba PT. PCM** dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,8%. PT. PCM telah menyetorkan PAD tahun anggaran 2020 ke Kas Umum Daerah Kota Cilegon senilai **Rp. 8.017.606.293,-**. Kelebihan sebesar **Rp 35.000,-** merupakan kekurangan bayar dari tahun 2019 akibat potongan administrasi dari pihak Bank berupa beban RTGS yang disetorkan baru dibayarkan pada tahun 2020. Penyetoran dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 2.672.535.431,- di tanggal 16 Juni 2020, tahap kedua sebesar Rp. 2.672.535.431,- di tanggal 16 Desember 2020, dan tahap ketiga sebesar Rp. 2.672.535.431,- di tanggal 23 Desember 2020.

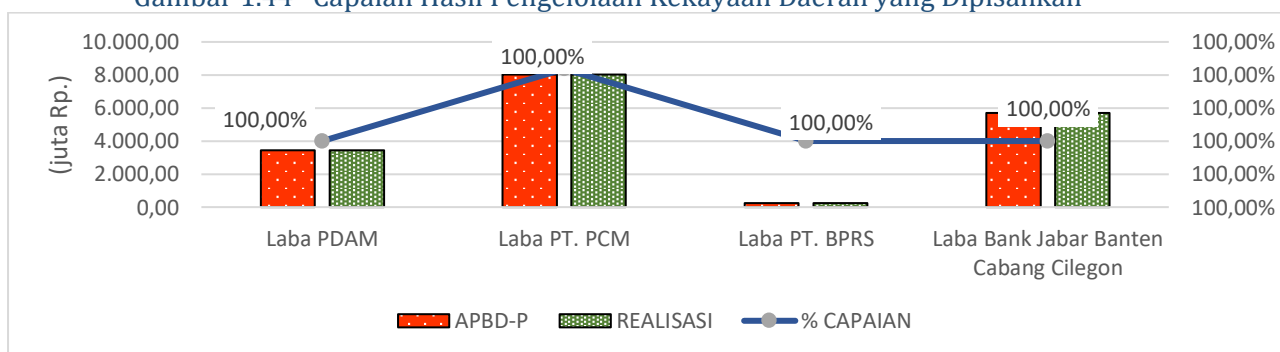
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 1.14 Rencana dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.414.052.532	17.414.087.532	35.000	100,00%
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17.414.052.532	17.414.087.532	35.000	100,0002%
	Laba PDAM	3.454.966.581	3.454.966.581	0	100,00%
	Laba PT. PCM	8.017.606.293	8.017.641.293	35.000	100,00%
	Laba PT. BPRS	240.898.694	240.898.694	0	100,00%
	Laba Bank Jabar Banten Cabang Cilegon	5.700.580.964	5.700.580.964	0	100,00%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.44 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, capaian realisasi penerimaan mencapai **98,30%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 2.001.878.492,-)** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 118.042.298.514,-** dengan total penerimaan sebesar **Rp. 116.040.420.022,-**. Hal tersebut dipengaruhi atas capaian realisasi beberapa sektor lain-lain PAD yang sah, diantaranya:

- Realisasi atas penerimaan Jasa Giro Kas Daerah mencapai **162,81%** atau melampaui sebesar **Rp. 565.310.385,-** dari target yang ditetapkan sebesar **RP 900.000.000,-**. Hal ini diakibatkan dana yang ada di Kas Daerah akibat penurunan realisasi belanja yang mengakibatkan penurunan saldo Kas Daerah.
- Realisasi atas komponen Bunga Deposito Bjb telah mencapai target sebesar **122,8%** atau melampaui target sebesar **Rp. 2.770.314.199,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 12.150.000.000,-**. Hal tersebut terlampaui karena pemanfaatan Dana iddle di Kas Daerah, yang diakibatkan oleh penurunan realisasi Belanja dan pelampauan Pendapatan Asli Daerah.
- Realisasi atas komponen Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berupa Kerugian Barang Daerah mencapai **81,57%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 6.080.286,-)** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 33.000.000,-**. Hal ini dikarenakan penerimaan dari klaim TGR Tahun 2019, yang terbayarkan di tahun anggaran 2020.
- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mencapai **125,44%** atau melampaui sebesar **Rp. 23.111.132,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 90.835.953,-**.
- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Pajak mencapai **149,09%** atau melampaui sebesar **Rp. 495.867.239,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.010.170.000,-**. Dan Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Retribusi mencapai **1.529,99%** atau melampaui sebesar **Rp. 34.178.384,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.390.120,-**. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib retribusi dan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran tepat pada waktunya (sebelum tanggal jatuh tempo).
- Realisasi atas komponen Pendapatan Denda Retribusi mencapai **1.529,99%** atau melampaui sebesar **Rp. 34.178.384,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.390.120,-**.
- Realisasi atas komponen Pendapatan dari Pengembalian Temuan mencapai **203,17%** atau melampaui sebesar **Rp. 684.636.342,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 663.621.208,-**. Hal tersebut dipengaruhi dari koordinasi yang dilakukan antar stakeholder Kota Cilegon dan pihak eksternal lainnya.
- Realisasi atas komponen Sewa mencapai **112%** atau melampaui sebesar **Rp. 78.206.222,-** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 651.558.600,-**.
- Realisasi dana kapitasi penerimaan atas JKN pada FKTP mencapai **77,14%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 2.907.674.805,-)** dari yang ditargetkan sebesar

Rp 12.720.125.120,-. Hal tersebut sesuai dengan perubahan alokasi transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kementerian terkait.

- Realisasi komponen BLUD RSUD mencapai **96,57% tidak terlampaui sebesar (Rp. 2.939.426.940,-)**, mengingat terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien baik pada instalasi rawat jalan maupun rawat inap yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, terjadinya musibah banjir yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan radiologi (CT scan dan alat rontgen thorak), dan adanya regulasi rujukan perjenjang untuk pasien BPJS.
- Realisasi atas komponen Lain-lain PAD yang Sah Lainnya mencapai **10,62%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 1.082.089.590,-)** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.200.000.000,-**. Hal ini dikarenakan minimnya pendapatan pengembalian belanja bersifat insidental dibawah tahun 2020 disebabkan diberlakukannya pembayaran non tunai sejak tahun 2019 .

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut :

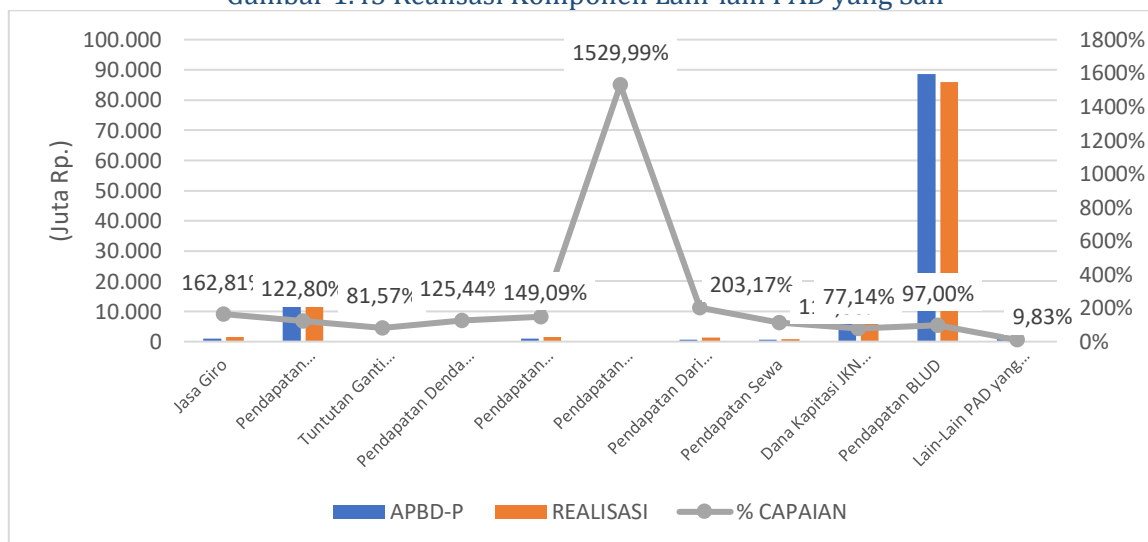
Tabel 1.15 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.042.298.514	116.040.420.022	-2.001.878.492	98,30%
4 . 1 . 4 . 02	Jasa Giro	900.000.000	1.465.310.385	565.310.385	162,81%
	Jasa Giro Kas Daerah	900.000.000	1.465.310.385	565.310.385	162,81%
4 . 1 . 4 . 03	Pendapatan Bunga Deposito	12.150.000.000	14.920.314.199	2.770.314.199	122,80%
	Rekening Deposito pada Bank BJB	12.150.000.000	14.920.314.199	2.770.314.199	122,80%
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	33.000.000	17.359.714	-15.640.286	52,61%
	Kerugian Barang Daerah	33.000.000	17.359.714	-15.640.286	52,61%
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.835.953	113.947.085	23.111.132	125,44%
	Bidang Pendidikan	26.894.616	26.894.616	0	100,00%
	Bidang Kesehatan	16.874.078	27.134.678	10.260.600	160,81%
	Bidang Pekerjaan Umum	47.067.259	12.850.532	-34.216.727	27,30%
	Bidang Perumahan Rakyat	-	47.067.259	47.067.259	#DIV/0!
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak	1.010.170.000	1.506.037.239	495.867.239	149,09%
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.450.000	12.639.342	7.189.342	231,91%
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.450.000	98.065.291	57.615.291	242,44%
	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000	4.114.549	3.614.549	822,91%
	Pendapatan Denda Pajak Reklame	60.000.000	159.824.393	99.824.393	266,37%
	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	236.320.000	237.267.900	947.900	100,40%
	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	66.000.000	66.051.974	51.974	100,08%
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000	11.226.440	10.726.440	2245,29%
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	950.000	1.750.799	800.799	184,29%
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	600.000.000	915.096.551	315.096.551	152,52%

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	2.390.120	36.568.504	34.178.384	1529,99%
	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000	27.325.624	26.325.624	2732,56%
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.117.060	8.750.060	7.633.000	783,31%
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	273.060	492.820	219.760	180,48%
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	663.621.208	1.348.257.550	684.636.342	203,17%
	Pendapatan Dari Pengembalian Temuan	663.621.208	1.348.257.550	684.636.342	203,17%
4.1.4.16	Pendapatan Sewa	651.558.600	729.764.822	78.206.222	112,00%
	Cicilan Kios	633.558.600	707.536.284	73.977.684	111,68%
	MCK Umum	18.000.000	22.228.538	4.228.538	123,49%
4.1.4.17	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.720.125.120	9.812.450.315	-2.907.674.805	77,14%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon	1.349.536.515	1.013.978.551	-335.557.964	75,14%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan	2.002.849.834	1.614.467.081	-388.382.753	80,61%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber	1.659.500.000	1.412.951.261	-246.548.739	85,14%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol	838.595.164	721.847.465	-116.747.699	86,08%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak	1.819.756.292	1.422.017.217	-397.739.075	78,14%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta	974.006.000	849.455.343	-124.550.657	87,21%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang	1.520.683.032	1.186.969.429	-333.713.603	78,06%
	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil	2.555.198.283	1.590.763.968	-964.434.315	62,26%
4.1.4.18	Pendapatan BLUD	88.620.597.513	85.962.939.799	-2.657.657.714	97,00%
	Pendapatan BLUD - RSUD	85.820.597.513	82.881.170.573	-2.939.426.940	96,57%
	Pendapatan BLUD - PDB	2.800.000.000	3.081.769.226	281.769.226	110,06%
4.1.4.19	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	1.200.000.000	127.470.410	-1.072.529.590	10,62%
	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	1.200.000.000	127.470.410	-1.072.529.590	10,62%

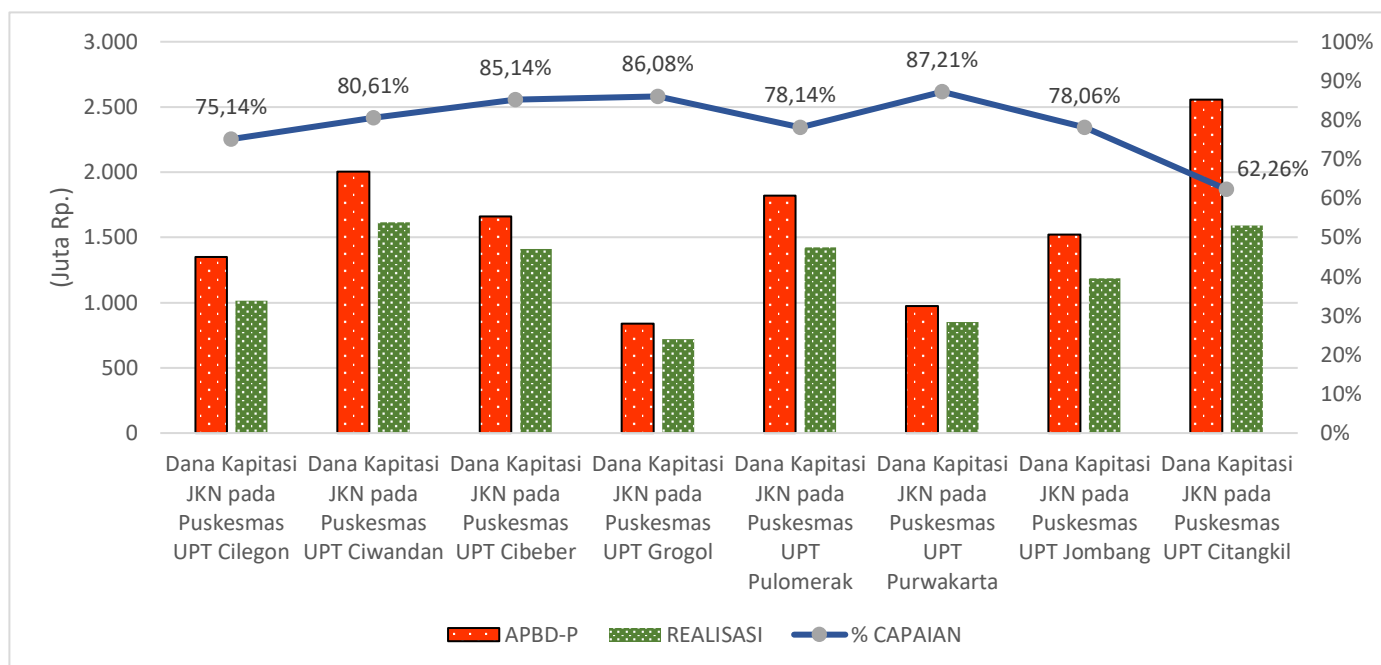
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.45 Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah



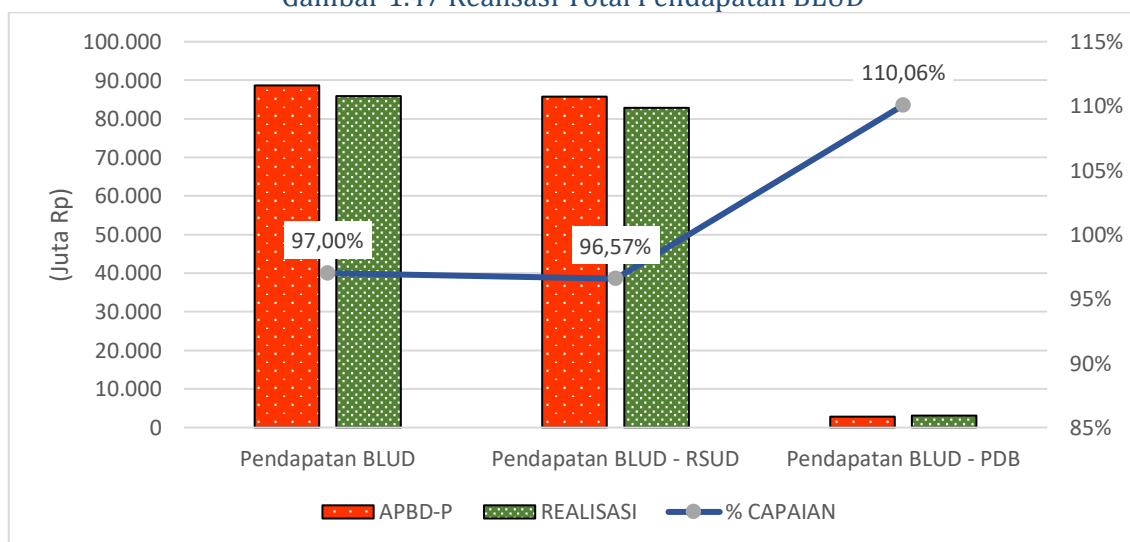
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.46 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.47 Realisasi Total Pendapatan BLUD



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

B. Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun 2020 dari Dana Perimbangan mencapai **98,41%** atau sebesar **Rp. 840.885.118.397,-** artinya terdapat deviasi **1,59%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 854.469.618.820,-**. Yang bersumber dari komponen :

1. Realisasi dari sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar **92,47%** atau terealisasi sebesar **Rp. 119.602.371.812,-** dari target sebesar **Rp. 129.338.999.820,-**. Capaian tersebut berdasarkan pada aturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020. dan Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020. Khususnya DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.

2. Realisasi Dana Alokasi Umum mencapai **99,68%** atau tidak melampaui sebesar **(Rp. 1.913.748,-)** dari target sebesar **Rp. 599.460.814.000,-**. Hal tersebut dikarenakan alokasi DAU tambahan tidak tersalurkan mengingat adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat khususnya alokasi DAU Tambahan untuk P3K.
3. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai **98,46%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 1.934.124.415,-)** dari target sebesar **Rp. 125.669.805.000,-**. Adapun secara rinci, realisasi DAK Fisik mencapai **94,46%** dari target sebesar **Rp. 35.822.699.000,-**, adapun DAK Fisik sesuai dengan jumlah data kontrak yang dikirimkan ke Pemerintah Pusat. sedangkan realisasi DAK Non Fisik mencapai **100,06%** dari target sebesar **Rp 89.847.106.000,-** sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

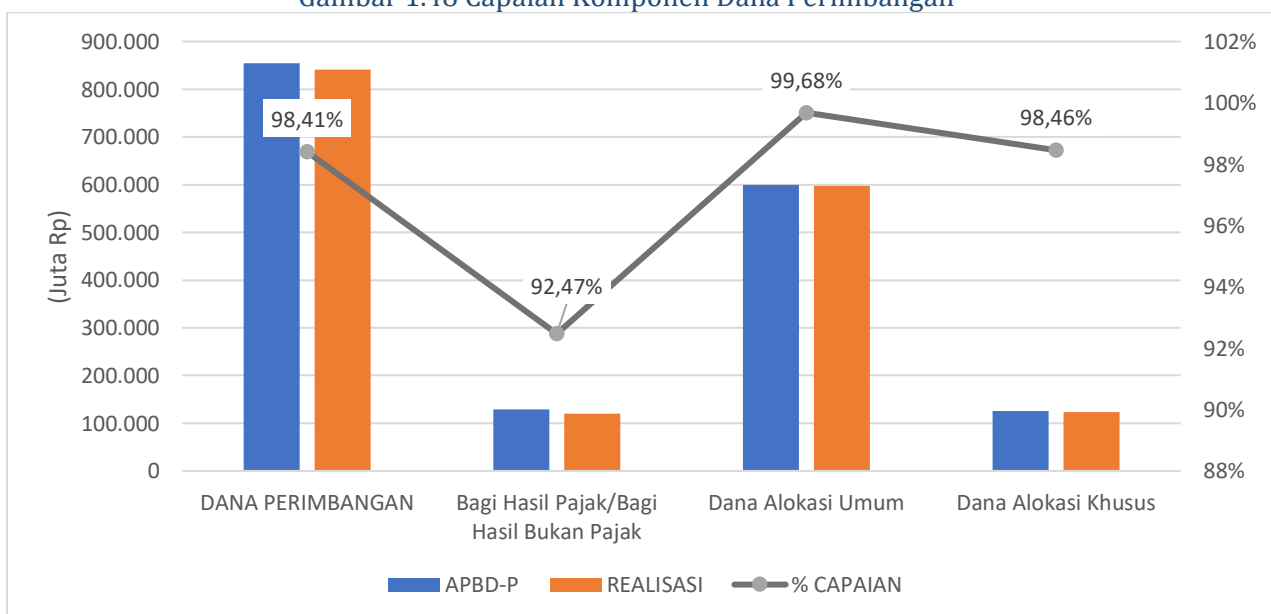
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 1.16 Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	854.469.618.820	840.885.118.397	-13.584.500.423	98,41%
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.338.999.820	119.602.371.812	-9.736.628.008	92,47%
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	599.460.814.000	597.547.066.000	-1.913.748.000	99,68%
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	125.669.805.000	123.735.680.585	-1.934.124.415	98,46%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.48 Capaian Komponen Dana Perimbangan



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi penerimaan dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak hanya mencapai **92,47%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 9.736.628.008,-)** dari target sebesar **Rp. 129.338.999.820,-** dengan total realisasi sebesar **Rp. 119.602.371.812,-** yang terdiri dari:

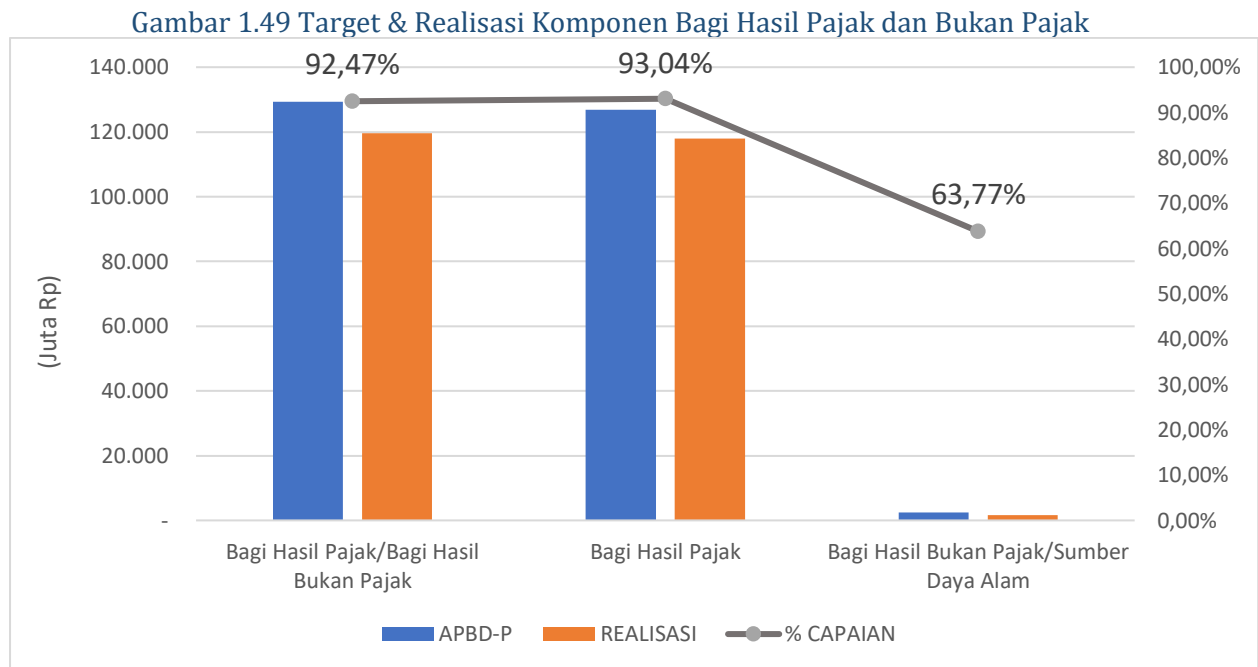
1. Bagi Hasil Pajak mencapai **93,04%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 8.832.238.494,-)** dari target sebesar **Rp. 126.842.579.405,-** adapun yang mempengaruhi dari:
 - a. Realisasi komponen Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mencapai **89,46%** dari target sebesar **Rp. 3.999.081.160,-**. Hal ini dikarenakan penurunan omset Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pengurangan dana alokasi DBH Pajak Pusat dan adanya Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 pada DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.
 - b. Realisasi komponen Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25, Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Psl 21 mencapai **93,16%** dari target sebesar **Rp. 122.836.241.245,-**. Hal ini dikarenakan penurunan omset Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pengurangan dana alokasi DBH Pajak Pusat dan adanya Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 pada DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam mencapai **63,77%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 904.389.514,-)** dari target sebesar **Rp. 2.496.420.415,-** capaian tersebut dipengaruhi dari penerimaan komponen :
 - a. DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan mencapai **52,55%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 42.839.613,-)**. Hal ini karena penurunan omset Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pengurangan dana alokasi DBH Pajak Pusat dan adanya Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 pada DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.
 - b. DBH dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap mencapai **71,53%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 53.306.849,-)**. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan kelebihan penganggaran pada DBH Panas Bumi.
 - c. DBH dari Sumber Daya Perikanan mencapai **49,61%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 800.712.614,-)**. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan kelebihan penganggaran pada DBH Panas Bumi.
 - d. DBH dari Hasil SDA Pertambangan Umum mencapai **98,8%** tidak terlampaui sebesar **(Rp. 7.530.438,-)**, mengingat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan kelebihan penganggaran pada DBH Panas Bumi

Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sebagai berikut :

Tabel 1.17 Rencana dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

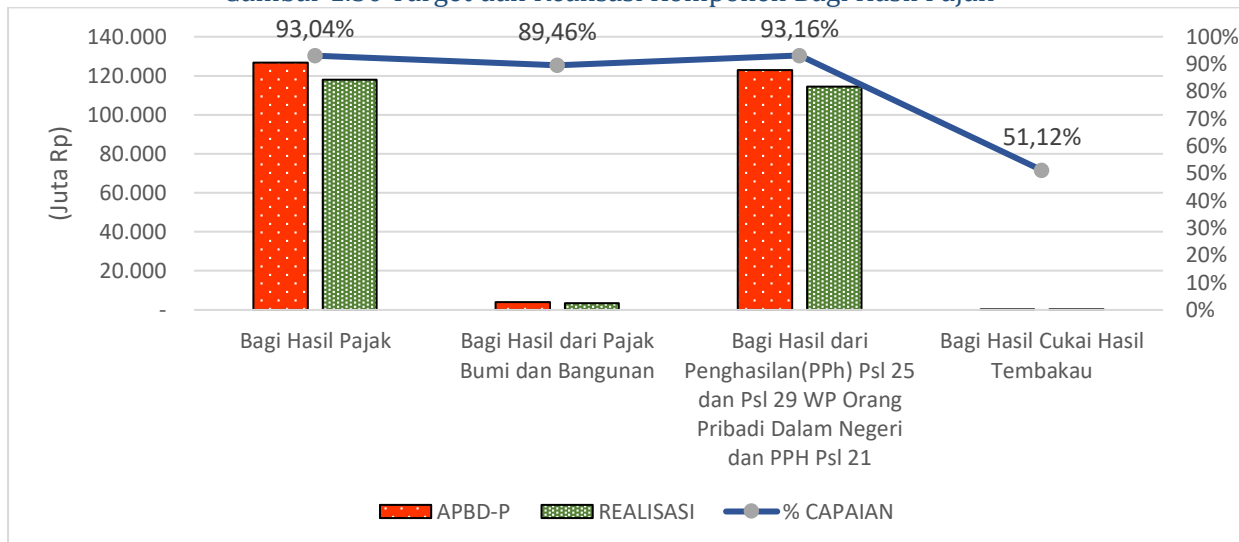
Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.338.999.820	119.602.371.812	-9.736.628.008	92,47%
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	126.842.579.405	118.010.340.911	-8.832.238.494	93,04%
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.999.081.160	3.577.541.406	-421.539.754	89,46%
	Bagi Hasil dari Penghasilan (PPH) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21	122.836.241.245	114.429.089.505	-8.407.151.740	93,16%
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.257.000	3.710.000	-3.547.000	51,12%
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.496.420.415	1.592.030.901	-904.389.514	63,77%
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	90.285.863	47.446.250	-42.839.613	52,55%
	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap	187.268.649	133.961.800	-53.306.849	71,53%
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.588.988.903	788.276.289	-800.712.614	49,61%
	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti)	629.877.000	622.346.562	-7.530.438	98,80%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)



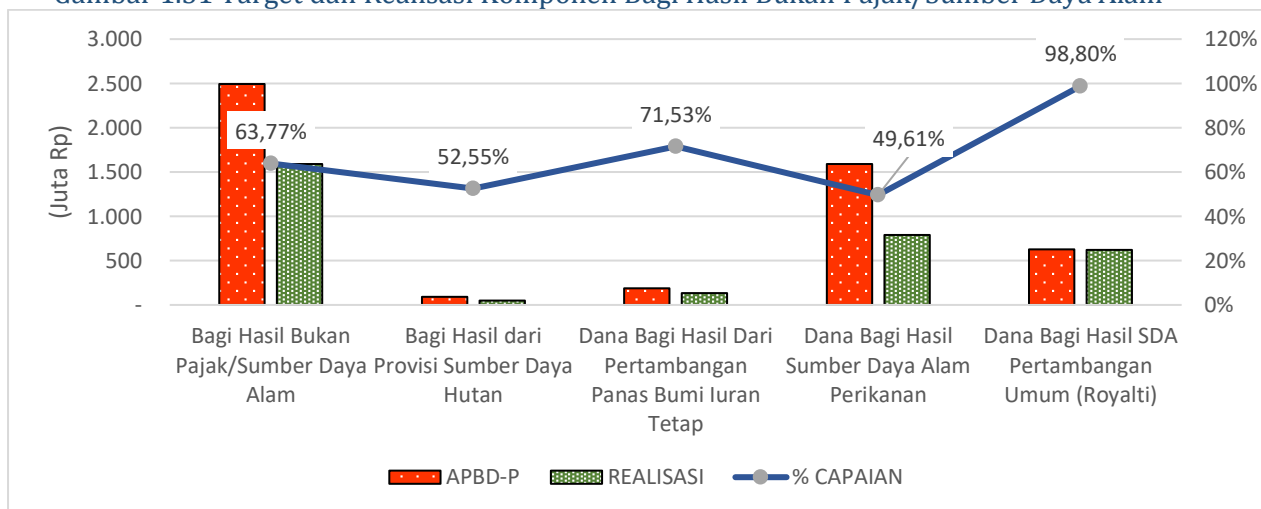
Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.50 Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Pajak



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.51 Target dan Realisasi Komponen Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

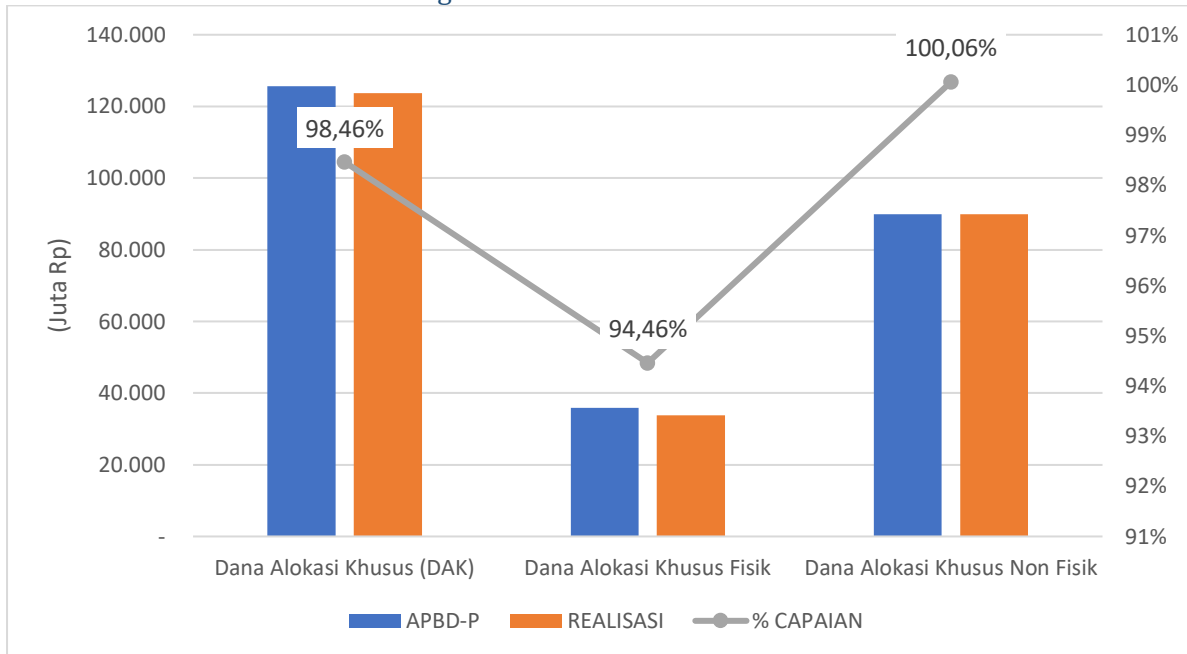
2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum terealisasi **99,68%** atau tidak terlampaui sebesar **(Rp. 1.913.748.000)** dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar **Rp. 599.460.814.000,-**. Hal tersebut dikarenakan alokasi DAU tambahan tidak tersalurkan mengingat adanya rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat khususnya alokasi DAU Tambahan untuk P3K.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi Khusus terealisasi sebesar **98,46%** atau sebesar **Rp. 123.735.680.585,-** dari target sebesar **Rp. 125.669.805.000,-**. Alokasi tersebut dikarenakan mengikuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Gambar 1.52 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2020, realisasi penerimaannya mencapai **94,42%** atau sebesar **Rp. 202.906.274.153,-** dari target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 214.890.890.961,-** yang bersumber dari komponen :

- Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS mencapai **97,80%** atau tidak terlampaui sebesar (**Rp. 946.607.207,-**) dari target sebesar **Rp. 43.117.590.421,-** mengingat teranggarkannya silpa tahun 2019 pada pendapatan hibah SMP.
- Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mencapai **88,16%** tidak terlampaui sebesar (**Rp. 11.038.009.601,-**) dari target sebesar **Rp. 93.188.773.540,-**, berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 973/Kep.137.Huk/2020 merupakan alokasi DBH bulan Februari 2020, namun akibat Liquiditas di Bank Banten sehingga penetapan DBH sebesar 11 miliar tersebut tertahan. Capaian tersebut dipengaruhi dari komponen sebagai berikut :
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor mencapai **92,95%** tidak terlampaui sebesar (**Rp. 1.531.820.839,-**). Hal ini dikarenakan akibat Liquiditas di Bank Banten sehingga penetapan DBH Pajak Kendaraan Bermotor bulan Februari 2020 tertahan.
 - Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai **76,95%** tidak terlampaui sebesar (**Rp. 3.515.717.077,-**). Hal ini dikarenakan akibat Liquiditas di Bank Banten sehingga penetapan DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bulan Februari 2020 tertahan.
 - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai **79,16%** tidak terlampaui sebesar (**Rp. 7.468.114.077,-**). Hal ini dikarenakan akibat Liquiditas di Bank Banten sehingga penetapan DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bulan Februari 2020 tertahan.

- d. Bagi Hasil dari Pajak Rokok mencapai **107,25%** terlampaui sebesar **Rp. 1.4477.642.392,-**.
- c. Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus komponen Dana Insentif Daerah (DID) mencapai **100,00%** dari target sebesar **Rp. 33.584.527.000,-**
- d. Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten mencapai **100,00%** dari target sebesar **Rp. 45.000.000.000,-**.

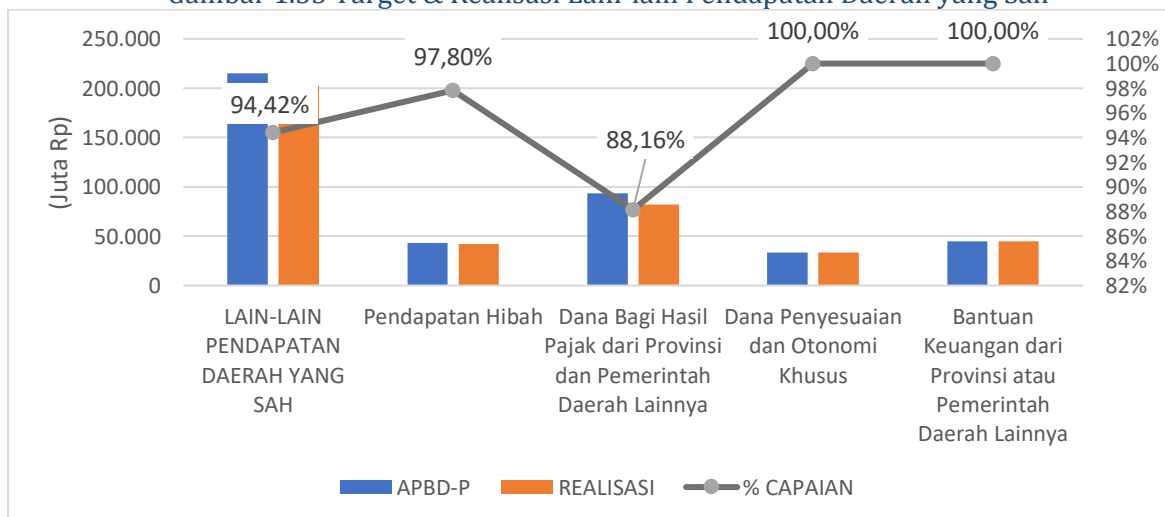
Adapun rincian rencana dan realisasi pendapatan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut :

Tabel 1.18 Rencana dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		Lebih/Kurang	% Capaian
		APBD-P	Realisasi		
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214.890.890.961	202.906.274.153	-11.984.616.808	94,42%
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	43.117.590.421	42.170.983.214	-946.607.207	97,80%
4 . 3 . 1 . 06	Pendapatan Hibah Dana BOS	43.117.590.421	42.170.983.214	-946.607.207	97,80%
4 . 3 . 3	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	93.188.773.540	82.150.763.939	-11.038.009.601	88,16%
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.735.412.662	20.203.591.823	-1.531.820.839	92,95%
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.251.412.501	11.735.695.424	-3.515.717.077	76,95%
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.827.868.171	28.359.754.094	-7.468.114.077	79,16%
	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20.374.080.206	21.851.722.598	1.477.642.392	107,25%
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.584.527.000	33.584.527.000	0	100,00%
	Dana Insentif Daerah	33.584.527.000	33.584.527.000	0	100,00%
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.000.000.000	45.000.000.000	0	100,00%
	Bantuan keuangan dari Provinsi Banten	45.000.000.000	45.000.000.000	0	100,00%

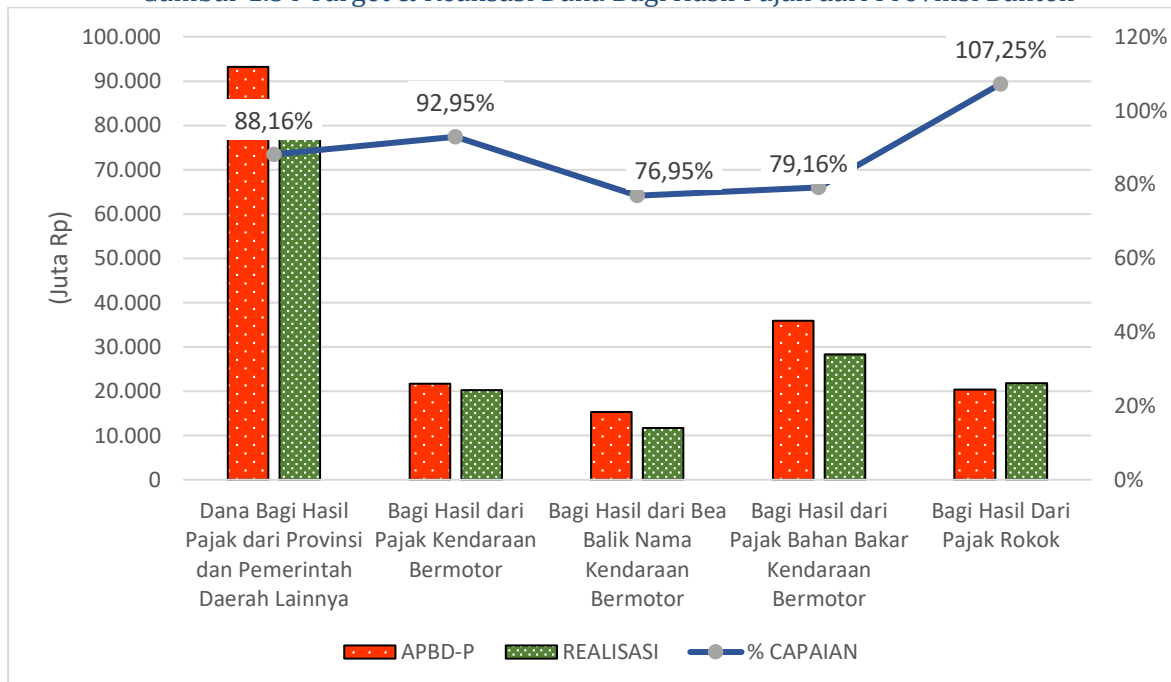
Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.53 Target & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Gambar 1.54 Target & Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

Tabel 1.19 Rencana dan Realisasi Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.644.437.995.416,00	1.761.192.008.114,00	107,10
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	575.077.485.635,00	717.400.615.564,00	124,75
411	Pendapatan Pajak Daerah	422.247.075.762,00	564.094.936.513,00	133,59
41101	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	6.610.328.358,00	146,90
4110103	Hotel Bintang Empat	3.000.000.000,00	4.145.215.182,00	138,17
4110104	Hotel Bintang Tiga	250.000.000,00	543.349.562,00	217,34
4110105	Hotel Bintang Dua	850.000.000,00	1.417.722.883,00	166,79
4110107	Hotel Melati Tiga	278.000.000,00	344.708.338,00	124,00
4110108	Hotel Melati Dua	50.000.000,00	73.705.600,00	147,41
4110109	Hotel Melati Satu	7.000.000,00	8.563.500,00	122,34
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	65.000.000,00	77.063.293,00	118,56
41102	Pajak Restoran	20.000.000.000,00	21.725.555.744,00	108,63
4110201	Restoran	13.520.000.000,00	13.439.029.605,00	99,40
4110202	Rumah Makan	500.000.000,00	496.236.696,00	99,25
4110203	Kafetaria	1.800.000.000,00	2.058.115.423,00	114,34
4110204	Kantin	180.000.000,00	184.881.753,00	102,71
4110205	Katering	4.000.000.000,00	5.547.292.267,00	138,68
41103	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.951.493.825,00	108,42
4110301	Tontonan Film/Bioskop	883.000.000,00	899.763.185,00	101,90
4110302	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00
4110305	Pameran	0,00	0,00	0,00
4110307	Karaoke	0,00	0,00	0,00
4110309	Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00
4110310	Permainan Biliar	28.000.000,00	33.726.118,00	120,45
4110315	Permainan Ketangkasan	831.000.000,00	928.332.649,00	111,71
4110317	Mandi Uap/Spa	13.000.000,00	21.071.542,00	162,09
4110319	Pertandingan Olahraga	45.000.000,00	68.600.331,00	152,45
41104	Pajak Reklame	1.400.000.000,00	1.710.746.253,00	122,20
4110401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.270.000.000,00	1.524.021.733,00	120,00
4110402	Reklame Kain	53.000.000,00	108.334.520,00	204,40
4110403	Reklame Melekat/Stiker	1.000.000,00	0,00	0,00
4110405	Reklame Berjalan	4.000.000,00	7.000.000,00	175,00
4110406	Reklame Udara	1.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
4110409	Reklame Film/Slide	71.000.000,00	71.390.000,00	100,55
41105	Pajak Penerangan Jalan	160.000.000.000,00	211.311.964.438,00	132,07
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	108.000.000.000,00	138.036.767.133,00	127,81
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	52.000.000.000,00	73.275.197.305,00	140,91
41106	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	4.958.311.800,00	110,18
4110606	Batu Gunung/Batu Belah/Andesit	360.000.000,00	437.790.200,00	121,61
4110607	Makadam	140.000.000,00	172.460.000,00	123,19
4110612	Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras	4.000.000.000,00	4.348.061.600,00	108,70
41107	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.508.824.767,00	100,59
4110701	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.508.824.767,00	100,59
41108	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.507.580.869,00	115,97
4110801	Pajak Air Tanah	1.300.000.000,00	1.507.580.869,00	115,97
41111	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	95.800.618.164,00	119,75
4111101	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	95.800.618.164,00	119,75
41112	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	147.247.075.762,00	217.009.512.295,00	147,38
4111201	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	147.247.075.762,00	217.009.512.295,00	147,38
412	Hasil Retribusi Daerah	17.374.058.827,00	19.851.171.497,00	114,26
41201	Retribusi Jasa Umum	3.100.338.827,00	3.339.310.196,00	107,71
4120101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	942.807.150,00	94,28
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	641.901.204,00	547.959.000,00	85,37
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	246.000.000,00	187.047.000,00	76,04
4120106	Retribusi Pelayanan Pasar	451.650.000,00	578.537.000,00	128,09
4120107	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.587.623,00	212.543.000,00	70,71
4120108	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	73.558.000,00	122,60
4120114	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.200.000,00	796.859.046,00	199,12
41202	Retribusi Jasa Usaha	3.681.860.000,00	3.733.706.725,00	101,41
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.495.040.000,00	3.517.820.900,00	140,99
4120204	Retribusi Terminal	40.740.000,00	42.276.000,00	103,77
4120205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	105.157.900,00	105,16
4120207	Retribusi Rumah Potong Hewan	46.080.000,00	54.760.000,00	118,84
4120208	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.000.000.000,00	13.691.925,00	1,37
41203	Retribusi Perizinan Tertentu	10.591.860.000,00	12.778.154.576,00	120,64
4120301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.560.000.000,00	5.014.091.100,00	109,96
4120304	Retribusi Izin Trayek	31.860.000,00	13.974.000,00	43,86
4120307	Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)	6.000.000.000,00	7.750.089.476,00	129,17
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.414.052.532,00	17.414.087.532,00	100,00
41301	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17.414.052.532,00	17.414.087.532,00	100,00
4130101	Labas PDAM	3.454.966.581,00	3.454.966.581,00	100,00
4130102	Labas PT. PCM	8.017.606.293,00	8.017.641.293,00	100,00
4130103	Labas PT. BPRS	240.898.694,00	240.898.694,00	100,00
4130104	Labas Bank Jabar Banten Cabang Cilegon	5.700.580.964,00	5.700.580.964,00	100,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.042.298.514,00	116.040.420.022,00	98,30
41402	Jasa Giro	900.000.000,00	1.465.310.385,00	162,81
4140201	Jasa Giro Kas Daerah	900.000.000,00	1.465.310.385,00	162,81
41403	Pendapatan Bunga Deposito	12.150.000.000,00	14.920.314.199,00	122,80
4140301	Rekening Deposito pada Bank BJB	12.150.000.000,00	14.920.314.199,00	122,80
41404	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	33.000.000,00	17.359.714,00	81,57
4140402	Kerugian Barang Daerah	33.000.000,00	17.359.714,00	81,57
41406	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.835.953,00	113.947.085,00	125,44
4140601	Bidang Pendidikan	26.894.616,00	26.894.616,00	100,00
4140602	Bidang Kesehatan	16.874.078,00	27.134.678,00	160,81
4140603	Bidang Pekerjaan Umum	47.067.259,00	12.850.532,00	27,30

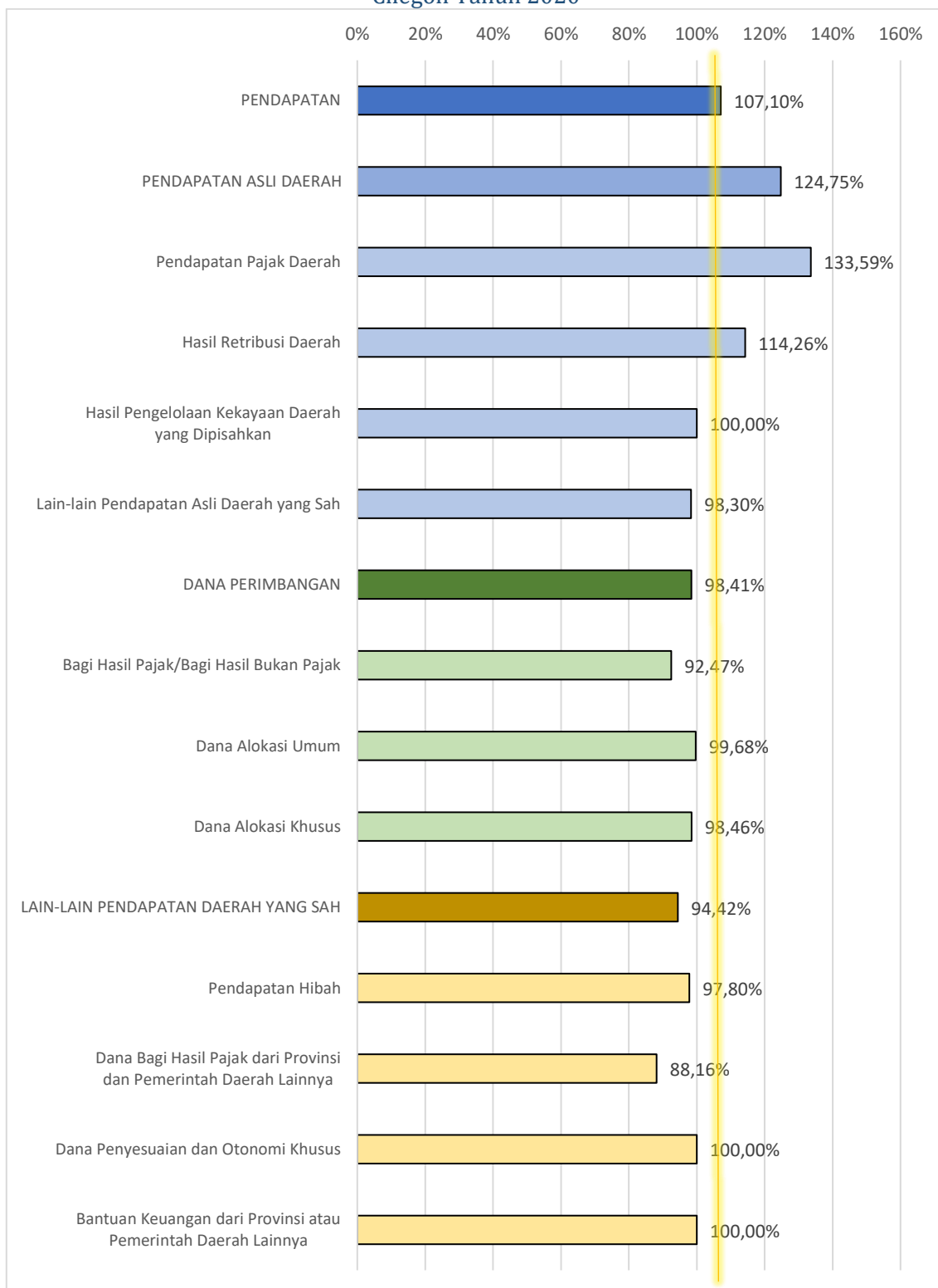
No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
4140604	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	47.067.259,00	#NUM!
41407	Pendapatan Denda Pajak	1.010.170.000,00	1.506.037.239,00	149,09
4140701	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.450.000,00	12.639.342,00	231,91
4140702	Pendapatan Denda Pajak Restoran	40.450.000,00	98.065.291,00	242,44
4140703	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	500.000,00	4.114.549,00	822,91
4140704	Pendapatan Denda Pajak Reklame	60.000.000,00	159.824.393,00	266,37
4140705	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	236.320.000,00	237.267.900,00	100,40
4140706	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	66.000.000,00	66.051.974,00	100,08
4140707	Pendapatan Denda Pajak Parkir	500.000,00	11.226.440,00	2.245,29
4140708	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	950.000,00	1.750.799,00	184,29
4140711	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	600.000.000,00	915.096.551,00	152,52
41408	Pendapatan Denda Retribusi	2.390.120,00	36.568.504,00	1.529,99
4140815	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	27.325.624,00	2.732,56
4140826	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.117.060,00	8.750.060,00	783,31
4140828	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00
4140829	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	273.060,00	492.820,00	180,48
4140832	Pendapatan Denda Retribusi IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing)	0,00	0,00	0,00
41410	Pendapatan Dari Pengembalian	663.621.208,00	1.348.257.550,00	203,17
4141006	Pendapatan dari Pengembalian Temuan	663.621.208,00	1.348.257.550,00	203,17
41416	Pendapatan Sewa	651.558.600,00	729.764.822,00	112,00
4141601	Cicilan Kios	633.558.600,00	707.536.284,00	111,68
4141602	MCK Umum	18.000.000,00	22.228.538,00	123,49
41417	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.720.125.120,00	9.812.450.315,00	77,14
4141701	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon	1.349.536.515,00	1.013.978.551,00	75,14
4141702	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan	2.002.849.834,00	1.614.467.081,00	80,61
4141703	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeber	1.659.500.000,00	1.412.951.261,00	85,14
4141704	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol	838.595.164,00	721.847.465,00	86,08
4141705	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak	1.819.756.292,00	1.422.017.217,00	78,14
4141706	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta	974.006.000,00	849.455.343,00	87,21
4141707	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang	1.520.683.032,00	1.186.969.429,00	78,06
4141708	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil	2.555.198.283,00	1.590.763.968,00	62,26
41418	Pendapatan BLUD	88.620.597.513,00	85.962.939.799,00	97,00
4141801	Pendapatan BLUD - RSUD	85.820.597.513,00	82.881.170.573,00	96,57
4141802	Pendapatan BLUD - PDB	2.800.000.000,00	3.081.769.226,00	110,06
41419	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.200.000.000,00	127.470.410,00	9,83
4141901	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.200.000.000,00	127.470.410,00	9,83
42	DANA PERIMBANGAN	854.469.618.820,00	840.885.118.397,00	98,41
421	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.338.999.820,00	119.602.371.812,00	92,47
42101	Bagi Hasil Pajak	126.842.579.405,00	118.010.340.911,00	93,04
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.999.081.160,00	3.577.541.406,00	89,46
4210103	Bagi Hasil dari Penghasilan(PPh) Ps1 25 dan Ps1 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Ps1 21	122.836.241.245,00	114.429.089.505,00	93,16
4210104	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.257.000,00	3.710.000,00	51,12
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.496.420.415,00	1.592.030.901,00	63,77
4210202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	90.285.863,00	47.446.250,00	52,55
4210210	Dana Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Iuran Tetap	187.268.649,00	133.961.800,00	71,53

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
4210211	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.588.988.903,00	788.276.289,00	49,61
4210212	Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti)	629.877.000,00	622.346.562,00	98,80
422	Dana Alokasi Umum	599.460.814.000,00	597.547.066.000,00	99,68
42201	Dana Alokasi Umum	599.460.814.000,00	597.547.066.000,00	99,68
4220101	Dana Alokasi Umum	599.460.814.000,00	597.547.066.000,00	99,68
423	Dana Alokasi Khusus	125.669.805.000,00	123.735.680.585,00	98,46
42301	Dana Alokasi Khusus (DAK)	125.669.805.000,00	123.735.680.585,00	98,46
4230101	Dana Alokasi Khusus Fisik	35.822.699.000,00	33.837.589.253,00	94,46
4230102	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.847.106.000,00	89.898.091.332,00	100,06
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214.890.890.961,00	202.906.274.153,00	94,42
431	Pendapatan Hibah	43.117.590.421,00	42.170.983.214,00	97,80
43106	Pendapatan Hibah Dana BOS	43.117.590.421,00	42.170.983.214,00	97,80
43106001	Hibah Dana BOS SMPN 1	952.084.217,00	765.593.614,00	80,41
43106002	Hibah Dana BOS SMPN 2	1.587.591.755,00	1.006.332.391,00	63,39
43106003	Hibah Dana BOS SMPN 3	1.148.365.925,00	934.962.215,00	81,42
43106004	Hibah Dana BOS SMPN 4	892.649.977,00	859.320.750,00	96,27
43106005	Hibah Dana BOS SMPN 5	921.441.675,00	919.148.503,00	99,75
43106006	Hibah Dana BOS SMPN 6	834.921.730,00	814.270.044,00	97,53
43106007	Hibah Dana BOS SMPN 7	867.435.051,00	887.663.384,00	102,33
43106008	Hibah Dana BOS SMPN 8	676.604.226,00	641.191.518,00	94,77
43106009	Hibah Dana BOS SMPN 9	601.135.195,00	572.399.074,00	95,22
43106010	Hibah Dana BOS SMPN 10	409.279.100,00	410.104.470,00	100,20
43106011	Hibah Dana BOS SMPN 11	617.081.570,00	619.938.737,00	100,46
43106012	Hibah Dana BOS SDN JANGKAR	224.100.000,00	230.400.000,00	102,81
43106013	Hibah Dana BOS SDN PANGABUAN	186.300.000,00	193.500.000,00	103,86
43106014	Hibah Dana BOS SDN KUBANG SARI II	325.800.000,00	339.660.000,00	104,25
43106015	Hibah Dana BOS SDN PEMATANG KEPUH	110.700.000,00	113.850.000,00	102,85
43106016	Hibah Dana BOS SDN SERANG ILIR	278.100.000,00	279.990.000,00	100,68
43106017	Hibah Dana BOS SDN KARANG SETRA	154.800.000,00	148.620.705,00	96,01
43106018	Hibah Dana BOS SDN KEPUH	175.500.000,00	164.160.000,00	93,54
43106019	Hibah Dana BOS SDN KUBANG SARI I	243.900.000,00	240.750.000,00	98,71
43106020	Hibah Dana BOS SDN TEMUGIRING	294.300.000,00	294.930.000,00	100,21
43106021	Hibah Dana BOS SDN TEGAL RATU	226.800.000,00	231.840.000,00	102,22
43106022	Hibah Dana BOS SDN TEGAL KIDONGDONG	197.100.000,00	198.990.000,00	100,96
43106023	Hibah Dana BOS SDN CIWANDAN	255.600.000,00	253.710.000,00	99,26
43106024	Hibah Dana BOS SDN CIPAOT CIWANDAN	201.600.000,00	194.052.967,00	96,26
43106025	Hibah Dana BOS SDN GUNUNG SUGIH	180.900.000,00	188.460.000,00	104,18
43106026	Hibah Dana BOS SDN BOJONG BARU	373.500.000,00	370.662.672,00	99,24
43106027	Hibah Dana BOS SDN BELUMBANG	341.100.000,00	353.790.000,00	103,72
43106028	Hibah Dana BOS SDN BANJAR NEGARA	140.400.000,00	146.970.000,00	104,68
43106029	Hibah Dana BOS SDN CIGEBLAG	289.800.000,00	283.500.000,00	97,83
43106030	Hibah Dana BOS SDN CILODAN	147.600.000,00	169.650.000,00	114,94
43106031	Hibah Dana BOS SDN MERAK	191.700.000,00	187.687.260,00	97,91
43106032	Hibah Dana BOS SDN MEKARSARI	200.700.000,00	193.821.938,00	96,57
43106033	Hibah Dana BOS SDN LEBAK GEDE	161.100.000,00	157.950.000,00	98,04
43106034	Hibah Dana BOS SDN LANGON	157.500.000,00	151.247.884,00	96,03
43106035	Hibah Dana BOS SDN SUKAJADI	179.100.000,00	181.260.000,00	101,21
43106036	Hibah Dana BOS SDN PRINGORI	120.600.000,00	120.690.000,00	100,07
43106037	Hibah Dana BOS SDN SURALAYA	224.100.000,00	208.481.389,00	93,03
43106038	Hibah Dana BOS SDN KAHAL	203.400.000,00	209.430.000,00	102,96
43106039	Hibah Dana BOS SDN TEMBULUN	161.100.000,00	151.650.000,00	94,13
43106040	Hibah Dana BOS SDN TANJUNG SEKONG	136.800.000,00	141.576.333,00	103,49
43106041	Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI V	216.000.000,00	223.560.000,00	103,50
43106042	Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI IV	147.600.000,00	153.360.000,00	103,90
43106043	Hibah Dana BOS SDN TAMANSARI III	173.700.000,00	180.630.000,00	103,99
43106044	Hibah Dana BOS SDN TAMANSARI II	139.500.000,00	137.672.267,00	98,69
43106045	Hibah Dana BOS SDN WIDIYATAMA	207.000.000,00	209.520.000,00	101,22
43106046	Hibah Dana BOS SDN WILULANG	300.600.000,00	285.750.000,00	95,06
43106047	Hibah Dana BOS SDN TAMAN SARI I	242.100.000,00	247.050.000,00	102,04
43106048	Hibah Dana BOS SDN CIPALA	116.100.000,00	117.360.000,00	101,09
43106049	Hibah Dana BOS SDN GUNUNG BATUR	80.100.000,00	80.730.000,00	100,79

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
43106050	Hibah Dana BOS SDN FLORIDA	173.700.000,00	169.304.133,00	97,47
43106051	Hibah Dana BOS SDN BABAKAN TURI	322.200.000,00	308.349.133,00	95,70
43106052	Hibah Dana BOS SDN BUMI WARAS	299.700.000,00	296.280.000,00	98,86
43106053	Hibah Dana BOS SDN TEMBULUN II	63.900.000,00	66.028.096,00	103,33
43106054	Hibah Dana BOS SDN LEBAK GEBANG	109.800.000,00	110.070.000,00	100,25
43106055	Hibah Dana BOS SDN KETILENG III	168.300.000,00	175.140.000,00	104,06
43106056	Hibah Dana BOS SDN KETILENG II	212.400.000,00	215.820.000,00	101,61
43106057	Hibah Dana BOS SDN KETILENG I	201.600.000,00	218.520.000,00	108,39
43106058	Hibah Dana BOS SDN CIWADUK	296.100.000,00	304.920.000,00	102,98
43106059	Hibah Dana BOS SDN CIPAOT	270.900.000,00	261.594.472,00	96,56
43106060	Hibah Dana BOS SDN CILEGON VI	150.300.000,00	150.840.000,00	100,36
43106061	Hibah Dana BOS SDN CIWEDUS I	197.100.000,00	191.430.000,00	97,12
43106062	Hibah Dana BOS SDN CIWEDUS II	195.300.000,00	178.920.000,00	91,61
43106063	Hibah Dana BOS SDN BLOK I	522.000.000,00	514.440.000,00	98,55
43106064	Hibah Dana BOS SDN BENDUNGAN II	290.700.000,00	290.070.000,00	99,78
43106065	Hibah Dana BOS SDN BENDUNGAN I	179.100.000,00	188.820.000,00	105,43
43106066	Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN I	499.500.000,00	516.510.000,00	103,41
43106067	Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN IV	619.200.000,00	646.920.000,00	104,48
43106068	Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN III	165.600.000,00	151.740.000,00	91,63
43106069	Hibah Dana BOS SDN KEDALEMAN II	154.800.000,00	153.450.000,00	99,13
43106070	Hibah Dana BOS SDN KALITIMBANG I	108.900.000,00	112.050.000,00	102,89
43106071	Hibah Dana BOS SDN KEROTEK	138.600.000,00	131.310.000,00	94,74
43106072	Hibah Dana BOS SDN JERANG ILIR	185.400.000,00	192.330.000,00	103,74
43106073	Hibah Dana BOS SDN JERANG BARAT	281.700.000,00	272.250.000,00	96,65
43106074	Hibah Dana BOS SDN BULAKAN I	180.900.000,00	179.010.000,00	98,96
43106075	Hibah Dana BOS SDN BULAKAN II	225.000.000,00	220.640.001,00	98,06
43106076	Hibah Dana BOS SDN CIKERUT	253.800.000,00	254.700.000,00	100,35
43106077	Hibah Dana BOS SDN CIKERAI II	189.000.000,00	189.180.000,00	100,10
43106078	Hibah Dana BOS SDN CIKERAI I	171.000.000,00	165.967.907,00	97,06
43106079	Hibah Dana BOS SDN BULAKAN III	147.600.000,00	146.970.000,00	99,57
43106080	Hibah Dana BOS SDN CIBEER I	229.500.000,00	220.410.000,00	96,04
43106081	Hibah Dana BOS SDN CIBEER II	240.300.000,00	249.660.000,00	103,90
43106082	Hibah Dana BOS SDN CIBEER III	426.600.000,00	426.870.000,00	100,06
43106083	Hibah Dana BOS SDN KALITIMBANG II	164.700.000,00	167.850.000,00	101,91
43106084	Hibah Dana BOS SDN SUMURWULUH	142.200.000,00	140.674.300,00	98,93
43106085	Hibah Dana BOS SDN KAMPUNG BARU	220.500.000,00	230.580.000,00	104,57
43106086	Hibah Dana BOS SDN KOTASARI	218.700.000,00	223.981.474,00	102,41
43106087	Hibah Dana BOS SDN TEGAL WANGI	177.300.000,00	178.020.000,00	100,41
43106088	Hibah Dana BOS SDN CIORA	199.800.000,00	200.740.140,00	100,47
43106089	Hibah Dana BOS SDN PABUARAN	190.800.000,00	189.810.000,00	99,48
43106090	Hibah Dana BOS SDN GROGOL II	244.800.000,00	242.280.000,00	98,97
43106091	Hibah Dana BOS SDN GROGOL I	281.700.000,00	279.865.800,00	99,35
43106092	Hibah Dana BOS SDN GEREM III	143.100.000,00	141.120.000,00	98,62
43106093	Hibah Dana BOS SDN GEREM II	154.800.000,00	155.430.000,00	100,41
43106094	Hibah Dana BOS SDN GEREM I	210.600.000,00	209.340.000,00	99,40
43106095	Hibah Dana BOS SDN BUJANGGADUNG	410.400.000,00	401.926.648,00	97,94
43106096	Hibah Dana BOS SDN CIKUASA II	180.900.000,00	177.120.000,00	97,91
43106097	Hibah Dana BOS SDN CIKUASA I	142.200.000,00	147.890.040,00	104,00
43106098	Hibah Dana BOS SDN PABEAN	104.400.000,00	104.400.000,00	100,00
43106099	Hibah Dana BOS SDN PASAR BUNDER	225.900.000,00	217.350.000,00	96,22
43106100	Hibah Dana BOS SDN PECINAN	95.400.000,00	85.320.000,00	89,43
43106101	Hibah Dana BOS SDN SUMAMPIR	361.800.000,00	366.961.441,00	101,43
43106102	Hibah Dana BOS SDN SIMPANG TIGA	302.400.000,00	319.410.000,00	105,62
43106103	Hibah Dana BOS SDN RAMANUJU	175.500.000,00	191.250.000,00	108,97
43106104	Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA II	118.800.000,00	118.800.000,00	100,00
43106105	Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA I	315.900.000,00	315.270.000,00	99,80
43106106	Hibah Dana BOS SDN PURWAKARTA	168.300.000,00	173.340.000,00	102,99
43106107	Hibah Dana BOS SDN KENANGA	123.300.000,00	128.970.000,00	104,60
43106108	Hibah Dana BOS SDN KEBON DALEM	297.000.000,00	304.200.000,00	102,42
43106109	Hibah Dana BOS SDN KUBANG KUTU II	245.700.000,00	246.960.000,00	100,51
43106110	Hibah Dana BOS SDN KUBANGKUTU I	192.000.000,00	192.870.000,00	100,45
43106111	Hibah Dana BOS SDN KUBANG KALAK	153.900.000,00	158.501.433,00	102,99
43106112	Hibah Dana BOS SDN KOTA BUMI	188.100.000,00	189.000.000,00	100,48
43106113	Hibah Dana BOS SDN BLACU	165.600.000,00	165.600.000,00	100,00
43106114	Hibah Dana BOS SDN PANGGUNG RAWI	180.000.000,00	181.890.000,00	101,05
43106115	Hibah Dana BOS SDN MASIGIT III	39.600.000,00	42.750.000,00	107,95

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
43106116	Hibah Dana BOS SDN MASIGIT II	211.500.000,00	204.570.000,00	96,72
43106117	Hibah Dana BOS SDN SUKMAJAYA II	148.500.000,00	154.180.645,00	103,83
43106118	Hibah Dana BOS SDN SUKMAJAYA I	139.500.000,00	136.913.187,00	98,15
43106119	Hibah Dana BOS SDN KEPENDILAN	196.200.000,00	192.870.000,00	98,30
43106120	Hibah Dana BOS SDN KERANGGOT	286.200.000,00	304.290.000,00	106,32
43106121	Hibah Dana BOS SDN KUBANG LABAN	286.200.000,00	281.790.000,00	98,46
43106122	Hibah Dana BOS SDN MASIGIT I	252.900.000,00	237.155.055,00	93,77
43106123	Hibah Dana BOS SDN CILEGON XII	211.500.000,00	212.760.000,00	100,60
43106124	Hibah Dana BOS SDN CILEGON XI	301.500.000,00	312.543.760,00	103,66
43106125	Hibah Dana BOS SDN CILEGON X	154.800.000,00	159.210.000,00	102,85
43106126	Hibah Dana BOS SDN CILEGON VIII	104.400.000,00	101.250.000,00	96,98
43106127	Hibah Dana BOS SDN CILEGON VII	117.900.000,00	119.160.000,00	101,07
43106128	Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM III	157.500.000,00	157.961.694,00	100,29
43106129	Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM II	204.300.000,00	202.607.679,00	99,17
43106130	Hibah Dana BOS SDN GEDONG DALEM I	128.700.000,00	130.429.100,00	101,34
43106131	Hibah Dana BOS SDN CILEGON V	218.700.000,00	225.769.384,00	103,23
43106132	Hibah Dana BOS SDN CILEGON IX	291.600.000,00	290.700.000,00	99,69
43106133	Hibah Dana BOS SDN BLOK C	268.200.000,00	265.303.128,00	98,92
43106134	Hibah Dana BOS SDN CILEGON IV	422.100.000,00	436.148.023,00	103,33
43106135	Hibah Dana BOS SDN CILEGON III	306.000.000,00	311.580.000,00	101,82
43106136	Hibah Dana BOS SDN CILEGON II	552.600.000,00	552.720.666,00	100,02
43106137	Hibah Dana BOS SDN CILEGON I	398.700.000,00	418.483.288,00	104,96
43106138	Hibah Dana BOS SDN PEKALONGAN I	147.600.000,00	144.720.000,00	98,05
43106139	Hibah Dana BOS SDN PEKALONGAN II	267.300.000,00	250.020.000,00	93,54
43106140	Hibah Dana BOS SDN SAMANGRAYA II	459.000.000,00	449.910.000,00	98,02
43106141	Hibah Dana BOS SDN SAMANGRAYA I	301.500.000,00	293.670.000,00	97,40
43106142	Hibah Dana BOS SDN KUBANG SEPAT II	341.100.000,00	359.993.600,00	105,54
43106143	Hibah Dana BOS SDN KUBANG SEPAT I	451.800.000,00	466.920.000,00	103,35
43106144	Hibah Dana BOS SDN KEPUH DENOK	248.400.000,00	244.890.000,00	98,59
43106145	Hibah Dana BOS SDN KELELET	240.300.000,00	249.120.000,00	103,67
43106146	Hibah Dana BOS SDN KEBONSARI II	301.500.000,00	290.250.000,00	96,27
43106147	Hibah Dana BOS SDN KEBONSARI I	291.600.000,00	293.130.000,00	100,52
43106148	Hibah Dana BOS SDN KUBANG LESUNG	190.800.000,00	188.280.000,00	98,68
43106149	Hibah Dana BOS SDN KUBANG LESUNG KULON	96.300.000,00	86.220.000,00	89,53
43106150	Hibah Dana BOS SDN KRENCENG II	147.600.000,00	148.230.000,00	100,43
43106151	Hibah Dana BOS SDN KRENCENG I	328.500.000,00	337.500.000,00	102,74
43106152	Hibah Dana BOS SDN TAMAN BARU II	226.800.000,00	217.350.000,00	95,83
43106153	Hibah Dana BOS SDN WARNASARI	327.600.000,00	338.040.000,00	103,19
43106154	Hibah Dana BOS SDN WALIKUKUN	120.600.000,00	126.900.000,00	105,22
43106155	Hibah Dana BOS SDN TEMIANG	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
43106156	Hibah Dana BOS SDN TEGAL CABE	261.900.000,00	272.610.000,00	104,09
43106157	Hibah Dana BOS SDN TAMAN BARU I	153.000.000,00	145.800.000,00	95,29
43106158	Hibah Dana BOS SDN CITANGKIL BARU	113.400.000,00	115.830.000,00	102,14
43106159	Hibah Dana BOS SDN CIRIU	398.700.000,00	395.550.000,00	99,21
43106160	Hibah Dana BOS SDN DELINGSENG	449.100.000,00	450.000.000,00	100,20
43106161	Hibah Dana BOS SDN DERINGO	201.600.000,00	198.450.000,00	98,44
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	93.188.773.540,00	82.150.763.939,00	88,16
43301	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	93.188.773.540,00	82.150.763.939,00	88,16
4330101	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.735.412.662,00	20.203.591.823,00	92,95
4330103	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.251.412.501,00	11.735.695.424,00	76,95
4330105	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.827.868.171,00	28.359.754.094,00	79,16
4330108	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	20.374.080.206,00	21.851.722.598,00	107,25
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.584.527.000,00	33.584.527.000,00	100,00
43401	Dana Penyesuaian	33.584.527.000,00	33.584.527.000,00	100,00
4340103	Dana Insentif Daerah	33.584.527.000,00	33.584.527.000,00	100,00
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
43501	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
4350101	Bantuan keuangan dari Provinsi Banten	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00

Gambar 1.56 Diagram Persentase Capaian Realisasi Komponen Pendapatan daerah Kota Cilegon Tahun 2020

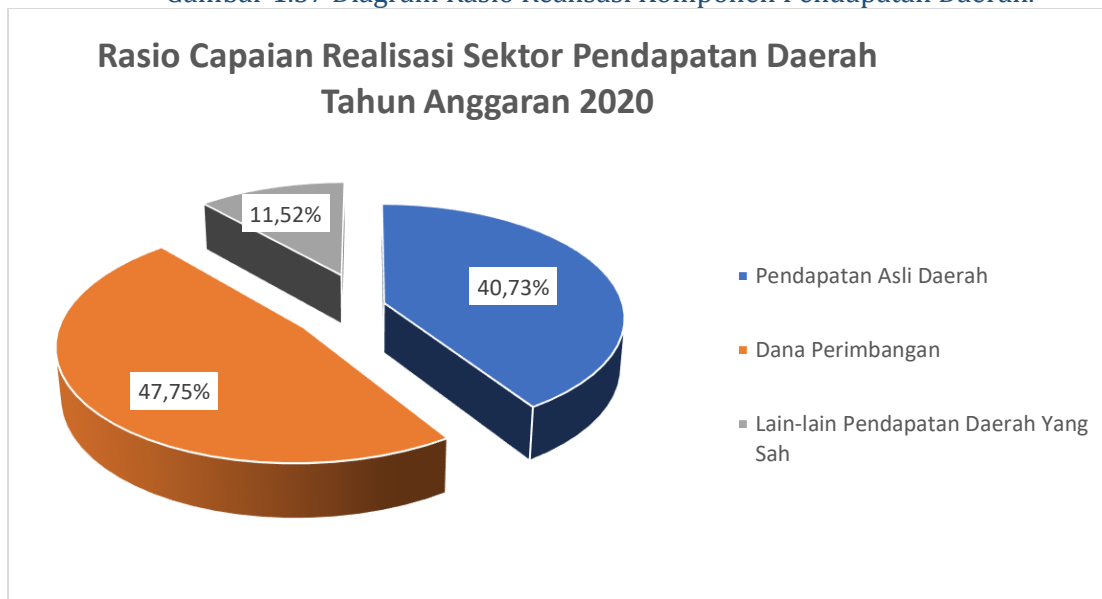


Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

1.5.1.3 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Komposisi Penerimaan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2020 meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan komposisi mencapai 40,73%, Dana Perimbangan memberikan komposisi sebesar 47,75%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya memberikan komposisi sebesar 11,52%. Dengan kata lain PAD Kota Cilegon memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi penerimaan Kota Cilegon, sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari Dana Alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, Dana Alokasi dari Pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi kebutuhan pengeluaran pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberian kewenangan sesuai Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga kemandirian pembiayaan dapat tercipta oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Gambar 1.57 Diagram Rasio Realisasi Komponen Pendapatan Daerah.



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Untuk menjaga keseimbangan belanja penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan prioritas pemerintah Kota Cilegon yang dibebankan kepada Pendapatan Asli Daerah, maka diupayakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan berbagai strategi baik peningkatan kinerja pemungutan, peningkatan pelayanan publik, penyederhanaan mekanisme, peningkatan/ penambahan objek/subjek Pajak dan Retribusi Daerah, peningkatan daya investasi, meningkatkan pendanaan penyertaan modal BUMD, dan mengurangi resiko pengembalian/temuan. Secara rinci Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Pelaksanaan intensifikasi Pajak Daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah. dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pajak Hotel : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (*tapping box*) pada beberapa hotel.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
2. Pajak Restoran : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang menunggak.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (*tapping box*) pada beberapa wajib restoran /rumah makan.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak restoran.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
3. Pajak Hiburan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Hiburan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (*tapping box*) pada beberapa Wajib Pajak Hiburan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
4. Pajak Reklame : Melakukan penagihan pada media-media reklame yang telah masuk jatuh tempo.
5. Pajak Penerangan Jalan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan : Pelaksanaan intensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunggak.

- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 7. Pajak Parkir Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Parkir dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.
 - Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi (*tapping box*).
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 8. Pajak Air Tanah Pelaksanaan intensifikasi dari pajak Air Tanah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu:
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak Air Tanah.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak Air Tanah.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak Air Tanah yang menunggak.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
- 9. BPHTB BPKAD Kota Cilegon melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak.
- 10. PBB Pelaksanaan intensifikasi dari pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Melakukan penagihan aktif pada wajib-wajib pajak yang menunggak
 - Melakukan penilaian individual objek subjek PBB di wilayah Kota Cilegon
 - Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak secara langsung.
 - Memberikan penghargaan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kegiatan bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - Melakukan pendataan dan pemutakhiran masal PBB.
 - Melakukan pelayanan PBB keliling di tingkat Kelurahan.
 - Melakukan penyesuaian NJOP

2. Intensifikasi Retribusi Daerah

Adapun rincian intensifikasi yang dilakukan per objek Retribusi Daerah diantaranya sebagai berikut :

2.1 Intensifikasi Retribusi Jasa Umum

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Umum meliputi :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan khususnya pada UPTD Puskesmas sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan secara baik dan optimal, melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penanganan Pandemi Covid 19, menyediakan fasilitas pelayanan pasien pandemi covid 19, penambahan 1 puskesmas dan melaksanakan akreditasi puskesmas pada wilayah Cibeber.

2. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pelayanan Persampahan** yang telah dilaksanakan dengan menambah armada pengangkut dalam 3 tahun terakhir dapat melayani masyarakat secara luas, menambah ritasi pengangkutan, dan memberikan pembinaan dan motivasi kepada petugas kolektor.
3. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum** oleh **Dinas Perhubungan** adalah Menyusun mekanisme pemungutan dan zona titik pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutan, dan melaksanakan monitoring para jukir dan lokasi parkir.
4. Upaya intensifikasi terkait pengelolaan **Retribusi Pelayanan Pasar** baik yang dikelola oleh **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** maupun **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** meliputi :
 - a. Dalam hal pengelolaan **Retribusi Pasar Hewan** melaksanakan sosialisasi dan penjemputan atas pelayanan pasar hewan dan peningkatan kebersihan sarana dan prasarana pendukung pemungutan retribusi pasar hewan.
 - b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Cilegon dalam pengelolaan pendapatan melakukan pembinaan kepada petugas kolektor, merevitalisasi manajemen pengelolaan pasar dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pasar, dan kerjasama dengan Dinas terkait terhadap pedagang emprakan dan yang tidak menggunakan tempat sesuai dengan peruntukannya.
5. Pelaksanaan intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor** pada **Dinas Perhubungan** berupaya meningkatkan kegiatan pelayanan PKB kepada Konsumen atau masyarakat umum, Dinas Perhubungan Kota Cilegon pada tahun 2020 melakukan perubahan dan perbaikan baik sarana dan prasarana guna mendekatkan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, beberapa perubahan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dan penerapan Aplikasi SIM PKB (*Smart Card*).
 - b. Pembuatan ruang tunggu atau ruangan pelayanan uji KIR.
 - c. Peningkatan sarana pada ruang PKB.
6. Pelaksanaan intensifikasi yang dilaksanakan oleh **Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan** dalam hal pemungutan **Retribusi APAR** diantaranya :
 - a. Terlaksannya evaluasi/revisi PERDA Nomor 08 Tahun 2014 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran menjadi PERDA Nomor 02 Tahun 2020 dengan sumber pembiayaan mandiri;
 - b. Terlaksannya Evaluasi / Revisi PERWAL 30 tahun 2014 menjadi Perwal 70 Tahun 2020 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dengan sumber pembiayaan mandiri;
 - c. Belum terakomodirnya alokasi anggaran untuk sosialisasi dan implementasi Perda dan Perwal tersebut;
 - d. Terakomodirnya pembiayaan pengadaan peralatan pemeriksaan yang memadai;
 - e. Terlaksannya penambahan / pengadaan personil pegawai teknis pemeriksaan (namun belum mendapatkan bimbingan teknis).
7. Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengelolaan **Retribusi Tera / Tera Ulang** adalah melaksanakan optimalisasi pemeriksaan alat timbang, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

peralihan pemungutan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah, dan melaksanakan sosialisasi kepada wajib retribusi tentang wajib melaksanakan tera atau tera ulang di wilayah Kota Cilegon

2.2 Intensifikasi Retribusi Jasa Usaha

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Jasa Usaha meliputi :

1. Upaya intensifikasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh OPD sebagai berikut :
 - a. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** dengan upaya meningkatkan pemeliharaan alat berat, menjaga kondisi alat yang usia sudah tua dengan tidak memforsir kegunaan alat namun tetap mengoptimalkan alat yang tersedia, mengajukan penambahan alat berat yang dapat meningkatkan pemungutan retribusi, dan mengoptimalkan dan menyesuaikan jadwal SDM yang terlatih dalam pengoprasian alat berat dimasa Pandemi Covid 19, menjaga alat berat yang dimiliki selalu dalam keadaan baik dengan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala sehingga ketika ada yang menyewa alat dalam keadaan siap..
 - b. **BPKAD** dalam mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan upaya sebagai berikut:
 1. Menginventarisir Aset Pemerintah Daerah baik aset tetap dan lainnya;
 2. Mengoptimalkan upaya penerapan Peraturan Walikota terkait pemungutan retribusi Pemakaian kekayaan daerah;
 3. Mengembangkan Sistem Pembayaran Online, untuk mempermudah pembayaran retribusi pada Wajib Retribusi.
2. Upaya intensifikasi dalam hal pemungutan **Retribusi Terminal** pada Dinas Perhubungan telah berupaya :
 - a. Sosialisasi Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2020;
 - b. Melengkapi fasilitas pendukung di Terminal Seruni, mulai dari renovasi gedung dan pemasangan rambu-rambu untuk memperlancar arus lalu lintas dari dan ke Terminal Seruni;
 - c. Pendekatan secara persuasif khususnya kepada pengguna jasa sewa lahan, pengemudi, angkutan kota, bis dan Taksi tentang pentingnya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal di Terminal Seruni terhadap pengguna jasa lainnya.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya pada **UPT RPH (Rumah Potong Hewan)** Ruminasi (sapi/kerbau) dengan upaya persuasif menjemput pengguna jasa, selama ini masih terus dilakukan guna menciptakan hubungan yang baik dengan pengguna jasa, baik itu dari pengguna jasa pelayanan pemotongan dan pelayanan pasar hewan. Meningkatkan kenyamanan, kualitas pelayanan dan kelayakan Tempat Potong Hewan yang dimiliki Kota Cilegon.
4. Intensifikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam hal pemungutan Retribusi Kepelabuhanan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah mengingat objek masih bersifat multi tafsir.

2.3 Intensifikasi Retribusi Perizinan Tertentu

Intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon khususnya pada sektor Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan **Retribusi IMB** adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon.
- b. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan atas pemungutan **Retribusi Izin Trayek** dapat dilakukan apabila kita menambah jumlah angkutan umum dan memperluas jalur pelayanan trayek.
- c. **Retribusi IMTA** : Pelaksanaan Intensifikasi Disnaker melakukan monitoring terhadap perusahaan pengguna TKA terkait lokasi kerja yang belum merubah lokasi kerja. Kita menekankan kepada perusahaan agar merubah lokasi kerjanya hanya Cilegon jika memang TKA tersebut hanya bekerja di Cilegon. Agar pada saat perpanjangan otomatis dilakukan dan masuk dana DPKK nya ke PAD Kota Cilegon, melaksanakan pembinaan dan peningkatan SDM pengawas dalam pemeriksaan Tenaga Kerja Asing di wilayah Cilegon.

3. Intensifikasi Perusahaan Milik Daerah

1. Langkah dan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bank BJB Cab. Cilegon dalam rangka pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya memfasilitasi atas tercapainya pemungutan retribusi berbasis online, peningkatan layanan dan jaringan untuk melayani pembayaran Pajak Daerah dengan menyiapkan jaringan kantor yang mempermudah wajib pajak/wajib retribusi diantaranya :
 - 1 (satu) kantor cabang.
 - 2 (dua) kantor cabang pembantu.
 - 7 (tujuh) kantor kas.
 - 5 (lima) payment point di kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pajak Daerah.
 - 1 (satu) unit mobil edukasi.
 - 53 (lima puluh tiga) mesin ATM.
 - Internet Banking (Bjb Digi) dan internet banking corporate (IBC).
 - Penempatan elektroik data capture (EDC) untuk peningkatan pelayanan di RSUD.
 - Pembayaran pajak melalui gerai modern (Indomaret) dan E- Commerce (Traveloka, Bukalapak dan Tokopedia)
 - Memfasilitasi pembayaran BPHTB on-line.
 - Pemungutan Retribusi melalui E-Retribusi.
 - Rencana perluasan penerimaan pembayaran pajak daerah melalui pihak ketiga yakni shopeepay, Link-aja, Go-Bills, Blibli, dan QRSI.
2. Intensifikasi yang dilakukan oleh **PT PCM** meliputi memberikan pelayanan jasa penyandaran kapal yang tepat waktu, handal dan aman, serta meminimalisir keluhan pelanggan secara objektif sekaligus penyelesaian keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat.
3. Intensifikasi yang dilakukan oleh **Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM** meliputi meminimalisir kolektibilitas pembiayaan bermasalah, melakukan sosialisasi, kerjasama dan promosi kepada pemerintah, BUMD, swasta (usaha besar, menengah, usaha kecil), lembaga kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di wilayah Cilegon, dan mengadakan jasa pembiayaan individu yang lebih kompetitif untuk pegawai negeri maupun pegawai swasta.

4. **Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri** dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor Laba PDAM Kota Cilegon melaksanakan upaya intensifikasi berupa menjual air kepada masyarakat dengan menambah jaringan pipa dan menambah pemasangan pelanggan baru.

4. Intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Intensifikasi yang dilakukan RSUD diantaranya meningkatkan jumlah kunjungan pasien dengan upaya :
 - a. Menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mengurangi keraguan pasien untuk berkunjung selama pandemi Covid-19, yaitu:
 - b. Menyiapkan tempat cuci tangan dan *Handsanitizer* di beberapa tempat strategis ;
 - c. Menerapkan *physical distancing* atau pembatasan jarak fisik;
 - d. Petugas garda terdepan selalu mengenakan APD.
 - e. Melaksanakan proses screening atau verifikasi pasien yang berkunjung selama masa pandemi ;
 - f. Meningkatkan pelayanan pasien dengan menyediakan fasilitas *Healing Garden* untuk sarana relaksasi pasien ;
 - g. Meningkatkan fasilitas layanan Radiologi terutama untuk alat CT Scan dan alat rontgen thorak;
 - h. Meningkatkan fasilitas ruang rawat inap VIP ;
 - i. Meningkatkan jaringan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan UPN Veteran.
2. Intensifikasi pada **BLUD Pemerintah** dalam hal ini dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil adalah meningkatkan penagihan kepada Mitra Binaan, melakukan pendampingan kepada Mitra Binaan, dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pada Pendamping Kelurahan.
3. Mengurangi tingkat realisasi penerimaan dari sektor pendapatan denda pajak dan retribusi dengan melaksanakan sosialisasi, himbauan atas kewajiban membayar pajak dan retribusi, tepat pada waktunya, dan melaksanakan amnesti pajak daerah.
4. Intensifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pengembalian temuan adalah meningkatkan sistem pengendalian, dan pengawasan atas serapan belanja daerah.
5. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung pelayanan pada 8 unit UPT Puskesmas, menambahkan 1 pelayanan unit UPT Puskesmas di Kota Cilegon dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait alokasi JKN tahun anggaran 2020 serta penerapan pelayanan pasien Covid 19.

B. Intensifikasi Dana Perimbangan Tahun 2020

Secara garis besar penerimaan Dana Perimbangan dipengaruhi dari alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kota Cilegon sesuai dengan ketentuan. Namun Pemerintah Daerah senantiasa melaksanakan upaya-upaya peningkatan yang komprehensif dan berkala dengan melaksanakan rekonsiliasi data dengan kementerian terkait, dalam penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditentukan, melaksanakan konsultasi atas piutang capaian alokasi transfer lebih bayar maupun kurang bayar oleh Pemerintah Pusat, dan melakukan penyesuaian atas pagu anggaran target pendapatan dari sektor transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk Kota Cilegon.

Adapun intensifikasi sesuai dengan komposisi alokasi Dana Perimbangan sebagai berikut:

1. Intensifikasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1.1 Bagi Hasil Pajak Pusat

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2020.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2020.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan.

1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

- Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2020.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran 2020.
- Penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kantor Pengelolaan Kas Negara (KPN) dalam rangka penyesuaian penerimaan pendapatan.

2. Intensifikasi Dana Alokasi Umum (DAU)

- Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data pada Kementerian Keuangan RI terkait Dana Alokasi Umum (DAU) secara periodik, dan melaksanakan penyerapan DAU sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- Melaksanakan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Intensifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

- Melaksanakan penyampaian pelaporan penyerapan DAK tepat waktu, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait juknis/juklak penyerapan DAK periode tahun 2020.

- Melaksanakan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
- Melaksanakan Penyesuaian pagu anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana cadangan alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

C. Intensifikasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020

Secara umum upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pada penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah

- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Hibah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan
- Melaksanakan penyesuaian target alokasi anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten.
- Melaksanakan kebijakan atas pencairan/transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

Berdasarkan Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

- Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan berupaya melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi dengan sekolah-sekolah yang penerima dana BOS di Wilayah Kota Cilegon, dan Melaksanakan penyesuaian Pagu sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten serta penyesuaian pengenaan tarif BOS baik untuk SD dan SMP.

2. Bagi Hasil Pajak Provinsi

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten..
- Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data dengan Provinsi Banten dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor Bagi Hasil Dari PKB, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok yang dilaksanakan rutin setiap periodik.

3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Penyesuaian atas Pagu anggaran Pendapatan sektor Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Insentif Daerah) sesuai dengan rincian alokasi TKDD tahun anggaran 2020. meningkatkan koordinasi terkait alokasi DID Tambahan, Serta melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4. Bantuan Keuangan Provinsi Banten

- Melaksanakan kesesuaian target pendapatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini koordinasi dengan Bappenda Provinsi berkaitan dengan penetapan target alokasi anggaran tahun 2020,

dan alokasi penyerapan/penerimaan atas bantuan keuangan Provinsi Banten secara periodik dengan menerapkan Protokoler Kesehatan.

D. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

1. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Ekstensifikasi merupakan upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan dan/atau penambahan obyek dan subyek sumber-sumber pendapatan, dan perubahan atas regulasi/tata cara pemungutan/mechanisme pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah:

1.1 Pajak Daerah

Pelaksanaan eksternal dilakukan oleh BPKAD terhadap objek pajak yang belum menjadi wajib pajak adalah dengan :

- a) Ekstensifikasi dari beberapa Jenis Pajak diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah adalah dengan melaksanakan pendataan pada objek-objek Pajak Daerah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
- b) Pada jenis Pajak Reklame upaya ekstensifikasi dengan melakukan pendataan reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.
- c) Pada sektor BPHTB mencari informasi pada pihak lain terkait potensi hal yang terjadi di kota Cilegon, dan
- d) Pada sektor PBB melakukan Updating data PBB-P2 sehingga apabila terjadi mutasi sebagian atas suatu bidang tanah, maka akan menambah jumlah wajib pajak PBB-P2.

1.2 Retribusi Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon telah berupaya untuk dapat mengintegrasikan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1.2.1 Retribusi Jasa Umum, meliputi ;

1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sebagai petunjuk untuk pelayanan kesehatan agar lebih baik.
2. Ekstensifikasi sektor Retribusi Pelayanan Persampahan dengan memberikan penghargaan kepada Wajib Retribusi yang taat membayar yang dilakukan secara periodik satu tahun sekali, menyediakan fasilitas berupa TPS Container bagi warga yang membutuhkan, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan pentingnya membayar kewajiban retribusi kebersihan.
3. Ekstensifikasi sektor Parkir Tepi Jalan Umum yang dikelola Dinas Perhubungan adalah mensurvei lokasi titik parkir baru, dan mendata para jukir baru dan menerbitkan SPTP.
4. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan upaya melakukan relokasi pedagang untuk masuk ke pasar yang sudah tersedia agar dapat dilakukan pungutan retribusi terhadap mereka dan dilakukan sosialisasi tentang retribusi daerah kepada para pedagang pasar. Melanjutkan MOU antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Kejaksaan Negeri Cilegon sampai dengan Tahun 2021.

5. Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan perluasan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor guna memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2020 ini Dinas Perhubungan Kota Cilegon akan membangun ruangan tunggu atau ruangan pelayanan terpadu uji KIR kendaraan bermotor.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan dalam pembenahan dan peningkatan capaian penerimaan retribusi pelayanan APAR diantaranya:
 - a. Menjalin koordinasi dengan Dinas terkait dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cilegon;
 - b. Berkoordinasi dengan pihak OPD terkait mengenai dukungan anggaran;
 - c. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Cilegon tentang kebutuhan tenaga teknis;
 - d. Melaksanakan Pendataan bangunan gedung untuk bahan evaluasi selanjutnya;
 - e. Mensosialisasikan bahwa pentingnya pemenuhan standar keselamatan kebakaran bangunan gedung sesuai perundang-undangan berlaku.

1.2.2 Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan meyakinkan pihak ketiga (penyewa) bahwa alat berat yang dimiliki UPTD Perlengkapan, perbengkelan dan laboratorium tidak kalah dengan yang dimiliki swasta.
2. **BPKAD** dalam hal pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah melaksanakan upaya ekstensifikasi berupa :
 - a) Kajian untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan aset Pemerintah Kota Cilegon dengan ketentuan zonasi wilayah
 - b) Promosi untuk meningkatkan daya investasi agar aset yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor.
3. Ekstensifikasi pemungutan **Retribusi Terminal** adalah Menyusun Perubahan Peraturan Walikota tentang pemungutan retribusi terminal, yang diharapkan menggali potensi pendapatan dari Terminal Seruni. Seperti jasa parkir Bis dan kendaraan antar jemput penumpang baik roda dua maupun roda empat, selain itu adanya potensi pendapatan dari kendaraan yang menginap di Terminal Seruni.
4. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam pengelolaan retribusi pelayanan jasa usaha sektor retribusi pemotongan hewan ternak besar (sapi/kerbau) melakukan himbauan memotong hewan pada tempat yang disediakan pemerintah daerah, dan memberikan penyediaan fasilitas jasa pelayanan tambahan sesuai kebutuhan.

1.2.3 Retribusi Izin Tertentu, meliputi :

1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya membuat IMB.
2. Pelaksanaan Ekstensifikasi pada Dinas Tenaga Kerja dengan melakukan pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA terkait lokasi kerja. Kita menekankan kepada perusahaan agar merubah lokasi kerja nya hanya Cilegon jika memang TKA tersebut hanya bekerja di Cilegon saja. Agar pada saat perpanjangan otomatis dilakukan dan masuk dana DPKK nya ke PAD Kota Cilegon.
3. Retribusi Trayek berupaya mengintegrasikan pengawasan bagi angkutan umum, upaya pemberian reward bagi angkutan umum yang taat kewajiban izin trayek.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- a. Bank BJB turut serta mendukung pembangunan di Kota Cilegon dengan program Kredit Modal Kerja Konstruksi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Serta Bank BJB senantiasa turut berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
- b. PDAM Cilegon Mandiri melakukan ekstensifikasi dengan melakukan penambahan pelanggan SL Baru, dan Pengembangan jaringan pipa baru di beberapa wilayah di Kota Cilegon.
- c. Ekstensifikasi yang dilakukan oleh PT. PCM adalah memelihara komunikasi rutin yang efektif dengan pelanggan, meninjau kemungkinan pengembangan bisnis perusahaan dengan kajian-kajian yang komprehensif, memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi kemaritiman dan khususnya pengusaha kepelabuhanan untuk membuka peluang pelanggan dan bisnis baru.
- d. Mengadakan fasilitas jemput tabungan kepada pihak nasabah penabungan, baik setoran maupun penarikan, mengadakan pemantauan dan pembinaan yang lebih efektif terhadap nasabah Badan Usaha, melakukan kerjasama penempatan dana, kerjasama pembiayaan dengan Bank Umum Syariah serta mengupayakan efisiensi pengeluaran biaya.

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- a. Upaya penentuan nilai jual lelang kendaraan dengan melaksanakan koordinasi dengan pihak KPKNL selaku appraisal (penilai) BMD.
- b. Melaksanakan efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah sehingga penerimaan atas temuan Inspektorat dapat terminimalisir.
- c. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan Lain-lain PAD yang sah Cicilan Kios dengan melakukan revitalisasi pasar, meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi pengunjung maupun pedagang, dan melakukan pendataan kembali terhadap debitur.
- d. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pendapatan BLUD RSUD Cilegon adalah meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, penambahan pelayanan baru pada RSUD, penambahan alat kesehatan pada RSUD. Adapun penambahan beberapa pelayanan untuk pasien berupa :
 1. Pelayanan Bedah Urologi
 2. Pelayanan Konsultasi Tumbuh Kembang Anak
 3. Pelayanan Forensik dan Medikolegal
 4. Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 ;
 5. Menyediakan Ruang Isolasi Covid-19 di IGD dan di Ruang Rawat Inap.
- e. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan dalam hal pemungutan BLUD Pemerintah adalah melaksanakan sosialisasi/ pembekalan kepada Calon Mitra Binaan sebelum pencairan pinjaman, peningkatan kemampuan SDM Pengelola Dana Bergulir, dan lebih selektif dalam rekrutasi dan penyaluran pinjaman.

2. Ekstensifikasi Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sehingga upaya ekstensifikasi penggalan potensi baru sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota Cilegon hanya dapat mendukung pengelolaan dimaksud melalui konsultasi, koordinasi terkait mekanisme pencairan/transfer yang dilakukan

Pemerintah RI Kementerian terkait, agar Dana Perimbangan dimasa mendatang mendapatkan alokasi Dana Bidang Baru dan semakin optimal, dan Melaksanakan Kebijakan terkait Rasionalisasi dan Relokasi Anggaran tepat waktu sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat.

3. Ekstensifikasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

- a. Upaya yang dilakukan dalam penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diantaranya melibatkan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Banten agar alokasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lebih maksimal.
- b. Upaya ekstensifikasi dalam hal penyerapan alokasi Dana Bantuan Sekolah adalah dengan melakukan pemantauan update atas aturan-aturan Pemerintah Pusat, dan update petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja.
- c. Melaksanakan Kebijakan terkait Rasionalisasi dan Relokasi Anggaran dengan kebutuhan pemerintah Kota Cilegon, berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

1.5.1.4 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

PERMASALAHAN PENDAPATAN DAERAH

Permasalahan pemungutan atas tidak tercapainya beberapa komponen target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, yang tercermin pada beberapa sektor pendapatan daerah Kota Cilegon adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

a. Pajak Daerah

- a) Pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun yang sulit bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dampak dari adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang melanda seluruh dunia. Begitupun di Kota Cilegon mengalami dampak dari adanya Covid-19, hal ini mempengaruhi perekonomian di Kota Cilegon. Sektor perdagangan dan jasa mengalami dampak dari adanya virus tersebut. Tidak sedikit wajib pajak pada sektor tersebut mengalami penurunan omset bahkan sampai tutup usahanya. Jika melihat trend penerimaan dari jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, jenis-jenis pajak tersebut mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan target yang dibebankan telah tercapai bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terbantu dengan meningkatnya pendapatan dari sektor Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB.

b. Retribusi Daerah

1. Pada Retribusi Pelayanan Persampahan terdapat permasalahan diantaranya :
 - a. Adanya Pandemi Covid 19 di Tahun 2020 yang memberlakukan PSBB di Kota Cilegon memberikan dampak dalam pencapaian target retribusi persampahan dikarenakan penutupan sebagian aktivitas perekonomian seperti pertokoan, mall, pasar, dan perkantoran yang berimbas kepada penarikan retribusi yang tidak maksimal, pembatasan staff dan petugas kolektor untuk WFH dan tunggakan

- retribusi dari pihak pemegang izin pengguna lahan TPSA Bagendung untuk pembangunan sampah ke daerah
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan Perda No 8 tahun 2012.
 - c. Belum adanya sistem pembayaran retribusi secara online.
 - d. Alat timbang yang merupakan hibah dari pemerintah Provinsi Banten pada tempat pembuangan akhir, kondisi saat ini tidak dapat difungsikan atau rusak
 - e. Tarif pengenaan retribusi persampahan yang sudah tidak relevan dengan waktu.
 - f. Terbatasnya personil kolektor pemungut retribusi
 - g. Adanya keterlambatan wajib retribusi persampahan (pihak ketiga) dalam membayar retribusi bulannya sehingga terjadi piutang pada akhir tahun.
2. Pada Retribusi Pelayanan Pasar : terjadi penutupan sementara pada beberapa lokasi di Pasar Baru Cilegon mengingat adanya kasus Pasien pandemi Covid 19, masih terdapat pedagang yang tidak patuh melaksanakan pembayaran tepat waktu, dan masih terdapat kios dan Los yang tidak ditempati mengingat pedagang memilih berjualan di luar kios dan los yang telah disediakan. Distribusi karcis pemungutan retribusi mengalami keterlambatan mengingat alat Perporasi yang dimiliki Pemerintah Kota Cilegon berjumlah 2 unit dengan kondisi salah satu unit mengalami kerusakan. Dan kurangnya sanksi terhadap petugas kolektor retribusi.
 3. Pada Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum terdapat permasalahan terdapat titik parkir yang diluar kewenangan pengelolaan UPT Parkir Dishub Kota Cilegon, karena titik parkir tersebut berada di sepanjang jalan Nasional.
 4. Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi diantaranya tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum masih rendah, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.
 5. Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran (APAR) terdapat permasalahan diantaranya:
 - a. Masih lemahnya dukungan kebijakan dari OPD teknis terkait, mengenai Regulasi yang ada;
 - b. Masih minimnya dukungan kebijakan untuk menerapkan Sanksi (Efek jera) bagi pengelola yang tidak menaati peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Masih minimnya dukungan OPD terkait untuk sosialisasi dan implementasi hasil evaluasi Perda No. 08 Tahun 2014 dan Perwal No. 30 Tahun 2014 menjadi Perda Retribusi No. 02 Tahun 2020 tentang retribusi dan Perwal No. 70 Tahun 2020;
 - d. Masih adanya Perda 10 tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran belum sesuai dengan kondisi exsisting sekarang (Nomenklatur) dan Perwal No. 40 Tahun 2009;
 - e. Masih minimnya alat kelengkapan / penunjang tim pemeriksaan, beberapa peralatan sudah rusak;
 - f. Kendaraan operasional untuk personil dan peralatan tidak layak (dibutuhkan minibus);

- g. Personil (SDM) terdiri dari 6 orang staff pelaksana, 1 orang kasi dan 1 orang Kabid, namun tim belum bisa dibagi menjadi 2 (dua) tim dikarenakan pengetahuan dan kemampuan personil belum mumpuni (belum adanya pengetahuan dasar atau pelatihan terkait pemeriksaan/ inspeksi), mengakibatkan pemeriksaan kurang optimal;
- h. Beberapa anggota tim teknis belum mendapatkan pembekalan bimtek inspeksi (tatacara pelaksanaan inspeksi/audit pemeriksaan bangunan gedung),
6. Dalam melaksanakan pengelolaan Retribusi Terminal guna mencapai target retribusi, terdapat kendala-kendala pemungutan pendapatan, adapun permasalahan sebagai berikut :
 - a. Adanya Pandemi Covid 19 mengakibatkan kurang optimalnya pendapatan di Terminal Seruni.
 - b. Optimalisasi potensi PAD dari Terminal Seruni harus ada Revisi Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota.
 - c. Kendaraan Angkutan Kota sebagai objek retribusi tidak masuk Terminal Seruni.
 - d. Perlu adanya pembagian Sub-sub terminal Tipe C di beberapa titik, seperti di Pasar Blok F, Ciwandan dan lainnya.
 - e. Jaringan trayek angkot khususnya trayek PCI – Simpang dialihkan Terminal Seruni – Simpang Cilegon.
 - f. Turun naiknya operasional kendaraan bus AKAP sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah kendaraan bus AKAP yang beroperasi di Terminal Seruni.
 - g. Adanya kemacetan di sekitar Akses Tol simpang Seruni mengakibatkan Bus AKAP banyak yang tidak masuk ke Terminal Seruni.
7. Pada Retribusi **Rumah Potong Hewan (RPH)** yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdapat permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran pengguna jasa RPH dan pasar hewan dalam membayar retribusi. Dan tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan perlu dilakukan penyesuaian tarif mengingat sudah kurang/lebih dari 9 tahun berjalan belum ada penyesuaian.
8. Pada **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan** belum adanya sosialisasi kepada pengguna jasa kepelabuhanan dengan Pemerintah, koordinasi dengan instansi terkait belum optimal, dan adanya pandemi covid 19.
9. Pada **Retribusi Izin Trayek** permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran pengurus/pemilik angkutan umum untuk membayar retribusi izin trayek.
- c. **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah**
 - Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM adalah Pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih rendah, dan tingkat penabung (nasabah) pada Bank BPRS masih rendah, cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim.
 - Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada rekanan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan melalui Bank Lain, belum optimalnya penggunaan garansi bank untuk mengcover pengadaan barang dan jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta Wajib Pajak khususnya penggunaan *Tapping Box* belum seluruhnya menggunakan rekening Bank Bjb untuk mempermudah transaksi keuangan.

- Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri adalah kebiasaan pelanggan untuk melunasi tagihan air dilakukan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan surat peringatan penutupan sementara.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah diantaranya rendahnya kesadaran mitra binaan dalam memenuhi kewajiban untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah, dan kurang optimalnya pelaksana Pengelola Dana Bergulir (pendamping kelurahan) dalam melakukan penagihan kepada Mitra Binaan.
3. Kendala yang dialami RSUD Kota Cilegon dalam pencapaian target pendapatan BLUD RSUD adalah sebagai berikut :
 - a. Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi RSUD, karena sejak bulan Februari 2020 pandemi covid-19 telah terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien baik pada instalasi rawat jalan maupun rawat inap; sehingga berakibat pula pada penurunan jumlah pendapatan RSUD Kota Cilegon
 - b. Tersendatnya pembayaran klaim oleh BPJS dan Kemenkes selaku penjamin pasien Covid ;
 - c. Adanya regulasi rujukan berjenjang untuk pasien BPJS. Pasien diarahkan dari faskes menuju RS type C, dan selanjutnya bila tidak terdapat pelayanan sesuai kebutuhan pasien, baru dirujuk ke RS type B ;
 - d. Adanya peluang bagi RS type C untuk membuka pelayanan Spesialis (THT, Ortopedi, Syaraf) yang semula izin pelayanan hanya terbatas pada 4 pelayanan dasar (Spesialis bedah, Spesialis anak, Spesialis Kandungan, dan Spesialis Penyakit Dalam). Sehingga mengurangi peluang untuk RS type B khususnya RSUD Kota Cilegon ;
 - e. Terhentinya pelayanan Onkologi karena kekurangan tenaga ahli.
 - f. Terjadinya musibah banjir yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan Radiologi (CT scan dan alat rontgen thorak).

2. DANA PERIMBANGAN

- 1) Dana Transfer Pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat sehingga pemerintah daerah bersifat menerima alokasi Dana Transfer.
- 2) Terjadi penurunan omset Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada pengurangan dana alokasi DBH Pajak Pusat yang diakibatkan dengan adanya pandemi Covid 19.

- 3) Perubahan Kebijakan terkait Pemotongan Dana Transfer sesuai Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 pada DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.
- 4) Koordinasi dengan pemerintah pusat mengalami kesulitan dimasa pandemi Covid 19 sehingga berdampak pada keterlambatan perubahan kebijakan penyaluran alokasi dan perubahan pagu anggaran.
- 5) Terjadinya inflasi di tahun 2020 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 sehingga terjadi berbagai perubahan arah kebijakan pengelolaan keuangan yang diakibatkan oleh pandemi.
- 6) Terbitnya PMK nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi covid virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional.
- 7) Terbitnya Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.07/2020 tentang tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Dalam Hal pencapaian realisasi sesuai Per-Gub mengingat DBH merupakan komponen pajak provinsi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga Pemerintah Kota Cilegon hanya menerima bagi hasil atas penerimaan jenis pajak tersebut.
- b. Terkendala pada Koordinasi dimasa pandemi Covid 19, sehingga keterlambatan terkait perubahan kebijakan pengelolaan dana transfer pemerintah daerah provinsi banten.

B. Solusi

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

a. Hasil Pajak Daerah

1. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kami melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - Memberikan relaksasi pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik berupa kenaikan maupun bunga bagi wajib pajak yang mengajukan.
 - Memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk yang Buku I.
 - Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon Tahun 2020.

b. Retribusi Daerah

- 1) Dalam hal permasalahan retribusi persampahan Dinas Lingkungan Hidup berupaya menambah personil kolektor dalam tugas pemungutan retribusi, mendatangi langsung wajib retribusi terutama swasta yang menangani sampah industri oleh petugas bendahara penerimaan Dinas.

- 2) Retribusi Pelayanan Pasar Meningkatkan sosialisasi terkait kewajiban membayar retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam peraturan daerah dan peraturan walikota Cilegon. Melaksanakan himbauan melaksanakan kebijakan penanganan pandemi covid 19, dan mengarahkan kepada pedagang untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan, dilaksanakan pendataan dan pembinaan terhadap wajib retribusi agar memiliki kesadaran untuk menempati kios/los dan hanggar yang tersedia, BPKAD untuk menambah alat perporasi, melaksanakan kerjasama dengan APH (kejari) untuk mengintensifkan penagihan piutang atas piutang retribusi sewa kios. Dan merevisi dokumen surat perjanjian atas pemanfaatan kios/los dan hanggar bagi para pedagang.
- 3) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir berupaya untuk mencari solusi yang tepat sasaran yaitu dengan pendekatan ke para juru parkir ilegal untuk memberikan arahan dan kewajiban sebagai juru parkir.
- 4) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Melakukan Perubahan tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan (PKB).
 - b. Meningkatkan Kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan secara rutin dengan melibatkan instansi atau Stakeholder (porli, Dishub Provinsi dan BPTD).
- 5) Solusi yang dilakukan guna meningkatkan PAD dari sektor Retribusi Rumah Potong Hewan adalah meningkatkan sosialisasi/himbauan kepada pengguna jasa RPH agar melaksanakan kewajiban membayar kewajibannya dan dapat melaksanakan penyesuaian tarif pemungutan,
- 6) Solusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diantaranya :
 - a. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke OPD teknis yang terkait;
 - b. Melakukan pendekatan pelayanan secara optimal pada perusahaan / pengelola.
 - c. Melakukan sosialisasi Perda Retribusi yang baru kepada Pengelola/Subjek Retribusi dan koordinasi OPD terkait, Melaksanakan kegiatan evaluasi Perwal Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - d. Merencanakan Evaluasi Perda No 10 Tahun 2009 dan Perwal No 40 Tahun 2009;
 - e. Mengoptimalkan peralatan yang ada dan memperbaiki peralatan yang rusak;
 - f. Menggunakan mobil inventaris dinas (losbak) dan dukungan sukarela kendaraan pribadi,
 - g. Mengoptimalkan SDM yang ada dan yang telah mengikuti bimtek inspeksi/audit bangunan gedung,.
- 7) Upaya penyelesaian masalah terkait Retribusi Terminal solusi yang Dinas Perhubungan lakukan adalah :
 - a. Telah terbitnya Perubahan Peraturan Walikota terkait Perubahan Perwal No. 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal. Sebagai dasar hukum untuk optimalisasi potensi di Terminal Seruni.
 - b. Mengurangi kemacetan di Simpang Bojonegara (Akses Tol Cilegon Timur) agar kendaraan Bis menurunkan penumpang dalam Terminal Seruni sehingga Angkutan Kota masuk Terminal Seruni.

- 8) Upaya yang telah dilaksanakan terkait permasalahan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah melaksanakan sosialisasi atas perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 terkait perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Perwal Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (KSOP Kelas 1 Banten; PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM); Kejaksaan Negeri Kota Cilegon ; dan BPN Cilegon).

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Solusi yang dilakukan oleh Perusahaan Milik Daerah diantaranya :

1. Pada Laba PT. BPRS CM Perlu adanya peningkatan pelayanan SDM, dan fasilitas-fasilitas pendukung seperti halnya ATM, mendekatkan cakupan pelayanan kepada nasabah melalui pembukaan cabang yang lebih luas.
2. Implementasi *Internet Banking Corporate* (IBC) untuk mempermudah transaksi keuangan serta peningkatan kerjasama dengan SKPD agar penyetoran dana SP2D bisa disalurkan melalui Bank Bjb serta peningkatan gerakan Non Tunai untuk program dana yang bersifat bantuan. Perluasan cara pembayaran PBB melalui e-commerce (Traveloka, bukalapak, dan tokopedia), serta Implementasi BPHTB online Kota Cilegon.
3. Adapun untuk menarik piutang pelanggan dilakukan dengan cara melakukan penagihan dan penerapan sanksi berupa penutupan SL sementara kepada pelanggan yang menunggak.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pemerintah Kota Cilegon berupaya untuk :

1. Dalam hal pengelolaan, pemungutan Lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios SKPD terkait membentuk tim pembinaan dan pengawasan kepada debitur yang menunggak atas kewajiban membayar retribusi daerah, dimana pelaksanaannya melibatkan Pengacara Negara yakni Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. Untuk mengatasi masalah terkait masih rendahnya kesadaran pemilik kios dalam membayar kewajiban cicilan kios pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pendekatan baik secara kekeluargaan maupun pendekatan secara hukum agar para pemilik kios dapat memenuhi kewajibannya, serta terus dilakukan penataan dan pembinaan kepada para pedagang agar dapat menempati hanggar yang sudah disediakan.
2. Solusi yang telah dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan BLUD Pemerintah adalah memberikan surat teguran/peringatan kepada Mitra Binaan atas keterlambatan pembayaran angsuran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Dana bergulir adalah dana yang harus dikembalikan bukan Dana Hibah, dan membuat jadwal kunjungan / pendampingan secara berkala kepada mitra Binaan.
3. Untuk upaya meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD –RSUD sesuai target yang ditetapkan pihak RSUD telah melaksanakan upaya-upaya:
 - a. Perlu advokasi dari Tim Kesehatan Pemerintah Kota bersama BPJS untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan rujukan berjenjang ;

- b. Memperbaiki kinerja pengelolaan piutang pasien covid agar tidak tersendat dalam penagihan klaimnya ;
- c. Mengupayakan berfungsinya kembali alat CT Scandan alat rontgen thorak

2. DANA PERIMBANGAN

- 1) Dana Transfer Pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat sehingga pemerintah daerah bersifat menerima alokasi Dana Transfer.
- 2) Penyesuaian Alokasi Pagu anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyesuaian Perdirjen Nomor PER-6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 pada DBH Pph Pasal 21, DBH PBB, dan DBH SDH hutan.
- 4) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan menerapkan protokoler kesehatan.
- 5) Melaksanakan rasionalisasi dan relokasi anggaran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- a. Melaksanakan penyesuaian dan perubahan atas pagu anggaran Dana Hibah BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pencapaian target realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bappenda Provinsi Banten.

1.5.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Berpedoman kepada Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar belanja dan standar satuan harga. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, APBD juga dialokasikan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5.2.1 Target dan Realisasi Belanja

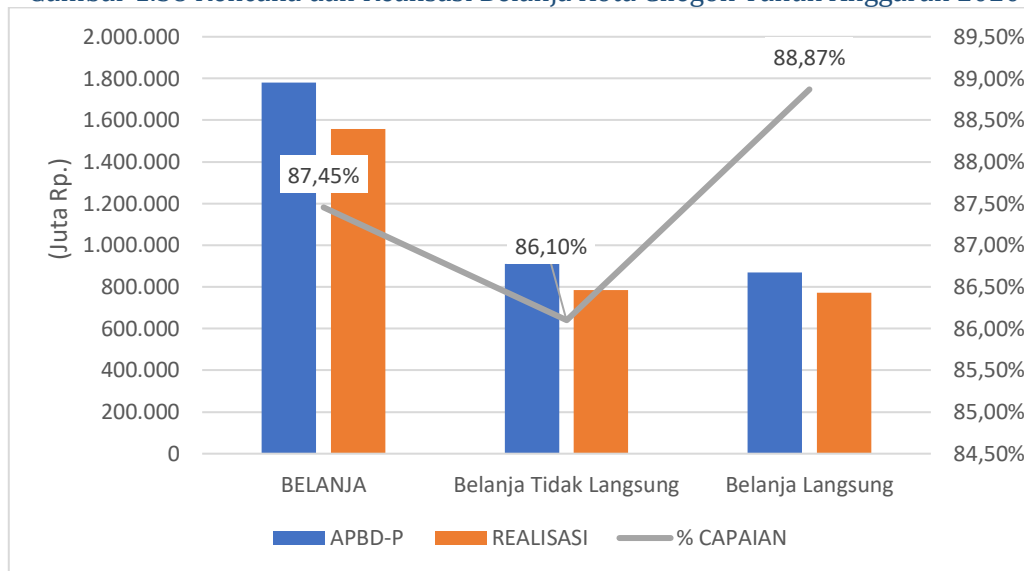
Anggaran Belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebelum dilakukan audit oleh BPK RI adalah sebesar **Rp 1.781.012.558.591,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.557.540.059.911,-** atau persentase pencapaian sebesar **87,45%**. Terdapat sedikit penurunan jika dibandingkan dengan kinerja belanja daerah di tahun sebelumnya yang mencapai 88,32%. Rincian realisasi belanja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1.20 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

URAIAN	2020 (Unaudited)		
	APBD-P	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4
BELANJA	1.781.012.558.591	1.557.540.059.911	87,45%
Belanja Tidak Langsung	911.184.639.782	784.536.496.294	86,10%
Belanja Langsung	869.827.918.809	773.003.563.617	88,87%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.58 Rencana dan Realisasi Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan teknis. Belanja tidak langsung yang dilaksanakan pada pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 meliputi Belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik, dan Belanja Tidak Terduga.

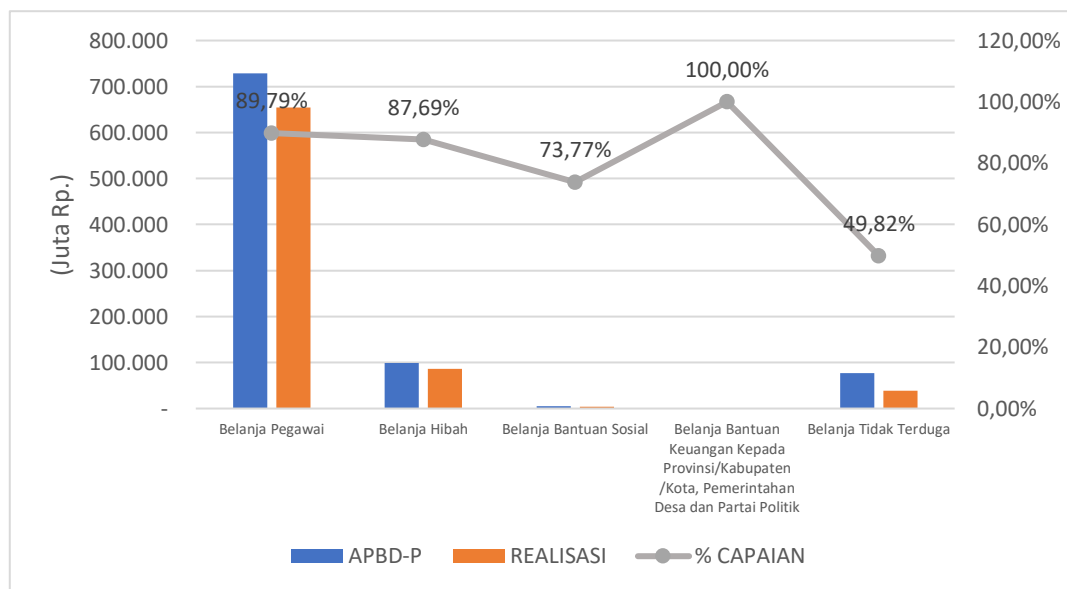
Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 911.184.639.782,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 784.536.496.294,-** atau mencapai **86,10%**. Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut :

Tabel 1.21 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 1	Belanja Tidak Langsung	911.184.639.782	784.536.496.094	86,10%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	728.890.800.204	654.501.082.358	89,79%
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	98.598.993.668	86.465.528.308	87,69%
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	5.519.446.000	4.071.757.500	73,77%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.103.397.376	1.103.397.376	100,00%
5 . 1 . 7	Belanja Tidak Terduga	77.072.002.534	38.394.730.552	49,82%

Sumber: LRA Kota Cilegon (Unaudited)

Gambar 1.59 Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A.1 Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada APBD tahun 2020 meliputi :

1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan penganggaran Calon PNSD sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2019;
3. Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBDT Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani peraturan yang berlaku;
4. Dalam merencanakan belanja pegawai memperhitungkan "accres" gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
5. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani regulasi yang berlaku;

Pada tahun 2020 belanja pegawai dianggarkan sebesar **Rp. 728.890.800.204,-** dan terealisasi sebesar **Rp 654.501.082.358,-** atau sebesar **89,79%**.

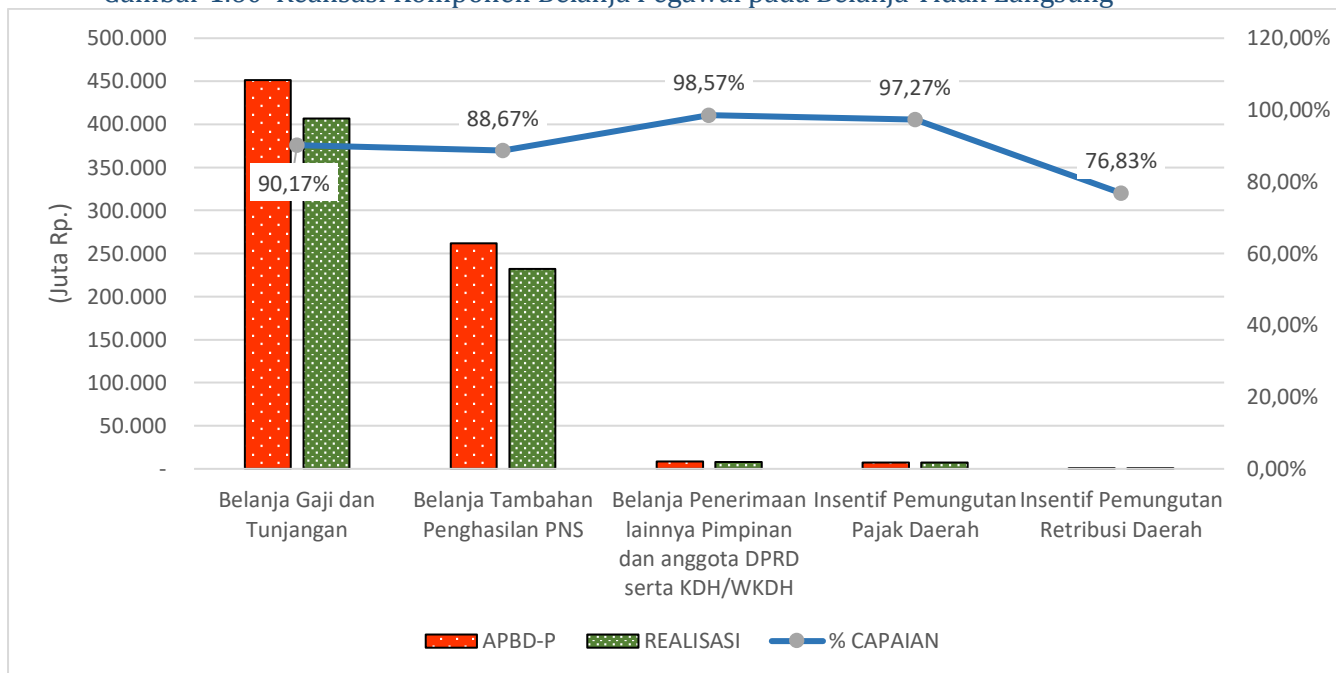
Tabel 1.22 Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	728.890.800.204	654.501.082.358	89,79%
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	451.104.937.865	406.767.365.961	90,17%
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	261.855.453.951	232.188.938.407	88,67%
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.259.542.910	8.141.070.994	98,57%

5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.389.323.825	7.187.387.572	97,27%
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	281.541.653	216.319.424	76,83%

Sumber : Diolah dari LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.60 Realisasi Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A.2 Belanja Hibah

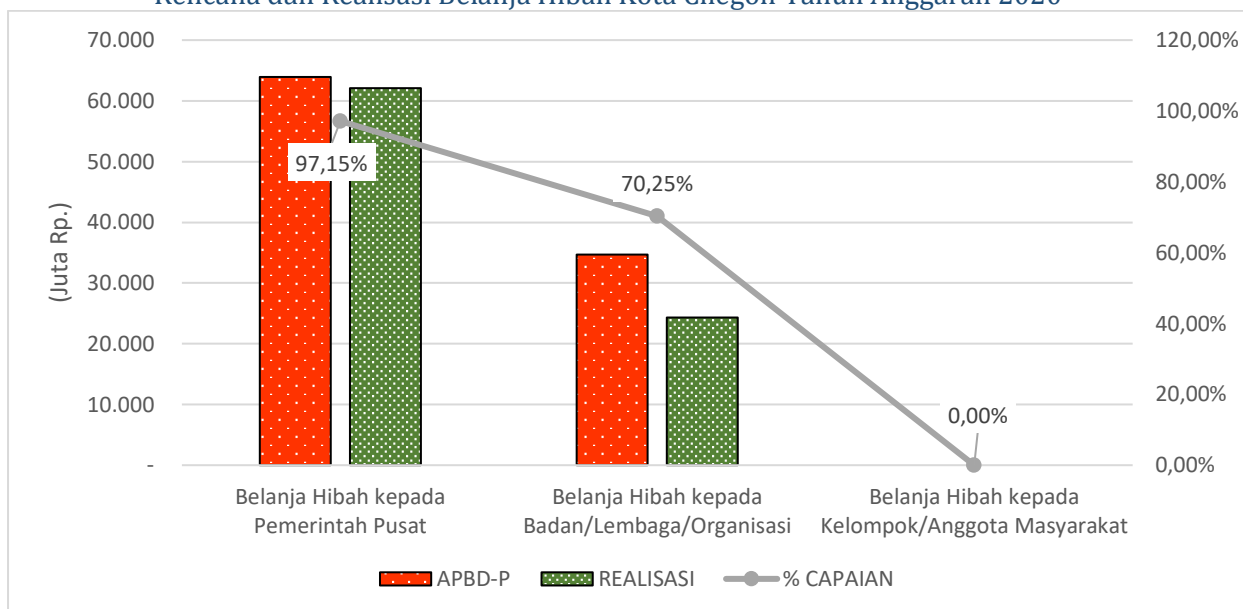
Pengertian Hibah dalam konteks tata kelola keuangan daerah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pada tahun anggaran 2020 belanja hibah dianggarkan sebesar **Rp. 98.598.993.668,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 86.465.528.308,-** atau sebesar **87,69%** dari target. Target dan realisasi belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.23 Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5.1.4	Belanja Hibah	98.598.993.668	86.465.528.308	87,69%
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	63.931.534.168	62.112.655.168	97,15%
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	34.667.459.500	24.352.873.140	70,25%
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	-	-	0,00%

Sumber: LRA Kota Cilegon 2020 (Unaudited)

Gambar 1.61
Rencana dan Realisasi Belanja Hibah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A.3 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun anggaran 2020 Belanja Bantuan Sosial yang berupa Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang Direncanakan dianggarkan sebesar **Rp. 5.519.446.000,-** dan terealisasi sebesar **73,77%** atau sebesar **Rp 4.071.757.500,-** alokasi bantuan beasiswa keluarga miskin, Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM), bantuan permakanan panti dan bantuan operasional panti. terkait JSCM, tidak seluruh anggaran dicairkan karena terdapat beberapa calon penerima sasaran sudah tercakup dalam sasaran program PKH dari sumber dana APBN. Sedangkan terkait operasional panti, anggaran ini tidak direalisasikan karena mengacu kepada regulasi tentang kewenangan bahwa rehabilitasi dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bantuan sosial untuk alokasi santunan kematian, cadangan rawan pangan, dan bantuan RTLH karena bencana disesuaikan dengan kejadian di lapangan.

Rincian rencana dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

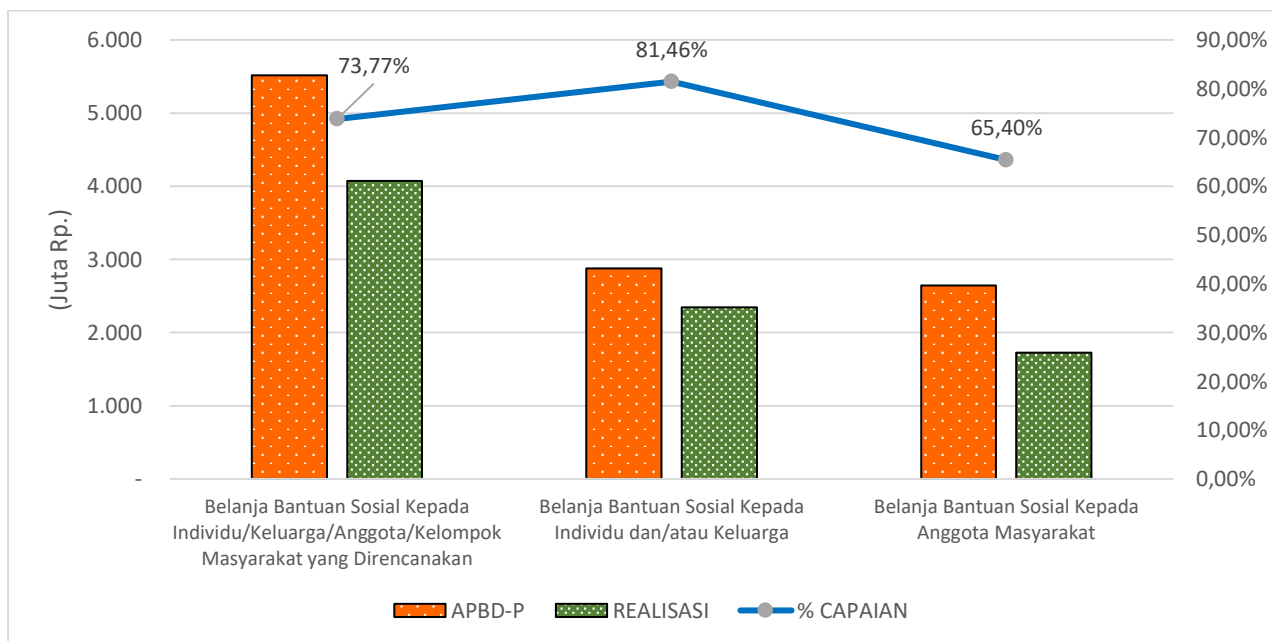
Tabel 1.24 Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	5.519.446.000	4.071.757.500	73,77%
5 . 1 . 5 . 02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang Direncanakan	5.519.446.000	4.071.757.500	73,77%
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	2.876.446.000	2.343.257.500	81,46%
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.643.000.000	1.728.500.000	0,00%

5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga /Anggota/Kelompok Masyarakat yang tidak Direncanakan	-	-	0,00%
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat Yang Tidak Direncanakan	-	-	0,00%

Sumber: LRA Kota Cilegon 2020 (Unaudited)

Gambar 1.62
Rencana dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

A.4 Belanja Bantuan Keuangan

Di Kota Cilegon, belanja bantuan keuangan diperuntukan kepada partai politik. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan sebesar **Rp 1.103.397.376,-** yang terealisasi **100%**.

A.5 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan jenis belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Di tahun anggaran 2020, alokasi belanja tidak terduga ditujukan untuk penanganan kasus Covid-19 dan dampaknya ke masyarakat, dianggarkan sebesar **Rp. 77.072.002.534,-** dan terealisasi sebesar **49,82%** atau sebesar **Rp 38.394.730.752,-**. Dari keseluruhan 8 OPD yang mendapatkan bantuan keuangan, hanya 7 OPD yang merealisasikannya yaitu pada Dinas Kesehatan untuk penanganan COVID-19, RSUD untuk Belanja Bahan Medis Habis Pakai dalam

rangka Penanganan COVID, Dinas Koperasi dan UMK berupa Bantuan Modal untuk UMK dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berupa Bantuan Untuk Petani dan Nelayan dalam masa Pandemi COVID-19 yang baru diberikan dalam satu tahap dari total 2 tahap, Bantuan UKM Pembuat Masker dan Stimulus PKL pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bantuan untuk Ojek Pangkalan, Ojek Online dan Supir Angkot dari Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial untuk penyediaan paket sembako. Sementara 1 OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja tidak merealisasikan bantuan untuk Tenaga Kerja terdampak PHK dikarenakan tidak tersedianya data karyawan yang di-PHK.

B. Belanja Langsung

Salah satu komponen terpenting dalam struktur APBD adalah belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah Kota Cilegon.

Belanja langsung direncanakan pada tahun anggaran 2020 sebesar **Rp. 869.827.918.809,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 773.003.563.617,-** atau sebesar **88,87%**. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal. Adapun rinciannya sebagai berikut :

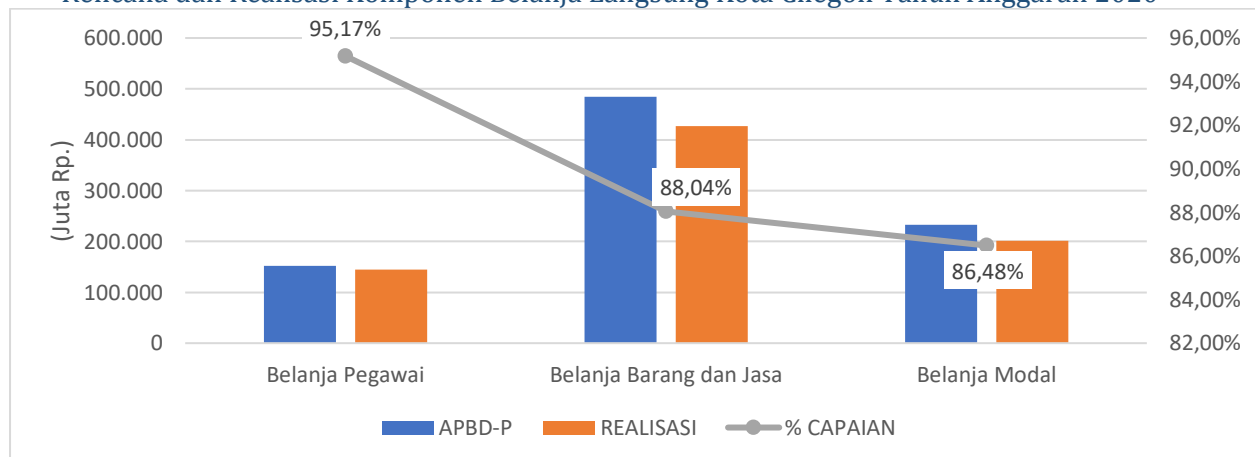
Tabel 1.25 Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	869.827.918.809	773.003.563.617	88,87%
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.289.630.066	144.936.469.100	95,17%
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.748.914.161	426.754.694.114	88,04%
5 . 2 . 3	Belanja Modal	232.789.374.582	201.312.400.403	86,48%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

Gambar 1.63

Rencana dan Realisasi Komponen Belanja Langsung Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



Sumber : BPKAD Kota Cilegon, diolah

B.1. Belanja Langsung berdasar Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanjanya, kelompok belanja langsung terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standar belanja tahun 2020.

Total anggaran belanja pegawai di tahun 2020 sebesar **Rp 152.289.630.066,-** atau sebesar **17,5%** dari total belanja langsung, meliputi honorarium non PNS, honorarium PNS, belanja pegawai BLUD/BOS dan belanja untuk diberikan kepada pihak ketiga. Realisasi belanja pegawai di belanja langsung di tahun 2020 mencapai **Rp. 144.936.469.100,-** atau sebesar **95,17%** dari total belanja pegawai. Berikut tabel anggaran dan realisasi komponen belanja pegawai.

Tabel 1.26 Rencana dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	152.289.630.066	144.936.469.100	95,17%
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.455.151.900	16.112.407.950	92,31%
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.046.035.166	116.231.296.150	96,02%
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD/BOS	13.788.443.000	12.592.765.000	91,33%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jenis dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

Total anggaran belanja barang dan jasa tahun 2020 adalah **Rp. 484.748.914.161,-** atau sebesar **55,73%** dari total belanja langsung, dan terealisasi sebesar **Rp. 426.754.694.114,-** atau sebesar **88,04%** dari anggaran belanja barang dan jasa. Berikut tabel anggaran dan realisasi komponen Belanja Barang dan Jasa.

Tabel 1.27 Rencana dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.748.914.161	426.754.694.114	88,04%
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.302.094.140	15.006.011.758	92,05%
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.106.176.926	27.216.862.010	90,40%
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	151.986.729.606	132.331.450.225	87,07%
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.430.880.505	16.032.538.680	82,51%
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.774.717.761	22.084.836.383	85,68%
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.847.945.095	12.841.690.053	86,49%
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	4.462.756.000	3.480.276.958	77,98%
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	378.760.000	190.322.000	50,25%
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	348.000.000	292.924.000	84,17%
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.322.960.076	3.437.944.928	64,59%
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.412.614.264	25.364.029.514	75,91%
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.016.070.400	757.396.400	74,54%
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.683.921.900	2.538.453.865	94,58%
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.779.499.500	3.399.158.200	89,94%
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.193.005.466	37.154.595.542	92,44%

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	3.346.049.000	3.272.310.000	97,80%
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.275.882.367	4.483.603.267	84,98%
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.238.742.700	3.745.794.700	88,37%
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.135.666.325	4.887.024.225	95,16%
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Uang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	239.050.000	238.650.000	99,83%
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa BLUD/BOS	104.677.658.870	96.275.173.979	91,97%
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Sarana dan Prasarana yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	11.789.733.261	11.723.647.427	99,44%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk pengadaan lahan, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

Di tahun 2020, belanja modal masih diprioritaskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah terutama jalan dan jembatan, pemenuhan sarana prasarana pemerintahan pengadaan sarana prasarana peningkatan layanan pemerintahan terutama kebersihan, penerangan jalan umum dan penataan Kawasan kumuh, serta pembangunan saluran dan drainase sebagai percepatan penanganan banjir.

Total anggaran belanja modal di tahun 2020 sebesar **Rp 232.789.374.582,-** atau sebesar **26,76%** dari total belanja langsung, dan terealisasi sebesar **Rp 201.312.400.403,-** atau sebesar **86,48%** dari anggaran belanja modal. Berikut table anggaran dan realisasi Belanja Modal.

Tabel 1.28 Rencana dan Realisasi Belanja Modal Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	232.789.374.582	201.312.400.403	86,48%
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	1.890.000.000	1.562.674.103	82,68%
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	13.083.040.113	4.393.638.000	33,58%
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	160.970.000	144.380.920	89,69%
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.911.200.000	3.727.150.008	95,29%
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	92.900.000	66.715.000	71,81%
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	126.610.000	63.360.000	50,04%
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	20.000.000	19.500.000	97,50%

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	236.500.000	202.650.000	85,69%
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	103.450.000	17.795.000	17,20%
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	1.200.000	1.200.000	100,00%
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.574.885.979	3.031.216.828	84,79%
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.128.824.684	4.398.048.112	85,75%
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.103.398.396	7.331.764.226	90,48%
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	735.049.071	698.614.500	95,04%
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	933.023.843	872.001.000	93,46%
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	702.836.800	673.105.000	95,77%
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	16.114.898.558	14.744.650.177	91,50%
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	6.884.312.646	6.826.856.046	99,17%
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	130.331.503	127.154.100	97,56%
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	308.070.000	-	0,00%
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	60.225.000	60.225.000	100,00%
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-Rambu	275.050.000	271.621.000	98,75%
5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	83.500.000	82.229.600	98,48%
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.226.589.411	82.449.647.948	94,52%
5 . 2 . 3 . 54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	171.525.617	-	0,00%
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.295.486.215	1.203.767.131	92,92%
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	49.379.623.912	40.729.039.649	82,48%
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	775.804.000	762.920.150	98,34%
5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.235.048.632	8.755.479.081	85,54%
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	487.300.000	440.023.000	90,30%
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	124.200.000	120.849.500	97,30%

Kode Rek	Uraian	2020 (Unaudited)		% Capaian
		APBD-P	Realisasi	
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	373.825.275	104.591.875	27,98%
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	9.927.000	9.927.000	100,00%
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	405.000.000	5.000.000	1,23%
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	138.945.000	42.500.000	30,59%
5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	145.000.000	74.167.000	51,15%
5 . 2 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	76.412.000	75.582.200	98,91%
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	817.875.000	549.320.000	67,16%
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	51.000.000	50.124.500	98,28%
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	403.562.500	398.612.000	98,77%
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Pengadaan Software	1.359.126.588	1.319.468.500	97,08%
5 . 2 . 3 . 92	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD/BOS	12.680.990.061	11.300.533.483	89,11%
5 . 2 . 3 . 95	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD/BOS	3.971.856.778	3.604.298.766	90,75%

Sumber : LRA Kota Cilegon Tahun 2020 (Unaudited)

B.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan

Berdasarkan sumber dananya, belanja langsung meliputi : belanja yang dibiayai dari dana transfer (dana perimbangan, antara lain meliputi DAU dan DAK) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (antara lain Bantuan Keuangan Provinsi).

B.2.1. Belanja Langsung bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Banten

Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep. 135-Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Cilegon memperoleh Bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 45.000.000.000,- (Empat Puluh Lima Miliar rupiah) yang dialokasikan untuk Penanganan Covid 19 dan dampaknya, yaitu : a) Penanganan Kesehatan dalam rangka penyebaran Covid 19 sebesar **Rp. 14.252.723.000,-**; b) Penanganan dampak ekonomi sebesar **Rp. 11.094.762.000,-**; dan c) Penyediaan *Social Safety Net* (Jaring Pengaman Sosial) sebesar **Rp. 19.652.515.000,-**. Rincian kegiatannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.29 Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020

NO	OPD PELAKSANA	URAIAN PENANGANAN	Satuan	TARGET		Realisasi		% Capaian		KETERANGAN (Lokasi dan Penjelasan Lainnya)
				Volume	Jumlah (Rp.)	Volume	Jumlah (Rp.)	KINERJA	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.		Penanganan kesehatan dalam rangka penyebaran Covid-19			14.252.723.000		8.625.911.570	37,42%	60,52%	
1.	Dinas Kesehatan	Insentif Tenaga Medis	Orang	2.150	2.987.500.000		0	0,00%	0,00%	
2.	Dinas Kesehatan	Biaya Pemeriksaan PCR Nakes dan Bukan Nakes/ Masyarakat	Orang	4.000	2.400.000.000	490	294.000.000	12,25%	12,25%	
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Penanganan Pandemi Covid-19	Paket	1	8.865.223.000	1	8.331.911.570	100,00%	93,98%	
B.		Penanganan Dampak Ekonomi			11.094.762.000		7.090.230.000	64,19%	63,31%	
1.	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil	Bantuan Mitra Binaan dan Stimulus Modal UMK	Orang	2.475	1.995.168.000	2.418	1.211.500.000	97,70%	60,72%	
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan IKM Pembuat Masker; Dukungan Sarpras kebersihan pendukung aktivitas perdagangan; Bantuan Stimulus untuk PKL	IKM/ PKL	1.248	840.594.000	1.149	743.730.000	92,07%	89,19%	
3.	Dinas Perhubungan	Bantuan Opang, Ojol dan Sopir Angkot	Orang	6.318	3.159.000.000	3.743	1.871.500.000	59,24%	59,24%	
4.	Dinas Tenaga Kerja	Bantuan Tenaga Kerja sektor formal terdampak PHK/Dirumahkan	Paket	1	500.000.000	0	0	0,00%	0,00%	
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bantuan untuk Petani dan Nelayan (2 tahap)	KK	9.200	4.600.000.000	6.617	3.257.500.000	71,92%	70,82%	
C.		Penyediaan Social Safety Net. Jaring pengaman.			19.652.515.000		3.565.699.500	50,00%	18,14%	
1.	Dinas Sosial	Penambahan KSJSCM Kondisi Covid-19	KS	13.347	16.016.400.000	0	0	0,00%	0,00%	
2.	Dinas Sosial	Penyediaan Paket Sembako	paket	18.790	3.636.115.000	18.790	3.565.699.500	100,00%	98,06%	
		JUMLAH			45.000.000.000		19.281.841.070	50,53%	42,85%	

Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Kota Cilegon, diolah

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, tidak terserapnya insentif tenaga medis, bantuan tenaga kerja sektor formal terdampak PHK/dirumahkan serta penambahan KSJSCM kondisi Covid 19 serapan kegiatan berdampak terhadap kinerja anggaran bantuan keuangan. Hal ini dikarenakan penyerapan anggaran penanganan Covid 19 lebih banyak bersumber dari APBD.

B.2.2. Belanja Langsung bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus

Pada Tahun Anggaran 2020 Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) disampaikan melalui sistem aplikasi E-planning yang di kelola langsung oleh kementerian PPN/Bappenas. Anggaran dana alokasi khusus (DAK) Kota Cilegon Tahun 2020 sebesar **Rp. 126.805.730.640,-** meliputi : 1) DAK Fisik sebesar **Rp. 35.822.699.000,-** untuk kegiatan rehabilitasi dan pengadaan sarpras belajar. Pengadaan alkes, penyediaan obat, Instalasi pengolahan air limbah/IPAL, penguatan intervensi stunting dan sarpras klinik pelayanan KB; 2) DAK non fisik sebesar **Rp 92.333.031.640,-** untuk dana tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru, akreditasi puskesmas, distribusi obat dan e-logistik, jaminan persalinan, dukungan manajemen BOK dan Jampersal, dana bantuan operasional keluarga berencana, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro, pelayanan administrasi kependudukan, dan pelatihan tata Kelola destinasi pariwisata dan hibah kepada organisasi pendidikan. Realisasi kegiatan mencapai **Rp 121.141.106.973,- (95,53%)**. Capaian kegiatan yang bersumber dana dari dana alokasi khusus sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 1.30 Target dan Realisasi Kegiatan yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAK FISIK					35.822.699.000	33.059.216.071	92,29%	
DAK REGULER								
BIDANG PENDIDIKAN								
Rehabilitasi Prasarana Belajar PAU (DAK)	Ruang	3	3	100,00%	226.824.000	226.824.000	100,00%	Dindik

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pengadaan Sarana Belajar PAUD (DAK)	Sekolah	1	1	100,00%	30.933.000	30.903.700	99,91%	Dindik
Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)	Ruang	29	29	100,00%	4.132.733.000	3.525.446.320	85,31%	Dindik
Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)	Ruang Kelas	5	5	100,00%	1.039.500.000	1.039.500.000	100,00%	Dindik
Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)	Sekolah	7	7	100,00%	630.000.000	361.445.000	57,37%	Dindik
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)	Paket	5	5	100,00%	2.368.791.000	2.368.791.000	100,00%	Dindik
Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)	Sekolah	4	4	100,00%	1.475.357.000	1.471.127.000	99,71%	Dindik
BIDANG KESEHATAN & KB								
Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	1.845.840.000	1.844.882.228	99,95%	Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Paket	2	2	100,00%	2.819.886.000	2.818.678.755	99,96%	Dinkes
Pengadaan BHPHIV dan Sifilis (DAK)	Paket	1	1	100,00%	360.697.518	333.800.760	92,54%	Dinkes
Pengadaan Catridge TCM (DAK)	Paket	1	1	100,00%	738.647.962	738.389.575	99,97%	Dinkes
Pengadaan Posbindu Kit (DAK)	Paket	19	19	100,00%	125.990.520	100.111.000	79,46%	Dinkes
Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (DAK)	Paket	1	0	0,00%	400.000.000	0	0,00%	Dinkes
Penguatan Intervensi Stunting (Penanganan Gizi Buruk) (DAK)	Paket	1	1	100,00%	483.633.000	483.630.648	100,00%	Dinkes
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jenis	27	27	100,00%	17.739.223.000	16.371.648.077	92,29%	RSUD
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK)	Paket	75	50	100,00%	550.843.000	533.750.008	96,90%	DP3AKB
Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK)	Paket	6, 10, 15, 43	6, 10, 15, 43	100,00%	737.300.000	700.238.000	94,97%	DP3AKB
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Paket	5, 6	5, 6	100,00%	116.500.000	110.050.000	94,46%	DP3AKB

Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Kota Cilegon, diolah

Tabel 1.31 Target dan Realisasi Keg. yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
DAK NON-FISIK					92.333.031.640	89.470.655.790	96,90%	
Akreditasi Puskesmas (DAK)	Kegiatan	3	1	33,33%	703.414.000	163.816.000	23,29%	Dinkes
Distribusi Obat dan E-logistik (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	65.000.000	62.575.023	96,27%	Dinkes
Jaminan Persalinan/ Jampersal (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	1.068.591.000	813.685.073	76,15%	Dinkes
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jampersal (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	41.057.000	31.770.000	77,38%	Dinkes
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	1.350.000.000	1.349.999.988	100,00%	Dinkes
Upaya Kesehatan Sekunder Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	780.163.000	584.057.890	74,86%	Dinkes
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	Bulan	12	12	100,00%	4.077.016.000	3.722.303.325	91,30%	8 Puskesmas
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Paket	1	1	100,00%	1.384.288.000	1.369.834.798	98,96%	DP3AKB
Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	ok	1600	1600	100,00%	360.000.000	323.319.800	89,81%	DKCS
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Kegiatan	20	20	100,00%	150.000.000	135.429.500	90,29%	DKCS
Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK)	Buah, Buku	138, 405	138, 405	100,00%	688.179.000	621.409.220	90,30%	DKCS
Pengelolaan Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan/atau Pendayagunaan Data Kependudukan (DAK)	Semester	2	2	100,00%	100.000.000	67.260.000	67,26%	DKCS
Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksana Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Kegiatan	10	10	100,00%	62.267.000	61.277.173	98,41%	DKCS

Program/ Kegiatan	Satuan output	Kinerja			Anggaran (Juta Rupiah)			OPD
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK)	Kegiatan	3	3	100,00%	417.358.000	375.105.000	89,88%	Dinkop
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK)	Orang	40	40	100,00%	116.500.000	81.620.000	70,06%	Disparbud
Pelatihan Usaha Kepariwisata (DAK)	Orang	40	40	100,00%	116.500.000	103.170.000	88,56%	Disparbud
Penyusunan Buku Promosi Pariwisata Daerah (DAK)	Jenis	9	0	0,00%	22.870.000	0	0,00%	Disparbud
Hibah Kepada Organisasi Pendidikan (BOP PAUD dan Kesetaraan)	Tahun	1	1	100,00%	8.170.300.000	7.375.600.000	90,27%	Dindik
Tunjangan Khusus Guru PNSD	Bulan	12	12	100,00%	71.530.528.640	71.529.698.000	100,00%	Dindik
Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	Bulan	12	12	100,00%	1.129.000.000	698.725.000	61,89%	Dindik

Sumber : BPKAD dan BAPPEDA Kota Cilegon, diolah

1.5.2.2 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

- 1) Persentase serapan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja tidak terduga mencapai 86,10%. Serapan belanja bantuan sosial mencapai 73,77% dalam hal ini tidak seluruh anggaran belanja bantuan sosial direalisasikan karena berpedoman kepada hasil verifikasi lapangan; Selain itu, beberapa sasaran/penerima program telah tercakup sebagai sasaran program Bantuan Sosial yang bersumber dana dari APBN.
- 2) Persentase serapan keseluruhan belanja langsung yang merupakan akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebesar 88,87 %. Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran di awal tahun 2020 terutama untuk penanganan Covid 19 dan dampaknya sehingga beberapa kegiatan dialihkan. Selain itu, ketidaktepatan dalam perencanaan kegiatan al. terkait cash budget, kendala pada saat proses pelelangan, kelengkapan administrasi serta adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan 4, yang ketika mengalami gagal lelang tidak memungkinkan lagi dilakukan lelang ulang.

B. Solusi

1. Meningkatkan kinerja serapan belanja tidak langsung khususnya terkait belanja bantuan sosial, melalui peningkatan kualitas verifikasi dan validasi data penerima program serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi bantuan sosial bagi pengusul dan penerima program.
2. Meningkatkan kinerja serapan belanja langsung melalui pengendalian dimulai dari perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam hal ini setiap OPD harus merencanakan kegiatan dengan cermat, memantau pelaksanaan kegiatan dan melakukan pelaporan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Bab 2: Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1 Perubahan Perwal APBD sebelum dan sesudah Perubahan Perda APBD Tahun 2020

Perubahan penjabaran APBD Tahun 2020 dilakukan karena adanya pergeseran anggaran, baik pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja. Secara regulasi hal ini diatur pada pasal 160 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, pergeseran antar rincian objek belanja dan pergeseran antar objek belanja dilakukan dengan merubah Perwal tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan. Sedangkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD yang dilakukan melalui tahapan perubahan dokumen perencanaan (RKPD Perubahan) dan dokumen anggaran (KUA dan PPAS perubahan).

Sebelum dan sesudah penetapan RKPD Perubahan Tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2020, dengan resume perubahan sebagai berikut :

1. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas progres pekerjaan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon yang tidak terselesaikan pada Tahun Anggaran 2019 melalui **Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019**.
2. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan berdasarkan adanya usulan Perangkat Daerah terkait pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan diantaranya dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan Gerogol dan Kecamatan Citangkil.
3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan berdasarkan terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mempercepat penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease*

2019 (COVID-19) diperlukan langkah penganggaran yang cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar perangkat daerah di Kota Cilegon. Disamping hal tersebut juga dilakukan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan berdasarkan diperlukan adanya pergeseran anggaran pada belanja tidak langsung gaji PNS sesuai dengan usulan dari Perangkat Daerah.
5. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.086.919.756.276,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp(399.224.357.120,00) sehingga menjadi Rp1.687.695.399.156,00.

6. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan karena diperlukan pergeseran anggaran pada belanja pakaian kerja sesuai dengan usulan dari Perangkat Daerah terkait (Kelurahan Suralaya, Ciwedus, Randakari dan Purwakarta).
7. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020. Perubahan dilakukan karena diperlukan pergeseran anggaran pada belanja langsung sesuai dengan usulan dari Perangkat Daerah terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kelurahan Ciwandan).
8. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dilakukan karena diperlukan pergeseran anggaran pada belanja tidak langsung sesuai dengan usulan dari Perangkat Daerah terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sekretariat Daerah).
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Setelah APBD Perubahan).. Perubahan dilakukan karena diperlukan pergeseran anggaran pada belanja tidak langsung sesuai dengan usulan

dari Perangkat Daerah terkait. Kebutuhan akan perubahan ini sendiri disebabkan munculnya kebijakan dari Pemerintah Pusat dimana Kota Cilegon mendapatkan Bantuan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Tracking dan Tracing Covid-19 di Kota Cilegon.

10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Setelah APBD Perubahan). Perubahan dilakukan karena diperlukan pergeseran anggaran pada belanja tidak langsung sesuai dengan usulan dari Perangkat Daerah. (BPKAD dan Kecamatan Ciwandan).

2.2 Perubahan Perda APBD

2.2.1 Latar Belakang

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Cilegon yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya saldo anggaran yang terjadi akibat dari kelebihan dari tahun yang lalu, yang digunakan untuk kegiatan tahun berjalan.

Terlebih pada awal tahun 2020, terdapat Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memerlukan adanya perubahan kebijakan ekonomi dan sosial untuk dapat menanggulangi dampak penyebaran wabah tersebut.

Pada mekanisme perubahan anggaran, hal ini dilakukan melalui Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2020 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara dasar hukum hal ini diatur oleh Permendagri No. 33 tahun 2019, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, dan secara substantif Perubahan ini berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2020.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Terjadinya pandemi covid secara langsung berdampak terhadap kinerja pendapatan daerah. Sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan konstruksi sangat terdampak. Pada sektor transportasi perjalanan darat maupun penyebaran mengalami penurunan, khususnya angkutan kereta api tidak beroperasi hingga triwulan 2. Pada sektor pariwisata, penurunan dapat dilihat dari menurunnya tingkat hunian hotel serta berbagai kegiatan hiburan yang mengalami kelesuan. Pada sektor perdagangan dan jasa, hal ini terpengaruh dengan tidak beroperasinya mall-mall selama beberapa minggu. Dan pada sektor konstruksi, dengan

berkurangnya proyek-proyek konstruksi dari pemerintah daerah ataupun swasta, hal ini berdampak banyaknya tenaga kerja khususnya outshoring yang tidak dipekerjakan kembali.

Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hal ini tercermin pada kinerja perekonomian daerah maupun nasional di triwulan I yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*). Terkait hal ini, Pemerintah Pusat mengoreksi dana perimbangan kepada Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian pendapatan atas adanya penurunan dana tranfer sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 yang lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, maka dilakukan perubahan penjabaran (penurunan) APBD mendahului Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor No.25 Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum di sub bab 3.7.

Namun kinerja pendapatan daerah hingga triwulan 2 menunjukkan perbaikan. Geliat sektor perdagangan kembali membaik, dengan kembali beroperasinya mall-mall, bergeliatnya kembali penjualan di restoran baik melalui pesan antar ataupun *take away*. Pada sektor industri, sebagian industri lebih melakukan perubahan metoda kerja melalui *workh from home* tanpa menurunkan produksinya. Beberapa industri kimia mengalami kenaikan produksi di masa pandemi ini. Hal ini memberikan kinerja yang positif terhadap kinerja pendapatan di triwulan 3 dan 4 meskipun tidak seperti pada kondisi reguler. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan *new normal* yang akan berlaku secara bertahap di bulan juli 2020.

Maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD tahun 2020 diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan layanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatan law enforcement. Peningkatan layanan perpajakan dilakukan melalui layanan berbasis elektronik, yang mana wajib pajak atau pelaku usaha dipermudah pelayanannya dan pemungutan pajaknya. Saat ini telah tersedia layanan berbasis elektronik yaitu : e-sptpd, SIMBOCIL, SMS Billing PBB dan info pendapatan melalui pemasangan tapping box yang terintegrasi dengan sistem monitoring pajak daerah, serta pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah baik PBB maupun pajak konvensional lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui peningkatan *law enforcement* melalui kerjasama dengan Pengacara Negara, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Cilegon.

Sebagai stimulus perekonomian, Pemerintah Kota Cilegon memberikan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak Covid 19 berupa penghapusan denda pajak kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan penghapusan denda sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2.2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun 2020 secara umum terbagi pada dua tahap : *tahap pertama* yang dituangkan pada perwal perubahan penjabaran, sebagai dukungan percepatan penanganan covid-19 di Kota Cilegon. Kebijakan belanja pada perubahan perwal

tersebut diarahkan pengamanan daya beli masyarakat serta perekonomian daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran melalui :

- a) rasionalisasi belanja pada APBD reguler; Dilakukan melalui penjadwalan ulang capaian program/kegiatan, perubahan alokasi anggaran serta penundaan pemanfaatan anggaran
- b) prioritas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan covid; Belanja BTT tersebut diprioritaskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial.
- c) realokasi belanja bantuan keuangan yang telah dilakukan melalui perubahan penjabaran mendahului perda perubahan APBD.

Tahap kedua, dilakukan melalui perubahan APBD Kota Cilegon sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD tahun 2020, yang didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD hingga triwulan 2 tahun 2020. Seiring dengan adanya penambahan pendapatan baik PAD maupun dana transfer maka kebijakan belanja diarahkan pada mitigasi bencana khususnya bencana banjir, upaya untuk menjaga kualitas pelayanan dasar, dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, percepatan penyelesaian kegiatan prioritas daerah serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan terkait dana transfer dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yang diselaraskan dengan penanganan covid dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait hal ini, dilakukan perubahan prioritas dan fokus belanja yang semula prioritas pertama dialokasikan untuk belanja infrastruktur menjadi kepada kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada menjaga kualitas kesehatan, kualitas pendidikan serta perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

2.2.3.1 Rasionalisasi Belanja Pada APBD Tahun 2020

Rasionalisasi belanja pada APBD tahun 2020 dilakukan melalui :

1. Penjadwalan ulang capaian program/kegiatan serta perubahan alokasi anggaran, terhadap :
 - a) Kegiatan yang memiliki proses pelaksanaan yang bertentangan dengan kebijakan *social distancing/physical distancing*.
 - b) Rasionalisasi belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya, seminar serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang, atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat di tunda pelaksanaannya.
 - c) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat (DAU Kelurahan)
 - d) Belanja Modal yang kurang prioritas, terutama pengadaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan perkantoran serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan ditunda untuk tahun berikutnya.

- e) Kegiatan yang masih belum tepat kode rekening penganggarannya didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan belum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Melakukan **re-schedule** atau **penundaan** pemanfaatan anggaran pada komponen belanja Hibah yang tidak terkait atau mendukung upaya mitigasi dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Cilegon serta pengamanan daya beli masyarakat. Pengecualian terkait hal ini adalah belanja hibah terkait penyelenggaraan pilkada, yang tetap akan diselenggarakan di tahun 2020.

2.2.3.2 Prioritas Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Penanganan covid-19 menggunakan belanja tidak terduga, yang dalam hal ini mengalami penambahan dari hasil rasionalisasi belanja. Penggunaan belanja tidak terduga ini dituangkan dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 973/Kep.190-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, yang pedoman penggunaannya diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cilegon Tahun 2020, yang mana BTT tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk :

- a. Penanganan Kesehatan, antara lain :
 1. Penyediaan sarana prasarana Kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas media, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana Kesehatan lainnya;
 2. Penyediaan sarana fasilitas Kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *COVID-19*, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. Merekrut tenaga Kesehatan/media yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus Pendidikan atau tenaga Kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *COVID-19*;
 4. Pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 5. Penyemprotan desinfektan;
 6. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
 8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 9. Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
 10. Penanganan kesehatan lainnya;
- b. Penanganan dampak ekonomi, antara lain :
 1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 2. Penanganan insentif berupa :

- a) Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
- b) Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c) Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
4. Penanganan dampak ekonomi lainnya;
- c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain :
 1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak *COVID-19*;
 2. fasilitas Kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
 3. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada d alam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemic *COVID-*

2.2.3.3 Perubahan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020

Perubahan penggunaan belanja bantuan keuangan didasarkan pada surat Gubernur Provinsi Banten No 050/828-Bapp/2020 tanggal 3 april 2020 perihal Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Banten No. 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi Bantn.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi, yang dalam hal ini ditujukan untuk percepatan pencegahan dan penanganan covid-19 di Kota Cilegon meliputi :

- 1) Penanganan kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan covid-19 di Kota Cilegon, meliputi pemberian insentif tenaga medis, keg. screening, APD, sarpras pola hidup bersih sehat dan alat-alat medis dan kedokteran;
- 2) Penanganan dampak ekonomi antara lain berupa bantuan modal untuk UMK yang terdampak di baik di sektor formal ataupun non formal;
- 3) Penyediaan *social safety net* (jaring pengaman sosial) berupa bantuan uang tunak ataupun sembako untuk masyarakat yang berada di PBDD (data terpadu) ataupun yang tidak tetapi terdampak, misalnya masyarakat yang terkena PHK; serta bantuan hibah kepada instansi vertikal.

Seiring dengan adanya perkembangan pendapatan, baik terkait hasil evaluasi pendapatan hingga akhir triwulan 2 serta perubahan terkait dana transfer, maka penambahan belanja akan diprioritaskan pada: 1)mitigasi bencana khususnya bencana banjir; 2)pemenuhan pelayanan dasar; 3)dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 4)percepatan penyelesaian kegiatan prioritas daerah serta 5)dukungan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan terkait dana transfer dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang

ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yang diselaraskan dengan penanganan covid dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait hal ini, dilakukan perubahan prioritas dan fokus belanja yang semula prioritas pertama dialokasikan untuk belanja infrastuktur menjadi kepada kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada menjaga kualitas kesehatan, kualitas pendidikan serta perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

2.2.3.4 Prioritas belanja lainnya di triwulan 3 dan 4 tahun 2020

Beberapa kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2020 adalah penyelesaian pembayaran lahan jalan lingkar utara yang utara yang dilanjutkan dengan pematangan lahan JLU. Upaya penanganan banjir yang cukup parah terjadi di beberapa wilayah kecamatan beberapa bulan lalu, difokuskan pada penyelesaian pembangunan tandon, serta pemeliharaan saluran dan drainase. Upaya untuk menjaga kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, dilakukan melalui perluasan dukungan untuk belajar daring, dukungan sarpras dan edukasi untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dengan mengoptimalkan penambahan anggaran dana transfer baik BOS maupun kapitasi serta dukungan sarpras, pendampingan dan pelatihan terhadap usaha mikro kecil dan tenaga kerja terdampak covid. Pemenuhan dukungan layanan pemerintah khususnya beberapa kegiatan di program generik menjadi prioritas lainnya dalam rangka mendukung layanan pemerintahan.

Sedangkan terkait anggaran penambahan dana insentif daerah, sebagaimana petunjuk teknis yang ditetapkan, prioritas belanja diarahkan pada upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

2.2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan dalam APBD adalah melakukan penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2019 berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Bab 3:

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

3.1.1.1 Urusan Pendidikan

A. DINAS PENDIDIKAN DAN SMPN

Tabel 3.1.1.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
DINAS PENDIDIKAN						
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		9.659.947.125	8.739.234.377	90,47%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	100%	100%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	91.00%	91,00%		
	Tingkat disiplin aparatur	100%	99.70%	99,70%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan <i>cash budget</i> (anggaran kas)	100%	96.70%	96,70%		
Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal		3.503.386.307	3.337.401.107	95,26%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS (0-6 tahun)	8.87%	9.47%	106,76%		
	APK PAUD usia 3-6 tahun (RENSTRA KEMDIKBUD)	43.64%	48.25%	110,56%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (TK/RA/TPA)	37.61%	41.22%	109,60%		
	Angka Melanjutkan (AM) POS PAUD/ KOBER/ TPA/ SPS	100%	100%	100%		
	Angka Putus Sekolah (APTs) PAUD/ KOBER/ TPA/ MDA	0%	0%	100%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) TK dan sederajat (TK/RA)	37.02%	41.22%	111,35%		
	Proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang melek huruf	100%	99.95%	99,95%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) TK/RA	37.02%	40.65%	109,81%		
	Tingkat kelulusan UN kejar paket A	100	100	100%		
	Tingkat kelulusan pendidikan kesetaraan Paket B dan C	100	100	100%		
	APM Pendidikan Prasekolah	59.21.00	61.83	104,42%		
	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Prasekolah	1,004861111	25.08.00	105,96%		
	Proporsi Penduduk usia PAUD Yang Tidak Sekolah	76.33.00	74.92	98,15%		
Pengadaan Peralatan/Pendidikan PAUD Holistik Integratif		295.756.000	293.665.400	99,29%		
	Terlaksananya pengadaan alat didik untuk PAUD Holistik Integratif	4 Lembaga	4 Lembaga	100%		
Pengadaan Fasilitas Sarana Belajar Bagi PAUD		337.556.000	326.451.000	96,71%		
	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) Outdoor, Indoor, Meubelair dan audio visual	16 Lembaga	16 Lembaga	100%		
Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)		200.000.000	199.022.000	99,51%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga TBM yang Mendapatkan Operasional	28 Lembaga	28 Lembaga	100%		
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)		160.000.000	156.400.000	97,75%		
	Terlaksananya Lembaga PKBM yang mendapatkan operasional	15 Lembaga	15 Lembaga	100%		
Peningkatan Kompetensi Pengelola TK Holistik Integratif		95.700.000	95.700.000	100%		
	Terselenggaranya Peningkatan kompetensi pengelolaan TK holistik Integratif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Apresiasi PTK PNFI Berprestasi Tingkat Kota Cilegon		230.047.000	227.628.800	98,95%		
	Terlaksananya Kegiatan Lomba dalam rangka apresiasi PTK PNF Berprestasi TK, Kota Cilegon	15 Mata Lomba	15 Mata Lomba	100%		
Bantuan BOP TK Negeri		294.284.797	291.074.797	98,91%		
	Terlaksananya BOP TK Negeri	14 Lembaga	14 Lembaga	100%		
Penyelenggaraan keterampilan bagi Warga Belajar Paket C dan Paket B		75.000.000	74.492.000	99,32%		
	terlaksanya pelaksanaan keterampilan warga belajar paket C	615 Orang	615 Orang	100%		
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Kesetaraan		70.440.050	70.039.950	99,43%		
	Terlaksananya Kebutuhan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Kesetaraan	900 Orang	900 Orang	100%		
Pendampingan Operasional DAK		141.086.000	0	0,00%	Pendampingan DAK tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan DAK itu sendiri mengalami rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid	
	Terlaksananya kegiatan pendampingan operasional DAK	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal		88.972.610	88.972.610	100%		
	Terlaksananya Ujian Kompetensi Keterampilan Warga Belajar Non Formal	75 Orang	75 Orang	100%		
Pelatihan Keterampilan Warga Belajar Non Formal		147.415.000	147.415.000	100%		
	Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan warga belajar non formal	80 Orang	80 Orang	100%		
Penyelenggaraan Paket B dan C kesetaraan Pendidikan Non Formal		300.000.000	300.000.000	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C Serta Penguatan Kelembagaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Peningkatan Kompetensi Pengelola PAUD Holistik Integratif		238.751.850	238.751.850	100%		
	Terlaksananya peningkatan kompetensi pengelolaan PAUD Holistik Integratif	150 Orang	150 Orang	100%		
Penyusunan Bahan Ajar Program Pendidikan Kesetaraan Paket B Dan Paket C		4.320.000	4.320.000	100%		
	Terlaksananya kegiatan penyusunan bahan ajar program pendidikan kesetaraan Paket B dan C	100 Orang	100 Orang	100%		
Pelatihan Dan Penulisan Soal UPK Pendidikan Kesetaraan		47.800.000	47.800.000	100%		
	Terlaksananya pelatihan dan penulisan soal UPK Pendidikan kesetaraan	50 Orang	50 Orang	100%		
Pengadaan Server dan Komputer Bagi PKBM		440.500.000	440.500.000	100%		
	Tersedianya Komputer dan Server Untuk UNBK Bagi PKBM	2 PKBM	2 PKBM	100%		
Pengadaan Peralatan Kantor bagi Lembaga PAUD		78.000.000	77.440.000	99,28%		
	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor bagi Lembaga PAUD	8 Lembaga	8 Lembaga	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK)		226.824.000	226.824.000	100%		
	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK)	1 Sekolah	1 Sekolah	100%		
Pengadaan Sarana Belajar PAUD (DAK)		30.933.000	30.903.700	99,91%		
		1 Sekolah	1 Sekolah	100%		
Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar						
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar		13.829.243.000	12.085.733.356	87,39%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	116.82%	112.31%	96,14%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	101.74%	93.29%	91,69%		
	Angka Mengulang Kelas (AMK) SD/ MI	2.86%	0.21%	192,66%		
	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI/ SDLB ke SMP/ MTs/ SMPLB	100%	100%	100%		
	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/ MI	0.25%	0.01%	196,00%		
	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	100%	100%	100%		
	Rata - rata lama sekolah (RLS)	11.08 Tahun	9.74 Tahun	87,91%		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.04 Tahun	13.15 Tahun	87,43%		
	Cakupan sekolah dasar (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	95	96.11.00	101,17%		
Pembangunan Ruang Perpustakaan		1.500.000	1.500.000	100%		
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Perpustakaan	3 SD	3 SD	100%		
Pembangunan Toilet		115.000.000	86.200.000	74,96%		
	Terlaksananya Pembangunan Toilet sekolah dalam kondisi baik	16 Ruang	16 Ruang	100%		
Pengadaan Meubeleir Sekolah Dasar		300.000.000	291.789.000	97,26%		
	Tersedianya Fasilitas Barang Meubeleir	12 Bulan	12 Bulan	100%		
Penyelenggaraan Lomba-Lomba		241.760.000	241.760.000	100%		
	Terselenggaranya Lomba-Lomba Kesiswaan sekolah dasar	25 Mata Lomba	25 Mata Lomba	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah Dasar		69.405.000	66.907.600	96,40%		
	Jumlah Sekolah Yang Menyelenggarakan PSB	150 Sekolah Negeri	150 Sekolah Negeri	100%		
Penyelenggaraan dan Pelatihan UASBN dan US SD/MI		4.900.000	4.900.000	100%		
	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan UASBN dan US SD/MI	8.000 Siswa	8000 Siswa	100%		
Penyelenggaraan Pembinaan Program Gugus dan KKKS		4.793.000	4.793.000	100%		
	Jumlah peserta Pembinaan Program Gugus dan KKKS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Pelatihan Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar		7.440.000	7.440.000	100%		
	Jumlah Peserta Pelatihan Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar	80 Peserta	80 Peserta	100%		
Penyelenggaraan Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan		79.580.000	79.005.500	99,28%		
	Jumlah Lomba Kesiswaan yang dilaksanakan	25 Mata Lomba	25 Mata Lomba	100%		
	Terselenggaranya lomba PAI	1 Mata Lomba	1 Mata Lomba	100%		
	Terselenggaranya lomba MIPA, Kreativitas dan kesenian	1 Mata Lomba	1 Mata Lomba	100%		
Pengembangan Kurikulum Sekolah mantap		11.240.000	10.640.000	94,66%		
	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD) Mantap	8 Sekolah	8 Sekolah	100%		
Pengadaan Alat TIK Sekolah Dasar Negeri		317.000.000	316.800.000	99,94%		
	Tersedianya Peralatan Komputer	64 PC. 4 Laptop. 4 Proyektor	64 PC. 4 Laptop. 4 Proyektor	100%		
Renovasi Pagar dan Gapura		300.000.000	295.825.000	98,61%		
	Tersedianya pagar dan gapura sekolah	4 SD	4 SD	100%		
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD		1.450.000	1.450.000	100%		
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD	2 SD	2 SD	100%		
Penulisan Soal UASBN SD/MI		78.030.000	75.830.000	97,18%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Mata Pelajaran hasil Penulisan Soal Jenjang Sekolah Dasar	3 Mata Pelajaran	3 Mata Pelajaran	100%		
Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)		4.132.733.000	3.525.446.320	85,31%		
	Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana Belajar Sekolah Dasar	34 Ruang Kelas	34 Ruang Kelas	100%		
Renovasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (DID)		6.192.412.000	5.384.072.936	86,95%		
	Terlaksananya Reviataliasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	6 Sekolah	6 Sekolah	100%		
Rehabilitasi Ruang Kantor/Guru		302.500.000	290.429.000	96,01%		
	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kantor/Guru	3 SD	3 SD	100%		
Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)		1.039.500.000	1.039.500.000	100%		
	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Belajar SD	5 Ruang Kelas	5 Ruang Kelas	100%		
Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)		630.000.000	361.445.000	57,37%	Realisasi anggaran berdasarkan hasil penawaran lelang, yang menunjukan adanya efisiensi anggaran	
	Tersedianya Sarana Alat Kesenian Tradisional Sekolah Dasar	7 Sekolah	7 Sekolah	100%		
Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama						
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		9.184.121.913	9.138.593.913	99,50%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ SMPLB	109.13%	98.27%	90,05%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	96.33%	85.42%	88,67%		
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs/ SMPLB ke SMA/ SMK/ MA/ SMALB	100%	100%	100%		
	Angka Putus Sekolah (APTs) SMP/ MTs	0.11%	0.01%	190,91%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	100%	100%	100%		
	Angka Mengulang Kelas (AMK) SMP/ MTs	0.12%	0.1%	116,67%		
	Cakupan sekolah menengah pertama (sederajat) yang telah memenuhi kriteria SPM	95	97.06.00	102,74%		
	Cakupan siswa/i kurang mampu yang mendapatkan fasilitas di sekolah negeri dan sekolah swasta	80	0	0,00%		
Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Jenjang SMP		394.045.925	394.045.925	100,00%		
	Terciptanya kenaikan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Pendidikan Menengah	83 SMP dan MTs	83 SMP dan MTs	100%		
Gebyar Festival FLS2N Tingkat Kota Cilegon		47.500.000	47.311.000	99,60%		
	Terselenggaranya kegiatan dalam pengembangan minat bakat siswa	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%		
Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota Cilegon		64.615.000	64.615.000	100,00%		
	Meningkatnya Prestasi Siswa dibidang Sains	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Penyelenggaraan Lomba Literasi Sekolah		197.000.000	197.000.000	100,00%		
	meningkatnya prestasi siswa dibidang literasi sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Kegiatan Gebyar Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SMP		149.150.000	147.950.000	99,20%		
	Meningkatnya mutu dan prestasi siswa dalambidang PAI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama		411.367.000	398.445.000	96,86%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	11 Sekolah	11 Sekolah	100%		
Liga Sepak bola Siswa Jenjang SMP		14.850.000	14.850.000	100,00%		
	Meningkatnya Mutu dan Prestasi siswa bidang Laga Sepak Bola	42 Sekolah	42 Sekolah	100%		
Revitalisasi SMP Negeri		3.600.000	3.600.000	100%		
	Terlaksananya Renovasi SMP Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		
Pengadaan Alat Lab, IPA / Fisika Biologi SMP		3.000.000	3.000.000	100%		
	Terlaksananya Alat Laboratorium SMP Negeri	2 Sekolah	2 Sekolah	100%		
Pengadaan Lab Komputer SMP		2.091.864.246	2.091.864.246	100%		
	Terlaksananya Komputer SMPN	2 Sekolah	2 Sekolah	100%		
Pengadaan Studio Visual SMP		1.594.550.000	1.577.000.000	98,90%		
	Terlaksananya Pengadaan Studio Visual SMPN	11 Sekolah	11 Sekolah	100%		
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)		2.368.791.000	2.368.791.000	100%		
		4 Sekolah	4 Sekolah	100%		
Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)		1.475.357.000	1.471.127.000	99,71%		
		4 Sekolah	4 Sekolah	100%		
Pengadaan Sarana Sekolah SMP Negeri		318.431.742	310.336.742	97,46%		
	Terlaksananya Pengadaan Sarana Sekolah SMP Negeri	3 Sekolah	3 Sekolah	100%		
Sosialisasi pengelolaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota		50.000.000	48.658.000	97,32%		
	Tersedianya pendampingan dalam evaluasi, penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan dana BOS SMP	43 Sekolah	43 Sekolah	100%		
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan						
Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan		18.565.690.520	18.456.504.920	99,41%		
	Angka kelulusan ujian akhir SD/ sederajat	100%	100%	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Angka kelulusan ujian akhir SMP/ sederajat	100%	100%	100%		
	Proporsi jumlah guru SD/ sederajat yang memenuhi kriteria SPM	100%	100%	100%		
	Proporsi jumlah guru SMP/ sederajat yang memenuhi kriteria SPM	100%	100%	100%		
	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%		
	Di setiap kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%		
	Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah untuk SD/MI memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%		
	Di setiap kota semua pengawas sekolah dan madrasah SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	100%	100%		
	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau DIV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikasi	100%	100%	100%		
	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/ S1 (Proporsi jumlah guru SD/MI, SMP/ MTs/ dan SMA/ SMK/ MA yang berijazah D4/ S1 terhadap total jumlah guru SD/MI, SMP/ MTs)	89.71%	92.99%	103,66%		
	Jumlah Guru TK/RA yang bersertifikat Pendidik	350 Orang	359 Orang	102,57%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Guru TK/RA yang berkualifikasi S1/D4	735 Orang	864 Orang	117,55%		
Penyelenggaraan & Pembekalan Calon Peserta PPG		20.785.000	20.785.000	100%		
	Tersedianya Pembekalan Calon Peserta PPG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap		65.169.700	65.169.700	100%		
	Tersedianya Workshop Pemantapan Mata Pelajaran SMP Sekolah Mantap	118 Peserta	118 Peserta	100%		
Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap		95.910.500	95.910.500	100%		
	Terselenggaranya Workshop Pemantapan Guru Kelas Sekolah Mantap	130 Orang	130 Orang	100%		
Workshop Pembinaan Pemantapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan		100.539.700	100.539.700	100%		
	Terselenggaranya Pemantapan pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Jenjang TK	100 Orang	100 Orang	100%		
Penyelenggaraan Kualifikasi Guru S1/D4 Tingkat Kota Cilegon		39.613.500	39.613.500	100%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Jumlah Guru Kualifikasi Guru SMA/D3	300 Orang	300 Orang	100%		
Pendidikan dan Pelatihan (workshop/binlat/seminar/dll) Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan		17.695.900	17.695.900	100%		
	Terlaksananya Workshop Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	260 Orang	260 Orang	100%		
Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		12.797.076.620	12.716.076.620	99,37%		
	Jumlah Peserta calon penerima Bantuan Honor Daerah Bagi Sekolah SD Negeri dan Sekolah Swasta Jenjang TK, SD dan SMP	2.337 Orang	2337 Orang	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemeliharaan Sistem Informasi Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Rapor		42.000.000	41.277.000	98,28%		
	Terpeliharanya Sistem Informasi Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Rapor	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%		
Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru		22.000.000	21.954.000	99,79%		
	Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Tunjangan Guru	1 Sistem	1 Sistem	100%		
Penguatan Lembaga PAUD Non Formal		4.921.210.000	4.903.660.000	99,64%		
	Terlaksananya Operasional Pengelola PAUD	908 Orang	908 Orang	100%		
Seleksi dan Apresiasi GTK Tingkat Kota Cilegon		201.078.600	198.862.000	98,90%		
	Jumlah Hadiah Laptop bagi peserta Juara Lomba Tahun 2020	439 Orang	439 Orang	100%		
Verifikasi Dan Validasi Guru Penerima Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Non Sertifikasi		86.171.000	86.171.000	100%		
	Verifikasi Gaji Berkala Peserta penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Tambahan Penghasilan	200 Orang	200 Orang	100%		
Workshop Kepemimpinan Kepala Sekolah PAUD		4.940.000	4.940.000	100%		
	Terlaksananya Workshop Kepemimpinan Kepala Sekolah PAUD	300 Orang	300 Orang	100%		
Penyelenggaraan Olimpiade Guru Tingkat Kota Cilegon		151.500.000	143.850.000	94,95%		
	Terlaksananya penyelenggaraan OGN	388 Guru SD dan SMP	388 Guru SD dan SMP	100%		
SMPN						
SMPN 1						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.127.572.936,00	1.053.270.788,00	93,41%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		94.238.224,00	65.284.474,00	69,28%		
Pembinaan Orientasi Siswa		5.427.000.00	5.427.000.00	100%		
	Tercapainya Pembinaan Orientasi Terhadap Siswa Baru	250 siswa	250 siswa	100%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		82.758.724.00	54.794.974.00	66%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 1 Cilegon	5 kegiatan	5 kegiatan	100%		
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik		6.052.500.00	5.062.500.00	83,64%		
	Terlaksananya Pembinaan Iman dan Takwa Siswa/i SMPN 1 Cilegon	706 siswa	706 siswa	100%		
SMPN 2						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.041.252.224,00	899.844.335,00	86,42%		
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		162.653.400,00	94.095.000,00	57,85%		
Pembinaan Orientasi Siswa		25.202.400	23.975.000	95,13%		
	Terpenuhinya kegiatan Pembinaan Orientasi Siswa	4 kegiatan	4 kegiatan	100%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		41.172.000	36.795.000	89,37%		
	Terpenuhinya kegiatan evaluasi hasil belajar	6 kegiatan	6 kegiatan	100%		
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik		80.640.000	28.060.000	34,80%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler	17 jenis	17 jenis	100%		
Pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik		15.639.000	6.165.000	39,42%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terpenuhinya kegiatan Pembinaan Imtaq dan Kerohanian peserta didik	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00%		
SMPN 3						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		883.702.391,00	778.409.069,00	88,08%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		144.600.000,00	39.526.200,00	27,33%		
Evaluasi hasil belajar peserta didik		103.800.000	33.136.200	31,92%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik	4 Keg	4 Keg	100%		
Pembinaan orientasi peserta didik		23.400.000	6.390.000	27,31%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya pembinaan orientasi peserta didik	3 Keg	3 Keg	100%		
pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik		17.400.000	-	0,00%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik	1 Keg	1 Keg	100%		
SMPN 4						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.091.743.756	962.764.560	88,19%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		130.580.000,00	91.445.000,00	70,03%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		58.320.000	41.655.000	71,42%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Tersedianya pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik	6 kegiatan/12 bulan	12 bulan	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembinaan Orientasi Peserta Didik		21.780.000	10.200.000	46,83%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya orientasi pendidikan	5 kegiatan/192 orang /3 bulan	3 bulan	100%		
Pembinaan Imtaq dan kerohanian peserta didik		15.450.000	7.200.000	46,60%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Tersedianya pembinaan Imtaq dan kerohanian seluruh warga SMP Negeri 4 Cilegon.	5 kegiatan/12 bulan	12 bulan	100%		
Rehabilitasi Toilet SMP		35.030.000	29.150.000	83,21%		
	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala toilet sekolah	20 toilet/12 bulan	12 bulan	100%		
SMPN 5						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.017.920.603,00	974.661.711,00	95,75%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama						
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		122.700.321	61.437.700	50,07%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya kebutuhan Evaluasi Hasil Belajar pada SMPN 5 Cilegon	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%		
SMPN 6						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.123.254.206	1.028.630.584	91,57%		
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama	-	14.630.601	. 9.125.000.	62,37%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		14.630.601	. 9.125.000.	62,37%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik	800 Siswa	800 Siswa	100%		
SMPN 7						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		874.897.253,00	825.477.623,00	94,35%		
Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		96.000.000	66.360.000	69,12%		
Pembinaan Orientasi Siswa		11.400.000	8.100.000	71,05%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya kegiatan Pembinaan Orientasi Siswa	4 kegiatan	4 kegiatan	100%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		66.600.000	47.220.000	70,90%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya kegiatan evaluasi hasil belajar	10 kegiatan	10 kegiatan	100%		
Pendampingan Program Kurikulum 2013		9.000.000	8.760.000	97,33%		
	Terpenuhinya kegiatan workshop Pegawai SMPN 7 Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Peningkatan Kopetensi Akademis non Akademis		9.000.000	2.280.000	25,33%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler(akademis 3 Jenis dan non akademis 20 Jenis)	23 jenis	23 jenis	100%		
SMPN 8						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		920.811.408,00	874.522.963,00	94,97%		
SMPN 9						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		938.726.560	883.992.646	89,24%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		5.720.000	5.720.000	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		5.720.000	5.720.000	100%		
	Terlaksananya evaluasi hasil belajar pada SMPN 9 Cilegon	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		
SMPN 10						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		682.846.271	666.356.188	97,59%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		24.489.000	16.158.000	65,98%		
Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik		13.659.000	12.638.000	92,53%		
	Terlaksananya kegiatan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%		
kegiatan orientasi siswa		7.590.000	3.520.000	46,38%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya pembinaan orientasi siswa	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%		
Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik		3.240.000	0	0,00%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya pembinaan imtaq dan kerohanian peserta didik	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%		
SMPN 11						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		880.510.636	837.965.202	95,17%		
Program peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama		72.379.800	41.954.000	57,96%		
Pembinaan Orientasi siswa		5.886.000	3.766.000	63,98%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Orientasi siswa	6 kelas	6 kelas	100%		
Evaluasi Hasil Peserta Didik		34.663.800	30.038.000	86,66%		
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Peserta didik	9 kali	7 kali	77,77%		
Peningkatan Kompetensi Akademik non Akademik		24.930.000	1.750.000	7,02%	Karena pandemi covid, kegiatan dilakukan secara	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					daring sehingga beberapa anggaran tidak direalisasikan	
	Terlaksananya peningkatan kompetensi Akademik non Akademik	6 event	1 event	16,67%		
Penerimaan Peserta Didik Baru		6.900.000	6.400.000	92,75%		
	Terlaksananya kegiatan Penerimaan peserta didik baru	6 kelas	6 kelas	100%		

A. Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

A.1 Program Dukungan Layanan Pemerintahan

Pada Tahun 2020, Program Dukungan Layanan Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 90,47% atau terealisasi Rp. 8.739.234.377,00 dari target anggaran Rp. 9.659.947.125,00,-.

Pada program ini terdapat empat indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu tinglat disiplin aparatur, kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* (anggaran kas), persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, dan persentase ketersediaan data dan informasi sektoral. Program Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pendidikan Kota Cilegon pada Tahun 2020 berkinerja cukup baik tercermin dari keempat indikator capaian kinerja program terdapat 1 (satu) indikator memiliki tingkat capaian kinerja 100% dan 3 (lainnya) diatas 80%, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral;

Dinas Pendidikan selalu berupaya dalam memenuhi perencanaan dan pelaporan data sektoral diantaranya berupa data SPM (Standar Pelayanan Minimal), LPPD, LKPJ, dan SPIP. Sehingga untuk indikator persentase ketersediaan data dan informasi sektoral memiliki capaian indikator kinerja sebesar 100%.

2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik;

Indikator ini memiliki target kinerja 100%, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 91,00%.

3. Tingkat disiplin aparatur;

Ketercapaian indikator tingkat disiplin aparatur memiliki nilai capaian indikator kinerja 99,70% dari target 100%, yang dilihat dari rata-rata kehadiran pegawai dan kehadiran apel pegawai selama satu tahun pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* (anggaran kas);

Dinas Pendidikan Kota Cilegon telah berupaya untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan dengan baik, dimana realisasi keuangan kegiatan sesuai berdasarkan *cash budget* yang telah ditetapkan yaitu dengan target kinerja 100%. Akan tetapi pada Tahun 2020 ini terdapat kendala yaitu dampak Covid 19 pada segi anggaran terdapat beberapa kegiatan mengalami Refocusing/ Rasionalisasi Anggaran sehingga menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilanjutkan atau terhenti, sehingga tingkat realisasi ketercapaian pada indikator ini sebesar 96,70%.

Secara umum kinerja pada program dukungan pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Cilegon sangat baik walaupun terdapat kendala yaitu pengurangan anggaran terkait refocusing anggaran pada beberapa kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas (Cawas) dan Calon Kepala Sekolah (Cakep) serta Penguatan Kepala Sekolah Tingkat Kota Cilegon, Pengadaan Meubeleir, Pengadaan sewa Gedung/Rumah, Verifikasi dan Validasi GTK Kandidat Penerima NUPTK, Penguatan Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (POKJA DATADIK), Pemutakhiran Data Aplikasi Dapodik, Pemetaan Zonasi Sekolah Berbasis Spasial, Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon

Pada Program Dukungan Layanan Pemerintahan, ada beberapa kegiatan yang realisasi kinerja/anggarnya dibawah 80.00% yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 40,65% dikarenakan penyerapan anggaran pada tahun 2020 disesuaikan dengan pemakaian sumber daya air, listrik, dan telepon sehingga masih terdapat sisa anggaran;

2. Penyediaan jasa Transaksi Keuangan;

Penyediaan jasa Transaksi Keuangan dengan capaian 53,79% dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut hanya diserap sesuai dengan kebutuhan buku cek pada subag keuangan

3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

Terserap 60,25% dikarenakan adanya Kesalahan kode rekening seharusnya perjalanan keluar daerah namun masuk kedalam kode rekening perjalanan dalam daerah.

4. Pelaksanaan dan Evaluasi Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Guru

Terserap 73,71% dikarenakan Efisiensi Anggaran dan menyesuaikan dengan standar harga untuk akomodasi Kegiatan

5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terserap 79,36% Hasil negosiasi kontrak sehingga nilai anggaran turun dari pagu yang ditetapkan
6. Evaluasi dan Pelaporan Data Pembangunan Sektoral
Terserap 77,55% kegiatan dilakukan di Aula Dinas Pendidikan Kota Cilegon maka anggaran sewa ruang tidak diserap

A.2 Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Sasaran Strategis Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal adalah Terwujudnya penyediaan dan pengembangan layanan satuan Pendidikan PAUD Formal dan Non Formal yang merata dan berkeadilan secara berkesinambungan, berkualitas, terjangkau, relevan dan kompetitif.

Pada program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di atas terdapat 26 Indikator program yang rata – rata capaian realisasinya sudah mencapai lebih dari 90%, memiliki target anggaran Rp. 3.503.386.307,00,- dengan capaian realisasi keuangan 95,26 % atau terealisasi sebesar Rp. 3.337.401.107,00,- kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dan partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal telah terkelola dengan baik

Disisi lain jika dilihat dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran pada program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di atas juga sudah menunjukkan daya serapan anggaran yang maksimal dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,26% meskipun terdapat beberapa kegiatan yang terkena refocusing akibat covid 19 yaitu Pengadaan Alat Didik TK Holistik Integratif, Rehabilitasi Gedung PAUD, Penyelenggaraan Lomba Kesiswaan Paket B Tingkat Kota Cilegon, Gebyar Kreativitas Peserta Didik PAUD dan TK, Pendampingan Operasional DAK, Pendampingan Akreditasi Satuan Lembaga PNFI, Pengembangan Kurikulum 2013 PAUD dan TK, Penilaian Kinerja Lembaga P2PNF, Pembinaan dan Pengembangan PKG PAUD Formal dan Non Formal, Pelatihan Kelembagaan Pengelola PKBM TBM LKP dan PAUD, Rehabilitasi Gedung TK Negeri, Pramuka Saka Widya Budaya Bakti

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kinerja dan anggaran kegiatan pada Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal telah mencapai realisasi rata- rata lebih dari 90% yang berarti semua kegiatan dan anggaran yang tersedia dan tidak terkena refocusing telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2020.

A.3 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar adalah Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Dasar yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat. Pada program tersebut terdapat 22 Indikator program yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan capaian kinerja rata – rata lebih dari 90% yang menunjukkan bahwa pelayanan dan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan Sekolah Dasar telah dilakukan dengan baik di tandainya dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dengan realisasi 96,14% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan realisasi 91,69% Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa daya tampung peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar telah memadai dengan di dukung sarana dan prasarana yang mencukupi.

Untuk mendukung capaian indikator program tersebut maka diperlukan adanya kegiatan penunjang agar sasaran program dapat tercapai. Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran pada program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar telah mencapai 91,72%, yang menggambarkan bahwa hampir semua kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi disisi lain masih terdapat beberapa kegiatan yang relasisasinya di bawah 80%.

Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kinerja dan anggaran kegiatan yang tersedia pada Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar telah mencapai realisasi lebih dari 90% walaupun terdapat kegiatan yang terkena refocusing anggara yaitu Bantuan Operasional Sekolah Model dan Gugus, Pembangunan RKB SD Negeri, Pelaksanaan Kegiatan FLS2N, OSN, Pelatihan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar (SD), Penyelenggaraan Beasiswa SD, Pembinaan Pengelola Penerima Bantuan Pendidikan SD, Pendidikan dan Pelatihan Non Akademik, Pembangunan Sekolah Dasar Negeri, Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri namun secara kinerja semua kegiatan yang dan anggaran tersedia telah dilaksanakan secara maksimal di tahun anggaran 2020.

A.4 Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama adalah Terwujudnya ekosistem pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang merata, terjangkau, bermutu dan kompetitif bagi masyarakat. Jika di lihat dari tabel capaian indikator program diatas terdapat 16 indikator program yang realisasinya rata – rata telah mencapai lebih dari 90%. Salah satu indikator keberhasilan program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi sebesar 90,05% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dengan capaian realisasi sebesar 88,67%. Hal ini menunjukan bahwa daya tampung untuk masyarakat dan siswa usia 13-15 tahun telah memadai dari segi pelayanan maupun sarana – prasaran sekolah jenjang SMP sederajat.

Selain itu untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020 pun telah mencapai realisasi 99,50% dengan rata – rata realisasi serapan anggaran perkegiatan diatas 90%

meskipun terdapat kegiatan yang terkena refocusing anggaran yaitu Pengembangan Kurikulum Jenjang SMP, Rehabilitasi Sarana Prasarana Sekolah, Pembangunan RKB SMP, Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Jenjang SMP, Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP, Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Bimbingan Teknis Pengelola OSIS Se-Kota Cilegon, Sosialisasi Kapasitas Pembangunan Karakter Peserta Didik SMP, Worksoop Jurnalistik, Pendampingan Sekolah Model dan Sekolah Mantap, Pemasangan Paving Blok SMPN, Pengadaan Meubeleir SMP Negeri, Penyelenggaraan Beasiswa SMP, Pembangunan SMP Negeri, Rehabilitasi Ruang Kelas SMP, Pembangunan Aula SMP, Penilaian Pembelajaran Jenjang SMP, Pembangunan Lapangan Olahraga SMPN

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh kinerja dan anggaran kegiatan pada Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama belum dapat terlaksana 100% sehingga penyerapan anggaran pada program tersebut hanya sebesar 93,98% pada tahun anggaran 2020

A.5 Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Sasaran Strategis Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Meningkatnya Kapasitas, Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dari 12 indikator Program yang ada pada tabel tersebut rata – rata capaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Cilegon telah dilaksanakan dengan baik.

Jika dilihat dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan di atas bahwa capaian realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 99,41% meskipun terdapat kegiatan yang terkena refocusing yaitu Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, Pelatihan Guru Teknologi Informasi, Peningkatan Mutu Kualitas Pendidikan Guru Sekolah Negeri non PNS, Peningkatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Lomba dan Apresiasi Karya APEM, Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SD, Bimtek Kurikulum Pengelola PAUD, Seleksi dan Apresiasi Karya Tulis Ilmiah Bagi Guru SD dan SMP, Lomba Sastra Bahasa bagi Guru SMP, Penyelenggaraan Pemantapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) KKG/MGMP SD dan SMP, Workshop Penguatan Pendidikan karakter (PPK) KKKS/KKPS, MKKS/MKPS SD/SMP, Lomba Penulisan Best Practice Kepsek dan Pengawas, Lomba Karya Inovasi Pembelajaran Guru SMP.

A.6 SMPN

Dari tabel realisasi kegiatan dan anggaran 11 Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat dilihat bahwa rata – rata capaian realisasi kegiatan dan anggaran sudah terealisasi lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari APBD di SMP Negeri telah dikelola dengan baik. Akan tetapi ada beberapa kegiatan yang capaian realisasi anggarannya masih di bawah 80% antara lain :



1. SMPN 1

- a. Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terserap 58,52% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- b. Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan terserap 35,61% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
- c. Penyediaan Jasa jaminan/pemeliharaan Kesehatan (DID) terserap 63,30% dikarenakan sebagian alokasi anggaran telah tercover dari APBD
- d. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 66% karena terkena refocusing untuk penanganan covid-19

2. SMPN 2

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terserap 42,59% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal
- b. Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terserap 57,99% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- c. Peningkatan Kompetisi Akademik non Akademik terserap 34,80% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- d. Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik terserap 39,42% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

3. SMPN 3

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 53,73% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal



- b. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 52,04% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terserap 75,54% Pengurangan langganan koran karena sekolah diliburkan akibat pandemic Covid 19
 - d. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 31,92% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
 - e. Pembinaan Orientasi Peserta Didik terserap 27,31% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
4. SMPN 4
- a. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terserap 65,65% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
 - b. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 76,86% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
 - c. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 71,42% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
 - d. Pembinaan Orientasi Peserta Didik terserap 46,83% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
 - e. Pembinaan Imtaq dan Kerohanian Peserta Didik terserap 46,60% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
5. SMPN 5
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 73,49% dikarenakan Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakain listrik tidak maksimal

- b. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terserap 68,98% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor terserap 67,59% dikarenakan karena terkena refocusing untuk penanganan covid-19
- d. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer terserap 68,52% dikarenakan karena terkena refocusing untuk penanganan covid-19
- f. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 76,76% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
- g. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 50,07% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

6. SMPN 6

- e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 34,51% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal
- a. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 79,59% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
- b. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 62,37% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

7. SMPN 7

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 74,34% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal
- b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terserap 75,21% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal



- c. Penyediaan Makanan dan Minuman terserap 58,33% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- c. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 60,99% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID
- d. Pembinaan Orientasi Siswa terserap 71,05% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- e. Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik terserap 70,90% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- f. Peningkatan Kompetisi Akademik non Akademik terserap 25,33% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

8. SMPN 8

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 74,89% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal
- b. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terserap 8,91% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- d. Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan terserap 22,80% dikarenakan terdapat dana Tambahan dari kegiatan Penyediaan Jasa jaminan/Pemeliharaan Kesehatan yang bersumber dari DID

9. SMPN 9

- f. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional terserap 10,23% Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- a. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer terserap 64,35% Dikareenakan penurunann kegiatan di sekolah akibat pandemi maka tidak ada pemeliharaan komputer



10. SMPN 10

- a. Penyediaan Alat Tulis Kantor/ATK terserap 74,75% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- b. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional terserap 71,30% karena Kondisi kendaraan dan suku cadang masih layak pakai karena itu tidak dilakukan pemeliharaan
- c. Kegiatan Orientasi Siswa terserap 46,38% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

11. SMPN 11

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terserap 70,09% Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan rekening dari penyedia jasa layanan dan terdapat penurunan tagihan rekening pada tahun 2020 karena siswa yang belajar daring sehingga pemakaian listrik tidak maksimal
- b. Pemeliharaan dan Perijinan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional terserap 41,03%
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terserap 66,50% Pengurangan langganan koran karena sekolah diliburkan akibat pandemic Covid 19
- d. Pembinaan Orientasi Siswa terserap 63,98% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal
- e. Peningkatan Kompetisi Akademik non Akademik terserap 7,02% Karena pandemi covid, kegiatan kesiswaan dilakukan secara daring sehingga anggaran tidak terserap maksimal

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan :

1. Belum signifikannya peningkatan APK dan APM jenjang PAUD dikarenakan belum adanya peraturan daerah maupun peraturan Walikota terkait program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD;

2. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan beasiswa prestasi untuk siswa berprestasi dan lulusan terbaik jenjang SD dan SMP;
3. Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 4 standar kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial; serta belum meratanya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana SD di sejumlah sekolah sehingga mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar dan minimnya daya tampung;
5. Belum tersedianya data yang valid terkait penduduk usia sekolah yang tidak sekolah;

B.2 Solusi :

1. Disusunnya peraturan daerah dan peraturan walikota tentang program wajib PAUD bagi penduduk usia PAUD
2. Disediakan beasiswa prestasi bagi peserta didik berprestasi dan lulusan terbaik jenjang SD dan SMP;
3. Diadakannya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat, bimbingan teknis dan workshop kompetensi; serta dilakukan pemetaan zona pendidik dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan.
4. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja Penilik dalam pendataan masyarakat tidak sekolah serta memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah sampai dengan warga binaan di dalam lembaga pemasayarakatan;
5. Dibuat payung hukum yang mengatur tentang tata cara pemberian BOSDA untuk jenjang SD dan SMP serta BOPDA untuk jenjang PAUD;

3.1.1.2 Urusan Kesehatan

A. DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSKESMAS, LABKESDA, P2KT DAN JAMKESMAS

a. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Pada program ini, capaian kinerja keuangan mencapai 89,39% yaitu dari target sebesar Rp 15.186.442.549,- terealisasi sebesar Rp 13.576.148.864,- yang dalam hal ini terdapat beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, antara lain kegiatan pengadaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi ruang VIP. Namun, kinerja outcome program mencapai kinerja yang baik, yang secara ringkas ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		15.186.442.549	13.576.148.864	89,39		
	1. Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan (Dinkes)	100 %	100 %	100		
	2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Dinkes)	100 %	80 %	80		
	3. Tingkat disiplin dan kinerja aparatur (Dinkes)	100 %	100 %	100		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) (Dinkes)	100 %	87,64 %	87,64		

UPTD PUSKESMAS CILEGON

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		186.992.799	169.949.907	90,89		

UPTD PUSKESMAS CIWANDAN

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		264.300.000	228.005.579	86,27		

UPTD PUSKESMAS CIBEBER

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		176.460.880	153.324.944	86,89		

UPTD PUSKESMAS GEROGOL

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		79.309.000	70.610.935	89,03		



UPTD PUSKESMAS PULOMERAK

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		178.175.000	157.122.463	88,18		

UPTD PUSKESMAS PURWAKARTA

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		187.455.500	169.544.115	90,44		

UPTD PUSKESMAS JOMBANG

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		130.246.000	125.229.756	96,15		

UPTD PUSKESMAS CITANGKIL 1

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		174.375.000	130.854.017	75,04		

UPTD PUSKESMAS CITANGKIL 2

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		175.290.000	137.592.739	78,49		

UPTD LABKESDA

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		25.969.000	19.263.500	74,18		

UPTD JPKM

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		31.086.000	27.289.446	87,79		

UPTD PUSAT PELAYANAN KESEHATAN TERPADU

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		248.282.500	201.183.510	81,03		

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN

Program dukungan pelayanan bertujuan mengembangkan kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dengan sasaran program tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan, tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan untuk proses pengambilan dan pengelolaan pembangunan kesehatan, serta untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi program kesehatan. Keberhasilan program ini di dukung dengan beberapa indikator diantaranya :

1) Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan (%)

Data yang dibutuhkan adalah LAKIP, SPM, LPPD, dan LKPJ dan semua telah tersedia maka capaiannya adalah 100%.

$\frac{\text{Jumlah Pemenuhan dokumen LAKIP, SPM, LPPD, dan LKPJ}}{\text{Jumlah Pemenuhan dokumen LAKIP, SPM, LPPD, dan LKPJ}} \times 100\% = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

Jumlah Pemenuhan dokumen LAKIP, SPM, LPPD, dan LKPJ 4

2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (%),

Sarana dan Prasarana perkantoran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam kondisi baik dan layak adalah sebesar 80%

$\frac{\text{Jumlah aset OPD dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan aset OPD (yang tercatat di BPKAD)}} \times 100\% = \frac{19.028}{23.786} \times 100\% = 80\%$

Jumlah keseluruhan aset OPD (yang tercatat di BPKAD) 23.786

3) Tingkat disiplin dan kinerja aparatur (%)

Tingkat disiplin dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan mencapai realisasi 99,999%.

NO	BULAN	KETIDAK HADIRAN PEGAWAI TANPA KETERANGAN (%)	KEHADIRAN PEGAWAI (%)
1	Januari	0,001	99,999
2	Februari	0,002	99,998
3	Maret	0,002	99,998
4	April	0,000	100,000
5	Mei	0,000	100,000
6	Juni	0,000	100,000
7	Juli	0,000	100,000
8	Agustus	0,000	100,000
9	September	0,000	100,000
10	Oktober	0,000	100,000
11	November	0,000	100,000
12	Desember	0,000	100,000
JUMLAH		0,005	100,00

$\frac{\text{Persentase kehadiran pegawai selama 12 bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100\% = \frac{1.199.995}{12} \times 100\% = 99,999\%$

4) Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) (%)

Capaian Kinerja Kesesuaian Realisasi Keuangan berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas) sebesar 87,64% (Kategori Baik).

NO	TW	ANGGARAN KAS			KET
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI TRIWULAN TERHADAP TOTAL (%)	
1	TW I	39.209.836.216	21.157.229.662	17,25	
2	TW II	27.968.879.244	25.182.064.636	20,53	
3	TW III	24.842.435.022	26.050.192.477	21,24	
4	TW IV	30.634.025.274	35.111.640.767	28,63	
TOTAL		122.655.175.756	107.501.127.542	87,64	

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Tabel 3.1.1.2b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular						
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		36.715.121.077	32.316.023.562	88,01		
	1 Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	100 %	84,38 %	84,38		
	2 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertiikasi akreditasi	8 Puskesmas	8 Puskesmas	100		
	3 Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (memenuhi standar yang berlaku)	78 %	82,12 %	105,53		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4 Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	8 Puskesmas	8 Puskesmas	100		
	5 Persentase ketersediaan obat dan vaksin	98 %	100 %	102,04		

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.001.5.2 Peningkatan Kesehatan Dasar		17.577.000	17.577.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp. 100.000.000	
	1. Terlaksananya Pertemuan Upaya Pengembangan Perkesmas	0 orang	0 orang		Refocusing	
	2. Terlaksananya Rakontek Quickwin Pelayanan Darah	40 orang	40 orang	100		
	3. Terlaksananya Pertemuan Manajemen Puskesmas	0 orang	0 orang		Refocusing	
	4. Terlaksananya Pertemuan Laboratorium Sederhana	0 orang	0 orang		Refocusing	
	5. Terlaksananya Lomba FKTP Berprestasi	0 orang	0 orang		Refocusing	
	6. Terlaksananya Pembinaan FKTP Berprestasi	0 orang	0 orang		Refocusing	
	7. Terlaksananya Monitoring Program Yandas	0 orang	0 orang		Refocusing	
	8. Terlaksananya Validasi Data	90 orang	90 orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.003.5.2 Sistem Registrasi Kematian		100.000.000	99.490.000	99,49		
	1. Terlaksananya Pelatihan Wawancara Kasus Kematian	340 orang	340 orang	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2. Terlaksananya Wawancara Kasus Kematian	200 Kasus Kematian	200 Kasus Kematian	100		
	3. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Data CVRS	170 orang	170 orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.004.5.2 Peningkatan Kesehatan Rujukan		6.525.000	6.525.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp. 100 Juta	
	1. Terlaksananya Pertemuan FKTP dan FKTL tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon	0 orang	0 orang		Refocusing	
	2. Terlaksananya Pertemuan Pembuatan Produk Hukum tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon	40 orang	40 orang	100		
	3. Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon	0 orang	0 orang		Refocusing	
	4. Terlaksananya Validasi Data Rujukan (FKTP Swasta dan Pemerintah)	0 orang	0 orang		Refocusing	
	5. Terlaksananya Monev Sistem Rujukan	0 orang	0 orang		Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.15.005.5.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		220.000.000	220.000.000	100		
	1. Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Manajemen Puskesmas	110 Orang	110 Orang	100		
	2. Terlaksananya Rakor Persiapan Reakreditasi Puskesmas	110 Orang	110 Orang	100		
	3. Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Audit Internal dan Keselamatan Pasien di Puskesmas	110 Orang	110 Orang	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4. Terlaksananya Rakor Perencanaan Kegiatan di Puskesmas	110 Orang	110 Orang	100		
	5. Terlaksananya Pelatihan Perawatan Luka	25 Orang	25 Orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		83.660.000	83.586.000	99,91	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 135.000.000	
	1. Terlaksananya Pertemuan Upaya pengembangan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasyankes	36 orang	36 orang	100		
	2. Terlaksananya Pertemuan Penyehat Tradisional	55 orang	55 orang	100		
	3. Terlaksananya Pertemuan Orientasi kader Kelompok Asman Toga	110 orang	110 orang	100		
	4. Terlaksananya Lomba Asman Toga dan Akupresur TK Kota Cilegon	192 orang	192 orang	100		
	5. Terlaksananya Lomba Asman Toga & Akupresur TK Provinsi	0 orang	0 orang	0	Refocusing	
	6. Terlaksananya Pembinaan Kelompok Asman Toga & Akupresur	0 orang	0 orang	0	Refocusing	
	7. Terlaksananya Monitoring Program Yankestrad di Puskesmas	0 orang	0 orang	0	Refocusing	
	8. Terlaksananya Validasi Data Program Yankestrad	16 orang	16 orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.030.5.2 Peningkatan Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional		16.500.000	16.500.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 110.000.000	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Terlaksananya Rakoor JKN (KBKP) FKTP Pemerintah	141 Orang	141,00 Orang	100,00		
	2. Terlaksananya Rakoor JKN (KBKP) FKTP Swasta	0 Orang	0 Orang			
	3. Terlaksananya Validasi data instrumen JKN	0 Orang	0 Orang			
	4. Terlaksananya Monitoring JKN	0 Orang	0 Orang			
	5. Terlaksananya Pertemuan JKN	0 Orang	0 Orang			
1.1.02.1.1.02.01.00.15.053.5.2 Akreditasi Puskesmas (DAK)		703.414.000	163.816.000	23,29	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 Sesuai Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada masa pandemi Covid-19 bahwa kegiatan persiapan dan survei akreditasi ditunda sampai dengan setelah status bencana nasional dinyatakan dicabut oleh pemerintah	
	1. Terlaksananya Workshop Pendukung Akreditasi	225 orang	0 orang	0		
	2. Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi	240 orang	120 orang	50		
	3. Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas	240 orang	0 orang	0		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.108.5.2 Lomba Tenaga Kesehatan Teladan		4.900.000	4.900.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 80.000.000	
	1. Terlaksananya Uji Tulis Lomba Tenaga Kesehatan Teladan	0 orang	0 orang		Refocusing	
	2. Terlaksananya Kunjungan Lapangan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan	0 orang	0 orang			
	3. Terlaksananya Uji Lapangan Provinsi Lomba Tenaga Kesehatan Teladan	0 orang	0 orang			

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4. Terlaksananya Pembinaan Tenaga Kesehatan Teladan	10 orang	10 orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.109.5.2 Kajian Pembiayaan Kesehatan Daerah/DHA		46.575.000	46.525.000	99,89	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 190.000.000	
	1. Terlaksananya Entry data DHA	40 Orang	40 Orang	100		
	2. Terlaksananya Triangulasi Data DHA	0 Orang	0 Orang			
	3. Terlaksananya Pendampingan Data DHA	0 Orang	0 Orang			
	4. Terlaksananya Penajaman Data DHA	0 Orang	0 Orang			
	5. Terlaksananya Lokakarya Data DHA	0 Orang	0 Orang			
	6. Terlaksananya Desiminasi DHA	0 Orang	0 Orang			
	7. Terlaksananya Pelatihan DHA	80 Orang	80 Orang	100		

SEKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.006.5.2 Penyediaan Obat, bahan dan alkes habis pakai		627.713.000	622.940.393	99,24		
	1. Terlaksananya Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	12 Bulan	12 Bulan	100		
	2. Terlaksananya Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	0 Kegiatan	0 Kegiatan		karena adanya covid sehingga anggaran di alihkan ke belanja obat dan bmhp	Perubahan ABT

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.027.5.2 Pengawasan Obat dan Makanan		24.626.000	24.626.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 225.000.000	
	1. Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor	60 orang	60 orang	100		
	2. Terlaksananya Pengawasan Obat dan Makanan	60 Orang	60 Orang	100		
	3. Terlaksananya Pembinaan Keamanan Pangan Untuk Pedagang kaki Lima	0 Orang	0 Orang			
	4. Terlaksananya Sosialisasi Gerakan masyarakat Waspada Obat Makanan ilegal	0 Orang	0 Orang			
	5. Terlaksananya Penyuluhan Keamanan pangan	0 Orang	0 Orang			
	6. Terlaksananya Penyuluhan Pangan Jajanan Anak Sekolah	1 SD	1 SD	1		
	7. Terlaksananya Belanja bahan percontohan	100 Sampel	100 Sampel	100		
	8. terlaksananya Pengawasan Obat makanan dan Kosmetik di sarana Distribusi	0 Tempat	0 Tempat			
1.1.02.1.1.02.01.00.15.050.5.2 Pendamping DAK Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		3.250.000	3.250.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 15.000.000	
	1. Terjaminnya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.054.5.2 Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)		1.845.840.000	1.844.882.228	99,95		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Tersedianya Obat-obatan dan vaksin	12 bulan	12 bulan	100		
	2. Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai	12 bulan	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.207.5.2 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian		4.687.000	4.687.000	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) untuk Covid-19 yang semula anggaran Rp 225.287.000	
	1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kefarmasian	0 orang	0 orang			
	2. Terlaksananya Rapat Perencanaan TPOT	35 orang	35 orang	100		
	3. Terlaksananya Keg.Penggunaan Obat Rasional	0 orang	0 orang			
	4. Terlaksananya Keg.Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	0 orang	0 orang			
	5. Terlaksananya Rapat Evaluasi TPOT	0 orang	0 orang			
	6. Terlaksananya Pembekalan/Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian	0 orang	0 Orang			
1.1.02.1.1.02.01.00.15.208.5.2 Pengadaan BHPHIV dan Sifilis (DAK)		360.697.518	333.800.760	92,54		
	1. Terlaksananya Pengadaan Barang Habis Pakai dan Reagent HIV AIDS	12,00 bulan/9100 orang ibu hamil	12,00 bulan/9100 orang ibu hamil	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.209.5.2 Pengadaan Catridge TCM (DAK)		738.647.962	738.389.575	99,97		
	1. Tercapainya deteksi dini kasus TB resisten	2.849 orang	903 orang	31,70	Pandemic Covid-19 sehingga penjangkaran berkurang	
	2. Terlaksananya Pengadaan Reagent Program TB	12 bulan	12 bulan	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3. Terpenuhinya belanja bahan reagent	2.849 buah	2.849 buah	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.211.5.2 Distribusi Obat dan E-logistik (DAK)		65.000.000	61.575.023	94,73		
	1. Terlaksananya Distribusi dan Pemanfaatan Sistem Logistik Obat dan BMHP	12 Bulan	12 Bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.16.110.5.2 Penguatan Intervensi Stunting (Penanganan Gizi Buruk) (DAK)		483.633.000	483.630.648	100		
	1. Terlaksananya Pengadaan Obat Program Gizi untuk mencegah stunting	12 bulan	12 bulan	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.028.5.2 Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan		16.895.000	16.895.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 120.000.000	
	1. Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan bidang tenaga kesehatan	0 orang	0 orang	0	kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	2. Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan bidang sarana kesehatan	0 orang	0 orang	0	kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	3. Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor	40 orang	40 orang	0		
	4. Terlaksananya monitoring / survei sarana kesehatan	0 lokasi	0 lokasi	0	kegiatan tidak dianggarkan karena terkena refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.029. 5.2 ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)		19.000.000	19.000.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 70.000.000	
	1. Terlaksananya up dating data ASPAK	20 orang	20 orang	100		
	2. Terlaksananya rakornis ASPAK	0 orang	0 orang		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.15.044. 5.2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya		84.763.200	84.763.200	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 1.325.265.143	
	1. Terlaksananya rehabilitasi pustu kalitimbang	0 Unit Bangunan	0 Unit Bangunan		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	2. Terlaksananya rehabilitasi medical center bagendung	0 Unit Bangunan	0 Unit Bangunan		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	3. Terlaksananya poskesdes kota bumi	0 Unit Bangunan	0 Unit Bangunan		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	4. Terlaksananya Rehabilitasi pustu medical center samang raya	0 unit bangunan	0 unit bangunan		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	5. Terlaksananya Pembuatan pagar pustu lebak gede	0 unit bangunan	0 unit bangunan		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.15.045. 5.2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya		51.454.592	51.454.592	100	Kegiatan Direfocusingkan (Refocusing) yang semula anggaran Rp 625184592	
	1. Rehabilitasi medical center ketileng	0 paket	0 paket		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	2. Rehabilitasi poskesdes grogol	0 paket	0 paket		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3. Rehabilitasi pustu samangraya	0 paket	0 paket		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	4. Rehabilitasi poskesdes kepuh	0 paket	0 paket		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	5. Rehabilitasi kantor dinkes lama	0 paket	0 paket		kegiatan tidak dilakukan karena terkena refocusing	
	6. Jasa konsultan perencanaan	5 Paket	5 Paket	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.201.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan		2.000.000.000	1.988.843.591	99,44		
	1. Tersedianya sarana alat kesehatan di puskesmas	8 puskesmas	8 Puskesmas	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.301.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III (DAK)		1.350.000.000	1.349.999.988	100		
	1. Jumlah Pembayaran insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Covid-19	468 Orang Bulan (156 L ; 312 P)	424,00 Orang Bulan (156 L ; 312 P)	90,60		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.103.5.2 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)		2.819.886.000	2.818.678.755	99,96		
	1. Tersedianya Sarana Alat Kesehatan di Puskesmas	8 Puskesmas	8 Puskesmas	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.15.210.5.2 Pengadaan Posbindu Kit (DAK)		125.990.520	100.111.000	79,46		
	1. Tersedianya Posbindu Kit	19 Paket	19 Paket	100		

UPTD PUSKESMAS CILEGON

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		75.000.000	64.282.500	85,71		
1.1.02.1.1.02.01.02.15.026. 5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		75.000.000	64.282.500	85,71		
	1. Tersedianya Bahan Bibit/Tanaman Obat Keluarga	2 Jenis	2 Jenis	100		
	3. Tersedianya Belanja Cetak	1 Paket	1 Paket	100		
	4. Tersedianya Makanan dan Minuman	250 Box	250 Box	100		
	6. Tersedianya Transport Pembinaan Kesehatan	250 ok	250 ok	100		
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		1.349.536.515	1.104.291.472	81,83		
1.1.02.1.1.02.01.14.15.031. 5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		944.674.961	709.732.512	75,13		
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	12 Bulan/Orang	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.14.15.203. 5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		262.808.900	254.363.760	96,79		
	1. Tersedianya Alat Tulis Kantor	48 Jenis	45 Jenis	93,75		
	2. Tersedianya Perangko, Material	2 Jenis	2 Jenis	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dan Benda Pos Lainnya					
	3. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	22 Jenis	22 Jenis	100		
	4. Tersedianya Bahan Baku Bangunan	1 Paket	1 Paket	100		
	5. Tersedianya Bahan Obat-obatan	1 Paket	1 Paket	100		
	6. Tersedianya Laboratorium/Reage nt dan Bahan Habis Pakai	7 Jenis	7 Jenis	100		
	9. Tersedianya Cetak	17 Jenis	17 Jenis	100		
	10. Tersedianya Penggandaan	1 Jenis	1 Jenis	100		
	11. Tersedianya Cetak Spanduk	1 Jenis	1 Jenis	100		
1.1.02.1.1.02.01.14.15.204. 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		111.699.500	109.928.200	98,41		
	1. Tersedianya Pengadaan Alat Kantor	1 jenis	1 jenis	100		
	2. Tersedianya Pengadaan Alat Rumah Tangga	2 Jenis	2 jenis	100		
	3. Tersedianya Pengadaan Komputer	1 Paket	1 Paket	100		
	4. Tersedianya Pengadaan Alat Kedokteran	8 Jenis	8 Jenis	100		
	5. Tersedianya Peralatan audiovisual	2 jenis	2 Jenis	100		
	10. Tersedianya Belanja modal Gedung dan Bangunan	1 Paket	1 Paket	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.14.15.205. 5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		30.353.154	30.267.000	99,72		
	1. Tersedianya Jasa/Upah Tenaga Kerja	5 Jenis	5 Jenis	100		

UPTD PUSKESMAS CIWANDAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		81.965.000	81.965.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.03.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		81.965.000	81.965.000	100		
	1. Tersedianya Bahan Alat Pemeliharaan Tanaman	4 jenis	4 jenis	100		
	2. Tersedianya Bahan bibit Tanaman	700 bibit	700 bibit	100		
	3. Tersedianya Pupuk tanaman	300 karung	300 karung	100		
	4. Tersedianya transport petugas pembinaan TOGA	240 OK	240 OK	100		
	5. Tersedianya transport petugas Sosialisasi TOGA	120 ok	120,00 ok	100		
	6. Tersedianya Cetak Spanduk	48 m2	48 m2	100		
	7. Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Sosialisasi TOGA	120 Box	120 Box	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		2.002.849.834	1.781.978.986	88,97		
1.1.02.1.1.02.01.15.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		1.293.350.000	1.130.060.446	87,37		
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	12 bulan	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.15.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		468.502.834	426.253.040	90,98		
	1. tersedianya Alat Tulis Kantor	28 jenis	28 jenis	100		
	2. tersedianya bahan obat-obatan	1 paket	1 paket	100		
	3. tersedianya Evaluasi Puskesmas	1 paket	1 paket	100		
	4. tersedianya cetak dan penggandaan	45 jenis	45 jenis	100		
	5. tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29 jenis	29 jenis	100		
	6. tersedianya alat listrik dan elektronik	10 jenis	10 jenis	100		
	7. Tersedianya Materai	2 Jenis	2 Jenis	100		
	8. Tersedianya Pengisian tabung gas	2,00 jenis	2 jenis	100		
	9. Tersedianya Pengisian tabung Apar	1 Jenis	1 Jenis	100		
	10. Tersedianya Bahan Laboratorium	13 jenis	13 jenis	100		
	11. Tersedianya Bahan habis pakai rumah sakit	1 jenis	1 jenis	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	12. Tersedianya surat kabar/majalah	2 jenis	2 jenis	100		
	13. Tersedianya pakaian batik	70 stel	70 stel	100		
	14. Tersedianya penggandaan	40 lembar	36 lembar	92		
	15. tersedianya Cetak Spanduk	40 meter	40 meter	10		
	16. Tersedianya Bahan Kesehatan	2 jenis	2 jenis	100		
	17. tersedianya kebutuhan internet	0 tahun	0 tahun	0		
	18. Tersedianya Suku cadang alat Laboratorium	4 jenis	4 jenis	100		
1.1.02.1.1.02.01.15.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		199.992.000	190.235.500	95,12		
	1. Tersedianya Pengadaan alat kantor lainnya	0 JENIS	0 JENIS	0		
	2. Tersedianya Meubelair	4 JENIS	4 JENIS	100		
	4. Tersedianya pengadaan alat pendingin	4 jenis	4 jenis	100		
	5. Tersedianya pengadaan alat kedokteran umum	0 jenis	0 jenis	0		
	6. Tersedianya Peralatan Personal Komputer	2, jenis	2 jenis	100		
	7. Tersedianya Tabung Pemadam Kebakaran	1 jenis	1 jenis	100		
	8. tersedianya alat kedokteran gigi	1 unit	1 unit	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja % Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	9. tersedianya Rambu Puskesmas	3 jenis	3 jenis	100		
1.1.02.1.1.02.01.15.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		41.005.000	35.430.000	86,40		
	1. Terlaksananya Service/ Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	16 jenis	16 jenis	100		

UPTD PUSKESMAS CIBEKER

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		58.405.600	58.405.600	100		
1.1.02.1.1.02.01.04.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		58.405.600	58.405.600	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 90.000.000	
	1. Tersedianya Tanaman Obat	550 Pohon	550 pohon	100		
	2. Tersedianya Pupuk Tanaman NPK	30 Karung	30 karung	100		
	3. Tersedianya Tanaman Urea	31 Karung	31 karung	100		
	4. Tersedianya Poly Bag	3.000 Lembar	3.000 lembar	100		
	5. Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan	0 box	0 box	0		
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		1.659.500.000	1.465.146.563	88,29		
1.1.02.1.1.02.01.16.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		1.161.650.000	988.899.593	85,13	Pandemi Covid 19 berdampak terhadap berkurangnya peserta BPJS sehingga jasa pelayanan menurun	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	1 tahun	1 Tahun	100		
1.1.02.1.1.02.01.16.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		317.010.000	302.631.970	95,46		
	1. Tersedianya Alat tulis Kantor	30 jenis	30 jenis	100		
	2. Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	7 jenis	7 jenis	100		
	3. Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2 jenis	2 jenis	100		
	4. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 jenis	23 jenis	100		
	5. Tersedianya Bahan Obat-Obatan	1 jenis	1 jenis	100		
	6. Tersedianya Bahan Laboratorium / Reagent	11 jenis	13 jenis	118,18		
	7. Tersedianya Bahan Alat Habis Pakai Rumah Sakit	11 jenis	15 jenis	136,36		
	8. Tersedianya Belanja Cetak	16 jenis	16 jenis	100		
	9. Tersedianya Penggandaan / Fotocopy	1 jenis	1 jenis	100		
	10. Tersedianya Mamin Pelaksanaan Kegiatan	2.440 box	2.440 box	100		
1.1.02.1.1.02.01.16.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		131.840.000	128.307.500	97,32		
	1. Terlaksananya Pengadaan Personal Komputer	3 jenis	3 jenis	100		
	2. Terlaksananya Pengadaan Personal Printer	4 jenis	4 jenis	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3. Terlaksananya Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4 jenis	4 jenis	100		
	8. Terlaksananya Pengadaan Alat Pembersih	2 unit	2 unit	100		
	9. Terlaksananya Pengadaan alat pendingin	2 unit	2 unit	100		
	10. Terlaksananya pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use)	2 jenis	2 jenis	100		
	11. Terlaksananya pengadaan alat kedokteran gigi	1 jenis	1 jenis	100		
1.1.02.1.1.02.01.16.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		49.000.000	45.307.500	92,46		
	1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5 Paket	5 Paket	100		
	2. Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14 jenis	13 jenis	92,86		

UPTD PUSKESMAS GROGOL

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		59.475.000	59.475.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.05.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		59.475.000	59.475.000	100,00	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 60.000.000	
	1. Terlaksananya bahan/bibit tanaman	2 jenis	2 jenis	100		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2. Tersedianya spanduk nama kelompok Toga	4 kelurahan	4 kelurahan	100		
	3. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Toga	800,00 box	800 box	100		
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		838.595.164	734.888.178	87,63		
1.1.02.1.1.02.01.17.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		587.016.615	505.256.229	86,07	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 937.650.000	
	1. Tersedianya jasa pelayanan kesehatan	1 Tahun	1 tahun	100		
1.1.02.1.1.02.01.17.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		154.178.549	139.895.949	90,74	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 266.310.000	
	1. Tersedianya alat tulis kantor	33 jenis	33 jenis	100		
	2. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17 jenis	17 jenis	100		
	3. Tersedianya bahan kesehatan	3 jenis	3 jenis	100		
	4. Tersedianya bahan laboratorium/reagent	7 jenis	7 jenis	100		
	5. Tersedianya bahan obat-obatan	1 paket	1 paket	100		
	6. Tersedianya bahan alat habis pakai Rumah Sakit	6 jenis	6 jenis	100		
	7. Tersedianya cetak dan penggandaan	20 jenis	20 jenis	100		
	8. Tersedianya transportasi dan akomodasi	1 paket	1 paket	100		
1.1.02.1.1.02.01.17.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan		66.400.000	61.250.000	92,24	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 86.540.000	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Prasarana Puskesmas (Kapitasi)						
	1. Terlaksananya pengadaan personal komputer	4 unit	4 unit	100		
	2. Tersedianya Pengadaan Alat Kantor	1 unit	1 unit	100		
	3. Tersedianya Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1 unit	1 unit	100		
	4. Tersedianya Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	1 unit	1 unit	100		
1.1.02.1.1.02.01.17.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		31.000.000	28.486.000	91,89	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 49.000.000	
	1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	0 jenis	0 jenis	0		
	2. Tersedianya Bahan Baku Bangunan	14 jenis	14 jenis	100		
	3. Tersedianya Jasa/Upah Tenaga Kerja	2 jenis	2 jenis	100		

UPTD PUSKESMAS PULOMERAK

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		43.933.000	43.013.000	97,91		
1.1.02.1.1.02.01.06.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		43.933.000	43.013.000	97,91	Kegiatan Direfocusingkan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					yang semula anggaran Rp 60.000.000	
	1. Tersedianya Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	4 Jenis	4 jenis			
	2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelompok Asman TOGA dan Akurpresur	4 Kegiatan	4 kegiatan			
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		1.819.756.292	1.674.522.322			
1.1.02.1.1.02.01.18.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		1.200.000.000	1.098.479.303	91,54		
	1. Tersedianya Jasa pelayanan kesehatan	12 Bulan	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.18.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		410.626.000	372.825.019	90,79		
	1. Tersedianya alat tulis kantor	29 Jenis	29 Jenis	100		
	2. Tersedianya alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, battery kering)	7,00 Jenis	7 Jenis	100		
	3. Tersedianya materai	130 Lembar	130 Lembar	100		
	4. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16,00 Jenis	16 Jenis	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5. Tersedianya pengisian tabung gas	98,00 Tabung	98 Tabung	100		
	6. Tersedianya bahan laboratorium / reagent	20,00 Jenis	20 Jenis	100		
	7. Tersedianya bahan alat habis pakai rumah sakit	6 Jenis	6 Jenis	100		
	8. Tersedianya bahan obat-obatan	1 Paket	1 Paket	100		
	9. Tersedianya surat kabar	300 Eksampler	300 Eksampler	100		
	10. Tersedianya barang cetak	16 Jenis	16 Jenis	100		
	11. Tersedianya penggandaan / fotocopy	59.895 Lembar	59.895 Lembar	100		
	12. Tersedianya makanan dan minuman untuk petugas dan pasien rawat inap	5.405 Box	5.405 Box	100		
1.1.02.1.1.02.01.18.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		186.490.292	180.578.000	96,83		
	1. Tersedianya Komputer	3 Unit	3 Unit	100		
	2. Tersedianya Scanner	1 Unit	1 Unit	100		
	3. Tersedianya Fotometer	1 Unit	1 Unit	100		
	4. Tersedianya Mikroskop Binokuler	1 Unit	1 Unit	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5. Tersedianya Mesin Antrian Infokes	1 Unit	1 Unit	100		
	6. Tersedianya Mesin Finger Print	1 Unit	1 Unit	100		
	7. Tersedianya Suction Baby	1 Unit	1 Unit	100		
	8. Tersedianya Standing AC	1 Unit	1 Unit	100		
	9. Tersedianya Rister Tensi Meter	1 Unit	1 Unit	100		
	10. Tersedianya Dental Aerosol Suction Machine	1 Unit	1 Unit	100		
1.1.02.1.1.02.01.18.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		22.640.000	22.640.000	100		
	1. Terlaksananya pemeliharaan Air Conditioner (AC)	20 Unit	20 Unit	100		
	2. Terlaksananya pemeliharaan komputer	15 Unit	15 Unit	100		
	3. Terlaksananya pemeliharaan laptop	11 Unit	11 Unit	100		
	4. Terlaksananya pemeliharaan printer tinta	9 Unit	9 Unit	100		
	5. Terlaksananya Pemeliharaan IPAL	1 Unit	1 Unit	100		

UPTD PUSKESMAS PURWAKARTA

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		15.710.475	15.710.475	100		
1.1.02.1.1.02.01.07.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		15.710.475	15.710.475	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 90.000.000	
	1. Tersedianya bahan/bibit tanaman obat keluarga	402 Jenis	401 Jenis	99,75		
	2. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	110 Box	55 Box	50		
	3. Tersedianya transport dan akomodasi kegiatan pelayanan kesehatan tradisional	0 OK	0 OK	0		
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		974.006.000	906.081.013			
1.1.02.1.1.02.01.19.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		651.975.802	594.618.743	91,20		
	1. Tersedianya jasa pelayanan kesehatan (L:7 P:51)	12 Bulan	12 Bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.19.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		223.169.594	214.551.070	96,14		
	1. Tersedianya alat tulis kantor	27 Jenis	28 Jenis	103,70		
	2. Tersedianya bahan obat-obatan	12 Bulan	12 Bulan	100		
	3. Tersedianya bahan laboratorium/reagen t	12 Jenis	12 Jenis	100		
	4. Tersedianya BHPRS	23 Jenis	23 Jenis	100		
	5. Tersedianya barang cetak	124 Rim	124 Rim	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	6. Tersedianya fotocopy	23.388 Lembar	22.340 Lembar	95,52		
	7. Tersedianya cetak spanduk	80 m2	70 m2	87,50		
1.1.02.1.1.02.01.19.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		91.360.604	89.501.200	97,96		
	1. Tersedianya kursi rapat susun dan meja rapat	28 Unit	28 Unit	100		
	2. Tersedianya printer	3 Unit	3 Unit	100		
	3. Tersedianya alat kedokteran	25 Unit	25 Unit	100		
1.1.02.1.1.02.01.19.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		7.500.000	7.410.000	98,80		
	1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas	75 Unit	73 Unit	97,33		

UPTD PUSKESMAS JOMBANG

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		80.503.350	80.503.350	100		
1.1.02.1.1.02.01.08.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		80.503.350	80.503.350	100		
	1. Tersedianya Bahan/Bibit Tanaman TOGA	8 Jenis	8 Jenis	100		
	2. Tersedianya Makanan dan Minuman Pelaksanaan Sosialisasi dan Lomba Asma TOGA	500,00 Box	500,00 Box	100		
1.1.02.1.1.02.01.20.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		849.120.000	830.878.601	97,85		
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	12 bulan	12 Bulan	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.20.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		286.800.000	220.170.707	76,77		
	1. Tersedianya alat tulis kantor	52 jenis	52 jenis	100		
	2. Tersedianya Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery Kering)	970,00 buah	970,00buah	100		
	3. Tersedianya perangkat, materai dan benda pos lainnya	226 Lembar	226 Lembar	100		
	4. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	866,00 Buah	866 Buah	100,00		
	5. Tersedianya bahan laboratorium/reagent	227 jenis	114 jenis	50,22	tidak terserap karena pengadaan dapat dari dinas kesehatan	
	6. Tersedianya bahan alat habis pakai rumah sakit	390,00 jenis	0 jenis	0	tidak terserap karena pengadaan dapat dari dinas kesehatan	
	7. Tersedianya belanja cetak	5.509 jenis	5.509 jenis	100		
	8. Tersedianya belanja penggandaan	28.937 jenis	28.937,00 jenis	100		
	9. Tersedianya belanja cetak spanduk	149 M2	149 M2	100		
	10. tersedianya transportasi dan akomodasi	1 Paket	1 Paket	100		
	11. tersedianya obat-obatan	1 paket	1 paket	100		
1.1.02.1.1.02.01.20.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		354.763.032	344.650.000	97,15		
	1. Terlaksananya Pengadaan Meubelair	9 Buah	9 Buah	100		
	2. Terlaksananya Pengadaan Personal Komputer	5 buah	5 buah	100		
	3. Terlaksananya Pengadaan Printer	3 Unit	3 Unit	100		
	4. Terlaksananya Peralatan Kantor : 3 Rak Besi, 1 Lemari Arsip Mekanik	4 Buah	4 Buah	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.20.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		30.000.000	30.000.000	100		
	1. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas : service Ac 22unit, penambahan freon 22unit, service mesin ketik elektrik 1unit, service komputer 17unit, Service Printer Tinta 12unit, service notebook/laptop 14unit, service alat sterilisator 2unit	103 Unit	85 Unit	82,52		

UPTD PUSKESMAS CITANGKIL 1

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		68.077.000	68.077.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.09.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		68.077.000	68.077.000	100		
	1. Tersedianya bahan / bibit tanaman TOGA	4 Jenis	4 Jenis	100		
	2. Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sosialisasi TOGA	120 Box	120 Box	100		
1.1.02.1.1.02.01.21.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		1.406.405.198	1.228.168.235	87,33		
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan	91 Pegawai : L:10, P:81	80,00 Pegawai : L:10, P:81	87,91		
1.1.02.1.1.02.01.21.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		455.328.985	402.546.940	88,41		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan		Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan		% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Terlaksananya sewa E-Puskesmas NG	12	Bulan	12	Bulan	100		
	2. Tersedianya ATK	52	Jenis	49	Jenis	94,23		
	3. Tersedianya Materai	300	Lembar	300	Lembar	100		
	4. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14	Jenis	14	Jenis	100		
	5. Tersedianya Bahan Laboratorium/Reagent	4	Jenis	4	Jenis	100		
	6. Tersedianya BHPRS	25	Jenis	25	Jenis	100		
	7. Tersedianya Barang Cetak	38	Jenis	38	Jenis	100		
	8. Tersedianya Penggandaan	3	Jenis	3	Jenis	100		
	9. Tersedianya Suku Cadang Alat Kedokteran	10	Buah	0	Buah	0	Harga Tidak sesuai	
	10. Tersedianya Cetak Spanduk	10	Buah	10	Buah	100		
	11. Tersedianya Pakaian Seragam Kerja & Apron	2	Jenis	2	Jenis	100		
1.1.02.1.1.02.01.21.15.204.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		126.906.100		111.930.000		88,20		
	1. Tersedianya Lemari Alat	2	Unit	2	Unit	100		
	2. Tersedianya alat kedokteran umum	9	Jenis	8	Jenis	88,89		
	3. Tersedianya Meubelair	2	Jenis	2	Jenis	100		
	4. Tersedianya Exhaust Fan	1	Buah	1	Buah	100		
	5. Tersedianya Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Jenis	3	Jenis	100		
	6. Tersedianya Tablet PC	1	Unit	1	Unit	100		
	7. Tersedianya Mesin Scanner	1	Unit	1	Unit	100		
	8. Tersedianya Pesawat Telepon	2	Unit	2	Unit	100		
	9. Tersedianya Alat Laboratorium Umum	2	Jenis	2	Jenis	100		
	10. Tersedianya Alat Laboratorium Hematologi	1	Unit	1	Unit	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.21.15.205.5.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Kapitasi)		20.510.000	20.510.000	100,00		
	1. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Citangkil	9,00	9,00 Jenis	100		

UPTD PUSKESMAS CITANGKIL 2

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		47.328.000	34.320.000	72,52		
1.1.02.1.1.02.01.22.15.006.5.2 Penyediaan Obat, bahan dan alkes habis pakai		2400000	300.000	12,50		
	1. Jumlah Pengisian Tabung Gas	40 kali	5 kali	12,50	sesuai kebutuhan	
1.1.02.1.1.02.01.22.15.026.5.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional		44928000	34.020.000	75,72	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 45.000.000	
	1. Tersedianya bahan / bibit tanaman TOGA	4 jenis	3 jenis	75		
	2. Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan sosialisasi TOGA	265 box	203 box	76,60		
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		546.048.000		0		
1.1.02.1.1.02.01.23.15.031.5.2 Jasa pelayanan kesehatan (kapitasi)		382.233.600	0	0	Puskesmas belum teregistrasi sehingga belum bisa melakukan kerjasama dengan BPJS	Setelah teregistrasi bulan Agustus 2020, Puskesmas Citangkil II Melakukan proses kerjasama dengan BPJS

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Tersedianya Jasa Pelayanan	12 kegiatan	0 kegiatan	0		
1.1.02.1.1.02.01.23.15.203.5.2 Dukungan Manajemen Operasional Kesehatan (Kapitasi)		163.814.400	0	0	Puskesmas belum teregistrasi sehingga belum bisa melakukan kerjasama dengan BPJS	Setelah teregistrasi bulan Agustus 2020, Puskesmas Citangkil II Melakukan proses kerjasama dengan BPJS
	1. Tersedianya ATK	51 Jenis	0 Jenis	0		
	2. Tersedianya Materai	400 Lembar	0 Lembar	0		
	3. Tersedianya peralatan kebersihan	11 Jenis	0 Jenis	0		
	4. Tersedianya obat-obatan	1 Paket	0 Paket	0		
	5. Tersedianya bahan laboratorium / reagent	4 Jenis	0 Jenis	0		
	6. Tersedianya Bahan habis pakai Rumah Sakit	6 Jenis	0 Jenis	0		
	7. Tersedianya cetakan	34 Jenis	0 Jenis	0		
	8. Terlaksananya penggandaan	4 Jenis	0 Jenis	0		

LABKESDA

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		40.000.000	22.151.200	55,38		
1.1.02.1.1.02.01.13.15.042.5.2 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah		40.000.000	22.151.200	55,38	Refocusing	
	1. Terlaksananya Pelayanan Rujukan Uji Silang Sediaan BTA se-wilayah Kota Cilegon	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100		
	2. Tersedianya Alat Perlindungan Diri	1 Paket	1 Paket	100		
	3. Tersedianya alat-alat laboratorium	0 Unit	0 Unit	0		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4. Jumlah kursus singkat laboratorium	1 Kegiatan	0 Kegiatan		Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan	Pelatihan SDM Laboratorium dikoordinasikan ke Bidang Yankes dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.13.15.202.5.2 Inhouse Training Pelayanan Laboratorium Kesehatan		0	0	0	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 50.000.000	
	1. Terlaksananya Inhouse Training Pelayanan Laboratorium kesehatan	0 Paket	0 Paket	0		

UPTD JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		11.078.126.840	9.651.682.840	87,12		
1.1.02.1.1.02.01.11.15.033.5.2 Pelayanan Kepesertaan JPKM		2.700.000	2.700.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 39.550.000	
	1 Terlaksananya kegiatan JPKM	3 bulan	3 bulan	0	target pada indikator output 0 tapi pada rincian biaya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut	
	2 Terlaksananya kegiatan sosialisasi rapat koordinasi bendahara JKN dan BPJS	1 bulan	1 bulan	100		
	3 Terlaksananya kegiatan sosialisasi kegiatan JPKM dengan unsur RT, RW dan Kader	0 bulan	0 bulan	0	Adanya refocusing Anggaran	Dianggarkan kembali pada tahun berikutnya

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4 Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi kegiatan JPKM	0 bulan	0 bulan	0	Adanya refocusing Anggaran	Dianggarkan kembali pada tahun berikutnya
	5 Terlaksananya rapat JKN kegiatan JPKM dengan OPD/Instansi terkait	0 bulan	0 bulan	0	Adanya refocusing Anggaran	Dianggarkan kembali pada tahun berikutnya
	6 Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Kepesertaan	3 bulan	3 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.11.15.034.5.2 Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non-Kapitasi		661.292.840	482.877.840	73,02		
	1 Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan Non-Kapitasi	12 bulan	12 bulan	100	Kegiatan prolanis tidak semua Puskesmas melaksanakan dan juga karena adanya pandemi covid 19	Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan prolanis dengan maksimal pada saat Pandemi covid 19 sudah berakhir
	2 Terlaksananya pelayanan kesehatan Non-Kapitas (prolanis)	12 bulan	12 bulan	100		
	3 Terlaksananya kegiatan pertemuan badan	12 bulan	12 bulan	100		
	4 Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi kegiatan non-kapitasi	12 bulan	12 bulan	100		
	5 Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi kegiatan Non-Kapitasi (Prolanis)	12 bulan	12 bulan	100		
1.1.02.1.1.02.01.11.15.035.5.2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan (APBD II)		10.414.134.000	9.166.105.000	88,02		
	1 Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD II	12 bulan	12 bulan	100		
	2 Tersedianya Penggandaan/Foto Copy Dokumen	5.821 lembar	5.820 lembar	100		
	3 Jumlah penyelenggaraan jaminan kesehatan	280.944 jiwa bulan	264.729 Jiwa bulan	94,23	ada kesalahan dalam penghitungan target di	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	melalui BPJS yang bersumber dari APBD II				DPA. Seharusnya adalah 280.944 premi bulan. Realisasi 264.729 premi bulan	

PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan		1.008.869.900	556.958.375	55,21	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	Pembatasan permintaan pelayanan
1.1.02.1.1.02.01.12.15.037.5.2 Pelayanan Ambulan Rujukan Gratis		509.945.000	265.668.500	52,10	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	selama pandemi Rujukan keluar kota di batasi
	1 Terselenggaranya Pelayanan Ambulan Rujukan Gratis	744 keberangkatan	383 keberangkatan	51,48	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	selama pandemi Rujukan keluar kota di batasi
	2 Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	319 Box	174 Box	54,55	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	selama pandemi Rujukan keluar kota di batasi
	3 Tersedianya Makanan dan Minuman Petugas ambulan	2.1 Paket	21 Paket	1	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	selama pandemi Rujukan keluar kota di batasi
	4 Tersedianya Perjalanan dinas luar daerah	818 Paket	359 Paket	43,89	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	selama pandemi Rujukan keluar kota di batasi
1.1.02.1.1.02.01.12.15.038.5.2 Pelayanan Ambulan Jenazah		30.860.000	22.500.000	72,91	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan	Pembatasan pemenuhan permintaan pelayanan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1 Terselenggaranya kegiatan Ambulan Jenazah Gratis	7 keberangkatan	0 keberangkatan	0		
	2 Tersediannya Makanan Dan Minuman Harian	900 Paket	750 Paket	83,33		
	3 Tersedianya Perjalanan Dinas Luar daerah	7 Keberangkatan	0 Keberangkatan	0		
1.1.02.1.1.02.01.12.15.039.5.2 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)		202.545.000	18.936.000	9,35	dikarenakan pandemi covid-19 maka tidak ada kegiatan P3K	Permohonan P3K berkurang
	1 Terselenggaranya kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan	200 Kegiatan	79 Kegiatan	39,50		
	2 Tersedianya Bahan Bakar Minyak	450 kegiatan	120 kegiatan	26,67		
	3 Tersedianya Bahan Obat Obatan	160 unit	48 unit	30		
	4 Tersedianya Makanan dan minuman Harian	145 Dus	0 Dus	0		
	5 Tersedianya Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan	750 Kegiatan	0 Kegiatan	0		
	6 Tersedianya pakaian kerja lapangan	29 buah	29 buah	100		
1.1.02.1.1.02.01.12.15.040.5.2 Publik Safety Center (PSC)		24.600.000	16.051.315	65,25	dikarenakan pandemi covid-19 maka dilakukan pembatasan kegiatan	
	1 Terselenggaranya pelayanan PSC	100 ok	100 ok	100		
	2 Tersedianya Belanja Transportasi akomodasi	168 ok	0 ok	0		
	3 Tersedianya Belanja Cetak dan Penggandaan	16 meter	16 meter	100		
	4 Tersedianya Makanan Dan minuman Pelaksana Kegiatan	240 ok	240 ok	100		
	5 Tersedianya Perjalanan dinas luar daerah	4 ok	4 ok	100		
1.1.02.1.1.02.01.12.15.041.5.2 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		240.919.900	233.802.560	97,05		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1 Terselenggaranya kegiatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100 ok	100 ok	100		
	2 Tersedianya Belanja cetak dan penggandaan	20 meter	0 meter	0	Kegiatan Tidak dapat dilakukan karena pandemi	
	3 Tersedianya sewa perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100		
	4 Tersediannya Makanan Dan minuman rapat	1.000 Box	0 Box	0,00	Kegiatan Tidak dapat dilakukan karena pandemi	
	5 Tersedianya Makanan dan minuman pelaksana kegiatan SPGDT	1.800 ok	1.800 ok	100		

PEMBAHASAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan, pembinaan terhadap sarana kesehatan swasta, pengawasan terhadap obat, makanan dan minuman termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Beberapa indikator Program ini dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator program ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (%)

Capaian Realisasi Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2020 adalah sebanyak 84,38. Dibandingkan dengan data 2019 terjadi penurunan sebanyak 9,79% karena kepesertaan BPJS tahun 2019 adalah sebanyak 94,17%. Penurunan tersebut tidak terjadi pada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang biayanya di tanggung pemerintah karena data anggaran PBI adalah sebaga berikut : Anggaran Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibiayai Pemerintah atau PBI pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu dari anggaran Rp 7.369.788.000,0 (APBD) dan Rp. 2.000.000.000,0 (DID) atau total sebesar Rp 9.369.788.000 pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.414.134.000 (APBD) pada tahun 2020 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 10,03%. Realisasi pembayaran iuran BPJS PBI pun mengalami kenaikan dari 7.645.400.000 pada tahun 2019 menjadi Rp 9.166.105.000 pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 16,59%. Dari data tersebut Penurunan terjadi pada peserta mandiri dan atau peserta yang dibiayai pemberi

kerja.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah peserta BPJS di Kota Cilegon}}{\text{Jumlah warga kota cilegon}} \times 100\% = \frac{355.637}{421.448} \times 100\% = 84,38\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

KEGIATAN	OUTPUT
1.1.02.1.1.02.01.00.15.004.5.2 Peningkatan Kesehatan Rujukan	
	1. Terlaksananya Pertemuan FKTP dan FKTL tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon
	2. Terlaksananya Pertemuan Pembuatan Produk Hukum tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon
	3. Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum tentang Sistem Rujukan di Kota Cilegon
	4. Terlaksananya Validasi Data Rujukan (FKTP Swasta dan Pemerintah)
	5. Terlaksananya Monev Sistem Rujukan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.005.5.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	
	1. Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
	2. Terlaksananya Rakor Persiapan Reakreditasi Puskesmas
	3. Terlaksananya Rakor Pelaksanaan Audit Internal dan Keselamatan Pasien di Puskesmas

KEGIATAN	OUTPUT
	4. Terlaksananya Rakor Perencanaan Kegiatan di Puskesmas
	5. Terlaksananya Pelatihan Perawatan Luka
1.1.02.1.1.02.01.00.15.030.5.2 Peningkatan Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional	
	1. Terlaksananya Rakoor JKN (KBKP) FKTP Pemerintah
	2. Terlaksananya Rakoor JKN (KBKP) FKTP Swasta
	3. Terlaksananya Validasi data instrumen JKN
	4. Terlaksananya Monitoring JKN
	5. Terlaksananya Pertemuan JKN
1.1.02.1.1.02.01.11.15.035.5.2 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Melalui BPJS Kesehatan (APBD II)	
	1. Terlaksananya penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBD II
	2. Tersedianya Penggandaan/Foto Copy Dokumen
	3. Jumlah Jaminan Kepesertaan

2) Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Yang Tersertifikasi Akreditasi (Puskesmas)

Capaian Realisasi Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 100% dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal

$$\frac{1 \text{ Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi}}{1} \times 100\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

Jumlah kecamatan 1

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Akreditasi Puskesmas (DAK)	Terlaksananya Workshop Pendukung Akreditasi
	Terlaksananya Pendampingan Pasca Akreditasi
	Terlaksananya Survey Reakreditasi Puskesmas

3) Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIP (Memenuhi Standar Yang Berlaku).

Capaian Realisasi Persentase jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP (memenuhi standar yang berlaku) pada tahun 2020 adalah sebanyak 82,12% dengan target sasaran 78% maka capaian kinerja adalah sebesar 105.53%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP}}{\text{jumlah tenaga kesehatan}} \times 100\% = \frac{1929}{2349} \times 100\% = 82,12\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan bidang tenaga kesehatan
	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan bidang sarana kesehatan

	Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor
	Terlaksananya monitoring / survei sarana kesehatan

4) Persentase ketersediaan obat dan vaksin (%)

Capaian Realisasi Persentase ketersediaan obat dan vaksin pada tahun 2020 adalah sebanyak 100% dengan target sasaran 98% maka capaian kinerja adalah sebesar 102,04%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Obat dan vaksin yang dimiliki}}{\text{Jumlah obat dan vaksin yang dibutuhkan}} \times 100 \% = \frac{11.745.010}{11.745.010} \times 100\% = 100 \%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

KEGIATAN	OUTPUT
1.1.02.1.1.02.01.00.15.050.5.2 Pendamping DAK Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terjaminnya Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.1.02.1.1.02.01.00.15.054.5.2 Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	Tersedianya Obat-obatan dan vaksin
	Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai
1.1.02.1.1.02.01.00.15.211.5.2 Distribusi Obat dan E-logistik (DAK)	Terlaksananya Distribusi dan Pemanfaatan Sistem Logistik Obat dan BMHP
1.1.02.1.1.02.01.00.15.006.5.2 Penyediaan Obat, bahan dan alkes habis pakai	Terlaksananya Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
	Terlaksananya Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai

5) Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (puskesmas)

Capaian Realisasi Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 8 Puskesmas dengan target sasaran 8 Puskesmas maka capaian kinerja adalah sebesar 100%.

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga dan Sarana Kesehatan	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan tenaga kesehatan
	Terlaksananya sosialisasi perundang - undangan sarana kesehatan
	Terlaksananya monitoring tenaga dan sarana kesehatan
Pendataan Tenaga Kesehatan di Sarana Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor
	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Tenaga Kesehatan di Fasyankes

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Tabel 3.1.1.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga						
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		8.224.614.453,00	6.852.557.676,00	83,31%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	306 per 100.000 kelahiran hidup	203 per 100.000 kelahiran hidup	133,60	Angka Kematian Ibu kota Cilegon 18 orang hasil konferensi (203/100.000 KH) masih dibawah cut of point nasional (306), ini menunjukkan kematian ibu dibawah angka kematian ibu secara nasional namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019 angka kematian ibu naik pada tahun 2020 (ada yang disebabkan Covid-19)	Melakukan koordinasi terkait program Ibu Hamil dengan lintas Program dan lintas sektor terkait, peningkatan ANC dan penjarangan ibu hamil sedini mungkin pada TM 1, optimalisasi data kesehatan ibu dan anak, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta SDM melalui pembinaan dan pelatihan
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	24 per 100.000 kelahiran hidup	12,00 per 100.000 kelahiran hidup	150	Angka Kematian bayi kota Cilegon (12/1000 KH) masih dibawah cut of point nasional (24), ini menunjukkan kematian bayi dibawah angka kematian bayi secara nasional namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019 angka kematian bayi turun pada tahun 2020 (karena ada Perubahan Cara Penghitungan)	Melakukan koordinasi terkait program bayi baru lahir dengan lintas Program (PROMKES) untuk edukasi lintas sektor terkait kes bayi baru lahir, pemantauan pencatatan pelaporan secara berkala untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar
	3. "Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)"	17 %	2,72 %	184,11	Prevalensi Underweight pada balita kota Cilegon (2,7%) masih dibawah cut of point nasional (17%), ini menunjukkan kasus balita underweight masih dalam batas normal	Menambah jumlah pos gizi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kordinasi dengan linsek dan linprog terkait gizi, pelacakan kasus lebih ditingkatkan
	4. "Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (persen)"	28 %	1,66 %	194,07	Prevalensi stunting pada baduta kota Cilegon (1,66%) masih dibawah cut of point nasional (28%), ini menunjukkan kasus stunting pada baduta masih dalam batas normal	Menambah jumlah pos gizi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kordinasi dengan linsek dan linprog (konvergensi stunting), pelacakan kasus lebih ditingkatkan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5. Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat	98 %	95,94 %	97,89	-banyak warga yg tidak mampu belum memiliki jamban sehat, masih terdapat warga yang pembuangan limbahnya langsung ke sungai atau kali -kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat - tidak memiliki lahan/ keterbatasan lahan	- pengadaan jamban sehat bagi masyarakat yang kurang mampu melalui mekanisme dana DPWL atau melalui CSR - melakukan pemucuan - pengadaan jamban komunal bagi wilayah yang memiliki keterbatasan lahan - sosialisasi
	6. Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	74 %	81,32 %	109,89		

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.015.5.2 Jaminan Persalinan/Jampersal (DAK)		1.068.591.000	813.685.073	76,15	Masa pandemi covid yang tidak bisa maksimal dalam melakukan pertemuan karena diberlakukannya PSBB, dan belum semua fasilitas kesehatan mengajukan biaya klaim transport pendampingan rujukan baik untuk pasien atau petugas	di fokuskan pada pelayanan ibu hamil,bersalin, neonatus, dan ibu nifas dengan pembatasan faskes yang melakukan perjanjian kerjasama disesuaikan dengan PAGU yang ada
	1. Terlaksananya jasa pelayanan jaminan persalinan (jampersal)	1 tahun	1 tahun	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.103.5.2 Kesehatan Ibu Hamil		2.360.000	2.360.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 200.000.000	
	1. Terlaksananya BinteK ANC	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	Adanya refocusing dari nilai DPA , pencapaian pemeriksaan ANC yang berkualitas dan sesuai	Melakukan koordinasi terkait program Ibu Hamil dengan lintas Program dan lintas sektor terkait, peningkatan ANC dan penjangkaran ibu hamil

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					standar dan tata laksana kasus belum optimal	sedini mungkin pada TM 1, optimalisasi data kesehatan ibu dan anak, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta SDM melalui pembinaan dan pelatihan
	2 . Terlaksananya Pelatihan Sufas	0 Orang perempuan	0 Orang perempuan	0	Refocusing	
	3 . Terlaksananya Optimalisasi P4K	0 Orang, 15 Laki, 20 Perempuan	0 Orang, 15 Laki, 20 Perempuan	0	Refocusing	
	4 . Terlaksananya Follow Up SBMR Bidan	0 Orang, 40 Perempuan	0 Orang, 40 Perempuan	0	Refocusing	
	5 . Terlaksananya Follow Up SBMR PONE	0 Orang, 5 Laki & 40 Perempuan	0 Orang, 5 Laki & 40 Perempuan	0	Refocusing	
	6 . Terlaksananya PPWS KIA	0 Orang, 5 Laki & 60 Perempuan	0 Orang, 5 Laki & 60 Perempuan	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.104.5.2 Kesehatan Ibu Bersalin		2.315.000	2.315.000	100,00	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 172.000.000	Melakukan koordinasi terkait program Ibu Bersalin dengan lintas Program dan lintas sektor terkait, meningkatkan kualitas pelayanan persalinan sesuai standar APN untuk persalinan normal dan penanganan komplikasi, pembinaan dukun untuk tidak menolong persalinan dengan perjanjian, meningkatkan sufus PMB dan klinik untuk layanan faskes sesuai standar
	1 . Terlaksananya Orientasi dan Sosialisasi Gadar Maternal Neonatal	0 Orang Perempuan	0 Orang Perempuan	0		
	2 . Terlaksananya Reorientasi APN	0 Orang perempuan	0 Orang perempuan	0	Refocusing	
	3 . Terlaksananya Evaluasi Kesga gizi	0 Orang, 5 Laki & 45 Perempuan	0 Orang, 5 Laki & 45 Perempuan	0	Refocusing	
	4 . Terlaksananya Pembinaan Bidan Kelurahan	0 Orang perempuan	0 Orang perempuan	0	Refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5. Terlaksananya Pertemuan Bidan Koordinator	0 Orang perempuan	0 Orang perempuan	0	Refocusing	
	6. Terlaksananya Pembelajaran Audit	0 Orang, 80 Perempuan, 10 Laki	0 Orang, 80 Perempuan, 10 Laki	0	Refocusing	
	7. Terlaksananya Pengkajian Kematian Maternal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	Refocusing	
	8. Terlaksananya Pelatihan Emergency Drill bagi Klinik dan BPM	0 Orang, 4 laki & 20 Perempuan	0 Orang, 4 laki & 20 Perempuan	0	Refocusing	
	9. Terlaksananya Koordinasi PONE	0 Orang, 10 Laki & 45 Perempuan	0 Orang, 10 Laki & 45 Perempuan	0	Refocusing	
	10. Terlaksananya OJT PONE	0 Puskesmas Poned	0 Puskesmas Poned	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.105.5.2 Kesehatan Bayi Baru Lahir		42.510.000	41.930.000	98,64	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 135.000.000	Melakukan koordinasi terkait program bayi baru lahir dengan lintas Program (PROMKES) untuk edukasi lintas sektor terkait kes bayi baru lahir, pemantauan pencatatan pelaporan secara berkala untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar
	1. Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal bagi petugas di RSKM	0 Orang, 16 Perempuan	0 Orang, 16 Perempuan	0	Refocusing	
	2. Terlaksananya Reorientasi Asfiksia BBLR bagi Bidan Kelurahan	0 Bidan, 50 Perempuan	0 Bidan, 50 Perempuan	0	Refocusing	
	3. Terlaksananya Orientasi bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bayi balita sesuai standar	30 Orang, 30 Perempuan	30 Orang, 30 Perempuan	100		
	4. Terlaksananya Pengkajain Kasus Kematian Anak	5 Kegiatan, 2 Laki dan 3 Perempuan	5 Kegiatan, 2 Laki dan 3 Perempuan	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5. Terlaksananya Evaluasi rotasi klinik neonatal bagi petugas di RSKM	0 Orang, 30 Perempuan	0 Orang, 30 Perempuan	0	Refocusing	
	6. Terlaksananya Penatalaksanaan stabilisasi kegawatan maternal neonatal	0 Orang, 40 Perempuan	0 Orang, 40 Perempuan	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.106.5.2 Kesehatan Anak Bawah Lima Tahun (Balita)		2.400.000	2.400.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 97.025.000	Pemantauan kesehatan balita sesuai standar dengan janji temu, pelayanan di Posyandu hanya imunisasi pada balita dengan menerapkan protokol kesehatan, koordinasi lintas program terkait yaitu promosi kesehatan tentang kesehatan bayi balita
	1. Terlaksananya Monitoring SDIDTK	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	Refocusing	
	2. Terlaksananya Evaluasi Monitoring SDIDTK	0 Orang	0 Orang	0	Refocusing	
	3. Terlaksananya Pendampingan Psikolog di Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	Refocusing	
	4. Terlaksananya Evaluasi Hasil Pendampingan Psikolog di Puskesmas	0 Orang	0 Orang	0	Refocusing	
	5. Terlaksananya Monitoring MTBS/MTBS	8 Puskesmas	8 Puskesmas	100		
	6. Terlaksananya Evaluasi Hasil Monitoring MTBS/MTBS	0 Orang	0 Orang	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.108.5.2 Kesehatan Usia Lanjut		27.529.700	27.529.700	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp. 145.000.000. pelayanan posbindu tidak maksimal	Koordinasi dengan kecamatan dan Puskesmas terkait pembentukan POSBINDU sesuai sasaran lansia,

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					karena pengaruh pandemic covid, jumlah posbindu yang masih kurang sesuai sasaran lansia, kurang dukungan keluarga saat mendampingi ke posbindu	sosialisasi ke faskes tingkat pertama dan lanjutan tentang pelayanan standar bagi lansia, koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk pelaporan usila
	1 · Terlaksananya Lomba Senam Lansia	0	0	0	Refocusing	
	2 · Terlaksananya Pengadaan Plang Posbindu	29	29	100		
	3 · Terlaksananya Pengadaan Buku Lansia	0	0	0	Refocusing	
	4 · Terlaksananya Lomba Puskesmas Santun Lansia	0	0	0	Refocusing	
	6 · Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Cakupan SPM LANSIA	0 Orang, 30 Perempuan & 10 Laki	0,00 Orang, 30 Perempuan & 10 Laki	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.109.5.2 Gizi Masyarakat		765.237.153	630.555.020	82,40	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 850.000.000	Koordinasi dengan linsek dan linprog terkait masalah gizi, komunikasi dan pemantauan masalah gizi masih tetap dilakukan secara virtual, melakukan home visit pada balita gizi buruk dan pemberian vit A sesuai proses
	1 · Terlaksananya Orientasi ANTROPOMETERI	20 Orang 20 Perempuan	20 Orang 20 Perempuan	100		
	2 · Terlaksananya Pengadaan Alat Antropometri	210 Buah	210 Buah	100		
	3 · Terlaksananya Orientasi PMBA Bagi Tenaga Kesehatan	20 Orang 20 Perempuan	20 Orang 20 Perempuan	100		
	4 · Terlaksananya Follow up KADER SEGANI SMP & SMA	40 Orang 40 Perempuan	0 Orang 40 Perempuan	0		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5 · Terlaksananya Lomba Balita dan bumil Sehat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	Refocusing	
	6 · Terlaksananya Pemberian PMT Balita Kurang Gizi dan bumil KEK	2 Paket	2 Paket	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.111.5.2 Upaya Kesehatan Sekunder Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		780.163.000	571.657.890	73,27	Kegiatan pertemuan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena pandemi covid	Pertemuan dilaksanakan dengan mempertahankan proses dan tetap menjaga jarak
	1 · terlaksananya kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk penurunan stunting	80 orang	80 Orang	100		
	2 · Terlaksananya evaluasi pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat bagi petugas kesehatan	70 orang	70 Orang	100		
	3 · Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi program gizi	70 orang	70 orang	100		
	4 · Terlaksananya orientasi SDIDTK dan sosialisasi kelas ibu balita bagi kader	50 orang	50 orang	100		
	5 · terlaksananya orientasi dan pendampingan kalakarya MTBS	40 orang	40 orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.1 6.201.5.2 USEKREM		27.810.000	27.060.000	97,30	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 200.000.000	kerjasama dan koordinasi dengan institusi pendidikan untuk menyampaikan kpd orangtua siswa melakukan pemantauan kesehatan secara

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						mandiri, koordinasi dengan puskesmas untuk distribusi buku raport kesehatan, meningkatkan kerjasama dengan lintas program dalam melakukan skrining kesehatan dimasa pandemik
	1 . Terlaksananya Workshop KHATAN esehatan Remaja	24 Orang, 15 perempuan, 9 laki	24 Orang, 15 perempuan, 9 laki	100		
	2 . Terlaksananya Evaluasi USEKREM	0 Orang, 28 perempuan, 12 laki	0 Orang, 28 perempuan, 12 laki	0	Refocusing	
	3 . Terlaksananya Sosialisasi Posyandu Remaja	0 Orang, 36 perempuan, 14 laki	0 Orang, 36 perempuan, 14 laki	0	Refocusing	
	4 . Terlaksananya Refresing Petugas UKS	0 orang, 30 perempuan, 6 laki	0 orang, 30 perempuan, 6 laki	0	Refocusing	
	5 . Terlaksananya Gebyar Anak Sehat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	Refocusing	
	6 . Terlaksananya Pendampingan Imunisasi Gigi	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0	Refocusing	
	7 . Terlaksananya Orientasi Pelayanan Kesehatan Anak Diluar Sekolah	0 Orang, 35 perempuan, 15 laki	0 Orang, 35 perempuan, 15 laki	0	Refocusing	

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.16.00 1.5.2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan		179.173.000	164.946.420	92,06	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 485.000.000	
	2. Terlaksananya pengawasan kualitas	96 lokasi	88 lokasi	91,75	masih adanya masyarakat yang belum memiliki sarana air bersih sehingga kualitas air	adanya bantuan pengiriman air atau pembuatan sarana air bersih untuk daerah yang

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	air bersih pemukiman				menjadi kurang baik, sehingga perlu terus dilakukan pemantauan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas air bagi mereka	kualitas airnya kurang baik serta pemantauan dan pembinaan dapat melibatkan tenaga kader STBM
	3. Terlaksananya pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	100		
	6. Terlaksananya orientasi	1 kegiatan	1 kegiatan	100		
	7. Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi manakan dan minuman	0 lokasi	0 lokasi	0	refocusing	
	8. Terlaksananya sosialisasi	0 kegiatan	0 kegiatan	0	refocusing	
	9. Terlaksananya pemicuan CLTS/STBM	0 lokasi	0 lokasi	0	refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.16.00 3.5.2 Penyelenggaraan Kota Sehat		10.280.000	10.280.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 179.380.000	
	2. Terlaksananya rapat kerja TP kota sehat	40 orang	40 orang	100		
	3. Terlaksananya rapat koordinasi TP kota sehat	0 orang	0 orang	0	refocusing	
	4. Terlaksananya rapat evaluasi kota sehat	0 orang	0 orang	0	refocusing	
	5. Terlaksananya kaji banding kota sehat	0 Kegiatan	0 kegiatan	0	refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.16.00 5.5.2 Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga		31.484.600	31.484.600	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 75.000.000	
	1. Terlaksananya senam sehat	40 Orang (laki 10, Perempuan 30)	40 Orang (laki 10, Perempuan 30)	100		
	2. Terlaksananya Pembinaan Pos UKK Kesja	0,00 Orang	0,00 orang	0	refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3. Terlaksananya work shop penanganan kebakaran	60 Orang	60 orang	100		
	4. Terlaksananya simulasi kegawatdaruratan bencana	0 orang	0 orang	0	refocusing	
	5. Terlaksananya sosialisasi peregrangan	0 OPD	0 OPD	0	refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.16.01 7.5.2 Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL (DAK)		400.000.000	- -	0		
	1. Terlaksananya pengadaan unit IPAL puskesmas Purwakarta	1 unit	0 unit	0	tidak direalisasi karena tidak terdapat dana pekerjaan konstruksi nya. pengajuan dana mekanisme perubahan juga sulit krn pandemi dan dana banyak difokuskan pada penanganan covid, kondisi pandemi covid juga menyebabkan CSR yang diajukan ke perusahaan belum bisa di realisasi.	Diajukan kembali pada usulan dana DAK dan melalui CSR
1.1.02.1.1.02.01.00.16.10 2.5.2 DED Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah		5.000.000	5.000.000	100,00		
	1. Tersedianya DED IPAL	1 dokumen	1 dokumen	100		

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.16.00 4.5.2 Peningkatan Promosi Kesehatan		147.205.000	144.280.000	98,01	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 400.000.000	
	1. Terlaksananya Pembinaan Krida SBH	96 orang (L:184 P:200)	96 orang (L:184 P:200)	100		
	2. Terlaksananya verifikasi data PIS PK	8 kegiatan	8 kegiatan	100		
	3. Terlaksananya evaluasi program PIS PK	0 orang (L:110 P:130)	0 orang (L:110 P:130)	0	refocusing	
	4. Terlaksananya Pameran Pembangunan	0 hari	0 hari	0	refocusing	
	5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas	0 orang (L:30 P:50)	0 orang (L:30 P:50)	0	refocusing	
	6. Terlaksananya Media Promosi Kesehatan	0 paket	0 paket	0	refocusing	
	7. Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader kesehatan	50 orang (L:10 P:40)	50 orang (L:10 P:40)	100		
	8. Terlaksananya Promosi Kesehatan di Radio	4 kegiatan	4 kegiatan	100		
	9. Terlaksananya pameran rakorkesda provinsi	0 paket	0 paket	0	refocusing	
	10. Terealisasinya media roll banner	100 buah	100 buah	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.16.20 2.5.2 Promosi Kesehatan (DID Tambahan)		100.000.000	96.320.000	96,32		
	1. Terealisasinya Cetakan Media Poster Kesehatan	800 lembar	800 lembar	100		
	2. Terealisasinya Cetak Spanduk kesehatan	200 Meter	200 Meter	100		
	3. Terealisasinya Cetak X- Banner kesehatan	80 Buah	80 Buah	100		

UPTD PKM CILEGON

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		520.398.000	425.313.225	81,73		
1.1.02.1.1.02.01.02.16.00 7.5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat		8.350.000	8.350.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 20.100.000	
	1. Tersedianya Hadiah Bayi dan Balita	2 Jenis	2 Jenis	100		penyerahan hadiah dilakukan secara terbatas cukup di Aula Puskesmas
	3. Tersedianya Dekorasi	0 Jenis	0 Jenis	0	tidak dilaksanakan Lomba Seperti Thn sblmnya, di area terbuka karena pandemi covid	
	4. Tersedianya Sewa Meja dan Kursi	0 Jenis	0 Jenis	0		
	5. Tersedianya Sewa Tenda	0 M2	0 M2	0		
	6. Tersedianya Sewa Soundsystem	0 Set	0 Set	0		
	7. Tersedianya Makanan dan Minuman	0 Box	0 Box	0		
1.1.02.1.1.02.01.02.16.01 8.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		512.048.000	416.963.225	81,43		
	25. Terlaksananya Kegiatan BOK (DAK)	6 Jenis Kegiatan	6 Jenis Kegiatan	100		

UPTD PKM CIWANDAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		463.195.000	462.911.500	99,94		
1.1.02.1.1.02.01.03.16.007. 5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat		0	0	0	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 14.900.000	
	1 Tersedianya Barang Hadiah	0 jenis	0 jenis	0	Refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2 Tersedianya belanja Dekorasi	0 paket	0 paket	0	Refocusing	
	3 Tersedianya Cetak Spanduk	0 m2	0 m2	0	Refocusing	
	4 Tersedianya sewa kursi	0 buah	0 buah	0	Refocusing	
	5 Tersedianya sewa tenda	0 m2	0 m2	0	Refocusing	
	6 Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman	0 Box	0 Box	0	Refocusing	
	7 Tersedianya Kipas Angin Blower	0 unit	0 unit	0	Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.03.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		463.195.000	462.911.500	99,94		
	1 Terlaksananya Kegiatan BOK	1970 orang	1.969,000K	99,95		

UPTD PKM CIBEKER

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		511.370.000	406.013.200	79,40		
1.1.02.1.1.02.01.04.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		511.370.000	406.013.200	79,40		
	1. Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)	4.820 orang	3.750 orang	77,80		

UPTD PKM GROGOL

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		507.280.000	505.833.675	99,71		
1.1.02.1.1.02.01.05.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		507.280.000	505.833.675	99,71		
	1. Terlaksananya Kegiatan BOK (DAK)	3.778,00Orang	3.778,00orang	100		
	2. Tercapainya Kegiatan BOK (DAK)	100%	100%	100		

UPTD PKM PULOMERAK

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja / Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		525.825.000	524.852.225	99,82		
1.1.02.1.1.02.01.06.16.007.5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat		22.500.000	22.500.000	100		
	1. Tersedianya Hadiah	18,0 Buah	18 Buah	100		
	2. Tersedianya Cetak Spanduk	10 Meter	10 Meter	100		
	3. Tersedianya Sewa Tenda	132 Meter	132 Meter	100		
	4. Tersedianya Makanan dan Minuman	306 Box	306 Box	100		
	5. Terlaksananya Lomba Balita Indonesia Tingkat Kecamatan	153 Orang	153 Orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.06.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		503.325.000	502.352.225	99,81		
	1. Terlaksananya Kegiatan BOK	3.321 Orang	3.321 Orang	100		

UPTD PKM PURWAKARTA

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		539.830.000	420.901.500	77,97		
1.1.02.1.1.02.01.07.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		539.830.000	420.901.500	77,97	Kegiatan terhambat karena pandemi	
	1. Tersedianya Jasa / Upah Tenaga Kerja	13 Bulan	13 Bulan	100		
	2. Tersedianya Transportasi Dan Akomodasi Kegiatan BOK	6.231 OK	4.433 OK	71,14	Kegiatan terhambat karena pandemi	
	3. Tersedianya Penggandaan	19.860 Lembar	19.860 Lembar	100		
	4. Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat	480 Box	480 Box	100		
	5. Tersedianya Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan BOK	6.687 Box	5.499 Box	82,23		

UPTD PKM JOMBANG

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		517.730.000	485.350.000	93,75		
1.1.02.1.1.02.01.08.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		517.730.000	485.350.000	93,75	Pandemi covid 19 sehingga kegiatan BOK tidak berjalan sesuai rencana	
	1. Terlaksananya Kegiatan Bantuan Operasional (DAK)	7.195 orang	6.765 orang	94,02		

UPTD PKM CITANGKIL 1

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		522.238.000	498.028.000	95,36		
1.1.02.1.1.02.01.09.16.018.5.2 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)		522.238.000	498.028.000	95,36		
	1. Terlaksananya Kegiatan BOK	4.695,00orang	4.695,00Orang	100		

UPTD PKM CITANGKIL 2

ArahKebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja / % Keu	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		0	0	0	Terkena refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.22.16.007.5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat		0	0	0	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 17.490.000	
	1. Tersedianya Makanan dan Minuman Peserta LBI	0 Box	0 Box	0		
	2. Tersedianya belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	0 Jenis	0 Jenis	0		
	3. Tersedianya sewa peralatan dan perlengkapan Kegiatan	0 Jenis	0 Jenis	0		
	4. Tersedianya Piala dan Hadiah	0 Buah	0 Buah	0		

Peningkatan kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui pengembangan kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan di Kota Cilegon cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya dalam memelihara kesehatan serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari beberapa indikator keberhasilan diantaranya :

1) AKI (Angka Kematian Ibu) per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) (AKI KONVERSI)

Jumlah kematian ibu karena hamil, bersalin, dan nifas di Kota Cilegon Tahun 2020 sebanyak 18orang dari 8.854 jumlah kelahiran hidup, dan bila dikonversikan menjadi 203 /100.000 KH. Dengan target tahun 2020 sebesar kurang dari 306/100.000 KH, maka dengan ini capaiannya adalah sebesar133,6 %. Penyebab kematian ibu selama 2020 adalah Hipertensi Dalam Kehamilan 5 orang, Jantung 1 orang, Perdarahan 1 orang, Obesitas 1 orang, KPD 1 orang, Covid 3 orang, Hepatitis 1 orang, Serotinus 1 orang, meningitis 1 orang, sepsis 1 orang dan penyebab lain 2 orang.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000 = \frac{18}{8.854} \times 100.000 = 203$$

Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah :

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya BinteK ANC
	Terlaksananya Pelatihan Sufas
	Terlaksananya Optimalisasi P4K
	Terlaksananya Follow Up SBMR Bidan
	Terlaksananya Follow Up SBMR PONE
	Terlaksananya PPWS KIA
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Orientasi dan Sosialisasi Gadar Maternal Neonatal
	Terlaksananya Reorientasi APN

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Evaluasi Kesga gizi
	Terlaksananya Pembinaan Bidan Kelurahan
	Terlaksananya Pertemuan Bidan Koordinator
	Terlaksananya Pembelajaran Audit
	Terlaksananya Pengkajian Kematian Maternal
	Terlaksananya Pelatihan Emergency Drill bagi Klinik dan BPM
	Terlaksananya Koordinasi PONED
	Terlaksananya OJT PONED
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Orientasi ANTROPOMETERI
	Terlaksananya Pengadaan Alat Antropometri
	Terlaksananya Orientasi PMBA Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Follow up KADER SEGANI SMP & SMA
	Terlaksananya Lomba Balita dan bumil Sehat
	Terlaksananya Pemberian PMT Balita Kurang Gizi dan bumil KEK

2) AKB (Angka Kematian Bayi) per1.000 KH (Kelahiran Hidup)

Jumlah kematian bayi ditahun 2020 sebesar 110 bayi dari 8.854 yang jika dikonversi ke AKB maka angkanya adalah sebesar 12 /1000 Kelahiran Hidup Dengan target tahun 2020 sebesar kurang dari 24/1000 KH. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, maka dengan ini capaiannya adalah sebesar 150%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000 = \frac{110}{8.854} \times 1.000 = 12$$

Penghitugan pada tahun 2020 ini memasukkan data kematian kasus IUFD.

Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah:

Kegiatan	Output
Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya Orientasi dan Sosialisasi Gadar Maternal Neonatal
	Terlaksananya Reorientasi APN
	Terlaksananya Evaluasi Kesga gizi
	Terlaksananya Pembinaan Bidan Kelurahan
	Terlaksananya Pertemuan Bidan Koordinator
	Terlaksananya Pembelajaran Audit
	Terlaksananya Pengkajian Kematian Maternal
	Terlaksananya Pelatihan Emergency Drill bagi Klinik dan BPM
	Terlaksananya Koordinasi PONED
	Terlaksananya OJT PONED
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Orientasi ANTROPOMETERI
	Terlaksananya Pengadaan Alat Antropometri
	Terlaksananya Orientasi PMBA Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Follow up KADER SEGANI SMP & SMA
	Terlaksananya Lomba Balita dan bumil Sehat
	Terlaksananya Pemberian PMT Balita Kurang Gizi dan bumil KEK
1.1.02.1.1.02.01.00.16.105.5.2 Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Rotasi Klinik Neonatal bagi petugas di RSKM
	Terlaksananya Reorientasi Asfiksia BBLR bagi Bidan Kelurahan
	Terlaksananya Orientasi bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bayi balita sesuai standar
	Terlaksananya Pengkajain Kasus Kematian Anak
	Terlaksananya Evaluasi rotasi klinik neonatal bagi petugas di RSKM
	Terlaksananya Penatalaksanaan stabilisasi kegawatan maternal neonatal

3) Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita (persen)

Capaian Kinerja Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada anak balita di Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebanyak 2,72% dengan target ditahun 2020 sebesar 17%, angka tersebut menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak balita. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik, maka capaian Kinerja adalah sebesar 184,11%, ini menunjukkan keberhasilan capaian program kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui perbaikan gizi masyarakat.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{balita gizi kurang (bb/u) underweight}}{\text{jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang}} \times 100\% = \frac{859}{31.538} \times 100\% = 2,72\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Orientasi ANTROPOMETERI
	Terlaksananya Pengadaan Alat Antropometri
	Terlaksananya Orientasi PMBA Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Follow up KADER SEGANI SMP & SMA
	Terlaksananya Lomba Balita dan bumil Sehat
	Terlaksananya Pemberian PMT Balita Kurang Gizi dan bumil KEK

4) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)

Capaian Kinerja Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak baduta di Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar 1,66% dengan target sebesar 28%, sehingga capaian realisasi sebesar 194,07%. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik.

$$\frac{\text{baduta pendek (tb/u) stunting}}{\text{jumlah baduta 0-23 bulan yang diukur tinggi badan}} \times 100\% = \frac{273}{16.472} \times 100\% = 1,66\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Gizi Masyarakat	Terlaksananya Orientasi ANTROPOMETERI
	Terlaksananya Pengadaan Alat Antropometri
	Terlaksananya Orientasi PMBA Bagi Tenaga Kesehatan
	Terlaksananya Follow up KADER SEGANI SMP & SMA
	Terlaksananya Lomba Balita dan bumil Sehat
	Terlaksananya Pemberian PMT Balita Kurang Gizi dan bumil KEK

5) Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat

Presentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat di Kota Cilegon pada tahun 2020 sebesar 95,94% dengan target sasaran sebesar 98%, sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 97,89%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat)}}{\text{jumlah KK}} \times 100\% = \frac{125.301}{130.602} \times 100\% = 95,94\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah

Kegiatan	Output
Penyelenggaraan Kota Sehat	Terlaksananya rapat kerja TP kota sehat
	Terlaksananya rapat koordinasi TP kota sehat
	Terlaksananya rapat evaluasi kota sehat
	Terlaksananya kaji banding kota sehat
Peningkatan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengawasan kualitas air bersih pemukiman
	Terlaksananya pelatihan
	Terlaksananya orientasi

Kegiatan	Output
	Terlaksananya pengawasan hygiene sanitasi manakan dan minuman
	Terlaksananya sosialisasi
	Terlaksananya pemicuan CLTS/STBM

6) Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

Capaian Kinerja rumah tangga yang melaksanakan PHBS di Kota Cilegon pada tahun 2020 sebesar 81,32% dengan target sasaran sebesar 74%, sehingga capaian realisasi sebesar 109,88%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber- PHBS}}{\text{Jumlah Rumah tangga yang dipantau}} \times 100\% = \frac{81.716}{100.493} \times 100\% = 81,32\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah

Kegiatan	Output
Peningkatan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Krida SBH
	Terlaksananya verifikasi data PIS PK
	Terlaksananya evaluasi program PIS PK
	Terlaksananya Pameran Pembangunan
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas
	Terlaksananya Media Promosi Kesehatan
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader kesehatan
	Terlaksananya Promosi Kesehatan di Radio
	Terlaksananya pameran rakorkesda provinsi
	Terealisasinya media roll banner

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Tabel 3.1.1.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular						
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		1.817.962.000,00	1.413.983.550,00	77,77%		
	1. Cakupan Keluruhan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	95,35 %	95,35		
	2. "Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap"	100 %	96,83 %	96,83		
	3. "Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk"	245	195,00	120,41		
	4. Prevalensi HIV/AIDS	0,5 %	0,03 %	1,94		
	5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	100 %	100 %	100		
	6. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	100 %	100 %	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.02.1.1.02.01.00.17.004.5.2 Kesehatan Haji		215.000.000	69.153.000	32,16	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya Pembinaan dimasa Tunggu	800 jemaah (L=400 P=400)	704 jemaah (L=400 P=400)	88		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pembinaan dimasa keberangkatan	650 jemaah(L=300 P=350)	696 jemaah(L=300 P=350)	107,08		
	Terlaksananya jemaah Haji Istithaah Tahun 2020	650 jemaah(L=300 P=350)	696 jemaah(L=300 P=350)	107,08		
	Terlaksananya pembinaan kesehatan calon Jemaah Haji dimasa keberangkatan	240 jemaah(L=220 P=220)	223 jemaah(L=220 P=220)	92,92		
	Terlaksananya Screening Jemaah Haji Istithaah	650 jemaah(L=300 P=350)	380 jemaah(L=300 P=350)	58,46	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya Rakor Pmeriksaan Kesehatan Haji Tk.Pertama	40 orang(L=20 P=20)	0 orang(L=20 P=20)	0	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya Rakor Pmeriksaan Kesehatan Haji Tk.Lanjutan / Kedua	40 Orang(L=20 P=20)	40 Orang(L=20 P=20)	100		
	Terlaksananya Entry Data Siskohatkes Jemaah Haji	650 Jemaah(L=300 P=350)	650 Jemaah(L=300 P=350)	100		
	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Siskohatkes	20 orang(L=5 P=15)	20 orang(L=5 P=15)	100		
	Terlaksananya Sosialisasi Haji Sehat Jemaah Haji Th 2021	800 jemaah(L=400 P=400)	0 jemaah(L=400 P=400)	0	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya Pemantauan K3JH	14 hari	0 hari	0	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya antar jemput Jemaah Haji ke Embarkasi	3 kloter	0 kloter	0,	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					instruksi Walikota Cilegon	
	Terlaksananya kegiatan Penguatan Haji Sehat	30 orang(L=15 P=15)	0 orang(L=15 P=15)	0	Adanya pandemi tidak boleh ada kegiatan kerumunan (PSBB)sesuai instruksi Walikota Cilegon	
1.1.02.1.1.02.01.00.17.113.5.2 Survelinans		66.070.000	65.470.000	99,09	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 140.000.000	
	Terlaksannaya penanggulangan KLB	5 kasus	5 kasus	100		
	Terlaksananya validasi surveilanas PKM dan RS	25 orang (L=5 P=20)	25 orang (L=5 P=20)	100		
	Terlaksananya evaluasi surveilans Tk.Kota	30 orang (L=10 P=20)	0 L=10 P=20)	0	Adanya refocusing	
	Terlaksananya Rakor penyelenggaraan surveilans kesehatan	30 orang (L=10 P=20)	30 orang (L=10 P=20)	100		
	Terlaksananya pertemuan SIS PD3I	35 orang (L=5 P=30)	0 orang (L=5 P=30)	0	Adanya refocusing	
	Terlaksananya pertemuan Hospital Base Surveilans (HBS)	30,0 Orang (L=5 P=25)	30,00 Orang (L=5 P=25)	100		
	Terlaksananya pertemuan Comunity Base Surveilans (CBS)	105,00 Orang (P=105)	105,00 Orang (P=105)	100		
	Terlaksananya Refresh SKDR	30,00 Orang (L=5 P=25)	30,00 Orang (L=5 P=25)	100		
	Terlaksananya pertemuan surveilnas PD3I	50,00 Orang (L=10 P=40)	0,00 L=10 P=40)	0,00	Adanya refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.17.114.5.2 Imunisasi		59.862.000	59.862.000	100,00	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 160.000.000	
	Terlaksananya Rakor BIAS	70,00 orang (L=35 P=35)	0,00 orang (L=35 P=35)	0,00	Adanya refocusing	
	Terlaksananya validasi data imunisasi	20,00 orang (P=20)	15,00 orang (P=20)	75,00	Disesuaikan dengan kebutuhan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pertemuan DQS	25,00 orang (P=25)	0,00 orang (P=25)	0,00	Adanya refocusing	
	Terlaksananya Evaluasi KIPi Tk.Kota	30,00 orang (L=10 P=20)	0,00 orang (L=10 P=20)	0,00	Adanya refocusing	
	Terlaksananya Imunisasi Dasar Lengkap	8.532 bayi/balita (L=4000 P=4532)	7.984 bayi/balita (L=4000 P=4532)	93,58	sasaran IDL sesuai pusdatin 8245	
	Terlaksananya BIAS	193 SD	193 SD	100		
	Terlaksananya Pertemuan Refresh Imunisasi	325 orang (P=325)	130 orang (P=325)	40	Adanya refocusing	
	Terlaksananya Penanggulangan kasus KIPi	4 Kasus	0 Kasus	0	Adanya refocusing	
	Terlaksananya sosialisasi imunisasi update	100 orang (P=100)	0 orang (P=100)	0	Adanya refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.17.115.5.2 Kesehatan Matra		577.088.000	488.072.800	84,58		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Arus Mudik Lebaran	5 posko	3 posko	60	Adanya refocusing	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tahun Baru	5 posko	3 posko	60	2 posko ikut gabung dengan Polres	Koordinasi dengan Polres di dalam pelaksanaan posko
1.1.02.1.1.02.01.00.17.116.5.2 Krisis Kesehatan		60.000.000	34.000.000	56,67	Tidak adanya evakuasi dalam penanggulangan krisis kesehatan	Sudah tertanggulangi nya oleh Puskesmas
	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	12 Kejadian / Kasus	0 Kejadian / Kasus	0		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.102.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang		245.700.000	222.783.750	90,67	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 253.400.000	
	1 Terlaksananya Validasi . P2BB	80 orang, L :8 P :72	80 orang, L :8 P :72	100		
	2 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program Kecacingan	0 orang, L :10 P :20	0 orang, L :10 P :20	0		
	3 Terlaksananya Koordinasi dengan Propinsi	10 orang, L : 10 P :10	10 orang, L : 10 P :10	100		
	4 Terlaksananya Fogging . Focus	120 focus	101 focus	84,17		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	5 Terlaksananya Monitoring Evaluasi · Program Kecacingan	0 orang, L :10 P :20	0 orang, L :10 P :20	0		
	6 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi · Gerakan 1 rumah 1 Jumantik	70 orang, L :40 P :30	70 orang, L :40 P :30	100		
	7 Terlaksananya Kegiatan · Gerakan Serentak PSN	544 orang, L :244 P :300	544 orang, L :244 P :300	100		
	8 Terlaksananya Supervisi · P2BB	128 orang, L : 12 P :116	128 orang, L : 12 P :116	100		
	9 Terlaksananya Sosialisasi GHPR (Gigitan Hewan · Pembawa Rabies)	42 orang, L :12 P :30	42 orang, L :12 P :30	100		
	10 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi · Gerakan Serentak PSN	70 orang, L :30 P :40	70 orang, L :30 P :40	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.103.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS		97.314.000	97.314.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 545.520.000	
	1 Terlaksananya Orientasi PITC bagi petugas · kesehatan	0 orang, L :10 P :45	0 orang, L :0 P :0	0		
	2 Terlaksananya Transport · ODHA	135 orang, L :340 P :200	135 orang, L :85 P :30	100		
	3 Terlaksananya Pendampingan ODHA · (Kader Pendamping)	40 orang, P :120	20 orang, P :20	50		
	4 Terlaksananya Pertemuan Validasi · HIV/AIDS dan IMS	160 orang, L :60 P :100	160 orang, L :60 P :100	100		
	5 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi · P2HIV dengan Provinsi	6 orang, L :10 P :14	6 orang, L :1 P :5	100		
	6 Terlaksananya Pertemuan Rapat · Koordinasi Lintas Sektor	60 orang, L :60 P :60	60 orang, L :20 P :40	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	7 Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi HAS 2020	0 orang, L :15 P :45	0 orang, L :0 P :0	100		
	8 Terlaksananya Pertemuan Penguatan Jejaring ARV	50 orang, L :30 P :70	50 orang, L :15 P :35	100		
	9 Terlaksananya Kegiatan Penguatan LKB HIV-AIDS	0 orang, L :25 P :125	0 orang, L :0 P :0	100		
	10 Terlaksananya Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya	60 orang, L :40 P :80	60 orang, L :15 P :45	100		
	11 Terlaksananya Kampanye HIV-AIDS di Masyarakat	140 orang, L :200 P :500	140 orang, L :70 P :70	100		
	12 Terlaksananya Mobile VCT	200 orang, L :250 P :500	200 orang, L :150 P :50	100		
	13 Terlaksananya Kegiatan Hari AIDS Sedunia	0 orang, L :150 P :200	0 orang, L :0 P :0	100		
	14 Terlaksananya Pertemuan Program HIV/AIDS dan IMS di RS	0 orang, L :50 P :70	0 orang, L :0 P :0	100		
	15 Terlaksananya Supervisi P2 HIV	364 orang, L :164 P :200	364 orang, L :21 P :70	100		
	16 Terlaksananya Pertemuan Mami Papi dan Pengelola Hiburan Malam	50 orang, L :30 P :70	50 orang, L :12 P :38	100		
	17 Pembentukan Duta Remaja TB-HIV Tk. Kota	0 orang, L :15 P :40	0 orang, L :0 P :0	100		
	18 Penjangkauan Pada Populasi Resiko Tinggi	48 orang, L :68 P :100	42 orang, L :32 P :10	87,50		
	19 Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS Pada Populasi Beresiko Tinggi	60 orang, L :30 P :90	60 orang, L :30 P :30	100		
	20 Terlaksananya Sosialisasi HIV-AIDS di Pesantren	0 orang, L :150 P :150	0 orang, L :0 P :0	0		

**BAB
III**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	2 Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS di OPD	150 orang, L :50 P :100	150 orang, L :50 P :100	100		
	2 Terlaksananya Pertemuan Monev P2HIV	0 orang, L :25 P :50	0 orang, L :0 P :0	0		
	2 Terlaksananya Pertemuan Gerakan Ibu Hamil Peduli HIV-Syphilis-Hepatitis	0 orang, P :600	0 orang, L :0 P :0	0		
	2 Terlaksananya Orientasi CST bagi Petugas Kesehatan	0 orang, L :15 P :40	0 orang, L :0 P :0	0		
	2 Terlaksananya 5 Pertemuan Masyarakat Peduli TB-HIV	100 orang, L :75 P :125	100 orang, L :75 P :25	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.104.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB		100.423.500	100.423.500	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 335.000.000	
	1 Terlaksananya Pertemuan Validasi TB	160 orang, L :30 P :130	160 orang, L :6 P :74	100		
	2 Terlaksananya Pertemuan Validasi Kolaborasi TB-HIV	0 orang, L :30 P :90	0 orang, L :0 P :0	0		
	3 Terlaksananya Rapat Koordinasi Program TB dengan Provinsi	12 orang, L :4 P :20	12 orang, L :0 P :12	100		
	4 Terlaksananya Rapat Koordinasi Hari TB Sedunia	0 orang, L :15 P :40	0 orang, L :0 P :0	0		
	5 Terlaksananya Orientasi TB DOTS bagi petugas kesehatan	50 orang, L :5 P :45	50 orang, L :5 P :45	100		
	6 Terlaksananya Orientasi TB Anak dan Pemberian PP INH bagi Petugas Kesehatan	0 orang, L :5 P :45	0 orang, L :0 P :0	0		
	7 Terlaksananya Pertemuan Monev Pokja TB-HIV Tk. UPK	200 orang, L :200 P :600	200 orang, L :30 P :170	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	8 Terlaksananya Penyisiran . Kasus ke RS	0 orang, L :15 P :45	0 orang, L :0 P :0	0		
	9 Terlaksananya Sosialisasi P2TB pada Bidan . Kelurahan dan Bidkor	9 orang, P :65	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya Screening 0 Massal di Lapas dan . Tempat-tempat tertentu	0 orang, L :400 P :50	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya 1 Pertemuan TB DOTS RS	0 orang, L :15 P :45	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya 2 Pertemuan Kampanye . TB ke OPD	0 orang, L :100 P :180	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya Kegiatan 3 Hari TB	0 orang, L :150 P :200	0 orang, L :150 P :200	0		
	1 Terlaksananya Kegiatan 4 Evaluasi Semester Seksi . P2	40 orang, L :10 P :70	40 orang, L :10 P :30	100,00		
	1 Terlaksananya Supervisi 5 P2TB	220 orang, L :70 P :150	220 orang, L :4 P :51	100,00		
	1 Terlaksananya 6 Pertemuan Penguatan . Jejaring TB-HIV-Hepatitis	0 orang, L :10 P :50	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya Orientasi 7 SITB	0 orang, L :5 P :55	0 orang, L :0 P :0	0		
	1 Terlaksananya pelayanan 8 konsultasi dokter . spesialis paru	12 jp	10 jp	83,33		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.105.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kusta		12.280.000	12.280.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 60.780.000	
	1 Terlaksananya . Pertemuan Validasi Kusta	40 orang, L :4 P :76	40 orang, L :4 P :36	100		
	2 Terlaksananya Rapat Koordinasi Kusta Tk. . Kota	30 orang, L :10 P :20	30 orang, L :10 P :20	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	3 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dengan Propinsi	10 orang, L :5 P :15	10 orang, L :5 P :5	100		
	4 Terlaksananya Monev Pemeriksaan Kontak dan Kemoprofilaksis	0 orang, L :10 P :30	0 orang, L :0 P :0	0		
	5 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pem. Kontak dan Kemoprofilaksis bg Petugas Kesehatan	0 orang, L :10 P :30	0 orang, L :0 P :0	0		
	6 Terlaksananya Orientasi POD bagi petugas kesehatan	0 orang, L :10 P :40	0 orang, L :0 P :0	0		
	7 Terlaksananya Sosialisasi Frambusia	0 orang, L :10 P :20	0 orang, L :0 P :0	0		
	8 Terlaksananya Konfirmasi Diagnosis Kusta	4 orang, L :5 P :15	4 orang, L :2 P :2	100		
	9 Terlaksananya Sosialisasi Pemeriksaan Laboratorium Morfologi Index Bakteri Kusta	0 orang, L :10 P :20	0 orang, L :0 P :0	0		
	10 Terlaksananya Supervisi Kusta	32 orang, L :28 P :100	32 orang, L :4 P :28	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.106.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dan HPISP (Hepatitis Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan)		23.977.000	23.977.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 74.699.000	
	1 Terlaksananya Pertemuan Validasi ISPA, HPISP	68 orang, L :8 P :60	68 orang, L :2 P :32	100		
	2 Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Program ISPA-HPISP dengan Propinsi	10 orang, L :4 P :16	10 orang, L :6 P :4	100		
	3 Terlaksananya Rakor Program TB-HIV- Hepatitis dgn Program KIA dan Imunisasi	0 orang, L :7 P :35	0 orang, L :0 P :0	0		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	4 Terlaksananya Pertemuan Hepatitis dan Thypoid	40 orang, L :10 P :70	40 orang, L :10 P :30	100		
	5 Terlaksananya . Pertemuan Diare	0 orang, L :10 P :70	0 orang, L :0 P :0	0		
	6 Terlaksananya . Pertemuan ISPA	40 orang, L :10 P :70	40 orang, L :25 P :15	100		
	7 Terlaksananya Sosialisasi . Hepatitis di PT	0 orang, L :45 P :45	0 orang, L :0 P :0	0		
	8 Terlaksananya Deteksi . Dini Hepatitis	40 orang, L :30 P :130	40 orang, L :10 P :30	100		
	9 Terlaksananya Supervisi . Program ISPA HPISP	160 orang, L :20 P :140	160 orang, L :20 P :140	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.201.5.2 Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Era Pandemi Covid 19 (DID Tambahan)		150.000.000	72.400.000	48,27	Honor Narasumber dan Transport Peserta tidak diserap karena mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI / PMK .07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020	
	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Era Pandemi 2020 di masyarakat	1.155 Orang L : 500 , P :655	764 Orang L : 500 , P :655	66,15	jumlah peserta tidak tercapai karena peserta yang diundang menyesuaikan dengan kondisi status Covid 19 kecamatan tempat diselenggarakannya acara	
	Jumlah Petugas Kesehatan dan Kader yang mengikuti Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di Era Pandemi 2020 bagi	450 Orang L : 200, P : 250	450 Orang L : 200, P : 250	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	petugas kesehatan dan kader					
1.1.02.1.1.02.01.00.17.107.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Lainnya		58.920.000	42.720.000	72,51	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 200.000.000	
	1 Melaksanakan Sosialisasi Kanker dalam rangka hari kanker se dunia	130 Orang (L 30 P 100)	13 orang	100		
	2 Melaksanakan Penjaringan IVA	5,00 Orang (P 10)	0 orang	0	Target indikator kegiatan belum terkoreksi saat proses refocusing	
	3 Melaksanakan Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim	0 Orang (P 80)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	4 Melaksanakan Sosialisasi Talasemia Pada Anak	0 Orang (L 10 P 70)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	5 Melaksanakan Sosialisasi Deteksi Osteoporosis	0 Orang (L 20 P 60)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	6 Melaksanakan Penjaringan PTM Pada OPD	50 Orang (L 20 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	7 Melaksanakan Penjaringan PTM Pada Masyarakat	33 Orang (L 3 P 30)	33 orang	100		
	8 Melaksanakan Sosialisasi Kesehatan Ginjal	0 Orang (L 10 P 60)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	9 Melaksanakan OJT IVA Di Puskesmas	0 Orang (L 5 P 15)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.17.108.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi		36.997.500	36.997.500	100,	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 126.947.500	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	1. Melaksanakan Sosialisasi UBM Bagi Petugas Kesehatan	0 Orang (L 5 P 45)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	2. Melaksanakan Pelatihan Konseling / Konselor Persiapan Klinik UBM	0 Orang (L 5 P 45)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	3. Melaksanakan Penatalaksanaan Hipertensi dan Stroke	60 Orang (L 10 P 50)	60 orang	100		
	4. Melaksanakan Skrining Hipertensi Pada Masyarakat (Petugas)	0 Orang (L 2 P 8)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	5. Melaksanakan Validasi Data Penyakit Tidak Menular	0 Orang (L 5 P 15)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	6. Melaksanakan Sosialisasi UBM Pada Masyarakat	0 Orang (L 20 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	7. Melaksanakan Rapat Evaluasi Program PTM	0 Orang (L 10 P 50)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	8. Melaksanakan Sosialisasi PTM Pada Guru	0 Orang (L 20 P 40)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	9. Melaksanakan Pelatihan Penatalaksanaan Hipertensi Pada Ibu Hamil	0 Orang (P 60)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	10. Melaksanakan Penatalaksanaan Jantung	0 Orang (L 20 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	11. Melaksanakan Kegiatan Seminar Hari Hipertensi dalam rangka hari hipertensi se dunia	50 Orang (L 30 P 70)	50 Orang	100		
1.1.02.1.1.02.01.00.17.109.5.2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus		8.250.000	8.250.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 85.000.000	
	1. Melaksanakan Pelatihan	50 Orang (L 20 P 30)	50 Orang	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penatalaksanaan Diabetes Melitus Dengan Komplikasi Bagi Petugas Kesehatan					
	2. Melaksanakan Skrining Diabetes	0 Orang (L 3 P 7)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	3. Melaksanakan Sosialisasi Diabetes Pada Masyarakat	0 Orang (L 15 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	4. Melaksanakan Seminar Hari Diabetes Se Dunia	0 Orang (L 20 P 80)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	5. Melaksanakan Kegiatan Komplikasi Kronik DM Pada Lanjut Usia	0 Orang (L 10 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	6. Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan DM pada anak	0 Orang (L 10 P 30)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
1.1.02.1.1.02.01.00.17.110.5.2 Peningkatan Kesehatan Jiwa		33.500.000	18.000.000	53,73	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 110.000.000	
	1. Melaksanakan Kunjungan Dokter SpKj Ke Puskesmas	3 Puskesmas	3 Puskesmas	100		
	3. Melaksanakan Sosialisai Kesehatan Jiwa dan Napza pada Guru	680 Orang (L 300 P 380)	680 Orang	100		
	4. Melaksanakan Sosialisai Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Pada OPD	0 Orang (L 20 P 30) / 13 OPD	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	5. Melaksanakan Pembentukan Posjitu (Pos Jiwa Terpadu) Tingkat Kelurahan	0 Orang (L 40 P 40)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	6. Melaksanakan Validasi Data Kesehatan Jiwa	0 Orang (L 5 P 20)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	
	7. Melaksanakan Terapi Aktivitas Kelompok (	0 Orang (L 130 P 150)	0 orang	0	Anggaran Di Refocusing	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	TAK) pada Pasien ODGJ					
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		6.450.000	5.850.000	90,70		
1.1.02.1.1.02.01.02.17.008.5.2 Pemeriksaan Calon Jamaah Haji		6.450.000	5.850.000	90,70		
	1. Tersedianya Makanan dan Minuman Calon Jamaah Haji	1 kegiatan	1 Kegiatan	100		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		40.300.000	30.600.000	75,93	Karena pandemi covid19 mengakibatkan pembatasan kontak dengan pasien	Pengawasan melalui telepon
1.1.02.1.1.02.01.04.17.008.5.2 Pemeriksaan Calon Jamaah Haji		5.500.000	5.500.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 6.540.000	
	1. Tersedianya Makanan dan Minuman Pemeriksaan Haji	220	220 box	100		
1.1.02.1.1.02.01.04.17.009.5.2 Pengawas Minum Obat (PMO) Pasien MDR/XDR		16.800.000	8.000.000	47,62	Karena pandemi covid19 mengakibatkan pembatasan kontak dengan pasien	Pengawasan melalui telepon
	1. Terlaksananya Pengawas Minum Obat (PMO) Pasien MDR/XDR	336 ok	160 ok	47,62	Karena pandemi covid19 mengakibatkan pembatasan kontak dengan pasien	Pengawasan melalui telepon
1.1.02.1.1.02.01.04.17.010.5.2 Screening Contact TB MDR dan Kategori II		4.800.000	3.900.000	81,25		
	1. Terlaksananya Screening Contact	96 ok	78 ok	81,25		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	TB MDR dan Kategori II					
1.1.02.1.1.02.01.04.17.011.5.2 Pelaksanaan Kegiatan Rabu Sehat		13.200.000	13.200.000	100		
	1. Terlaksananya Kegiatan Rabu Sehat	660 box	530 box	80,30		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		7.200.000	7.200.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.05.17.008.5.2 Pemeriksaan Calon Jamaah Haji		7.200.000	7.200.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 14.400.000	
	1. Tersedianya makanan dan minuman kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji	288,00 box	288,00 box	100		
	2. Terlaksananya pemeriksaan calon jamaah haji	1 Kegiatan	1 kegiatan	100		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		11.350.000	11.350.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.09.17.008.5.2 Pemeriksaan Calon Jamaah Haji		11.350.000	11.350.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 16.600.000	
	1. Tersedianya ATK	5,00 Jenis	5,00 Jenis	100		
	2. Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji	210 Box	210 Box	100		
	3. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji tk. kecamatan	100 %	100 %	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja/ Realisasi Keuangan	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		7.280.000	7.280.000	100		
1.1.02.1.1.02.01.22.17.007.5.2 Pemeriksaan Calon Haji		7.280.000	7.280.000	100	Kegiatan Direfocusingkan yang semula anggaran Rp 14400000	
	1 Tersedianya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan pemeriksaan calon jamaah haji	225 Box	255,00 Box	113,33	Target output seharusnya 299 box sebagaimana tercantum pada rincian	
	2 Tersedianya ATK	7 Jenis	7 Jenis	100		
	3 Tersedianya Battery Kering	60 Pcs	60 Pcs	100		

PEMBAHASAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Program ini bertujuan mengendalikan dan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan dari penyakit menular dan tidak menular, penyakit bersumber binatang, penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan. Keberhasilan program ini di dukung oleh beberapa indikator yang mendukung program tersebut diantaranya :

1) Prevalensi HIV/AIDS

Capaian Kinerja Prevalensi HIV/AIDS dikota Cilegon pada tahun 2020 adalah sebesar 0,03% dengan target 0,5% maka capaiannya adalah sebesar 194 %. Indikator ini jika realisasi lebih kecil dari target maka akan dinyatakan lebih baik.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

jumlah penduduk laki2 dan perempuan
usia 15-49 tahun yg terinfeksi HIV /AIDS
jumlah penduduk laki2 dan perempuan
usia 15-49 tahun

$$\frac{\quad}{252.080} \times 100\% = \frac{76}{252.080} \times 100\% = 0,03\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular HIV	Terlaksananya Orientasi PITC bagi petugas kesehatan
	Terlaksananya Transport ODHA
	Terlaksananya Pendampingan ODHA (Kader Pendamping)
	Terlaksananya Pertemuan Validasi HIV/AIDS dan IMS
	Terlaksananya Pertemuan Koordinasi P2HIV dengan Provinsi
	Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
	Terlaksananya Pertemuan Rapat Koordinasi HAS 2020
	Terlaksananya Pertemuan Penguatan Jejaring ARV
	Terlaksananya Kegiatan Penguatan LKB HIV-AIDS
	Terlaksananya Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya
	Terlaksananya Kampanye HIV-AIDS di Masyarakat
	Terlaksananya Mobile VCT
	Terlaksananya Kegiatan Hari AIDS Sedunia
	Terlaksananya Pertemuan Program HIV/AIDS dan IMS di RS
	Terlaksananya Supervisi P2 HIV
	Terlaksananya Pertemuan Mami Papi dan Pengelola Hiburan Malam
	Terlaksananya Pembentukan Duta Remaja TB-HIV Tk. Kota
	Terlaksananya Penjangkauan Pada Populasi Resiko Tinggi
	Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS Pada Populasi Beresiko Tinggi
	Terlaksananya Sosialisasi HIV-AIDS di Pesantren

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Sosialisasi HIV AIDS di OPD
	Terlaksananya Pertemuan Monev P2HIV
	Terlaksananya Pertemuan Gerakan Ibu Hamil Peduli HIV-Syphilis-Hepatitis
	Terlaksananya Orientasi CST bagi Petugas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Masyarakat Peduli TB-HIV

2) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

UCI (Universal Child Immunization) adalah desa/kelurahan dimana ≥ 80 dari jumlah bayi yang ada di desa/ kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2020 capaian kelurahan UCI sebesar 95,35 % (41Kelurahan dari 43 Kelurahan di Kota Cilegon).

Cara menghitung indicator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Desa/kelurahan UCI}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\% = \frac{41}{43} \times 100\% = 95,35\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Imunisasi	Terlaksananya Rakor BIAS
	Terlaksananya validasi data imunisasi
	Terlaksananya Pertemuan DQS
	Terlaksananya Evaluasi KIPi Tk.Kota
	Terlaksananya Imunisasi Dasar Lengkap
	Terlaksananya BIAS
	Terlaksananya Pertemuan Refresh Imunisasi
	Terlaksananya Penanggulangan kasus KIPi

Terlaksananya sosialisasi imunisasi update

3) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu pada tahun 2020 sebesar 100% (8/8),

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Puskesmas melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan PTM}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\% = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Diabetes Melitus	Melaksanakan Pelatihan Penatalaksanaan Diabetes Melitus Dengan Komplikasi Bagi Petugas Kesehatan
	Melaksanakan Skrining Diabetes
	Melaksanakan Sosialisasi Diabetes Pada Masyarakat
	Melaksanakan Seminar Hari Diabetes Se Dunia
	Melaksanakan Kegiatan Komplikasi Kronik DM Pada Lanjut Usia
	Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan DM pada anak
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular hipertensi	Melaksanakan Sosialisasi UBM Bagi Petugas Kesehatan
	Melaksanakan Pelatihan Konseling / Konselor Persiapan Klinik UBM
	Melaksanakan Penatalaksanaan Hipertensi dan Stroke
	Melaksanakan Skrining Hipertensi Pada Masyarakat (Petugas)
	Melaksanakan Validasi Data Penyakit Tidak Menular
	Melaksanakan Sosialisasi UBM Pada Masyarakat

Kegiatan	Output
	Melaksanakan Rapat Evaluasi Program PTM
	Melaksanakan Sosialisasi PTM Pada Guru
	Melaksanakan Pelatihan Penatalaksanaan Hipertensi Pada Ibu Hamil
	Melaksanakan Penatalaksanaan Jantung
	Melaksanakan Kegiatan Seminar Hari Hipertensi dalam rangka hari hipertensi se dunia

4) Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (%)

Keberhasilan Kelurahan UCI sebesar 100% didukung indikator Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi 0-11 bulan yang sudah tercapai sebesar 96,83% dengan target sebesar 100% maka capaian kinerja telah mencapai sebesar 96,83%. Indikator ini menggambarkan kesadaran masyarakat yang sudah tinggi akan pentingnya melakukan upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

anak yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap x 100% = $7.984 \times 100\% = 96,83\%$

$\frac{\text{Jumlah sasaran yang telah ditentukan}}{8.245}$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Imunisasi	Terlaksananya Rakor BIAS
	Terslaksananya validasi data imunisasi
	Terlaksananya Pertemuan DQS
	Terlaksananya Evaluasi KIPi Tk.Kota
	Terlaksananya Imunisasi Dasar Lengkap
	Terlaksananya BIAS
	Terlaksananya Pertemuan Refresh Imunisasi
	Terlaksananya Penanggulangan kasus KIPi

Kegiatan	Output
	Terlaksananya sosialisasi imunisasi update

5) PREVALENSI TUBERCULOSIS (TB) PER 100.000 PENDUDUK

Realisasi prevalensi tuberculosis (TB) pada tahun 2020 adalah sebanyak 195,20/100.000 penduduk dengan target sasaran 245/100.000 penduduk, maka capaian Kinerja adalah sebesar 120,41%. Data tersebut menunjukkan kasus TB di Kota Cilegon masih cukup tinggi.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah semua kasus tuberkulosis}}{\text{jumlah penduduk kota cilegon}} \times 100\% = \frac{864}{442.803} \times 100.000 = 195$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular TB	Terlaksananya Pertemuan Validasi TB
	Terlaksananya Pertemuan Validasi Kolaborasi TB-HIV
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program TB dengan Provinsi
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Hari TB Sedunia
	Terlaksananya Orientasi TB DOTS bagi petugas kesehatan
	Terlaksananya Orientasi TB Anak dan Pemberian PP INH bagi Petugas Kesehatan
	Terlaksananya Pertemuan Monev Pokja TB-HIV Tk. UPK
	Terlaksananya Penyisiran Kasus ke RS
	Terlaksananya Sosialisasi P2TB pada Bidan Kelurahan dan Bidkor
	Terlaksananya Screening Massal di Lapas dan Tempat-tempat tertentu

Kegiatan	Output
	Terlaksananya Pertemuan TB DOTS RS
	Terlaksananya Pertemuan Kampanye TB ke OPD
	Terlaksananya Kegiatan Hari TB
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Semester Seksi P2
	Terlaksananya Supervisi P2TB
	Terlaksananya Pertemuan Penguatan Jejaring TB-HIV-Hepatitis
	Terlaksananya Orientasi SITB
	Terlaksananya pelayanan konsultasi dokter spesialis paru

6) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

Capaian Realisasi **Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa** pada tahun 2020 adalah sebanyak 100% dengan target sasaran 100%, maka capaian Kinerja adalah sebesar 100%.

Cara menghitung indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\% = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung adalah :

Kegiatan	Output
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Melaksanakan Kunjungan Dokter SpKj Ke Puskesmas
	Melaksanakan Sosialisai Kesehatan Jiwa dan Napza pada Guru
	Melaksanakan Sosialisai Kesehatan Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan Napza Pada OPD

Kegiatan	Output
	Melaksanakan Pembentukan Posjitu (Pos Jiwa Terpadu) Tingkat Kelurahan
	Melaksanakan Validasi Data Kesehatan Jiwa
	Melaksanakan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) pada Pasien ODGJ
	Melaksanakan Kunjungan Dokter SpKj Ke Puskesmas

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

1. Upaya penanganan kesehatan masih dititik beratkan pada upaya kuratif, sementara upaya promotif dan preventif yang secara ekonomi dan sosial memerlukan biaya yang lebih murah, masih perlu ditingkatkan.
2. Penyakit tidak menular merupakan penyebab dominan tingkat kematian, yang menunjukkan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan angka harapan hidup. Data menunjukkan bahwa penyakit Hipertensi dan Diabetes Melitus merupakan pintu masuk atau faktor risiko penyakit lainnya seperti jantung, gagal ginjal, dan stroke.

SOLUSI

1. Peningkatan upaya Promotif dan preventif dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Puskesmas serta pemberdayaan masyarakat dan didorong melalui kolaboratif dengan program lainnya baik dengan program DPWKel, ataupun dengan program sektoral lainnya. Promotif dan preventif ini difokuskan pada pemasyarakatan tentang pola hidup bersih dan sehat, baik terkait kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik dan edukasi penggunaan obat yang benar.
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit ditingkatkan melalui upaya peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan kegiatan deteksi dini penyakit dan mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam program ini.

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Pada program ini, capaian kinerja keuangan mencapai 62,84% yaitu dari target sebesar Rp 2.186.030.000,- terealisasi sebesar Rp 1.373.727.500,- yang dalam hal ini terdapat beberapa anggaran kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, antara lain kegiatan pengadaan fasilitas kesehatan dan rehabilitasi ruang VIP. Namun, kinerja outcome program mencapai kinerja yang baik, yang secara ringkas ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1.2e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan RSUD)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.186.030.000	1.373.727.500	62,84%		
	<i>Persentase Ketersediaan Data dan Informasi</i>	100%	100%	100%		
	<i>Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik</i>	100%	100%	100%		
	<i>Tingkat Disiplin Aparatur</i>	100%	93%	93%		
	<i>Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)</i>	100%	95,09%	95,09%		

Berikut penjelasan mengenai capaian kinerja program pada program **Dukungan Pelayanan Pemerintahan** :

1. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral

No	Jenis Data	Capaian
1	SPM	100%
2	LPPD	100%
3	LAKIP	100%
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%

Ketersediaan data dan informasi sektoral merupakan data dan informasi yang dimiliki oleh RSUD Kota Cilegon dalam rangka pemenuhan data SPM (Standar Pelayanan Minimal) Rumah Sakit, data LPPD (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah), data LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD Kota Cilegon memiliki realisasi capaian sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Dokumen SPM, LPPD, LAKIP dan SKM}}{\text{Jumlah Dokumen SPM, LPPD, LAKIP dan SKM yang harus ada}} \times 100 = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

2. Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik

No	Jumlah Aset	Jumlah Aset Kondisi Baik	Jumlah Aset Kondisi Rusak	Keterangan
1	5.990	5.990	0	

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik di RSUD Kota Cilegon yang tercatat di BPKAD mencapai nilai 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Aset OPD dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aset OPD (yang tercatat di BPKAD)}} \times 100\% = \frac{5.990}{5.990} \times 100\% = 100\%$$

3. Tingkat Disiplin Aparatur

Tingkat Disiplin Aparatur di RSUD Kota Cilegon diukur berdasarkan jumlah rata-rata presentase kehadiran pegawai per bulan selama tahun 2020. Realisasi capaian indikator ini mencapai target yaitu sebesar 93%.

4. Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas)

Berikut adalah Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cash Budget (Anggaran Kas) di RSUD Kota Cilegon Tahun 2020 dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, yaitu:

Anggaran Kas	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Target	35,456,235,863	18,365,028,027	20,278,598,027	32,592,279,249	106.692.141.166
Realisasi	10.812.801.530	19.646.969.099	40.590.348.808	30.405.378.204	101.455.497.641
Capaian Triwulan (%)	30.5%	106.98%	200.16%	93.29%	95.09%

3. Program Peningkatan Pelayanan RSUD

Pada program ini, capaian kinerja keuangan menunjukkan kinerja yang baik ditunjukkan dengan capaian sebesar 90,12% yaitu dari target sebesar Rp 104.506.111.163,- terealisasi sebesar Rp 94.179.326.263,-. Namun pada sisi capaian kinerja outcome program beberapa capaian program menunjukkan kinerja 'memuaskan' khususnya terkait indeks kepuasan masyarakat dan tingkat efektifitas layanan rumah sakit.

Tabel 3.1.1.2e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan (Program Peningkatan Pelayanan RSUD)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD						
Program Peningkatan Pelayanan RSUD		104.506.111.163	94.179.326.263	90,12%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD</i>	100%	78,22%	78,22%		
	<i>Meningkatnya Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan</i>	100%	78.06%	78.14%		
	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan</i>	100%	94.65%	94.65%		
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	<i>Terpenuhinya Kebutuhan Alat Kesehatan dan Kedokteran</i>	17.739.223.000	16.371.648.077	92.29%		
Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rujukan	<i>Terlaksananya Pendamping DAK Kegiatan Pengadaan Alkes Rujukan</i>	83.250.000	80.990.000	97.29%		
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD						
Program Peningkatan Pelayanan RSUD (BLUD-Swakelola)						
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Pasien RSUD</i>	100%	78,22%	78,22%		
	<i>Meningkatnya Pelayanan Yang Efektif Kepada Seluruh Pengunjung/Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan</i>	100%	78.14%	78.14%		
	<i>Presentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan</i>	100%	94.65%	94.65%		
Program Peningkatan Pelayanan RSUD	<i>Terlaksananya Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD</i>	86.683.638.163	77.726.688.186	89.67%		

3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN UPTD PERBENGKELAN, ALAT BERAT DAN LABORATORIUM

Tabel 3.1.1.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang						
Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang		Rp 529.292.500	Rp 489.932.600	92,56		
	Persentase jumlah KRK yang sesuai tata ruang terhadap jumlah KRK yang diajukan	86,00%	84,20%	98,16&%		
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		Rp 90.000.000	Rp 54.380.100	60,42	Refocusing anggaran	
	Jumlah dokumen PERDA	1 dokumen	0 dokumen	0,00		
Penyediaan Penunjang Operasional Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)		Rp 15.000.000	Rp 15.000.00	100,00		
	Jumlah dokumen SKRK yang diterbitkan	370 SKRK	325 SKRK	87,84		
Operasional TKPRD Kota Cilegon		Rp 18.860.000	Rp 15.120.000	80,17	Hanya ada 5 permohonan pembahasan TKPRD	
	Jumlah kegiatan TKPRD	10 kegiatan	5 kegiatan	50,00		
Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara						
Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame		Rp 69.612.273.729	Rp 67.598.054.728	97,11		
	Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi	62,50%	82,76%	132,41%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada	10,00%	9,26%	92,60%		
	Persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada	10,00%	100,00%	1000,00%		
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan		Rp 2.400.000.000	Rp 398.471.000	16,60	- 1 Unit Gd (Eks Matahari) gagal lelang - Perkuatan Gd DINSOS Lama - Rehab Kantor PU (TARU)	
	Jumlah gedung yang dibangun/dirahab	3 gedung	2 Gedung	66,67		
Perencanaan Teknis Ciptakarya		Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00	- Refocusing krn Pandemi - Hanya ATK yang dapat diserap di awal tahun	
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	0 dokumen	0		
Penerbitan standar laik fungsi bangunan		Rp 117.000.000	Rp 107.500.000	91,88		
	Jumlah SLF Bangun Gedung	3 dokumen	3 dokumen	100,000		
Pembuatan papan himbauan IMB		Rp 870.079	Rp 870.079	100,00	Hanya ATK yang dapat diserap	
	Jumlah papan himbauan IMB yang dibuat	1 unit	0 unit	0,00		
Pemeliharaan Papan Himbauan IMB		Rp 1.310.000	Rp 1.310.000	100,00	Hanya ATK yang dapat diserap	
	Jumlah lokasi papan himbauan IMB yang dipelihara	1 titik	0 titik	0,00		
Perencanaan Teknis Cipta Karya (Prioritas Daerah)		Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00	- Refocusing krn Pandemi - Hanya ATK yang dapat diserap di awal tahun	
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	1 dokumen	0 dokumen			
		Rp 67.058.693.650	Rp 67.055.503.649	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan (Prioritas Daerah)	Jumlah gedung yang dibangun/dirahab	1 gedung	1 gedung	100,00	Masih ada sisa pekerjaan yg blm terselesaikan, yaitu : lansekap, mesin pompa, genset, hidran, gondola, interior, jar internet.	
Mewujudkan kualitas data perencanaan tata ruang dan pekerjaan umum						
Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi		Rp 505.044.450	Rp 423.083.850	83,77		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan	90,00%	90,00%	100,00%		
	Rasio pelayanan alat berat	21/26	67/70	118,50%		
	Prosentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi	100,00%	90,00%	90,00%		
	Prosentase ketersediaan alat laboratorium	87,95%	88,10%	99,83%		
Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)		Rp 20.115.950	Rp 20.115.950	100,00		
	Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen	1 dokumen	100,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		Rp 14.290.500	Rp 14.290.500	100,00		
	Jumlah dokumen perencanaan OPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00		
Penyusunan Dokumen Tabel Monitoring Pengadaan Barang / Jasa		Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	100,00		
	Jumlah dokumen monitoring pengadaan barang/jasa	2 dokumen	2 dokumen	100,00		
Penyusunan Dokumen Harga Upah, Alat dan Bahan KePU-an PUTR		Rp 18.847.000	Rp 18.847.000	100,00		
	Jumlah dokumen harga upah, alat, dan bahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruks		Rp 920.000	Rp 920.000	100,00	Refocusing anggaran	
	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruks	0 orang	0 orang	0,00		
Pelatihan Sertifikasi Tenaga Terampi		Rp 1.111.000	Rp 1.111.000	100,00	Refocusing anggaran	
	Jumlah peserta pelatihan sertiikasi tenaga terampil	0 orang	0 orang	0,00		
Biaya Penunjang Penerbitan Rekomendasi SIUJK		Rp 20.960.000	Rp 20.960.000	100,00		
	Jumlah dokumen Rekomendasi IUJK dan Kartu PJTBU yang diterbitkan	250 dokumen	250 dokumen	100,00		
Penyediaan bahan laboratorium		Rp 62.400.000	Rp 54.375.000	87,14		
	Jumlah suku cadang alat lab yang disediakan	5 buah	5 buah	100,00		
	Banyaknya jenis bahan lab yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100,00		
	Banyaknya jenis suku cadang alat ukur yang disediakan	3 jenis	3 jenis	100,00		
Perbaikan dan pemeliharaan alat laboratorium		Rp 26.900.000	Rp 26.169.000	97,28		
	Jumlah alat yang dikalibrasi	18 buah	18 buah	100,00		
Perbaiki dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan		Rp 328.500.000	Rp 255.295.400	77,72	Pandemi Covid-19 permohonan pelayanan alat berat berkurang → BBM relatif sedikit yang terpakai	
	Jumlah alat berat yang dipelihara	15 unit	15 unit	100,00		
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi						
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Rp 62.519.407.746	Rp 44.988.093.535	71,96		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	95,00%	85,46%	89,96%		
	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	100,00%	100,00%	100,00%		
	Cakupan panjang jalan yang dipelihara	25,00%	2,75%	11,00%	Refocusing anggaran, hanya bisa memelihara 3 ruas jalan dengan panjang 10,57 km	
Perencanaan Teknis Bidang Bina Marga		Rp 1.174.711.500	Rp 1.036.836.850	88,26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Suralaya - Pancuran tidak dapat dilaksanakan, krn nama paket tidak mencantumkan "Perencanaan Pengadaan Lahan"	
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	10 dokumen	9 dokumen	90,00		
Pembangunan Jalan Lingkar Utara		Rp 26.527.519.443	Rp 16.975.647.075	63,99	Ada lahan yg blm dibayar, krn : blm sepakat harga, sertifikat masih diagunkan, waris dll	
	Luas pengadaan lahan	8.559 m2	3.013 m2	35,20		
	Panjang pembentukan badan jalan	700 m'	700 m'	100,00		
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan		Rp 6.852.000.000	Rp 1.794.920.212	26,20	Dua ruas gagal lelang (Jl. H. Leman dan Jl. Kp Denok Masjid) krn gak memenuhi kualifikasi	
	Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan	6 ruas	4 Ruas	66,67		
Penanganan Darurat Jalan		Rp 300.000.000	Rp 296.089.254	98,70	Butuh dana lebih besar krn banyak permohonan (ada 12 permohonan TA	Note : - Jl. KH. A. Dahlan (depan SD Ciwedus 1) - Jl. Akses DPKAD
	Jumlah permohonan penanganan kerusakan jalan	2 permohonan	3 permohonan	150,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					2020), hanya 3 permohonan yg dapat ditindaklanjuti	- TPT JLS
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan		Rp 2.622.077.861	Rp 2.418.705.392	92,24		
	Jumlah ruas jalan yang dipelihara rutin	4 ruas	4 ruas	100,00		
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (TMMD)		Rp 1.557.754.060	Rp 1.497.944.870	96,16		Perlu dilanjutkan dengan perkerasan jalan (nama jalan usulan : JL. Rd Arya Sinto)
	Panjang jalan baru baru	2000 m'	2000 m'	100,00		
Pembangunan Jalan Lingkar Utara (DID)		Rp 13.476.944.000	Rp 10.959.549.000	81,32	Beberapa kali gagal lelang (2 kali), shg dilakukan Penunjukan Langsung. Masa pelaksanaan semula 80 hari menjadi 30 hari.	Note : - Efisiensi penawaran pihak ketiga - Pematangan lahan di : STA 12+385 s.d. 12+664 Kel. Gerem, Grogol
	Panjang pematangan jalan	279 m'	279 m'			
Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir						
Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air		Rp 17.852.456.632	Rp 16.205.140.195	90,77		
	Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	95,40%	72,87%	76,38%		Note : 5,7 ha yg ditangani TA 2020
	Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik	78,48%	77,11%	98,25%		Note 930,8 m'pada TA 2020
	Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan	3,00%	0,53%	17,81%		Note :
Pengendalian Banjir dan Genangan (Prioritas Daerah)		Rp 339.820.000	Rp 315.052.000	92,71	- Kesulitan membuang bekas sedimen (gak ada tempat dilokasi)	Note : 2 pemel (sampah dan sedimen), : 1. Mitsubishi 2. Medaksa
	Jumah lokasi penanganan banjir/genangan	5 lokasi	7 lokasi	140,00		

**BAB
III**

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					- Lokasi pekerjaan jauh dari jalan akses	Lima rehab sal : Lihat DPA
Pemeliharaan Saluran/Drainase	Panjang saluran yang dipelihara	Rp 1.813.052.000, 2,5 km	Rp 1.759.497.000 9 km	97,05 360,00	- Kesulitan membuang bekas sedimen (gak ada tempat dilokasi) - Lokasi pekerjaan jauh dari jalan akses - Peralatan kurang memadai	Note : Pemel 34 lokasi (9 km), rehab 8 lokasi <u>Solusi :</u> Perlu peralatan yg memadai untuk pemel tandon
Normalisasi Saluran/Drainase	Panjang saluran yang dinormalisasi	Rp 230.000.000 80 m'	Rp 225.072.000 80 m	97,86 100,00	Perlu dilanjutkan normalisasi di sal sek Griya Praja Mandiri, perlakuan di muara sungai	
Perencanaan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Jumlah dokumen perencanaan teknis	Rp 1.382.155.500 16 dokumen	Rp 1.366.003.150 16 dokumen	98,83 100,00	-	
Peningkatan Saluran/Drainase dan Jaringan Irigasi	Jumlah lokasi peningkatan saluran	Rp 3.250.000.000 15 lokasi	Rp 3.179.885.464 15 lokasi	97,84 100,00		
Pembangunan Tandon	Jumlah lokasi pembangunan tandon	Rp 5.200.000.000 3 lokasi	Rp 3.722.201.449 3 lokasi	71,58 100,00	Cibuntu: - Pengerukan blm selesai dilakukan KPKNL - Pembebasan lahan blm selesai Bulakan : - Sayap kiri kanan outlet (tanggul) blm dibangun - Pengerukan tanah blm dilakukan KPKNL Sukmajaya II	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					- Ada lahan yg blm digali dan disatukan dgn tandon (kolam) yg besar (penghubung dua kolam)	
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		Rp 5.763.945.085	Rp 5.328.787.879	92,45		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	93%	92,29	99,24		
	Tingkat disiplin aparatur	92%	90,37	98,23		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100%	86,13	86,13		

86,00%. Untuk mengukur capaian indikator tersebut maka perlu diketahui terlebih dahulu jumlah permohonan SKRK dibandingkan dengan jumlah KRK yang sesuai dengan tata ruang. Pada tahun 2020 diperoleh data tambahan luas lahan sebesar 423,9458 ha, sehingga secara keseluruhan luas pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukan adalah sebesar 14.814,9458 ha, sehingga persentase dapat dihitung dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{luas pemanfaatan lahan yg sesuai peruntukkan}}{\text{total luas pemanfaatan ruang}} \times 100\% \\
 &= \frac{14.814,95}{17.550} \times 100\% \\
 &= 84,42\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.1.1.3a.1 Target Dan Realisasi Indikator Program Penataan, Pengendalian, Dan Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)

Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya	%	86,00	84,42	98,16

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2021

Dengan target indikator sebesar 86,00%, dan realisasinya sebesar 84,42%, maka capaian kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar 98,16% (Sangat Tinggi).

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame memiliki tiga indikator, yaitu : (1) persentase unit gedung negara / pemerintahan yang laik fungsi, (2) persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada, dan (3) persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada.

Pembangunan prasarana gedung perkantoran pemerintahan berupa peningkatan atau rehabilitasi gedung perkantoran harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, sederhana dan transparan. Saat ini jumlah gedung perkantoran pemerintahan di Kota Cilegon sebanyak 87 gedung yang terdiri dari gedung kantor kecamatan 8 unit, gedung kantor kelurahan 43 unit dan gedung dinas dan badan sebanyak 36 unit. Dalam indikator program disebutkan persentase unit gedung negara / pemerintahan yang laik fungsi. Definisi operasional untuk indikator tersebut adalah jumlah gedung negara / pemerintahan yang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dibagi dengan jumlah total gedung negara / pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Pada tahun 2020, jumlah jumlah gedung negara / pemerintahan yang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung adalah 72 unit, sehingga dapat dihitung persentase unit gedung negara / pemerintahan yang laik fungsi dengan rumus berikut :

$$= \frac{\text{jumlah gedung negara yang memenuhi persyaratan teknis}}{\text{jumlah total gedung negara}} \times 100\%$$

$$= \frac{72 \text{ unit}}{87 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$= 82,76\%$$

Apabila memperhatikan target indikator persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi pada tahun 2020 adalah 62,50%, maka capaian indikator kinerjanya adalah sebesar 132,42% (Sangat Tinggi).

Berkaitan dengan pelayanan teknis perizinan pada tahun anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon mengeluarkan rekomendasi teknis IMB sebanyak 565 buah, dan sudah dikeluarkan IMB-nya; Dengan tambahan 565 buah IMB, maka jumlah komulatif bangunan yang sudah ber-IMB pada tahun 2020 menjadi 10.682 unit, sehingga persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{jumlah bangunan yang ber-IMB}}{\text{jumlah total bangunan}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.682 \text{ unit}}{115.328 \text{ unit}} \times 100\%$$

$$= 9,26\%$$

Target indikator persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada pada tahun 2020 adalah 10,00%, dan mampu direalisasikan sebesar 9,26% atau capaian indikator kinerja adalah 92,60% (Sangat Tinggi).

Reklame merupakan salah satu indikator program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklamem. Indikator persentase reklame berizin terhadap jumlah reklame dihitung dengan membandingkan jumlah reklame berizin terhadap jumlah seluruh reklame.

$$= \frac{\text{Jumlah reklame berizin}}{\text{Jumlah seluruh reklame}} \times 100\%$$

Pada tahun 2019, jumlah reklame berizin adalah sebanyak 410 unit. Pada tahun 2020 terdapat tambahan sebanyak 59 unit. Hal ini berdasarkan data jumlah rekomendasi teknis izin reklame yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon. Dengan demikian, jumlah total reklame yang berizin sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 469 unit. Realisasi indikator program dapat dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{469}{469} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Target indikator persentase reklame berizin terhadap jumlah reklame pada tahun 2020 adalah sebesar 10%, dengan realisasi kinerja adalah 100%. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 1000%.

Tabel 3.1.1.3a.2 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame

Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase unit gedung negara/pemerintahan yang laik fungsi	%	62,50	82,76	132,42
Persentase bangunan berizin terhadap seluruh jumlah bangunan yang ada	%	10,00	9,26	92,60
Persentase reklame berizin terhadap seluruh jumlah reklame yang ada	%	10,00	100,00	1000,00

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2021

Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame pada tahun 2020 memiliki 7 kegiatan. Secara umum kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat direalisasikan dengan baik, namun satu kegiatan realisasinya kurang baik, yaitu kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintahan. Kegiatan ini dari target 3 unit gedung yang akan dibangun, hanya dapat direalisasikan sebanyak 2 unit gedung, yaitu perkuatan Gedung Dinas Sosial (gedung lama) dan rehab Kantor Dinas PUTR (Bidang Tata Ruang), sedangkan Gedung eks Matahari lama tidak dapat direalisasikan disebabkan gagal lelang. Dari pagu anggaran sebesar Rp 2.400.000.000,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 398.471.000,- atau 16,60%.

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi memiliki empat indikator, yaitu : (1) persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan, (2) rasio pelayanan alat berat, (3) persentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi, dan (4) persentase ketersediaan alat laboratorium.

Indikator rasio pelayanan alat berat dihitung berdasarkan perbandingan (rasio) antara jumlah permohonan alat berat yang dilayani dengan jumlah total permohonan pelayanan alat berat, yang dirumuskan sebagai "Jumlah permohonan yang dilayani : jumlah total permohonan".

Pada tahun 2020 terdapat 70 permohonan pelayanan alat berat, dan hampir semua permohonan dapat dilayani, yaitu sebanyak 67 permohonan, sehingga dapat dihitung rasio pelayanan alat berat yaitu 67 : 70 atau 67/70

Untuk ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi dihitung berdasarkan bobot layanan informasi. Terdapat tujuh layanan informasi jasa konstruksi, yaitu : (1) izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala, (2) data Badan Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala, (3) Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, (4) Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya, (5) Tanda daftar usaha perorangan yang ter-update secara berkala, (6) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update secara berkala, dan (7) profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota. Ketujuh layanan informasi tersebut memiliki bobot tertentu, sebagaimana Tabel III. 10 berikut :

Tabel 3.1.1.3a.3 Bobot Tujuh Layanan Informasi

No	Jenis Informasi	Bobot (%)
1	Izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala	35
2	Data Badan Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara berkala	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10
5	Tanda daftar usaha perorangan yang ter-update secara berkala	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update secara berkala	15
7	Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota	10

Sumber : Dinas PUTR Kota Cilegon, 2020

Dari ketujuh jenis informasi tersebut, telah dipenuhi 6 jenis layanan, yaitu : (1) Izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala, (2) Data Badan Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala, (3) Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, (4) Tanda daftar usaha perorangan yang ter-update secara berkala, (5) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update secara berkala, dan (6) Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota. Kelima jenis layanan tersebut jika dijumlahkan adalah sebesar 90%.

Tabel 3.1.1.3a.4 Ketersediaan Jasa Layanan Informasi

No	Jenis Informasi	Bobot (%)	Ketersediaan Jasa Layanan (%)
1	Izin Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala	35	35
2	Data Badan Usaha Konstruksi yang ter-update secara berkala	10	10
3	Data tenaga kerja jasa konstruksi yang ter-update secara berkala	10	10
4	Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN, dan sumber pendanaan lainnya	10	-
5	Tanda daftar usaha perorangan yang ter-update secara berkala	10	10
6	Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang ter-update secara berkala	15	15
7	Profil Tim Pembina jasa konstruksi di kab/kota	10	10
JUMLAH		100	90

Sumber : Dinas PUTR Kota Cilegon, 2020

Indikator persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% dengan realiasi sebesar 90,00%, dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 90% (Tinggi).

UPT Laboratorium dan Alat Berat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dinas PUTR Kota Cilegon, khususnya dalam melaksanakan pengujian bahan/material dan hasil konstruksi. Pada tahun anggaran 2020 direncanakan pengadaan alat laboratorium sebanyak 84 jenis, namun yang dapat direalisasikan adalah sebanyak 74 jenis, atau 88,10%. Dari target indikator ketersediaan alat laboratorium sebesar 87,95% dan realisasi sebesar 88,10%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 99,83% (Sangat Tinggi).

Tabel 3.1.1.3a.5 Target dan Realisasi Indikator Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral urusan pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan	%	90,00	90,00	100,00
Rasio pelayanan alat berat	%	21/26	67/70	118,50
Prosentase ketersediaan data layanan informasi jasa konstruksi	%	100,00	90,00	90,00
Prosentase ketersediaan alat laboratorium	%	87,95	88,10	99,83

Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi pada tahun anggaran 2020 memiliki 10 kegiatan, termasuk di dalam nya UPT Laboratorium dan Alat Berat. Secara umum kegiatan-kegiatan dalam program ini dapat direalisasikan dengan baik, namun ada satu kegiatan yang perlu ditingkatkan, yaitu kegiatan Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Berat dan Peralatan Perbengkelan. Walaupun kegiatan ini termasuk dalam kategori tinggi serapannya (diatas 75%), namun masih perlu ditingkatkan. Dari pagu anggaran sebesar Rp 328.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 255.295.400,- atau 77,72%. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jumlah permohonan pelayanan alat berat, yang berimplikasi pada menurunnya penggunaan BBM (serapan BBM pada DPA).

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai 3 indikator, yaitu : (1) persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap), (2) persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik, dan (3) cakupan panjang jalan yang dipelihara. Untuk menghitung persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap), digunakan rumus berikut :

$$\frac{\text{panjang jalan kondisi baik dan sedang}}{\text{total panjang jalan}} \times 100\%$$

Berdasarkan SK Walikota Cilegon Nomor 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan Kota Cilegon, bahwa jalan kota di Kota Cilegon memiliki panjang total 384,858 km. Pada akhir tahun 2020, Bidang Bina Marga DPUTR Kota Cilegon melakukan penilaian kemantapan jalan. Dari hasil survei kondisi jalan, diperoleh hasil 55,708 km jalan dengan kondisi baik, 273,190 km jalan dengan kondisi sedang, 35,578 km jalan dengan kondisi rusak ringan, dan 20,382 km jalan dengan kondisi rusak berat.

Tabel 3.1.1.3a.6 Kemantapan Jalan Kota Cilegon Tahun 2020

Kondisi Mantap				Kondisi Tidak Mantap			
Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
km	%	km	%	km	%	km	%
55,708	14,47	273,190	70,98	35,578	9,24	20,382	5,30
328,898 km (85,46%)				55,960 km (14,54%)			

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2020

Tabel 3.1.1.3a.7 Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Kota Cilegon Tahun 2020

Jenis Permukaan	Panjang (km)
Aspal	277,241
Beton	95,979
Conblock	-
Tanah	1,638
Jumlah	384,858

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2020

Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dihitung dengan menjumlahkan panjang jalan dalam kondisi baik dan panjang jalan dalam kondisi sedang. Berdasarkan data kondisi jalan sebagaimana Tabel III.6 di atas, maka dapat dihitung panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang), sebagai berikut :

$$= \frac{328,898 \text{ km}}{384,858 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= 85,46\%$$

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap mantap pada tahun 2020 ditargetkan 95,00%, namun yang dapat terealisasi hanya mencapai 85,46%. Hal ini disebabkan perubahan metode pengambilan data kondisi jalan, yang semula menggunakan metode visual, sejak tahun 2017 suveri kondisi jalan menggunakan alat NASSRA sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Selain itu, perubahan panjang jalan yang semula 420,09 km (652 ruas) menjadi 384,858 km (393 ruas) juga turut mempengaruhi capaian kinerja kondisi jalan mantap.

Perubahan ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten terhadap LKPD Kota Cilegon Tahun 2017, dimana aset jalan yang tercantum dalam KIB D hanya berjumlah 393 ruas, yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 620/Kep.372-DPUTR/2018 tentang Status Jalan Kota Cilegon tanggal 11 Mei 2018.

Untuk persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100,00%. Dari 54 unit jembatan yang ada di Kota Cilegon, sebanyak 54 unit dalam kondisi baik. Dengan demikian capaian indikator program ini adalah 100,00%.

Untuk cakupan panjang jalan yang dipelihara, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 25,00%. Pada tahun anggaran 2020, sebanyak 4 ruas dilakukan pemeliharaan, dengan panjang total 10,57 km. Keempat ruas jalan yang dipelihara tersebut adalah : (1) Jl. Kelapa Tujuh – Cipala (No. Ruas 135) dengan panjang 4,56 km, (2) Jl. Gunung Batur (No. Ruas 154) dengan panjang 4,20 km, (3) Jl. Purbaya (No. Ruas 288) dengan panjang 0,45 km, dan (4) Jl. Ki Kahal (No. Ruas 131) dengan panjang 1,37 km. Untuk menghitung cakupan panjang jalan yang dipelihara dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{panjang jalan kota yang dipelihara}}{\text{total panjang jalan kota}} \times 100\%$$

$$= \frac{10,57 \text{ km}}{384,858 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= 2,75\%$$

Dari target indikator cakupan pemeliharaan sebesar 25% dapat direalisasikan sebesar 2,75%, dengan demikian capaian indikator kinerjanya adalah sebesar 11,00% (Sangat Rendah).

Tabel 3.1.1.3a.8 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	%	95,00	85,46	89,96
Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00
Cakupan panjang jalan yang dipelihara	%	25,00	2,75	11,00

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2021

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada tahun anggaran 2020 memiliki 7 kegiatan. Secara umum kegiatan-kegiatan dalam program ini cukup baik dalam hal realisasi, namun terdapat 2 kegiatan yang serapan anggarannya kurang memuaskan, yaitu : (1) Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), dan (2) pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Untuk kegiatan Pembangunan JLU penyebabnya adalah terdapat lahan yang belum dibayarkan oleh karena belum ada kesepakatan harga, sertifikat masih diagunkan, dan permasalahan waris. Untuk Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, realisasi anggaran dan output kegiatan tidak tercapai dengan baik. Dari pagu anggaran sebesar RP 6.852.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.794.920.212,- atau 26,20%. Rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan dari 6 ruas yang direncanakan, hanya dapat direalisasikan 4 ruas. Dua ruas yang tidak dapat direalisasikan, yaitu Jl. H. Leman dan Jl. Kp. Denok Masjid gagal lelang.

Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki tiga indikator kinerja, yaitu : (1) Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam), (2) Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik, dan (3) Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan.

Dewasa ini permasalahan banjir menjadi permasalahan yang mendesak untuk diatasi pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Cilegon. Dinas PUTR Kota Cilegon melalui Bidang Sumber Daya Air, menaruh perhatian besar terhadap permasalahan banjir. Penanganan banjir di Kota Cilegon dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti kegiatan pembangunan tandon, dan kegiatan pengendalian banjir dan genangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Bidang Sumber Daya Air, di Kota Cilegon terdapat 58 titik banjir/genangan dengan luas 51,90 ha yang menjadi dasar penanganan banjir/genangan dalam periode tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 3.1.1.3a.9 Data Dasar Lokasi Banjir / Genangan Di Kota Cilegon

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas genangan (Ha)
I	Jombang	1. Seneja (Sal. Mitsubishi)	3
		2. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI) 1	2
		3. Perum Bumi Panggung Rawi (BPI) 2	2
		4. Kp. Kranggot	4
		5. Perumahan Metro Cilegon	0.2
		6. Perumahan Taman Raya	0.1
		7. Belakang Mall Mayofield	3
		8. Masigit/SDN Masigit I, Kenanga	0.1

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas genangan (Ha)
		9. Depan Kelurahan Masigit	2
		10. Perum PGRI	0.1
		11. Lingk.Sawah Besar	0.1
		12. Lingk.Rokal	0.1
		13 Lingk. Nyi Kambang	0.3
		14. Lingk.Cigiceh (Pabrik Tahu Tempe)	0.1
		15. Lingk. Samandaran Kel.PG.Rawi	0.3
II	Citangkil	16 Makam Balung Di Bagian Hulu	1
		17 Ramanuju Citangkil-Purwakarta	0.5
		18 Kubang Welut	2
		19 Lingk.Ciriu	1
		20 Lingk. Ramanuju Baru (RGM)	0.1
III	Pulomerak	21 Lingk. Gamblang, Mekarsari	0.1
		22 Belakang Pasar, Tamansari	0.1
		23 Lingkungan Tamansari/ Sudimampir	1.5
		24 Lingk. Temposo Lebak Gede	0.5

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas genangan (Ha)
		25 Lingk.Kecamatan Pulomerak Lebak Gede	0.2
		26 Lingk. Batu Bolong	0.1
		27 Lingk. Langon sari Kali Medaksa	0.1
		28 Lingk.Sawah Kel.Tamansari	2
IV	Cilegon	29 Arjuna bagian hilir	0.2
		30 Pasar Kelapa Kapling Blok F (Saluran jalan)	0.2
		31 Lingk.Palas (Saluran Purbaya) Kel. Bendungan	0.1
		32 RBK	1
V	Purwakarta	33 Kp. Penyairan, Kotabumi (hulu)	1
		34 Kp. Penyairan, Kotabumi (hilir)	0.1
		35 Kp. Dukuh Malang, Kel. Pabean	0.1
		36 Jl. Pasar baru Link. Kubang Welingi Kel. Purwakarta	0.5
		37 Perum Golf Asri Kel.Kebon Dalem	1.5
		38 Terowongan Tol Leweung Sawo	0.2
		39 Lingk. Belakang SDN Kenanga	0.3

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas genangan (Ha)
		40 Lingk Kaligandu	0.1
VI	Grogol	41 Perum. Arga Baja, Kel. Kotasari	0.5
		42 Perum. Arga Baja II, Kel. Kotasari	0.5
		Lingk. Ciore Waseh, Kel. Kota Sari, di dpn 43 gerbang Tol Cilegon Barat	0.5
		Lingk. Ciore Kwista, Kel. Kota Sari dan Kel. 44 Grogol	0.3
		45 Lingk. Keserangan, blkg ktr Samsat Rawa Arum	0.2
VII	Ciwandan	46 Lingk. Kebanjiran	1
		47 Tegal Ratu (Lingk. Dpn Kantor Kel)	3
		48 Simpul JLS dengan Jalan Negara, Ciwandan	3
		49 Lingk. Tegal Buntu	2
		50 Randakari (Kali Bapang)	3
		51 Lingk. Dpn Korindo	0.5
		52 Lingk. Kel Kepuh	0.5
VIII	Cibeber	53 Lingk. Cibeber Kulon	1

No	Lokasi (Kecamatan)	Titik Banjir	Luas genangan (Ha)
		54 Seruni, Kel. Kedaleman	0.1
		55 Lingk. Depan dan Belakang Polsek Cibeber	3
		56 Lingk. Ciberko	0.2
		57 Lingk. Pesantren Cibeber	0.2
		58 Perum Gedong Damai (Kel. Kalitimbang)	0.5
Total Luas Banjir dan Genangan			51,9

Sumber : Dinas PUTR Kota Cilegon, 2020

Pada tahun anggaran 2020, Dinas PUTR Kota Cilegon telah melakukan penanganan banjir/genangan di empat titik dengan luas penanganan 5,7 ha. Keempat titik tersebut adalah : (1) Link. Kubang Welut Kel. Samangraya, dengan luas 2 ha, (2) Link. Perum Golf Asri Kel. Kebondalem, dengan luas 1,5 ha, (3) Link. Perum Metro Kel. Kebondalem, dengan luas 0,2 ha, (4) Link. Tegal Buntu Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan, dengan luas 2 ha. Dari total luas banjir/genangan sebesar 51,9 ha Dinas PUTR Kota Cilegon dapat menyelesaikan sebanyak 37,82 ha. Indikator persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam) merupakan luas daerah yang masih tergenang dihitung sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Luas yang masih banjir (tegenang)}}{\text{Luas total banjir (genangan)}} \times 100\%$$

Tetapi, dalam RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 target indikator ini menunjukkan angka penanganan banjir/genangan, sehingga khusus untuk indikator ini definisi operasionalnya diubah menjadi luasan banjir/genangan yang sudah ditangani. Dengan demikian, dapat dihitung penanganan banjir/genangan sampai dengan tahun 2020, yaitu :

$$= \frac{\text{Luas banjir (genangan) yang ditangani}}{\text{Luas total banjir (genangan)}} \times 100\%$$

$$= \frac{37,82 \text{ ha}}{51,90 \text{ ha}} \times 100\%$$

$$= 72,87\%$$

Tabel 3.1.1.3a.10 .Lokasi Penanganan Banjir/Genangan Tahun 2020

No.	Lokasi Penanganan	Luas (ha)
1	Link. Kubang Welut Kel. Samangraya	2,00
2	Link. Perum Golf Asri Kel.Kebondalem	1,50
3	Link. Perum Metro Kel. Kebondalem	0,20
4	Link. Tegal Buntu Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan	2,00
Jumlah		5,70

Sumber : DPUTR Kota Cilegon, 2021

Target indikator persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam) pada tahun 2020 adalah sebesar 95,40% dan realisasinya adalah sebesar 72,87%, sehingga capaian indikatornya adalah sebesar 76,38% (Tinggi).

Panjang saluran/drainase perkotaan yang terdata di Dinas PUTR Kota Cilegon adalah 175,59 km. Pada tahun anggaran 2020, kegiatan pemeliharaan saluran/drainase menghasilkan panjang saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik adalah 10.577,35 m', sehingga sampai dengan tahun 2020 panjang saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik adalah 135,40 km. Panjang saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Panjang saluran/drainase dalam kondisi baik}}{\text{panjang total saluran/drainase perkotaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{135,40 \text{ km}}{175,59 \text{ km}} \times 100\%$$

$$= 77,11\%$$

Dari target indikator persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik sebesar 78,48% dan realisasi sebesar 77,11% maka capaian indikator kinerjanya sebesar 98,25% (Sangat Tinggi).

Selain pemeliharaan saluran/drainase perkotaan, Dinas PUTR Kota Cilegon juga melaksanakan kegiatan peningkatan saluran/drainase. Pada tahun anggaran 2020, peningkatan saluran/drainase yang telah dilaksanakan adalah sepanjang 930,8 m', sehingga persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$= \frac{\text{Panjang saluran/drainase yang ditingkatkan}}{\text{Panjang total saluran/drainase perkotaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{930,8 \text{ m}'}{175.590 \text{ m}'} \times 100\%$$

$$= 0,53\%$$

Tabel 3.1.1.3a.11 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase luasan yang masih tergenang (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	%	95,40%	72,87%	76,38%
Persentase saluran/drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	78,48%	77,11%	98,25%
Persentase peningkatan panjang saluran/drainase perkotaan	%	3,00%	0,53%	17,81%

Sumber : Dinas PUYTR Kota Cilegon, 2020

Dari target indikator persentase peningkatan saluran/drainase perkotaan sebesar 3,00% dan realisasi sebesar 0,53%, maka capaian indikator kinerjanya sebesar 17,81% (Sangat Tinggi).



Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2020 memiliki 6 kegiatan. Secara umum kegiatan-kegiatan pada program ini dapat direalisasikan dengan baik, kecuali kegiatan Pembangunan Tandon yang hanya mampu merelaisasikan sebesar 71,58%. Dari pagu anggaran sebesar Rp 5.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 3.722.201.449,- atau 71,58%. Hal ini disebabkan pembebasan lahan yang belum selesai pada Tandon Cibuntu, pengerukan tanah yang ditangani KPNKL belum selesai pada Tandon Cibuntu dan Tandon Bulakan, dan pengerjaan konstruksi sayap kanan/kiri pada Tandon Bulakan belum selesai dikerjakan.

PERMASALAHAN

1. Rencana kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana tertuang dalam DPA, belum mencantumkan rencanan pengadaan lahan
2. Pembayaran lahan terkendala kesepakatan harga, ahli waris, dan sertifikat yang diagunkan
3. Beberapa kegiatan mengalami gagal lelang
4. Kegiatan pembangunan tandon terkendala pembuangan galian tanah oleh KPNKL

SOLUSI

1. DPA agar mencantumkan item pengadaan lahan untuk kegiatan yang memerlukan pengadaan lahan
2. Alokasi untuk pengadaan lahan agar memperhitungkan kendala-kendala di lapangan
3. Agar proses pengadaan dilakukan di Triwulan 1 atau tiwulan 2 untuk antisipasi kegagalan lelang
4. Agar lebih dioptimalkan koordinasi dengan KPKNL

3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CILEGON

Tabel 3.1.1.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu						
Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan						
Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota		4.245.946.000	3.336.685.806	78,59	Pandemi COVID-19	
	Rasio Realisasi Taman Kota, Taman Perumahan, dan Lingkungan Terhadap kebutuhan luas RTH Publik Yang Seharusnya Tersedia	10,49%	4,34%	41,27%	Refocusing anggaran	
	Rasio Taman Kota Terpelihara Terhadap Taman Kota Yang Ada	76,98%	66,40%	86,25%	Refocusing anggaran	
	Persentase ketersediaan prasarana Kota terhadap kebutuhan	72,00%	42,86%	59,52%	ketersediaan lahan terbatas	
Pemeliharaan Prasarana Arsitektur Kota		Rp 52.000.000	Rp 51.100.000	98,27		
	Jumlah gerbang kota yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	100,00		
Pemeliharaan Sarana dan Arsitektur Kota		Rp 1.206.812.000	Rp 971.988.631	80,54	Efisiensi dari harga solar (DPA)	
	Jumlah RTH yang dilakukan pemeliharaan sarana	3 lokasi	3 lokasi	100,00		
Perencanaan Teknis Sarana dan Arsitektur Kota		Rp 911.574.000	Rp 844.698.050	92,66		
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	11 dokumen	11 dokumen	100,00		
Pembangunan Sarana Arsitektur Kota		Rp 210.000.000	Rp 207.049.825	98,60		
	Jumlah RTH yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	100,00		
		Rp 200.000.00	Rp 196.973.000	98,49		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan/Penataan Sarana Arsitektur Kota (Prioritas Daerah)	Jumlah RTH yang dilakukan penataan sarana	1 lokasi	1 lokasi	100,00		
Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota		Rp 1.665.560.000	Rp 1.064.876.300	63,94	Efisiensi BBM, di DPA direncanakan harga lbh tinggi dari harga pasar, untukantisipasi fluktuasi harga BBM	
	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	11 unit	11 unit	100,00		
	Jumlah peralatan yang dipelihara	80 unit	80 unit	100,00		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan					??	??
Program Penataan Perumahan dan Permukiman		1.794.889.500	1.656.405.500	92,28	Pandemi Covid-19	
	Prosentase luas penanganan kawasan kumuh	10,27%	0%	0	Tidak ada penangana kumuh TA 2020 → Refocusing TA 2020 (keg Penataan Kaw Kumuh).	
	Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	90,31%	82,1	90,9	Refocusing anggaran	
	Persentase Drainase Lingkungan dalam kondisi baik/ Tidak rusak	93,80%	69,75	74,36	Refocusing anggaran	
	Persentase Penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan	17,31%	0,25%	1.44		3 lokao x 60 KK x 5 jwa – jmlh pend dikurangi(1904 KK x 5 jiwa) 95320 jiwa
	Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	10,00%	0,48%	0,05%	Kurang sosialisasi pemanfaatan TPU Cikerei	
Pemasangan Paving jalan lingkungan		Rp 200.000.000	Rp 198.167.500	99,08		
	Jumlah lokasi pemasangan paving jalan lingkungan	1 lokasi	1 lokasi	100,00		
Pembangunan Drainase Lingkungan		Rp 3.562.500	Rp 3.562.500	100,00	Refocusing anggaran, hanya ATK	
	Jumlah lokasi pembangunan drainase lingkungan	0 lokasi	0 lokasi	0,00		
Rehabilitas dan pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman		Rp 200.000.000	Rp 195.223.000	97,61		
	Jumlah kecamatan yang PSU-nya dipelihara	1 kecamatan	1 kecamatan	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan sumur bor		Rp 661.000.000	Rp 562.013.500	85,02		
	Jumlah lokasi pembangunan sumur dalam (<i>deep well</i>)	3 lokasi	3 lokasi	100,00		
Optimalisasi penyediaan air bersih		Rp 4.584.500	Rp 4.584.500	100,00	Refocusing anggaran, hanya ATK	
	Jumlah KK yang dilayani air bersih	0 KK	0 KK	0,00		
Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman		Rp 521.250.000	Rp 491.480.000	94,29		
	Jumlah dokumen perencanaan teknis	4 dokumen	4 dokumen	100,00		
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)		Rp 200.000.000,	Rp 196.882.000	98,44		
	Jumlah lokasi pembangunan TPT	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00		
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Rp 4.492.500,	Rp 4.492.500	100,00	Refocusing anggaran, hanya ATK	
	Panjang jaringan perpipaan air bersih	0 m	0 m	0,00		
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		Rp 9.063.260.800	Rp 8.855.650.227	97,71		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	93,00%	100,00%	107,53%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	93,00%	94,64%	101,76%		
	Tingkat disiplin aparatur	92,00%	97,60%	106,09%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100,00%	88,99%	88,99%		

Tingkat keberhasilan program dukungan pelayanan pemerintahan ditentukan oleh 4 indikator program yaitu : (1) persentase ketersediaan data dan informasi sektora, (2) persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, (3) tingkat disiplin aparatur, dan (4) kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas). Masing-masing indikator program baik target, realisasi, hingga capaian kinerja akan dibahas secara terperinci.

Data dan informasi sektoral pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon saat ini dikelompokkan ke dalam data SPM, LPPD, dan LKPJ. Ketiga kelompok data tersebut pada tahun anggaran 2020 telah terpenuhi dengan output sebanyak 7 dokumen, dari target sebanyak 7 dokumen., sehingga realisasinya sebesar 100%. Dengan demikian, capaian indikator persentase ketersediaan data dan informasi sektoral adalah sebesar 107,53%. (Sangat Tinggi). Realisasi Indikator Kinerja Presentase Ketersediaan Data dan Informasi

Sektoral sebesar 107,52. Capaian ini diperoleh dari hasil perhitungan dari dokumen-dokumen yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diantaranya: Revisi Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, IKU, PK dan LAKIP.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik harus didukung dengan Sumber Daya Manusia, Data dan informasi, sehingga dalam pencapaian target pelaksanaan kegiatan bisa maksimal. Ketersediaan data dan informasi sektoral berpengaruh dalam menunjang kegiatan Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan serta terpenuhinya standar kebutuhan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung kelancaran tugas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil perhitungan data inventaris yang kita lakukan saat rekon dengan bagian asset BPKAD, bahwa sebanyak 1.007 unit sarana prasarana dalam kondisi baik, dari jumlah total 1.064 unit yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon., sehingga dapat dihitung indikator persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik sebesar 94,64%. Capaian indikator persentase sarana prasarana dalam kondisi baik adalah sebesar 101,76% (Sangat Tinggi).

Tingkat disiplin aparatur merupakan salah satu paramater keberhasilan program pembangunan. Tingkat disiplin aparatur dihitung berdasarkan rata-rata kehadiran pegawai dalam kurun waktu Januari 2020 sampai dengan Desember 2020. Dari hasil rekapitulasi kehadiran pegawai diperoleh angka sebesar 97,60%. Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan prosentase kehadiran pegawai tiap bulannya dalam kurun waktu satu tahun dan data di ambil dari hasil rekon absen (jumlah PNS 35 orang, TKK 2 orang dan THL 176 orang dengan total pegawai 213 orang). Dengan target indikator sebesar 92,0% maka capaian kinerja program adalah 106,09% (Sangat Tinggi).

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) dihitung sebagai angka rata-rata realisasi keuangan per triwulan. Dari data realisasi keuangan per triwulan, diperoleh angka kesesuaian realisasi keuangan sebesar 88,99%. Dengan target indikator kinerja sebesar 100%, maka capaian indikator kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* adalah sebesar 88,99% (Tinggi).

No	INDIKATOR PROGRAM	Target	DEFINISI OPERASIONAL
1	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral	93%	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan data SPM, LPPD dan LKPJ}}{\text{Jumlah data SPM, LPPD dan LKPJ yang harus ada}} \times 100\%$ $= \frac{7 \text{ dokumen}}{7 \text{ dokumen}} \times 100\% = 100\%$ * data yang harus dipenuhi : Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, IKU, PK dan LAKIP (7 dokumen)

No	INDIKATOR PROGRAM	Target	DEFINISI OPERASIONAL
2	Presentase Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik	93%	$\frac{\text{Jumlah aset OPD dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan aset OPD}} \times 100\%$ $= \frac{1.007}{1.064} \times 100\%$ $= 94,64 \%$ * Jumlah aset sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perkim yang tercatat per 31 Desember 2020 * Ada penambahan aset sarana prasarana kantor dari pengadaan TA 2020 sebanyak 26 unit * Ada pengurangan aset sarana prasarana kantor rusak berat (proses penghapusan aset) TA 2020 sebanyak 32 unit
3	Tingkat Disiplin Aparatur	92%	$\frac{\text{Rata-rata presentasi kehadiran pegawai per bln Januari s.d Desember (\%)}}{12}$ $= \frac{94,73+94,96+94,75+97,09+98,76+98,73+98,80+98,72+98,64+98,58+98,76+98,72}{12}$ $= 97,60 \%$ *Data diambil dari data rekon absen
4	Presentase Kesesuaian Cash Budget	100%	$\frac{\text{Jumlah realisasi cash budget tw 1+ tw 2 + tw 3 + tw 4 (\%)}}{4}$ $= \frac{81,06+81,57+93,35+100}{4}$ $= 88,99\% \%$

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 memiliki 25 kegiatan. Secara umum kegiatan-kegiatan pada program ini dapat direalisasikan dengan baik, tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 91,69 %. Meskipun ada beberapa kegiatan yang ada tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun

beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cilegon dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 53,22 %
Pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyerapan anggaran sampai desember 2020 disesuaikan dengan kebutuhan OPD, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 46,78%
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 59,04 %
Pada kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor mengalami refocusing dan rasionalisasi. Penyerapan anggaran untuk kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai dengan kebutuhan OPD. Sehingga penyerapan anggaran sampai Desember 2020 adalah sebesar 59,04%.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD 68,05
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD mengalami refocusing dan rasionalisasi untuk penanggulangan pandemic covid-19. Semula anggaran tersebut sebesar Rp. 20.000.000 dan rasionalisasikan sebesar Rp. 5.789.700.
Dimana untuk kegiatan penyusunan Renstra dan Renja OPD ada kegiatan belanja jasa tenaga ahli narasumber, namun mengingat adanya pandemic covid-19, maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota mempunyai 3 indikator yaitu : (1) rasio realisasi taman kota,taman perumahan, dan lingkungan terhadap kebutuhan luas RTH Publik yang seharusnya tersedia, (2) rasio taman kota terpelihara terhadap taman kota yang ada, dan (3) persentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan,

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
1	Rasio realisasi taman kota, taman perumahan dan lingkungan terhadap kebutuhan luas RTH	10,49	$\frac{\text{Realisasi taman kota dan jalur hijau yang ada}}{\text{kebutuhan luas RTH Publik yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$ $= \frac{416.165,1 \text{ m}^2}{9.605.900 \text{ m}^2} \times 100\%$

No	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
	publik yang seharusnya tersedia		= 4,33%
2	Rasio taman kota terpeliharanya terhadap taman kota yang ada	76,98	$\frac{\text{Jumlah Taman Kota terpelihara}}{\text{Taman Kota yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{276.306,14}{416.165,1} \times 100\%$ $= 66,40$
3	Rasio panjang trotoar dan median jalan yang terpelihara terhadap panjang trotoar dan median jalan yang ada	0%	$\frac{\text{Panjang Trotoar dan median jalan yang terpelihara}}{\text{Panjang trotoar dan median jalan yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$
4	Presentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan	72	
5	Cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk	10	$\frac{\text{Jumlah Makam yang dimanfaatkan}}{\text{Ketersediaan Makam yang dapat dimanfaatkan}} \times 100\%$ $= \frac{48}{10.059} \times 100\%$ $= 0,47\%$

Berdasarkan luasan RTH di dalam Perda 3 Tahun 2011 tetang RTRW Kota Cilegon 2010-2030, luas RTH keseluruhan adalah 9.605.900 m². Sampai dengan Thn 2020 yang ditangani oleh Dinas Perkim adalah 416.704 m² sehingga persentase realisasi pengelolaan RTH Publik adalah sebesar 4,34%

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kab yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Realisasi pembangunan taman kota, taman perumahan dan lingkungan pada tahun 2019 sebesar 4,33%. Realisasi Indikator Kinerja ini didapat dari perhitungan Realisasi Taman Kota dan Jalur Hijau yang ada dibagi dengan Kebutuhan Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia. Target indikator sebesar 10,49 % tidak tercapai dikarenakan tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Taman Kota Cibeber tidak dapat dilaksanakan karena alokasi anggaran mengalami refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19.

Realisasi rasio taman kota terpeliharanya terhadap taman kota yang ada Pemeliharaan Taman kota baru mencapai 66,40 % dari target 76,98 %. Perhitungan realisasi Indikator Kinerja ini didapat dari perhitungan Jumlah Taman Kota terpelihara seluas 276.306,12 m² dibagi dengan Taman Kota yang ada seluas 416.165,1 m². Ketidaktercapaian target indikator ini karena kurangnya personil pemeliharaan taman yang mencakup pekerjaan penyiraman, penyiangan, pemupukan, pembersihan sampah dan pengelolaan taman. Pada saat ini ruang terbuka hijau public yang sudah dikelola secara maksimal hanya alun-alun kota Cilegon dikarenakan telah memiliki personal pemeliharaan taman dan personel pamdal (pengamanan dalam), sementara di lokasi ruang terbuka hijau public lainnya baru ada pengurus taman. Konsekuensi dari sebuah pembangunan ruang terbuka hijau public adalah pemeliharaannya, sehingga sangat dibutuhkan penambahan personel dan anggaran demi tercapainya target rasio taman kota terpelihara.

Rasio presentase ketersediaan prasarana kota terhadap kebutuhan didefinisikan sebagai landmark dan sculpture yang perlu dibangun untuk memperindah estetika kota. Perhitungan indikator diperoleh Jumlah ketersediaan Prasarana kota yang terbangun sebanyak 3 lokasi dibagi dengan Jumlah Prasarana Kota yang dibutuhkan sebanyak 7 lokasi. Pada tahun 2020, capaian indicator mencapai 42,86 % dari 72 %. Pembangunan prasarana arsitektur kota yang sudah terealisasi berada di 3 (tiga) lokasi yang dalam hal ini Landmark Simpang Tiga, Gerbang Kota Cilegon Timur dan Gerbang Kota Ciwandan. Ketidak tercapaian target ketersediaan prasarana kota salah satunya adalah masalah ketersediaan lahan.

Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota pada tahun anggaran 2020 memiliki 6 kegiatan. Secara umum dapat direalisasikan dengan baik, walaupun terdapat 1 kegiatan yang kurang memuaskan, yaitu kegiatan Pemeliharaan Peralatan Sarana Arsitektur Kota, dengan realisasi anggaran sebesar 63,94%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi BBM. Pada DPA direncanakan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi fluktuasi harga BBM.

Program Penataan Perumahan dan Permukiman memiliki lima indikator, yaitu : (1) prosentase luas penanganan kawasan kumuh, (2) persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak, (3) persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak, (4) persentase penduduk yang mendapat pelayanan air bersih dengan non perpipaan, dan (5) cakupan pemanfaatan tempat pemakaman umum oleh penduduk.

Realisasi indikator Prosentase luas penanganan kawasan kumuh pada tahun anggaran 2020 mencapai 0 % dari target 10,27 %. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini diperoleh dari Jumlah luas penanganan kawasan kumuh seluas 0 Ha dibagi jumlah luas kawasan kumuh yang ada seluas 89,54 Ha, karena dalam pelaksanaan pada APBD Kota Cilegon TA 2020 terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Penatan Kawasan Kumuh senilai 700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di Kec. Grogol dan Kec. Pulomerak, namun kegiatan ini mengalami refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga target yang telah ditentukan tidak tercapai.

Realisasi Indikator Kinerja Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik sebesar 90,9 %. Perhitungan ini diperoleh dari Jumlah jalan lingkungan dalam kondisi baik sepanjang 81.372 m dibagi dengan jalan lingkungan yang ada sepanjang 99.122 m, dengan demikian prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penanganan jalan lingkungan di TA 2020 berlokasi di Cibeber (Jl. KH. Mabrur), dari panjang total + 700m' hanya dapat ditangani 195,2 m'

Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ tidak rusak mencapai 69,75 dari target 74,36 %. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini diperoleh dari Jumlah drainase lingkungan dalam kondisi baik seluas 30.424 m² dibagi jumlah drainase lingkungan yang ada seluas 44.192,10 m². Realisasi ini belum memperhitungkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Program DPWKEK dan KOTAKU.

Realisasi indikator kinerja Prosentase penduduk yang mendapat pelayanan air bersih non perpipaan yaitu jumlah penduduk yang mendapat pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 720 jiwa dibagi jumlah total penduduk yang mendapat air bersih dari non perpipaan sehingga dapat diperoleh sebesar 0,19 % dari target 17,31 %. Perhitungan ini hanya memperhitungkan akses pelayanan air bersih dari non perpipaan, dan tidak memperhitungkan akses air bersih perpipaan.

Pemakaman umum adalah pemakaman umum yang dikelola Pemot Cilegon yang dimanfaatkan oleh penduduk Kota Cilegon. TPU di Cikeraai merupakan tanah Fasos yang diserahkan oleh pengembang perumahan dengan luas total lebih kurang 10,36 ha, dengan kapasitas 10.059 makam. Pada tahun 2020 ada 48 orang meninggal yang dimakam di TPU Cikeraai, jumlah orang yang dimakamkan di TPU Cikeraai ini relative kecil karena hampir disetiap kelurahan ada lokasi pemakaman umum dan masyarakat menggunakan pemakaman local tersebut untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal. Terdapat 38 lokasi pemakaman lokal yang tersebar di 43 kelurahan. Program Penataan Perumahan dan Permukiman pada tahun anggaran 2020 melaksanakan 8 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dari segi anggaran dapat direalisasikan dengan baik, kendati tidak dapat merealisasikan target indikator. Hal ini disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

3.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tabel 3.1.1.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		5.988.304.314	5.879.830.798	98,19		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Satpol PP)	95	100	105,26		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Satpol PP)	95	100	105,26		
	Tingkat disiplin aparatur (Satpol PP)	85	94,58	111,27		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) (Satpol PP)	95	96,38	101,45		
Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum						
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum		533.469.237	510.014.437	95,60		
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota	100	100	100,00		
	Rasio Personil Satpol PP per Jumlah 10.000 Penduduk	10	6,43	64,95		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengendalian Ketentraman Ketertiban Masyarakat Kota Cilegon		190.818.437	178.323.437	93,45		
	Terlaksananya Operasi Penertiban dan Pengamanan	12	12	100,00		
	Tersedianya Laporan Penertiban dan Pengamanan	12	12	100,00		
Pembinaan Kesemaptaan/Kesiapsiagaan Fisik dan Mental		25.190.000	25.190.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kesemaptaan/Kesiapsiagaan Fisik Mental Anggota Satpol PP	5	5	100,00		
Pengamanan Objek Vital dan Asset Daerah		254.200.000	243.241.000	95,69		
	Terlaksananya Pengamanan Objek Vital	12	12	100,00		
	Terlaksananya Pengamanan Aset (berwujud) Pada Aksi Demo / Huru Hara	12	12	100,00		
	Tersedianya Laporan Pengamanan Objek Vital dan Aset Daerah	12	12	100,00		
Patroli Rutin Keamanan Wilayah		63.260.800	63.260.000	100,00		
	Terlaksananya Operasional Patroli Rutin Keamanan Wilayah	12	12	100,00		
	Tersedianya Laporan patroli rutin keamanan wilayah	12	12	100,00		
Program Perlindungan Masyarakat		149.114.392	135.904.392	91,14		
	"Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota "	35	36,05	103,00		
	Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan anggota linmas Kota Cilegon	100	83,33	83,33		
Pembinaan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Potensi Satlinmas		450.000	-	0,00	Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada dihentikannya	Anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terselenggaranya Pelatihan /Bintek Penanganan Bencana bagi Anggota Satlinmas	-	-	0,00	pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, perkumpulan termasuk didalamnya kegiatan Pembinaan dan pelatihan yang seharusnya melibatkan banyak anggota Satlinmas didalam pelaksanaannya	125.815.000,- mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 125.365.000,-
	Terselenggaranya Pembinaan Satlinmas	-	-	0,00		
Mediasi Penyelesaian Masalah Trantibum dan Perlindungan Masyarakat pada Lingkungan RT		6.883.892	6.883.892	100,00		
	Terlaksananya Mediasi Masalah Trantib dan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	8	100,00		
Validasi Data Keanggotaan Satlinmas Tahun 2020		4.442.000	4.442.000	100,00		
	Terlaksananya Up Dating Data Keanggotaan dan Penugasan Satlinmas tahun 2020	43	43	100,00		
	Tersedianya Biodata Keanggotaan Satlinmas Tahun 2020	43	43	100,00		
	Tersedianya SK Penugasan Satlinmas tahun 2020	8	8	100,00		
Pelatihan Simulasi Pertolongan Pertama Korban Bencana dalam Rangka HUT Linmas		4.885.000	4.885.000	100,00	Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada dihentikannya pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, perkumpulan termasuk didalamnya kegiatan Peringatan Hari Jadi Satpol PP dan Satlinmas Tk Kota Cilegon yang seharusnya melibatkan banyak anggota Satlinmas dan peserta dari OPD lain didalam pelaksanaan kegiatannya	Anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp. 77.785.000,- mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 1.400.000,- dan pada saat Perubahan Anggaran Dialihkan sepenuhnya untuk pos kegiatan lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran diluar anggaran ATK yang telah terserap sebelumnya
	Terselenggaranya Pelatihan / Simulasi Atraksi Penanganan Korban Bencana oleh Satlinmas	-	-	0,00		
Bantuan Pemeliharaan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat Pengunjung Area Publik Tertentu		127.644.000	114.884.000	90,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pemeliharaan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat Pengunjung Area Publik Tertentu	10	10	100,00		
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Se-Kota Cilegon		4.809.500	4.809.500	100,00		
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Pamsung Pilkada dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas	8	8	100,00		
	Tersedianya laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tingkat kecamatan	8	8	100,00		
Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah		508.159.229	453.519.229	89,25		
	Cakupan penegakan peraturan daerah	100	100	100,00		
Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Hara		52.000.000	52.000.000	100,00		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Hara	20	20	100,00		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan lainnya		424.519.229	369.879.229	87,13		
	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang Undangan	48	48	100,00		
Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah		31.640.000	31.640.000	100,00		
	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah dan Perundang Undangan	60	60	100,00		
	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Implementasi Perda	12	12	100,00		

Pada program Dukungan Pelayanan Pemerintahan terdapat 4 (empat) indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral dengan target kinerja 95% dan realisasi kinerja sebesar 100% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 105,26%. Yang kedua Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target kinerja 95% dan realisasi kinerja sebesar 100% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 105,26%. Indikator selanjutnya Tingkat disiplin aparatur dengan target kinerja 85% dan realisasi kinerja sebesar 94,58% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 111,27%. Dan yang terakhir Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) dengan target kinerja 95% dan realisasi kinerja sebesar 96,38% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 101,45%.

Untuk program selanjutnya yaitu Program Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai indikator kinerja tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kota pada tahun 2020 dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 100% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 100%. Sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dimana dirumuskan dengan Jumlah Pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang K3 yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibandingkan dengan Jumlah Pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang K3 yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan. Dari data yang diperoleh bahwa pada kurun waktu tahun 2020 Jumlah Pelanggaran Perda Perda Nomor 5 Tahun 2003 yang dilaporkan dan/ atau dipantau sebanyak 71 kasus dan secara keseluruhan dari 71 kasus tersebut dapat diselesaikan atau ditertibkan. Sedangkan untuk indikator Rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk dengan target kinerja 10% dan realisasi sebesar 6,43% maka diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 64,95%. Capaian ini merupakan hasil dari perhitungan perbandingan jumlah seluruh personil Satpol PP Kota Cilegon dibandingkan dengan per 10.000 jumlah penduduk cilegon pada tahun 2020.

Untuk program perlindungan masyarakat mempunyai 2 (dua) indikator kinerja program yaitu Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten/Kota dan Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan anggota linmas Kota Cilegon. Untuk indikator pertama Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten/Kota dengan target kinerja 35% dan realisasi kinerja sebesar 36,05% maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 103%. Dengan jumlah Satlinmas Se-Kota Cilegon sebanyak 1597 personil dibandingkan dengan jumlah per 10.000 penduduk sebesar 44,3 maka diperoleh nilai realisasi sebesar 36,05% dan capaian kinerja 103 %. Sedangkan untuk indikator kedua yaitu Cakupan peningkatan kapasitas dan pembinaan anggota linmas Kota Cilegon dengan target kinerja 100 dan realisasi kinerja sebesar 83,33 maka diperoleh nilai persentase capaian kinerja sebesar 83,33%

Indikator Cakupan penegakan peraturan daerah pada tahun 2020 capaiannya sebesar 100%. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan terkait penegakan Perda yang telah dilaksanakan sepanjang kurun waktu tahun 2020. Sesuai dengan SPM Satpol PP yang

salah satunya adalah cakupan penegakan peraturan daerah dimana dirumuskan dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibandingkan dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau ditahun bersangkutan. Pada tahun 2020 dari total 181 kasus pelanggaran terhadap Perda yang teridentifikasi sebanyak 181 kasus tersebut dapat ditertibkan dan diselesaikan, sehingga dapat diperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Sebagian besar kegiatan yang terdapat dalam program Dukungan Pelayanan Pemerintahan nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini didorong dengan semakin terfasilitasinya dari segi sarana dan prasarana maupun dukungan anggaran pada kegiatan yang terkait. Untuk beberapa kegiatan capaian kinerjanya tidak sesuai target dikarenakan kondisi real yang ada di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dapat terserapnya baik anggaran maupun kinerjanya. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meskipun nilai capaian kinerja kegiatannya 100 % (Target : 3 jenis, Realisasi : 3 Jenis) namun dari segi realisasi anggaran capaiannya sebesar 74,49%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja listrik yang kurang maksimal karena disesuaikan dengan pemakaian sebenarnya dan adanya pembatasan pemakaian dikarenakan daya listrik yang kurang besar (belum mencukupi untuk pasokan 3 lantai).

Dari 5 kegiatan yang masuk dalam Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagian besar capaian kinerjanya diatas 90%. Dengan kekuatan pleton anggota sebanyak 4 (empat) pleton menambah tingkat kuantitas serta efektivitas kegiatan patroli rutin di lapangan. Dukungan anggaran yang cukup juga menjadi faktor pendukung tercapainya target kinerja Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Namun untuk kegiatan Pengamanan dan Pengawasan Pejabat / Tamu VVIP nilai capaian kinerja kegiatan dan nilai realisasi anggarannya sebesar 0% dikarenakan tidak adanya kunjungan pejabat /Tamu VVIP yang memerlukan pengawasan serta adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan sehingga pada akhirnya anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp. 16.270.000,- dialihkan sepenuhnya ke pos kegiatan lain yang lebih memerlukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran TA 2020.

Dari 6 (enam) kegiatan yang masuk dalam program Program Perlindungan Masyarakat hampir sebagian besar capaian kinerjanya diatas 90%. Namun untuk kegiatan Pembinaan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Potensi Satlinmas baik capaian kinerja kegiatan maupun realisasi anggaran nilainya sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak dihentikannya pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, perkumpulan termasuk didalamnya kegiatan Pembinaan dan pelatihan yang seharusnya melibatkan banyak anggota Satlinmas didalam pelaksanaannya. Dampak kebijakan rasionalisasi, anggaran kegiatan tersebut yang semula sebesar Rp. 125.815.000,- mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 125.365.000,-. Selain itu pada kegiatan Pelatihan Simulasi Pertolongan Pertama Korban Bencana dalam Rangka HUT Linmas nilai capaian kinerjanya adalah sebesar 0% meskipun nilai realisasi anggarannya sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada dihentikannya pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, perkumpulan termasuk didalamnya kegiatan Peringatan Hari Jadi Satpol PP dan Satlinmas Tk Kota Cilegon yang seharusnya melibatkan banyak

anggota Satlinmas dan peserta dari OPD lain didalam pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya Anggaran kegiatan yang semula sebesar Rp. 77.785.000,- mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 1.400.000,- dan pada saat Perubahan Anggaran dialihkan sepenuhnya untuk kegiatan lain yang lebih membutuhkan penambahan anggaran diluar anggaran ATK yang telah terserap sebelumnya.

Dari empat kegiatan yang terdapat dalam Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah, tiga diantaranya nilai capaian kinerjanya diatas 80% dan satu kegiatan yang nilai capaian kinerja serta realisasi anggarannya 0% yaitu kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Perda dan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak dihentikannya pelaksanaan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, perkumpulan termasuk didalamnya kegiatan Sosialisasi yang seharusnya melibatkan banyak peserta dari masyarakat, pelaku usaha dan OPD lain didalam pelaksanaannya. Sehingga mendapat dampak Rasionalisasi Anggaran yang mengakibatkan kegiatan yang semula anggarannya sebesar Rp. 52.000.000,- mengalami rasionalisasi sepenuhnya sebesar Rp. 52.000.000,-

B. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Tabel 3.1.1.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran						
Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran		526.753.000,00	494.251.500,00	93,83%		
	Persentase Kapasitas Penanganan Kebakaran Pada WMK	49%	35,96%	73,87%		
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	33%	37,50%	113,64%		
	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 pada WMK	42%	56,25%	133,93%		
	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	40%	38,71%	96,77%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung		53.146.000,00	53.146.000,00	100%		
	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan alat proteksi kebakaran bangunan gedung	100 objek	100 objek	100%		
Pengadaan Peralatan Damkar		146.982.000,00	146.982.000,00	100%		
	Terlaksananya pengadaan peralatan damkar	4 jenis	4 jenis	100%		
Pemasangan Hidrant Kota		120.000.000,00	114.008.000,00	95,01%		
	Terlaksananya pemasangan hidrant kota (1 titik di Jl. KH TB Ismail, 2 titik di JLS, 1 titik di lingk. Sumur Menjangan)	4 titik	4 titik	100%		
Pemeliharaan Peralatan Damkar dan Rescue		63.500.000,00	63.075.500,00	99,33%		
	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan rescue	3 jenis	3 jenis	100%		
Pengadaan Peralatan Rescue		143.125.000,00	117.040.000,00	81,77 %		
	Terlaksananya pengadaan peralatan damkar	9 jenis	9 jenis	100%		
Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran						
Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan		909,647,000.00	786,037,760.00	86.41%		
	Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman	54%	85%	157,51%		
	Tingkat waktu tanggap (respon time) daerah layanan WMK	80%	82.14	102,68%		
	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	50%	38,71	77,42%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengamanan Hari Raya/Kegiatan Keagamaan/Olahraga, Hari Jadi Kota Cilegon dan Hari Besar Nasional		557,050,000.00	471,720,000.00	84,68%		
	Tersedianya pengamanan hari besar agama dan hari besar nasional	71 orang	71 orang	100%		
Siaga Tim Penanggulangan Kebakaran		322.680.000,00	284.400.760,00	88,14%		
	Terlaksananya makan dan minum 1 x 24 jam	58 orang	58 orang	100%		
Drill Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran		29.917.000,00	29.917.000,00	100%		
	Terlaksananya drill penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	30 orang	30 orang	100%		
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		4.325.832.933	3.974.284.369	91,87%		
	Tingkat disiplin aparatur	90%	97,11%	107,90%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	90%	86,07%	95,64%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90%	72,71%	80,79%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	90%	100	111,11%		

Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran memiliki 4 (empat) indikator. Indikator program pertama, yaitu Persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK yang dihitung dengan cara membandingkan (jumlah bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter) yang ada dengan jumlah kebutuhan (jumlah bangunan pemadam, personil dan mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter) yang ideal pada WMK. Realisasi Persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK pada tahun 2020 sebesar 35,96% dari target sebesar 49% dengan capaian kinerja sebesar 73,79%. Pada indikator ini realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan karena masih kurangnya jumlah kebutuhan sektor pemadam kebakaran dan personil, sesuai dengan luas minimal layanan, terutama di lokasi Kecamatan Cilegon, Purwakarta, Citangkil, dan Pulomerak. Upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi target kinerja indikator persentase kapasitas penanganan kebakaran pada WMK yaitu dengan membangun sektor pemadam kebakaran secara merata pada level Kecamatan dan daerah-daerah rawan kebakaran.

Indikator program kedua yaitu Cakupan pelayanan bencana kebakaran dihitung dengan cara membandingkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang terbentuk dengan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang dibutuhkan. WMK yang terbentuk sebanyak 3, sedangkan jumlah WMK yang dibutuhkan 8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran terealisasi sebesar 37,50% dari target sebesar 33%, sehingga prosentase capaian indikator ini mencapai 113,64%.

Indikator program ketiga yaitu Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 pada WMK yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 pada WMK dengan jumlah total kebutuhan mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 (2 unit per WMK). Sampai dengan tahun 2020 jumlah mobil pemadam kebakaran yang tersedia sebanyak 9 unit, sedangkan jumlah WMK yang dibutuhkan sebanyak 8 WMK, dan dengan kebutuhan setiap WMK minimal sebanyak 2 unit mobil pemadam. Sehingga realisasi capaian ini mencapai 56,25%. Penetapan target sesuai dengan revisi renstra sebesar 50%.

Indikator program keempat adalah Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah satgas yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dengan jumlah satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat sesuai dengan standar berjumlah 36 orang, sedangkan jumlah satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 93 orang, sehingga capaian indikator ini tercapai sebesar 38,71% dari target 40%. Realisasi capaian indikator program ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan, karena adanya kegiatan yang mendukung indikator program ini dihilangkan akibat *refocussing* anggaran untuk percepatan penanganan *covid-19*. Upaya untuk memenuhi target kinerja indikator ini adalah melalui peningkatan kapasitas keandalan anggota pemadam kebakaran.

Pada Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator program pertama, Persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman dihitung dengan cara membandingkan jumlah kasus kebakaran di permukiman yang tertangani dalam waktu tanggap (sejak diterimanya informasi / laporan kebakaran dan unit sampai ke lokasi dan siap memberikan layanan) kurang dari atau sama dengan 15 menit dengan jumlah keseluruhan kasus kebakaran di permukiman dikali 100%. Pada tahun 2020 dari 20 kejadian kebakaran di permukiman, ada sebanyak 17 kejadian yang dapat tertangani dalam waktu tanggap dan ada 3 kejadian yang tertangani lebih dari waktu tanggap. Sehingga realisasi indikator ini tercapai 85,00% dari tahun 2020 sebesar 54%. Oleh karena itu, capaian indikator persentase capaian waktu dalam penanggulangan kebakaran di permukiman pada tahun 2020 sebesar 157,51%.

Indikator program kedua, yaitu Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan WMK yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran dalam wilayah Manajemen kebakaran (WMK). Pada tahun 2020, jumlah kasus kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran ada 56 kejadian, sedangkan yang tertangani dalam waktu tanggap 46 kejadian. Realisasi indikator program ini tercapai sebesar 82,14% dari target 80%, sehingga capaiannya sebesar 102,68%.

Indikator program ketiga, yaitu Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah satgas yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dengan jumlah satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sampai dengan tahun 2020 jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang telah mengikuti diklat dan memiliki sertifikat sesuai dengan standar berjumlah 36 orang, sedangkan jumlah satgas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 93 orang. Realisasi Indikator program ini tercapai 38,71% dari target 50%. Pada program ini realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan, karena adanya kegiatan untuk mendukung indikator program ini dihilangkan akibat *refocussing* anggaran. Upaya untuk memenuhi target kinerja indikator ini adalah dengan peningkatan kapasitas keandalan anggota pemadam kebakaran.

Terdapat 4 indikator program pada program dukungan pelayanan pemerintahan yaitu Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral, Presentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik, Tingkat Disiplin Aparatur dan Presentase Kesesuaian Cash Budget semua indikator telah berjalan dengan baik tidak ada kendala berarti dimana capaian indikator diatas 80%.

Anggaran pada Program **Dukungan Pelayanan Pemerintahan** sebesar Rp. 4.325.832.933,- dengan realisasi sebesar Rp 3.974.284.369 atau realisasi sebesar 91,87%. Ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80% yaitu :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik karena ada sisa penyerapan anggaran listrik yang sesuai dengan tagihan listrik
- Penyediaan jasa promosi dan propaganda karena adanya efisiensi.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah karena adanya pandemic covid-19 tidak terserap SPPD luar daerah
- Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional karena adanya efisiensi.
- Penyusunan dokumen penganggaran perangkat daerah karena adanya efisiensi.

3.1.1.6 Sosial

A. DINAS SOSIAL DAN UPTD DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tabel 3.1.1.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan						
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	86%	92.13%	107.13%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	98.8%	100%	101.21%		
	Tingkat disiplin dan kinerja aparatur	92%	94.18%	102.37%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	93%	64.5%	69.35%	Adanya kebijakan refocusing yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon, sehingga pelaksanaan DPA tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	
Program Pemberdayaan Sosial						
	Persentase pemberdayaan PSKS	7.9%	9,25%	118,55%		
	Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif	1.1%	0.60%	54.55%	Karena pandemi Covid19, kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif difokuskan untuk pemberdayaan KUBE yang telah dibentuk	
	Presentase penerima bantuan pangan Non tunai	100%	97.09%	97.09%		
	Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun	17.1%	16.58%	96.96%		
Pemberdayaan karang taruna		5,687,000	5,687,000	100.00%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 140.142.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna	30 orang	-	0.00		
Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU		35,000,000	1,257,000	3.59	Pelaksanaan Kegiatan terkendala, dalam rangka mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19	

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Pemberdayaan Keluarga Plasma Melalui FCU	50 orang	-	0.00		
Pemberdayaan TKSK		52,224,000	52,224,000	100.00%		
	Jumlah Pemberdayaan TKSK	8 orang	8 orang	100.00%		
Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		67,128,000	67,128,000	100.00%		
	Pemberdayaan LK3	1 lembaga	1 lembaga	100.00%		
Pemberdayaan Organisasi Sosial		1,450,000	1,450,000	100.00%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 50.000.000	
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengelola LKS	50 orang	-	0.00		
Pemberdayaan Ekonomi Produktif		600,000	-	0.00	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 170.000.000	
	- Terlaksananya sosialisasi Program Ekonomi produktif kepada calon penerima UEP	0	-	0.00		
	- Terlaksananya bimbingan motivasi kepada calon penerima uep	0	-	0.00		
	-Terlaksananya sosialisasi dan bimtek pendamping UEP	0	-	0.00		
Peningkatan Kesetiakawanan Sosial		2,125,000	2,125,000	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kesetiakawanan Sosial	0	-	0.00		
Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan		51,050,000	49,089,500	96.16%		
	Jumlah Pembinaan bagi Veteran dan Keluarga Veteran	10 orang	10 orang	100.00%		
Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		150,650,000	150,187,000	99.69%		
	Terlaksananya Bimtek KUBE E warong	16 kelompok	23 kelompok	143.75%	Ada penambahan/perluasan e warong sebagai agen baru	
	Terlaksananya Monev BPNT	1 orang	1 orang	100.00%		

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya pengelola KUBE E Warong tentang pengelolaan dan pengembangan usaha	16 kelompok	21 kelompok	131.25%		
	Meningkatnya pelayanan penyaluran dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi BPNT	1 orang	1 orang	100.00%		
Pendampingan rehabilitasi Sosial RTLH		38,115,000	33,815,000	88.72%		
	Terlaksananya pendampingan rehabilitasi sosial RTLH	80 RTS	74 RTS	92.50%	6 rumah tidak lolos verifikasi	
Pemberdayaan KUBE (DID Tambahan)		200,000,000	167,439,000	83.72%		
	Jumlah anggota KUBE yang dilatih	162 orang	162 orang	100.00%		
Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial						
	Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)	2,7%	1,59%	58,89%	adanya dampak pandemi covid-19. Anggaran untuk Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas dirasionalkan untuk refocussing penanganan covid, adapun anggaran sebelumnya sebesar Rp 70.301.200	
	Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti	17.8%	2.81%	15.79%	adanya dampak pandemi covid-19	penanganan lebih ke penanganan yang bersifat Standar Pelayanan Minimal
	Presentase lanjut usia terlanter yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	13.3%	9.42%	70.83%		
	Presentase gepeng yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti	100%	100.00%	100.00%		
Penanganan bagi ODGJ		329,795,000	321,521,000	97.49%		
	Terlaksananya Penanganan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	64 orang	64 orang	100.00%		
Bantuan Sembako dan Rehabilitasi Sosial bagi Lansia		200,320,000	126,338,500	63.07%	Adanya keterbatasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga protokol kesehatan covid19	
	Terlaksananya pemberian sembako bagi lanjut usia	180 orang	180 orang	100.00%		

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		160 orang	16 orang	10.00%	Karena Pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat dan untuk memutus penularan virus covid-19, sehingga kegiatan hanya dilaksanakan melalui pendamping untuk melakukan penjangkauan lanjut usia terlanter ke rumah lansia tersebut	
Penanganan anjal, Gepeng dan WPS		117,245,539	108,138,539	92.23%		
	Laksanakan Kegiatan pembinaan dan Penanganan WPS	20 orang	20 orang	100.00%		
	Laksanakan Kegiatan pembinaan dan Penanganan Gepeng	60 orang	60 orang	100.00%		
	Laksanakan Kegiatan pembinaan dan Penanganan Anjal	80 orang	80 orang	100.00%		
Pengelolaan Pondok Sosial		441,587,808	360,755,408	81.70%		
	Laksanakan Operasional Pondok Sosial	12 keg	12 keg	100.00%		
Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS		4,500,000	4,500,000	100.00%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 146.549.100	Untuk tahun ke depan menganggarkan kembali
	Laksanakan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	0	0	0.00		
Rehabilitasi Sosial Anak		82,701,241	75,640,000	91.46%		
	Laksanakan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak	21 orang	21 orang	100.00%		
	Laksanakan Peningkatan Penguatan Keluarga Anak terlanter	70 orang	70 orang	100.00%		
	Laksanakan Peningkatan Penguatan Keluarga Anak Jalanan	70 orang	70 orang	100.00%		
	Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Tentang Pengasuhan Anak	145 orang	145 orang	100.00%		
Program Perlindungan Jaminan Sosial						

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	100.00%	100.00%		
	Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	77%	82.39%	107.00%		
	Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani	100%	100.00%	100.00%		
Buffer Stock		365,439,391	300,790,700	82.31%	Efisiensi harga barang	Pelaksanaan pekerjaan dalam pengadaan barang dalam 1 tahun, untuk menjamin kualitas dan masa kadaluarsa, pengambilan barang sesuai dengan permintaan/kebutuhan
	Terlaksananya penyediaan Buffer Stock	1700 paket	1700 paket	100.00%		
Pemantapan KSB		4,900,000	2,140,000	43.67%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 46.000.000	
	Terlaksananya kegiatan pemantapan KSB	30 orang	-	0.00	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, dalam rangka mematuhi protokol covid19	
Pelatihan Tagana		105,950,400	104,950,400	99.06%		
	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tagana	85%	85 %	100.00%		
Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan		91,904,000	30,349,000	33.02%	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah orang terlantar dalam perjalanan yang dilayani	
	Terlaksananya Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan	200 orang	67 orang	33.50%		
Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit		104,170,000	26,595,861	25.53%	Di sesuaikan dengan kebutuhan jumlah orang terlantar sakit yang dilayani	
	Terlaksananya Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit	15 orang	5 orang	33.33%		

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)		309,418,000	288,106,600	93.11%	Karena adanya Covid - 19	
	Telaksannya Pendampingan Perogram Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)	2857 KK	1760 KK	61.60%	Pencairan disesuaikan hasil Verifikasi, Sebagian KK telah mendapatkan bantuan lain yang se jenis, (seperti PKH, BLT dan BST)	
Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)		108,268,200	87,823,200	81.12%		
	Terlaksannya Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	4711 KK	5384 KK	107.88%		
Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial		19.805.000,-				
	Terlaksannya Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial	450 KK	0	0.00	- E hibah Bansos belum mengakomodir Bansos Tidak terencana	
Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda		24,898,000	4,303,000	17.28%	Pertemuan / rapat koordinasi tidak dilaksanakan dalam rangka mematuhi protokol covid19	
	Terlaksannya Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda	12 Bulan	2 bulan	16,67%		
Pelayanan Rekomendasi Penerimaan Bantuan Iuran (PBI)		12,800,000	10,866,000	84.89%		
	Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	200 KK	612 KK	306.00%	Penonaktifan peserta PBI bantuan Provinsi dan Pusat menyebabkan peningkatan data usulan dari masyarakat untuk dapat didaftarkan kembali ke PBI APBD kota Cilegon	
Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar		63,076,000	29,211,000	46.31%		
	Terlaksananya Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar	15 orang	9 orang	60.00%	Pelayanan disesuaikan dengan jumlah jenazah terlantar yang membutuhkan pelayanan	

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Pemberdayaan Sosial						
Penyusunan Data sektoral Bidang Kesejahteraan Sosial		445,598,667	282,757,000	63.46		
	Terlaksananya penyusunan data sektoral bidang kesejahteraan sosial	3 dokumen	3 dokumen	100.00		

A. Pelayanan Pemerintahan terdapatempat indikator program yaitu :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral, indikator ini mengukur tingkat ketersediaan data dan informasi sektoral pada Dinas Sosial. Pencapaian indikator ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan 98,8%, hasil ini diperoleh dari jumlah pemenuhan data dan informasi terhadap jumlah data dan informasi yang harus ada.
Capaian indikator ini terhadap target akhir RPJM sudah memenuhi target, dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja tahun 2020 sebesar 101.21%.
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, merupakan indikator yang mengukur Jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik terhadap seluruh sarana dan prasarana perkantoran, pencapaian kinerja indikator ini 92.13%. dari target yang ditetapkan 86% Pencapaian ini dipengaruhi masih banyak sarana dan sarana dalam kondisi rusak berat dan sedang proses penghapusan sebanyak 202 unit dari jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial sebesar 1369 aset.

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik = $\frac{(1346)}{1461} \times 100 \%$

1461

= 92,13 %

3. Tingkat disiplin aparatur, merupakan indikator yang mengukur tingkat kedisiplinan pegawai. Tingkat kedisiplinan pegawai Dinas Sosial tahun 2020 mencapai 94,18 % dari target 92%. Pencapaian indikator ini sebesar 102,37%, keberhasilan pencapaian ini didukung oleh adanya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah di Lingkungan Kota Cilegon. Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang sanksi sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai di lingkungan Kota Cilegon serta pembinaan pegawai yang dilakukan Dinas

Sosial Kota Cilegon.

4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), indikator ini menunjukkan tingkat realisasi keuangan disesuaikan dengan perencanaan penganggaran pertriwulan. Pencapaian indikator ini sebesar 64.5% dari target yang di tetapkan 93% dilihat dari tabel diatas bahwa capaian kinerja tahun 2020 sebesar 69.35%. Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah belum maksimalnya pengendalian internal baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terkait refocusing dampak pandemic Covid-19.

B. Program Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial merupakan salah satu dari empat intervensi Kesejahteraan Sosial yang diarahkan untuk merubah masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial dan ketidakberdayaan, agar mereka mampu mengatasi dan memenuhi kebutuhan dasarnya dan secara bertahap meningkatkan kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan dibidang pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti Karang Taruna dan Organisasi Sosial. Dalam rangka mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial perlu ada peran aktif masyarakat, indikator kinerja ini mengukur peran aktif masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

1. Persentase pemberdayaan PSKS

Persentase pemberdayaan PSKS, indikator ini mengukur tingkat pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Capaian indikator ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 hal ini dikarenakan peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan Potensi kesejahteraan sosial yang merupakan peranan penting dalam penanganan PMKS di masyarakat. Untuk indikator ini pada tahun 2020 sudah mencapai target akhir RPJM.

$$\begin{aligned} \text{Persentase pemberdayaan PSKS} &= \frac{\text{jumlah PSKS yang dibina}}{\text{jumlah PSKS seluruhnya}} \times 100\% \\ &= (296/3201) \times 100 = 9,25\% \\ \text{Capaian kinerja tahun 2020} &= 9,25/7.9 \times 100 \% = 118,55 \% \end{aligned}$$

Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah:

- Masih banyak pekerja sosial/relawan sosial yang belum tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dasar dan lanjutan.
- Belum adanya regulasi mengenai diklat-diklat keterampilan bagi pekerja sosial/relawan sosial

Langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi:

- Mengusulkan diklat relawan sosial ke Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial
- Membuat usulan regulasi mengenai diklat-diklat khusus untuk relawan sosial.

2. **Persentase (%) fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif**

Merupakan indikator untuk mengukur jumlah fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif. realisasi indikator ini sebesar 0,6 % dibawah dari target yang telah ditetapkan 1,1% dengan capaian kinerja 54,55%, pencapaian ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 203,70%, Faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian indikator ini adalah adanya pandemic Covid-19. Adapun kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Produktif difokuskan untuk kegiatan bimbingan lanjutan dan pembinaan bagi KUBE yang sudah terbentuk atau yang ada.

$$\begin{aligned} \text{Persentase (\%)} \text{ FM yang menerima pem. ekonomi produktif} &= \frac{\text{Jumlah FM yg menerima pem. ekonomi produktif}}{\text{Jumlah FM yg seharusnya menerima pem. Ekonomi produktif}} \times 100 \% \\ &= (54/8926) \times 100\% = 0,60\% \end{aligned}$$

Capaian indikator ini dengan target akhir RPJM tahun 2021 dengan target 7,74%, sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 9,0% dengan rincian berikut :

TAHUN	KUBE (orang)	UEP (orang)	JUMLAH	CAPAIAN (%)
2017	300	200	500	5.6
2018		50	50	0.56
2019	200		200	2.24
2020	54			0.6
JUMLAH				9.00

Hambatan/kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya monitoring dan evaluasi bagi penerima bantuan ekonomi produktif Langkah-langkah antisipasif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

- Inventarisasi KUBE yang sudah terbentuk dan melakukan pemetaan serta pengelompokan status KUBE
- meningkatkan pendampingan bagi penerima KUBE.
- Peningkatan pembinaan lanjutan bagi masyarakat yang sudah menerima KUBE.

3. Presentase penerima bantuan pangan Non tunai/ Bantuan Sembako

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank Mandiri. Jumlah realisasi BPNT sebanyak 12.613 KK dari jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.991 KK dengan capaian kinerja 97,09% dari target yang ditetapkan 100% hal ini disebabkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu, data ganda, meninggal dan pindah.

$$\begin{aligned}\% \text{penerima bantuan pangan Non} &= \frac{\text{Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai} \times 100 \%}{\text{jumlah masyarakat miskin}} \\ &= (12.613/12.991) \times 100\% \\ &= 97,09 \%\end{aligned}$$

Pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 97,09% lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 96,41% hal ini adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak Bank Mandiri, Dinas Sosial, TKSK, Kortek BPNT dan KUBE e-Warong. Hambatan/kendala yang dihadapi pergantian data yang tidak bisa langsung dilakukan, sehingga serapan penyaluran tidak bisa 100%. Langkah-langkah antisipasif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah Koordinasi dengan pihak Kementerian Sosial terkait data yang digunakan.

4. Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Pada tahun 2020 Keberhasilan indikator ini mencapai 96,96% atau sebanyak 97 Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun melalui Baznas 10 rumah, DPW kel 13 dan dari APBD 74 rumah.

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} \text{ rumah tidak layak huni yang dibangun} &= \frac{\text{Jumlah RTLH yang dibangun}}{\text{jumlah RTLH yang seharusnya mendapat bantuan}} \times 100 \% \\ &= (97/585) \times 100\% \\ &= 16,58 \%\end{aligned}$$

Bantuan RTLH tahun 2020

TAHUN	DPW KEL	Baznas	CCSR	Dinas Sosial	JUMLAH	CAPAIAN
2017				150	150	25.64%
2018	56	10	10	57	133	22.43%
2019	72	12	18		102	17.43%
2020	13	10		74	97	16.58%
Jumlah	141	32	28	281	480	82.08%

Hambatan/kendala yang dihadapi

- Proposal yang masuk dalam e-Bansos tidak lolos dalam verifikasi tahap selanjutnya karena adanya komponen yang kurang dalam proposal tersebut.
- Kelengkapan administrasi kepemilikan tanah.

Langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah :

- Pendampingan dalam pembuatan proposal dan pendampingan dalam pertanggungjawaban dana bantuan.

C. Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial bisa diartikan sebagai pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

1. Indikator Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga

dan masyarakat)

Capaian indikator pada tahun 2020 sebesar 1.59% dari rencana yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 2.7% Target dari indikator ini pada Tahun 2020 tidak tercapai karena mengalami refocusing dampak Covid-19. Namun, pada tahun 2020 terdapat bantuan provinsi untuk penyandang disabilitas sebanyak 16 orang.

Hambatan/kendala yang dihadapi adalah jenis Penyandang disabilitas berbeda-beda sehingga harus dilakukan pemetaan potensi dan jenis penyandang disabilitas sehingga pembinaan tepat sasaran.

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti	$\frac{16}{1007} \times 100 \%$
	$= 1,59 \%$

Langkah-langkah antisipasif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah tersedia data sesuai dengan jenis kecacatan.

2. Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti

Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti melebihi dari target yang ditentukan, keberhasilan ini dicapai karena adanya program yang bersumber APBD Kota dan APBD Provinsi, dari target RPJMD sebesar 17.8% dapat direalisasikan 2.81% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 15.79 %

% anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti	$= \frac{276}{9805} \times 100 \%$
Capaian kinerja tahun 2020	$= 2,81/17.8 \times 100 \% = 15,79 \%$

Capaian ini belum memenuhi target dikarenakan masih banyaknya anak-anak yang belum terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti yang perlu penanganan serta fokus pembinaan atau pendampingan bukan hanya kepada anak akan tetapi kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang membutuhkan penanganan rehabilitasi diluar panti.

3. Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti.

Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti, indikator ini mengukur jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti terhadap jumlah lanjut usia terlantar. Pencapaian kinerja tahun 2020 dari target RPJMD sebesar 13.3% dapat direalisasikan 9.42% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 70.83 %, Capaian indikator program ini dipengaruhi oleh dukungan program-program yang bersumber dari APBN dan Provinsi mengalami refocusing anggaran akibat dampak Covid-19, Rincian sebagai berikut :

NO	SUMBER	JUMLAH
1	APBD	196 orang
2	APBD Provinsi	299 orang
Jumlah		495 orang

$$\begin{aligned}
 \% \text{ LU terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti} &= \frac{495}{5238} \times 100 \% \\
 &= 9,42 \% \\
 \text{Capaian kinerja tahun 2019} &= 9,42 / 13.3 \times 100\% \\
 &= 70,83\%
 \end{aligned}$$

Adapun langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah memferifikasi dan validasi data yang ada oleh pendamping khusus Lanjut Usia Terlantar.

4. Presentase gepeng yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti

Pencapain kinerja melalui Dinas Sosial dalam mentertibkan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Cilegon telah di lakukan dalam

upaya memberikan rehabilitasi kepada PMKS Indikator Pada Presentase Presentase gepeng yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti dapat direalisasikan 100 % adapun sasaran gepeng yang mendapatkan pelayanan sebanyak 60 orang.

D. Program Perlindungan Jaminan Sosial

1. Indikator Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar

Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya terpenuhi kebutuhan dasar. Pada indikator Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar pencapaian kinerja 100 % dari jumlah korban bencana sebanyak 5.286 jiwa.

$$\% \text{ korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar} = \frac{5286}{5826} \times 100 \% = 100 \%$$

kebutuhan selama masa tanggap darurat, tersedianya Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih, koordinasi yang baik dengan instansi terkait terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta adanya Kampung Siaga Bencana di 3 Lokasi.

Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam rangka penanganan korban bencana yaitu masih minimnya sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana terutama untuk ketersediaan sarana dapur umum apabila terjadi bencana di beberapa titik yang berjauhan. Langkah antisipatif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan ini adalah membuat usulan untuk menambah sarana dan prasarana dapur umum.

2. Indikator Presentase Fakir miskin mendapatkan bantuan tunai bersyarat

Keberhasilan dalam capaian indikator ini di dukung dengan program-program yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Adapun pada tahun 2020 jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat sebanyak 8.555 jiwa terhadap jumlah keseluruhan fakir miskin sebanyak 10.383 jiwa.

Indikator Pada Presentase Fakir miskin, dari target 77% dapat direalisasikan 82,39% sehingga Pencapaian indikator ini sebesar 107 % yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. Adapun rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	APBN	5.384

NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH
2	Jamsosratu	APBD I	1.411
3	Jaminan Sosial Cilegon Mandiri	APBD Kota	1.760
	JUMLAH		8.555

$$\begin{aligned} \text{Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat} &= \frac{8.555}{10.383} \times 100 \% \\ &= 82,39 \% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian kinerja tahun 2020} = (82,39/77) \times 100 = 107,01 \%$$

Keberhasilan indikator ini didukung dengan adanya sinergi program Pusat, provinsi dan Kota Cilegon serta koordinasi antara pendamping PKH, Jams Bosratu dan JSCM, serta adanya perluasan cakupan penerima manfaat PKH.

3. Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani

keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik pelayanan orang terlantar dalam perjalanan, pelayanan pemakaman jenazah terlantar maupun pelayanan orang terlantar sakit. Adapun rincian jumlah layanan tersebut sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah
1	pelayanan orang terlantar dalam perjalanan	67 orang
2	pelayanan pemakaman jenazah terlantar	9 orang
3	pelayanan orang terlantar sakit	5 orang
	Jumlah	81 orang

Perhitungan Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani didapat dari Jumlah orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani dibagi jumlah pengaduan orang terlantar dalam perjalanan, jenazah dikali 100 %.

$$\text{Realisasi kinerja} = (81/81) \times 100\% = 100\%$$

Keberhasilan pencapaian kinerja ini karena adanya kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan PT KAI serta didukung pula oleh Baznas Kota Cilegon terutama dalam biaya penanganan orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar sakit diluar anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Cilegon.

Hambatan/ kendala yang dihadapi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait terutama RSUD untuk pelayanan orang terlantar sakit dan Kepolisian untuk surat keterangan orang terlantar dalam perjalanan.

Langkah-langkah antisipatif dalam rangka mengatasi permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah membuat kesepakatan bersama antara Dinas Sosial, Rumah Sakit yang ada di Kota Cilegon dan Kepolisian.

PERMASALAHAN

1. Belum optimal penanganan PMKS secara komprehensif, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas sektoral maupun tingkat Provinsi dalam penanganan orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar sakit.
4. Masih kurangnya jumlah pekerja sosial dan penyuluh sosial yang tersertifikasi dalam pendampingan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

SOLUSI :

1. Pemantapan kelembagaan Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dan Sistem layanan rujukan Terpadu
2. Membuat mekanisme pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial agar tersedia data yang akurat dan update.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait/Dinas Sosial Provinsi mengenai penanganan orang terlantar dalam perjalanan dan orang terlantar sakit.
4. Usulan rekrutmen tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial tersertifikasi baik yang berstatus Aparatur Sipil negara atau Pengawai Tidak Tetap.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

3.1.2.1 Tenaga Kerja

A. DINAS TENAGA KERJA DAN UPTD LATIHAN KERJA

Tabel 3.1.2.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Tenaga Kerja

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.629.812.306,00	2.446.856.829,00	93,04%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	95,00	77,7	81,8%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	95,00	70,67	74,39	Terdapat 2 (dua) kendaraan roda 4 yang tidak dipakai dikarenakan 1 unit rusak berat, dan 1 unit dalam proses penghapusan.	Penghapusan kendaraan yang rusak berat dan pengadaan kendaraan dinas yang baru.
	Tingkat disiplin aparatur	95,00	95%	100,00%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	85,00	71,30%	83,88%		
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan					- Dinas Tenaga Kerja belum memiliki aplikasi berbasis android dan website yaitu Sistem Bursa Kerja (Sibuker) untuk menjadi pusat informasi lowongan kerja dan juga menjadi system / aplikasi yang mempertemukan antara perusahaan dengan pencari kerja.	- Kami sudah mengajukan ke Dinas Kominfo dan Bappeda agar Disnaker memiliki sistem bursa kerja (Sibuser) berbasis Web dan Android. Pendekatan secara personal kepada manajemen-manajemen perusahaan di Kota Cilegon terkait dengan kerja.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					- Belum maksimalnya sinkronisasi pelatihan yang ada di BLK dengan kebutuhan industri di Cilegon	informasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan
Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja		2.903.190.000,00	925.065.500,00	31,86%	Kecilnya serapan anggaran program peningkatan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja disebabkan adanya berapa kegiatan pelatihan yang sumber dana nya dari DID tidak dapat dilaksanakan karena adanya Peraturan menteri keuangan No. 87 pasal 2 ayat (2) dan no. 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) yang berbunyi tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan juga disebabkan beberapa kegiatan yang serapan anggarannya tidak tercapai (pameran bursa kerja / fasilitasi penempatan, pemagangan lulusan blk) karena pandemic covid-19.	Kegiatan pelatihan yang tidak dilaksanakan di tahun 2020 tersebut akan dilaksanakan kembali di tahun anggaran 2021.
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80,00	52,2%	65,25%	- Sarana dan Prasarana pelatihan yang belum memadai (Kejuruan Las, Otomotif, Listrik, Komputer, Menjahit) - Rasionalisasi anggaran sehingga kuota peserta pelatihan berkurang - Masih kurangnya instruktur sehingga tidak sesuai dengan permenaker No.8 Tahun 2017 tentang standar BLK (minimal 2 instruktur per kejuruan).	- Mengajukan bantuan peralatan pelatihan ke Kementrian Tenaga Kerja dan sewa mesin pelatihan - Menambah kuota peserta pelatihan dan kejuruan pelatihan - Mengajukan kebutuhan instruktur ke BKPP dan Bekerjasama dengan BB.PLK Serang terkait dengan bantuan instruktur.
	Persentase tenaga kerja peserta pelatihan yang mendapatkan kesempatan	50,00	64%	128,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	pemagangan, diterima bekerja di perusahaan, maupun berwirausaha					
	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	45,00	13,8	30,7%	pada tahun 2020 dari data pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6100 orang yang ditempatkan sebanyak 844 orang. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja nya sebesar 13,8% dari target yang ditetapkan 45%, sehingga capaian kinerjanya 30,7%. Tidak tercapainya realisasi kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen, dan juga masih ada perusahaan yang melakukan rekrutmen akan tetapi tidak melaporkannya ke dinas tenaga kerja dan ada beberapa lowongan kerja yang tidak terisi oleh pencari kerja kota cilegon dikarenakan kualifikasi nya cukup tinggi.	Dinas Tenaga kerja akan meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan agar menjalankan aturan wajib lapor lowongan dan penempatan tenaga kerja, dan Disnaker Kota Cilegon meningkatkan kompetensi pencari kerja dengan pelatihan – pelatihan yang ada di Disnaker, sehingga setiap kesempatan kerja yang ada di kota cilegon dapat terisi oleh pencari kerja dari Kota Cilegon.
Pelatihan forklift		205.000.000,00	192.014.000,00	93,67%		
	Terlaksananya Pelatihan Forklif	40,00	40,00	100,00%		
Pelatihan computer		88.600.000,00	87.347.500,00	98,59%		
	Terlaksananya Pelatihan Komputer	20,00	20,00	100,00%		
Pelatihan Otomotif Sepeda Motor		84.950.000,00	72.832.350,00	85,74%		
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif Sepeda Motor	20,00	20,00	100,00%		
Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dalam Bidang Usaha Mandiri		192.700.000,00	125.084.000,00	64,91%	Belanja paket bahan pelatihan tidak bisa diserap dikarenakan tidak sesuai dengan kode rekening.	Untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang usaha mandiri upayanya kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan terkait kode rekening

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						belanja modal dan belanja pakai habis.
	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dalam Bidang Usaha Mandiri	30,00	30,00	100,00%		
Pelatihan Las Tingkat Lanjut (FCAW/GTAW)		178.550.000,00	170.040.450,00	95,23%		
	Terlaksananya Pelatihan Las Tingkat Lanjut (FCAW/GTAW)	20,00	20,00	100,00%		
Pameran Bursa Kerja		27.000.000,00	9.450.000,00	35,00%		
	Terlaksananya Pameran Bursa Kerja	20,00	20,00 (7 Perusahaan difasilitasi melakukan rekrutment di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon) (13 Perusahaan melakukan)ekrutmen melakukan rekrutment secara Daring / online di perusahaan masing-masing)	100,00% (35% difasilitasi oleh Disnaker) 65% (dilakukan secara daring di perusahaan masing-masing)	Dengan adanya pandemi covid-19 anggaran kegiatan bursa kerja / fasilitasi penempatan yang dilaksanakann di Disnaker tidak mencapai target karena sebanyak 13 perusahaan melaksanakan rekrutment secara daring / online.	Kegiatan pameran bursa kerja / fasilitasi penempatan tenaga kerja akan dilaksanakan kembali di tahun anggaran 2021 dan berharap kondisi pandemic covid-19 segera berakhir.
Pemagangan Lulusan BLK		45.000.000,00	28.800.000,00	64,00%	Tidak sepenuhnya anggaran yang diserap dikarenakan jumlah peserta pemagangan tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga anggaran transport peserta tidak terserap sepenuhnya.	Kegiatan pemagangan akan dilaksanakan kembali di tahun anggaran 2021
	Terlaksananya Kegiatan Pemagangan Lulusan BLK	50,00	32,00	64,00%	Pada tahun 2020 Kegiatan Pemagangan lulusan blk memiliki target 50 peserta yang dimagangkan, akan tetapi pada pelaksanaannya hanya sebanyak 32 lulusan pelatihan blk yang dimagangkan. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang belum dapat	- Disnaker akan terus mensosialisasikan adanya program pemagangan lulusan BLK - Disnaker mengupayakan untuk mengadakan pelatihan yang jurusannya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					menerima peserta magang dari lulusan blk. dikarenakan adanya pandemic covid-19. Dan juga disebabkan banyak kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan jurusan / kompetensi pelatihan di BLK.	
Pelatihan Kelistrikan		139.740.000,00	115.747.200,00	82,83%		
	Terlaksananya Pelatihan Kelistrikan	40,00	40,00	100,00%		
Sertifikasi Kompetensi Kerja		160.000.000,00	123.750.000,00	77,34%	Tidak tercapainya realisasi anggaran dikarenakan adanya perubahan biaya sertifikasi oleh penyedia jasa K3.	Perlu adanya standarisasi biaya oleh penyedia jasa K3
	Terlaksananya Sertifikasi Forklift	40,00	40,00	100,00%		
Pelatihan Las (DID Tambahan)		298.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan pelatihan las sudah dilaksanakan di kegiatan reguler tahun anggaran 2020 yang sumber dana nya dari APBD dan dilaksanakan lagi di tahun 2020
	Terlaksananya Pelatihan Las	20,00	0,00	0,00%		
Pelatihan AC (DID Tambahan)		208.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan pelatihan AC sudah dilaksanakan di kegiatan reguler tahun anggaran 2020 yang sumber dana nya dari APBD dan dilaksanakan lagi di tahun 2020

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	
	Terlaksananya pelatihan teknisi AC	20,00	0,00	0,00%		
Pelatihan operator forklift (DID Tambahan)		110.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan pelatihan Forklift sudah dilaksanakan di kegiatan reguler tahun anggaran 2020 yang sumber dana nya dari APBD dan dilaksanakan lagi di tahun 2020
	Terlaksananya pelatihan forklift (DID)	20,00	0,00	0,00%		
Sertifikasi operator forklift (DID Tambahan)		101.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan Sertifikasi Forklift sudah dilaksanakan di kegiatan reguler tahun anggaran 2020 yang sumber dana nya dari APBD dan dilaksanakan lagi di tahun 2020
	Terlaksananya Sertifikasi operator forklift (DID)	20,00	0,00	0,00%		
Sertifikasi operator alat berat/eksavator (DID Tambahan)		101.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi	Untuk kegiatan sertifikasi operator alat berat akan



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	dilaksanakan di kegiatan reguler tahun anggaran 2021
	Terlaksananya sertifikasi alat berat	20,00	0,00	0,00%		
Pelatihan menjahit (DID Tambahan)		206.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan pelatihan sablon sudah dilaksanakn di kegiatan reguler tahun 2020 melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan usaha mandiri dan di tahun 2021 akan diusulkan kembali di APBDP 2021
	Terlaksananya pelatihan menjahit (DID)	20,00	0,00	0,00%		
Pelatihan sablon (DID Tambahan)		300.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai	Untuk kegiatan pelatihan sablon sudah dilaksanakn di kegiatan reguler tahun 2020 melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan usaha mandiri dan di tahun 2021 akan diusulkan kembali di APBDP 2021

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					honorarium dan perjalanan dinas.	
	Terlaksananya Pelatihan Sablon	20,00	0,00	0,00%		
Pelatihan potong rambut (DID Tambahan)		457.650.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan Pelatihan yang sumber dana nya dari Dana Insentif Daerah (DID) tidak jadi dilaksanakan / diserap, dikarenakan berdasarkan PMK. 87 pasal 2 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Dan PMK 167/ PMK.07/2020 pasal 20 ayat (6) tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas.	Untuk kegiatan pelatihan potong rambut akan diusulkan kembali di kegiatan APBDP 2021
	Terlaksananya Pelatihan Potong Rambut	25,00	0,00	0,00%		
Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan					- Frekuensi pembinaan ketenagakerjaan berkurang karena minimnya petugas yang melakukan pembinaan ke perusahaan - Kurangnya minat dari perusahaan dan pekerja akan pentingnya aturan ketenagakerjaan	- Dilakukannya upgrading kepada pegawai agar bisa melakukan pembinaan ke perusahaan - Dilakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja
Program Peningkatan Hubungan Industrial		298.100.000,00	79.915.000,00	26,81%	Kinerja realisasi keuangan program hubungan industrial tidak banyak terserap dikarenakan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan (penyelesaian perselisihan hubungan industrial) serta kegiatan penanganan demo dan perumusan umk umsk yang anggarannya tidak terserap sepenuhnya (penjelasan dapat dilihat di kolom kegiatan)	Untuk kegiatan di bidang hubungan industrial akan dimaksimalkan pelaksanaannya di tahun anggaran 2021 dan berharap kondisi pandemic covid-19 segera berakhir sehingga kegiatan bisa dilaksanakan. Untuk kegiatan penanganan demo kegiatan dan serapan anggarannya tergantung pada ada atau tidak nya demo yang terjadi.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	70,00	78,8%	98.5%		
	Cakupan tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan	60,00	78,4	130,6%		
	Proporsi perusahaan yg telah memiliki Sarana Hubungan Industrial	12,00	45,7	380%		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		38.000.000,00	0,00	0,00%	Pelaksanaan kegiatan ini mengalami kendala dimana kegiatan ini yang awalnya dilaksanakan di Triwulan III tidak dapat di realisasikan dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang melarang kegiatan yang mengumpulkan jumlah massa yang cukup banyak. Sehingga kegiatan dialihkan di Triwulan IV, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan juga karena kondisi pandemi belum membaik.	Dalam pelaksanaannya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebenarnya lebih maksimal jika dilaksanakan melalui pendekatan kepada perusahaan dan pekerja secara langsung karena lebih efektif dalam menyerap aspirasi perusahaan dan pekerja. Adapun kasus perselisihan antara perusahaan dan pekerja di tahun 2020 mencapai 33 kasus yang tercatat dan 26 kasus diselesaikan melalui perjanjian Bersama.
	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Perselisihan	200,00	0,00	0,00%		
Perumusan UMK dan UMSK		217.600.000,00	70.015.000,00	32,18%	Pada tahun 2020 kinerja kegiatan Perumusan UMK dan UMSK realisasinya 50% (1 dokumen) dikarenakan pada tahun 2020 hanya UMK saja yang dirumuskan, sedangkan Perumusan UMSK tidak dilaksanakan dikarenakan dikeluarkannya Undang-undang cipta kerja no 11. Hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi anggaran dikarenakan rapat depeko tidak	Kegiatan perumusan upah minimum tetap akan dilaksanakan dan menunggu peraturan pelaksana dari UU cipta kerja.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					rutin dilaksanakan sehingga pemberian honor tidak diserap semuanya.	
	Terumuskannya Rekomendasi UMK dan UMSK	2,00	0,00	0,00%		
Penanganan Demo/Unjuk Rasa		42.500.000,00	9.900.000,00	23,29%	Pada tahun 2020 kegiatan Demo / unjuk rasa minim terjadi dikarenakan tidak diberikannya ijin oleh aparat / instansi terkait. sehingga anggarannya pun tidak terserap semuanya.	Untuk kegiatan penanganan demo pelaksanaan dan serapan anggarannya tergantung ada atau tidaknya demo yang terjadi.
	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Demo / Unjuk Rasa	930,00	0,00	0,00%		

A. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Serta Kompetensi Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas serta Kompetensi Tenaga Kerja merupakan program Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan tujuan membina dan melatih tenaga-tenaga pencari kerja agar berdaya saing dalam memasuki dunia kerja serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja / Perusahaan. Sasaran dari program ini adalah menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan berbasis kompetensi dan berwawasan kewirausahaan mandiri serta menempatkan ke perusahaan-perusahaan yang berada di cilegon. Pembangunan Program peningkatan kualitas, produktivitas serta kompetensi tenaga kerja dilaksanakan melalui pelayanan masyarakat pada bidang pelatihan ketenagakerjaan baik yang berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis kewirausahaan mandiri.

Program peningkatan kualitas produktivitas serta kompetensi tenaga kerja memiliki indikator pembangunan dimana berdasarkan tabel diatas capaian kinerja indikator program sebagai berikut:

1. Capaian Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini menunjukan jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi terhadap jumlah pendaftar pelatihan yang mengikuti proses seleksi. Pada tahun 2020 dari data calon peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 345 orang, yang diterima untuk mengikuti pelatihan sebanyak 180 orang yang terbagi dalam 6 jenis pelatihan. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja sebesar 52,2% dari target yang ditetapkan 80%, sehingga capaian kinerjanya 65,25%. Tidak tercapainya realisasi kinerja tersebut disebabkan oleh adanya

pandemic covid-19 yang berimbas pada terjadinya rasionalisasi anggaran, sarana dan prasarana pelatihan yang belum memadai, belum disertifikasinya semua kejuruan serta masih kurangnya instruktur sehingga tidak sesuai dengan permenaker No.8 Tahun 2017 tentang standar BLK (minimal 2 instruktur per kejuruan).

2. **Capaian Tenaga Kerja Peserta Pelatihan Yang Mendapatkan Kesempatan Pemagangan, Diterima Berkerja Di Perusahaan, Maupun Berwirausaha**

Pada tahun 2020 memiliki target kinerja 50% dengan realisasi 64%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 128%. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pemagangan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) pada tahun 2020, sebanyak 32 lulusan Pelatihan telah dimagangkan di selama tahun 2020, hal tersebut tentunya tidak mencapai target kegiatan yang ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 50 peserta pemagangan. Akan tetapi untuk target indikator program tentunya melebihi target yang ditentukan sebesar 50%.

Adapun dalam kegiatan pemagangan lulusan pelatihan BLK tidak tercapainya target sebanyak 50 peserta disebabkan Karena banyak perusahaan yang belum dapat menerima peserta magang dikarenakan adanya pandemic covid-19 dan juga dikarenakan banyak posisi-posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan jurusan / kompetensi lulusan BLK.

3. **Capaian Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan**

pada tahun 2020 dari data pencari kerja yang terdaftar sebanyak 6100 orang yang ditempatkan sebanyak 844 di 57 perusahaan. Dari data tersebut diperoleh realisasi kinerja nya sebesar 13.83% dari target yang ditetapkan 45%, sehingga capaian kinerjanya 30.7%. Tidak tercapainya realisasi kinerja tersebut antara lain disebabkan adanya kondisi pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak melakukan rekrutmen, dan juga masih ada perusahaan yang melakukan rekrutmen akan tetapi tidak melaporkannya ke dinas tenaga kerja serta ada beberapa lowongan kerja yang tidak terisi oleh pencari kerja kota cilegon dikarenakan kualifikasi nya cukup tinggi.

4. **Progres Program Prioritas Daerah**

Progres dari program prioritas daerah dalam kegiatan Pengembangan BLK pada tahun 2020 senilai Rp. 4.149.400.000 tidak ada yang dilaksanakan. Dimana pada tahun 2020 rencana awal dalam pengembangan BLK yaitu dengan pembangunan Workshop Las, akan tetapi tidak dilakukan karena anggaran terkana rasionalisasi terkait penanganan Covid-19.

B. **Program Peningkatan Hubungan Industrial (HI)**

Hubungan industrial adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Sasaran Pelayanan pembangunan yang dilakukan pemerintah

Kota Cilegon kepada dunia usaha/industri yang sedang memiliki konflik dengan pekerja. Bentuk peranan pemerintah dalam hubungan industrial yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan perselisihan Hubungan Industrial dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan perusahaan, maka Bidang Hubungan Industrial perlu adanya langkah-langkah antisipasi yang meliputi Pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, memberdayakan pekerja serikat pekerja, mensosialisasikan pembentukan dan pembinaan LKS Bipartit, Memberdayakan peran LKS Tripartit, mengoptimalkan fungsi Dewan pengupahan kota, dan mengupayakan agar semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek serta mengupayakan agar perusahaan yang mempekerjakan 10 orang wajib memiliki peraturan perusahaan dan memiliki SP/SB agar membuat Perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja.

Keberhasilan pembangunan pada program Hubungan Industrial melalui tiga indikator, adapun penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut:

1. Capaian Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Realisanya sebesar 78.8% dari target sebesar 80%, tingginya capaian didasarkan dari 33 kasus yang tercatat, 26 kasus sudah diselesaikan, karena dengan adanya mediator yang memberikan pemahaman tentang aturan ketenagakerjaan para pihak yang berselisih pada akhirnya memilih untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan melalui mediasi / musyawarat mufakat.

2. Capaian tenaga kerja yang memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dan Kesehatan

Realisasi kinerjanya sebesar 78,4% dari target sebesar 60%, tinggi capaian ini di dasarkan atas tingginya perusahaan yang mendaftarkan buruh / pekerja sebagai anggota BPJS. Data Keanggotaan BPJS pekerja formal penerima upah (PU) sampai dengan tahun 2020 sebanyak 71.358 orang, sedangkan untuk jumlah Tenaga kerja / buruh yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak 91010 orang.

3. Capaian Proporsi perusahaan yg telah memiliki Sarana Hubungan Industrial

Untuk pencapaian indikator proporsi perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial dari target yang direncanakan dalam RPJMD 12% atau perusahaan memiliki tingkat realisasi kinerja sebesar 45,7% atau 590 perusahaan yang memiliki sarana hubin / jumlah perusahaan yang wajib memiliki sarana hubin , faktor yang mendorong capaian ini melebihi target dikarenakan meningkatnya frekuensi pembinaan persyaratan kerja ke perusahaan-perusahaan di Kota Cilegon sehingga perusahaan-perusahaan tersebut sadar dan paham akan pentingnya memiliki sarana hubungan industrial.

Permasalahan

1. Tingginya minat masyarakat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BLK tidak sebanding dengan kuota peserta pelatihan yang ada, serta sarana prasarana (SDM, peralatan pelatihan dan infrastruktur) yang belum memadai.
2. Belum adanya analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga kurangnya penyerapan lulusan blk di industri.
3. Meningkatnya angka pengangguran yang disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia
4. Kurangnya pengetahuan mengenai Peraturan Ketenagakerjaan baik dari Pihak Perusahaan maupun Pihak Pekerja sehingga hak dan kewajiban masing-masing belum terlaksana dengan baik, akibatnya masih terdapat perselisihan ketenagakerjaan dan aksi demo/ unjuk rasa.

Solusi

1. Dalam menyusun anggaran mendatang, anggaran akan di prioritaskan untuk peningkatan kualitas/kuantitas sarana prasarana pelatihan sesuai dengan standar lembaga pendidikan pelatihan.
2. Perlu dilakukan analisa kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Cilegon.
3. Upaya yang harus dilakukan dalam menangani masalah pengangguran yaitu dengan ditingkatkannya program dan kegiatan wirausaha mandiri dan membantu menyediakan sarana prasarana untuk usaha bagi lulusan peserta pelatihan wirausaha mandiri serta mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan tentang peraturan wajib lapor lowongan pekerjaan dan mekanisme penempatan tenaga kerja
4. Upaya yang dilakukan dalam memberikan pengetahuan tentang Peraturan Ketenagakerjaan adalah dengan sosialisasi dan pembinaan kepada Perusahaan dan Pekerja sebagai bentuk pencegahan perselisihan hubungan industrial. Dalam penyusunan anggaran akan diprioritaskan untuk sosialisasi dan pembinaan Peraturan ketenagakerjaan.

3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

1.1 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Tabel 3.1.2.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		4.418.803.357	4.092.163.652	92.61	(diisi permasalahan dalam mencapai target program)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	90%	90%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	78,52%	78,52%		
	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	97,53%	97,53%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan Cash Badgeut (Anggaran Kas)	100%	96,19%	96,19%		

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

1. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Adapun jumlah aset OPD dalam kondisi baik sebanyak 596 Terhadap jumlah keseluruhan aset OPD (yang tercatat di BPKAD) 759 maka capaian realisasinya 78,52%

2. Tingkat disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur dilihat dari rata-rata absen kehadiran pegawai DP3AKB setiap hari dan direkap pada akhir bulan, tahun 2020 capaian kerjanya 97,53% Adapun jumlah persentase kehadiran pegawai selama 1 tahun maka capaiannya sebesar 97,53%.

No	Bulan	% Kehadiran Pegawai
1	Januari	98.00%
2	Februari	98.00%

No	Bulan	% Kehadiran Pegawai
3	Maret	98.00%
4	April	98.00%
5	Mei	98.00%
6	Juni	98.00%
7	Juli	98.00%
8	Agustus	97.00%
9	September	97.00%
10	Oktober	97.00%
11	November	97.00%
12	Desember	97.00%
Jumlah		1.171 %
Tingkat disiplin aparatur		97.53 %

3. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan *cash budget* (anggaran kas)

Adapun cash budget dalam 1 tahun sebesar 23.730.193.846,- dengan realisasi anggaran dalam 1 tahun sebesar 22.826.248.468,- maka capaian realisasinya adalah sebesar 96.19%

Kegiatan Dukungan Pelayanan Pemerintahan

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat memiliki anggaran Rp. 1.745.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp1.745.000,00. atau 100% dari anggaran.

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik memiliki anggaran Rp.98.400.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 71.142.410,00 atau 72.30% dari anggaran. Adapun sisa anggaran yang tidak teralisasi dikarenakan komunikasi, sumber daya air dan listrik diajukan sesuai dengan pengajuan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik pada DP3AKB Kota Cilegon, Unit Pelaksana Peremberdayaan Perempuan Anak (UPT PPA) dan Unit Pelaksana Keluarga Berencana (UPT KB)

3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor merupakan jasa penyediaan yang terdiri dari 7 orang yang jasa kebersihan dan 3 orang jasa keamanan, memiliki anggaran Rp.368.500.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.365.500.000 atau 99,19 % dari anggaran.

4. Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Penyediaan jasa promosi dan propaganda memiliki anggaran Rp.84.000,000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.83.940.000 atau 99,93% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan iklan dimedia massa dan lensa event yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor memiliki anggaran Rp.34.000,000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.33.550.000 atau 98.68% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh program/kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki anggaran Rp. 20.210.002,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 20.210.002,00 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan cetakan, cetak spanduk dan penggandaan yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh program/kegiatan pada DP3AKB Kota Cilegon.

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor memiliki anggaran Rp.2.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 1.932.000,00 atau 96.60 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan untuk sebagai sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga memiliki anggaran Rp.19.700.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.19.700.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan untuk sebagai sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

9. Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman memiliki anggaran Rp. 70.158.734,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 70.156.000,00 atau 99,67% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan makanan dan minuman baik itu makanan dan minuman harian maupun makanan dan minuman rapat yang dibutuhkan untuk sebagai sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah memiliki anggaran Rp 117.519.325,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 117.414.600,00 atau 99,91% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibutuhkan untuk sebagai pendukung seluruh kegiatan/program pada DP3AKB Kota Cilegon.

11. Pengadaan komputer

Pengadaan komputer memiliki anggaran Rp 9.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.8.925.000 atau 99.17 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan komputer yaitu komputer 3 unit dan printer 5 unit yang dibutuhkan untuk sebagai sarana dan prasarana pada DP3AKB Kota Cilegon.

12. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki anggaran Rp 28.860.000,00. dan sudah terealisasi sebesar Rp. 28.560.000,00 atau 98.96 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk sebagai sarana dan prasarana pada DP3AKB Kota Cilegon.

13. Pengadaan sewa gedung/rumah

Pengadaan sewa gedung/rumah memiliki anggaran Rp 375.000.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 297.100.000,00 atau 79.23% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan kebutuhan sewa gedung/rumah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon, Unit Pelaksana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Unit Pelaksana Keluarga Berencana (UPTD KB) sebagai sarana dan prasarana. Untuk sewa gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang dianggarkan satu tahun namun realisasinya hanya 6 Bulan, karena menmpati gedung baru.

14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor memiliki anggaran Rp 49.500.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.49.500.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan kebutuhan rutin/berkala gedung kantor sebagai sarana dan prasarana perkantoran agar dalam kondisi layak/baik.

15. Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional memiliki anggaran Rp 303.565.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 281.211.700,00 atau 92.64 % dari anggaran. Tidak teralisasi seluruh anggaran dikarenakan pengajuan kebutuhan pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yaitu roda 2 dan 16 unit dan roda empat 9 unit sesuai dengan kebutuhan akan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional itu sendiri sebagai sarana dan prasarana agar dalam kondisi layak/baik dan agar dapat digunakan sebagai pendukung seluruh program/kegiatan.

16. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Pemeliharaan rutin/berkala komputer memiliki anggaran Rp 7.410.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp.7.410.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan rutin/berkala komputer sebagai sarana dan prasarana agar dalam kondisi layak/baik dan agar dapat digunakan sebagai pendukung seluruh program/kegiatan
17. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan
Penyediaan jasa jaminan / pemeliharaan kesehatan memiliki anggaran Rp 94.551.896,00 dan terealisasi Rp. 86.620.032,00 atau 91.61 % dari anggaran.
18. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Pengadaan Peralatan rumah tangga memiliki anggaran sebesar Rp.12.000.000 dan sudah terealisasi 9.900.000 atau 82.50 % dari anggaran.
19. Penyediaan jasa pegawai nom PNS
Penyediaan jasa pegawai nom PNS memiliki anggaran Rp.1.157.400.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp.1.037.925.500,00 atau 89.68 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan banyaknya kebutuhan jasa pegawai nom PNS yaitu TKK 9 orang dan THL 18 orang sebagai sumber daya pendukung seluruh program/kegiatan.
20. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan memiliki anggaran Rp 30.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 29.998.000 atau 99.99 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sarana dan prasarana pada DP3AKB Kota Cilegon.
21. Penatausahaan keuangan dan aset OPD
Penatausahaan keuangan dan aset OPD memiliki anggaran Rp 37.900.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 37.900.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan penatausahaan keuangan dan aset OPD sebagai sarana pendukung kinerja penatausahaan keuangan dan aset OPD.
22. Penyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan keuangan memiliki anggaran Rp 16.343.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 15.343.000,00 atau 93.86 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan penyusunan laporan keuangan sebagai sarana pendukung dalam lapoan keuangan.
23. Penyusunan dokumen perencanaan OPD

Penyusunan dokumen perencanaan OPD memiliki anggaran Rp 5.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 5.000.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan OPD sebagai sarana meningkatnya ukuran capaian renja.

24. Penyelenggaraan forum perangkat daerah

Penyelenggaraan forum perangkat daerah memiliki anggaran Rp 61.850.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 57.945.000,00 atau 93.69 % dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan penyelenggaraan forum perangkat daerah sebagai sarana dan prasarana agar terakomodasinya usulan stakeholder dan tersampainya informasi program pada masyarakat.

25. Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah

Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah memiliki anggaran Rp 5.000.000 dan sudah terealisasi sebesar Rp 5.000.000 atau 100% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah sebagai sarana terlaksananya pelaporan kinerja.

26. Evaluasi data pembangunan sektoral

Evaluasi data pembangunan sektoral memiliki anggaran Rp 2.047.400,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 1.997.400,00 atau 97.56% dari anggaran. Terealisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan evaluasi data pembangunan sektoral sebagai sarana terlaksananya evaluasi kegiatan OPD dan tersedianya data SPM dan pembangunan sektoral.

27. Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah memiliki anggaran Rp.2.500.000 dan teralisasi Rp. 2.500.000 atau 100 % dari anggaran.

28. Pengadaan sarana petugas lapangan KB (DAK)

Pengadaan sarana petugas lapangan KB (DAK) memiliki anggaran Rp 550.843.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 533.750.008,00 atau 96,90% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan sarana petugas lapangan KB (DAK) sebagai sarana pendukung kegiatan sub bidang KB.

29. Pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan (DAK)

Pengadaan sarana KIE KIT dan media lini lapangan (DAK) memiliki anggaran Rp737.300.000,00 dan sudah terealisasi sebesar Rp 700.238.000,00 atau 94.97% dari anggaran. Teralisasi seluruh anggaran dikarenakan adanya kebutuhan sarana KIE KIT dan media lini lapangan (DAK) sebagai sarana pendukung kegiatan sub bidang KB.

1.2 Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 3.1.2.2b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak						
Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		741.146.907	666.450.838	89.92%		
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan, Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%		
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksanaan KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%		
	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%		
	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%		
	Cakupan Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%		
	Rasio KDRT	10,0	0.072%	0,0072%		
	Terlaksananya pembentukan kelurahan layak anak dan PATBM	43%	43%	100%		
	Cakupan Korban KDRT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan	80%	100%	100%		
	Cakupan Penanganan Kasus KDRT	100%	100%	100%		
	Persentase ketersediaan elemen pendukung kota layak anak	70%	68.3%	98%		
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		90.251.500,00	89.831.350,00	99,53%		
	Terlaksananya Rapat Evaluasi PATBM	65 Orang	65 Orang	100%		
	Terlaksananya Workshop PATBM	215 Orang	215 Orang	100%		
Pembinaan dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		165.307.307,00	158.787.307,00	96,06%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Peserta Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan	30	30	100%		
	Jumlah Peserta Bimtek Perlindungan Pekerja Perempuan	30	30	100%		
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan		41.190.000,00	28.417.500,00	68,99%	Besaran belanja disesuaikan dengan SSH	
	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan di Era Digital	60	60	100		
Pengembangan Kota Layak Anak		121.365.000,00	119.436.000,00	98,41%		
	Terlaksananya Rapat Gugus Tugas KLA, Pembinaan Forum Anak Kecamatan Kelurahan, Pembinaan Kecamatan Kelurahan Layak Anak dan Rapat Forum Anak Tk. Kota	390 Peserta	390 Peserta	100%		
Peningkatan Perlindungan Perempuan		25.895.500,00	25.671.000,00	99,13%		
	Terlaksananya Workshop PKDRT.	80 Orang	80 Orang	100%		
	Terlaksananya TPPO.	50 Orang	50 Orang	100%		
	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan	30 Orang	30 Orang	100%		
Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan		24.200.000,00	468.263,00	1,93%	Disesuaikan dengan kebutuhan jumlah korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan di RSUD Kota Cilegon	
	Terlaksananya Pelayanan Visum	16 Kasus	0 Kasus	0	Karena pihak kepolisian ingin hasil visum lebih cepat keluarnya dikarenakan	Visum dilakukan di RSKM, karena telah menandatangani kesepakatan bersama dengan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					untuk keperluan penyidikan. Dan rata-rata visum dalam yang banyak dibutuhkan oleh korban kekerasan	DP3AKB dalam penanganan kekerasan
	Terlaksananya Pelayanan Rawat Jalan	35 Kasus	3 Kasus	8,57%	Karena hanya sedikit klien yang membutuhkan rawat jalan di RSUD	Tetap melakukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan
	Terlaksananya Pelayanan Rawat Inap	10 Kasus	0 Kasus	0	Karena belum ada klien yang membutuhkan rawat inap di RSUD	Tetap melakukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan
Pembinaan dan aplikasi KLA		22.937.600,00	22.937.600,00	100%		
	Terlaksananya Pembinaan Dakelana dan Kelana Berbasis Website	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100%		
Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA)		150.000.000,00	145.004.718,00	96,67%		
	Terlaksananya pelayanan dan Penanganan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	12	12	100%		
Peringatan Hari Anak Disabilitas Internasional		100.000.000,00	75.897.100,00	75,90%	Besaran belanja disesuaikan dengan SSH	
	Jumlah Peserta Seminar Pola Asuh Anak Disabilitas	150 Orang	150 Orang	100%		
	Jumlah Peserta Anak Disabilitas yang mengikuti wisata religi	70 Orang	70 Orang	100%		

Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering kita jumpai disekitar kita, dan ini merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun berada seperti halnya tindakan yang menghambat tercapainya kesetaraan, kemajuan dan perdamaian. Dari kacamata hak asasi manusia, fenomena ini merupakan pelanggaran, sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Akar masalah dari kekerasan terhadap perempuan adalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Nilai budaya yang meletakkan posisi perempuan pada posisi sub-ordinasi dan marjinal yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan terjadi.

Melalui Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan DP3AKB bertujuan untuk menekan angka dan melindungi tindak kekerasan yang di alami perempuan dan anak khususnya di kota cilegon, yang di karenakan faktor budaya yang masih banyak terjadi di masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Kinerja Program pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak ditunjukan oleh capaian kinerja sbb :

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih adalah adalah capaian penanganan pengaduan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat (Permen PPA No.01 Tahun 2010)

Adapun cara penghitungan rumus adalah:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu sebanyak 100 klien terhadap Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu sebanyak 100 klien, maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100 %.

Berikut adalah data sebaran jumlah pelapor berdasarkan domisili per kecamatan dan luar wilayah

DATA PELAPOR KEKERASAN PER KECAMATAN				
KECAMATAN	JUMLAH	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	ANAK
CIBEER	12	5	0	7

DATA PELAPOR KEKERASAN PER KECAMATAN				
KECAMATAN	JUMLAH	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	ANAK
JOMBANG	23	15	1	7
CILEGON	8	4	0	4
CITANGKIL	17	13	0	4
CIWANDAN	5	2	0	3
PURWAKARTA	10	8	0	2
GROGOL	10	3	1	6
PULOMERAK	9	2	1	6
LUAR WILAYAH	6	4	0	2
TOTAL	100	56	3	41

Adapun Kegiatan yang menunjang didalam Capaian Indikator Program adalah:

1. Dilaksanakannya kegiatan pelayanan pendampingan dan home visite, sehingga sangat membantu dalam mendampingi dan menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak
 2. Dilaksanakannya pelayanan pendampingan psikologis oleh tenaga ahli psikolog setiap hari kerja
- b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
- Pelayanan Kesehatan yang dimaksud ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan (KtP/A). Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.

Pada tahun 2020 sampai dengan Bulan September, Jumlah korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A) yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis terpadu (PPT/PKT) di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu sebanyak 33 kasus terhadap Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata Datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KTP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu. Maka capaian realisasi 100 %. Jumlah 33 klien yang mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu 28 pelayanan Visum et repertum di RSUD dan RSKM, dan 5 klien melakukan pengobatan akibat dari kekerasan yang diterimanya, 2 bayi korban kekerasan, 3 korban KDRT

- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Rehabilitasi sosial dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual.

Pada tahun 2020 sampai dengan Bulan September Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 100 orang . Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial sebanyak 100 orang, maka capaian realisasi 100 % dari target yang ditetapkan adalah 100 %

- d. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Penegak hukum adalah institusi institusi yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta penjatuhan putusan disidang pengadilan. Putusan pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2020 Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak 25 Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan 25 maka dari target yang ditetapkan adalah 100 %

- e. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak hak yang dijamin undang undang atau kebijakan lainnya, dalam kaitan penyelesaian bantuan hukum.

Pada tahun 2020 Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 5 orang terhadap Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum sebanyak 25 orang maka capaian realisasi 20 % dari target yang ditetapkan adalah 100 % hal ini dikarenakan belum adanya lawyer, sehingga untuk bantuan hukum masih bekerjasama dengan instansi lain.

f. Cakupan Layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Cara Perhitungan Rumus: Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dibagi jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial.

Pada tahun 2020 Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial adalah 100 orang, dan korban kekerasan yang telah disatukan kembali ke keluarga adalah 100 orang, sehingga capaian 100%.

g. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melapor ke unit pelayanan terpadu dibagi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kota Cilegon dikali 100%.

Selama periode 2020 sampai Bulan Desember Jumlah KDRT tercatat 69 orang terhadap jumlah kepala keluarga sebanyak 95.217 kk, Maka realisasinya sebesar 0,072 %.

h. Terlaksananya Pembentukan PATBM

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan merespon cepat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di kota cilegon, dalam kegiatan ini ada dua out put yang akan kita capai yaitu terlaksananya rapat evaluasi PATBM sebanyak 65 orang dan terlaksananya workshop PATBM yang diikuti oleh 215 orang. Dan perlu di ketahui jumlah PATBM di Kota Cilegon ada 43 PATBM yang tersebar di setiap kelurahan dengan jumlah aktivis sebanyak 430 orang.

i. Elemen Pendukung Kota Layak Anak

Selaras dengan RPJMD untuk mewujudkan Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di tahun 2020 terdapat target 70% dengan menggunakan rumus jumlah poin dari dokumen rencana tindak yang dilaksanakan pada sampai dengan tahun akumulasi dibagi dengan seluruh poin dalam dokumen rencana tindak. Jumlah Poin Pada Tahun 2020 Kota Layak Anak Kota Cilegon terdapat 683 Poin dibagi seluruh Poin 1000 dikali 100 % mencapai realisasi 68,3%, dengan capaian kinerja mencapai 98 %. Di tahun 2020 ini Pemerintah Kota Cilegon masih menggunakan capaian kinerja dengan tahun yang lalu dikarenakan pada tahun ini Pemerintah Pusat meniadakan kegiatan penilaian Kota Layak Anak, namun dalam mewujudkan kota layak anak di tahun ini DP3AKB tetap melaksanakan kegiatan untuk mendukung kota layak anak antara lain : Rapat Gugus Tugas KLA, Pelatihan Ramah Anak, Pembinaan kecamatan / Kelurahan Layak Anak, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Tk.Kota, Sosialisasi PUSPAGA, Pembinaan / Workshop aplikasi KLA dalam tahapan membenahi dan menata program - Program yang berkaitan dengan perwujudan cilegon sebagai Kota Layak Anak (KLA), terutama dari program pembangunan pemenuhan sarana dan prasarana yang berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak anak serta program lainnya dalam hal mental spiritual anak, pengasuhan yang mempunyai pola didik dan tumbuh kembang yang baik dalam keluarga maupun lainnya demi mewujudkan Kota Cilegon sebagai Kota Layak Anak pada tahapan yang akan datang.

Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah dan merespon cepat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di kota cilegon, dalam kegiatan ini ada dua out put yang akan kita capai yaitu terlaksananya rapat evaluasi PATBM sebanyak 65 orang dan terlaksananya workshop PATBM yang diikuti oleh 215 orang. Dan perlu di ketahui jumlah PATBM di Kota Cilegon ada 43 PATBM yang tersebar di setiap kelurahan dengan jumlah aktivis sebanyak 430 orang. Adapun anggaran yang dimiliki kegiatan PATBM Rp. 90.251.500 dan teralisasi Rp. 89.831.350 atau 99.53 % dari anggaran yang ada.

2. Pembinaan dan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara Lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Pembinaan dan Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki anggaran sebesar Rp. 165.307.307,00 dan teralisasi Rp.158.787.307,00 atau 96.06%

3. Peningkatan Pemberdayaan Korban Kekerasan

Peningkatan Pemberdayaan Korban Kekerasan memiliki anggaran sebesar Rp. 41.190.000,00 dan teralisasi Rp. 28.417.500,00 atau 68.99 % dari anggaran.

4. Pengembangan Kota Layak Anak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran OPD, lembaga dan masyarakat untuk peduli terhadap anak-anak di Kota Cilegon dalam rangka mengembangkan Kota Cilegon untuk mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak, dalam kegiatan ini ada empat out put yang akan kita capai yaitu terlaksananya Rapat Gugus Tugas KLA, terbentuknya Forum Anak Tingkat Kelurahan sebanyak 43 Kelurahan, acara Kongres Anak Indonesia.

Maksud kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak untuk tahun 2020 adalah membangun seluruh wilayah Kota Cilegon dari tingkat Kelurahan sampai Tingkat Kota untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terlembaga dan terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak pada program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran OPD, lembaga dan masyarakat untuk peduli terhadap anak-anak di Kota Cilegon.
2. Untuk memenuhi hak-hak anak.
3. Meningkatkan kerjasama dan komitmen bersama kepada yang terkait dalam mengembangkan dan menjalankan program-program peduli anak.
4. Mengembangkan Kota Cilegon untuk mendapat penghargaan Kota Layak Anak ke tingkat Tertinggi.
5. Merumuskan Dasar Hukum sebagai dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Kedalam Program Pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Daerah Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Anak melalui Naskah Akademik KLA.

Sasaran kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2020 di Kota Cilegon pada Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah :

1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Lembaga Masyarakat
3. Anak berumur 10 – 18 tahun
4. Bagi masyarakat



5. Dunia Usaha
6. Media

Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak sebesar Rp.121.365.000,00p,- dan teralisasi Rp. 119.436.000,00 atau 98.41 % dari anggaran yang disediakan.

5. Peningkatan Perlindungan Perempuan

Kegiatan peningkatan perlindungan perempuan pada tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan adalah ;

1. Melaksanakan workshop PKDRT
2. Melaksanakan pelatihan penanganan korban kekerasan

Peningkatan perlindungan perempuan memiliki anggaran sebesar Rp. 25.895.500,00 dan teralisasi Rp. 25.671.000,00 atau 99.13 % dari anggaran.

6. Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan

Adapun maksud diadakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan adalah melindungi korban kekerasan yang memerlukan pelayanan kesehatan pada layanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Adapun anggaran yang dimiliki oleh kegiatan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan adalah Rp. 24.400.000 dan terealisasi Rp 468.263,00. Atau 1.93 % , dikarenakan pada tahun 2020 disebabkan karena tidak adanya korban yang memerlukan penanganan / pelayanan kesehatan dari RSUD Kota Cilegon atau tidak dilakukan rawat inap atau rawat jalan.

7. Pembinaan Dan Aplikasi KLA

Maksud kegiatan Pembinaan dan Aplikasi KLA untuk Tahun 2020 adalah memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengakses informasi Pembinaan dan Aplikasi Kota Layak Anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Aplikasi KLA pada program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pemenuhan hak secara praktis melalui aplikasi anak;
- b) Meningkatkan pembinaan bagi OPD/Lembaga yang cerdas, maju, sehat dan berwawasan;
- c) Mempermudah dalam memperoleh informasi dan data tentang pemenuhan hak anak.

Realisasi anggaran kegiatan Pembinaan Dan Aplikasi KLA sebesar Rp. 22.937.600,00 atau 100 % dari anggaran Rp. 22.937.600,00.

8. Peringatan Hari Anak Disabilitas

Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dalam kegiatan Peringatan Hari Anak Disabilitas hanya satu out put yaitu terlaksananya peringatan hari anak disabilitas di kota Cilegon .Adapun anggaran yang ada Rp. 100.000.000 atau yang terealisasi Rp. 75.897.100,00 atau 75.90 %.

9. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak (UPT PPA)

Melalui Kegiatan UPTD PPA masalah Kekerasan Perempuan dan Anak diharapkan dapat tertangani serta tercipta rasa aman bagi perempuan dalam pemenuhan hak asasinya, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan dan demokratis. Kita harus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, karena mereka mempunyai hak yang sama untuk “mendapatkan perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Adapun tujuan dari kegiatan UPTD PPA adalah:

- 1) Membantu sebagian tugas dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 2) Memberi layanan teknis operasional berupa penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dan penanganan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, bimbingan rohani, mediasi tentang hak anak, pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak, serta rujukan lanjutan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan serta melindungi dan/atau mengungsikan perempuan dan anak termasuk perempuan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus yang bermasalah ke tempat yang aman.
- 3) Melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 4) Mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera bebas dari tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan pada keluarga dengan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.

Adapun anggaran yang dimiliki oleh UPTD PPA Rp. 150.000.000 dan terealisasi Rp. 145.004.718,00 atau 96.67 %.

1.3 Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel 3.1.2.2c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan PPPA (Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target (Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga						
Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		2.080.272.219,00	2.007.123.688,00	96,48%		
	PKK Aktif (RasioJumlah PKK Aktif terhadap Jumlah PKK yang Ada)	52	52	100%		
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan /atau berperan dalam program / kegiatan Pemerintah	35%	100%	285%		
	Rasio Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pekerja Perempuan yang Ada	100	204.792	14,4		
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	14,29	10	69%		
	Proporsi Perempuan di lembaga politik dan jabatan Politik	30	11	36 ,67%		
	Jumlah Organisasi Perempuan di Bina	39 Organisasi	39 Organisasi	100%		
Gender dalam Pembangunan		155.792.000,00	155.792.000,00	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target (Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan PUG	40 Orang	40 Orang	100%		
Pelatihan Entrepreneurship untuk Perempuan		29.258.500,00	29.258.500,00	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan E-Commerce Untuk Perempuan	100 Orang	100 Orang	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Untuk Wirausaha Perempuan	100 Orang	100 Orang	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Perizinan Usaha Bagi Wirausaha Perempuan	140 Orang	140 Orang	100%		
Peningkatan Kualitas Keluarga dan Organisasi Perempuan		45.000.000,00	42.625.000,00	94,72%		
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perempuan yang berpartisipasi dalam pembangunan. Meningkatnya pengetahuan peran dan tanggung jawab ibu rumah tangga dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera	30 Orang	30 Orang	100%		
Workshop Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Pembangunan		75.158.469,00	71.491.622,00	95,12%		
	Terlaksananya pendidikan / pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam legislatif	30 Orang	30 Orang	100%		
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)		45.684.000,00	45.684.000,00	100%		
	Terlaksananya Sosialisasi P2WKSS, Pembinaan Kepada 200 KK Binaan P2WKSS	200 Keluarga	200 Keluarga	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target (Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma Wanita (DWP)		149.940.000,00	143.822.380,00	95,92%		
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma wanita	36 Orang	36 Orang	100%		
Pembinaan dan Pengembangan GOW		83.700.000,00	83.498.100,00	99,76%		
	Terbinanya organisasi wanita sekota cilegon	56 Organisasi	56 Organisasi	100%		
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga		245.670.000,00	245.306.875,00	99,85%		
	Terlaksananya kegiatan pertemuan rutin PKK tingkat Kota Cilegon	100%	100%	100%		
Pembinaan GSI		49.262.000,00	42.082.000,00	85,42%		
	Terlaksananya Pembinaan GSI Tk.Kecamatan, Terlaksananya Pembinaan GSI Kelurahan, Terlaksananya Pembinaan GSI Rumah Sakit dan Terlaksananya Pembinaan GSI Perusahaan Sayang Ibu	59 (Kec, kel, RS, Perusahaan)	59 (Kec, kel, RS, Perusahaan)	100%		
Pengembangan Industri Rumah		807.250,00	807.250,00	100%		
	Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja Industri Rumah	50 Orang	50 Orang	100%		
	Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Bagi Pelaku	100 Orang	100 Orang	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target (Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Industri Rumahan					
	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha	160 Orang	160 Orang	100%		
	Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaku Industri Rumahan	100 Orang	100 Orang	100%		
Pengembangan Industri Rumahan (DID Tambahan)		1.200.000.000,00	1.146.755.961,00	95,56%		
	Meningkatkan Pengetahuan dan wawasan bagi pelaku industri rumahan Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengembangan Industri Rumahan Meningkatkan kemampuan bagi pelaku industri Meningkatkan usaha industri rumahan sehingga bisa membantu kesejahteraan keluarga	480 Orang	480 Orang	100%		

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang di laksanakan oleh DP3AKB adalah salah satu strategi pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender yang melibatkan langsung perempuan dan laki-laki secara proposional melalui pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi dalam semua bidang pembangunan. Hal ini dapat didukung dalam beberapa indikator didalam kegiatan sebagai berikut:

- PKK aktif (rasio jumlah PKK aktif terhadap total jumlah PKK yang ada)
Pada tahun 2020 jumlah PKK aktif sebanyak 52 terhadap Total jumlah PKK sebanyak 52 maka capaian realisasi 100% dari target yang ditetapkan adalah 100 %

Cara Perhitungan Rumus: Jumlah PKK Aktif dibagi dengan total Jumlah PKK
- Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintahan dan/atau berperan dalam program/kegiatan Pemerintah

Jumlah Salah satu indikator dalam RPJMD tentang tingkat presentase perempuan dalam program pemerintah di tahun 2020 dengan Kader Cilegon Mandiri yang aktif terhadap jumlah Kader Cilegon Mandiri yang ada dikali 100%. Adapun jumlah kader yang aktif di Kota Cilegon sebanyak 2550 dibagi jumlah kader yang ada yaitu sebanyak 2550 di kali 100% terdapat realisasi 100%. Dengan hasil realisasi tersebut tingkat partisipasi perempuan dalam program pemerintah telah melebihi target RPJMD dengan capaian kinerja mencapai 285 %. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah yang mendukung penuh tentang kegiatan perempuan dalam program pemerintah. Dengan capaian kinerja yang telah kita capai, DP3AKB akan melaksanakan program/kegiatan yang mendukung partisipasi perempuan dalam program pemerintah.

b.1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan dan/ atau berperan dalam program / kegiatan Pemerintah

Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 14.180 dibagi jumlah ASN Perempuan sebanyak 3.063 di lembaga pemerintahan, sehingga mencapai realisasi 463% dari target 100%.

Cara Perhitungan Rumus : Jumlah penduduk perempuan yang bekerja dibagi jumlah ASN Perempuan x 100%.

b.2 Proporsi Perempuan dilembaga politik dan jabatan Politik

Jumlah Perempuan di lembaga legislatif tahun 2020 berjumlah 4 orang, dari target Undang-Undang keterwakilan perempuan sebesar 30%, sehingga mencapai 13,33%, seharusnya terwakili minimal 10 orang.

UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan kepada perempuan 30% dalam memungkinkan terjadinya suatu perubahan di lembaga publik.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang Penerangan Zipper System yakni setiap 3 bakal calon legislatif terdapat minimal satu Caleg perempuan.

Cara Perhitungan Rumus: Jumlah perempuan di lembaga legislatif dibagi target nasional tentang keterwakilan perempuan dilegislatif x 100.

- c. Rasio Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Daerah terhadap Jumlah Pekerja Perempuan yang Ada
- Rasio jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah daerah jumlah pekerja perempuan sebanyak 204.792 dibanding dengan jumlah pekerja perempuan yang ada 14.180 sehingga mencapai realisasi 204.792 dengan capaian kinerja mencapai 14,4. Capaian kinerja untuk rasio pekerja perempuan di Kota Cilegon belum mencapai target

1. Jumlah Organisasi Wanita yang dibina

Pada tahun 2020 jumlah organisasi wanita yang dibina sebanyak 39 organisasi, terhadap 39 organisasi yang ada, maka capaian realisasi 100% dari target yang ditetapkan adalah 100 %.

Adapun organisasi-organisasi yang dibina yaitu pelatihan membatik.

Cara Perhitungan Rumus: Jumlah Organisasi wanita yang dibina dibagi jumlah organisasi yang ada

Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Gender dalam Pembangunan

Salah satu bentuknya adalah dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan sangat diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Untuk mendukung aplikasi dan implementasi program pengarusutamaan gender tentunya tidak kalah penting dukungan informasi yang lebih intensif dan terencana, peran dan dukungan seluruh elemen baik eksekutif dan legislatif serta masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan gender dalam pembangunan ialah :

1. Terlaksananya Kegiatan sosialisasi kampanye serta laki-laki terhadap PUG (HeForShe)
2. Terlaksananya kegiatan Training of Fasilitator PUG.
3. Terlaksananya kegiatan Training of Fasilitator PUG bagi OPD.

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Gender dalam Pembangunan ialah :

- a. Masyarakat Kota Cilegon.
- b. OPD / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Adapun anggaran yang ada sebesar Rp.155.792.000 dan terealisasi 100 % dari anggaran Rp.155.792.000.

2. Pelatihan Enterpreneurship untuk Perempuan

Pelatihan enterpreneursip untuk perempuan pada tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan E-Commerce Untuk Perempuan
2. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Untuk Wirausaha Perempuan
3. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Perizinan Usaha Bagi Wirausaha Perempuan

Adapun anggaran yang ada di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 29.258.500,00 atau 100 % dari anggaran Rp.29.258.500,00

3. Peningkatan Kualitas Keluarga dan Organisasi Perempuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada kegiatan PKKOP adalah mengembangkan potensi diri ibu rumah tangga dan anggota organisasi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp 45.000.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 42.625.000,00 atau 94.72 % dari jumlah anggaran.

4. Workshop Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Pembangunan

Kegiatan Workshop Keterwakilan Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2020 adalah melaksanakan pendidikan / pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan dalam legislatif, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan yang diikuti oleh 30 Orang. Adapun anggaran yang ada di tahun 2020 adalah Rp. 75.158.469,00 dan terealisasi di tahun 2020 adalah Rp.71.491.622,00 atau 95.12 %.

5. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) pada tahun 2020 dilaksanakan di dua kelurahan yaitu kelurahan cikuasa dan kelurahan gerem Kecamatan Gerogol.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan sosialisasi, dan pembinaan terhadap 200 KK yang ada di 2 kelurahan ,untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diberikan oleh OPD lintas Sektor. Untuk tahun 2020 ini tidak dilaksanakan evaluasi oleh Provinsi Banten.

Adapun kegiatan P2WKSS yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut

1. Rapat Koordinasi P2WKSS Tim Sektor Pokja P2WKSS
2. Rapat Koordinasi P2WKSS Tingkat Kelurahan
3. Sosialisasi P2WKSS Tk. Kota Cilegon
4. Pelatihan Aneka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PAPEP)
5. Pembinaan kepada 200 KK binaan
6. Pembinaan tingkat propinsi

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp.45.684.000 dan penyerapan anggaran sebesar 45.684.000 atau 100 % dari jumlah anggaran.

6. Pembinaan Peningkatan Organisasi Dharma wanita (DWP)

Organisasi Dharma Wanita (DWP) di tahun 2020 melaksanakan pembinaan pada anggota nya yang bernaung dalam organisasi dharma wanita yang berjumlah 36 orang. Adapun tujuan nya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggotanya.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pertemuan Rutin DWP / Pembinaan
- b. Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh pengurus DWP.

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp.149.940.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp 143.822.380,00 .atau 95.92 % dari jumlah anggaran.

7. Pembinaan dan pengembangan GOW

Kegiatan pembinaan dan pengembangan GOW pada tahun 2020

Maksud pembinaan adalah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota sehingga menjadi sumber daya wanita makin bermutu..

Adapun tujuan dari kegiatan GOW Kota Cilegon adalah :

- 1) Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- 2) Menggalang persatuan dan kesatuan untuk membina Kerjasama antar Organisasi Wanita Indonesia di Kota Cilegon.
- 3) Meningkatkan kedudukan dan derajat wanita khususnya di Bidang Sosial, Bidang Pendidikan dan Lingkungan Hidup, Bidang Sosial, Bidang Organisasi dan Humas dan Bidang Ekonomi untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
- 4) Bekerjasama dengan Pemda Kota Cilegon dan Non Pemerintah dalam program-program peningkatan peranan wanita usaha-usaha social dalam masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Rapat Kerja GOW Kota Cilegon tahun 2020
- 2) Pelatihan Protokoler bagi Anggota Organisasi Wanita
- 3) Pembekalan Kecakapan Berinovasi dalam Peningkatan Ekonomi bagi Anggota Organisasi.
- 4) Pembinaan Organisasi Wanita Kepada 56 organisasi wanita

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp.83.700.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp.83.498.100,00.atau 99,76% dari jumlah anggaran.

8. Peningkatan kesejahteraan keluarga (PKK)

Organisasi wanita yang sudah dikenal di setiap daerah adalah Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 program Pokok PKK.

Gerakan PKK mempunyai peranan yang tidak kecil dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai mitra kerja pemerintah dalam peran sertanya menunjang dan menyukseskan

pembangunan selalu berupaya bekerja keras bergerak maju, seiring dan seirama dengan gerak pemerintah dengan memantapkan kiprah dan jati dirinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Program Pokok PKK.

Pemerintah dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui :

ROGRAM POKOK PKK, YANG TERDIRI DARI :

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotong royong
3. Pendidikan dan keterampilan
4. Pengembangan kehidupan berkoperasi
5. Pangan
6. Sandang
7. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
8. Kesehatan
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

Untuk tahun 2020 dari tahun ke tahun kegiatan PKK tetap memprioritaskan yang ada dalam 10 program pokok PKK.

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp.245.670.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 245.306.875,00 atau 99,85% dari jumlah anggaran.

9. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Gerakan Syang Ibu Meningkatnya pengetahuan kepedulian komitmen dan peran serta masyarakat dalam upaya integrativ dan sinergis pada program percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak guna mewujudkan manusia yang berkualitas.

Kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pembinaan GSI TK.Kecamatan (Revitalisasi GSI)
Kegiatan ini diikuti oleh 43 kelurahan sekota Cilegon sebagai kelurahan Sayang Ibu.
2. Kegiatan pelatihan pencatatan pelaporan Gerakan Sayang Ibu
Kegiatan ini diikuti oleh kader GSI Sekota Cilegon.

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 senilai Rp.49.262.000,00 dan penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.082.000,00 atau 85.42% dari jumlah anggaran.

10. Pengembangan Industri Rumahan

Kegiatan pengembangan industri rumahan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pokja Industri Rumahan
2. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Bagi Pelaku Industri Rumahan
3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Usaha
4. Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaku Industri Rumahan Melalui pengembangan industri rumahan diharapkan dapat memberdayakan perempuan di bidang ekonomi untuk mensejahterakan kaum perempuan di bidang ekonomi.

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 Rp. 807.250.000 dengan realisasi Rp.807.250.000 atau 100 % dari anggaran.

11. Pengembangan Industri Rumahan (DID) Tambahan

Pengembangan industri tambahan (DID) Tambahan ini merupakan anggaran dari pusat yang dilaksanakan di 8 Kecamatan yang diikuti oleh 480 peserta yang dilaksanakan selama 2 hari, dan kegiatan yang dilaksanakan adalah cooking class dan bantuan peralatan dapur, yang diikuti oleh anggota industri rumahan di 8 kecamatan di kota cilegon.

Adapun jumlah anggaran tahun 2020 Rp.1.200.000 dengan realisasi Rp. 1.146.755.961,00 atau 95.56 % dari anggaran.

Permasalahan

1. Belum Optimalnya OPD, media massa dan dunia usaha dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui pembangunan yang ramah anak
2. Kurangnya tenaga yang terlatih tentang perlindungan perempuan dan anak
3. Belum banyak masyarakat yang mengerti dan paham akan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
4. Masih kurangnya pemahaman pada OPD, kecamatan dan kelurahan dalam pengoperasian/pengisian aplikasi website *sikecil* (Sistem informasi kecamatan, kelurahan eman pecil)

Solusi

1. Konsisten dalam mengadakan sosialisasi kepala OPD, media massa, dan dunia usaha tentang kota layak anak, membuat MOU dengan media massa dan dunia usaha untuk mendukung kota layak anak, dan membuat asosiasi pengusaha sahabat anak
2. Diadakanya pelatihan kepada petugas pelayanan penerima pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sosialisasi dan pelatihan bagi aktivis PATBM
3. Tetap konsen terhadap program pencegahan dan penanganan korban kekerasan khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengusulkan PERDA TPPO.
4. Memperbanyak volume pelatihan pengoperasian aplikasi website *sikecil* bagi OPD, Kecamatan dan Kelurahan.

3.1.2.3 Pangan

A. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tabel 3.1.2.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pangan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan						
Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan		393.180.200,00	378.167.500,00	96,18%		
	Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi energi	95,3%	N/A	N/A	Tidak terlaksana survei dan penyusunan dokumen skor Pola pangan Harapan (PPH) karena <i>refocussing</i> .	Perlunya anggaran untuk melakukan survei, pendataan dan penyusunan dokumen PPH.
	Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein	100%	N/A	N/A	Tidak terlaksana survei dan penyusunan dokumen skor Pola Pangan Harapan (PPH) karena <i>refocussing</i> .	Perlunya anggaran untuk melakukan survei, pendataan dan penyusunan dokumen PPH.
	Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan	80,0%	94,28%	117,85%		
	Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah	100%	34,6%	34,6%	Cadangan beras sebanyak 40 ton disalurkan untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga target tidak tercapai	Penambahan anggaran untuk meningkatkan CPPD Kota Cilegon.
Peningkatan konsumsi pangan		39.439.000,00	39.439.000,00	100%		
	Terlaksananya BinteK Penyusunan Pola Pangan Harapan	51 orang	51 orang	100%		
	Terlaksananya Monitoring Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)	56 orang	56 orang	100%		
Penganekaragaman konsumsi pangan		79.400.200,00	78.835.900,00	99,29%		
	Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan Sumber Pangan	150 orang	150 orang	100%		
Peningkatan keamanan pangan		94.841.000,00	90.620.400,00	95,55%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Uji Laboratorium Pangan Segar	12 komoditi	12 komoditi	100%		
	Terlaksananya Pengawasan PSAT yang beredar di pasar	3 pasar	3 pasar	100%	Kurangnya tenaga pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam melaksanakan pengawasan keamanan pangan hayati nabati khususnya dalam hal pemeriksaan laboratorium untuk cemaran mikroba yang terkandung dalam pangan segar asal tumbuhan.
Diversifikasi Pangan (DID Tambahan)		179.500.000,00	169.272.200,00	94,3%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan KWT Untuk Pemulihan Ekonomi	43 kelompok	43 kelompok	100%	Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan 43 KWT untuk pemulihan ekonomi peserta terbatas. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Masih banyak anggota KWT di Kota Cilegon yang masih kurang informasi dan pengetahuan tentang menanam dan mengolah lahan yang baik yang mengakibatkan hasil panen yang dihasilkan tidak sesuai harapan.	Peserta yang telah mengikuti Pelatihan Pemberdayaan 43 KWT untuk pemulihan ekonomi dapat berbagi informasi dan pengetahuan yang didapat kepada anggota KWT lainnya sehingga diharapkan adanya kesamaan informasi dan pengetahuan antara peserta yang sudah mengikuti kegiatan maupun yang belum mengikuti kegiatan, yang pada akhirnya seluruh anggota KWT di Kota Cilegon mendapatkan informasi dan pengetahuan yang sama dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan anggota Kelompok. Melakukan penyuluhan ataupun pembinaan yang dilakukan Penyuluh di masing-masing kecamatan secara intensif diberikan kepada KWT Binaan sehingga, proses penanaman dan pengolahan bisa dimonitor secara baik, sehingga hasil panen bisa maksimal.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga						
Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan		387.171.025,00	381.171.025,00	98,45%		
	Pencapaian tingkat ketersediaan energi	90%	N/A	N/A	Tidak terlaksana survei dan penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) karena <i>refocussing</i> .	Perlunya survei dan pendataan serta penyusunan dokumen NBM.
	Pencapaian tingkat ketersediaan protein	90%	N/A	N/A	Tidak terlaksana survei dan penyusunan dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) karena <i>refocussing</i> .	Perlunya survei dan pendataan serta penyusunan dokumen NBM.
	Pencapaian stabilitas harga pangan (beras) (CV < 10%)	CV < 10%	1,68%	100%		
Peningkatan ketersediaan energi dan protein		10.484.000,00	10.484.000,00	100%		
	Terlaksananya bimtek pengembangan ketersediaan pangan bagi masyarakat (KWT dan poktan)	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Peningkatan distribusi pangan		8.325.000,00	8.325.000,00	100%		
	Terlaksananya pengolahan data analisis harga dan pasokan pangan daerah di Kota Cilegon	1 tahun	1 tahun	100%		
Pengendalian kerawanan pangan		9.780.000,00	9.780.000,00	100%		
	Tersedianya data SKPG di Kota Cilegon per bulan	12 dokumen	12 dokumen	100%		
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)		358.582.025,00	352.582.025,00	98,33%		
	Pengadaan beras cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)	33,4 ton	33,4 ton	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengadaan sewa angkutan beras CPPD	100%	0%	0%	Sewa angkutan beras tidak menggunakan anggaran kegiatan namun menggunakan anggaran dari BTT TA 2020.	
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		3.464.044.000	3.327.506.558	96,06%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	28,57%	28,57%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	71,06%	71,06%		
	Tingkat disiplin aparatur	100%	96,5%	96,5%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100%	87,41%	87,41%		

Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan

1. Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi energi

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi energi berupa kalori yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat Kota Cilegon sbb:

$$\text{Tingkat konsumsi energi} = \frac{\text{Jumlah energi yang dikonsumsi}}{\text{Standar kebutuhan energi}} \times 100 \%$$

Tingkat konsumsi energi pada tahun 2019 adalah sebesar 88,18%, dimana target pencapaian tingkat konsumsi energi yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 88,3%. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 99,86%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2020 tidak diukur dikarenakan kegiatan survei dan penyusunan dokumen skor Pola Pangan Harapan (PPH) tidak terlaksana akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

2. Peningkatan pencapaian tingkat konsumsi protein

Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi protein yang dikonsumsi per hari oleh masyarakat Kota Cilegon, dengan rumus indicator kinerja sebagai berikut :

$$\text{Tingkat konsumsi protein} = \frac{\text{Jumlah protein yang dikonsumsi}}{\text{Standar kebutuhan protein}} \times 100 \%$$

Tingkat konsumsi protein pada tahun 2019 sebesar 113,7%, dari target pencapaian tingkat konsumsi protein yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 100%. Maka, capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 113,7%. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak dilakukan perhitungan terhadap indicator ini, dikarenakan untuk kegiatan survei dan penyusunan dokumen skor Pola Pangan Harapan (PPH) tidak terlaksana akibat *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.

3. Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan

Pangan segar asal tumbuhan yang dimaksud di sini adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung, dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan jenis pangan asal tumbuhan yang dikonsumsi tidak memiliki cemaran residu pestisida, logam berat dan mikroba. Indikator ini menggambarkan tingkat keamanan pangan segar yang memenuhi standar yang beredar di Kota Cilegon dengan cara membandingkan jumlah sampel yang diuji dengan hasil sampel yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Tingkat pengawasan PSAT pada tahun 2020 sebesar 94,28%, dimana dari jumlah sampel sebanyak 70, jumlah sampel yang aman sebanyak 66. Target pencapaian tingkat pengawasan keamanan PSAT yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar > 80%, maka capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 117,85%. Secara keseluruhan semua kegiatan dapat mendukung indikator pada program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dapat terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2020 sebesar 96,18%.

4. Prosentase tingkat minimal cadangan pangan pemerintah

Berdasarkan Permentan No. 65 tahun 2010, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) TA 2017 ditargetkan sebesar 100 ton ekuivalen beras. Realisasi kinerja ini tidak tercapai dikarenakan tidak ada anggaran untuk kegiatan CPPD. Pada TA 2018, berdasarkan Permentan No. 11 tahun 2018, CPPD yang harus disediakan oleh Pemkot Cilegon sebesar 180 ton, namun baru terealisasi sebesar 32,9 ton, sehingga indicator prosentase tingkat minimal CPPD tercapai 18,3%. Pada TA 2019 CPPD yang ditargetkan sebesar 182 ton, pengadaan beras yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebesar 37,3 ton sehingga realisasi CPPD akumulatif tahun 2018 dan 2019 menjadi 70,2 ton atau tercapai 38,6%. Pada TA 2020 target CPPD sebanyak 182 ton, dimana telah dilaksanakan pengadaan beras pada tahun 2020 sebanyak 33,4 ton sehingga ketersediaan CPPD sampai dengan

tahun 2020 tersedia sebanyak 103,6 ton. Pada tahun 2020, untuk penanganan *covid-19* cadangan beras yang ada disalurkan sebanyak 40 ton, sehingga akhir tahun 2020 stok CPPD tersisa sebanyak 63,6 ton. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja Prosentase Tingkat Minimal CPPD pada tahun 2020 sebesar 34,9%. Perhitungan capaian kinerja beras CPPD didasarkan pada harga penjualan beras (HPB) Bulog yang berlaku saat ini yaitu Rp. 10.543/kg.

Program Distribusi dan Cadangan Pangan

1. **Pencapaian tingkat ketersediaan energi.** Indikator ini menggambarkan jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan energi per kapita. Pengukurannya dengan cara menganalisa neraca bahan makanan terhadap 11 jenis bahan makanan. Pada tahun 2019 tingkat ketersediaan energi diperoleh sebesar 103% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90%, maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar 114,4%. Hal ini dapat dicapai melalui ketersediaan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang ada di kota Cilegon maupun pasokan dari luar Kota Cilegon. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan survei ketersediaan dikarenakan anggaran mengalami *refocussing* untuk memutus penyebaran *covid-19* di Kota Cilegon.
2. **Pencapaian tingkat ketersediaan protein.** Indikator ini untuk menggambarkan jumlah penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan protein per kapita. Pengukurannya dengan cara menganalisa neraca bahan makanan. Pada tahun 2019 tingkat ketersediaan protein diperoleh dengan realisasi sebesar 126% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 90% , sehingga capaian kinerja tahun 2019 mencapai 140%. Hal ini dapat dicapai melalui ketersediaan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan yang ada di Kota Cilegon maupun pasokan dari luar kota Cilegon. Sedangkan pada tahun 2020 tidak dapat dilakukan survei ketersediaan protein dikarenakan adanya *refocussing* anggaran akibat *covid-19* di Kota Cilegon.
3. **Pencapaian stabilitas harga pangan (beras).** Indikator ini untuk menggambarkan perkembangan stabilitas harga beras di tingkat konsumen melalui pemantauan / pengumpulan data di pedagang (eceran dan grosir) data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Hal ini untuk menjamin bahwa harga pangan (beras) sepanjang tahun tetap mengalami kestabilan yang ditunjukkan dengan nilai CV (*coefficient variability*) < 10%, artinya fluktuasi harga pangan tidak melebihi 10%, dengan hasil CV sebesar 1,68%. Pada tahun 2020 fluktuasi harga pangan (beras) diperoleh maksimal hanya 10%, sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100%.

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

Persentase ini diperoleh dari tersedianya data SPM, LPPD dan LKPJ, dalam hal ini SPM yang dipakai berdasarkan SPM Ketahanan pangan, ada 7 jenis yaitu :

1. Ketersediaan energi perkapita 90%
2. Ketersediaan Protein perkapita 90%
3. Stabilitas harga pangan (beras)
4. Tingkat konsumsi Energi
5. Tingkat konsumsi Protein
6. Tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan
7. Tingkat minimal cadangan pangan pemerintah

Dalam pencapaian persentase ketersediaan data dan informasi sektoral, dari 7 data yang harus tersedia, hanya tersedia 2 data yaitu tingkat pengawasan pangan segar asal tumbuhan dan tingkat minimal cadangan pangan pemerintah, sedangkan 5 data lainnya tidak dapat dipenuhi karena adanya refocussing anggaran, sehingga capaian kinerja indikator ketersediaan data dan informasi sektoral tercapai 28,7%.

2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Persentase ini diperoleh melalui data jumlah asset yang tercatat dan jumlah asset yang dalam kondisi baik. Data ini diperoleh melalui rekon asset yang dilakukan oleh BPKAD dan DKPP. Dimana jumlah asset yang dalam kondisi baik sebanyak 356 dan jumlah asset yang tercatat sebanyak 501, sehingga diperoleh persentase sebesar 71,06%.

3. Tingkat disiplin aparatur

Persentase ini diperoleh melalui jumlah persentase kehadiran selama setahun, sehingga diperoleh sebesar 96,5%.

4. Persentase kesesuaian cashbudget

Persentase diambil dari realisasi per triwulan dibagi target realisasi per triwulan sehingga diperoleh persentasinya. Pada triwulan pertama cashbudget tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refofusing anggaran untuk penanganan covid 19 sehingga tidak terserap lebih dari 60%.

Permasalahan :

1. Hampir seluruh kegiatan mengalami *refocussing* anggaran untuk penanganan *covid-19*, hal ini berimbas pada jalannya kegiatan yang bersifat sosialisasi dan survei pendataan, sehingga hanya beberapa capaian program yang tetap dilaksanakan seperti pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan perhitungan stabilitas harga pangan (beras).

2. Ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon sampai dengan Desember 2020 sebesar 63,6 ton masih jauh dari ideal yaitu 182 ton berdasarkan perhitungan dalam Permentan No. 11 Tahun 2018 tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Untuk itu di tahun anggaran berikutnya harus diadakan penambahan ketersediaan beras CPPD Kota Cilegon.
3. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya keamanan pangan. Hal ini disebabkan masyarakat baik produsen (terutama produsen skala rumah tangga) maupun konsumen belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup sehingga masalah keamanan pangan belum menjadi prioritas dalam mengembangkan / memilih pangan untuk dikonsumsi.
4. Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan alternatif

Solusi :

1. Perlu adanya alokasi penanganan Covid-19 secara khusus
2. Alokasi anggaran untuk pengadaan beras CPPD per tahun bisa lebih dari tahun-tahun sebelumnya atau sebesar 33,4 ton beras kualitas medium dengan asumsi harga HPB Bulog Rp 10.543/kg melalui mekanisme kerja sama jual beli dan penyimpanan beras CPPD antara Pemkot Cilegon dengan Bulog Kantor Cabang Serang.
3. Perlunya penanganan keamanan pangan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
4. Perlunya peningkatan pemahaman tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marginal sebagai sumber bahan pangan alternatif bagi keluarga harus terus dilakukan dengan menambah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dll.



3.1.2.4 Pertanahan

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CILEGON

Tabel 3.1.2.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang						
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah		Rp 18.300.000	Rp 18.300.000	100,00		
	Persentase aset lahan pemda yang bersertifikat	89,00%	84,50%	94,94%		TA 2019 datanya 84,50
Pembinaan Pertanahan	Jumlah peserta pembinaan pertanahan	80 orang Rp 18.300.000	Rp 18.300.000	100,00		

3.1.2.5 Lingkungan Hidup

A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I-IV, DAN UPTD TPSA

Tabel 3.1.2.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan						
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		2.381.535.981,00	2.340.095.481,00	98,26%		
	Rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	100%	80%	80%		
	Tingkat pencemaran air Kota Cilegon	10,00%	5%	50%		
	Proporsi titik pemantauan kualitas air sungai	100%	100%	100%		
	Proporsi titik pemantauan kualitas udara	100%	100%	100%		
	Proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah	95,00%	72,65%	76,5%		
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	95,00%	21%	22,1%		
	Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa	100,90%	0%	0%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi	100%	47,27%	47,27%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan		1.241.200,00	1.241,200,00	100%		
	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Lingkungan	2 pekerjaan	0	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	Diusulkan untuk dianggarkan kembali
Pemeliharaan alat laboratorium dan ISPU		292.,500.000,00	278.565.000,00	95,24%		
	Terlaksananya pemeliharaan alat ISPU	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Pemantauan Kualitas Tanah Untuk Produksi Bio massa		763.000,00	763.000,00	100%		
	Terpantaunya kualitas tanah untuk produksi biomassa di wilayah Kota Cilegon	1 kegiatan	0 kegiatan	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
Pemantauan Kualitas Lingkungan non institusi / non kumulatif		997.205.000,00	997.205.000,00	100%		
	Tersedianya laporan hasil analisa laboratorium kualitas lingkungan non institusi / non komulatif	1 Dokumen	1 dokumen	100%		
	Tersedianya laporan hasil kajian dan evaluasi hasil pemantauan	1 Dokumen	1 dokumen	100%		
Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Komulatif		652.248.000,00	635.308.000,00	97,40%		
	Terpantaunya kualitas lingkungan institusi / komulatif di wilayah Kota Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Kajian Penentuan/penetapan Kelas Badan air Penerima		385.913.500,00	382.773.000,00	99,19%		
	Terlaksananya penyusunan kajian penetapan kelas air	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Pembinaan Pra Proper		1,015,500.00	1,015,500.00	100%		
	Pembinaan Peserta PROPER	1 kegiatan	0	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	Diusulkan untuk dianggarkan kembali
Pemulihan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan		50.649.781,00	43.224.781,00	85,34%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya pendampingan terhadap masyarakat di sepanjang Sungai Cibeber	1 kegiatan	1 keg (honor penggiat lingk 2 bln	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
	Terlaksananya pendampingan terhadap masyarakat di sepanjang Sungai Kedung Ingas	1 kegiatan	1 keg (honor penggiat lingk 2 bln, atk)	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
	Terlaksananya pendampingan terhadap pencemaran di wilayah industri Kota Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan (Tenaga ahli dr Untirta 1 bln)	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
	Terlaksananya penanaman bibit tanaman untuk pemulihan dan penanggulangan bagian hulu Sungai Cibeber dan Sungai Kedung Ingas	1 kegiatan	0	0%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi						
Program Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		234.921.500,00	121.071.500,00	51,54%	Sisa anggaran yang tidak diserap yaitu biaya uji laboratorium dan perlengkapannya. Hal ini dikarenakan selain adanya pandemi covid-19, adanya aturan PSBB dan anggaran pelaksanaan untuk pengawasan di lapangan dirasionalisasi yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					maksimal sehingga anggaran uji laboratorium tidak terealisasi.	
	Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas	93.80%	104.9%	111.79%		
	Persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%		
Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH		98.768.000,00	6.918.000,00	7,00%		
	Terawasinya penanggung jawab usaha/kegiatan yang menerima izin lingkungan dan izin PPLH	80 usaha/kegiatan	21 usaha/kegiatan	26,25%	Adanya wabah pandemi covid-19, refocussing anggaran serta ketatnya aturan perusahaan terkait dengan protokol kesehatan , sehingga mobilitas keluar masuk orang di perusahaan sangat ketat dan dibatasi, selain itu adanya kebijakan WFH bagi perusahaan dan instansi pemerintah sehingga sering kali jadwal yang sudah disusun bantrok sehingga tidak bisa dilaksanakan.	
	Terawasinya penanggung jawab usaha/kegiatan yang menerima Sanksi Administratif	10 usaha/kegiatan	12 usaha/kegiatan (PT. Berlian Amal Perkasa, PT. Synthetic Rubber	120%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Indonesia, PT. KIEC, PT. Posco M.Tech, PT. CAPC, PT. Peteka Karya Tirta, PT. Astra International – Honda Cilegon, PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut), PT. Mandiri Sumber Kemakmuran (Honda Motor Cab Simpang, PT. Mandiri Sumber Kemakmuran (Honda Motor Cab PCI)			
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup		53.324.500,00	31.324.500,00	58,74%		
	Terselesaikannya jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan dan dapat ditindak lanjuti	15 kasus	17 kasus	113,33%		
Peningkatan jumlah sekolah peraih Adiwiyata		82.829.000,00	82.829.000,00	100%		
	Jumlah Sekolah Peraih Adiwiyata	10 sekolah	10 sekolah	100%		
Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas						
Program Penataan Lingkungan		179.422.000,00	173.891.000,00	96,92%		
	Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup	93,60%	158,87%	169,73%	Masih rendahnya pemahaman dan ketaatan pelaku usaha	Ada keterkaitan dgn bidang penegakan hukum sehingga

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					sehingga masih ada usaha / kegiatan yg belum memiliki dokumen lingkungan	perlu pembinaan dan pendekatan dgn pelaku usaha
	Cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup	7,10%	35,1%	491,6%	Usaha/keg tsb sdh ada dokumen lingkungan namun ada banyak perubahan sehingga tidak sesuai lagi dgn dokumen lingkungan. Perlu tambahan SDM untuk mengaudit kesesuaian operasional dengan dokumen lingkungan	Perlu peningkatan kapasitas SDM
	Tingkat Prosentase Lahan RTH di Kota Cilegon	100%	88,12%	88,12%		
	Tingkat Pemenuhan bangunan Konservasi air	100%	78%	78%		
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (NIRWASITA TANTRA)		971.000,00	971.000,00	100%		
	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 kegiatan	0	0%	Anggaran <i>direrfocussing</i>	Diusulkan untuk dianggarkan kembali
Penyusunan IKLH		50.000.000,00	45.010.000,00	90,02%		
	Tersusunnya Dokumen IKLH	1 dokumen	1 dokumen	100%		
Penyusunan KLHS Untuk RDTR		744.000,00	744.000,00	100%	Anggaran <i>direrfocussing</i>	Diusulkan untuk dianggarkan kembali
	Terlaksananya Penyusunan KLHS dan RDTR	1 kegiatan	0	0%		
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)		24.582.000,00	24.582.000,00	100%		
	Penentuan Target RPPLH (30 tahun), Penyusunan Muatan RPPLH (30 tahun),	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Anggaran <i>direrfocussing</i> sehingga target terealisasi	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Rancangan dokumen, Penyusunan Naskah Akademis				hanya FGD sebanyak 1 kali	
Penghijauan		60.100.000,00	59.700.000,00	99,33%		
	Terlaksananya Pemeliharaan Hutan Kota dan Penyediaan Bibit Tanaman di Kota Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Kampung Iklim		43.025.000,00	42.884.000,00	99,67%		
	Terlaksananya Kegiatan Kampung Iklim Untuk Mendukung Adaptasi dan Mitigasi Kampung Iklim	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas						
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		7.382.799.000,00	6.922.889.750,00	93,77%		
	Persentase penanganan persampahan	72.00 %	69,98 %	97,19%		
	TPS per satuan penduduk (Rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk)	2,36 m3 per penduduk	3,86 m ³ /penduduk	163,56%		
	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	0.55 %	0,53 %	96,36%		
Pengamanan kebersihan kegiatan khusus daerah		159.855.000,00	126.630.000,00	79,22%		
	Terlaksananya Penanganan Kebersihan Pada Kegiatan Hari - hari besar Nasional Dan Hari Besar Lainnya	6 kegiatan	4 kegiatan	66,66%		
Pemeliharaan Rutin/berkala lingkungan TPSA Bagendung		120.000.000,00	120.000.000,00	100%		
	Tersedianya Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gas Methan Di lingkungan TPSA Bagendung	2 paket	2 paket	100%		
Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		187.340.000,00	187.340.000,00	100%		
	Tersedianya Sarana Pendukung Untuk Pelaksanaan Kegiatan	10 jenis	10 jenis (sekop, cangkul, gagang cangkul, garukan,	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelayanan Persampahan / Kebersihan		sapu lidi, gagang sapu, pengki bambu, pengki atom, blong plastik, terpal)			
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan operasional kebersihan		6.076.800.000,00	5.765.095.750,00	94,87%		
	Tersedianya Kendaraan Operasional yang Siap Pakai	12 bulan	12 bulan	100%		
Pemeliharaan alat angkut persampahan		293.000.000,00	293.000.000,00	100%		
	Terpeliharanya Alat Angkutan Persampahan	3 jenis	3 jenis	100%		
Pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3		99.400.000,00	85.365.000,00	85,88%		
	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan limbah B3	100 perusahaan	24	24%		
Evaluasi dan sosialisasi pengelolaan limbah B3		2.864.000,00	2.864.000,00	100%		
	Terlaksananya Evaluasi dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3	70 perusahaan	0	0%	Anggaran direfocussing	
Pembangunan TPST		100.000.000,00	12.800.000,00	12,80%		
	Tersedianya bangunan TPS untuk penunjang pelayanan kebersihan	1 lokasi	0	0%		
Pengadaan lahan trans depo		8.945.000,00	8.945.000,00	100%		
	Tersedianya lahan untuk pembangunan transfer depo penunjang pelayanan kebersihan	2 lokasi	0	0%		
Pembangunan trans depo		38.945.000,00	29.700.000,00	76,26%		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan DED untuk Pembangunan Transfer Depo	1 dokumen	1 dokumen	100%		
	Tersedianya bangunan transfer depo untuk	1 lokasi	0	0%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	penunjang pelayanan kebersihan					
Identifikasi dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah		100.000.000,00	95.950.000,00	95,95%		
	Penerapan target JAKSTRADA dalam hal pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%	1 dokumen	1 dokumen	100%		
Lomba Bank Sampah		100.050.000,00	99.600.000,00	99,55%		
	Terlaksananya kegiatan lomba bank sampah tingkat Kota Cilegon	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Dukungan Penanganan Banjir		95.600.000,00	95.600.000,00	100%		
	Terlaksananya penanganan kebersihan	10 lokasi	10 lokasi (pasar kranggot, kali tumpang kedaleman, kali laguna, pabean, ciwandan, cikerut, karang asem, kotabumi, grogol, rawarum)	100%		
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I						
Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		24.200.000,00	23.600.000,00	97,52%		
	Tercapainya Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan	6 jenis	2 jenis	33%	Tidak melakukan perubahan di indikator keluaran target kinerja pada DPA	Melaksanakan pembelanjaan pengadaan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II						
Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		24.200.000,00	23.600.000,00	97,52%		
	Tercapainya Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan Kebutuhan UPTD Wilayah II	2 jenis	2 jenis	100%	Dalam pelaksanaan tertunda dari jadwal yang sudah ditentukan, karena adanya <i>refocussing</i> anggaran	Melaksanakan pembelanjaan pengadaan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III						
Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		24.300.000,00	24.300.000,00	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tercapainya Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan	2 jenis	3 jenis	150%	Tidak melakukan perubahan di indikator keluaran target kinerja pada DPA	Melaksanakan pembelanjaan pengadaan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA
UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		24.200.000,00	23.600.000,00	97,52%		
	Tercapainya Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan	2 jenis	2 jenis	100%		
UPTD Tempat Pengolahan Sampah Akhir Penyediaan Peralatan Sarana Kebersihan		14.200.000,00	13.650.000,00	96,13%		
	Tercapainya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kota	6 jenis	2 jenis	33,33%		
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		14.587.775.095	13.871.659.024	95,09%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100 %	100 %	100 %		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100 %	79,17 %	79,17 %		
	Tingkat disiplin aparatur	100 %	99,25 %	99,25 %		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100 %	82,41 %	82,41 %		
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH I		103.006.080	102.277.388	99,29%		
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II		106.356.891	103.494.727	97,31%		
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH III		100.337.141	98.349.782	98,02%		
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH IV		100.987.141	100.433.900	99,45%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAH UPTD TPSA		73.218.960	42.627.677	58,22%		

Pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdapat 8 (delapan) indikator dengan capaian kinerja pada indikator tersebut di atas adalah :

1. Realisasi capaian indikator rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada tahun 2020 sebesar 75 %. Capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan yakni sebesar 100%. Hal ini disebabkan parameter SO₂ dan CO yang terpantau oleh Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) melebihi nilai ISPU (TIDAK SEHAT). Selanjutnya agar target indikator rata-rata tingkat pencemaran udara Kota Cilegon atau Indeks Standar Pencemar Udara / ISPU dapat terpenuhi, maka di tahun yang akan datang perlu dilakukan upaya pengendalian pencegahan pencemaran udara, serta melakukan upaya penghijauan lingkungan dan uji emisi sumber tidak bergerak. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan uji emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor). Saat ini Pemerintah Kota Cilegon telah memiliki 4 (empat) Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Ambien yang dapat mengukur kualitas udara secara kontinyu. Alat SPKU yang ada tersebut mewakili pencemaran udara dari factor industry dan faktor transportasi. Adapun lokasi penempatan 4 Alat SPKU tersebut adalah :
 - Unit SPKU Simpang Tiga, Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta
 - Unit SPKU Simpang PCI (Jalan Aat – Rusli)
 - Unit SPKU Gunung Sugih, Kelurahan Gunung Sigih Kecamatan Ciwandan
 - Unit SPKU Gerem, Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol
2. Realisasi Indikator tingkat pencemaran air Kota Cilegon (kualitas baku mutu air tanah) pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 50 % yakni dari target 10 air tanah yang dilakukan pemantauan, ada 5 (lima) sampel yang melebihi baku mutu. Lokasi yang melebihi baku mutu tersebut yaitu Kelurahan Mekarsari untuk Parameter TDS dan CaCO₃, Kantor Kelurahan Tegal Ratu untuk Parameter pH, Kantor Kelurahan Bendungan untuk Parameter Mn, Kantor Kelurahan Kepuh Untuk Parameter pH dan Kantor Kelurahan Samang Raya untuk Parameter pH. Sedangkan untuk 5 (lima) lokasi lainnya yang dilakukan pemantauan seperti Kantor / Rumah Dinas Walikota Cilegon, Kantor Kelurahan Gerem, Kantor Kelurahan Ramanuju, Kantor Kelurahan Kalitimbang dan Kantor Kecamatan Jombang masih memenuhi Baku Mutu Lingkungan.
3. Indikator proporsi titik pemantauan kualitas air sungai pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 100%, artinya Dinas Lingkungan Hidup Kota

Cilegon telah melakukan pemantauan terhadap sebanyak 90 (Sembilan puluh) titik, dengan waktu tiga periode yaitu bulan pada Triwulan II, III dan IV.

4. Indikator proporsi titik pemantauan kualitas udara untuk Tahun 2020 capaiannya sebesar 100%, artinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pemantauan sebanyak 150 (seratus lima puluh) titik, dengan waktu tiga periode yaitu bulan pada Triwulan II, III dan IV.
5. Indikator proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah cair untuk Tahun 2020 capaian indikator sebesar 67,5%, artinya terdapat 25 (dua puluh lima) pabrik yang memenuhi baku mutu limbah cair dari 37 (tiga puluh tujuh) pabrik yang dipantau. Kemudian proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebesar 77,8% artinya dari 18 (delapan belas) jumlah pabrik yang dipantau, terdapat 14 (empat belas) pabrik yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Capaian indikator ini masih dibawah target karena masih ada beberapa pelaku usaha yang masih belum taat terhadap peraturan lingkungan hidup. Sehingga upaya selanjutnya agar indikator proporsi pabrik yang memenuhi baku mutu limbah cair dapat tercapai yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang masih belum dapat memenuhi baku mutu (belum taat terhadap peraturan lingkungan hidup).
6. Realisasi indikator jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara untuk Tahun 2020 capaiannya sebesar 22,1%. Hal ini dikarenakan dari target 95 (sembilan puluh lima) usaha/kegiatan yang harus dilakukan pengawasan, hanya 21 usaha/kegiatan yang sudah dilakukan pengawasan dan statusnya tidak taat terhadap peraturan lingkungan. Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *covid-19* dan ketatnya aturan perusahaan terkait *covid-19* sehingga mobilitas keluar masuk orang di perusahaan sangat ketat dan dibatasi. Selain itu adanya kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi perusahaan dan instansi pemerintah sehingga sering kali jadwal yang sudah disusun bantrol dan tidak bisa dilaksanakan.
7. Indikator persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa untuk tahun 2020 tidak tersedia data, sebab kegiatan pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa tidak dilakukan karena adanya pandemi *covid-19* sehingga anggarannya *direfocussing*.
8. Indikator persentase wilayah industri manufaktur yang mendapatkan supervisi untuk tahun 2020 sebesar 47,27% artinya dari target 366 (tiga ratus enam puluh enam) yang harus dilakukan supervisi terdiri dari penanganan kasus sebanyak 15 kasus, Evaluasi dokumen lingkungan sebanyak 161 perusahaan, Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH sebanyak 80 usaha/kegiatan, Pengawasan terhadap penerima sanksi administratif sebanyak 10 usaha/kegiatan, dan pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebanyak 100 perusahaan. Capaian Tahun 2020 untuk penanganan kasus sebanyak 17 kasus, Evaluasi dokumen lingkungan sebanyak 99 perusahaan,

Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH sebanyak 21 usaha / kegiatan, Pengawasan terhadap penerima sanksi administrasi masih 12 usaha / kegiatan, Pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebanyak 24 perusahaan. Jadi jumlah yang sudah dilakukan supervisi sebanyak 173 usaha/kegiatan. Capaian masih belum mencapai target hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi *covid-19*, rasionalisasi anggaran serta ketatnya aturan perusahaan terkait *covid-19* sehingga mobilitas keluar masuk orang diperusahaan sangat ketat dan dibatasi, selain itu adanya kebijakan WFH bagi perusahaan dan instansi pemerintah sehingga seringkali jadwal yang sudah disusun bantakan sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Pada Program Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Terdapat 2 (dua) indikator. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut di atas adalah :

1. Realisasi indikator Cakupan Pembinaan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat/komunitas tahun 2020 capaiannya tidak sesuai dengan target karena ada beberapa pembinaan yang tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu pada kegiatan Adipura dan Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup dikarenakan anggarannya dirasionalisasi, sehingga jumlah orang yang sudah dilakukan pembinaan hanya sebanyak 195 orang dari jumlah total target 405 orang. Solusi untuk capaian target di tahun mendatang sebaiknya bukan berdasarkan jumlah orang, tetapi berdasarkan jenis penghargaan yang akan diraih, sehingga capaian target lebih terukur. Tahun 2020 capaiannya sebesar 104,9% artinya jumlah kelompok masyarakat atau komunitas (masyarakat umum, sekolah dan usaha/kegiatan) yang telah dibina pada tahun 2020 sebanyak 425 orang terhadap total jumlah kelompok masyarakat tersebut sebanyak 405 orang yang akan dibina.
2. Realisasi Indikator persentase jumlah kasus dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti tahun 2020 sebesar 100%, artinya setiap ada kasus dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dengan melakukan pemantauan langsung ke tempat kejadian. Pada tahun 2020 kasus lingkungan yang masuk sebanyak 17 (tujuh belas) kasus pengaduan masyarakat dan yang telah ditindaklanjuti (selesai) sebesar 76, 47% (13 kasus) yaitu telah melaksanakan kewajiban yang tertuang didalam berita acara, sedangkan yang masih dalam proses penyelesaian sebesar 23,53% (4 kasus). Hal ini menandakan masih ada usaha/kegiatan di Kota Cilegon yang masih belum taat terhadap peraturan lingkungan hidup. Sehingga kedepannya harus di tingkatkan sosialisasi tentang peraturan lingkungan hidup, upaya pengendalian dan pengawasannya serta penerapan sanksi bagi usaha / kegiatan yang melanggar.

Pada program Penataan Lingkungan terdapat 4 (empat) indikator. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut yaitu :

1. Realisasi indikator Proporsi jumlah perusahaan yang memiliki dokumen terkait lingkungan hidup untuk tahun 2020 capaiannya melebihi 100%. Capaian tahun 2020 sebesar 158,87% artinya jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup sebanyak 842 (delapan ratus empat puluh dua) perusahaan dari target 530 (lima ratus tiga puluh) perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup dapat berbentuk Amdal, UKL –UPL, SPPL dan sepanjang tahun 2020 dominan data yang disampaikan tersebut di atas adalah SPPL.
2. Realisasi Indikator cakupan supervisi kesesuaian operasional perusahaan terhadap dokumen lingkungan hidup tahun 2020 sebesar 35,10 %, dimana jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup yang disupervisi sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) dokumen dari 490 (empat ratus sembilan puluh) perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan hidup. Usaha/kegiatan tersebut bergerak pada sektor industri, perumahan, perhotelan, pertambangan serta perdagangan dan jasa dan berlokasi tersebar di 8 (delapan kecamatan) di Kota Cilegon.
3. Realisasi Indikator tingkat persentase lahan RTH di Kota Cilegon Tahun 2020 masih sebesar 88,12%, artinya luas RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup meliputi hutan kota, sempadan sungai dan mata air yang telah di hijaukan seluas 31,51 Ha dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 35,76 Ha. Karena pada Tahun 2020 tidak ada penambahan lahan untuk RTH.
4. Realisasi Indikator tingkat Pemenuhan bangunan konservasi air Tahun 2020 sebesar 78%, artinya jumlah bangunan konservasi air yang dibuat berupa sumur resapan dan lubang resapan biopori sebanyak 3.687 unit terhadap jumlah bangunan konservasi air yang direncanakan sebanyak 4.727 unit. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada kegiatan pembuatan bangunan konservasi air di Dinas Lingkungan Hidup. Namun, pada tahun 2020 melalui Program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel), dilaksanakan pembangunan Sumur Resapan sebanyak 478 unit, yang tersebar di 43 Kelurahan dan 8 Kecamatan.

Pada Program Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Terdapat 3 (tiga) indikator. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Persentase penanganan persampahan tahun 2020 capaiannya sebesar 69,98%, artinya volume sampah yang diangkut ke TPSA baik yang diangkut oleh armada dari DLH atau dibuang langsung oleh masyarakat sebanyak 381.973 m³ dari volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 545.832 m³ (data jumlah penduduk yang digunakan adalah data dari DKCS semester I). Capaian masih di bawah target karena adanya penurunan pengangkutan sampah yang di luar armada Dinas Lingkungan Hidup (industri, fasilitas perekonomian yaitu pertokoan dan mall) dimana pada tahun 2019 sebesar 13.327 m³ berkurang menjadi 10.453 m³ . Hal ini disebabkan karena pandemi *covid-19* yaitu dengan adanya kebijakan pemerintah tentang *Work From Home* (WFH) dan adanya pembatasan pengunjung

bagi pertokoan dan mall, sehingga volume sampah di area komersil juga menurun.

2. Realisasi Indikator untuk TPS per satuan penduduk (rasio daya tampung TPS per 1.000 penduduk) tahun 2020 sebesar 3,86%, artinya hingga tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah memiliki TPS sebanyak 206 unit dengan daya tampung setiap TPS adalah 8 m³, sehingga total daya tampung TPS sebesar 1.648 m³ terhadap total jumlah penduduk Kota Cilegon Tahun 2020 sampai dengan Bulan Juni sebanyak 427.266 jiwa (sumber data dari DKCS Kota Cilegon). Capaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 2,27 m³ per penduduk.
3. Realisasi Indikator persentase pengurangan sampah di perkotaan tahun 2020 sebesar 0,53%, yakni jumlah sampah yang dilakukan upaya pengurangan sebesar 2.930,52 m³ terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 545.832 m³. Hingga tahun 2020 telah dilakukan upaya dalam pengurangan produksi sampah melalui sistem 3R yaitu *reduce*, *recycle* dan *reuse*, dimana sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dipilah dan dikelola melalui lembaga bernama Bank Sampah dan TPS 3R. Sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis kemudian diangkut dan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir sampah). Jumlah bank sampah hingga tahun 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) bank sampah, dimana dapat mengelola sampah sebesar 1.237,08 m³/tahun dan 3 (tiga) unit TPS 3R yang dapat mengelola sampah sebesar 1693,44 m³/tahun terhadap volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Cilegon sebanyak 545.832 m³. Capaian ini memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 0,53%.

B.1 Permasalahan

1. Belum terintegrasinya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
2. Adanya pandemi *covid-19* yang berimbas kepada anggaran kegiatan yang dirasionalisasi sehingga pelaksanaannya tidak maksimal atau tidak dapat terlaksana, selain itu adanya kebijakan PSBB yang mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan sangat terbatasnya ruang dan geraknya.
3. Masih ada kegiatan yang waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan *cash budget* hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas SDM terhadap pemahaman tahapan dan urutan pekerjaan berikut kebutuhan waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga akhir pelaksanaan pekerjaan, termasuk tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. Kurang cermatnya menghitung kebutuhan anggaran pada pelaksanaan dan operasional kegiatan pada beberapa program, sehingga sebagian anggaran tidak dapat terserap dengan baik.
5. Kurangnya jumlah SDM pengawas lingkungan terutama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sehingga penanganan pada pengaduan kasus lingkungan hidup menjadi tidak maksimal.
6. Belum tersedianya laboratorium lingkungan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), untuk merespon secara cepat atas adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Belum optimalnya kinerja dari PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum lingkungan tingkat Kota Cilegon.
8. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dan aparaturnya dalam menjaga kebersihan lingkungan (kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya).
9. Kurangnya kesadaran dan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kota Cilegon.
10. Kurangnya SDM pelaksana (staf) pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

B.2 Solusi

1. Rencana kerja dan kegiatan pada setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup semestinya harus berdasarkan isu dan permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat, salah satunya dimulai dari hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup berdasarkan analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan daya dukung lingkungan hidup. Dari data tersebut akan tergambarkan upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui program dan bidang masing-masing serta keterlibatan dan koordinasi antar sektor lainnya.
2. Peran penegakkan hukum atas pelanggaran PPLH dapat ditingkatkan, tidak saja hanya menunggu pengaduan tetapi dengan melihat data-data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup dan analisa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengajukan usulan penambahan SDM dan kegiatan Diklat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Diklat-diklat lain yang menunjang kegiatan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup, baik ke BKPP Kota Cilegon, BKPP Provinsi Banten maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan menambah jumlah PPLH Kota Cilegon. Untuk pengadaan

ketersediaan laboratorium lingkungan daerah, perlu dimulai dari perencanaan dengan mereview kembali dokumen-dokumen yang pernah dikeluarkan.

4. Upaya pengurangan dan penanganan sampah seharusnya sudah mulai diidentifikasi dan menjadi program kerja pemerintah. Pada upaya pengurangan adalah melalui pendirian TPS 3R dan bank sampah sebanyak mungkin terutama pada sumber timbulan sampah, sosialisasi dan pelaksanaan (pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, pendauran ulang). Untuk upaya penanganan sampah adalah melalui sosialisasi dan pelaksanaan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, fungsi TPA). Upaya-upaya tersebut perlu didukung dengan regulasi yang mengaturnya.
5. Perlunya penegakkan hukum tentang pengelolaan sampah.
6. Dalam menetapkan suatu rencana kegiatan sebaiknya memperhatikan permasalahan dan jumlah kebutuhan sumber daya yang harus disediakan, sehingga dalam penyusunan anggaran dapat menjawab seluruh kebutuhannya.
7. Meningkatkan pengetahuan para aparatur tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Perlu dilakukan perbaikan atau perubahan indikator program yang benar-benar dapat terukur untuk perencanaan kedepannya.

3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 3.1.2.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Dukungan Layanan Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
A. PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PEMERINTAHAN		4.250.290.665	3.635.982.185	85,55%		
				94,08%		
	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral	100%	100%	100%		
	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	85,82%	85,82%		
	Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur	100%	99,40%	99,40%		
	Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cah Budget (Anggaran Kas)	100%	91,10%	91,10%		

A.1.1. ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Program Dukungan Layanan Pemerintahan berdasarkan tabel diatas realisasi Anggaran Sebesar Rp. **3.635.982.185.-** atau **85,55%** dari total anggaran sebesar **Rp.4.250.290.665.-** dan capaian Indikator kinerja sebesar **94,08%**, dari indicator Kinerja Program :

- Indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral** dari target kinerja sebesar **100%** Realisasi **100%** dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pemenuhan Dokumen LAKIP, RENJA, LPPD, dan LKPJ}}{\text{Jumlah Dokumen LAKIP, RENJA, LPPD, dan LKPJ yang harus ada}} \times 100 = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

- Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran** sebesar **66,49%** dalam Kondisi Baik dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Aset OPD dalam Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aset OPD (yang tercatat di BPKAD)}} \times 100\%$$

$$= \frac{363}{423} \times 100\% = 85,82\%$$

3. **Tingkat Disiplin dan Kinerja Aparatur** dilihat dari rata-rata Absen Kehadiran pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setiap hari dan direkap pada Akhir bulan, Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja **99,40%** (Sangat Baik) dengan perhitungan sebagai berikut :

**PERSENTASE KEHADIRAN PEGAWAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
TAHUN 2020**

NO.	BULAN	% KEHADIRAN PEGAWAI
1	JANUARI	99,07%
2	FEBRUARI	98,29%
3	MARET	100%
4	APRIL	99,24%
5	MEI	100%
6	JUNI	100%
7	JULI	99,78%
8	AGUSTUS	99,78%
9	SEPTEMBER	99%
10	OKTOBER	99%
11	NOVEMBER	99%
12	DESEMBER	99%
TINGKAT DISIPLIN APARATUR		99,40%

$$= \frac{\text{Persentase kehadiran pegawai selama 12 bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.192,78}{12} \times 100\% = 99,40\%$$

4. **Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Cah Budget (Anggaran Kas)** telah sesuai dengan yang diharapkan, dengan capaian realisasi anggaran **91,10%**.

Cash Budget	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Target	3.603.104.370	2.548.989.718	2.600.403.828	2.386.489.341	11.138.987.257
Realisasi	2.201.493.171	1.980.359.874	2.937.084.588	3.028.573.943	10.147.511.576
% Capaian Triwulan	19,77%	17,78%	26,37%	27,18%	91,10%

$$\text{Presentase Kesesuaian Cash Budget} = 19,77\% + 17,78\% + 26,37\% + 27,18\% = 91,10\%$$

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada tahun 2020 dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dengan membawahkan 3 Kepala Seksi yaitu:

1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang Penduduk
3. Seksi Pendataan Penduduk.

Pada tahun 2020 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ditunjang oleh 3 kegiatan berikut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1.2.6b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pelayanan pendaftaran penduduk		201.380.203	199.562.076	99,10%	(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				101,83%		
	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95	96,73%	101,82%		
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan	1 hari	1 hari	100 %		
Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk		66.415.000	65.670.400	98,88%		
	Terlaksananya Pelayanan Langsung Dokumen Kependudukan	35 keg	35 Keg	100%		
Penyuluhan Pindah Datang Penduduk		76.965.000	76.038.500	98,80%		
	Terlaksananya Penyuluhan Pindah Datang Penduduk	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100%		
Pendataan Penduduk Rentan		58.000.203	57.853.176	99,74%		
	Terlaksananya Pendataan Penduduk Rentan	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100%		

A.2.1. ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk tahun 2020 berdasarkan tabel diatas mendapatkan anggaran sebesar **Rp.201.380.203,-** realisasi **Rp.199.562.076,-** atau **99,10%**. Dilihat dari tabel diatas indikator kinerja program sebagai berikut :

2. Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator cakupan pelayanan pendaftaran penduduk dihitung dari akumulasi cakupan kepemilikan KTP-el, cakupan penerbitan KK, cakupan penerbitan surat keterangan pindah keluar kota cilegon, cakupan penerbitan KIA, cakupan penerbitan dokumen kependudukan Orang Asing di bagi 5 jenis pelayanan, pada tahun 2020 target kinerja **95%** realisasi **96,73%** capaian kinerja **101,82%** .

➤ **Cakupan Kepemilikan KTP-el**

Ktp-el adalah kartu tanda penduduk yang di buat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi, cakupan KTP-el merupakan jumlah KTP-el yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP.

Data ini di dapat dari jumlah KTP-el yang diterbitkan sebanyak 295.777 dibagi jumlah penduduk wajib KTP sebesar 306.779 atau capaian 96,41%

$$= \frac{\text{Jumlah KT el yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$$

$$= \frac{295.777}{306.779} \times 100\% = \mathbf{96,41\%}$$

➤ **Cakupan Penerbitan KK**

Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga.

Data ini di dapat dari jumlah kartu keluarga yang diterbitkan sebanyak 134.457 dibagi jumlah kepala keluarga sebesar 134.457 atau capaian 100%.

$$= \frac{\text{Jumlah KK yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

$$= \frac{134.457}{134.457} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

➤ **Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon**

Surat keterangan pindah keluar kota cilegon merupakan surat pengantar untuk warga yang akan melakukan pindah dan sebagai pengantar untuk pembuatan dokumen kependudukan di tempat yang baru.

Data ini di dapat dari jumlah surat keterangan pindah keluar yang di terbitkan sebesar 8.411 dibagi jumlah permohonan penerbitan surat keterangan pindah keluar sebesar 8.411 atau capaian 100%.

$$= \frac{\text{Jumlah SKP yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Penerbitan SKP}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.411}{8.411} \times 100\% = 100\%$$

➤ **Cakupan Penerbitan KIA**

KIA adalah kartu identitas anak yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang berusia 0-17 tahun kurang 1 hari sebagai identitas bagi anak yang wajib dimiliki oleh setiap anak.

Data ini di dapat dari jumlah KIA yang diterbitkan sebesar 121.944 dibagi jumlah anak dibawah usia wajib KTP sebanyak 139.781 atau capaian 87.24%.

$$= \frac{\text{Jumlah KIA yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Anak dibawah usia wajib KTP}} \times 100\%$$

$$= \frac{121.944}{139.781} \times 100\% = 87,24\%$$

➤ **Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing**

Dokumen kependudukan orang asing atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang berdomisili di kota cilegon, yang mempunyai KITAS wajib melaporkan keberadaannya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk selanjutnya dibuatkan SKTT.

Data ini di dapat dari jumlah dokumen kependudukan orang asing yang diterbitkan sebanyak 652 dibagi jumlah permohonan dokumen kependudukan orang asing sebesar 652 atau capaian 100%.

$$= \frac{\text{Jumlah Dok Kependudukan Orang Asing yg diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Dok Kependudukan Orang Asing}} \times 100\%$$

$$= \frac{652}{652} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Kinerja dari Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

$$= \frac{96,41\% + 100\% + 100\% + 87,24\% + 100\%}{5 \text{ Jenis Pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{483,65\%}{5 \text{ Jenis Pelayanan}} \times 100\% = 96,73\%$$

Kegiatan yang mendukung dalam capaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah :

1. Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk
2. Penyuluhan Pindah Datang Penduduk
3. Pendataan Penduduk Rentan

3. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk

Tahun 2020 mencapai target yaitu 1 hari kerja dari Target yg telah ditetapkan yaitu 1 hari yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk sebagai berikut :

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah

1. KK : 1 hari / 10 menit
2. KTP-el : 1 hari / 10 menit
3. SKP : 1 hari / 10 menit
4. SKTT : 1 hari / 10 menit
5. KIA : 1 hari / 10 menit
6. SKPD : 1 hari / 10 menit
7. SKPLN : 1 hari / 10 menit
8. SKDLN : 1 hari / 10 menit
9. LEGALISIR : 1 hari / 10 menit

Jumlah total 9 hari / 90 menit

$$\frac{9 \text{ hari/90menit}}{9 \text{ jenis layanan}} = 1 \text{ hari / 10 menit}$$

Indikator kinerja waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran penduduk pada tahun 2020 target yaitu 1 hari kerja dengan realisasi 10 menit, dikarenakan adanya inovasi-inovasi pelayanan Disdukcapil, penyelesaian dokumen kependudukan bisa diselesaikan dalam jangka waktu lebih cepat dari target.

Jika dilihat dari kegiatan pada program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk semua sudah mencapai target sesuai yang diharapkan.

Peningkatan kinerja di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, dipengaruhi oleh :

1. Adanya pengadaan Blangko, formulir dan buku register pendaftaran penduduk.
2. Adanya Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan kepada penduduk Kota Cilegon melalui media cetak / elektronik maupun tatap muka bersama aparaturnya dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan
3. Adanya pelayanan secara online.

A.3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN CATATAN SIPIL

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Pencatatan Sipil yang lebih baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen Pencatatan Sipil antara lain ; Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, Pengangkatan Anak, Pengesahan Anak dll.

Pada Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan 3 Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Kelahiran
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
3. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Pada tahun 2020 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil ditunjang oleh 4 kegiatan berikut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1.2.6c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil		270.017.000	265.852.000	98,46%	(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil				106,53%		
	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	86%	97,23%	113,06%		
	Waktu rata-rata penyelesaian dokumen Pencatatan sipil	1 hari	1 hari	100 %		
Pembinaan Pencatatan Perkawinan, perceraian dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan		37.332.500	36.662.500	97.32%		
	Terlaksananya Pembinaan Pencatatan Perkawinan, perceraian dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan	100 orang	100 orang	100%		
Pelayanan Langsung Akta Kelahiran		98.085.000	97.835.000	99,75%		
	Terlaksananya Pelayanan Langsung Akta Kelahiran	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100 %		
Pelayanan Langsung Akta Kematian		98.500.000	95.225.000	96,71%		
	Terlaksananya Pelayanan Langsung disetiap Kecamatan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	100 %		
Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegara an dan Kematian		36.099.500	36.099.500	100%		
	Terlaksananya penyampaian informasi tentang status anak, pewarganegaraan, kematian dan Keluarga Binaan P2WKSS kepada Masyarakat di Kota Cilegon	200 orang 50 orang	200 orang 50 Orang	100%		

A.3.1. ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2020 berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sebesar **106,53%**, sedangkan target anggaran sebesar **Rp.270.017.000.-** dengan realisasi **Rp. 265.852.000.-**atau **98,46%**.

Dari table diatas berikut indikator kinerja Program :

1. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

Cakupan pelayanan pencatatan sipil dihitung dari akumulasi cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, cakupan penerbitan akta kematian, cakupan penerbitan akta perkawinan non muslim, cakupan penerbitan akta perceraian non muslim, dibagi dari 4 jenis pelayanan ,pada tahun 2020 target kinerja cakupan pelayanan pencatatan sipil sebesar **86%** realisasi **97,23%** atau **113,06%**.

a. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun

Capaian pada cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Tahun dihitung dari jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0 – 18 tahun, pada tahun 2020 mencapai 88,90%.

$$= \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{129.974}{146.208} \times 100\% = \mathbf{88,90\%}$$

b. Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Akta kematian merupakan akta bagi orang yang sudah meninggal yang berdomisili di kota cilegon, dan melaporkannya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota cilegon.

Capaian cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian dihitung dari jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan terhadap jumlah akta kematian yang dilaporkan, pada tahun 2020 berjumlah 1.741 akta.

$$= \frac{\text{Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.741}{1.741} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

c. Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim

Capaian cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim dihitung dari jumlah Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim yang diterbitkan terhadap jumlah Akta Perkawinan Non Muslim dilaporkan, pada tahun 2020 berjumlah 4.181 akta.

$$= \frac{\text{Jumlah Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta Perkawinan non Muslim yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.181}{4.181} \times 100\% = 100\%$$

d. Cakupan Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim

Capaian cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Non Muslim dihitung dari jumlah Kutipan Akta Perceraian Non Muslim yang diterbitkan terhadap jumlah Akta Perceraian Non Muslim dilaporkan, pada tahun 2020 berjumlah 611 akta.

$$= \frac{\text{Jumlah Kutipan Akta perceraian non muslim yang diterbitkan}}{\text{Jumlah akta Perceraian non muslim yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{611}{611} \times 100\% = 100\%$$

2. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil

Tahun 2020 mencapai Realisasi **10 menit** dari target **1 hari** kerja, yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pencatatan sipil sebagai berikut:

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah

1 Akte Kelahiran	: 1 hari/10menit
2 Akte Kematian	: 1 hari/10menit
3 Akte Perkawinan	: 1 hari/10menit
4 Akte Perceraian	: 1 hari/10menit
5 Akte Pengangkatan Anak	: 1 hari/10menit
6 Akte Pengesahan Anak	: 1 hari/10menit
7 Akte Pengakuan Anak	: 1 hari/10menit
8 Akte Perubahan Nama	: 1 hari/10menit
9 Pembatalan Akta Perkawinan	: 1 hari/10menit
10 Surat Keterangan Lahir Mati	: 1 hari/10menit
11 Perubahan Peristiwa Penting Lainnya	: 1 hari/10menit
12 Perubahan Status Kewarganegaraan	: 1 hari/10menit
13 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri	: 1 hari/10menit
14 Laporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri	: 1 hari/10menit
15 Legalisir Akta-Akta Pencatatan Sipil	: 1 hari/10menit
16 Pembatalan Akta Perceraian	: 1 hari/10menit

Jumlah total 1 hari/160 menit

$\frac{1 \text{ hari/160 menit}}{16 \text{ jenis layanan}} = 10 \text{ menit}$

Jadi capaian kinerja dari indikator waktu rata-rata penyelesaian Dokumen Pencatatan Sipil adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Indikator kinerja waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan sipil pada tahun 2020 target yaitu 1 hari kerja dengan realisasi 10 menit, dikarenakan adanya inovasi-inovasi pelayanan Disdukcapil, penyelesaian dokumen kependudukan bisa diselesaikan dalam jangka waktu lebih cepat dari target.

Kegiatan yang mendukung dalam capaian indikator kinerja Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah :

1. Pembinaan Pencatatan Perkawinan, perceraian dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan
2. Pelayanan Langsung Akta Kelahiran
3. Pelayanan Langsung Akta Kematian
4. Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Jika dilihat dari kegiatan pada program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil semua sudah mencapai target sesuai yang diharapkan. Peningkatan kinerja di Bidang Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, juga di dukung dengan kegiatan di bawah ini:

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil di yg diadakan oleh Ditjen Dukcapil dan Propinsi Banten Secara Online
2. Adanya Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dan yang bertujuan agar masyarakat Kota Cilegon dengan mudah mengetahui Informasi tentang pentingnya Akta-Akta Pencatatan Sipil
3. Melaksanakan Pelayanan Langsung Akta Kematian di 8 Kecamatan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan pencatatan perkawinan, perceraian dan pelayanan langsung akta perkawinan non muslim.

A.4 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sasaran untuk meningkatkan kualitas Database Kependudukan dan upaya memberikan kemudahan layanan informasi Administrasi Kependudukan (adminduk) untuk masyakat/stakeholder/lembaga/instansi/OPD di lingkungan Kota Cilegon. Tujuan dari Program dimaksud adalah bagaimana pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dapat memfasilitasi Bidang Pelayanan Kependudukan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pemanfaatan Data Informasi Penduduk.

Pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan 3 Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi SIAK
2. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Data
3. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM, TI, Komunikasi

Pada tahun 2020 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditunjang oleh 4 kegiatan berikut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1.2.6d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan		343.365.000	334.848.700	97.52%	(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				104.98%		
	Tingkat validasi, akurasi, dan up to datanya data	85.79%	90.06%	104.98%		
Pemeliharaan SIAK		207.454.000	205.257.500	98.94%		
	Terpeliharanya jaringan aplikasi SIAK Dinas dan Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%		
Pengelolaan SIAK		48.801.000	48.173.000	98.71%		
	Terpenuhinya tata kelola dan SDM teknologi informasi dan komunikasi baik di Kecamatan maupun Dinas	40 tenaga operator	40 tenaga operator	100%		
Pembinaan dan Penyusunan Buku Induk Kependudukan		46.280.000	40.588.200	87.70%		
	Terlaksananya Pembinaan penyusunan buku induk penduduk	43 buku	43 buku	100%		
Perecepatan Perekaman Penduduk Usia Wajib KTP el		40.830.000	40.830.000	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terpenuhinya Perekaman KTP-el di Sekolah	10 sekolah	10 Sekolah	100%		

A.4.1. ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2020 berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sebesar **104.98%**, sedangkan target anggaran sebesar **Rp.343.365.000,- dengan realisasi Rp.334.848.700,- atau 97,52%.**

Dari data indikator Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan :

1. **Tingkat Validasi, Akurasi, dan Up To Date nya Data** dari target kinerja **85,79%** realisasi **90,06%** capaian kinerja **104,98%** dihitung dari :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Data terverifikasi dan tervalidasi}}{\text{Data Anomali (Data bermasalah)}} \times 100\% \\
 &= \frac{441.191}{490.191} \times 100\% = 90,06\%
 \end{aligned}$$

Tingkat Validasi, Akurasi Data Base Kependudukan dihitung dari Data terverifikasi dan tevalidasi terhadap Data Anomali atau Data bermasalah, Pada tahun 2020 tercapai **90,06%**.

Capaian kinerja fasilitasi pelayanan SIAK online, SIAK Konsolidasi baik pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil maupun pengolahan data kependudukan melalui program SIAK ditahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. Pada Tahun 2020 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan melakukan pelayanan online dikarenakan pandemic covid 19.

Pelayanan KTP-el Baik untuk perekaman maupun pencetakan dalam tahun 2020 berjalan secara baik dan lancar, Untuk pelaksanaan pelayanan KTP-el secara regular khusus untuk perekaman penduduk pindah datang dan pencetakannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Tabel 5

Data Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2020

Uraian	Keterangan
• Terlaksananya Pemeliharaan Tower Wireles Jaringan Komunikasi SIAK dan server.	10 titik
• Terlaksananya Pembinaan Terhadap Tenaga Pengelola SIAK : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Kecamatan	5 orang 24 orang
• Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan : 1. Buku Induk Penduduk (BIP)	43 Buku
• Terlaksananya pembinaan terhadap petugas administrasi pelaporan Laporan Mati Pindah Datang (LAMPID) 1. Laporan Kegiatan 2. Perekaman KTP-el	1 dokumen
(Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman terhadap jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%)	
$= \frac{295.777}{306.779} \times 100\% = 96,41\%$	

Jika dilihat dari kegiatan pada program Peningkatan Informasi Administrasi Kependudukan semua sudah mencapai target sesuai yang diharapkan.

Kegiatan yang mendukung dalam capaian indikator kinerja pada Tingkat Validasi dan Akurasi Database Kependudukan atau Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan adalah :

1. Pemeliharaan SIAK
2. Pengelolaan SIAK
3. Pembinaan dan Penyusunan Buku Induk Kependudukan
4. Percepatan Perekaman Penduduk Usia Wajib KTP el.

A.5 PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

Program Peningkatan Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan pada tahun 2020 dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang dengan Membawahkan 3 Kepala Seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Kerjasama
2. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan
3. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Pada tahun 2020 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan ditunjang oleh 4 kegiatan berikut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.1.2.6e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan		265.226.558	263.331.565	99,29%	(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan				100%		
	Jumlah Buku profil yang di selesaikan	112	112	buku		
	Jumlah Ketersediaan Dokumen Analisis Kependudukan	40	40	buku		
	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan thdp target instansi	5 instansi	5 instansi	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Inovasi Pelayanan di Bidang Kependudukan		100.000.000	98.900.000	98.90		
	Terlaksananya Peningkatan Inovasi Pelayanan di bidang kependudukan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%		
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan		10.250.000	10.250.000	100%		
	Terciptanya Kerjasama dalam Pemanfaatan Data kependudukan dengan Dinas dan Instansi	4 TW	4 TW	100%		
Pengembangan / Peningkatan Pelayanan Publik Masyarakat		107.151.558	107.051.558	99.91%		
	Terlaksananya Pengembangan / Peningkatan Pelayanan Publik Masyarakat	1 Paket	1 Paket	100%		
Optimalisasi dan Tata Kelola Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan		47.825.000	47.150.000	85.31%		
	- Tersedianya buku Profil Kependudukan	112 buku	112 buku	100%		
	- Tersedianya Dokumen analisis Kependudukan	40 buku	40 buku			
	- Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	70 Orang	70 Orang			

A.5.1. ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator pada Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan tahun 2020 berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sebesar **100%** target anggaran sebesar **Rp.265.226.558,-** realisasi **Rp. 263.331.565,-**atau Caapaian **99,29%**.

Dari data indikator Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :

1. **Jumlah Buku profil yang di selesaikan**

Buku profil yang diselesaikan dihitung dari target 112 buku dan realisasi 112 buku dengan capaian 100%

2. **Jumlah Ketersediaan Dokumen Analisis Kependudukan**

Ketersediaan Dokumen Analisis Kependudukan dihitung dari target 40 buku dan realisasi 40 buku dengan capaian 100%

3. **Cakupan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**

dari target kinerja **5 instansi** realisasi **100%** capaian kinerja **100%** dihitung dari :

$$= \frac{\text{Jumlah Instansi yang melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah target instansi (5 instansi)}} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerjasama dengan 5 instansi antara lain :

- **BPRS**

Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengkinian data NIK

- **KEMENTRIAN AGAMA**

Perjanjian kerjasama dalam rangka pemanfaatan data akta perkawinan khusus nya di KUA

- **DINAS PENDIDIKAN**

Perjanjian Kerjasama dalam rangka pemanfaatan dokumen Kependudukan untuk KIA

- **KLINIK BERSALIN BILQIS**

Perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan cakupan akta kelahiran

- **KANTOR POS**

Perjanjian kerjasama dalam hal jasa pengiriman dokumen Kependudukan.

Jika dilihat dari kegiatan pada program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan tahun 2020 semua sudah mencapai target sesuai yang diharapkan.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

B.1 Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk

1. Masih adanya masyarakat yang belum memperbaharui kartu keluarga akibat perubahan susunan anggota keluarga.



2. Masih adanya Warga Negara Asing / Perusahaan yang mempekerjakan orang asing tidak melaporkan untuk Pembuatan SKTT.
3. Pelayanan langsung / keliling tidak bisa dilaksanakan di 8 Kecamatan, Sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya karena terkendala wabah Pandemi Covid 19.

SOLUSI

B.1 Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk

1. Meningkatkan sosialisasai kepada penduduk Kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik
2. Menyampaikan surat himbauan kepada Perusahaan-perusahaan yang Mempekerjakan Orang Asing atau Agen-agen yang membuat Dokumen Orang Asing.
3. Pelayanan dilakukan secara Online, dokumen yang sudah selesai dikirim melalui Jasa Kantor Pos.

PERMASALAHAN

B.2 Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

1. Masih banyak penduduk yang identitasnya (nama, tempat lahir, tanggal lahir) di setiap dokumen kependudukannya (KTP, Surat Nikah, KK) terdapat perbedaan. Hal ini menyulitkan pelaporan pencatatan sehingga petugas pencatatan sipil menghimbau agar semua data / identitas di setiap dokumen kependudukan harus sama untuk memudahkan verifikasi data yang menjadi persyaratan dalam pembuatan akta-akta pencatatan sipil. Untuk memperbaiki perbedaan data tersebut diperlukan waktu sehingga dengan demikian terkesan membuat akta-akta pencatatan sipil agak sulit.
2. Masih adanya masyarakat yang memiliki persepsi, akta kelahiran hanya diperlukan oleh anak-anak saja untuk keperluan sekolah dan mencari kerja, sementara untuk orang yang telah berusia menganggap tidak perlu. Untuk saat ini banyak penduduk yang sudah berusia mendaftarkan untuk pergi ibadah haji dan umroh.
3. Masih kurang tersosialisasinya perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian.
4. Pelayanan langsung / keliling tidak bisa dilaksanakan di 8 Kecamatan, sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya karena terkendala wabah Pandemi Covid 19.

SOLUSI

B.2 Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

1. Adanya kegiatan pelayanan langsung dan pendokumentasian akta-akta pencatatan sipil di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Cilegon, dan pelayanan langsung jemput bola ke sekolah PAUD, TK, SD, SMP dan SMU, Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk mencatatkan kelahirannya.
2. Adanya pembinaan teknis pencatatan sipil kepada aparaturnya Kelurahan, Kecamatan, badan pemerintah/swasta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dalam pembinaan teknis ini dipaparkan tentang pentingnya kepemilikan akta catatan sipil, prosedur dan tata cara serta persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pencatatan.
3. Adanya sosialisasi perubahan status anak, kewarganegaraan dan agar kematian yang bertujuan masyarakat Kota Cilegon dengan mudah mengetahui informasi tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil.
4. Pelayanan dilakukan secara Online, dokumen yang sudah selesai dikirim melalui Jasa Kantor Pos.

PERMASALAHAN

B.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Faktor Alam dan Cuaca sangat Berpengaruh terhadap koneksi jaringan SIAK
2. Sering terjadi trouble pada jaringan Telkom untuk pelayanan KTP-el baik Rekam maupun Cetak
3. Kurangnya Tenaga pengelola SIAK baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Perekaman langsung/keliling tidak bisa dilaksanakan di 8 Kecamatan, sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya karena terkendala wabah Pandemi Covid 19

SOLUSI

B.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Melaksanakan supervisi dan pemeliharaan SIAK secara berkala dan kontinyu / rutin
2. Melakukan koordinasi dengan indosat melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
3. Perlu Penambahan Tenaga Teknis Administrasion Data Base (ADB)
4. melakukan inventarisasi peralatan KTP-el yang rusak untuk di perbaiki yang dikoordinasikan melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Perekaman KTP El untuk Pemula dan yg belum pernah melakukan perekaman dilakukan secara bergantian di kecamatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.

PERMASALAHAN

B.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Masih belum adanya jaringan Non Internet di OPD untuk Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Masih banyak OPD yang belum melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data.
3. Masih perlunya Komitmen dalam Membangun Inovasi oleh berbagai pihak.

SOLUSI

B.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

1. Perlunya Pengembangan Jaringan Non Internet Khususnya di Diskominfo.
2. Sosialisasi Secara Menyeluruh (OPD, Lembaga non vertikal) serta para pelaku usaha di kota Cilegon.
3. Perlu Penguatan Komitmen oleh OPD yang diatur dalam Regulasi.

Selain solusi diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga telah melaksanakan beberapa **kebijakan** antara lain:

1. Adanya Dispensasi dari Menteri Dalam Negeri yang diwujudkan melalui Surat No. 472.11/3444/SJ tentang Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir setelah Undang-Undang No 23 tahun 2006. Kepengurusannya berdasarkan Azas Domisili bukan berdasarkan Azas Peristiwa.
2. Pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (***gratis***).
3. Adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Percepatan **Kartu Identitas Anak (KIA)** yang sudah diterapkan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri.
4. Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan secara online
5. Percepatan Peningkatan Akta Kelahiran 0-18 tahun Online antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan RSUD, RSIA, RSKM, Bidan Mandiri, Puskesmas.
6. Percepatan Perekaman usia wajib KTP di sekolah SMA/ SMK/ MAN dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
7. Pengembangan sistem aplikasi SIAK versi 6 ke versi 7
8. Melaksanakan kerjasama dengan Lintas Sektoral sehingga dapat meningkatkan percepatan pelayanan publik khususnya Dokumen Kependudukan.
9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Lintas Sektoral.

3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. DINAS SOSIAL

Tabel 3.1.2.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat. civitas perguruan tinggi. dan pelaku industri di Kota Cilegon						
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						
	Proporsi partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62%	59,06%	95,26%		
	Persentasi Kelembagaan yang Aktif	38,74%	38,74%	100%		
	Cakupan posyantek Kelurahan Berkembang	18,6%	18.6%	100%	Rasionalisasi (Refocusing)	Untuk dianggarkan di tahun 2021
	Presentase swadaya masyarakat dalam pembangunan DPW Kel	7%	10,57%	150,94%		
Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG		18,048,000	17,348,000	96.12	Rasionalisasi Anggaran (Refocusing untuk penanganan Covid)	
	-Terlaksananya Lomba Cipta Inovasi TTG ke-14 bagi Umum	0	0	0.00		
	- Terlaksananya Gelar TTG XVI Tingkat Provinsi Banten	0	0	0		
	- Terlaksananya Gelar TTG Nasional XXII	0	0	0		
Penguatan Lembaga Posyantek		6,067,000	6,067,000	100.00	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 242.300.000	

Arah Kebijakan/ program/ Kegiatan	Uraian indikator Kinerja	Target Kinerja (Target Keuangan)	Rea Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	- Terlaksananya Rapat Lomba Pengelolaan Posyantek Kelurahan ke-2 Tingkat Kota Cilegon	2 kali	0	0.00		
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Posyantek	4 kali	1 kali	25.00		
	- Terlaksananya Monitoring Tim Kota ke Posyantek Kelurahan	16 kelurahan	7 kelurahan	43.75		
Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan		212,433,000	205,503,000	96.74		
	- Terlaksananya Lomba RT/RW	8 kecamatan	5 kecamatan	62.50		
	- Terlaksananya Bimtek bagi RT/RW	43 kelurahan	43 kelurahan	100.00		
Pendampingan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel)		38,724,000	38,724,000	100.00		
	- Pendampingan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW/Kel)	43 kelurahan	43 kelurahan	100.00		

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari 4 indikator dengan rincian sebagai berikut :

Target dan Realisasi 2020 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Presentase swadaya masyarakat dalam pembangunan DPW Kel	7	10,57	150,94
2	proporsi partisipasi masyarakat terhadap Pemanfaatan Teknologi TepatGuna	62	59,06	95,26

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
3	Persentase Posyantek Kelurahan Berkembang	18,6	18,6	100
4	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan aktif	38,74	38,74	100

Pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Adanya refocusing anggaran menyebabkan perubahan perjanjian pada program pemberdayaan masyarakat kelurahan, adapun indikator pada program ini:

- 1. Presentase swadaya masyarakat dalam pembangunan DPW Kel**, realisasi indikator ini sebesar 10,57 % dari target 7% sehingga pencapaian kinerja sebesar 150,94%

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase swadaya masyarakat dalam pembangunan DPW Kel} &= \frac{\text{jumlah dana swadaya masyarakat melalui DPW Kel}}{\text{jumlah Dana DPW Kel}} \times 100\% \\
 &= \frac{729.532.540}{6.904.885.342} \times 100\% \\
 &= 10,57\%
 \end{aligned}$$

Capaian indikator melebihi dari target akhir RPJM 10,57 % dari target akhir 2021 sebesar 10%.

- 2. Presentase partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan TTG**, realisasi indikator ini sebesar 59,06 % dari target RPJMD sebesar 62% sehingga pencapaian kinerja sebesar 95,26%

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase Kelompok masyarakat terhadap pemanfaatan TTG} &= \frac{\text{jumlah TTG yang di}}{\text{jumlah alat TTG yang ada}} \times 100\% \\
 &= \frac{163}{276} \times 100\% \\
 &= 59,06\%
 \end{aligned}$$

Terdapat 110 unit alat Teknologi Tepat Guna yang dalam keadaan rusak dan 3 unit hilang.

3. **Presentase posyantek berkembang**, realisasi indikator ini sebesar 18,6 % dari target 18,6% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100% Indikator ini didukung oleh kegiatan Penguatan lembaga Posyantek.

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase posyantek berkembang} &= \frac{\text{jumlah Posyantek berkembang}}{\text{jumlah Posyantek}} \times 100\% \\
 &= \frac{8}{43} \times 100\% \\
 &= 18,6\% \\
 \text{Pencapaian kinerja tahun 2019} &= (18,6/18,6) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

4. **Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**, realisasi indikator ini sebesar 38,74% dari target 138,74% sehingga pencapaian kinerja sebesar 100% merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mandiri terhadap jumlah lembaga kemasyarakatan.

Presentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	= $\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mandiri}}{\text{jumlah lembaga kemasyarakatan}} \times 100\%$
	= $\frac{129}{333} \times 100 \%$
	= 38,74 %
Pencapaian kinerja tahun 2020	= $(38,74/38,74) \times 100\%$
	= 100 %

Keberhasilan indikator ini adanya keterlibatan lembaga kemasyarakatan melalui program Dana Pembangunan Wilayah kelurahan (DPWKel) serta adanya kegiatan workshop mengenai sinergitas kelembagaan/ LPM dengan RT/RW.

PERMASALAHAN

1. Masih lemahnya koordinasi dengan lembaga kemasyarakatan.
2. Pembentukan Posyantek aktif sudah terbentuk di 43 kelurahan dan 8 kecamatan, akan tetapi masih terdapat Posyantek yang ada belum menjadi posyantek mandiri.

SOLUSI :

1. Meningkatkan penguatan lembaga kemasyarakatan baik melalui DPW Kel maupun Rapat-rapat koordinasi
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya posyantek, serta perlunya pembinaan dan monitoring bagi lembaga posyantek

3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA DAN UPTD KELUARGA BERENCANA

1.3 Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk)

Arah Kebijakan/ Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk						
Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk		9.346.633.075	9.186.491.444	98.29%		
	Cakupan Klasifikasi Posyandu Mandiri, Purnama, Pratama	381 Posyandu	381 Posyandu	100%		
Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri		6.150.370.999,-	6.150.370.999,-	100%		
	Terselurkannya Operasional Kader Cilegon Mandiri	2.550 Kader	2.550 Kader	100%		
Penguatan Kelembagaan Posyandu		Rp. 699.015.130,-	Rp. 561.887.000,-	80,38%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 839.853.130	
	terselenggaranya Kegiatan Penguatan Kelembagaan posyandu	381 Posyandu	381 Posyandu			
Pembinaan Posyandu		Rp. 435.000,-	Rp. 435.000,-	100%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid19, dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 53.060.000	
	Terbinanya Kader Posyandu	1855 Kader	1855 Kader	100%		
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)		Rp. 1.384.288.000,-	Rp. 1.369.834.798,-	98.96%		

Arah Kebijakan/ Program/Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5	5	100%		
Jambore Kader Posyandu		Rp. 1.079.309.600,-	Rp. 1.072.274.600,-	99.35 %		
	Terlaksananya Kegiatan Jambore Kader Posyandu	2.550 Kader	2.550 Kader	100%		
	Terlaksananya Pengadaan Seragam Kader	1	1	100%		
Pelatihan KIP Konseling dan Pengelola Program KB		Rp 11.730.000,-	Rp 11.730.000,-	100%	Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid19 pada saat anggaran sudah terserap sebesar 15,64% (Rp. 11.730.000)	
	Teralaksananya Pelatihan KIP Konseling KB dalam Pelaksanaan Program KB	280 Kader	0	0%		

Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

a. Cakupan Klasifikasi Posyandu Mandiri, Purnama, Pratama

Kegiatan pembinaan posyandu adalah menjelaskan tentang klasifikasi posyandu yang berjumlah 381 posyandu yang ada di Kota Cilegon.

Cakupan Klasifikasi Posyandu Pratama, Madya, Purnama, Mandiri adalah atas dasar yang digunakan sebagai penyaring atau penentu tingkat kemandirian Posyandu. Posyandu dapat digolongkan menjadi 4 Tingkatan. Intervensi untuk masing – masing tingkatan tentu saja tidak sama. Adapun Intervensinya yaitu :

- Posyandu Tingkat Pratama** adalah Posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan dinilai gawat, sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi. Tahun 2020 di Kota Cilegon terdapat Posyandu Pratama 10
- Posyandu Tingkat Madya** adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 Kali Pertahun, dengan rata rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih atau Kelestarian kegiatan posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Tahun 2020 di Kota Cilegon terdapat Posyandu Tingkat Madya (tidak ada).
- Posyandu Tingkat Purnama** adalah Posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali pertahun, rata rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih atau program tambahan sederhana menuju tingkat lebih baik. Tahun 2020 di Kota Cilegon terdapat Posyandu Tingkat Purnama 239 Posyandu

- iv. **Posyandu Tingkat Mandiri** adalah Posyandu ini sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan Program utama sudah baik. Tahun 2020 di Kota Cilegon terdapat Posyandu tingkat mandiri 132 Posyandu.

POSYANDU SE KOTA CILEGON TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH POSYANDU	TINGKATAN POSYANDU				KET
			PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI	
1.	Kecamatan Cilegon	38	0	0	21	17	
2.	Kecamatan Purwakarta	40	0	0	29	11	
3.	Kecamatan Pulomerak	55	0	0	33	22	
4.	Kecamatan Grogol	39	0	0	22	17	
5.	Kecamatan Ciwandan	43	0	0	31	12	
6.	Kecamatan Citangkil	76	10	0	40	26	
7.	Kecamatan Cibeber	48	0	0	38	10	
8.	Kecamatan Jombang	42	0	0	25	17	
JUMLAH		381	10	0	239	132	

Kegiatan Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk adalah :

3. Penguatan Kelembagaan Posyandu

Kegiatan kelembagaan posyandu pada tahun 2020 ini adalah untuk terselenggaranya kegiatan posyandu yang ada di Kota Cilegon dengan jumlah 381 posyandu. Dan Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Mengadakan rapat antar forum posyandu.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Posyandu.
- 3) Meningkatkan motivasi pengelolaan dalam pelayanan posyandu
- 4) Bintek KCM (Kader Cilegon Mandiri)

Adapun tujuannya adalah :

- ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan utamabaik Program KKBPK, Kesehatan, budaya maupun ekonomi di lingkungan masyarakat terkecil.

- ✓ Meningkatkan Sumber Daya Manusia lebih berkualitas sebagai tugas perbantuan dari pemerintahan tingkat Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kelurahan sesuai dengan wilayah masing-masing.
- ✓ Mengembangkan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan program lokal dilingkungannya.

Adapun anggaran untuk kegiatan yang mendukung kegiatan kelembagaan posyandu adalah sebesar Rp. 699.015.130,00 dan terealisasi Rp. 561.887.000,00 atau sekitar 80,38% dari anggaran.

4. Peningkatan Kapasitas Kader Cilegon Mandiri

Kegiatan kapasitas kader cilegon mandiri ini adalah kegiatan yang menyalurkan operasional untuk para kader yang kegiatannya semua sudah terintegrasi dengan kegiatan lainnya yang tersebar di 8 kecamatan di kota cilegon.

Adapun Jumlah Kader pada tahun 2020 ini adalah berjumlah 2550 kader.

Jumlah Kader Per Kecamatan Tahun 2020

1. Kecamatan Cilegon	: 246 Orang
2. Kecamatan Citangkil	: 420 Orang
3. Kecamatan Cibeber	: 353 Orang
4. Kecamatan Ciwandan	: 347 Orang
5. Kecamatan Pulomerak	: 352 Orang
6. Kecamatan Purwakarta	: 273 Orang
7. Kecamatan Jombang	: 259 Orang
8. Kecamatan Grogol	: 300 Orang

Dan operasional kader KCM ini diberikan setiap triwulan dengan menyerahkan laporan hasil posyandu setiap bulannya. Dan honor tersebut di distribusikan melalui rekening masing masing yang di transfer langsung oleh pihak Bank.

Adapun anggaran yang ada di kegiatan peningkatan kapasitas kader cilegon mandiri adalah Rp. 6.150.370.999,00 dan terealisasi Rp. 6.150.370.999,00 atau 100% dari anggaran.

3. Pembinaan Posyandu

Kegiatan pembinaan posyandu adalah menjelaskan tentang klasifikasi posyandu yang berjumlah 381 posyandu yang ada di kota cilegon.

Kegiatan pembinaan posyandu ini adalah kegiatan yang bertujuan membina para petugas atau kader posyandu sesuai petunjuk atau teknis yang lebih baik, dan kegiatan pembinaan posyandu ini dibantu oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Forum Kader Posyandu.

Anggaran yang ada pada kegiatan pembinaan adalah Rp. 435.000 dan terealisasi Rp. 435.000 atau 100 % dari anggaran.

4. Pelatihan KIP Konseling KB Bagi Pengelola Program KB

Kegiatan ini Melatih kader cilegon mandiri dan kader pos kb, Pos KB adalah perwakilan dari kader tingkat kelurahan yaitu berjumlah 180 kader atau pos kb.

Yang bertujuan :

- Terlaksananya pelatihan KIP/Konseling KB Bagi Pengelola Program KKBPK se-Kota Cilegon.
- Bertambahnya jumlah petugas/kader yang memiliki kemampuan dan keterampilan KIP/Konseling KB.
- Meningkatnya pengetahuan dan sikap positif peserta tentang Program KKBPK Tk. Kota Cilegon.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang memperlakukan keluarga dan masyarakat secara terhormat.
- Meningkatnya pengetahuan dan sikap positif peserta tentang alat/cara KB.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang komunikasi interpersonal.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang observasi dan memantapkan hubungan baik.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang mendengar dan bertanya.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang mengatasi rumor dan pengertian yang salah.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ber-KB.
- Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta tentang pengarahan kepada kelompok.

Anggaran yang dimiliki kegiatan ini adalah sebesar Rp.11.730.000 dan terealisasi Rp. 11.730.000 atau 100 % dari anggaran.

5. Jambore Kader Posyandu

Kegiatan jambore kader posyandu adalah kegiatan ceremony yang diadakan khusus untuk para kader KCM atau Kader Cilegon Mandiri yang melibatkan kecamatan, perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Cilegon yang bertujuan untuk mendukung atau mensupport kegiatan kader dimana kegiatannya sudah terintegrasi semua kegiatan, yang bertujuan untuk hidup lebih sehat keluarga dan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam jambore kader posyandu adalah:

1. Ceremony atau berkumpulnya kader yang berjumlah 2550 kader di alun-alun kota cilegon
2. Perlombaan
3. Pentas Seni
4. Menampilkan tentang beredukasi atau memberi penyuluhan ke masyarakat
5. Pemberian seragam pada kader yang berjumlah 2550

Adapun anggaran pada kegiatan jambore kader posyandu Rp. 1.079.309.600,00 dan terealisasi Rp. 1.072.274.600,00 atau sekitar 99.35 % dari anggaran.

6. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK

Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang merupakan anggaran Dak Non Fisk tahun atau anggaran APBN yang dikoordinasikan oleh BKKBN Prov. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Bantuan Operasional Penyuluhan yang dilaksanakan oleh UPTD KB
2. Bantuan Distribusi Alokasi
3. Bantuan Operasional Kampung KB
4. Bantuan Dukungan Manajemen
5. Bantuan Dukungan KIE

Dan kegiatan ini dilaksanakan antar lintas program yang dilaksanakan selama satu tahun Adapun anggaran BOKB atau DAK Non Fisik adalah Rp. 1.384.288.000,00 dan terealisasi Rp. 1.369.834.798,00 atau 98.96 %.

7. Pembinaan Kader KCM UPT KB

Kegiatan Pembinaan kader KCM UPT KB adalah kegiatan atau anggaran yang ada pada upt kb DP3AKB yang mendukung untuk kegiatan dan operasional yang ada di UPT KB. Kegiatan yang dilaksanakan adalah biaya operasional , Rapat koordinasi lintas kecamatan dan kelurahan, Penyuluhan dan Pembinaan yang dilaksanakan dimasing – masing wilayah.

Adapun anggaran yang ada Rp. 21.484.346,00 dan terealisasi Rp. 19.960.046,00 atau 92,91%.

1.4 Program Bina Keluarga Sejahtera

Tabel 3.1.2.8a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Program Bina Keluarga Sejahtera)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga						
Program Bina Keluarga Sejahtera		527.429.184	466.480.500	88.44%		
	Prevalensi Peserta KB Aktif	67,00%	79.26%	118.2%		
	Presentasi Peserta KB Baru	100%	90.32%	90.32%		
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun 3,5%	3,5%	1,23%	164,85%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif MKJP	13,00%	15.7%	120%		
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	5,00%	8.65%	173%		
	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif 65%	67,00%	79.26%	118.2%		
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB 70%	70%	121.0%	172%		
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB 87%	87,00%	92.5%	106%		
	Cakupan Pembinaan Rumah Data di 9 Kampung KB	9 Lokasi	9 Lokasi	100,00%		
	Terbinanya Anggota PPEK 80 Orang di Kota Cilegon	100%	100%	100,00%		
Pelayanan KB		205.000.000,00	146.759.500,00	71,59%	Kegiatan Pelayanan KB MOW tidak dilaksanakan karena pagu anggaran tidak sesuai dengan harga di lapangan	
	Meningkatnya Pencapaian Akseptor KB Baru dan Pembinaan Akseptor KB Aktif	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100%		
Pelayanan KB Keliling		104.165.166,00	104.000.000,00	99,84%		
	Terlaksananya Pelayanan KB Mobile	43 Zona	43 Zona	100%		
	Meningkatnya Kegiatan Pelayanan KB di Tingkat Kota / Kecamatan dan KKB	100	100	100%		
Penyelenggaraan Hari Keluarga		1.990.018,00	1.990.000,00	100,00%	Kegiatan Penyelenggaraan Hari Keluarga tidak dilaksanakan sesuai	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					rencana karena di rasionalisasi untuk dana covid-19 tahun 2020	
	Meningkatnya Pemahaman Keluarga Tentang Program KKBP	1200 (Keluarga dan Instansi Terkait)	1200 (Keluarga dan Instansi Terkait)	100%		
Kampung KB		118.452.000,00	115.950.000,00	97,89%	Kegiatan Temu Pengelola Kampung KB tidak dilaksanakan karena di rasionalisasi untuk dana covid-19 tahun 2020	
	Terlaksananya Kegiatan Kampung KB	100%	100%	100%		
Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)		57.822.000,00	57.781.000,00	99,93%	Kegiatan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja tidak dilaksanakan karena di rasionalisasi untuk dana covid-19 tahun 2020	
	Meningkatnya Pengetahuan Reproduksi Pada Anggota Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa dan Terpilihnya Duta GenRe Tingkat Kota Cilegon	100	100	100%		
Penguatan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%		
	Aktifnya peran serta saka kencana Pramuka dalam program KB	100%	100%	100%		

Kegiatan Program Bina Keluarga Sejahtera

a. Prevalensi Peserta KB Aktif

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang istri atau suaminya masih menggunakan alat, obat, atau cara kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan. Angka laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai prosentase dari penduduk dasar Laju pertumbuhan.

Prevalensi Peserta KB Aktif adalah jumlah Peserta Aktif dibanding jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dikali 100%.

Adapun analisa dari Prevalensi KB Aktif tahun 2020 adalah Jumlah Peserta Program KB Aktif sebanyak 60.184 orang dibanding Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 75.931 orang sehingga DP3AKB mendapatkan capaian 79.26 % artinya pencapaian Peserta KB Aktif lebih baik karena lebih dari pada target (67%)

b. Presentasi Peserta KB Baru

Peserta KB Baru adalah Peserta KB yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi Peserta KB setelah melahirkan atau keguguran Presentasi KB Baru adalah jumlah Peserta KB Baru dibanding jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) dikali 100%.

Pada tahun 2020 jumlah Peserta KB Baru adalah 7.218 orang dari jumlah Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) sebesar 7.992 orang. Sehingga Presentasi KB Baru DP3AKB Kota Cilegon mencapai 90.32 %.

Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

c. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3.5 %

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 -35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang isterinya berusia dibawah 20 tahun.

Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan. Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

Rumus :

Persentase cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun.

Σ PUS yang usia isterinya < 20 tahun

----- x 100% = ...%

Σ PUS yang usia isterinya 15-49 tahun

Keterangan: Pembilang : Jumlah PUS yang usia isterinya < 20 tahun.

Penyebut : Jumlah PUS yang usia isterinya 15 – 49 tahun.

Satuan Indikator : Persentase (%)

Pada tahun 2020 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun sebanyak 941 orang terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 75.931 orang. Target yang ditetapkan adalah 3,5% dan capaian kinerja sebesar 1,23 %. Dengan demikian Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun telah berhasil mencapai target, , bahkan melebihi target 3,5%. Sehingga capaian kinerja ini adalah 164,85%. Maka dengan persentase capaian rendah maka semakin baik, adapun keberhasilan ini didukung oleh kegiatan PIK.R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) dan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

d. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif MKJP

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaten/ Kota dihitung/ diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

Rumus :

Jumlah Peserta KB Aktif

Sasaran PA/PUS = x 100 % = ...%

Jumlah PUS

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
- Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- Satuan Indikator : Presentase (%)

Pada tahun 2020 jumlah PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi MKJP sebanyak 11.948 orang terhadap jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 75.931 orang. Target yang ditetapkan adalah 13,00% dan realisasi 15.7 %. Dengan demikian Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif MKJP telah berhasil mencapai target.

Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

e. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut Unmet Need dikarenakan:

1. ingin anak ditunda
2. tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.

Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

Rumus :

$\sum \text{PUS (tak KB) iat+tial}$

Persentase Unmet Need = ————— x 100 %

$\sum \text{PUS 15-49 th}$

Keterangan :

- Pembilang : $\sum \text{PUS (tak KB) iat+tial}$ = Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- Penyebut : $\sum \text{PUS 15-49 th}$ = Jumlah PUS di wilayah tersebut
- Satuan Indikator : Persentase (%)

Pada tahun 2020 Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 6.566 orang terhadap Jumlah PUS di wilayah tersebut sebanyak 75.931 orang sehingga realisasi sebesar 8.65 % dan yang ditargetkan adalah 5,00%. Capaian tersebut masih jauh dari target. Artinya masih banyak Pasangan Usia Subur yang ingin mempunyai anak lebih dari dua dan masih banyak PUS yang ingin mempunyai anak segera.

Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

f. Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaten/Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

Rumus :

Jumlah Peserta KB Aktif

Sasaran PA/PUS = $x 100 \% = \dots\%$

Jumlah PUS

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
- Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

- Satuan Indikator : Presentase (%)

Pada tahun 2020 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif sebanyak 60.184 orang terhadap Jumlah PUS di wilayah tersebut sebanyak 75.931 orang dengan realisasi 79.26 % .

Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)

g. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

Rumus:

Anggota BKB ber KB

Cakupan Anggota = $x 100 \% = \dots\%$

BKB ber KB Seluruh PUS anggota BKB

Keterangan:

- Pembilang : Anggota BKB ber-KB
- Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB
- Satuan Indikator : Persentase (%)

Pada tahun 2020 Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebanyak 3.338 orang dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di kelompok BKB sebanyak 2.758 orang. Sehingga persentasenya adalah 121.0 %, sudah berhasil lebih dari target sebesar 70,00%.

H. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera dan kemandirian ber-KB.

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta sebagai upaya peningkatan kemandirian ber-KB.

Rumus :

Anggota UPPKS ber KB

Cakupan Anggota = $\frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Seluruh anggota UPPKS}} \times 100 \%$

UPPKS ber KB mandiri Seluruh anggota UPPKS peserta KB

Keterangan :

- Pembilang : Anggota UPPKS ber KB mandiri
- Penyebut : Seluruh anggota UPPKS peserta KB
- Satuan Indikator : Persentase (%)

Pada tahun 2020 Cakupan Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-KB sebanyak 187 orang dari Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 202 orang. Sehingga persentasenya adalah 92.5 %, dari target 87,00% .

Keberhasilan ini didukung adanya pembinaan dan penyuluhan mengenai program KB, pembinaan TRIBINA (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

I. Cakupan Pembinaan Rumah Data di 9 Kampung KB

Kampung KB adalah satuan Wilayah setingkat RW atau yang setara dengan kriteria tertentu diaman terdapat keterpaduan program pembangunan antara Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta pembanguna sektor terkait dalam upaya cakupan pembinaan rumah data di 9 (sembilan) kampung KB 1 Kelurahan di setiap Kecamatan .

Tujuan Kampung KB adalah cakupan pembinaan rumah data di 9 (sembilan) kampung KB Kelurahan di setiap Kecamatan melalui Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Di Kota Cilegon terdapat 9 (sembilan) Kampung KB yang semuanya sudah memiliki rumah data.

- J. Terbinanya Anggota PPEK 80 Orang di Kota Cilegon
Anggota Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga (PPEK) di Tahun 2020 masih dibina 80 orang di Kota Cilegon.

Kegiatan Program Bina Keluarga Sejahtera

1. Pelayanan KB

Dalam pelaksanaannya pengertian Program Keluarga Berencana telah meluas dan bergeser dari pelayanan Kontrasepsi menjadi pelayanan Keluarga Sejahtera dan ke kegiatan yang berhubungan dengan upaya mewujudkan Keluarga yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan nuansa otonomi daerah dimana kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama dan Keluarga Berencana merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program di daerah, maka perlu dikemukakan bahwa program KB secara langsung memiliki banyak manfaat bagi individu, keluarga maupun masyarakat, serta pemerintah daerah baik yang sifatnya jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam peningkatan kesejahteraan. Dalam program KB ada hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua yaitu *hak kesehatan reproduksi* bagi setiap orang, dimana seseorang berhak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Reproduksi sehingga ia mempunyai kondisi sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara sempurna, serta bukan hanya terhindar dari kesakitan dan kecacatan, baik pada alat, sistem, fungsi, dan proses reproduksi sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara biologis, sosial dan ekonomis.

Tujuan Umum Pelayanan KB adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Sedangkan tujuan Khususnya yaitu Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, Menurunkan TFR (Total Fertility Rate), Cakupan PA/PUS berkisar 70 – 74 %, Menurunkan AKB dan AKI, Menurunnya Angka Usia Pertama Perkawinan, Menurunnya Un Meet Need, Tertcapainya peserta KB Baru, Meningkatkan wawasan kaum pria tentang program KB khususnya KB Pria dan Meningkatkan peran serta Pria dalam ber KB.

Manfaat Pelayanan KB untuk meningkatkan pelayanan KB terutama KB MKJP agar peserta KB lebih berkualitas. Dampak Kegiatan Pelayanan KB yaitu Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB dapat terlayani sesuai dengan kebutuhan kontrasepsinya. Dengan sasaran dari Pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur. Meningkatnya kesertaan Pasangan Usia Subur untuk ber KB, Tercapainya PPM Peserta KB baru dan Menurunnya Un Meet Need atau Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani ber KB.

Pada tahun 2020 ini pelayanan KB masih dilakukan di 43 Kelurahan yang dibantu oleh Faske Faskes yang ada di setiap kelurahan dan dibantu oleh tim medis yang profesional. Dan Pelayanan kb yang melibatkan even even tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi, maka dari itu anggaran

yang ada tidak terealisasi diatas 90 %. Adapun anggaran tahun 2020 kegiatan pelayanan kb Rp. 205.000.000,00 dan teralisasi Rp. 146.759.500,00 atau 71,59 %.

2. Pelayanan KB Keliling

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB Keliling adalah memperluas jangkauan program KB terutama daerah-daerah terpencil dengan mendatangi tempat/ lokasi calon peserta keluarga berencana dan memberikan pelayanan kontrasepsi di tempat. Sasaran Kuantitatif adalah yang menjadi sasaran dalam kegiatan Pelayanan KB di Kota Cilegon Manfaat Kegiatan Pelayanan KB Keliling yaitu meningkatkan pencapaian peserta KB baru, meningkatkan kesertaan ber KB MKJP, mendekatkan pelayanan KB Kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan KB keliling ini di dukung oleh mobilitas yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana seperti MOYAN (Mobil untuk Pelayanan), Mobil Penumpang Akseptor, MUPEN (Mobil Penerangan).

Adapun anggaran yang ada pada kegiatan pelayanan kb keliling Rp. 104.165.166,00 dan terealisasi Rp. 104.000.000,00 atau 99,84 %.

3. Penyelenggaraan Hari Keluarga

Keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam penyemaian nilai luhur bangsa dan bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga keluarga indonesia akan terbentuk keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga tangguh dan mandiri. Penduduk merupakan modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan suatu bangsa dan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan yang seutuhnya merupakan motivasi utama pemerintah, terutama pemerintah Kota Cilegon untuk membantu dan mendukung program pembangunan khususnya pembangunan dibidang kependudukan dan program keluarga berencana yang secara menyeluruh mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan bangsa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan masyarakat adil dan makmur di Kota Cilegon.

Pada tahun 2020 untuk peringatan Hari Keluarga Nasional, Tk. Kota dan tk.Provinsi ditiadakan. Dan anggaran terjadi rasionalisasi.

Adapun anggaran yang ada untuk kegiatan penyelenggaraan hari keluarga Rp. 1.990.018,00 dan teralisasi Rp.1.990.000.

4. Kampung KB

Kampung KB, akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung Kbbertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara memlalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Program Kampung KB merupakan salah satu kebijakan publik yang dilakukan Pemerintah melalui BKKBN. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam pogram atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan public tersebut.

Dengan adanya Kampung Kb dapat memberikan kontribusi dan dukungan dalam membangun dan mengembangkan kampung-kampung yang ada di Kota Cilegon supaya lebih baik. Selain itu dengan terbentuknya Kampung KB ini maka seluruh Instansi baik Swasta maupun Pemerintah dapat terlibat dan berkontribusi memberikan dukungan dalam mengembangkan Kampung-Kampung yang ada di Kota Cilegon dengan perencanaan menyeluruh dan terpadu.

Adapun 9 (Sembilan) Kampung KB di Kota Cilegon yaitu :

1. Kecamatan Cibeber , terdapat Kampung KB (Cikerai)
2. Kecamatan Cibeber , terdapat Kampung KB (Cikerut)
3. Kecamatan Cilegon, terdapat Kampung KB (Bagendung)
4. Kecamatan Jombang, terdapat Kampung KB (Panggung Rawi)
5. Kecamatan Purwakarta, terdapat Kampung KB (Tegal Bunder)
6. Kecamatan Ciwandan, terdapat Kampung KB (Kepuh)
7. Kecamatan Grogol, terdapat Kampung KB (Rawa Arum)
8. Kecamatan Pulomerak, terdapat Kampung KB (Taman Sari)
9. Kecamatan Citangkil, terdapat Kampung KB (Deringo)

Tujuan kegiatan adalah Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dan Tujuan Khusus adalah meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, Pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, Keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern. Meningkatkan ketahanan keluarga mealalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan informasi dan Konseling(PIK) Remaja. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS. Meningkatkan KIE program KB kepada sasaran dan masyarakat. Meningkatkan segala informasi yang berhubungan dengan KB tepat sasaran dan lebih cepat sampai ke masyarakat, sehingga yang menjadi program pemerintah dapat dengan segera dicapai.

Adapun anggaran kegiatan kampung kb Rp. 118.452.000,00 dan terealisasi Rp. 115.950.000,00 atau 97,89 %.

5. Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)

Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah remaja yang berkaitan dengan praktek kehidupan dalam keluarga. Dengan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang kehidupan berkeluarga sehingga para remaja mempunyai pengetahuan yang cukup tentang konsep kehidupan berkeluarga. Informasi ini disertai dengan contoh-contoh konkrit dari pasangan

suami isteri yang telah berhasil dalam membina kehidupan berkeluarga. Dengan demikian diharapkan para remaja akan mempunyai gambaran yang tidak saja konseptual, tetapi juga operasional dalam arti para remaja menjadi lebih yakin dengan kebenaran konsep berkeluarga yang dibacanya, karena pada saat yang sama mendapat informasi dengan contoh-contoh konkrit dari konsep kehidupan berkeluarga. Rendahnya pemahaman dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja: pernikahan usia muda, serta dampak negative pergaulan bebas, Remaja putus sekolah: factor ekonomi, pergaulan, dan faktor mental (kesadaran), Kenakalan remaja: miras, tawuran remaja, Pengangguran: SDM rendah, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya pelatihan kerja, rendahnya keahlian (skill) yang dimiliki. Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas maka dibentuklah PIK-KRR yang diharapkan kiprahnya dalam pemberdayaan remaja. Pembahasan berikut adalah tentang aktifitas yang telah dilakukan PIK-KRR dalam upayanya untuk memberdayakan remaja.

Jumlah remaja - mahasiswa sangat besar ± 64 Juta (27,6% dari jumlah penduduk). Besarnya arus globalisasi informasi yang tidak terkendali berdampak positif dan negative bagi remaja dan mahasiswa, Mengakibatkan perilaku hidup tidak sehat dan tidak berakhlak remaja - mahasiswa Indonesia. Perilaku remaja - mahasiswa Indonesia seperti ini, mempengaruhi program kkb dan kualitas bangsa 10-20 tahun kedepan. Perkembangan dunia yang kian mengglobal, menjadikan perubahan-perubahan besar terhadap perilaku remaja, namun perubahan tersebut lebih cenderung mengarah pada kegiatan negative dibanding positifnya. Masalah remaja yang timbul biasanya berkaitan dengan masalah seksualitas (Hamil di luar nikah, aborsi), AIDS, penyalahgunaan Napza dan sebagainya. Remaja dalam kondisi ini tentu saja membutuhkan penanganan serta informasi seluas-luasnya mengenai kesehatan reproduksi, pentingnya menata masa depan dengan baik lewat meninggalkan perilaku yang tidak bermanfaat dan merusak masa depan remaja itu sendiri. Menjalani kehidupan remaja yang jauh dari perilaku sex bebas, pernikahan dini dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang serta menjauhkan diri dari bahaya AIDS tentulah membutuhkan perhatian kita semua. Remaja tidak bias berjalan sendirian tanpa pendampingan orang tua, masyarakat lingkungan serta negaranya.

Tujuan Umum Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) Upaya untuk mengatasi masalah-masalah remaja yang berkaitan dengan praktek kehidupan dalam keluarga Dengan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang kehidupan berkeluarga sehingga para remaja mempunyai pengetahuan yang cukup tentang konsep kehidupan berkeluarga. Informasi ini disertai dengan contoh-contoh konkrit dari pasangan suami isteri yang telah berhasil dalam membina kehidupan berkeluarga, dengan adanya Program GenRe sebagai informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik, menyiapkan pribadi yang matang dalam membangun keluarga yang harmonis, memantapkan perencanaan berkeluarga. Memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak (healthy and ethical life behaviors) untuk mencapai ketahanan remaja (adolescent resilience) sebagai dasar mewujudkan Generasi Berencana.

Adapun manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota PIK R, Pembina dan Guru BK dalam Program GenRe. Meningkatnya kinerja anggota PIK R, Pembina dan Guru BK dalam melaksanakan tugasnya.

Meningkatnya pengetahuan anggota PIK R, Pembina dan Guru BK dalam pemeliharaan Program GenRe. Terdata dan terkontrol perubahan jumlah ataupun anggota kelompok setiap bulannya di PIK R Kota Cilegon.

Adapun anggaran yang ada Rp57.822.000,00 dan terealisasi Rp..99.93%.

6. Penguatan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka

Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan kaum muda menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan berperan serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, perlu membekali anggotanya dengan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kependudukan dan keluarga berencana sebagai salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Salah satu upaya untuk membentuk tenaga kader pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Menanamkan nilai-nilai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui kegiatan kepramukaan yang dimulai sejak usia dini (Pramuka Siaga) akan membantu percepatan proses kesadaran, kemampuan, kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup berwawasan kependudukan. Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di lingkungan Gerakan Pramuka, perlu dibentuk Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana yang merupakan sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sasaran Kuantitatif dari Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Saka Kencana Pramuka adalah anggota saka kencana pramuka sebanyak 60 Orang di Kota Cilegon. Dan Saresehan Saka Kencana Pramuka sebanyak 20 Orang Peserta. Dan sasaran kualitatif yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan saka kencana pramuka dalam Program KKBPK, adanya kepuasan peserta /anggota kelompok kegiatan dalam memperoleh informasi tentang Program KKBPK, meningkatnya Partisipasi murid atau mahasiswa dalam kegiatan Saka Kencana Pramuka di Sekolahannya.

Adapun manfaat atau hasil yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan anggota saka kencana pramuka dalam Program KKBPK. Meningkatnya kinerja anggota anggota saka kencana pramuka dalam melaksanakan tugasnya.

Meningkatnya pengetahuan anggota saka kencana pramuka dalam pemeliharaan Program KKBPK. Terdata dan terkontrol perubahan jumlah ataupun anggota kelompok setiap bulannya di Saka Kencana Pramuka Kota Cilegon.

Untuk tahun 2020 ini pembinaan saka kencana pramuka dilakukan kepada para Pembina berjumlah 75 orang.

Adapun anggaran yang ada Rp. 40.000.000 dan terealisasi Rp.40.000.000 atau 100 %. Dengan demikian total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Pagu Rp. 23.730.193.846 dan realisasi Rp. 22.826.248.468 atau 96.19 % dari total anggaran.

Dengan demikian total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Pagu Rp. 23.730.193.846 dan realisasi Rp. 22.826.248.468 atau 96.19 % dari total anggaran.

Permasalahan

1. Belum optimalnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam membantu program bangga kencana (Pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana)
2. Kurangnya petugas PLKB dan PKB di Kota Cilegon (43 Kelurahan : 3 PKB , 8 PLKB), dari target (1 Kelurahan:1 PLKB/PKB). Masih kurang 32 tenaga PKB/PLKB di kota cilegon.
3. Belum memiliki gudang Alokon (Alat dan Obat Kontrasepsi) yang representatif

Solusi

1. Meningkatkan peran TOGA / TOMA melalui pelatihan dan sosialisasi program bangga kencana, dan menggerakkan TOGA/TOMA berperan aktif untuk membangun kampung KB
2. Mengusulkan untuk perekrutan tenaga PLKB ke BKPP Kota Cilegon dan meminta dukungan tenaga PKB ke BKKBN Perwakilan Provinsi Banten
3. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan gudang alokon yang representatif.

3.1.2.9 Perhubungan

A. DINAS PERHUBUNGAN, UPTD PENGELOLAAN SARPRAS PERHUBUNGAN, UPTD PARKIR

Tabel 3.1.2.9a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		3.503.386.307	3.337.401.107	95,26%		
	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral	100%	90%	90%		
	Presentase Sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	55%	55%		
	Tingkat disiplin dan kinerja aparatur	100%	98,82%	98,82%		
	Kesesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan cash budget (Anggaran kas)	100%	84,50%	84,50%		

Ketercapaian program Dukungan pelayanan Pemerintahan terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 100 %, telah tercapai realisasi sebesar 90 % dengan capaian 90 %, tidak terpenuhinya target dikarenakan adanya kegiatan yang di refocusing sehingga ada beberapa data dokumen yang tidak terpenuhi.

2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 100 %, telah tercapai realisasi sebesar 55% dengan capaian 55%. pada tahun 2019 dengan target 100%, realisasi 65 % capaian 65 %, disini terlihat adanya penurunan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada tahun 2020, dikarenakan tidak terpenuhinya target dikarenakan adanya aset di Dinas Perhubungan yang sudah tidak layak pakai / Rusak.

3. Tingkat disiplin dan kinerja aparatur

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 100 %, telah tercapai realisasi sebesar 98.82% dengan capaian 98.82%. pada tahun 2019 dengan target 100%, realisasi 92 % capaian 92 %, disini terlihat adanya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur pada tahun 2020.

4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cas budget (anggaran kas)

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 100 %, telah tercapai realisasi sebesar 88,02% dengan capaian 88,02%. pada tahun 2019 dengan target 100%, realisasi 82,25 % capaian 82,25 %, disini terlihat adanya peningkatan Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cas budget pada tahun 2020.

B.1 Permasalahan

1. Belum optimalnya SDM yang tersedia di bidang Perhubungan pada semua program.
2. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana
3. Banyaknya asset berupa kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai dan tidak efisien untuk dilakukan pemeliharaan.
4. Banyaknya asset yang di hapuskan pada dinas perhubungan
5. Belum optimalnya pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan

B.2 Solusi

1. Menambah dan meningkatkan kapasitas SDM bidang perhubungan.
2. Melakukan penghapusan Aset yang sudah tidak layak pakai dan mengganti dengan asset yang baru.
3. Melakukan identifikasi kebutuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana perhubungan sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan regulasi.
4. Menambah pagu anggaran sesuai kebutuhan

Tabel 3.1.2.9b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
perhubungan (kelayakan angkutan jalan. halte penerangan jalan umum. dsb)						
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan		13.829.243.000,00	12.085.733.356,00	87,39%		
	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Pengujian Kendaraan	77%	79,50%	103,24%	Waktu penyelesaian Proses Pengujian Kendaraan Dan Tarif/Biaya Pengujian Kendaraan mendapat respond kurang baik dari masyarakat masih lama dan biaya tinggi. Blue -E bukti uji lulus electronic 2021 sudah menjalankan secara online untuk pengujian dan pembayaran (BJB) sudah tidak ada secara tunai. Tarif retribusi sudah ditetapkan secara nasional yang harus diikuti oleh daerah akan tetapi untuk denda diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Kota Cilegon memiliki intensitas Pengujian yang sangat tinggi yang pada saat ini akreditasi yang dimiliki dishub Kota cilegon Type B bersyarat. Untuk menaikan akreditasi menjadi Type A diperlukan perluasan lahan/jalur pengujian.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pengujian kendaraan seperti lahan/jalur pengujian.
	Tersedianya Halte yg Telah di Layani Angkutan Umum	67%	80%	119,40%	Jumlah halte yang sudah terbangun sampai 2020 sebanyak 12 lokasi (RSUD, SRIWI yang dibangun 2020)	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Cakupan Fasilitas Penerangan Jalan Umum	65,16%	63,28%	97,11%	Masih terbatasnya peralatan dan personel (Mobil Crane untuk Pemeliharaan PJU) penunjang kegiatan Penerangan Jalan Umum sehingga pemeliharaan belum optimal	Peningkatan Sarana Prasarana (Harus menyediakan mobil pickup yang dilengkapi crane dan menambah kendaraan Mobil Crane PJU) Dan Peningkatan/penambahan SDM yang sesuai dengan kompetensi/keahlian dibidang PJU
Pembangunan POS DISHUB		3.111.500	3.111.500	100%		
	Terlaksananya pembangunan POS Dishub	2	2	100%	Catatan Target 5 yang sudah terbangun 2, 2021 akan dibangun 2 pos dishub cikerai dan simpang terminal seruni	Penambahan Pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor		74.715.000	74.430.000	99,62%		
	tersedianya alat uji kendaraan bermotor memadai	8	8	100%	Refocusing	
Rehabilitasi Halte		4.645.000	4.645.000	100%	Retensi kegiatan 2019	Penambahan pagu anggaran sesuai kebutuhan
	Terlaksananya Rehabilitasi Halte	2	2	100%		
Rehab Gedung Pengujian		200.000.000	197.271.475	98,64%	Rehab Gedung Pengujian terdiri dari penambahan Gedung pelayanan pengujian dengan luasan 50m2	Gedung belum selesai direhab sisi kiri belum dikerjakan sesuai dengan dokumen DED yang akan dikerjakan pada tahun 2021. Tujuan rehab ini untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan Gedung

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						pengujian yang ditargetkan selesai pada tahun 2021
	Jumlah gedung pengujian yang di rehabilitasi	1	1	100%		
Pemasangan dan Pengadaan Tiang PJU		100.000.000	74.167.000	74,17%		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan PJU Bonakarta Masigit dan PJU Utara Selatan	2	2	100%	Penyusunan dokumen perencanaan PJU Bona karta dan 8 kecamatan. Anggaran penyambungan yang tidak terserap	
Pemeliharaan PJU		263.275.000	223.315.946	84,82%	Pembelian Lampu LED 120 Wat sebanyak 20 Unit untuk pemeliharaan lampu LED di JLS	
	Terlaksananya Pemeliharaan PJU	50	50	100%		
Verifikasi Tagihan PJU		30.000.000	24.000.000	80,00%	Honor operasional untuk 3 bulan	
	Tersedianya Belanja Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan	3	3	100%		
Pembayaran Listrik PJU		15.801.422.514	12.669.454.638	80,18%	Ada beberapa id pelanggan yang masih pakai abodemen yang harus dirubah ke meterisasi	Melakukan revitalisasi jaringan PJU dan migrasi pembayaran system abonemen ke meterisasi.
	Masyarakat Kota Cilegon	380	380	100%		
Penunjang Pelayanan PJU		18.347.471	12.213.242	66,57%	1. Internet SMS Call center, Voucher pulsa buat sms center, untuk dipastikan kenapa anggaran tidak terserap maksimal. 2. Kurangnya kendaraan operasional (Crane Skylife, bentor/cator dan	Penambahan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Mobil operasional kegiatan untuk monitoring dan pengawasan	
	ASN Bidang PJU	12	12	100%		
Pembangunan Halte		97.570.000	90.064.926	92,31%	Lokasi pembangunan halte di PCI, (ada Kegiatan pembangunan halte 2019 retensinya belum terbayar), retensi akan diajukan pada tahun 2021 Perubahan sampai dengan 2021 halte 13/15	
	terlaksananya pembangunan halte	1	1	100%		
Pemasangan Pagar Taman Layak Anak Terminal Seruni		1.154.500	1.154.500	100%		
	Terpenuhinya Kegiatan Pemasangan Pagar Taman Layak Anak Terminal Seruni	1	1	100%		
Sosialisasi Informasi Pelayanan PJU		36.290.000	29.150.000	80,33%		
	Terpenuhinya Informasi Pelayanan Pengaduan Penerangan Jalan Umum Kota Cilegon	51	51 (banner)	100%	Outputnya Banner Pengaduan PJU yang ditempatkan di Kelurahan dan kecamatan sekota cilegon, ada efisiensi anggaran karena harga dibawah DPA	
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Penerangan Jalan Umum		42.735.000	24.662.387	57,71%		
	Tersedianya Pemeliharaan dan Perijinan Rutin/Berkala	1	1	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kendaraan Dinas/ Operasional					
Pengadaan Kartu Uji Smart Card		31.000.000	24.147.000	77,89%	Sesuai PNPB 25rb DPA 30rb	
	Pengadaan Kartu Uji (Smart Card)	933	933	100%	Karena pembelian dalam satuan box, satu box berjumlah 100 smartcard	Permasalahan stock smartcard sudah habis sebelum tutup anggaran
			900(rapat)	96,46.(rapat)		
Pengadaan Aplikasi Pendukung SIM PKB		368.200.000	366.480.000	99,53%		
	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis computer	1	1	100%	Efisiensi dalam proses lelang (negosiasi harga), aplikasinya buat online pendaftaran sampai dengan pembayaran non tunai. Melalui link Ngekironline, pembayaran BJB, sesuai dengan perwal (minta dikirim)	
Peningkatan kapasitas pengujian kendaraan bermotor		106.200.000	105.400.000	99,25%	1. gedung pengujian Pengecatan ruang pengujian, dan sarana pendukungnya running text, kursi tunggu kursi tamu, meja pelayanan belanja sound system, pengadaan rambu traffic pos belanja seragam	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					lapangan pegawai, wallpaper. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pada Pengujian Kendaraan Bermotor (Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu).	

Ketercapaian program Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pengujian Kendaraan)

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 77 %, telah tercapai realisasi sebesar 79.5% dengan capaian 103%. pada tahun 2019 dengan target 75%, realisasi 79,7 % capaian 106,3 %.

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat kota Cilegon yang dilaksanakan oleh Tim Organisasi Setda Kota Cilegon dan Tim Surveyor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melakukan kegiatan pengumpulan data untuk menjamin validasi data yang diinput melalui Aplikasi SPSS, Jumlah Responden yang menjawab kuesioner sebanyak 456 Orang terdiri dari 8 Puskesmas sekota cilegon, 8 Kecamatan sekota cilegon , 9 OPD dan 13 UPT sekota Cilegon dengan target awal peserta sejumlah 12 orang dari masing-masing kerja unit pelayanan. Untuk Dinas Perhubungan pada pelayanan pengujian kendaraan yang melibatkan 12 responden penerima pelayanan public di Kota Cilegon, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut mencapai point 79.5 point dengan predikat BAIK dimana ada beberapa variable yang menjadi penilaian.

Jika melihat dari 9 indikator yang ada, Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dipersepsikan BAIK dengan perolehan nilai sebesar 79.5 poin. Adapun nilai masing-masing indikator tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 3.1.2.9b.1 Nilai IKM Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	INDIKATOR	NILAI RATA-RATA	NILAI PER UNSUR	KATEGORI
1.	Persyaratan	3.33	83,25	Baik
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3.58	89,5	Sangat Baik
3.	Waktu Penyelesaian	2,92	73	kurangBaik
4.	Biaya/Tarif	2.83	70,75	Kurang Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,08	77	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.33	83.25	Baik
7.	Prilaku Pelaksana	3.25	81,25	Baik
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,83	70.75	Kurang Baik
9.	Sarana dan Prasarana	3.50	87.5	Baik
Nilai IKM		3.18	79.75	Baik

2. Indikator Cakupan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 65.16%, telah tercapai realisasi sebesar 63,28% dengan capaian 97,11%. pada tahun 2019 dengan target 63%, realisasi 63,28% capaian 100,4 %, disini terlihat adanya penurunan Cakupan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tahun 2020, dikarenakan adanya kegiatan yang di refocusing untuk penanganan pandemi COVID- 19 sehingga rencana kerja yang sebelumnya telah disiapkan tidak dapat dilaksanakan.

Dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas penerangan jalan umum (PJU) yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan PJU selama lima tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan data PJU sampai tahun anggaran 2020 sebanyak 5379 unit (data ini komulatif dari tahun 2018) dan Jumlah kebutuhan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) selama lima tahun adalah 8.500 unit maka penghitungannya adalah :

$$5379 \text{ unit} \times 100\% = \mathbf{63.28\%}$$



8500 t

3. Indikator Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 67%, telah tercapai realisasi sebesar 80% dengan capaian 119,4%. pada tahun 2019 dengan target 53,33%, realisasi 53,33% capaian 100 %, disini terlihat adanya peningkatan Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2020, dikarenakan adanya kegiatan penambahan pembangunan Halte.

Dimana hasil tersebut di dapat dari :

Jumlah halte yang sudah ada yang dilayani angkutan umum dalam trayek X 100%

Jumlah kebutuhan halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek

12 halte X 100% = **80%**

15 halte

Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pada Pengujian Kendaraan Bermotor (Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu).
2. Aplikasi SIM PKB yang belum optimal.
3. Belum terpenuhinya kendaraan operasional Uji Keliling.
4. Melakukan revisi terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor.
5. Tidak adanya honor lembur petugas piket 24 jam pada tahun 2020.
6. Tidak adanya honor verifikasi pembayaran listrik untuk petugas PJU dalam survey lapangan.
7. Belum memiliki system pengaduan yang terintegrasi dalam laporan harian petugas.
8. Perlu adanya kajian teknis PJU pada Bidang Sarana dan Prasarana.
9. Kurangnya kendaraan operasional
Contoh : Crane Skylife, bentor/cator dan Mobil Operasional Kegiatan untuk kegiatan monitoring dan pengawasan).
10. Belum tersedianya SDM yang menguasai teknik sipil/transportasi dan kelistrikan/elektro.

B. Solusi

1. Penambahan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan
2. Perlu adanya perubahan regulasi secara cepat
3. Ditambahkannya pada SAB untuk honor tim verifikasi tagihan PJU dan Honor lembur untuk petugas piket 24 jam.
4. Pembuatan sistem yang terintegrasi dengan laporan harian petugas.

A3. Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut

Tabel 3.1.2.9b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan						
Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut		13.829.243.000,00	12.085.733.356,00	87,39%		
	Jumlah Tuks yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Lainnya Mengenai Kepelabuhanan di Kota Cilegon	18TUks	18 TUks	100%	Para stakeholder pada prinsipnya Mendukung peraturan daerah selama tidak berbenturan dengan peraturan lainnya.	
	Cakupan Pengawasan Pengendalian kawasan Pesisir	24 KM	24 KM	100%	Belum ada perhitungan	
Legal Consulting Kepelabuhan		56.350.000,00	56.350.000,00	100%	Honor-honor pendampingan Hukum kepelabuhan (outcome utang retribusi kepelabuhan, perundang-undangan, asset Dishub (HUBLA) 1. Ada pemamngilan orang terutang 2. Pendampngan perundangan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Permasalahan koordinasi stakeholder belum maksimal, tentang peraturan yang digunakan	
	Terlaksananya pendapat dan pertimbangan hukum	1,00 (Doc)	1,00 (Doc)	100%		
Pendataan Alur Pelayaran/Sounding		123.500.000,00	119.900.000,00	97,09%		
	Tersedianya data Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	1,00 (Doc)	1,00 (Doc)	100%		

Ketercapaian program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut terdiri dari **2 indikator** yaitu dengan Indikator Jumlah TUKS (Terminal untuk kepentingan sendiri) yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon dan indikator Cakupan pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir. Adapun penjelasan dari kedua indikator yaitu:

1. Realisasi jumlah TUKS yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan lainnya mengenai kepelabuhanan di Kota Cilegon sebesar 18 TUKS dari target 18 TUKS sehingga capaian 100 %. Dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan pelayanan TUKS:

$$\frac{\text{Jumlah TUKS yang dilayani}}{\text{Jumlah TUKS yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{18 \text{ TUKS}}{18 \text{ TUKS}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

2. Realisasi Cakupan Pengawasan dan Pengendalian kawasan Pesisir capaian realisasi kinerja sebesar 24 KM.

Permasalahan dan Solusi

PRASARANA DAN KESELAMATAN PELAYARAN

A. Permasalahan

1. Kurang optimalnya pengawasan kawasan pesisir di kota cilegon karena keterbatasan sarana seperti kapal pengawas/patrol.

2. Adanya kesalahan persepsi mengenai regulasi penetapan zona pengelolaan 12 mil laut antara Pemerintah Daerah dan Provinsi.
3. Belum dimilikinya aturan teknis/pedoman berupa peraturan walikota untuk pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan diantaranya pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir.

B. Solusi

PRASARANA DAN KESELAMATAN PELAYARAN

1. Menyamakan persepsi internal maupun eksternal terhadap regulasi mengenai zona pengelolaan wilayah 12 mil laut antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, melalui kegiatan koordinasi berupa rapat evaluasi bersama.
2. Menetapkan aturan teknis/pedoman pelaksanaan pelayanan kepelabuhan secara umum dan menyeluruh berupa penetapan peraturan walikota yang mengatur pelayanan kepelabuhanan di Kota Cilegon sehingga dengan demikian baik terhadap pungutan kepelabuhanan maupun teknis pelayanan lainnya dapat dilaksanakan secara tertib dan kondusif sesuai arahan rencana pembangunan kota.
3. Meningkatkan alokasi pagu anggaran untuk peningkatan pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan.

A.4 Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tabel 3.1.2.9c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan						
Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		13.829.243.000,00	12.085.733.356,00	87,39%		
	Cakupan fasilitas perlengkapan jalan (rambu quadril)	25,76%	26,88%	104,35%	Belum memiliki Database Rambu di Kota Cilegon, terkait kondisi fisik rambu	Perlu penyusunan Database rambu terkait kebutuhan rambu di Kota Cilegon. Akan ada prioritas terkait kebutuhan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pengamanan Rambu belum bisa maksimal	Untuk pengamanan akan melakukan monev rambu. Pe
	cakupan penunjang sistem angkutan umum massal (SAUM)	46,13%	27,38%	59,35%	Belum optimal pelayanan SAUM karena belum terpenuhinya shelter	Melakukan evaluasi trayek/koridor
	Rasio kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota	1270 unit	1085	112,13%	Honor Untuk pejalan kaki, makan minum honor anggota, atk (permasalahantidak ada)	
Bina disiplin Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kota		82.850.000,00	82.850.000,00	100,00%	86,490 juta sebelum refocusing, terdiri dari pemeliharaan ganti suku cadang penggantian daun rambu, rambu-rambu yg roboh dan rusak diperbaiki, lokasinya di (Data dikirim)	
	Berkurangnya Waktu Tempuh Jalan Kota Pada Peak Hour	30	30	100%		
Pemeliharaan Rutin Rambu-rambu Bersuara di Jalan Kota		43.436.000,00	43.436.000,00	100,00%		
	Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas di Ruas Kota Cilegon	4	4	100%		
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan		310.894.160,00	305.196.000,00	98,17%	Pengadaan 1 buah WL, Cermin lalu lintas 5 buah, rambu portable 5 buah, rambu standard 7 buah, pagar/guardrail 28 meter dipasang di kec cibeeber (lokasi dicek dan akan dikirim) ZOS di depan SD 7 pagebangan (	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					termasuk 6 rambu standar, atk, permasalahan tidak ada	
	Terlaksananya Pengadaan Rambu-rambu	4	4	100%		
Pengadaan Sarana SAUM		1.713.450.000,00	1.695.430.000,00	98,95%	2 unit Bus SAUM, total 4 unit bus SAUM	
	Tersedianya armada Bus SAUM	2	2	100%		
Operasional SAUM		903.964.840,00	848.270.000,00	93,84%	Operasional per setengah jam awal per jam (2021)	Pemeliharaan kendaraan, harga aki kurang, ban dalam blm ada di standar harga, APD buat crew SAUM, pada tahun 2021 sudah dianggarkan untuk pemeliharaan shelter, masukkan untuk koridor lain yang akan berbenturan dengan angkot untuk memberikan subsidi kepada angkot yang bersinggungan dengan saum (ini perlu dibahas lebih lanjut dishub),
	Tersedianya armada Bus SAUM	4,00 Armada	4,00 Armada	100%		
Penyusunan Analisa Dampak Lalulintas (ANDALALIN)		100.000.000,00	95.595.000,00	95,60%	Sudah dibahas dengan Kementerian untuk dokumen andalalin yang akan ditindaklanjuti dengan survey lapangan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Kau)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Dokumen Andalalin Penataan simpang Bonakarta	1	1	100%		

Ketercapaian program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. Indikator cakupan fasilitas perlengkapan jalan

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 25,76%, telah tercapai realisasi sebesar 26,88% dengan capaian 104%. pada tahun 2019 dengan target 23,30 %, realisasi 24,71% capaian 106 %, disini terlihat adanya peningkatan cakupan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2020, dikarenakan adanya kegiatan penambahan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan.

Untuk perhitungan Indikator cakupan fasilitas perlengkapan jalan dibagi menjadi 2 komponen yaitu :

- Rambu** cara penghitungan : Rambu yang ada/Kebutuhan rambu * 100

$$\frac{812 \text{ unit}}{1765} \times 100 = 46.01\%$$
- Guadrail** cara penghitungan : Guadrail yang ada/ Kebutuhan * 100

$$\frac{139 \text{ m}^2}{1792 \text{ unit}} \times 100 = 7.76\%$$

Dari kedua data tersebut terdapat hasil perhitungan $46.01 + 7.76 = 26,88$

2

2. Indikator Cakupan penunjang sistem angkutan umum masal (SAUM)

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 46,13 %, telah tercapai realisasi sebesar 27,38 % dengan capaian 59,35 %. pada tahun 2019 dengan target 17.86 %, realisasi 17,86 % capaian 100 %, disini terlihat tidak terpenuhinya target Cakupan penunjang sistem

angkutan umum masal (SAUM) pada tahun 2020, dikarenakan adanya pada tahun 2020 tidak terdapat penambahan pagu anggaran pembangunan shelter sehingga tidak terpenuhinya target.

Perhitungan Indikator diperoleh dari **3 komponen yaitu** : Shelter, bus dan rambu.

Indikator	Rumusan	Realisasi 2020	Ket
Cakupan penunjang sistem Angkutan umum Massal (SAUM)		Maka perhitungannya adalah :Total presentase /3 $25\% + 57,14\% / 3 = 27,38\%$	
Shelter		25%	
	Shelter yg ada	4	
	Jumlah Kebutuhan shelter	16	
BUS		57.14%	
	Jumlah Bus	4	
	Kebutuhan Bus	7	
Rambu		0%	
	Jumlah Rambu	0	
	Kebutuhan Rambu	32	

3. Indikator kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota

Pencapaian kinerja pada tahun 2020 dengan target kinerja 1270 unit angkot, telah tercapai realisasi sebesar 1425 unit angkot berdasarkan data angkot kota cilegon, dengan capaian 112,2 %. pada tahun 2019 dengan target 1270 unit, realisasi 1425 unit capaian 112,2 %, disini kepatuhan awak angkutan umum terhadap standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota pada tahun 2020 tidak ada peningkatan, dimana terdapat data dari 1425 unit terdiri dari 1085 unit yang aktif beroperasi dan 340 unit angkot peremajaan angkot yang diatas lima tahun.

Jumlah Angkot yang Aktif Beroperasi

Trayek	Jumlah unit
Cilegon - Merak	268 unit
Cilegon - Anyer	302 unit

Cilegon – Bojonegara	62 unit
Cilegon Pci	154 unit
Cilegon – merak – pulorida	299 unit
	1085

A.1.2 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Belum adanya terminal Type C sebagai tujuan akhir dari angkutan umum.
2. Belum optimalnya trayek angkutan kota yang existing yang ada 8 dan yang aktif 5.
3. Belum optimalnya jumlah pengguna Bus SAUM
4. Kurangnya Sosialisasi kepada masyarakat
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana
6. Belum terbentuknya kelembagaan operasional Bus SAUM
7. Belum bisa dilakukan penarikan tarif retribusi.
8. Belum optimalnya marka jalan yang terpasang
9. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk menjaga rambu yang telah terpasang sehingga menyebabkan lebih cepat rusak dan hilang.
10. Kurangnya anggaran
11. Merubah regulasi UPT Parkir
12. Saran dan Prasarana yang belum optimal
13. Belum optimalnya angkutan kota yang masuk kedalam Terminal Seruni.
14. Belum terkoordinasinya System Jaringan Trayek Angkutan Kota dengan Terminal Seruni.
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Terminal Seruni
16. Belum optimalnya penataan jalur lintasan pada Terminal Seruni
17. Belum optimalnya pelayanan pengguna terminal seruni

B. Solusi

1. Perlu adanya Sub Terminal Type C
2. Merevisi jaringan trayek agar lebih optimal
3. Perlu ditingkatkannya Sarpras pendukung
4. Penambahan Pagu Anggaran sesuai dengan kebutuhan.

5. Melakukan koordinasi dengan Bidang LLAJ dan Bidang Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Cilegon terkait penertiban Bus agar masuk ke dalam Terminal Seruni.
6. Harus melakukan pengawasan yang lebih intens terhadap rambu
7. Koordinasi lebih ditingkatkan dengan SKPD lain dalam koordinasi teknik pembangunan sarpras.
8. Perlu ditingkatkannya Sarpras pendukung

A.5 Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas

Tabel 3.1.2.9d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat						
Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas						
	Tingkat Penanganan Kemacetan	10 Titik	10 Titik	100%		
Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Khusus Daerah		133.600.000,00	133.508.888,00	99,93%		
		100%	100%	100%		
Pendukung Operasional Keselamatan Lalu Lintas		43.779.027,00	43.179.027,00	98,63%		
		65 Orang	65 Orang	100%		
Pengadaan Penunjang Peralatan DALOPS		147.430.000,00	146.180.000,00	99,15%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		50 Orang	50 Orang	100%		
Pengawasan, Pengendalian dan Penindakan Angkutan Barang dan Angkutan Orang		68.750.000,00	68.750.000,00	100%		
		1900 Penindakan	1900 Penindakan	100%		

Ketercapaian program Pengendalian keselamatan Lalu Lintas pada indikator Tingkat Kelancaran Lalu Lintas Jalan dengan target tahun 2020 sebesar 10 titik dengan realisasi 10 titik, sehingga capaian 100%.

Pada tahun 2019 dengan target yang sama 10 titik, realisasi 10 titik dan capaian 100 %

Titik penanganan kemacetan yang dimaksud yaitu:

1. Simpang Mayofield	6. Simpang Sucofindo
2. Simpang Al hadid	7. Simpang Hotel Sukma
3. Simpang Jombangkali	8. Simpang BJB
4. Simpang Sate Cilegon	9. Simpang PCI
5. Simpang Rumah Dinas	10. Simpang Terminal Seruni

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Fasilitas pendukung untuk Bidang Keselamatan Lalu Lintas yang belum optimal.
2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan

Solusi:

3. Peningkatan fasilitas pendukung untuk Bidang Keselamatan Lalu Lintas
4. Peningkatan Kualitas SDM

A.6 Program UPTD. Parkir

Tabel 3.1.2.9d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (UPTD Parkir)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola angkutan orang, barang dan khusus melalui manajemen rekayasa lalu lintas, pengembangan sistem angkutan umum masal, serta pengembangan prasarana lalu lintas jalan						
Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
Operasional Kegiatan UPT Parkir		2.833.000,00	2.833.000,00	100%		
	- tertatanya penyelenggaraan parkir di kota cilegon	1	1	100%		
Penegak Tertib Perparkiran		15.000.000,00	15.000.000,00	100%		
	terselenggaranya perparkiran di kota cilegon	3	3	100%		

Permasalahan UPT Parkir

1. Pengelolaan UPT Parkir belum optimal
2. Sarana dan Prasarana yang belum optimal seperti Mobil Derek, alat komunikasi, gembok parkir untuk mobil besar dan mobil kecil, serta kendaraan operasional.

Solusi UPT Parkir

3. Merubah regulasi terkait pengelolaan UPT Parkir dan Retribusi Parkir
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Parkir seperti Mobil Derek, alat komunikasi, gembok parkir untuk mobil besar dan mobil kecil, serta kendaraan operasional.

A.7 Program UPTD. Pengelolaan Prasarana Perhubungan

Tabel 3.1.2.9e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan (UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat						
Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas						
Operasional Kegiatan Terminal		142.531.222,00	141.630.322,00	99,37%		
	Tersedianya operasional kegiatan terminal lainnya	2	2	100%		

Permasalahan UPT Prasarana Perhubungan

1. Belum optimalnya angkutan kota yang masuk kedalam Terminal Seruni.
2. Belum terkoordinasinya System Jaringan Trayek Angkutan Kota dengan Terminal Seruni.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Terminal Seruni
4. Belum optimalnya pelayanan retribusi di terminal
5. Belum optimalnya penataan jalur lintasan pada Terminal Seruni
6. Belum optimalnya pelayanan pengguna terminal seruni

Solusi UPT Prasarana Perhubungan

1. optimalisaasi jalur angkutan kota melalui Terminal Seruni.
2. Melakukan Evaluasi terhadap system jaringan trayek Angkutan Kota
3. Meningkatkan Sarana dan Prasaranan Terminal Seruni dengan mengembangkan Transit Oriented Development (TOD)
4. Merubah regulasi UPT Prasarana Perhubungan terkait pelayanan retribusi

3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

A. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAERAH

Tabel 3.1.2.10a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika (Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah						
Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah						
	Cakupan pelayanan informasi publik terkait pembangunan daerah	95,00	95,00	100%	Catatan Pengaduan yang masuk ke PPID Utama sebanyak 2 pengaduan	
sosialisasi, promosi dan propaganda pemerintah daerah		1,547,866,254.00	1,481,107,888.00	95,69%	Perlu tambahan Anggaran karena sudah banyak MEDIA Online, Media Elektronik	
	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Promosi dan Propaganda Pemerintah Daerah Tahun 2020	18 jenis pemberitaan	18 jenis pemberitaan	100 %	Anggaran untuk Sosialisasi Promosi dan Propaganda masih kurang (di Kota Lain sekitar 6M)	
Penyusunan media informasi daerah		237,400,000.00	231,245,000.00	97,41%	Tahun 2020 ada 100 buletin, tapi di 2021 ada 400 buletin	Kebutuhan bulletin per tahun idealnya 4000, 1000 Per TW, Bulletin disebar kepada OPD Kec Kel, Masyarakat, Sekolah-Sekolah. Bulletin berisi Program-program Kegiatan Pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemkot.
	Jumlah media informasi daerah	3 Jenis	3 Jenis	100 %	Buku Hari Jadi Buletin per Triwulan (4 Buletin) Film Pendek yg ditayangkan di alun2	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengembangan kelompok informasi masyarakat		20,000,000.00	19,880,000.00	99,40%	- Masih kurangnya anggaran - Belum Sarpras Sekretariat KIM	KIM Sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan, Perlu Sarpras di tingkat kelurahan
	Jumlah KIM yang dikembangkan	43 kelurahan	43 kelurahan	100 %	Pembuatan baju KIM Pembentukan KIM di kelurahan sebanyak 43 Kelurahan (tanpa OPD)	
	Jumlah KIM yang dibina	2 kelompok	2 Kelompok	100%	Forum KIM Kota dan Kecamatan (8 Kecamatan)	
Peningkatan sarana dan SDM LPPL		140,000,000.00	132,280,888.00	94,49%	Jangkauan Radio lebih pendek	
	Jumlah Alat alat Studio dan Pemancar yang di pelihara	10 bln	10 bln	100 %	Pa Herlian yg jelaskan	Perlu peralatan dan perlengkapan RADIO, Legal Standing belum lengkap untuk mendukung RADIO. Perlu Kajian Lengkap Untuk RADIO
	Terlaksananya Pemindahan dan Pemasangan Instalasi Pemancar Radio	1 unit	1 unit	100 %		
Optimalisasi penyebaran informasi pembangunan daerah		538,600,000.00	529,246,000.00	98,26%		
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui siaran Radio	12 bln	12 bln	100 %		
	Jumlah Peserta Bimtek Pelatihan Jurnalistik Media Elektronik dan Literasi Media	100 org	100 org	100 %	Pak Herlian yg menjelaskan Tidak ada honor panitia	
Diseminasi/penyebaran media ruang luar		50,000,000.00	49,645,000.00	99,29%	Anggaran nya masih kurang karena banyak permintaan	Banyak permintaan spanduk baliho (Idealnya 100juta).
	Jumlah kegiatan yang dibuat media ruang luar	350 m	350 m	100 %	spanduk	
Pemutakhiran Konten Website Pemerintah Kota Cilegon		34,000,000.00	31,808,000.00	93,55%		
	Jumlah pemutakhiran konten website Pemkot Cilegon	38 opd	38 opd	100 %		
Dukungan Operasional Radio Mandiri FM		33,662,040.00	33,662,040.00			

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Dana/ Anggaran Dukungan Operasional Penyiaran Radio	33,662,062.00			Honor OB (2 org)	
Pengelolaan Informasi Publik		30,000,000.00	29,970,500.00			
	Jumlah OPD Yang Memahami Keterbukaan Informasi Publik	35 OPD	35 OPD		Anggaran nya masih kurang • Butuh sosialisasi undang-undang keterbukaan informasi public • System pelayanan keterbukaan informasi public online belum ada • Keterbatasan sarana dan prasarana sekretarian PPID • Belum memiliki Ruang Tunggu Informasi Publik • Di setiap OPD ada kesulitan mengumumkan LRA dan RKA dan APBD belum dapat diinformasikan • Website OPD belum optimal • Honorarium PPID belum ada	

Keberhasilan program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator program yang mencapai 100 %, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran bagian komunikasi dan informatika dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan informasi pembangunan daerah, Terdapat 9 (Sembilan) kegiatan yang ada pada program pengembangan komunikasi dan pengelolaan informasi daerah.

Secara umum, semua kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menyediakan dan menyampaikan data-data pembangunan secara terpadu melalui Penyebaran Informasi Melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Mandiri FM Kota Cilegon, Publikasi dan Sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik , pemanfaatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon maupun melalui PPID Pembantu di OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon terkait

kebijakan pembangunan daerah, penyebaran informasi pembangunan daerah. Adapun dari capaian tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Siaran Radio Mandiri FM

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Mandiri FM Kota Cilegon didirikan untuk memberikan pelayanan informasi dan hiburan kepada masyarakat melalui siaran radio informasi yang dimaksud terkait dengan bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan agama. Dengan informasi tersebut diharapkan masyarakat Cilegon dan sekitarnya dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di daerah, dan pada gilirannya masyarakat dapat memberikan masukan, baik berupa saran-saran maupun kritik terhadap proses pembangunan daerah yang telah dan sedang berlangsung, sehingga sinergi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara sinergis. Dalam rangka penyebarluasan informasi LPPL Radio Mandiri FM melaksanakan 26 Program acara Siaran.

PROGRAM ACARA LPPL RADIO MANDIRI FM TAHUN 2020

NO	NAMA PROGRAM	KETERANGAN
1	SIRAMAN ROHANI	SETIAP HARI
2	SELAMAT PAGI CILEGON	SENIN S/D SABTU
3	SELAMAT PAGI CILEGON SPESIAL WEEKEND	1 X / MINGGU
4	KOPI PAGI	SENIN S/D JUM'AT
5	INFO MANDIRI	SENIN S/D SABTU
6	RUANG BISNIS	1 X / MINGGU
7	MAGAZINE	SENIN S/D JUM'AT
8	KILAS CAKRAWALA	SENIN S/D SABTU
9	WOLRD NEWS	2 X / MINGGU
10	TRAVEL MANIA	1 X / MINGGU
11	TODAY DIARY	1 X / MINGGU
12	HEADLINE WORLD NEWS	2 X / MINGGU
13	HEADLINE	1 X / MINGGU
14	MUTIARA MANDIRI	1 X / MINGGU
15	KOMUNITAS	1 X / MINGGU
16	INFO BANTEN (INTEN)	1 X / MINGGU

17	SIMFONI MANDIRI	1 X / MINGGU
18	CINEMA	1 X / MINGGU
19	WAYAHE BEBASAN	1 X / MINGGU
20	HOBBY	1 X / MINGGU
21	MUSIC LEGEND	1 X / MINGGU
22	ZONA KELUARGA	1 X / MINGGU
23	DUNIA KAMPUS	1 X / MINGGU
24	SHOW TIME (VIRAL)	1 X / MINGGU
25	INTIP (INFORMASI & TIP)	1 X / MINGGU
26	TRAVELING	1 X / MINGGU

2. Pembuatan

Buletin Suara Cilegon Mandiri: Buletin Cilegon diterbitkan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Setiap terbit dicetak sebanyak 1.000 (seribu) exp, yang disebarkan kepada OPD dan masyarakat di Kota Cilegon. Isi buletin tersebut memuat informasi-informasi terkait program dan kegiatan pembangunan pemerintah Kota Cilegon.

Gambar Buletin Suara Cilegon Mandiri Terbit Tahun 2020



3. Pembuatan Buku Hari Jadi Kota Cilegon

Buku Hari Jadi Kota Cilegon dicetak 1 (satu) kali setiap tahunnya dan didistribusikan kepada masyarakat pada acara Riung mungpulung. Isi Buku Hari Jadi meliputi program unggulan pemerintah daerah.

Gambar Buku Hari Jadi Kota Cilegon Tahun 2020



4. Penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik

Penyebarluasan informasi Pemerintah Kota Cilegon melalui media cetak dan elektronik berupa Pemberitaan Kebijakan dan pembangunan kota cilegon serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon.

Daftar jenis pemberitaan melalui media cetak dan elektronik

1. Iklan Ucapan Selamat dan dukacita Media Cetak
2. Pemberitaan Potret Cilegon Membangun
3. Pemberitaan Lensa Event
4. Iklan Display uk ¼ Halaman

5. Pemberitaan Rubrik Cilegon City
6. Pemberitaan Parade Foto
7. Iklan Media Online
8. Pemberitaan Rubrik Cilegon mandiri
9. Advetorial 1 halaman FC
10. Advetorial ½ Halaman FC
11. Publikasi Media TV Lokal
12. Publikasi Media TV Nasional
13. Pemberitaan Advetorial tabloid Lokal
14. Pemberitaan Advetorial Majalah
15. Publikasi Media Elektronik
16. Penayangan Iklan/Himbauan/Pengumuman Media Cetak
17. Penayangan Iklan/Himbauan/Pengumuman Media Elektronik
18. Penayangan Iklan/Himbauan/Pengumuman Media Online

5. **Penyebarluasan melalui Media Sosial**

Penyebarluasan informasi kegiatan Kota Cilegon melalui media sosial yang banyak digunakan, yaitu Instagram, Facebook dan Twitter. Sampai dengan akhir 2020, follower instagram Pemkot Cilegon sebanyak 16.200 (Enam belas ribu dan Twitter 1.011 (Seribu sebelas) follower. Adapun informasi yang disebarkan melalui media sosial adalah kegiatan rutin pimpinan dalam melaksanakan agenda pembangunan.

1. Untuk penyebaran informasi ke masyarakat, Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik membentuk **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai agen – agen informasi yang tersebar di 8 kecamatan.
2. Pengelolaan **informasi dan komunikasi (PIK)** Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilaksanakan melalui kegiatan dengan nama kegiatan pengelolaan informasi daerah yang dilaksanakan akan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Cilegon sebagai PPID Utama dan PPID

Pembantu yang berada di OPD masing-masing. Kegiatan ini untuk mengelola dan mendokumentasikan setiap permohonan informasi dari masyarakat yang struktur organisasinya dibentuk melalui peraturan walikota.

Untuk lebih memaksimalkan pengelolaan dan penyebaran informasi yang berkualitas kepada masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Sandi dan statistik melaksanakan kegiatan kemitraan dengan media secara intensif melalui kegiatan-kegiatan yang rutin baik dengan media cetak ataupun media elektronik lokal maupun nasional.

3.1.2.10.1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tabel 3.1.2.10b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Komunikasi dan Informatika (Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat.					(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi					Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terjadi refocusing anggaran. Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020.	
	Tingkat kualitas dan kapabilitas jaringan infrastruktur TIK	100,00	128,60	128,60 %		Disepakati target tiap tahun untuk OPD Kel Kecamatan yang dicapai terhadap total yang harus terjaringi. 33 (opd yang

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						terkoneksi)/42 (target tahun 2020, (sewa bangunan DISBUPAR, KOPERASI UKM, DISPORA, RSUD, SETWAN) Capaian 78,5 %
	Tingkat kualitas layanan e-government	100,00	54,17	54,17 %		
	Tingkat ketersediaan aplikasi TIK	100,00	88,19	88,19 %		
Optimalisasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		2.000.000,00	2.000.000,00	100 %	Anggaran awal Rp. 159.026.000, direfocusing menjadi Rp. 2.000.000,-.	
	Dokumen laporan pelaksanaan review, evaluasi, dan/atau perumusan isu strategis terkait dengan pelaksanaan dan perkembangan SPBE Kota Cilegon	4 Laporan	1 Laporan	25 %	1 laporan dokumen pelaksanaan rencana aksi SPBE Pemerintah Kota Cilegon	Dengan daya dukung yang ada, output kegiatan difokuskan pada koordinasi dengan stakeholders terkait dengan SPBE dan smartcity.
	Dokumen Laporan Optimalisasi Masterplan Cilegon Smart City	4,00	0,00	0 %	Refocusing	Untuk output pada target indikator kinerja Dokumen Laporan Optimalisasi Masterplan Cilegon Smart City tetap dilaksanakan evaluasi tingkat kota meskipun secara dukungan anggaran tidak tersedia dikarenakan refocusing anggaran)
Penyediaan Bandwith Kota Cilegon		682.188.000,00	555.136.500,00	81,38%	Anggaran sebelum perubahan Rp.685.500.000,- Ada efisiensi dari belanja bandwitch Karena pada saat pelaksanaan melalui e-forchasing nilai harga satuan ada dibawah nilai satuan DPA.	
	Kapasitas Bandwidth yang disewa Pemkot Cilegon	300,00 mbps	300 Mbps	100 %	-	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan SPBE		372.800.000,00	280.540.000,00	75,25%	DPA Reguler Rp.375.000.000,- setelah refocusing menjadi 372.800.000,- -Kelebihan honor pengadaan Barang dan Jasa (200.000) -Kelebihan honor Pemeriksa Hasil Pekerjaan (350.000) -Efisiensi dari Belanja Suku Cadang Komputer (3.042.000) -Efisiensi dari Belanja Peralatan dan Mesin (2.418.000) -Perubahan volume pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya dari 12 bulan menjadi 5 bulan (sisa : Rp.88.668.000)	
	Jumlah pemeliharaan dan pengembangan titik jaringan SPBE di OPD (Dispors, BPBD, DPRD, Disnaker, PU, LH dan Kel. Jombang	7,00	17	243 %	Pemeliharaan dan Pengembangan titik jaringan dilakukan terhadap 17 OPD: (Pol PP, Kesbangpol, PUTR, Dinkes, Dindik, Dinsos, BPKAD, Damkar, Disnaker, Kecamatan Jombang, BAPPEDA, Inspektorat, isperindag, Perkim, Setda, BKPP dan Diskominfo)	
Pengembangan aplikasi Smart Governance dan Pendukungnya		426.400.000,00	376.030.000,00	88,19 %	- Honorarium Narasumber Non PNS diluar Pegawai Pemda tidak diserap (4.150.000) - Belanja ATK tidak diserap (675.812) - Belanja Alat Pendidikan dan Pelatihan (5.323.600) - Perubahan volume pekerjaan pada Belanja Jasa Kantor Lembaga/Perguruan Tinggi (8.100.000) - Belanja Cetak Spanduk tidak diserap (734.000)	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					- Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak diserap (6.900.000) - Efisiensi Belanja Jasa Konsutansi lainnya (19.000.000) - Efisiensi Belanja Modal Pengadaan Software lainnya (5.486.588)	
	Terlaksananya Proses Pendampingan Implementasi SIMRAL pada Tahun Anggaran 2020	1,00	1,00	100 %	Proses pendampingan Implementasi SIMRAL untuk Tahun Anggaran 2020 oleh BBPT baru akan berakhir sampai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Semua Kementrian/Lembaga dan Daerah harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehingga Pengembangan Aplikasi Smart Gouvernance pada Tahun 2020 ruang lingkupnya hanya pada pendampingan <i>Implementasi modul penatausahaan tahun 2020, Implementasi modul akuntansi dan pelaporan tahun 2020 dan Implementasi modul SAKIP tahun 2020.</i>	Proses pendampingan implementasi SIMRAL masih dibutuhkan karena pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 baru akan disampaikan pada tahun 2021 dan setelah proses pelaksanaan penatausahaan keuangan Tahun Anggaran 2020 selesai. Selama proses penusunan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2020 masih dibutuhkan pendampingan BPPT agar proses penyusunan laporan keuangan bisa seoptimal mungkin. Koordinasi pemda dan pemerintah pusat harus lebih ditingkatkan agar lebih baik lagi supaya pemberitahuan penggunaan aplikasi yang sifatnya mandatory dari pemerintah pusat bisa disampaikan jauh hari sebelumnya agar perencanaan yang telah dibuat dapat diubah sedemikian rupa tanpa harus mengubah secara drastis target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
	Terlaksananya proses pencatatan kehadiran secara	1,00	1,00	100 %	Aplikasi e-Absen dikembangkan dalam rangka mendukung	Pengembangan aplikasi e-Absen untuk OPD se kota Cilegon akan



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	elektronis pegawai lewat aplikasi mobile				proses implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi e-Absen ini memungkinkan proses pencatatan kehadiran pegawai dilakukan secara elektronik melalui aplikasi mobile berbasis Android. Untuk sementara aplikasi ini baru diujicobakan penggunaannya di Dinas Komunikasi dan Informatika, Sandi dan Statistik. Dengan keterbatasan anggaran belum bisa dikembangkan untuk seluruh OPD.	dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan dengan alokasi anggaran dan kesiapan infrastruktur jaringan dan Sumber Daya Manusia yang akan mengelolanya. Pengelolaan aplikasi e-Absen ini akan dilakukan oleh OPD yang mengelola Kepegawaian, BKPP, secara umumnya. Diskominfo akan memberikan dukungan teknis terkait dengan Teknologi Informasi.
Pengembangan Sistem Pemantauan Terintegrasi berbasis teknologi informasi		650.000.000,00	449.772.000,00	69,20 %	Anggaran sebelum refocusing Rp. 1.400.000.000. - Belanja listrik untuk suplay Command Center tidak diserap selama 12 bulan karena Command center belum berfungsi (50.000.000) - Perubahan volume pekerjaan untuk belanja internet dari 12 bulan menjadi 7,5 bulan akibat menunggu pengesahan DPA refocusing anggaran (147.500.000)	
	Penyediaan infrastruktur pemantauan terpadu melalui pengadaan meubelair commend center untuk komunikasi digital	1,00	1,00	100 %	Akibat refocusing anggaran Untuk pengadaan infrastuktur Video Wall, pembangunan Command Center belum bisa terwujud sepenuhnya.	Penyediaan infrastruktur pemantauan terpadu melalui commend center menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk kelengkapan infrastruktur.
Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Integrated Control City System and Room (Prioritas Daerah)		534.840.000,00	374.152.550,00	69,96 %	- Efisiensi dari belanja Suku cadang Komputer (2.300.050) - Perubahan volume pekerjaan untuk Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin dari 12 bulan menjadi 5 bulan akibat	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					refocusing anggaran covid-19 (137.395.500) - Perubahan Volume pekerjaan untuk Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya dari 12 bulan menjadi 5 bulan akibat refocusing anggaran covid-19 (86.162.500) - Efisiensi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan tempat kerja yang akan dikapitalisasi (10.991.900)	
	Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Sistem Penunjang Smart City	1,00	1,00	100 %	Tidak adanya SDM yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan alat dan mesin.	Memaksimalkan kerjasama dengan PT. Krakatau Information Technology dalam Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Sistem Penunjang Smart City
Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Prioritas Daerah)		175.080.000,00	158.521.613,00	90,54	Anggaran awal sebelum refocusing Rp. 300.000.000. - Akibat Refocusing anggaran Covid-19 terdapat Perubahan volume pekerjaan pada belanja sewa call center 112 dari 12 bulan menjadi 10 bulan dan disesuaikan dengan jumlah tagihan/invoice yang diajukan (16.558.387)	
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu	12,00 bln	10,00 bln	83,33 %	10 laporan/bulan pelaksanaan pengelolaan panggilan darurat terpadu periode Maret s/d Desember sesuai dengan masa pelaksanaan kontrak kerja yakni selama 10 (sepuluh) bulan kalender, meskipun terdapat beberapa uraian kegiatan lainnya yang mengalami refocusing	Operasionalisasi pengelolaan panggilan darurat terpadu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan SPBE		281.500.000,00	272.414.375,00	96,77 %	-Efisiensi dari belanja Suku cadang computer (1.832.250)	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					-Belanja cetak tidak diserap (200.000) -Efisiensi dari Belanja amodal dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan (7.053.375)	
	Penambahan titik jaringan Fiber Optik (FO) di Gedung Kominfo dan Link Setda	2,00 unit	2,00	100 %	Keterbatasan anggaran; Belum seluruh gedung dilingkungan Setda terkoneksi melalui Fiber Optik (FO), sebagian masih menggunakan akses poin to poin melalui radio.	Sebagian gedung di Lingkungan Setda akses internet memaksimalkan pemanfaatan perangkat yang ada dengan system poin to poin melalui Radio.

3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL DAN UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR

Tabel 3.1.2.11a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep science and technopark dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon						
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil		1.938.182.932	1.742.506.863	89,90%		
	Persentase UMKM yang dibina/dilatih	2,5 %	3,44%	137%		
	Proporsi usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	> 5 %	2,6%	52,06%		
Operasional Pusat Inkubator Wirausaha dan klinik UMKM (PIWKU)		125.698.000	111.759.636	88,91%		
	terselenggaranya pelayanan klinik pendamping UMK	5 Bulan	5 Bulan	100%		
	Terfasilitasinya pengurusan IUMK	0 IUMK	0 IUMK	0 %		
	Terfasilitasinya standarisasi / sertifikasi hasil produk	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terfasilitasinya akses pasar hasil produksi	0 UMK	0 UMK	0 %		
	terfasilitasinya modal usaha	0 Lembaga	0 Lembaga	0 %		
Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan CWUB		19.370.000	19.370.000	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan CWUB	600 Orang	75 Orang	12,50%	direalisasi/refocusing anggaran dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi covid-19	Penyesuaian Perencanaan dengan kondisi pandemi Covid-19
Operasional UPT PDB		351.996.932,00	340.644.227,00	96,77%		
	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pengelola UPT PDB	66 Orang	66 Orang	100%		
	Tersedianya Operasional UPT PDB	4 Wilayah dan Tingkat Kota	4 Wilayah dan Tingkat Kota	100%		
	Meningkatnya Jangkauan Akses Pelayanan Dana Bergulir kepada Masyarakat	4 Wilayah	4 Wilayah	100%		
	Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan Pengelola Dana Bergulir	4 Wilayah dan Tingkat Kota	4 Wilayah dan Tingkat Kota	100%		
Pengelolaan data UMKM Kota Cilegon		90.648.000	71.723.000	79,12%	Efisiensi anggaran pada honorarium non PNS	Efisiensi anggaran dialihkan kepada belanja pelaksanaan kegiatan lainnya
	Terlaksananya Updating Data UMK Kota Cilegon	43 Kelurahan	43 Kelurahan	100,00%		
Enterpreneurs Award/Pemberian Penghargaan pada UMKM Berprestasi		75.000.000,00	73.910.000,00	98,55%		
	Penghargaan Kepada Mitra Binaan (MB)	75 Mitra Binaan	75 Mitra Binaan	100,00%		
Rakor sinkronisasi rencana kerja dan pengembangan UMKM		23.827.000,00	23.827.000,00	100,00%		
	terlaksananya kegiatan Rakor sinkronisasi rencana kerja dan pengembangan UMK	50 Orang	50 Orang	100,00%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro dan Kecil (DID Tambahan)		1.251.643.000,00	1.101.273.000,00	87,99%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK	100 NIB	100 NIB	100%		
	Pelatihan PKP untuk PIRT	50 Sertifikat PKP	50 Sertifikat PKP	100%		
	Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)	50 SP-PIRT	50 SP-PIRT	100%		
	Sertifikat Pelatihan Penyuluhan Halal	50 Sertifikat Pelatihan	50 Sertifikat Pelatihan	100%		
	Sertifikasi Halal	50 Sertifikat Halal	50 Sertifikat Halal	100%		
	Peserta dan Alat Pelatihan Pengolahan Produk UMK dan Kemasan (Packaging) Produk UMK	100 UMK	100 UMK	100%		
	Pelatihan Pemasaran Marketplace Digital	110 UMK	110 UMK	100%		
Operasional BLUD UPT - Dana Bergulir - Operasional BLUD UPT - Dana Bergulir		4.274.720.125	3.287.722.117	76,91%	Angka Anggaran tersebut bukan merupakan sumber anggaran dari RBA reguler setiap tahun (merupakan Tambahan silpa tahun lalu) dan tidak bisa dimanfaatkan seluruhnya sedangkan anggaran yang bisa dimanfaatkan hanya sebesar 3.287.722.117 sesuai dengan RBA reguler setiap tahun yang dibuat	Koordinasi dengan BPKAD
	Terlaksananya pembelian produk	1 paket	1 paket	100%		
Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan		1.717.656.000	1.528.784.000	89,00 %		
	Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat	74,5%	58,18%	78,10%	Jumlah data menggunakan data dari	Koordinasi dengan kemenkop dalam memfasilitasi koperasi tidak aktif

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					ODS (kementrian Hum&Ham).	
Sosialisasi Perkoperasian untuk Usaha Produktif/Kelompok Usaha		113.673.000	113.673.000	100%		
	tersosialisasikannya perkoperasian untuk usaha produktif/kelompok usaha	110 org	110 org	100 %		
Pengawasan, Pemeriksaan Koperasi dan UMK		24.000.000	0,00	0%	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, yang hanya tersedia untuk narasumber.	Menyusun Perencanaan kedepan lebih terinci dan teliti
	Terlaksannya Bimtek Pengawasan Menuju Koperasi Yang Sehat	60 orang	0	0%		
Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMK		142.625.000,00	125.465.000,00	87,97%		
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%		
	Tersedianya Data /Dokumentasi Koperasi sehat/Berprestasi	50 koperasi	50 koperasi	100%		
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (DAK)		417.358.000,00	375.105.000,00	89,88%		
	Kegiatan Bimbingan Penyuluhan Koperasi Tidak Aktif Ak	120 peserta	120 peserta	100%		
	Pelatihan Pemasaran UMKM Berbasis Online	40 peserta	40 peserta	100%		
	Diklat Akuntansi Berbasis Software Ak	80 peserta	80 peserta	100%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi Kelembagaan dan Perizinan (DID Tambahan)		620.000.000,00	584.364.000,00	94,25%		
	Jumah Pengurus Koperasi Mengikuti Bimtek Penumbuhan Wirausaha	30 orang	30 orang	100%		
	Jumlah sertifikasi profesi manager koperasi	20 koperasi	20 koperasi	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah sertifikasi profesi kasir koperasi	20 koperasi	30 koperasi	150%		
	Pembuatan Akta Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	100%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi (DID Tambahan)		400.000.000	330.177.000	82,54%	Efisiensi anggaran untuk transportasi dan ATK	Menyusun Perencanaan kedepan lebih terinci dan teliti
	Jumlah peserta yang mengikuti bintek peningkatan penunjang kesehatan koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%		
	Jumlah Aplikasi Akuntabilitas perkoperasian	50 koperasi	50 koperasi	100%		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		3.801.754.805	3.672.666.289	96,60%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	92,31%	92,31%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	93,75%	93,75%		
	Tingkat disiplin aparatur	88%	42%	47,73%	Penerapan WFH terkait pandemik covid 19	Target harus disesuaikan dengan penerapan WFH
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100%	48%	48%	1. Inkonsistensi perencanaan dengan realisasi kegiatan 2. Perencanaan cash budget tidak dimanage/disesuaikan dengan rencana pelaksanaan	Pembinaan terhadap pegawai

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta arah pembangunan yaitu Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi, dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon. Adapun sasarannya adalah **“Meningkatnya keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil”** Sasaran dimaksudkan untuk dapat meningkatkan keberdayaan perekonomian melalui pelatihan, bimbingan serta penyuluhan pada Koperasi dan UMK sehingga menjadikan koperasi yang sehat dan aktif juga UMK yang berkembang dan mampu bersaing. Berikut penjelasan capaian program pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil:

1. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Capaian kinerja program sebagai bentuk upaya pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Mikro kecil yang telah dilaksanakan dapat dilihat sebagai berikut :

1) Persentase UMKM yang dibina/dilatih

Indikator bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM pada pelaku usaha dari sisi produksi, manajemen usaha, pemasaran dan kualitas produk, sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan sistem usahanya. Sasaran pembinaan/pelatihan yang dilakukan pada Calon Wira Usaha Baru, Wira Usaha Baru dan Wira Usaha yang telah berjalan. Realisasi pelatihan UMKM yang telah dilaksanakan Tahun 2020 sebanyak 485 UMK dari jumlah 14.061 UMK yang ada di Kota Cilegon atau 3,44% dari target sebesar 2,5%, dengan capaian kinerja sebesar 137%, tingginya capaian kinerja tersebut dikarenakan adanya bantuan pemerintah pusat melalui dana DID Tambahan Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang diperuntukan penguatan usaha mikro . Adapun jenis pelatihan yang dibina kepada UMK :

1. Pelatihan calon wira usaha baru (75 peserta)
2. Pelatihan NIB nomor induk bersama bagi pelaku UMK (100 UMK)
3. Pelatihan PKP untuk PIRT (50 UMK)
4. Sertifikasi produk pangan industri RT (50 sp-pirt)
5. Sertifikat pelatihan penyuluhan halal (50 UMK)
6. Sertifikat halal 50 sertifikat
7. Pelatihan pengolahan produk UMK dan kemasan produk UMK sebanyak 100 UMK
8. Pelatihan pemasaran marketplace digital 110 UMK

2) Persentase usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil

Indikator bertujuan meningkatkan atau mengetahui jumlah usaha mikro dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun berikutnya. Sasaran dari indikator adalah mengetahui jumlah usaha mikro menjadi kecil pada tiap tahunnya. Upaya yang dilakukan pada indikator ini adalah mengupdate/mengelola jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Cilegon. Hasil update tahun 2020 bahwa jumlah usaha mikro sebanyak 14.061, dan usaha kecil sebanyak 366 UMK atau sebesar 2,6% dari target >5% maka pencapaiannya hanya sebesar 52,06%. Jumlah usaha kecil tersebut merupakan dari perkembangan usaha mikro sebanyak 212 pelaku usaha tahun 2020, peningkatan tersebut sebanyak 20 pelaku usaha yang didorong dari kegiatan pemulihan ekonomi nasional. Indikator ini dalam teknis pelaksanaannya melakukan update pendataan UMK.

Tabel 3.1.2.11a.1 Jumlah UMK Kota Cilegon Th 2020 Berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	CIBEBER	2326
2	CILEGON	1543
3	CITANGKIL	2339
4	CIWANDAN	2111
5	PULOMERAK	1014
6	GEROGOL	1374
7	JOMBANG	1458
8	PURWAKARTA	1896
	TOTAL	14061

Tabel 3.1.2.11a.2 Jumlah UMK Kota Cilegon Th 2020 berdasarkan Lapangan Usaha

NO	KATEGORI USAHA	JUMLAH
1	Industri Pengolahan	1399
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8749
3	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	3036

NO	KATEGORI USAHA	JUMLAH
4	Jasa Lainnya	698
5	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	177
6	Pengelolaan Limbah & Daur Ulang	2
	TOTAL	14061

MIKRO	13.695
KECIL	366
TOTAL	14.061

3) Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan

Indikator ini merupakan sasaran capaian program kepada koperasi yang ada di Kota Cilegon, karena koperasi adalah suatu penguatan ekonomi kerakyatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dicapai dalam pembangunan kepada koperasi agar koperasi menjadi koperasi yang tangguh, oleh karena itu diperlukannya penguatan dan pembinaan sehingga menjadi koperasi yang aktif dan sehat. Realisasi koperasi aktif sebanyak 359 koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 617, terdapat penambahan sebanyak 10 koperasi aktif dibandingkan tahun sebelumnya. Maka realisasi indikator Persentase Koperasi aktif dengan pengelolaan keuangan yang sehat di tahun 2020 sebesar 58,18% dengan capaian kinerja sebesar 78,10%, tidak tercapainya ini dikarenakan jumlah koperasi tidak aktif memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja. Terutama koperasi tidak aktif yang tidak ada kegiatan dan keberadaan kantornya. Dimana data koperasi sudah terpusat pada Online Data Sistem (ODS) Kementerian Hukum dan Ham. Pemerintah daerah setiap tahunnya telah membantu pembentukan badan hukum koperasi sebanyak 10 koperasi namun ada juga yang membuat badan hukum koperasi secara mandiri melalui kemenkumham.

Tabel 3.1.2.11a.3 Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)			Anggota (orang)		
		JML	Aktif	Tidak Aktif	JML	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (unit)			Anggota (orang)		
		JML	Aktif	Tidak Aktif	JML	L	P
1	Koperasi Produsen	58	45	13	162		
2	Koperasi Pemasaran	3	1	2	-	-	-
3	Koperasi Konsumen	516	293	223	19.230	15.800	3.430
4	Koperasi Jasa	20	19	1	2.617	2.028	589
5	Koperasi Simpan Pinjam	10	4	6	86	33	53
Jumlah		607	362	245	21.933	17.861	4.072

Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (ODS)

TAHUN	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI TIDAK AKTIF	CAPAIAN INDIKATOR
2020	617	359	258	58,18%
2019	607	349	258	57,50%

Sumber data : Olahan data Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Permasalahan dan Solusi

Pemasalahan :

1. Banyaknya koperasi tidak aktif yang melekat pada jumlah koperasi di mana koperasi tersebut sudah tidak terwujud kepengurusan dan kegiatannya.
2. Kurangnya memenuhi kewajiban koperasi akan pentingnya laporan keuangan yang sehat dalam menjalankan RAT, kelembagaan dan usaha koperasi untuk mewujudkan koperasi dengan pengelolaan keuangan yang sehat.
3. Masih banyak anggota koperasi yang belum memahami tentang perkoperasian
4. Belum optimalnya update data base koperasi
5. Belum optimalnya pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di kota cilegon
6. Belum optimalnya kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
7. Jaringan pemasaran produk UMK belum optimal

8. Belum optimalnya penataan database UMK
9. Masih banyak usaha mikro belum memiliki legalitas usaha dan standarisasi produk
10. Masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola UPT PDB
11. Penataan administrasi UPT PDB belum berbasis system.
12. UPT PDB belum memiliki satuan pengawas internal (SPI)

Solusi :

1. Memfasilitasi pembubaran koperasi tidak aktif yang tidak berwujud kepengurusannya kepada Pemerintah Pusat
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi tidak aktif dan koperasi baru
3. Pembinaan perkoperasian kepada anggota koperasi
4. Update data base tahunan
5. Optimalisasi pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di kota cilegon
6. Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
7. - Fasilitasi produk UMK melalui program kemitraan
- Peningkatan pelatihan jaringan/pengembangan pemasaran jenjang reseller
8. Perlunya pembuatan aplikasi database UMK online
9. - Fasilitasi pembuatan legalitas usaha dan produk
- Pelatihan packaging/kemasan/label
- Pelatihan PIRT , sertifikasi halal , Makanan Dalam (MD) dan Haki.
10. Pelatihan peningkatan pengetahuan pengelola UPT PDB
11. Pembuatan system adminitrasi
12. Membentuk satuan pengawas internal (SPI) UPT PDB

3.1.2.12 Penanaman Modal

A. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 3.1.2.12a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional						
Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal		69.445.000	67.445.000	97,12%		
	pertumbuhan rencana investasi	6,25 %				
Penyusunan potensi dan peluang investasi		52.995.000	51.995.000	98,11%		
	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi	0 sistem aplikasi	0 sistem aplikasi	0%	Perubahan output dikarenakan belum adanya RDTR	
	Tersedianya data potensi investasi di Kota Cilegon	1 dokumen	1 dokumen	100%		
Fasilitasi dan koordinasi percepatan penanaman modal		16.450.000	15.450.000	93,92%		
	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi percepatan penanaman modal	0 peserta	0 peserta	100%	Refocusing	
	tersedianya dokumen Nomor induk berusaha (NIB)	1	1 dokumen	100%		
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		114.670.000	113.505.750	98,98%		
	Laju pertumbuhan investasi	2,75 %	116,00%	4218,18%		
Forum Investasi		114.670.000	113.505.750	98,98%		
	Terlaksananya kegiatan forum investasi	100 peserta	100 peserta	100 %		
	terlaksananya pemberitaan melalui media elektronik	1 media	1 media	100 %		
Program peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan		359.282.423	355.740.600	99,01%		
	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perizinan	100 %	100%	100 %		Melakukan koordinasi dengan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan terkait kendala proses pelayanan izin yang melebihi waktu SOP

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi pengaduan masyarakat dunia usaha		50.456.823	47.950.000	95,03%		
	Terfasilitasinya Pengaduan Masyarakat Dunia Usaha dan Pemberitaan Rubrik Khusus Halaman Cilegon	12 Bulan	12 Bulan	100 %		
Pemeliharaan berkala sistem informasi pelayanan perizinan online		231.249.600	230.224.600	99,56%	1. Perubahan regulasi terkait perizinan yang dinamis 2. Kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan izin secara mandiri 3. Keterbatasan anggaran	1. Pemeliharaan berkala sistem informasi perizinan dan non perizinan 2. Melakukan sosialisasi tata cara pelayanan perizinan melalui SIPECI 3. Pengajuan penambahan anggaran untuk tenaga ahli pemeliharaan sistem
	Terpeliharanya sistem informasi perizinan online secara berkala	1 sistem perizinan	1 sistem perizinan	100%		
Penyusunan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan		47.500.000	47.490.000	99,98%		
	Terpenuhinya evaluasi pengolahan data dan pelaporan	0 dokumen	0	0%	Anggaran dialihkan untuk covid 19	
	Tersusunnya data dan pelaporan perizinan dan non perizinan	12 dokumen	12 dokumen	100 %		
Publikasi Media Cetak dan Elektronik		30.076.000	30.076.000	100%		
	Tersampainya informasi perizinan melalui media cetak dan elektronik	1 media	1 media	100%		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		4.168.494.860	3.964.720.171	95,11%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	65%	100,00%	153,8%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	67%	59,4%	88,6%		
	Tingkat disiplin aparatur	95%	90,14%	94,8%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	80%	71,45%	89,3%		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dengan arah kebijakan Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional. Dalam menjalankan tugas dan arah pembangunan DPMPTSP Kota Cilegon melakukan tugas nya melalui program dengan indikator pembangunan sebagai sasaran yang akan dicapai. Berikut penjelasan indikator pembangunan tahun 2020 pada masing-masing program :

1. Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal

Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal merupakan bagian dari pelayanan investasi yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon meliputi Promosi Investasi, Fasilitas Investasi, dan Pengembangan Investasi guna menarik investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota Cilegon

Salah satu indikator keberhasilan program promosi dan pengembangan investasi adalah penambahan rencana investasi yang masuk ke Kota Cilegon. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, setiap pelaku usaha baik PMA maupun PMDN wajib mendaftarkan perusahaan nya melalui OSS (Online Single Submission. Setelah melakukan pendaftaran pelaku usaha akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha dan berfungsi juga sebagai pengganti TDP, API dan akses kepastian.

Didalam NIB terdapat informasi berupa Nama dan NIK, akta pendirian, Bidang Usaha, Jenis Penanaman Modal, Lokasi Penanaman Modal, **Besaran Rencana Investasi**, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, Negara Asal (apabila PMA), Rencana Permintaan fasilitas fiskal, pajak dan kepabeanan, serta NPWP.

Berdasarkan data dari Sistem OSS dan NSWI BKPM RI, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlokasi di Cilegon, periode Januari-Desember 2020 berjumlah 988 NIB (PMA dan PMDN) dengan Jumlah Investasi Rp. 101.012.199.870.509. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 1.546 NIB (PMA dan PMDN) dengan jumlah investasi Rp. 491.837.300.850.170.

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 adalah masa transisi dari izin prinsip (SIPIPISE) ke NIB (OSS), dimana NIB wajib dan berlaku bagi semua investor (pelaku usaha) baik yang lama maupun yang baru sehingga banyak perusahaan -perusahaan yang telah existing juga mendaftarkan ke OSS untuk mendapatkan NIB sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan perizinan lebih lanjut.

REKAPITULASI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TAHUN 2020

JUMLAH NIB	988 NIB
JUMLAH INVESTASI	Rp. 101.012.199.870.509
TERBILANG	Seratus satu trilyun dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan rupiah
JUMLAH PROYEK	6.166 Proyek
JUMLAH TENAGA KERJA	193.372 Tenaga Kerja

Rekapitulasi Rencana Investasi 2016-2020 Kota Cilegon

Tahun	Nilai Rencana Investasi (dalam Rp. Trilyun)	Laju Rencana Investasi (%)	Keterangan
2016	111.048	29,13%	
2017	39.901	-64,07%	

Tahun	Nilai Rencana Investasi (dalam Rp. Trilyun)	Laju Rencana Investasi (%)	Keterangan
2018	43.546	9,14%	Berdasarkan Izin Prinsip (IP)
2019	491.837	1029,47%	Berdasarkan
2020	101.012	-79,46%	NIB

Persmasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Perlu adanya peninjauan ulang kembali RUMP Kota Cilegon karena ada perubahan perda tata ruang Kota Cilegon.
2. Belum adanya peta potensi dan peluang investasi, di Kota Cilegon
3. Belum memiliki SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah)
4. Kurangnya promosi investasi secara online yang berkesinambungan
5. Adanya kendala pada sistem *National Single Window Investment* (NSWI)

Solusi :

1. Revisi RUPM Kota Cilegon
 2. Dibuatnya peta potensi dan peluang investasi di Kota Cilegon yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan tat letak serta kelola perkecamatan
 3. Agar segera membuat SIPID
 4. Melaksanakan promosi investasi secara online yang berkesinambungan
 5. Koordinasi dan Konsultasi berkesinambungan dengan BKPM RI
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah program yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal melalui pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha pada tahap pra konstruksi, masa konstruksi dan tahap komersial. Sasaran atau fokus pengendalian penanaman modal yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan investasi di Kota Cilegon Melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan Perka BKPM RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan pembangunan pada urusan penanaman modal dengan indikator pembangunan yaitu laju pertumbuhan investasi sebagai “tolak ukur perubahan mendasar realisasi investasi”, adapun capaian kinerja pada program ini yaitu Laju Pertumbuhan Investasi.

Laju Pertumbuhan Investasi adalah “Kenaikan pertumbuhan nilai investasi pada tahun yang sedang berjalan dibandingkan dengan total investasi sampai dengan tahun sebelumnya”, capaian kinerja pada tahun 2020 investasi sebesar Rp. 18.143.836.300.000. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.414.135.529.500 atau 116%, jadi laju pertumbuhan investasi tahun 2019 sampai dengan 2020 sebesar 116 % dari target 2.75% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 4.205%. Pertumbuhan investasi pada industry/pelaku usaha yang mengembangkan perluasan lahan, pengembangan lahan/bangunan, mesin/peralatan volume produksi.

TABEL REALISASI INVESTASI PERTAHUN (2011 - 2020)

TAHUN	PMA Rp. TRILIUN	PMDN Rp. TRILIUN	TOTAL Rp. TRILIUN	LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI %
2011	12,5	0,07	12,57	
2012	0,62	1,02	1,64	-86,95%
2013	3,19	1,05	4,24	158,54%
2014	45,12	0,35	45,47	972,41%
2015	9,53	4,51	14,04	-68,33%
2016	24,006	1,526	25,532	77,31%
2017	7,658	1,807	9,466	-62,92%
2018	7,466	0,798	8,245	-12,90%
2019	4,328	4,085	8,414	2,05%
2020	14.685	3.458	18.143	116%

Sumber data : Data Olahan DPMPTSP

No.	Realisasi Investasi	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi
1	Baru (investasi baru)	20	3.613.137.645.000
2	Perluasan (investasi perluasan)	45	14.530.698.655.000
Jumlah		65	18.143.836.300.000

Sumber Data : Data Olahan DPMPTSP

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Pelaku usaha/ penanaman modal banyak yang belum melaporkan Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)

Solusi :

1. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku

3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan

Dalam rangka memberikan informasi Pengaduan Masyarakat pada Dunia Usaha yang ada di Kota Cilegon kaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparansi dan akuntabel, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu memiliki program kegiatan Fasilitas Pengaduan Masyarakat Dunia Usaha yang dibawahhi oleh Seksi Informasi dan Pengaduan pada Bidang Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

Dalam kegiatan tersebut seksi informasi dan pengaduan memfasilitasi penyampaian keluhan, kritik dan saran serta konsultasi atas penyelenggaraan proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon. Penyampaian keluhan, kritik dan saran serta konsultasi selain dapat dilakukan secara langsung pada kantor DPMTSPSP Kota Cilegon juga dapat dilakukan melalui berbagai sarana yang di sediakan, diantaranya dapat melalui fitur email, sms center hingga via live chat pada website dpmptsp.cilegon.go.id. semua penyampaian permohonan informasi, konsultasi hingga penyampaian keluhan akan di tanggap dan diberikan informasi dan solusi terbaik oleh petugas penangan informasi dan pengaduan.

Selain melakukan penangan pengaduan seksi informasi dan pengaduan juga melaksanakan program kegiatan sosialisasi melalui media cetak dengan membuka rubrik khusus yang dilaksanakan secara berkala. Adapun informasi layanan yang dimuat adalah meliputi berbagai informasi perizinan dan non perizinan yang sering di tanyakan oleh pemohon izin dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan adanya layanan ini diharapkan masyarakat dunia usaha mendapatkan informasi yang lebih akurat seputar pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kota Cilegon.

Proses perizinan yang mudah akan memberikan efisiensi dan manfaat yang besar untuk semua pihak yang menggunakan jasa instansi tersebut, Pelayanan yang memuaskan merupakan tujuan akhir dari sebuah instansi jasa pelayanan. yang nantinya akan berdampak positif terhadap setiap aspek yang bersinggungan. Diantaranya adalah ketertarikan investor atau pengguna layanan untuk mengembangkan segala potensi investasi yang dilakukan karena investor atau pengguna layanan merasa terfasilitasi dengan baik. Terkait dengan upaya mewujudkan pelayanan yang memuaskan maka diperlukan nya Bidang Data dan Informasi sebagai garda terdepan untuk menangani segala hal terkait kepuasan pengguna layanan. Maka melalui kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kami melakukan analisa terhadap kualitas pelayanan yang kami berikan dimana pengolahan nilai SKM dilakukan secara berkala per triwulan sebagai acuan kami melakukan evaluasi perbaikan layanan.

Pada Tahun 2020 terdapat 1 pengaduan yang masuk secara langsung, 4 pengaduan masuk melalui Email dan 14 Pengaduan masuk melalui website dan seluruh pengaduan terselesaikan dengan baik. Adapun 1 (satu) pengaduan yang masuk secara langsung ke sub bidang informasi dan pengaduan DPMPTSP Kota Cilegon juga dapat terselesaikan dengan baik melalui Berita Acara Penyelesaian (BAP) Pengaduan sesuai dengan mekanisme SOP pengaduan yang berlaku. Pengaduan tersebut ditangani dengan baik dan sesuai dengan tujuan sampai permasalahan tersebut selesai sehingga persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait perizinan yaitu 100%.

Dengan demikian masyarakat dunia usaha terfasilitasi dengan baik sehingga terjalinnya hubungan yang baik yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para pemilik dunia usaha dapat berkembang dengan baik dan diharapkan berdampak pada meningkatnya investasi di Kota Cilegon

Pelaksanaan kegiatan program ini yang di dukung beberapa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan baik secara anggaran maupun dan teknis, rata-rata serapan anggaran pada program ini 95.03%.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2020

TRIWULAN	Jumlah Responden	Nilai IKM
Triwulan I	307 Orang	79.23 poin
Triwulan II	295 Orang	79.78 poin
Triwulan III	395 Orang	77.32 poin

TRIWULAN	Jumlah Responden	Nilai IKM
Triwulan IV	304 Orang	76.88 poin
POIN NILAI IKM		78.30 poin (BAIK)

Sumber data : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mandiri DPMPTSP

Permasalahan

1. Terkait SKM terkendala akan pemohon perizinan dan nonperizinan yang enggan mengisi SKM saat mengambil SK izin.
2. Terkait pengaduan masyarakat banyak pengaduan pada email dan website yang salah sasaran atau tujuan, isi aduan yang di adukan tidak terkait Pelayanan pada DPMPTSP melainkan tertuju untuk layanan pada kelurahan atau DISDUKCAPIL.
3. Nilai IKM terendah selalu pada poin kecepatan waktu proses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
4. System informasi perizinan elektronik belum mengakomodir format pelaporan
5. Pengamanan Arsip belum terdigitalisasi

Solusi

1. IKM akan dilakukan secara online dengan mekanisme sebelum pemohon mengambil atau mendapatkan SK izin pemohon wajib mengisi SKM terlebih dahulu sehingga tidak ada pemohon izin yang tidak mengisi SKM.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih terkait fasilitasi pengaduan milik perangkat daerah lainnya sehingga pengaduan tersebut tidak menyasar ke DPMPTSP Kota Cilegon.
3. Perlu adanya evaluasi terhadap proses pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga ketepatan waktu proses perizinan dan nonperizinan menjadi lebih baik
4. Pengembangan SIPECI
5. Pembuatann Pengarsipan digital dokumen perizinan dan non perizinan

3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, UPTD PEMUSATAN LATIHAN CABANG OLAHRAGA BINAAN

Tabel 3.1.2.13a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.649.885.205	2.254.419.601	85,08%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	100%	100%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	90,34%	90,34%		
	Tingkat disiplin aparatur	100%	95,13%	95,13%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100%	84,25%	84,25%		
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga		2.935.958.000	2.524.883.194	85,99%		
	Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan	15%	4%	26,67%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19	Penyesuaian Target Indikator Keluaran Kegiatan yang mendukung Indikator Program
	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga	30%	20%	66,67%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19	Penyesuaian Target Indikator Keluaran Kegiatan yang mendukung Indikator Program

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Ker)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan Sport center (Prioritas Daerah)		2.504.280.000	2.094.440.994	83,63%		
	Terbangunnya Tribun Utara, Timur dan Selatan, Lanscape	1 Paket	1 Paket	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat		190.278.000	190.278.000	100%		
	Terlaksananya pengadaan Alat Olahraga untuk Masyarakat 1. Cabang Olahraga Catur (200 Buah) 2. Cabang Olahraga Sepak Bola (250 Buah) 3. Cabang Olahraga Bulutangkis (250 dan 172 Buah)	922 Buah	922 Buah	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga pemuda		191.400.000	191.400.000	100%		
	Terlaksananya pengadaan perlengkapan untuk kepemudaan	10 Paket	10 Paket	100%		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		50.000.000	48.764.200	97,53%		
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana umum (Lapangan Tinju, Penataan Taman dan Perapihan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda		307.432.000	306.562.000	99,72%		
	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	100%	80%	80%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	45%	80%	177,78%		
Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan		50.000.000	49.730.000	99,46%		
	Terlaksanya Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan	50 Orang	50 Orang	100%		
Pusdiklatsar Paskibraka		145.232.000	145.232.000	100%		
	Terlaksananya Pusdiklatsar Paskibraka	150 Orang	150 Orang	100%		
Seleksi dan pengiriman pertukaran pemuda antar Negara		36.450.000	36.450.000	100%		
	Terlaksananya Seleksi BPAP, BPAN, dan KPN	150 Orang	150 Orang	100%		
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga		2.337.775.400	1.195.442.100	51,14%		
	Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina	12%	1,4%	11,67%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19	Penyesuaian Target Indikator Keluaran Kegiatan mendukung Indikator Program
	Proporsi cabang olahraga yang berprestasi	65%	56,25%	86,54%		
O2S SMP Tingkat Cilegon		38.797.000	38.797.000	100%		
	Terlaksananya O2s SMP Dengan Peserta Seluruh Atlet Pelajar SMP se kota Cilegon	42 Sekolah	42 Sekolah	100%		
O2S Tingkat Kecamatan		138.200.000	136.794.000	91,20%		
	Terlaksananya kegiatan O2S tingkat kecamatan	180 Sekolah	180 Sekolah	100%		
O2S Taman Kanak Kanak		68.800.000	67.284.000	96,12%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan O2S Taman kanak-kanak Tingkat Kota Cilegon	100 Taman Kanak-Kanak	100 Taman Kanak-Kanak	100%		
O2S SKH Tingkat Kota Cilegon		37.226.000	36.661.000	98,48%		
	Terlaksananya Kegiatan O2S SKH Tingkat Kota Cilegon	4 Sekolah	4 Sekolah	100%		
O2S SD Tingkat Kota Cilegon		50.260.000	48.114.000	95,73%		
	Terlaksananya kegiatan O2S SD Tingkat Kota Cilegon	170 Sekolah Dasar	170 Sekolah Dasar	100%		
Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat		50.000.000	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid 19 karena kegiatan dapat menimbulkan kerumunan orang (dalam rangka mengikuti mengikuti Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan sosial yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid 19)	Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
	Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat Kota Cilegon	30 Orang	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid 19 karena kegiatan dapat menimbulkan kerumunan orang (dalam rangka mengikuti mengikuti Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan sosial yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid 19)	
KEJURDA Cabang Olahraga Pencak Silat		23.420.000	22.163.500	94,63		
	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Pencak Silat	18 Orang	13 Orang	94,63%		
KEJURDA Cabang Olahraga Karate		25.000.000	0	0	Tidak Terlaksananya Kegiatan dikarenakan Covid 19 dan Pelaksanaan dilakukan dengan Virtual Online sehingga Pengiriman tidak bisa dilakukan	Tidak melakukan Pengiriman Atlet pada Kegiatan KEJURDA Cabang Olahraga Karate dan tidak merealisasikan anggaran kegiatan
	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (	18 Orang	0	0		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEJURDA) Cabang Olahraga Karate					
Kejurda Cabang Olahraga Tae Kwon Do		25.000.000	0	0	Tidak Terlaksananya Kegiatan dikarenakan Covid 19 dan Pelaksanaan dilakukan dengan Virtual Online sehingga Pengiriman tidak bisa dilakukan	Tidak melakukan Pengiriman Atlet pada Kegiatan KEJURDA Cabang Olahraga Tae Kwon Do dan tidak merealisasikan anggaran kegiatan
	Terlaksananya kegiatan Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Tae Kwon Do	13 Orang	0	0		
PLCOB Sepak Takraw		79.289.600	53.036.000	66,89%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga sepak takraw
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Sepak Takraw	11 Orang	11 Orang	100%		
PLCOB Tae Kwon Do		193.948.900	52.416.000	27,03%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga tae kwon do
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tae kwon do	11 Orang	11 Orang	100%		
PLCOB Tenis Meja		223.937.400	50.389.000	22,50%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga tenis meja

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tenis meja	13 Orang	13 Orang	100%		
PLCOB Atletik		110.399.000	36.115.000	32,71%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga atletik
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Atletik	13 Orang	13 Orang	100%		
PLCOB Futsal		341.749.600	104.788.000	30,66%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga futsal
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Futsal	20 Orang	20 Orang	100%		
PLCOB Karate		185.088.800	40.025.600	21,63%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga karate
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Karate	11 Orang	11 Orang	100%		
PLCOB Pencak Silat		193.156.000	47.672.400	24,68%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga pencak silat
	Terpenuhinya PLCOB Pencak Silat	11 Orang	11 Orang	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
PLCOB Tinju		91.262.700	35.799.000	39,23%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga tinju
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tinju	9 Orang	9 Orang	100%		
PLCOB Bola Volly		129.520.400	55.409.200	42,78%	Kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih	Menghentikan Kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga bola volley
	Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bola Volly	11 Orang	11 Orang	100%		
Dukungan Pelayanan Stadion Seruni		332.720.000	298.847.000	89,82%		
	Terpenuhinya Dukungan Pelayanan Stadion Seruni	12 Bulan	12 Bulan	100%		

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

B. Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

A.1 Program Dukungan Layanan Pemerintahan

Pada Tahun 2020, Program Dukungan Layanan Pemerintahan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon memiliki Capaian Kinerja Keuangan sebesar 85,08% atau terealisasi Rp. 2.254.419.601,00 dari target anggaran Rp. 2.649.885.205,00,-.

Pada program ini terdapat empat indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Program yaitu tingkat disiplin aparatur, kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik, dan persentase ketersediaan data dan informasi sektoral. Program Dukungan Layanan Pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon pada Tahun 2020 berkinerja cukup baik tercermin dari keempat indikator capaian kinerja program terdapat 1 (satu) indikator memiliki tingkat capaian kinerja 100% dan 3 (lainnya) diatas 80%, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral;
Dinas Pemuda dan Olahraga selalu berupaya dalam memenuhi perencanaan dan pelaporan data sektoral diantaranya berupa data SPM (Standar Pelayanan Minimal), LPPD, LKPJ, dan SPIP. Sehingga untuk indikator persentase ketersediaan data dan informasi sektoral memiliki capaian indikator kinerja sebesar 100%.
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik;
Indikator ini memiliki target kinerja 100%, dengan criteria terdapat 561 aset Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dalam kondisi baik dari 621 jumlah keseluruhan asset sehingga diperoleh capaian realisasi kinerja sebesar 90,34%.
3. Tingkat disiplin aparatur;
Ketercapaian indikator tingkat disiplin aparatur memiliki nilai capaian indikator kinerja 95,13% dari target 100%, yang dilihat dari rata-rata kehadiran pegawai dan kehadiran apel pegawai selama satu tahun pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon. Capaian Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 15,48% dari tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon masih harus terus meningkatkan tingkat disiplin aparturnya sesuai dengan aturan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sehingga target indikator kinerja dapat tercapai.
4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas);
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon telah berupaya untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan dengan baik, dimana realisasi keuangan kegiatan sesuai berdasarkan cash budget dapat tercapai cukup baik, yaitu 84,25% dari terget yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Pada Program Dukungan Layanan Pemerintahan, ada beberapa kegiatan yang realisasi kinerja/anggarnya dibawah 80.00% yaitu :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
Kegiatan ini memiliki capaian kinerja relisasi anggaran hanya sebesar 33,31% dengan penyerapan sebesar Rp. 118.012.574,00,- dari target anggaran Rp. 354.280.000,00,-. Hal tersebut dikarenakan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, dan Air pada komponen rekening Belanja Listrik mengalokasikan untuk Belanja Listrik Stadion Seruni/Sport Center, akan tetapi dikarenakan Masa Pandemi Covid 19 penggunaan listrik di Stadion Seruni Sport Center tidak optimal dikarenakan terhentinya Pekerjaan Pembangunan Stadion Sport Center dampak Refocusing/Rasionalisasi Anggaran Covid 19.
2. Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan;
Tingkat capaian kinerja realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya sebesar 62,07 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.56.048.269,00,- dari Total Anggaran Rp. 90.300.000,00,- yang disebabkan belum semua Pegawai Non PNS Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon terdaftar BPJS, dari sejumlah 35 orang Pegawai Non PNS hanya 22 orang yang terdaftar BPJS. Diharapkan, pegawai yang belum terdaftar BPJS diupayakan bisa segera terdaftar di BPJS.

A.2 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga di Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana Kepemudaan dan Keolahragaan yang ada guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda dan atlet yang memiliki prestasi, kreativitas, kewirausahaan. Dalam kenyataannya pembangunan sarana dan prasarana telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan manusia.

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olahraga meliputi pembangunan sport center, pengadaan kebutuhan baik di kepemudaan dan keolahragaan, pemeliharaan prasarana dan sarana, serta penghargaan kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan organisasi, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan, kreativitas di tunjang dengan pemenuhan kebutuhan yang mereka butuhkan.

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon memiliki target anggaran Rp. 2.935.958.000,00,- dengan capaian realisasi keuangan 85,99% atau terealisasi sebesar Rp. 2.524.883.194,00,-.

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga memiliki 2 (dua) indikator kinerja program yang menjadi target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yaitu

1. Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan;

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga secara konsistensi telah menjalankan dalam pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan dengan menunjang beberapa kegiatan dalam mendukung ketercapaian Indikator Program dengan target yang tercantum dalam RPJMD sebesar 15% dengan target pemenuhan infrastuktur olahraga yaitu :

1. Sport Center dengan target paket pekerjaan berupa pekerjaan Tribun Utara, Timur, Selatan, pekerjaan lintasan dan pekerjaan Landscape.
2. Lapangan Ring tinju berupa pekerjaan pemeliharaan ring tinju dan penataan taman dan perapihan.

Pemenuhan ketercapaian indikator program sebesar 4%, dengan realisasi pemenuhan infrastuktur olahraga yaitu :

1. Sport Center dengan realisasi 1 paket pekerjaan berupa pekerjaan Landscape, meliputi Pekerjaan Landscape (Pengurugan Lahan Parkir) dan Pekerjaan Pintu Gerbang, dengan jumlah anggaran Rp. 2.504.280.000,00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.094.440.994,00,- atau sebesar 83,63%.
2. Lapangan Ring tinju berupa pekerjaan pemeliharaan ring tinju dengan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,00,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 48.764.200,00,- atau sebesar 97,53%.

Pembangunan Sport Center (Prioritas Daerah) dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum merupakan penunjang dalam meningkatkan nilai capaian indikator program yang pada Tahun 2020 dengan tingkat presentase sebesar 26,67%. Capaian Kinerja Indikator Program Tingkat Pemenuhan Infrastruktur Olahraga Perkotaan pada Tahun 2020 dibawah 50% disebabkan pada Tahun 2020 Anggaran pada Kegiatan penunjang Indikator Program yaitu Kegiatan Pembangunan Sport Center (Prioritas Daerah) mengalami Refocussing atau Rasionalisasi dampak Pandemi Covid 19, sehingga realisasi capaian indikator Program tidak dapat memenuhi target dari 15% hanya terealisasi 4%.

2. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga.

Untuk Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon melakukan berbagai upaya dalam konsistensi Anggaran yang diimplementasikan dalam Kegiatan yang mendukung Indikator Program ini yang memiliki target 30% ketercapaian, dari beberapa Sarana dan Prasarana yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 melalui realisasi proposal yang masuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga berupa Sarana Prasarana Olahraga Masyarakat dan Sarana Prasarana Kepemudaan. Dalam memenuhi nilai capaian realisasi Indikator ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat, berdasarkan dari proposal yang berasal dari 8 (Delapan) Kecamatan, dan juga terealisasi sebanyak 8 (Delapan) proposal yaitu berupa Alat Olahraga papan catur, bola sepak, raket bulu tangkis, Shuttlecock yang dibagikan ke 8 (Delapan) Kecamatan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, berdasarkan dari 2 (Dua) proposal yang masuk yang berasal dari Organisasi Kepemudaan yaitu Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan Kwarran, terealisasi sebanyak 1 (Satu) proposal yaitu berupa 10 Paket Tenda

yang terdiri dari Tenda Regu/Tenda Pleton, Tandu, dan Kasur Lipat yang diserahkan kepada Organisasi Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Sehingga Realisasi Kinerja Indikator Program ini sebesar 20% dari target 30% dengan tingkat capaian kinerja 66,67%. Adapun selisih target sebesar 10% tidak tercapai dikarenakan Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi sebagai kegiatan penunjang Indikator Program Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda, mengalami Refocussing atau Rasionalisasi dampak Pandemi Covid 19 yang menyebabkan Pemenuhan Sarana Prasarana Olahraga Prestasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga realisasi capaian indikator Program tidak dapat memenuhi target hanya tercapai 66,67% dari target 30%.

Realisasi keuangan beberapa kegiatan pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga tercapai cukup baik, terlihat dari capaian realisasi keuangan dari beberapa kegiatan tersebut diatas 80%.

A.3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Program Pengembangan pemuda di Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan Kepemudaan yang ada dalam organisasi guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda yang memiliki prestasi, kreativitas, kewirausahaan. Pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan kepemudaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan organisasi, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan, kreativitas.

Pada program ini Pemerintah Daerah Kota Cilegon telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 307.432.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 306.562.000,00 - atau 99,72%.

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda memiliki 2 indikator program yang menjadi target Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membina dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan di Kota Cilegon diantaranya:

1. Cakupan pembinaan organisasi pemuda;
Cakupan Organisasi Kepemudaan yang di bina dengan tingkat capaian realisasi sebesar 80% atau terdiri dari 65 organisasi yang di bina oleh bidang Pembinaan dan Pengembangan Pemuda yang terdiri dari 56 organisasi pemuda dan terdiri dari 8 kwarran 1 kwarcab yang ada di Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dan yang telah terealisasi terdiri dari 52 Organisasi yaitu 43 organisasi kepemudaan melalui wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon dan 8 kwarran 1 kwarcab melalui wadah Pramuka Kota Cilegon.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan target sebesar 45% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 177,78% dari 2.600 pemuda yang ada terdiri dari 2.240 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon dan 360 dibawah naungan Pramuka Kota Cilegon dan telah terealisasi sebanyak 2.080 atau 56,92% orang pemuda yang teridiri dari 1.720 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon dan 360 dibawah naungan Pramuka Kota Cilegon yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Realisasi keuangan beberapa kegiatan pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga tercapai cukup baik, terlihat dari capaian realisasi keuangan dari beberapa kegiatan tersebut diatas 80%.

A.4 Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Program Pengembangan olahraga di Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan olahraga guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh para atlit yang memiliki prestasi. Dalam kenyataannya, olahraga telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan manusia. Persoalannya adalah bagaimana agar olahraga dapat dijadikan wahana dalam membangun Daerah yang sehat dan kuat jasmani dan rohani. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pada program ini Pemerintah Daerah Kota Cilegon telah mengalokasikan alokasi sebesar Rp. 2.337.775.400,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.195.442.100,00,- atau 51,14%.

Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga memiliki 2 indikator program yang menjadi target Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membina dan mengembangkan olahraga prestasi di Kota Cilegon diantaranya:

1. Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina;

Dalam Ketercapaian Indikator Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sangat konsisten untuk pengembangan pembinaan atlet cabang olahraga yang saat ini mencapai 3.383 orang. Pada indikator ini telah ditetapkan target sebesar 12% dengan realisasi sebesar 1,4%, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2020 hanya 11,64%. Hal ini dikarenakan beberapa Kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Kinerja Program guna membina atlet cabang olahraga melalui Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA mengalami Refocussing atau Rasionalisasi dampak Pandemi Covid 19, serta menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator pun terhenti

sehingga realisasi capaian indikator Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina tidak dapat memenuhi dari target dari 12% hanya terealisasi 1,4%, yaitu hanya sebanyak 48 orang.

2. Proporsi cabang olahraga berprestasi;

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai langkah-langkah guna meningkatkan prestasi cabang olahraga yang ada di Kota Cilegon melalui Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA. Selain itu, pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi dilakukan secara khusus melalui 9 (sembilan) Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB). Target indikator ini sebesar 65%, dengan realisasi sebesar 56,25%, yaitu dari 16 cabang olahraga yang ada, ada 9 cabang yang mendapatkan prestasi. Sehingga capaian kinerja indikator tersebut sebesar 86,54%. Pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi melalui Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB) pada Tahun 2020 mengalami kendala yaitu hanya dilaksanakan selama 4 bulan dikarenakan Anggaran Kegiatan Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB) mengalami Refocussing atau Rasionalisasi dampak Pandemi Covid 19, serta menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator pun terhenti.

Pada program ini, terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi dibawah 80% diantaranya :

1. Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat

Nilai Anggaran Rp. 50.000.000,00- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Realisasi Kinerja 0%. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid 19 menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga Pelaksanaan Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat tidak dilaksanakan.

2. Kegiatan Kejurda Cabang Olahraga Karate

Anggaran senilai Rp. 25.000.000,00- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi Kinerja 0%. Hal ini dikarenakan dikarenakan Pandemi Covid 19 menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga Pelaksanaan Kegiatan Kejurda Cabang Olahraga Karate di Provinsi Banten dilakukan dengan Virtual Online sehingga Pengiriman Atlet pun tidak bisa dilakukan.

3. Kegiatan Kejurda Cabang Olahraga Tae Kwon Do

Anggaran senilai Rp. 25.000.000,00- dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran Rp. 0,- atau 0%. Realisasi Kinerja 0%. Hal ini dikarenakan dikarenakan Pandemi Covid 19 menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga Pelaksanaan Kegiatan Kejurda Cabang Olahraga Tae Kwon Do dilakukan dengan Virtual Online sehingga Pengiriman Atlet pun tidak bisa dilakukan.

4. PLCOB Sepak Takraw

Tingkat capaian kinerja keuangan Kegiatan PLCOB Sepak Takraw sebesar 66,89% dengan penyerapan sebesar Rp. 53.036.000,00,- dari target anggaran Rp. 79.289.600,00,-, dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini dibawah 70% disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga sepak takraw pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 66,89% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

5. PLCOB Tae Kwon Do

Kegiatan ini memiliki nilai anggaran Rp. 193.948.900,00,- dengan capaian realisasi sebesar 27,03% atau terserap sebesar Rp. 52.416.000,00,-, dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Hal ini disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga tae kwon do pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 27,03% adalah penyerapan belanja bahan alat

perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

6. PLCOB Tenis Meja

Tingkat capaian kinerja keuangan Kegiatan PLCOB Tenis Meja sebesar 22,50% dengan penyerapan sebesar Rp. 223.937.400,00,- dari target anggaran Rp. 50.389.000,00,-, serta tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini dibawah 70% disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Tenis Meja pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 22,50% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

7. PLCOB Atletik

Kegiatan ini memiliki nilai anggaran Rp. 110.399.000,00,- dengan capaian realisasi sebesar 32,71% atau terserap sebesar Rp. 36.115.000,00,-, dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Hal ini karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Atletik pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 32,71% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan

untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

8. PLCOB Futsal

Tingkat capaian kinerja keuangan Kegiatan PLCOB Futsal sebesar 30,66% dengan penyerapan sebesar Rp. 104.788.000,00,- dari target anggaran Rp. 341.749.600,00,-, serta tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini dibawah 70% disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Futsal pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 30,66% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

9. PLCOB Karate

Kegiatan ini memiliki nilai anggaran Rp. 185.088.800,00,- dengan capaian realisasi sebesar 21,63% atau terserap sebesar Rp. 40.025.600,00,-, dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Hal ini karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Karate pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 21,63% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman

pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

10. PLCOB Pencak Silat

Tingkat capaian kinerja keuangan Kegiatan PLCOB Pencak Silat sebesar 24,68% dengan penyerapan sebesar Rp. 47.672.400,00,- dari target anggaran Rp. 193.156.000,00,-, serta tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini dibawah 70% disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Pencak Silat pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 24,68% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

11. PLCOB Tinju

Kegiatan ini memiliki nilai anggaran Rp. 91.262.700,00,- dengan capaian realisasi sebesar 39,23% atau terserap sebesar Rp. 35.799.000,00,-, dengan tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Hal ini karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Tinju pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 39,23% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran

belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

12. PLCOB Bola Volly

Tingkat capaian kinerja keuangan Kegiatan PLCOB Bola Volly sebesar 42,78% dengan penyerapan sebesar Rp. 55.409.200,00,- dari target anggaran Rp. 129.520.400,00,-, serta tingkat capaian realisasi kinerja indikator kegiatan 100%. Capaian kinerja keuangan pada kegiatan ini dibawah 70% disebabkan karena dampak Pandemi Covid 19 anggaran reguler kegiatan ini mengalami Refocusing/Rasionalisasi yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan tanpa adanya anggaran belanja sewa tempat latihan dan upah pelatih, dan akhirnya kegiatan pemusatan latihan cabang olahraga Bola Volly pada Tahun 2020 hanya berlangsung selama 3 bulan. Selain itu menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ dan Surat Edaran Walikota Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 untuk melaksanakan pembatasan social yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan COVID 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan. Penyerapan anggaran 42,78% adalah penyerapan belanja bahan alat perlengkapan pendidikan/pelatihan untuk 1 tahun, belanja jasa upah tenaga kerja, belanja transportasi akomodasi, dan belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan, namun dikarenakan anggaran kegiatan dirasionalkan untuk refocusing penanganan Covid 19 yang hanya menyisakan anggaran belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan untuk 9 bulan, sedangkan tidak ada anggaran untuk upah pelatih, transport atlet untuk 9 bulan dan belanja sewa tempat, menyebabkan tidak mungkin kegiatan pembinaan cabang olahraga tetap dilaksanakan.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.1 Permasalahan :

1. Belum optimalnya prestasi diberbagai kejuaraan nasional serta belum efektifnya pembinaan cabang olahraga yang belum memiliki prestasi;
2. Belum optimalnya peran pemuda pelopor dalam meningkatkan kreatifitas dan produktivitas kepemudaan;
3. Belum meratanya pembangunan sarana prasarana olahraga sesuai standard dan DED pembangunan Sport Center yang sudah lama;
4. Masih perlunya pembaharuan asset guna menunjang peningkatan kinerja aparatur yang mendorong peningkatan kinerja dinas.

B.2 Solusi :

1. Meningkatkan Prestasi olahraga melalui :
 - a. Peningkatan kualitas pelatih melalui Pemusatan Latihan Cabang Olah Raga berprestasi (PLCOB);



- b. Peningkatan prestasi olahraga melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkelanjutan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - c. Peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, penyandang cacat dan masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional;
 - d. Mengikutsertakan atlet Kota Cilegon pada event olahraga tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - e. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberian penghargaan dan kesejahteraan bagi pelaku olahraga berprestasi.
2. Membangun gedung pemuda atau pusat kegiatan bagi pemuda sebagai wadah/tempat mengembangkan kreatifitas dan produktivitas kepemudaan dengan peran serta pemuda pelopor;
3. Pembangunan / Pemerataan sarana prasarana olahraga untuk semua cabang olahraga sesuai standar dengan melakukan Review DED Sport Center;
4. Pengadaan asset yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

3.1.2.14 Statistik

A. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

Tabel 3.1.2.14a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu						
Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah						
	Persentase ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan tepat waktu	100,00	33	33	Dokumen yang disusun hanya Profil Pembangunan Kota Cilegon sedangkan Dokumen statistic social dan ekonomi tidak dilaksanakan dikarenakan refocusing	
Penyusunan Statistik Ekonomi Kota Cilegon		10.394.000	3.394.000	32.65		
	jumlah dokumen statistik ekonomi kota cilegon	dokumen	1,00	0,00	Di refocusing sehingga penyusunan tidak terlaksanan	
Penyusunan statistik sosial Kota Cilegon			1.740.000,00	1.740.000,00	Di refocusing	
	jumlah dokumen sttaistik sosial kota cilegon	dokumen	1,00	0,00		
Penyusunan Profil pembangunan Kota Cilegon		111.428.208,00	110.640.000,00	99.29	Ada 2 kegiatan yaitu : Pembuatan film Pendek dan Penyusunan Statistik Sektoral	
	Jumlah dokumen profil pembangunan kota cilegon dan film pendek	2 dok	2 dok	100 %		

Tingkat keberhasilan Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah ditentukan oleh Indikator Program sebagai berikut :

No	Indikator Program	Target	Definisi Operasional

1	Persentase Ketersediaan Dokumen Statistik Daerah	100%	<u>Jumlah dokumen statistik yang tersusun</u> x 100% Target dokumen statistik yang tersusun $= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ (tercapai) *target 2 (Dua) Dokumen statistik yang tersusun pada tahun 2020 adalah: Profil Pembangunan Kota Cilegon yang berisi kan Buku Statistik Sektoral dan Visualisasi Film Pendek tentang Progress Pembangunan Kota Cilegon.

Tingkat Keberhasilan program/kegiatan pengembangan data dan statistik daerah ditentukan oleh indikator persentase ketersediaan dokumen statistik daerah dari 2 (dua) indikator kinerja target dan kinerja realisasi mencapai 93,70%, meskipun terdapat 1 (Satu) program/kegiatan dengan serapan kurang dari 75%, dikarenakan efesiensi dengan 1 (Satu) kegiatan mencakup keseluruhan pemaparan indikator statistik Daerah Kota Cilegon. Adapun dari capaian serapan anggaran dimaksud, diperoleh output kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan data –data sekunder statistik ekonomi, publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha, sebagai indikator makro pencapaian ekonomi Daerah Kota Cilegon yang seharusnya tersusun 1 (satu) Buku Statistik Ekonomi dengan adanya Pandemi Covid-19 maka anggaran penyusunan buku tersebut dialihkan kepada Penanganan Penanggulangan Covid-19.
2. Penyusunan data-data sektoral Profil Pembangunan Kota Cilegon, berisikan kompilasi data, informasi indikator makro pembangunan dan informasi layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Target output 1 buku realisasi output sesuai 1 buku). Serta penyusunan data-data sektoral dalam bentuk visualisasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) (target output 1 DVD/visual dan realisasi output sesuai 1 DVD/visual).

3. Penyusunan data-data sekunder statistik sosial, publikasi IPM indikator kesejahteraan rakyat (inkesra) sebagai gambaran makro hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah kota cilegon dalam upaya meningkatkan pemberdayaan manusia di kota cilegon yang seharusnya tersusun 1 (satu) buku statistic ekonomi dengan adanya pandemic covid-19 maka anggaran penyusunan buku tersebut dialihkan kepada penanganan penanggulangan covid-19.

Namun dari uraian 3 (Tiga) indikator kinerja tersebut, terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan tingkat capaian serapan anggaran kegiatan dibawah 75% dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan statistik Ekonomi Kota Cilegon kurang dalam penyerapan, sehingga mempengaruhi output kinerja penyusunan buku statistik ekonomi kota cilegon dan ini diakibatkan adanya pengalihan anggaran untuk penanggulangan covid-19 dan anggaran yang tersisa merupakan anggaran kegiatan pendukungnya. Sehingga tercapai efesiensi anggaran.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya
2. Terbatasnya ketersediaan data-data yang ada di Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan data/informasi secara cepat, tepat dan akurat.
3. Adanya pengalihan anggaran kegiatan statistic ekonomi dan statistic sosial ke anggaran penanggulangan covid 19 Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020 sehingga mempengaruhi target capaian pada 2 kegiatan tersebut.

SOLUSI

1. Peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dengan melalui pendidikan dan pelatihan
2. Mengusulkan perekrutan tenaga sesuai dengan kompetensinya
3. Meningkatkan koordinasi dan pemahaman tentang pentingnya data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekota cilegon



2. Penambahan anggaran kegiatan pada urusan statistik sektoral

3.1.2.15 Persandian

A. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK

Tabel 3.1.2.15a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Persandian

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah						
Program Penyelenggaraan Persandian						
	Tingkat penyelenggaraan persandian	100	50	50	Sifatnya berita melalui sanapati (persandian) karena banyak kegiatan yang difocusing (3 kegiatan) maka target kinerja tidak mencapai 100%	Kegiatan yang tercapai adalah Sterilisasi ruang kerja pimpinan (PU, KESBANG DINDIK DINKES, POL PP) dan penyelenggaraan persandi (SANAPATI) dan tidak tercapai keamanan informasi (Sertifikat Elec dan Securty Assesement). DARI 4 Target Kegiatan hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan.
Peningkatan pengembangan kapasitas layanan teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi		107.600.000,00	106.273.150,00	98,77%		
	Terlaksananya pengelolaan informasi Sandi	230 jenis	230 jenis			
	Terpeliharanya Alat-alat Komunikasi	20 bh	20 bh		Bell, Sound System, TOA, HT, Sirine	
	Terpeliharanya Alat-alat Telekomunikasi	85 bh	85 bh		Telpon, PABX dan Kabel Telpon	
Bimbingan teknis keamanan informasi		2.500.000,00	2.500.000,00		Belanja ATK sebelum refocusing	
	jumlah pengelola informasi persandian di OPD	85	0			
Sterilisasi penginderan ruang kerja pimpinan		28.100.000,00	26.956.000,00	95%	Reguler 50 jt	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengamanan informasi ruang kerja pimpinan dan OPD	5 OPD	5 OPD		Kesbanglinmas, Satpol PP, DPUTR, Dindik dan Dinkes Seharusnya target 2020 semua OPD sdh ter sterilisasi namun karena dengan adanya refocusing tersisa 5 Dinas: Dinkop, BPMKB, Dinas Pariwisata, Disnaker dan DLH	
Penerapan Sertifikat Elektronik		4.345.000,00	4.345.000,00		Refokusing hanya belanja ATK	
	Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sertifikat Elektronik	4	-			
Penilaian Keamanan Informasi		3.550.000,00	-		Refokusing, hanya belanja ATK	
	Terlaksananya Kegiatan Penilaian Keamanan Informasi	4	-		Ada edaran dari pusat BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tidak boleh ke daerah karena pandemic	

Penyelenggaraan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan keamanan informasi dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem Persandian Negara. Persandian merupakan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan menjamin originalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah, merupakan hal yang sangat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Pelaksanaan Pemerintahan akan sangat bergantung dengan didukung oleh pengguna teknologi informasi di segala aspek, mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), Perencanaan (*e-planning*), Keuangan (*e-budgeting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking*, dan berbagai ancaman lainnya. Secara umum, capaian kinerja program Penyelenggaraan persandian untuk kelima kegiatan yaitu :

1. Peningkatan pengembangan kapasitas layanan teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi
Penyerapan anggaran pada kegiatan Peningkatan pengembangan kapasitas layanan teknologi keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi sebesar 98,77 % karena pada kegiatan tersebut diperuntukan pengelolaan Informasi sandi dan pemeliharaan alat alat komunikasi dan telekomunikasi.
2. Bimbingan teknis keamanan informasi

Untuk kegiatan bimbingan teknis tidak mencapai target sesuai yang diinginkan karena anggarannya terkena recofusing covid 2020 yang semula Rp.50.000.000,- menjadi 2.500.000,- sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut hanya dapat dipakai untuk penyediaan Alat Tulis Kantor

3. Sterilisasi Penginderaan Ruang Kerja

Pada tahun 2020, sterilisasi ruang kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan target 5 Organisasi Perangkat Daerah dan telah dilakukan terhadap 5 (Lima) titik strategis yang rawan penyadapan dari pihak non pemerintah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah. Berikut daftar 5 titik tersebut : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang; Badan Kesbangpol; Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan

4. Penerapan Sertifikat Elektronik

Pada tahun 2020 Kegiatan Penerapan Sertifikat Elektronik tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran pada kegiatan tersebut.

5. Penilaian Kemanan Informasi

Pada tahun 2020 Kegiatan Penerapan Sertifikat Elektronik tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran pada kegiatan tersebut dan adanya Surat edaran dari pusat BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) tidak boleh ke daerah karena pandemic .

Permasalahan

1. Tidak adanya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang persandian (tidak ada fungsional sandiman) dan Tenaga IT (*information technology*) sebagai penunjang pelaksanaan persandian.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan persandian, serta terbatasnya Tenaga ahli atau Narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang harus melayani di bidang persandian pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Pandemi Covid 19 menyebabkan Refocussing Anggaran Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020

Solusi

1. Koordinasi dengan BKPP agar merekrut personil yang mempunyai kompetensi dibidang persandian dan peningkatan sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dan pelatihan persandian
2. Melaksanakan kerjasama dengan badan siber dan sandi Negara (BSSN) Jakarta dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan persandian.

3.1.2.16 Kebudayaan

A. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DAN UPTD BALAI BUDAYA

Tabel 3.1.2.16a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya					Ketika ada sinkronisasi antara undang-undang yang berlaku dengan pertauran daerah yang harus disesuaikan dengan visi misi daerah	Kita menyesuaikan peraturan daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan dibidang kebudayaan dengan skala prioritas
Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah		236.942.000,00	235.916.000,00	99,57%	Banyaknya aspek yang terdapat dalam upaya pembinaan dan pelestarian seni, budaya dan sejarah daerah yang menjadi fokus perhatian	Dilakukan kegiatan harus memperhatikan skala prioritas sesuai dengan renstra OPD
	Jumlah Sanggar yang dibina	87,00	0,00	0,00%	Tidak terealisasinya dalam indikator jumlah sanggar yang dibina dikarenakan anggaran yang tersedia terdampak refocusing COVID 19, sehingga untuk indikator sanggar yang dibina tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, capaian jumlah sanggar yang dibina pada tahun 2020 mengalami stagnansi atau dengan kata lain tidak ada peningkatan capaian dari tahun sebelumnya	Tetap mendorong sanggar-sanggar yang ada untuk melakukan latihan tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun tidak ada anggaran yang mendukung akibat adanya pandemi.
	Jumlah Peguron Yang Dibina	59,00	0,00	0,00%	jumlah peguron yang dibina tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersedia mengalami kebijakan realokasi/ refocusing dalam rangka penanganan pandemi Virus COVID 19 di Kota Cilegon.	Tetap mendorong peguron-peguron yang ada untuk melakukan latihan tetap memperhatikan protokol kesehatan walaupun tidak ada anggaran yang mendukung akibat adanya pandemi
	Cakupan Kajian Seni (50%)	67,00	53.3	79.55%	kajian seni dengan realisasi sebesar 79.55%, dikarenakan anggaran untuk kegiatan yang mendukung tercapainya indikator cakupan kajian seni terkena dampak refocusing COVID 19, yang mana kegiatan tersebut hampir semuanya mengalami kebijakan realokasi seperti saresehan Bahasa Jawa Banten Dialek Jawa Cilegon,	Membentuk Tim Ahli Tingkat Kota Cilegon atau bekerjasama sinergi dengan instansi terkait

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Kegiatan Siteplan dan DED Desa Budaya, Workshop dan Pagelaran, Festival Golok Day dan Pembinaan Seni Budaya Daerah.	
	Cakupan Fasilitas Seni (30%)	71,00	57,00	80,28%		Mendorong kelengkapan formal lembaga seperti sanggar seni, komunitas dan peguron/ komunitas
	Cakupan Gelar Seni (75%)	100,00	0,00	0,00%	Cakupan gelar seni tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk kegiatan mengalami kebijakan realokasi/refocusing atau terdampak COVID 19, adapun kegiatan yang mendukung ketercapaiannya indikator yaitu Festival Golok Day dan Festival Maulid di samping itu dengan adanya pandemi COVID 19 ini dilarang untuk mengundang kerumunan massa.	Gelar seni akan mengundang kerumunan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan pada saat pandemi, dan sebagai upaya untuk memutus dan menularkan virus covid 19. Sehingga upaya yang dilakukan dengan event-event yang mengundang kerumunan masa akan di kurangi atau dibatasi dan penjadwalan event lebih sedikit pesertanya.
	Cakupan Misi Kesenian (100%)	100,00	0,00	0,00%	Program atau kegiatan misi kesenian Daerah tidak dapat dilaksnakan karena terdampak oleh adanya pandemic global yaitu virus COVID 19 dimana anggaran kegiatannya harus dialihkan untuk penanganan virus tersebut, sehingga kegiatan yang semula akan di laksanakan di Tangerang Selatan dalam rangka event APEKSI tidak dilaksanakan.	Kita menyesuaikan dengan instruksi kemendagri yang meniadakan kegiatan yang dapat mengundang kerumunan
	Cakupan SDM Kesenian (25%)	25,00	25,00	100%		
	Cakupan Tempat Kesenian (100%)	100,00	100	100%		
	Cakupan Organisasi Kesenian (34%)	67,00	66.67	99.51%		
	Cakupan Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Kawasan Dan Struktur Cagar Budaya) Yang Dilesatarikan	29,00	9,00	31,03%	Kurang dukungan anggaran jadi terbatasnya jumlah cagar budaya yang sudah dikaji secara ilmiah	Membentuk tim ahli cagar budaya Tk.Kota Cilegon
	Cakupan Bahasa dan Adat Istiadat/ Nilai-nilai Budaya Daerah	2,00	2,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Cakupan Sejarah/ Kepurbakalaan dan Museum	1,00	0,00	0,00%	Cakupan sejarah/ kepurbakalaan dan museum tidak dapat dilaksanakan karena terdampak oleh adanya pandemi global yaitu virus COVID 19 dimana anggaran kegiatannya harus dialihkan untuk penanganan virus tersebut.	Mendorong terbentuk Tim Ahli Tingkat Kota Cilegon dan bersinergi dengan lembaga/instansi terkait.
Festival Maulid		6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Festival Maulid Tingkat Kota Cilegon	1,00	0,00	0,00%	Untuk kegiatan yang subsatansi (pawai dan pertunjukan) tidak dilakukan karena berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sehingga penyerapan yang ada hanya untuk ATK.	Mengingatn stakeholder kegiatan tersebut hanya dalam bentuk promosi. Atau dengan menyusun jadwal lomba dengan peserta lebih sedikit (Offline dan Online)
Festival Golok Day		14.500.000,00	14.500.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelestarian warisan Budaya tangible	1,00	0,00	0,00%	Untuk kegiatan yang subsatansi tidak dilakukan karena berkaitan dengan kondisi pandemi	Mengingatn stakeholder kegiatan tersebut hanya dalam bentuk promosi. Atau dengan Menyusun jadwal lomba dengan peserta lebih sedikit serta melalui virtual. (Offline dan Online)
Pembinaan Seni Budaya Daerah Kota Cilegon		49.942.000,00	49.782.000,00	99,68%		
	Terbinanya seni budaya dikota cilegon dalam bentuk GembrungBudaya, MTQ, prosesi seni, pementasan seni propinsi,festival qosidah,pementasankesenian diluar daerah dan fasilitasi kegiatan kesenian	7,00	0,00	0,00%	Untuk kegiatan yang subsatansi tidak dilakukan karena berkaitan dengan kondisi pandemi	Mengingatn stakeholder kegiatan tersebut hanya dalam bentuk promosi. Dan juga dengan penampilan peserta acara prosesi akan di batasi serta untuk kegiatan terkait akan dilaksanakan melalui media massa dan di tayangkan melalui media social dan cetak.
Penetapan Cagar Budaya Kota Cilegon		74.200.000,00	74.200.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya kota Cilegon	2,00	2,00	100%		
Bintek Cagar Budaya		12.300.000,00	12.300.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Bintek Cagar Budaya	1,00	0,00	0,00%	Untuk kegiatan yang subsatansi tidak dilakukan karena berkaitan dengan kondisi pandemi	Mengingatn stakeholder kegiatan tersebut hanya dalam bentuk promosi. Dan juga

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						membatasi peserta bintek atau melalui Virtual.
Penyusunan Pokok-pokok kebudayaan daerah dan sejarah Kota Cilegon		80.000.000,00	79.134.000,00	98,92%		
	Terlaksannnya Penyusunan Dok PPKD	1,00	1,00	100%		
	Terlaksannnya FGD dan sosialisasi PPKD	1,00	1,00	100%		

Pembangunan kebudayaan mempunyai andil yang besar dalam membangun watak masyarakat yang berbudaya (Nation and character building) menuju masyarakat yang madani/modern (civiled society). Peran strategis tersebut masih mempunyai makna bagi pembangunan daerah di masa depan, mengingat kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada ketatnya kompetisi di segala lini, akulturasi dan hegemoni budaya, hedonisme yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup dengan dekadensi moral dalam perwujudannya di masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian seni budaya, situs, cagar budaya dan nilai-nilai tradisional merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan problem solving dalam mewujudkan hal tersebut.

Berbicara kebudayaan secara umum, maka berbicara pula deskripsi secara umum tentang unsur-unsur kebudayaan yang menjadi urusan pemerintah dalam mengidentifikasi aspek-aspek kebudayaan itu sendiri diantaranya aspek kesenian, aspek adat dan tradisi, aspek kesejarahan dan keurbakalaan serta aspek cagar budaya, yang keseluruhannya menjadi tugas dan fungsi dari OPD sesuai dengan SOTK di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, melalui Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah, maka amatlah penting partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pertahanan, pengembangan dan pemanfaatan budaya yang menjadi asset dan identitas daerah. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon memiliki peran dan kontribusi dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pelestarian seni budaya, dan sejarah daerah dengan menetapkan target tertentu seperti yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Adapun capaian dari indikator program pembinaan dan pelestarian seni, budaya dan sejarah daerah yaitu:

1. Cakupan sanggar seni yang dibina

Pada tahun 2020 Tidak terealisasinya dalam indikator jumlah sanggar yang dibina dikarenakan anggaran yang tersedia terdampak refocusing COVID 19, sehingga untuk indikator sanggar yang dibina tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, capaian jumlah sanggar yang dibina pada tahun 2020 mengalami stagnansi atau dengan kata lain tidak ada peningkatan capaian dari tahun sebelumnya.

Salah satu prestasi yang diraih pada tahun 2020 yaitu HIMMI Kota Cilegon mengikuti lomba marawis yang di selenggarakan oleh Kodim 0623 dan sekaligus mewakili ke tingkat korem banten.

2. Cakupan jumlah peguron yang dibina

Pada tahun 2020 jumlah peguron yang dibina tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang tersedia mengalami kebijakan realokasi/ refocusing dalam rangka penanganan pandemi Virus COVID 19 di Kota Cilegon. Salah satu prestasi yang dapat diraih pada tahun 2020 tetap melakukan dan pembinaan terhadap peguron untuk berprestasi melalui lomba yang diselenggarakan oleh kodim 0623 yang mana lomba tersebut dilakukan secara virtual, peguron berru sakti menjadi juara umum sedangkan sinar srenggani menjadi juara ke 2.

3. Cakupan kajian Seni(50%)

Pada tahun 2020 capaian SPM cakupan kajian seni yang mana dalam target ditetapkan sebesar 67% dan realisasi sebesar 53,3% dengan capaian kinerja 79,55%. Realisasi dihitung dari dengan perhitungan 8 kajian yang telah dilaksanakan dibagi dengan total cakupan kajian sebanyak 15. Kinerja ndikator jika dilihat dari capaian SPM adalah $(53.3\%/50\% \times 100\%=106,6\%)$. Walaupun pada tahun 2020 banyak mengalami kegiatan yang terdampak refocusing seperti saresehan Bahasa Jawa Banten Dialek Jawa Cilegon, Kegiatan Siteplan dan DED Desa Budaya, Workshop dan Pagelaran, Festival Golok Day dan Pembinaan Seni Budaya Daerah.

Adapun cakupan kajian seni yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu: 1. Seminar Penetapan Cagar Budaya, 2. Bintek Cagar Budaya 3. Narasumber penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah 5. Study kepustakaan Penetapan cagar Budaya 6. Penggalian Penetapan cagar Budaya 7. Study banding Lawatan ke jogja dalam rangka PPKD 8. Dokumentasi penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah

4. Cakupan Fasilitas Seni (30%)

Pada tahun 2020 capaian SPM cakupan seni yang mana dalam target sebesar 71% dan realisasi sebesar 57% dengan capaian kinerja 80,28%, dilihat capaian SPM tahun 2020 pada indikator cakupan fasilitas seni (30%) adalah 57% dengan perhitungan 4 cakupan fasilitas yang dilaksanakan, sehingga nilai yang didapat adalah $(57\%/30\% \times 100\%=190\%)$.

Adapun cakupan Fasilitas seni yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu: 1. Bimbingan Organisasi Latihan Paduan Suara dan Latihan Marching Band, 2. Dewan Kesenian Cilegon (DKC) 3. Narasumber penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah 5. Study kepustakaan Penetapan cagar Budaya 6. Penggalian Penetapan cagar Budaya 7. Study banding Lawatan ke jogja dalam rangka PPKD 8. Dokumentasi penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah

5. Cakupan gelar seni (75%)

Capaian SPM tahun 2020 pada indicator cakupan gelar seni (75%) adalah 0% Karena cakupan gelar seni tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk kegiatan mengalami kebijakan realokasi/refocusing atau terdampak COVID 19, adapun kegiatan yang mendukung ketercapaiannya indikator yaitu Festival Golok Day dan Festival Maulid yang tidak terlaksana karena adanya pandemi COVID 19, karena dilarang untuk mengundang kerumuhan massa.

6. Cakupan Misi Kesenian (100%)

Capaian SPM tahun 2020 pada indicator cakupan misi kesenian (100%) adalah 0%. kegiatan misi kesenian Daerah tidak dapat dilaksanakan karena terdampak oleh adanya pandemic global yaitu virus COVID 19 dimana anggaran kegiatannya harus dialihkan untuk penanganan virus tersebut, sehingga kegiatan yang semula akan dilaksanakan di Tangerang Selatan dalam rangka event APEKSI tidak dilaksanakan.

7. Cakupan SDM Kesenian (25%)

Capaian SPM tahun 2020 pada indicator cakupan SDM kesenian (25%) adalah 100% dengan perhitungan 2 cakupan SDM yang dipenuhi dibagi dengan total cakupan SDM ($8 \text{ SDM} = 2/8 \times 100\% = 25\%$), sehingga nilai yang didapat adalah ($25\%/25\% \times 100\% = 100\%$).

Adapun kegiatan cakupan SDM Kesenian pada tahun 2020 yaitu : 1. Budayawan dalam prokes 2. Media Massa Baraya Post 3. BCO (berita Cilegon online)

8. Cakupan Tempat Kesenian (100%)

Cakupan SPM tahun 2020 pada indikator Cakupan tempat kesenian adalah 100% adapun sesuai dengan Peraturan Pendidikan Kebudayaan No. 85 Tahun 2013 yaitu Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal : 1 Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

Kegiatan Sanggar Seni Kota Cilegon berupa sub kegiatan tempat pertunjukan gelar seni dan pameran, serta digunakan juga untuk pertunjukan kesenian non tradisional oleh para penggiat kesenian di Kota Cilegon, hal ini sudah sesuai dengan target SPM sebesar 100%.

9. Cakupan Organisasi (34%)

Cakupan organisasi Kesenian memiliki capaian target SPM yang sebesar 196%. Cakupan organisasi kesenian yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota cilegon telah sesuai dengan target kinerja SPM yaitu 1 buah organisasi structural dan Lembaga Dewan Kesenian Cilegon yaitu DKC.

10. Cakupan cagar budaya (benda, bangunan, kawasan dan struktur cagar budaya) yang dilesatarikan.

Dari 29 cagar budaya yang telah diinventarisasi hanya 10 yang telah dikaji, agar cagar budaya tersebut tidak punah maka dilaksanakan kajian oleh tim ahli cagar budaya propinsi banten terhadap cagar yang sudah ditetapkan oleh pelestarian cagar budaya. Terdapat

pemeringkatan terhadap 9 cagar budaya yang masuk dalam kategori regional dan local. Pada Tahun 2020, realisasinya sebanyak 5 cagar budaya yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Cilegon nomor 430/kep-298-disparbud/2020 adapun capaian sebesar 31.03%.

11. Cakupan Bahasa dan adat istiadat/nilai-nilai budaya daerah

Berdasarkan perwal nomor 63 tahun 2019 tentang rencana strategis perangkat daerah 2016-2021, maka cakupan bahasa dan istiadat cakupan kajian seni yang telah dilakukan berdasarkan indikator diatas pada tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan dengan presentase sebesar 100 % dari target tahun 2020 sebesar 2 kegiatan.

Adapun kegiatan cakupan bahasa dan adat istiadat/nilai-nilai budaya daerah yaitu: Kegiatan Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, yang didalamnya terdapat cakupan Bahasa dan istiadat/nilai-nilai budaya daerah.

12. Cakupan Sejarah/kepurbakalaan dan Museum

Cakupan sejarah/ kepurbakalaan dan museum tidak dapat dilaksanakan karena terdampak oleh adanya pandemi global yaitu virus COVID 19 dimana anggaran kegiatannya harus dialihkan untuk penanganan virus tersebut.

Permasalahan

Dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Minimnya Anggaran dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan.
2. Perlunya tindak lanjut kajian dan penetapan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kota Cilegon sebagai asset daerah/heritage.
3. Minimnya alokasi anggaran yang diberikan untuk fasilitasi kegiatan dalam rangka memenuhi event-event dalam dan luar daerah.

Solusi

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah, maka disusunlah rumusan problem solving yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Diantaranya adalah :

1. Menyusun kajian atau penelitian tentang penyusunan dokumen PPKD sebagai tindak lanjut/penyempurnaan PPKD tahun 2019, kegiatannya adalah Penyusunan Dokumen PPKD yang terkoneksi dengan aplikasi APIK kemendikbud.
2. Pemeringkatan benda, situs dan kawasan cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya Propinsi Banten terhadap beberapa cagar budaya Cilegon yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPCB propinsi banten, kegiatannya adalah penetapan cagar budaya kota Cilegon.
3. Optimalisasi anggaran terhadap fasilitasi kegiatan seni dengan melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi, solusi ini dilakukan melalui kegiatan promosi dan propaganda kegiatan seni.

3.1.2.17 Perpustakaan

A. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Tabel 3.1.2.17a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Layanan Pemerintahan	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	95.00%	75.00%	78.95%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	86.00%	74.93%	87.13%		
	Tingkat kedisiplinan Aparatur	93.00%	90.33%	97.13%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	95.00%	79.88%	84.08%		
Program Peningkatan Layanan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan terhadap Populasi yang harus dilayani	27.5%	3.09 %	11.24%		
	Cakupan Anggota Perpustakaan	2356 orang	401 orang	17.02%		
	Persentase Jumlah Perpustakaan Kelurahan yang terkelola terhadap Jumlah Perpustakaan Kelurahan	23.36 %	23.36 %	100%		
	Peningkatan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	29776 eksemplar	30787 eksemplar	103,40%		
Peningkatan Layanan Perpustakaan		Rp 66,134,000	Rp 60,684,000	91.76%		
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		
Lomba Bercerita		Rp 80,996,700	Rp 80,996,700	100,00%		
	Menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca melalui cerita budaya lokal daerah	90 orang peserta	90 orang peserta	100,00%		
Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka		Rp 84,293,000	Rp 82,360,600	97.71%		
	Meningkatnya jumlah koleksi bahan pustaka	1.000 eksemplar	708 eksemplar	70.80%	Harga Buku di Pasaran yang berubah/naik	

3.1.2.17 Perpustakaan

A.1. Analisis Ketercapaian Program dan Kegiatan

A.1.1 Program Dukungan Layanan Pemerintahan

Untuk Program Dukungan Layanan Pemerintahan ini memiliki 4 indikator kinerja, dengan rincian capaian kinerja program sebagai berikut:

- **Indikator Presentase Ketersediaan data dan informasi sektoral** pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 95% dan sampai dengan Triwulan 4 terealisasi 75% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 78,95% . Indikator ini didukung dengan ketersediaan data dan informasi sektoral dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah melalui LKPJ, LPPD, SPM, dan Lakip. Namun pada DPAD tidak terdapat SPM sehingga tidak dapat memperoleh capaian 100%
- **Indikator Presentase Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik** pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 86% dan sampai dengan Triwulan 4 terealisasi 74,93% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 87,13% . Yang dihitung dari jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana kantor yang dimiliki DPAD. Pada Tahun 2020 ini DPAD melakukan beberapa pengadaan dan pemeliharaan terkait dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPAD melalui kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan meubelair, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin/berkala komputer.
- **Indikator Tingkat Disiplin Aparatur** pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 93% dan sampai dengan Triwulan 4 terealisasi 90,33% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 97,13% melihat dari rata-rata kehadiran pegawai dan kehadiran apel pegawai setiap bulan selama satu tahun. Tingkat kedisiplinan ini sudah cukup baik dan akan terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang melalui pembinaan kepegawaian.
- **Indikator Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)** pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 95% dan sampai dengan Triwulan 4 terealisasi 79,88% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 84,08%. Ketercapaian Indikator Kinerja Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) mencapai 96,43%, dengan target 95.00% dan realisasi 91.61% dilihat dari kesesuaian realisasi anggaran dengan cash budget. Indikator ini tercapai dengan dukungan ketepatan pengelolaan keuangan dimana penganggaran dan realisas ipencairannya dapat disesuaikan dengan cash budget per triwulannya.

Capaian kegiatan empat sasaran kegiatan yang berada dalam Program Dukungan Layanan Pemerintahan dari Tahun 2019 dan 2020 relatif sama yang rata-rata memiliki capaian 100% karena pada program ini berisi kegiatan-kegiatan rutin kerumahtanggaan kantor yang akan selalu dilaksanakan meskipun dalam situasi apapun.. Sehingga diperoleh Capaian kinerja fisik sebesar **97,72%**.

Pada Tahun 2020 ini karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat terlaksana yang salah satunya dikarenakan adanya Recofusing Anggaran untuk kegiatan yang dibutuhkan dalam penanganan Covid 19. Sehingga dalam Program Dukungan Layanan Pemerintahan ini terdapat 3 kegiatan yang direcofusing dengan anggaran 0. Yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon, dan Pameran Hari jadi kota Cilegon.

Sedangkan untuk Capaian kinerja Anggaran dimana berdasarkan APBDP terakhir anggaran untuk Program Dukungan Layanan Pemerintahan pada tahun 2020 ini sebesar **Rp. 1.088.408.971,-** dan Realisasi sebesar **Rp. 1.048.144.032,-**.

Terdapat Silpa sebesar **Rp. 40.264.939,-** dikarenakan untuk Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Perpustakaan Keliling tidak dapat diserap sepenuhnya mengingat Layanan Perpustakaan Keliling tidak dapat dilaksanakan selama Pandemi Covid-19, dan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak terserap sepenuhnya.

A.1.2 Program Peningkatan Layanan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Layanan Perpustakaan ini memiliki 4 indikator kinerja program, dengan rincian capaian kinerja :

- Indikator ini memiliki penghitungan dengan membandingkan jumlah pengunjung perpustakaan selama satu tahun dengan jumlah populasi yang harus dilayani sebanyak 300.000 populasi usia baca dari usia 5 tahun sampai dengan 55 tahun penduduk Kota Cilegon. Sehingga di tahun 2020 ini diperoleh Realisasi 3,09 % yang setara dengan 2.547 pengunjung dalam satu tahun dari target 27,50 % atau setara dengan 82.500 orang, Sedangkan untuk Capaian kinerja Untuk indikator ini tidak dapat tercapai target yang ditetapkan dengan Capaian Kinerja sebesar **11,24 %** yang diperoleh dari perbandingan antara Realisasi dengan target. Indikator ini didukung oleh kegiatan peningkatan Layanan Perpustakaan yang didalamnya terdapat pelaksanaan Perpustakaan Keliling. Dan juga didukung oleh kegiatan pengadaan sarana perpustakaan untuk melengkapi fasilitas pengunjung di ruang baca perpustakaan.
- indikator cakupan anggota perpustakaan ini diperoleh dengan menghitung jumlah anggota perpustakaan dalam satu tahun. Pada tahun 2020 ini anggota Perpustakaan ditargetkan sebanyak 2356 orang, akan tetapi realisasinya hanya mencapai 401 orang. Sehingga Capaian Kinerja Tahun 2020 hanya dapat diperoleh sebesar **17,02%**. Indikator ini juga didukung oleh Kegiatan Lomba Bercerita yang dapat menjangkau siswa untuk menjadi anggota perpustakaan.

Ketidaktercapaian indikator dengan Penurunan yang cukup drastis ini hampir sama dengan penurunan Indikator sasaran renstra dimana jumlah Pengunjung perpustakaan berbanding lurus dengan jumlah anggota perpustakaan. Jika pengunjung berkurang maka secara otomatis anggota pun akan berkurang. Penurunan Anggota perpustakaan ini pun dipengaruhi oleh kondisi yang sama dengan penurunan

pengunjung perpustakaan. Dengan tidak dapat dilaksanakannya secara maksimal Layanan Perpustakaan, akan sangat mempengaruhi pada Pengunjung dan Anggota perpustakaan.

Pada tahun 2020 ini Indikator Cakupan Anggota perpustakaan didukung oleh Kegiatan Peningkatan layanan perpustakaan, lomba bercerita, dan Bedah Buku. Akan tetapi satu kegiatan yaitu Bedah buku tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing anggaran.

- Indikator ini adalah menghitung persentase jumlah perpustakaan kelurahan yang telah terkelola dibandingkan jumlah Perpustakaan kelurahan yang ada. Sehingga dari perhitungan indikator ini diperoleh Presentase sebesar 23.36% untuk target pada Tahun 2020 yaitu dengan membandingkan 10 perpustakaan Kelurahan yang telah terkelola dibandingkan 43 perpustakaan yang ada. Dengan target penambahan 1 kelurahan setiap tahunnya yang dapat melayani perpustakaannya untuk masyarakat. Indikator ini didukung dengan adanya kegiatan Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah serta Lomba Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah. Sehingga bertambah 1 Perpustakaan Kelurahan yang dapat dilayankan kepada masyarakat dan diikutsertakan untuk Lomba Perpustakaan Kelurahan tingkat Provinsi di Tahun 2020. Sehingga sampai dengan tahun ini sudah terdapat 10 Kelurahan yang melayani Perpustakaannya Yaitu :
 - a. Perpustakaan Kelurahan Bendungan,
 - b. Perpustakaan Kelurahan Samangraya,
 - c. Perpustakaan Kelurahan Panggungrawi,
 - d. Perpustakaan Kelurahan Ciwedus,
 - e. Perpustakaan kelurahan Kebonsari,
 - f. Perpustakaan Kelurahan Cibeber,
 - g. Perpustakaan kelurahan Deringo,
 - h. Perpustakaan Kelurahan Purwakarta,
 - i. Perpustakaan Kelurahan Banjarnegara.
 - j. Kelurahan Pabean
- Indikator Peningkatan jumlah koleksi Bahan Pustaka ini dihitung dengan membandingkan Koleksi bahan pustaka pada tahun 2020 dengan Target Koleksi bahan pustaka. Pada Tahun 2020 ini ditargetkan bahan pustaka berjumlah **29776** eksemplar dan dapat terealisasi sebanyak **30787** dengan capaian sebesar **103.40%** . Ketercapaian Indikator ini didukung dengan kegiatan Pengadaan dan Pengolahan bahan Pustaka yang menambah jumlah koleksi Bahan Pustaka secara berkala setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan pemustaka. Dan Pada tahun 2020 ini yang pengadaan bahan pustaka jumlahnya berkurang daripada saat tahun 2019 karena harga buku yang mengalami kenaikan sehingga memperoleh eksemplar yang lebih sedikit. Sedangkan untuk kegiatan Pemeliharaan Koleksi Bahan Pustaka dengan merawat bahan pustaka agar dapat terus dimanfaatkan oleh pemustaka pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Cilegon dalam upaya mencapai Indikator Program Peningkatan Layanan Perpustakaan memiliki Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kegiatan :

- Selama masa Pandemi covid 19 kegiatan rutin layanan perpustakaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena tidak diperbolehkannya adanya kerumunan, dan sekolah-sekolah serta tempat-tempat keramaian ditutup. Sehingga untuk beberapa waktu layanan perpustakaan pun ditutup. Namun pada Bulan September DPAD Kota Cilegon kembali menyelenggarakan Layanan Perpustakaan Keliling ke Pondok Pesantren, dan TBM.
- Lomba bercerita dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 100%. Kegiatan ini dengan mengadakan Lomba bercerita bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 90 peserta untuk mempersiapkan peserta lomba pada Tingkat Provinsi dan Nasional disamping tujuan utamanya untuk menggali potensi siswa dalam mengembangkan bakatnya yang diasah melalui membaca. Selain itu untuk memperkenalkan budaya dan cerita Lokal kepada siswa agar menambah kecintaannya pada budaya lokal.
- Pengadaan dan Pengolahan bahan pustaka dengan ketercapaian kinerja 70.80% dan Anggaran 97.71%. . Dengan target pembelian buku 1000 eksemplar dan dapat terbeli 708 eksemplar. Pada kegiatan ini kinerja target tidak tercapai karena buku yang direncanakan untuk dibeli tidak tersedia di penerbit sehingga DPAD mengganti dengan buku lain yang serupa

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon melalui Program Peningkatan Layanan Perpustakaan terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk melayani masyarakat dalam penyediaan informasi kepustakaan yang berkualitas. Upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Cilegon yang turut mendorong peningkatan minat dan budaya baca masyarakat Cilegon.

Akan tetapi capaian kinerja untuk indikator presentase pengunjung perpustakaan terhadap populasi yang harus dilayani dan cakupan anggota perpustakaan mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan untuk mencapai indikator ini perpustakaan harus memiliki pengunjung yang datang ke perpustakaan sesuai dengan target tahunan. Karena adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan dibatasinya aktifitas yang melibatkan banyak orang dan mengurangi kegiatan-kegiatan pelayanan, membuat Perpustakaan Cilegon tidak dapat membuka layanan untuk beberapa waktu. Selain itu kegiatan layanan Perpustakaan Keliling pun tidak dapat dilaksanakan karena sekolah-sekolah tidak beroperasi, dan keramaian-keramaian tidak diperbolehkan. Hal ini cukup menjadi PR besar bagi perpustakaan yang mempunyai aktivitas layanan yang harus mendatangkan banyak orang/kerumunan.

Namun Perpustakaan Cilegon juga menempuh jalan lain dengan Layanan Perpustakaan Digital melalui Aplikasi iCilegon yang dapat didownload melalui Playstore. Terdapat sekitar 1500 buku elektronik yang dapat dipinjam secara gratis oleh masyarakat. Namun rupanya upaya tersebut belum dapat menarik masyarakat untuk mengunjungi iCilegon. Karena rata-rata masyarakat akan lebih mudah dan nyaman membaca melalui buku cetak daripada buku elektronik.

Dukungan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 terhadap Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Cilegon, terlihat salah satunya dengan pemberian anggaran tambahan di APBD-Perubahan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kota Cilegon. Dengan harapan melalui tersedianya perda ini kinerja perpustakaan akan dapat lebih maksimal, sehingga dalam proses pembinaan akan lebih didengar dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Dengan adanya payung hukum ini akan lebih melegitimasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Hal ini memperlihatkan keseriusan Pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui budaya baca masyarakat.

Untuk Capaian kinerja fisik melalui kegiatan pendukung Program peningkatan Layanan Perpustakaan sebesar **90,26%**. Sedangkan untuk Capaian Kinerja Anggaran Anggaran setelah APBDP sebesar **Rp.231.423.700** dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp. 224.041.300,-** . Terdapat silpa sebesar **Rp. 7.382.400** . dikarenakan honor Tenaga Lembur Sabtu dan Minggu untuk Layanan Perpustakaan keliling tidak dapat diserap. Dengan demikian Penyerapan Anggaran untuk Program peningkatan layanan Perpustakaan sebesar **96.81%** .

A.2. Permasalahan Program Peningkatan Layanan Perpustakaan /Bidang Perpustakaan

1. DED gedung Perpustakaan yang tidak jadi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum karena ada reconfusing anggaran. Pada tahun 2021 akan diupayakan penyusunan DED Perpustakaan melalui Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.
2. Perpustakaan Digital yang belum tersosialisasi secara maksimal sehingga masyarakat belum banyak mengetahui dan memanfaatkan aplikasi ini,
3. Perpustakaan belum menjadi prioritas untuk kelurahan sehingga belum dikelola dengan baik, belum terpenuhi sarana dan prasarana, dan belum terdapat petugas khusus yang mengelola perpustakaan sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan lomba perpustakaan kelurahan dan sekolah.

A.3. Solusi Program Peningkatan Layanan Perpustakaan /Bidang Perpustakaan

1. Pada tahun 2021 akan diupayakan penyusunan DED Perpustakaan melalui Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon.
2. Sosialisasi dengan lebih intensif pada OPD-OPD dan masyarakat umum mengenai Perpustakaan Digital.
3. Memberikan pembinaan pengelolaan perpustakaan secara berkesinambungan dan meminta agar adanya tenaga pengelola perpustakaan.

3.1.2.18 Kearsipan

A. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Tabel 3.1.2.18a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Rasio Unit Kerja Berstandar Baku dalam Pengelolaan Kearsipan terhadap total unit kerja Binaan	86 %	27.40 %	31.86%		
	Cakupan Akuisisi Arsip Bernilai Guna	1 OPD	1 OPD	100.00%		Memfaatkan kegiatan Pendataan dan penataan Arsip dan bekerjasama dengan OPD tempat pendataan dan Penataan Arsip dilakukan (Bappeda)
Penelusuran Arsip Statis Kota Cilegon		Rp 46,996,000	Rp 43,996,000	93.62%		
	Tersedianya arsip sejarah Kota Cilegon	1 Tema/tokoh	1 Tema/tokoh	100,00%		
Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan SKPD		Rp 33,540,000	Rp 28,740,000	85.69%		
	Tersedianya data arsip dinamis dan terpantaunya pengelolaan arsip SKPD	135/unit kerja	37/unit kerja	27.41%		
Pendataan dan Penataan Arsip SKPD		Rp 58,729,000	Rp 51,443,000	87.59%		
	Terdata dan Tertatanya Arsip Inaktif OPD	1 unit kerja	1 unit kerja	100.00%		
Penyusunan Regulasi Kearsipan (JRA)		Rp 3,794,500	Rp 3,794,500	100.00%	Terjadi Refocussing Anggaran	Dianggarkan kembali pada Tahun berikutnya karena merupakan kegiatan yang harus memenuhi 34 urusan pemerintah daerah.
	Terciptanya jadwal Retensi Arsip sebagai Pedoman Penyusutan	2 Perwal	1 Perwal	50.00%		

3.1.2.18 Kearsipan

B.1. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada pasal 12 ayat (2) butir r, Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diserahkan pengurusannya pada daerah otonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 2 bahwa Penyelenggaraan Kearsipan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dalam suatu sistem kearsipan nasional, Sebagai salah satu urusan wajib Kearsipan mendukung terciptanya good governance dalam pengelolaan dokumen dan pelestarian naskah-naskah sejarah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Arsip sebagai lembaga kearsipan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan fungsi bidang arsip sebagaiberikut :

- a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usahan Milik Daerah
- b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan Pemerintah Daerah, BUMD, Perusahaan, organisasi politik, pemerintahan Desa dan tokoh Masyarakat
- c. Pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dengan retensi di atas 10 tahun
- d. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan serta pemekaran
- e. Melakukan Autentifikasi arsip statis dan arsip alih media yang dikelola Lembaga Kearsipan Daerah
- f. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD
- g. Melaksanakan koordinasi tugas lingkup Dinas Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah maka Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon melalui Program Peningkatan Pengelolaan Arsip daerah agar dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Tata Kelola Arsip Dinamis dan statis secara Optimal dan terintegrasi pada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Cilegon. Serta dapat menyediakan Informasi arsip Dinamis maupun statis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung penyediaan informasi arsip Dinamis yang diperlukan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan serta menyediakan informasi arsip statis yang bernilai guna sejarah kepada masyarakat yang membutuhkan, tentunya harus didukung dengan pengelolaan arsip yang baik di setiap lingkup OPD yang ada.

Demi terwujudnya pengelolaan arsip yang baik maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah terus-menerus melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan dan peningkatan kapasitas SDM fungsional arsiparis maupun pengelola arsip yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cilegon.

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah ini memiliki 2 indikator kinerja program, dengan rincian capaian kinerja :

- Ketercapaian Indikator Kinerja Rasio Unit Kerja Berstandar Baku dalam Pengelolaan Kearsipan terhadap total unit kerja Binaan mencapai pada tahun 2020 adalah 86,00% namun Realisasi nya 27,40%, maka Capaian kinerja untuk Indikator ini pada tahun 2020 adalah 31.86% Capaian ini berkurang dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja ini diperoleh dengan memantau pelaporan situasi kondisi arsip unit kerja melalui pengisian data arsip dinamis surat masuk dan surat keluar. Dari 135 unit kerja terpantau hanya sekitar 37 unit kerja yang sudah melakukan mengisi data arsip dinamis Tahun 2020 dalam sistem e-arsip. Dalam kurun waktu 3 tahun ini indikator ini memiliki ketercapaian yang cenderung stagnan bahkan menurun. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya lagi evaluasi on the spot, hanya pemantauan evaluasi melalui sistem e-arsip saja. Kegiatan yang seharusnya mendukung ketercapaian program ini adalah Pembinaan dan Penilaian Angka Kredit Jafung Arsiparis, Pelaporan dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan SKPD, Supervisi/Pengawasan Kearsipan.

Meskipun tetap dilakukan pemantauan secara online namun, untuk indikator ini kegiatan pendukung memang harus dilaksanakan, karena kenyataan di lapangan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh unit kerja/OPD terkait dengan pengelolaan arsip dinamis. Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap arsip sehingga tidak didukung oleh sarana yang memadai dan tidak tersedia SDM yang kompeten untuk mengelola arsip dinamis tersebut.

- Ketercapaian Indikator Kinerja Cakupan Akuisisi Arsip bernilai guna mencapai 100%. Dengan target 1 OPD yang terakuisisi setiap tahunnya. Yaitu dengan Mengakuisisi arsip-arsip Statis milik OPD yang bernilai guna permanen untuk disimpan di lembaga Kearsipan. Pada tahun 2020 ini ditargetkan satu OPD yang terakuisisi dan diperoleh arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen. Sampai dengan tahun 2020 ini DPAD sudah mengakuisisi arsip milik 5 OPD yaitu Dinas Perkim, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kota Cilegon serta Bappeda Kota Cilegon.

Pada awalnya kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini hampir tidak dapat dilaksanakan karena adanya refofusing terhadap anggaran Pendataan dan Penataan Arsip yang akan berujung pada penyusutan arsip dan pengakuisisian arsip statis milik OPD. Namun karena

target Tahun 2020 ini adalah Bappeda maka DPAD mengajukan beberapa hal yang dapat disediakan oleh Bappeda sehingga kegiatan ini akan tetap dapat dilaksanakan.

Akuisisi arsip bernilai guna yaitu proses pengambilalihan pengelolaan arsip-arsip Statis milik OPD yang bernilai guna permanen untuk disimpan di lembaga Kearsipan. Pada tahun 2020 ini ditargetkan satu OPD yang terakuisisi dan diperoleh arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen dan arsip-arsip inaktif yang beretensi sekurang-kurangnya 10 Tahun untuk disimpan di Lembaga Kearsipan yaitu DPAD. Pada tahun 2020 ini DPAD Kota Cilegon berhasil mengakuisisi arsip milik Bappeda Kota Cilegon berupa arsip-arsip kajian-kajian penelitian milik Bidang Litbang, arsip-arsip pembangunan Bidang PSIK, dan arsip-arsip perencanaan milik Bidang PPM. Sehingga sampai dengan Tahun 2020 ini DPAD sudah mengakuisisi arsip milik 5 OPD yaitu Dinas Perkim, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, dan Bappeda Kota Cilegon.

Kegiatan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah yang berbasis Kinerja dan Anggaran APBD pada tahun 2020 banyak yang tidak dapat terlaksana. Dari 6 Kegiatan yang direncanakan dalam RKA dan terakomodir di DPA hanya Terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan sesuai dengan Anggaran Perubahan yang masih tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun kegiatan yang terlaksana adalah sebagai berikut :

- Penelusuran Arsip Sejarah dengan ketercapaian kinerja 100% dan anggaran 93,62%. Pada Penelusuran Tahun ini DPAD Kota Cilegon menelusur dan mengumpulkan arsip-arsip milik BUMN PT. Krakatau Steel dan kemudian dihimpun dan dibukukan. Dengan demikian DPAD Kota Cilegon sampai dengan tahun 2020 ini telah menerbitkan 3 Buku Arsip Tokoh yaitu :
 1. Tb. Aat Syafaat mantan Walikota Cilegon
 2. Rusli Ridwan mantan Wakil Walikota Cilegon
 3. Fatulloh Syamun mantan Ketua DPRD Kota Cilegon

Dan 1 Buku tentang Sejarah perjalanan PT Krakatau Steel.
- Pelaporan situasi dan kondisi Arsip SKPD dengan ketercapaian kinerja 27,41% dan Anggaran 85,69%. Adapun kegiatan ini tidak dilaksanakan tetapi dengan melakukan pemantauan terhadap keterisian data arsip dinamis SKPD dalam aplikasi e-arsip.
- Pendataan dan Penataan Arsip SKPD dengan ketercapaian kinerja 100% dan Anggaran 87,59%. Adapun Pendataan dan penataan Arsip di tahun 2020 ini dilaksanakan pada Bappeda Kota Cilegon. Dengan memisahkan dan mendata arsip arsip Inaktif serta arsip-arsip statis yang bernilai guna permanen. Pada kegiatan ini sekaligus dilanjutkan dengan pengakuisisian arsip milik Bappeda ke DPAD dengan bantuan dari Bappeda sendiri untuk melaksanakan kegiatan ini.

- Penyusunan Regulasi Kearsipan pada Tahun ini anggarannya direcofusing, dengan ketercapaian kinerja fisik 33% dan anggaran 100% namun terdapat 1 JRA dari 3 JRA yang ditargetkan yang dapat terrealisasi yang merupakan JRA Keuangan yang hanya berupa Revisi dari JRA keuangan sebelumnya yang akhirnya dapat diterbitkan kembali.

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja kegiatan pendukung Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah sebesar **63,50%** dalam predikat **Cukup** dengan penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah dengan Anggaran sesuai APBDP sebesar **Rp. 143.059.000 dan Realisasi Rp. 127.973.500,-** sehingga ketercapaian program sebesar **89,45%** . Terdapat Sisa anggaran sebesar **Rp. 15.086.000,-**.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Cilegon sebagai Lembaga Kearsipan Daerah pada tahun 2019 ini telah memperoleh gelar sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Tingkat Nasional, melalui ajang ANRI AWARD yaitu Penghargaan terhadap Juara I Lembaga Kearsipan Tingkat Nasional. Prestasi ini diraih sudah tentu tidak terlepas dari Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Cilegon melalui support Anggaran dan kebijakan serta kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam upaya pengelolaan dan penyelamatan arsip daerah milik Kota Cilegon maupun arsip milik masyarakat Kota Cilegon. Namun di Tahun 2020 ajang ANRI Award ini tidak dilaksanakan dikarenakan pandemi Covid 19 yang juga menyebabkan recofusing anggaran di pusat. Namun demikian dengan terpilihnya DPAD Kota Cilegon sebagai lembaga Kearsipan Daerah teladan membuat banyak tamu dari daerah lain berkunjung untuk melakukan studi banding ke DPAD kota cilegon, sehingga kedepan beberapa perbaikan perlu terus dilakukan terutama untuk mempertahankan gelar sebagai Lembaga Kearsipan Teladan Tingkat Nasional.

Untuk mempertahankan gelar tersebut , meskipun ketercapaian kinerja program dan anggaran dari tahun 2019 dari Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah ini sudah baik , dan di tahun 2020 banyak yang tidak dapat terlaksana, sehingga sangat dibutuhkan upaya ekstra untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya arsip di OPD-OPD masih harus terus ditekankan agar arsip dapat diperlakukan dengan baik sehingga pencarian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Gerakan sadar arsip perlu digaungkan baik pada lingkup pemerintahan maupun masyarakat umum agar penyelamatan terhadap informasi dan fisik arsip dapat dilakukan sehingga ditemukan arsip-arsip yang bernilai guna sejarah dan permanen untuk memperkaya khazanah arsip daerah.

B. 2. Permasalahan Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

1. Kurangnya pemahaman pencipta arsip dalam pengelolaan arsip khususnya arsip statis yang bernilai guna permanen sehingga terdapat perbedaan pemahaman dalam pengelolaan arsip. Dan seringkali berganti petugas pengelola arsip menyebabkan pengelolaan arsip

tidak berkesinambungan. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya capaian indikator rasio unit kerja berstandar baku dalam pengelolaan arsip.

2. Terbatasnya naskah sumber arsip sejarah di Kota Cilegon dan kesulitan dalam ijin untuk memperoleh arsip sejarah tersebut.
3. Masih banyak OPD yang belum dapat melakukan penyusutan arsip dikarenakan belum terpenuhinya JRA 34 urusan sehingga sehingga volume arsip OPD yang disimpan bertambah banyak tanpa diimbangi dengan ketersediaan sarana, prasarana dan SDM.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penyimpanan arsip-arsip Vital keperdataan milik pribadi sehingga salah dalam penyimpanan dan perawatanya.

B.3. Solusi Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah/Bidang

Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka DPAD Kota Cilegon pada bidang Kearsipan melakukan beberapa langkah alternatif untuk mengatasi permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Memberikan pengayaan dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip dan cara mengidentifikasi arsip agar dapat ditentukan nilai gunanya sehingga dapat dipisahkan dan dibedakan penanganannya antara arsip biasa, arsip penting, dan arsip yang bernilai guna permanen. Menetapkan pengelola arsip tiap unit kerja dan bidang-bidang pada OPD, sehingga pengelolaan arsip dapat berkesinambungan dan pengisian data e-arsip dapat berlanjut.
2. Melakukan penelusuran arsip organisasi atau lembaga yang berskala nasional namun bertempat di Cilegon agar dapat memperoleh arsip naskah sumber sejarah.
3. Berupaya memenuhi penyusunan Jadwal Retensi Arsip 34 Urusan pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyusutan arsip. Pada Tahun 2020 ini sudah terdapat 6 Perwal Jadwal Retensi Arsip yang terdiri atas JRA Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif non Keuangan non Kepegawaian, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan, Perencanaan.
4. Perlu ditingkatkannya penyuluhan, sosialisasi dan gerakan masyarakat sadar arsip secara berkesinambungan agar masyarakat dapat menyelamatkan arsip-arsip vital keperdataan milik pribadi.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

3.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

A. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (UPTD BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DAN AIR PAYAU)

Tabel 3.1.3.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan					Tugas pokok dan fungsi yang ada di UPTD budidaya ikan air tawar dan air payau tidak sesuai dengan program perikanan yang ada di Kementerian Perikanan dan Kelautan.	Adanya nomenklatur Dinas yang sesuai dengan program perikanan.
Program Pengembangan Perikanan		59.999.000,00	59.999.000,00	100%		
	Jumlah produksi perikanan tangkap	386,1 ton	219 ton	56,72%	Daya jangkau melaut yang masih terbatas	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
	Jumlah produksi perikanan budidaya	291,99 ton	230 ton	78,77%	Salah satu masalah adalah adanya teknologi budidaya yang masih rendah.	Penerapan teknologi budidaya perikanan.
Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap		9.700.000,00	9.700.000,00	100%		
	Terlaksananya Pendataan Statistik Perikanan Tangkap	2 bulan	2 bulan	2 bulan		
Pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya		50.299.000,00	50.299.000,00	100%		
	Terlaksananya Uji Mutu Hasil Perikanan	30 sampel	30 sampel	100%		
	Tersedianya data statistik perikanan	2 bulan	2 bulan	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya	1 paket	1 paket	100%		

Uraian penjelasan/ narasi :

Untuk mengukur hasil pelaksanaan Program Pengembangan Perikanan, terdapat 2 (dua) indikator program. Adapun capaian kinerja pada indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah produksi perikanan tangkap. Indikator ini untuk menggambarkan jumlah produksi perikanan tangkap selama satu tahun. Pengukurannya adalah dengan cara pendataan statistik secara berkala setiap bulan maka diperoleh produksi perikanan tangkap sebesar 219,2 ton pada tahun 2020. Target produksi perikanan tangkap adalah sebesar 386,1 ton. Maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 56,72% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai kendala diantaranya pada bulan Januari s/d April kondisi laut memasuki musim angin barat. Iklim yang tidak menentu mengakibatkan aktifitas nelayan dalam menangkap ikan berkurang. Selain itu, banyak armada perikanan tangkap yang sudah tua dan kurang layak untuk digunakan sedangkan nelayan kekurangan biaya untuk memperbaikinya, sehingga ketika digunakan untuk menangkap ikan menjadi kurang maksimal sehingga produktivitas nelayan menurun. Kendala lainnya adalah akibat adanya wabah *covid-19* membuat banyak nelayan yang mengurangi aktifitasnya baik aktifitas di rumah maupun aktifitas menangkap ikan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang agar sesuai target RPJMD, maka perlu dilakukan upaya pemberian stimulan berupa sarana dan prasarana penangkapan ikan yang lebih baik seperti pemberian alat tangkap serta perahu dan mesin dengan ukuran yang lebih besar sehingga memungkinkan nelayan melaut dengan daya jangkauan lebih jauh dan perbaikan atau penggantian rumpon dan *fish apartement* (tempat ikan berkumpul/berkembang biak).
2. Produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 230 ton dari target sebesar 291,99 ton sehingga capaian produksi perikanan budidaya sebesar 78,77%. Capaian ini belum memenuhi target karena adanya hama penyakit ikan serta adanya wabah *covid-19*, sehingga banyak pembudidaya yang mengurangi aktifitasnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya maka penggunaan vaksin pada ikan akan ditingkatkan, serta pemberian pakan yang baik dan berkualitas, sehingga ikan memiliki daya tahan yang lebih tinggi dan hasil produksi meningkat.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI



B. Permasalahan

1. Beberapa permasalahan teknis perikanan tangkap adalah :
 - a. Wilayah pesisir di Kota Cilegon sesuai Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020 – 2040, menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan industri. Kemudian di dalam Raperda RZWP3K di Provinsi Banten merupakan kawasan pelabuhan. Hal ini menyebabkan ruang gerak nelayan sangat terbatas baik dalam akses melaut maupun tempat sandar perahu. Sebanyak 90% nelayan Kota Cilegon adalah nelayan kecil dengan ukuran kapal < 5 GT.
 - b. Hingga saat ini Pemerintah Kota Cilegon belum mempunyai pelabuhan perikanan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan, berdasarkan kelayakan teknis dan fungsi Kota Cilegon, pelabuhan yang ada merupakan pelabuhan perikanan kelas D, dalam hal ini disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sehingga fungsi pengusaha dan pemerintahan belum bisa berjalan.
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang kurang memadai sehingga mempengaruhi aktifitas nelayan dalam menangkap ikan.
 - d. Kurangnya kualitas sumber daya manusia nelayan Kota Cilegon dalam hal teknik dan kemampuan tentang penangkapan ikan merupakan suatu hal yang juga perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Cilegon. Sebagian besar nelayan Kota Cilegon yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam penangkapan ikan.
 - e. Kurang lengkapnya dokumen administrasi perijinan yang dimiliki oleh para nelayan Kota Cilegon.
2. Beberapa permasalahan perikanan budidaya air tawar adalah :
 - a. Keterbatasan lahan budidaya serta keterbatasan sumber daya alam berupa air permukaan untuk perikanan budidaya.
 - b. Masih banyak pembudidaya ikan di Kota Cilegon yang masih kurang informasi dan pengetahuan tentang budidaya sehingga mengakibatkan jumlah produksi ikan yang dihasilkan tidak sesuai harapan.
 - c. Sebagian besar pembudidaya menganggap budidaya ikan sebagai usaha sampingan dan bukan sebagai usaha utama, sehingga hampir seluruh pembudidaya ikan tidak fokus menjalankan usaha budidaya.
 - d. Harga pakan yang belum stabil.
 - e. Harga jual ikan yang masih rendah dikarenakan adanya pemasok dari luar Kota Cilegon.
 - f. Keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha budidaya.

B. Solusi

1. Beberapa solusi perikanan tangkap adalah :
 - a. Menyediakan pelabuhan perikanan berupa fasilitas pokok dan fasilitas fungsional agar fungsi pengusaha dan pemerintahan dapat berjalan.

- b. Dalam upaya mengedepankan fungsi pengusahaan di dalam PPI, maka diperlukan pembentukan Lembaga pengelola hasil tangkapan ikan sehingga memiliki harga tidak dipermainkan oleh tengkulak.
 - c. Perlunya dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kota Cilegon agar aktifitas penangkapan ikan di Kota Cilegon dapat tersentralisasi secara baik dan benar.
 - d. Perlunya banyak spot-spot ikan yang ramah lingkungan agar potensi ikan di wilayah Kota Cilegon bisa terjaga dan areal penangkapan ikan tidak terlalu jauh dari pantai.
 - e. Mengadakan pelatihan untuk menambah informasi dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan profesi nelayan penangkap ikan sehingga para nelayan diharapkan dapat secara mandiri mengelola dan merawat sarana prasarana untuk menangkap ikan, sehingga tidak tergantung lagi dengan bantuan ataupun keterbatasan lainnya.
 - f. Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Penyuluh Perikanan dalam melengkapi dokumen perijinan dalam usaha perikanan.
2. Beberapa solusi perikanan budidaya air tawar adalah :
- a. Melakukan pendekatan kepada pembudidaya dan merubah pola pikir pembudidaya ikan bahwa sesungguhnya budidaya ikan merupakan peluang usaha yang sangat menjanjikan ini bisa dilihat dari analisis usaha budidaya ikan yang sangat menguntungkan. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada setiap pembudidaya sehingga pembudidaya dapat fokus melakukan usaha budidaya ikan bukan sebagai usaha sampingan.
 - b. Dilakukan kegiatan penumbuh kembangan kelompok agar tumbuh kesadaran untuk berkelompok bagi para pembudidaya ikan maupun pengolah pemasar hasil perikanan.
 - c. Pengembangan teknologi budidaya untuk mengatasi keterbatasan lahan dan sumber daya air.
 - d. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pembudidaya ikan sesuai dengan perkembangan teknologi perikanan budidaya.
 - e. Sosialisasi penggunaan pakan alternatif yang sesuai dengan CPIB, dilakukannya kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan.
 - f. Memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya serta pengolahan melalui anggaran APBD dengan syarat pengajuan proposal terlebih dahulu oleh kelompok pelaku usaha perikanan.

3.1.3.2 Pariwisata

A. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Tabel 3.1.3.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.067.574.000,00	1.829.242.759,00	88,47%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	98,00	98,00	100,00%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	97,00	78,00	80,41%		
	Tingkat disiplin aparatur	97,00	86,00	88,66%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	97,00	90,33	93,12%		
Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif					Banyak Kegiatan tidak dilaksanakan karena pandemic dan terkena refocusing anggaran	Mengusulkan kembali kegiatan terkait pada tahun 2021
Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		810.284.000,00	650.704.000,00	80,31%	Program yang terdiri dari beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena pandemic dan refocusing anggaran	Beberapa kegiatan yang masuk dalam program diusulkan kembali pada tahun 2021
	Capaian pengembangan destinasi wisata	67,00%	80,00%	119,04%		
	Capaian pembinaan usaha pariwisata	71,00%	71,00%	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif	57,00%	57.00%	100%		
	peningkatan jumlah kunjungan wisnu dan wisman	20,00%	-74,93%	-374,65%	Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.	Perlu upaya yang komperensif dari seluruh stakeholder yang ada.
Cilegon Etnik Carnival		1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan Cilegon Etnic Carnival	1,00	0,00	0,00%	Pada kegiatan Cilegon Ethnic Carnival tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mana kegiatan yang mengumpulkan banyak kerumunan tidak diperbolehkan sehingga tidak ada capaian indikator kegiatan di tahun 2020.	Mengusulkan kembali kegiatan pada tahun 2021
Pembinaan Kepariwisata Daerah		1.610.000,00	1.610.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan kepariwisataan daerah	1,00	0,00	0,00%	Pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan pembinaan kepariwisataan daerah tidak bisa dilaksanakan	Merubah output kegiatan jika terjadi masalah pandemi
Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon		44.055.000,00	17.555.000,00	39,85%	Minimnya materi promosi pariwisata dikarenakan tidak dilaksanakannya event besar seperti CEC dan Golok Day akibat pandemic covid -19	Perlu materi alternatif terkait promosi pariwisata di Kota Cilegon
	Terlaksananya kegiatan promosi seni budaya dan pariwisata kota cilegon	1,00	0,00	0,00%	Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.	Merubah output kegiatan jika terjadi masalah pandemi
Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon dan Audisi Gita Bahana Nusantara		118.835.000,00	118.835.000,00	100,00%		
	Terlaksananya pembinaan Paduan suara kota Cilegon	50,00	50,00	100,00%		
	Terlaksananya Audisi Gita Bahana Nusantara	100,00	100,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembinaan Marching Band Kota Cilegon		388.464.000,00	326.464.000,00	84,04%	Kegiatan tidak sepenuhnya di laksanakan dikarenakan adanya PSBB sesuai Peraturan walikota Cilegon Nomor 51 tahun 2020	Kegiatan akan dilaksanakan dengan mebgikuti protocol kesehatan
	Terlaksananya Pembinaan Marching Band di kota cilegon	2,00	2,00	100,00%		
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK)		116.500.000,00	81.620.000,00	70,06%	Kegiatan tidak seluruhnya dilaksanakan karena terdampak pandemi Covid-19.	Perlu kesadaran dan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah Covid-19.
	Terlaksananya kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	1,00	1,00	100,00%		
Pelatihan Usaha Kepariwisata (DAK)		116.500.000,00	103.170.000,00	88,56%		
	Terlaksananya kegiatan pelatihan manajemen Homestay/Pondok Wisata	1,00	1,00	100,00%		
Penyusunan Buku Promosi Pariwisata Daerah (DAK)		22.870.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana DAK non fisik Pariwisata dari Kemenparekraf	Menelaah kembali usulan kegiatan dari DAK
	Terpenuhinya kelancaran kegiatan pelatihan	2,00	0,00	0,00%	Output tidak tercapai dikarenakan kegiatan tidak dilaksanakan	

Industri Pariwisata di Kota Cilegon telah berkembang dengan cukup pesat dimana hal ini di lihat dari banyaknya jenis pariwisata yang berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pertemuan, insetif, konvensi dan pertemuan.

Pariwisata berbasis MICE di Kota Cilegon di dukung oleh adanya sejumlah fasilitas pariwisata antara lain Hotel, Restoran, Travel, Gelanggang Olahraga, Tempat Hiburan dan Rekreasi dan sebagainya. Keberadaan fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Kota Cilegon telah menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Kota Cilegon, dimana masyarakat dapat bekerja pada sektor usaha jasa pariwisata dan

memperoleh pendapatan atau penghasilan dari pekerjaannya. Disamping itu pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan daerah yang dihasilkan dari pungutan pajak atau retribusi dari penyelenggaraan usaha jasa pariwisata di Kota Cilegon.

Secara substansial industri pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang berbeda apabila dilihat dari bidang garapannya. Bidang garapan industri pariwisata mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana terdapat 13 bidang usaha kepariwisataan yang diturunkan lagi kedalam jenis dan sub jenis usaha kepariwisataan, Sementara itu bidang garapan ekonomi kreatif mengacu kepada Perpres Nomor 72 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dimana didalamnya terdapat 16 bidang usaha ekonomi kreatif, namun demikian kedua sektor tersebut dapat saling mendukung, melengkapi dan juga bersinergi guna meningkatkan daya saing dan perekonomian daerah. Adapun capaian dari indikator program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu:

1. Capaian pengembangan destinasi wisata

Capaian dari indikator program destinasi wisata pada Tahun 2020 yaitu mencapai persentase sebesar 119.04% dari realisasi indikator program sebesar 80%, hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan diawal yaitu sebesar 67%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. Tetapi capaian indikator program Pengembangan Destinasi Wisata pada tahun 2020 turun dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian program tidak dapat dilaksanakan.

2. Capaian pembinaan usaha pariwisata

Pada tahun 2020 Target dari indikator program pembinaan usaha pariwisata yaitu sebesar 71% dan dapat terealisasi dari indikator tersebut sebesar 71% sehingga capaian dari program pembinaan usaha pariwisata mencapai 100%. Hal ini membuat indikator program pembinaan usaha pariwisata telah tercapai. Dimana kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang terkait dengan usaha adalah pelatihan tentang manajemen homestay.

3. Capaian pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif

Realisasi dai indikator program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif pada tahun 2020 yaitu sebesar 57% dari target indikator tersebut sebesar 57%, sehingga capaian dari indikator pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif sebesar 100%. Hal ini membuat indikator program pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif telah tercapai dari target yang sudah ditetapkan. Dimana kegaian yang dilaksanakan berkaitan dan mendukung indikator tersebut pada tahun 2020 adalah pembinaan terhadap kelompok paduan suara di Kota Cilegon.

4. Peningkatan jumlah kunjungan wisnu dan wisman

Dalam hal kunjungan wisatawan capaian jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 baik wisatawan lokal/nusantara maupun wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat drastis, dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mencapai angka 814.268 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan hanya mencapai 204.129 orang. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2020 ini turun sebesar 610.139 orang atau -74,93% dibanding Tahun 2019.

Penurunan jumlah wisatawan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya faktor global yaitu berupa pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, dimana bisnis pariwisata secara umum terpuruk, sehingga arus pergerakan wisatawan masuk ke Kota Cilegon menjadi terhambat.

Adanya pandemi Covid 19 di tambah dengan berbagai aturan/regulasi yang membatasi bahkan melarang wisatawan untuk bepergian ke berbagai tempat baik untuk tujuan wisata maupun tujuan lainnya, mengakibatkan sektor pariwisata di Kota Cilegon mengalami keterpurukan dengan penurunan yang amat tajam terkait jumlah kunjungan wisatawan.

Di dalam Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target program, yaitu : Cilegon Ethnic Carnival, Pembinaan Kepariwisata Daerah, Promosi Seni Budaya dan Pariwisata Kota Cilegon, Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon dan Audisi Gita Bahana Nusantara, Pembinaan Marching Band Kota Cilegon, Saka Wisata Kota Cilegon, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK), Pelatihan Usaha Kepariwisata (DAK), Penyusunan Buku Promosi Pariwisata Daerah (DAK).

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, ada beberapa yang tidak terlaksana atau tidak mencapai target kinerja kegiatan karena ada refocusing anggaran serta adanya pandemi covid19 dimana membatasi kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Kegiatan yang dapat berjalan dengan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi covid19, diantaranya adalah Pembinaan Paduan Suara Kota Cilegon dan Audisi Gita Bahana Nusantara, Pembinaan Marching Band Kota Cilegon, Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK) dan Pelatihan Usaha Kepariwisata (DAK).

Permasalahan

1. Kota Cilegon belum menjadi daerah tujuan wisata dikarenakan tidak adanya objek yang layak dan memadai, beberapa objek wisata di Kota Cilegon memiliki potensi atau daya tarik wisata, namun hal itu belum tertata dan terkelola dengan baik dan optimal.
2. Kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas generasi muda yaitu pemilihan/pembinaan duta wisata dan budaya ditiadakan dari kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon.
3. Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan yang terkait dengan pembinaan usaha pariwisata dengan sasaran kegiatan yaitu pelatihan terhadap pelaku usaha pariwisata

Solusi



1. Perlu adanya dukungan untuk menciptakan dan mewujudkan keberadaan destinasi wisata unggulan di Kota Cilegon dimana salah satunya adalah situ rawa arum, oleh karenanya situ rawa arum perlu untuk mendapatkan prioritas pembangunan di Kota Cilegon.
2. Perlu dialokasikan kembali anggaran untuk kegiatan pemilihan/pembinaan duta wisata dan budaya dikarenakan ada keterkaitan dengan pembinaan generasi muda dan juga berkesinambungan dengan program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu pemilihan/pembinaan Kang Nong Banten.
3. Perlu dialokasikan kembali anggaran untuk kegiatan pembinaan usaha pariwisata dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun, yang bertujuan untuk memperkuat/mempererat kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan dunia usaha.

3.1.3.3 Pertanian

A. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN, UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR HEWAN, DAN UPT KAWASAN PERTANIAN TERPADU

Tabel 3.1.3.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas.						
Program Pengembangan Pertanian		1.390.882.688,00	1.358.657.988,00	97,68%		
	Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun	20%	0%	0%	Penangkaran kacang tanah tidak dilaksanakan karena kesulitan mendapatkan benih bersertifikat	Menggunakan komoditas kacang tanah lokal
	Proporsi peningkatan provitas jagung per tahun	1%	-14,45%	-14,45%	1. Petani cenderung melakukan panen jagung muda karena harganya lebih mahal daripada harga jagung pipilan kering 2. Produksi jagung panen muda maka produksinya tidak tercatan dalam produksi pipilan kering sehingga menyebabkan angka produksi turun. 3. Angka tanam turun pada tahaun 2020 31 Ha dibandingkan dengan angka tanam 2019 sebesar 58 Ha	Adanya peralihan komoditas jagung pipilan menjadi jagung hibrida

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Proporsi peningkatan provitas kacang tanah per tahun	0.5 %	-7,49%	-14,98%	1. Adanya penurunan produksi kacang tanah pada MT II disebabkan serangan OPT / kekeringan sehingga polong tidak berisi 2. Adanya Alih fungsi lahan (Purwakarta, Grogol, Jombang, Citangkil, Ciwandan, Pulomerak)	
	Proporsi peningkatan produksi melon per tahun	10 %	-41,66%	-4,17%	1. Lahan yang dibudidayakan melon diusahakan pada komoditas lain seperti jagung pulut sehingga berkurangnya angka tanam melon yang menyebabkan penurunan produksi angka tanam 2020 seluas 7,45 H, angka tanam 2019 seluas 10,7 Ha 2. Adanya peralihan komoditas melon ke komoditas tanaman sayuran. 3. Sebagian areal penanaman melon terserang OPT seperti (bercak dan keritaing serta layu fusarium) yang menyebabkan produksi melon menurun.	
	Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun	10%	-54,55%	-5,45%	1. <i>Force majeure</i> bencana banjir yang menyebabkan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					penurunan produksi cabe 2. Sebagian besar pertanaman cabe terserang OPT busuk buah atau patek 3. Angka tanam 2020 naik 22,8 Ha 2019 16,5 Ha tetapi produksi terlapor pada tahun 2021	
	Cakupan pembinaan pengolah hasil pertanian	20%	N/A	N/A	Tidak ada kegiatan pembinaan pengolah hasil pertanian	
Peningkatan Produksi Hortikultura		154.728.500,00	154.728.500,00	100%		
	Terlaksananya pengadaan bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan	1.585 batang	1.585 batang	100%		
	Terlaksananya Workshop Penetapan Sasaran Indikatif Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Peningkatan produksi tanaman Pangan		31.852.188,00	31.852.188,00	100%		
	Terlaksananya Sekolah Lapang Metode Hazton Padi Sawah	10 kegiatan	10 kegiatan	100%		
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan Tingkat Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%		
Peningkatan sarana prasarana dan perlindungan tanaman		253.452.000,00	248.446.500,00	98,03%		
	Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	Kebutuhan pestisida dan PPC tidak tercukupi untuk pencegahan dan	Menyediakan kebutuhan pestisida dan PPC untuk pencegahan dan penanganan serangan hama dan penyakit

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					penanganan serangan hama dan penyakit	
	Terlaksananya Sekolah Lapang Iklim (SLI)	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Masih ada beberapa peserta yang datang terlambat	Petugas lapang bisa lebih menghimbau kepada calon peserta agar dapat datang sesuai waktu pelaksanaan
	Optimasi lahan KPT	3 ha	3 ha	100%	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian yang dimiliki oleh Dinas	Menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan
Kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu (prioritas daerah)		850.000.00	850.000.00	100%	Anggaran <i>direfocussing</i>	
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (DID Tambahan)		730.000.000,00	709.718.400,00	97,22%		
	Terlaksananya Pengembangan Komoditas Cabai untuk Pemulihan Ekonomi Dampak <i>Covid-19</i>	3 ha	3 ha	100%		
	Terlaksananya Pengembangan Komoditas Kacang Panjang untuk Pemulihan Ekonomi Dampak <i>Covid-19</i>	7 ha	7 ha	100%		
	Terlaksananya Pengembangan Komoditas Kacang Mentimun untuk Pemulihan Ekonomi Dampak <i>Covid-19</i>	6 ha	6 ha	100%		
	Terlaksananya Pengembangan Komoditas Terong untuk Pemulihan Ekonomi Dampak <i>Covid-19</i>	2 ha	2 ha	100%		
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (DID Tambahan)		220.000.000,00	213.062.400,00	96,85 %		
	Tersedianya sarana produksi pengembangan jagung untuk pemulihan ekonomi dampak <i>Covid-19</i>	10 ha	10 ha	100%		
Kegiatan UPT Kawasan Pertanian Terpadu		54.824.000,00	50.184.000,00	91,54 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Penyuluh	12 bulan	12 bulan	100%		
	Tersedianya honorarium Non PNS diluar pegawai PEMDA (THL TBPP)	4 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	50%	SK THL TBPP dari Pusat mendapat honor 11 bulan	Honorarium Non PNS diluar pegawai PEMDA (THL TBPP) Hanya direalisasikan 1 Bulan
Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau Komunitas pelaku usaha sektor peternakan						
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan		467.510.330,00	465.680.330,00	99,61%		
	Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	0,5%	0,21%	42%	Belum adanya pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat (keterbatasan SDM), Adanya keterbatasan luas lahan usaha peternakan, adanya kasus pencurian induk kerbau, pengadaan straw direfocussing	Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan populasi ternak
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	15,0%	15,317%	102,11%	Adanya kendala SDM, ada masalah kelembagaan yakni belum terbentuknya UPT Puskesmas	Peningkatan SDM Keswan serta pembentukan UPT Puskesmas
	Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7,0%	7,13%	101,86%	Banyak pelaku usaha yang belum memiliki Izin Usaha (kurang lebih 50% belum berizin), Adanya keterbatasan SDM pengawas Kesmavet	Perlunya sinergi antar stake holder terkait

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pengembangan dan pengelolaan pembibitan dan produksi peternakan		190.991.300,00	190.991.300,00	100%		
	Terlaksananya Demplot Peternakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
	Terlaksananya Inseminasi Buatan	20 ekor	22 ekor	110%		
	Terlaksananya Asuransi Hewan Ternak	20 ekor	39 ekor	195%		
Pengendalian Penyakit Hewan Zoonosis		261.664.030,00	259.834.030,00	99,3%		
	Terselenggaranya vaksinasi rabies	400 ekor	400 ekor	100%		
	Terselenggaranya vaksinasi ND	30.000 ekor	30.000 ekor	100%		
	Tersedianya sarana dan prasarana Puskesmas	1 paket	1 paket	100%		
	Tersedianya obat-obatan hewan	1 paket	1 paket	100%		
Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan		14.855.000,00	14.855.000,00	100%		
	Terlaksananya Pengambilan dan pengujian bahan pangan asal hewan	10 sampel	10 Sampel	100%		
Peningkatan Kualitas pelayanan RPH, pasar hewan dan puskesmas		752.166.543,00	571.176.365,00	75,94%	Pengadaan alat <i>railing sytem</i> RPH tidak terealisasi karena adanya kekeliruan dalam penempatan kode rekening belanja	
	Tersedianya Lanjutan IPAL, Landscape dan Tempat Parkir RPH, dan Lanjutan Pagar RPH	3 paket	3 paket	100%		
	Tersedianya Peralatan RPH	7 unit	7 unit	100%		
	Tersedianya bahan material pemeliharaan RPH	1 tahun	0	0%	Penempatan rekening tidak sesuai	Membuat perencanaan pengadaan yang sesuai dengan peruntukan belanja

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya kebutuhan pelayanan RPH	1 tahun	1 tahun	6,96%	Realisasi pembangunan yang terhambat karena situasi pandemi covid-19 sehingga menyebabkan realisasi kebutuhan pelayanan tak dapat dilaksanakan	

Program Pengembangan Pertanian

1. Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan luasan penangkaran kacang tanah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah luasan penangkaran pada tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi dengan luasan penangkaran tahun (n-1) dikali 100%. Pada tahun 2019 luasan penangkaran kacang tanah sebesar 0 Ha dan tahun 2020 seluas 0 Ha maka diperoleh proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah sebesar 0%. Target peningkatan luasan penangkaran kacang tanah sebagaimana RPJMD adalah sebesar 20% per tahun. Maka capaian kinerja tahun 2020 sebesar 0%.

$$\begin{aligned}
 \text{Proporsi peningkatan luasan penangkaran kacang tanah} &= \frac{(\text{luasan th n} - (\text{luasan th n-1}))}{\text{luasan th n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{(0 - 0)}{20} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

2. Proporsi peningkatan produktivitas jagung per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produktivitas jagung dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produktivitas jagung pada tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi dengan produktivitas jagung tahun (n-1) dikali 100%. Pada tahun 2019 produktivitas jagung sebesar 31,63 Ku/Ha sementara pada tahun 2020 sebesar 27,06 Ku/Ha. Maka diperoleh realisasi proporsi peningkatan produktivitas jagung sebesar -14,45% pada tahun 2020. Target peningkatan proposi produktivitas jagung sebagaimana RPJMD adalah sebesar 1% per tahun. Penurunan produktivitas sebesar -14,45% terjadi karena berbagai hal

seperti luas panen lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, petani memanen jagung pada usia jagung masih muda sehingga hasil panen jagung muda tidak masuk ke perhitungan.

$$\begin{aligned}
 \text{Proporsi peningkatan produktivitas jagung} &= \frac{(\text{produktivitas th n} - (\text{produktivitas th n-1}))}{\text{produktivitas th n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{(27,06 - 31,63)}{31,63} \times 100\% \\
 &= -14,45 \%
 \end{aligned}$$

- Proporsi peningkatan produktivitas kacang tanah per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produktivitas kacang tanah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produktivitas kacang tanah pada tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi dengan produktivitas kacang tanah tahun (n-1) dikali 100%. Pada tahun 2019 produktivitas kacang tanah sebesar 12,68 Ku/Ha dan tahun 2020 sebesar 11,73 Ku/Ha. Maka diperoleh realisasi proposi peningkatan produktivitas sebesar -7,49% pada tahun 2020. Target peningkatan proposi produktivitas kacang tanah sebagaimana RPJMD adalah sebesar 0,5% per tahun. Mengalami penurunan produktivitas dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan karena adanya penurunan luas panen dibandingkan tahun sebelumnya dan terjadinya kemarau panjang pada bulan Juni sampai dengan Oktober, di mana hampir seluruh petani kacang tanah mengandalkan air hujan sebagai sumber airnya, sehingga angka produksi pada bulan Juni sampai November anjlok, maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang agar sesuai target RPJMD perlu dilakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada petani agar menggunakan pupuk berimbang, pembinaan, serta bantuan sarana produksi.

$$\begin{aligned}
 \text{Proporsi peningkatan produktivitas kacang tanah} &= \frac{(\text{produktivitas th n} - (\text{produktivitas th n-1}))}{\text{produktivitas th n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{(11,73 - 12,68)}{12,68} \times 100\% \\
 &= -7,49\%
 \end{aligned}$$

- Proporsi peningkatan produksi melon per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produksi melon dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produksi melon pada tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi dengan produksi melon tahun

(n-1) dikali 100%. Pada tahun 2020 produksi melon sebesar 104,93 ton dan tahun 2019 sebelumnya 179,87 ton buah segar. Maka diperoleh realisasi proposi peningkatan sebesar -41,66% pada tahun 2020. Target peningkatan proposi produksi melon sebagaimana RPJMD adalah sebesar 10 % per tahun. Maka capaian kinerja tahun 2019 sebesar -41,66%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi melon dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa kendala seperti hama dan penyakit, pemasaran masih terbatas untuk varietas tertentu. Maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang akan dilakukan upaya pembinaan, bantuan SL PHT, bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas SDM, temu usaha dan promosi.

5. Proporsi peningkatan produksi cabe per tahun. Indikator ini menggambarkan peningkatan produksi cabe dibandingkan tahun sebelumnya. Pengukurannya adalah dengan cara jumlah produksi cabe pada tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi dengan produksi cabe tahun (n-1) dikali 100%. Pada tahun 2019 produksi cabe sebesar 4.015,7 kw dan tahun 2020 sebesar 1.824,86 kw buah segar. Maka diperoleh realisasi proposi peningkatan sebesar -5,455% pada tahun 2020. Target peningkatan proposi produksi cabe sebagaimana RPJMD adalah sebesar 10% per tahun. Namun demikian masih terdapat kendala seperti hama dan penyakit. Maka untuk dapat meningkatkan capaian di tahun mendatang perlu dilakukan upaya pembinaan, bantuan SL PHT, bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas SDM, temu usaha dan promosi.

Prioritas Daerah

Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) dilihat dari pendekatan sektor pertanian adalah tempat yang difungsikan untuk pemberdayaan masyarakat petani, peternak dan pembudidaya ikan dengan komoditas permintaan pasar. Dan berfungsi juga sebagai tempat pembelajaran dan penelitian bagi siswa dan mahasiswa. Hal ini yang akan dikembangkan untuk menjadi tujuan wisata atau sebagai objek **agrowisata**.

Sampai dengan saat ini progress kegiatan pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu yang sudah dilaksanakan adalah tersusunnya dokumen Feasibility Study (FS), dokumen Masterplan, dokumen Pengadaan Tanah, dokumen *Detail Engineering Design* (DED), dokumen Lingkungan serta Pengadaan Tanah seluas 96.151 m².

Tahapan dan arah kebijakan kegiatan pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu selanjutnya adalah **Peningkatan produktifitas dan nilai tambah pertanian pada lahan-lahan kecil**, maka KPT dapat difungsikan sebagai :

- Penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi.
- Tempat pelatihan, pemagangan, diseminasi teknologi, serta pengembangan kemitraan agribisnis dengan swasta.

KEBUTUHAN DAN TAHAPAN PEKERJAAN Selanjutnya adalah :

- Kebutuhan akses jalan menuju KPT (saat ini kondisi jalan belum memadai, lebar jalan hanya ± 2.00 m). Dibutuhkan akses jalan yang lebih dekat dan lebih lebar dari yang ada sekarang melalui pembebasan lahan.
- Pekerjaan Pemagaran pada batas lahan KPT. Panjang keliling adalah ± 2100 m'.

- Pematangan lahan area pertanian, peternakan dan perikanan
- Prasarana : penyediaan listrik, air dan jalan
- Sarana : kantor KPT, gudang peralatan (pertanian, peternakan, perikanan), kandang, dll

Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar peningkatan populasi ternak ruminansia di Kota Cilegon. Pengukurannya adalah dengan cara populasi ternak ruminansia tahun n dikurangi populasi tahun $(n-1)$ dibagi populasi tahun $(n-1)$ dikali 100%.

Populasi ternak ruminansia Tahun 2019 sebesar 10.875 ekor sementara tahun 2020 sebesar 10.898 ekor maka diperoleh peningkatan populasi pada tahun 2020 sebesar 0,21%. Target peningkatan populasi ternak ruminansia sebagaimana RPJMD adalah sebesar 0,5% per tahun sehingga capaian kinerja tahun 2020 sebesar 42%.

$$\begin{aligned}
 \text{Peningkatan populasi ternak ruminansia} &= \frac{\text{Populasi ternak ruminansia tahun } n - \text{Populasi ternak ruminansia tahun } (n-1)}{\text{Populasi ternak ruminansia tahun } (n-1)} \times 100\% \\
 &= \frac{10.898 \text{ ekor} - 10.875 \text{ ekor}}{10.875 \text{ ekor}} \times 100\% \\
 &= 0,21\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun ini target peningkatan populasi ternak ruminansia tidak dapat tercapai, selain karena pandemi *covid-19*, banyak hal yang mempengaruhi seperti anggaran yang diperuntukan untuk inseminasi buatan (IB) yaitu membeli sperma (sapi / kerbau), nitrogen cair, straw dan lainnya, sehingga tingkat kehamilan ternak ruminansia tidak dapat ditingkatkan dan yang menjadi pengurangan terbesar yaitu adanya tindak pencurian hewan ternak sepanjang tahun 2020, sebanyak 24 ekor sapi / kerbau dicuri pada usia produktif dan ada diantaranya dalam keadaan hamil sehingga menjadi penurunan yang signifikan meskipun 8 ekor terlindungi oleh program Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau (AUTSK), dan sebanyak 3 ekor mati karena penyakit (tercover program AUTSK). Diharapkan pada tahun kedepan tidak lagiterjadi hal yang serupa dan para peternak mengikuti AUTSK sehingga peternak mendapatkan jaminan jika terjadi sesuatu pada hewan ternaknya.

2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar cakupan pelayanan kesehatan hewan terhadap populasi hewan keseluruhan di Kota Cilegon. Pengukurannya dilakukan dengan cara membagi jumlah hewan yang terlayani dengan jumlah populasi hewan dikali 100%.

Jumlah pasien terlayani tahun 2020 sebanyak 54.421 ekor sementara populasi sebesar 355.295 ekor maka diperoleh cakupan pelayanan kesehatan hewan tahun 2020 sebesar 15,317%. Target Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana RPJMD sebesar 15% maka pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 102,11%.

$$\begin{aligned} \text{Cakupan pelayanan kesehatan hewan} &= \frac{\text{Jumlah hewan yang terlayani}}{\text{Jumlah populasi hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{54.421 \text{ ekor}}{355.295 \text{ ekor}} \times 100\% \\ &= 15,317\% \end{aligned}$$

Pencapaian ini dapat diperoleh melalui berbagai upaya seperti penyediaan obat-obatan hewan, penyediaan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan, pelaksanaan vaksinasi rabies, vaksinasi ND (*Newcastle Disease*), pemeriksaan dan pengobatan helminthiasis (kecacingan), surveilans penyakit hewan menular strategis (PHMS), pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas dan pelayanan kesehatan hewan secara aktif dengan mobil Puskesmas keliling, sosialisasi kesehatan hewan dan media massa lokal.

3. Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Indikator ini untuk menggambarkan seberapa besar cakupan pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan hewan terhadap pelaku usaha produk asal hewan keseluruhan di Kota Cilegon. Pengukurannya dilakukan dengan cara membagi jumlah pelaku usaha yang terlayani dengan jumlah pelaku usaha produk asal hewan dikali 100%.

Jumlah pelaku usaha (kesmavet) terlayani tahun 2020 sebesar 78 dari 1093 pelaku usaha produk asal hewan maka diperoleh cakupan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner tahun 2020 sebesar 7,13%. Target Cakupan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner menurut RPJMD sebesar 7%, sehingga pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 101,86%.

$$\begin{aligned} \text{Cakupan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner} &= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang terlayani}}{\text{Jumlah pelaku usaha produk asal hewan}} \times 100\% \\ &= \frac{78 \text{ pelaku usaha}}{1093 \text{ pelaku usaha}} \times 100\% \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} & 1.093 \text{ pelaku usaha} \\ = & 7,13 \% \end{aligned}$$

Pencapaian tahun 2020 ini dapat diperoleh melalui berbagai upaya seperti : pemantauan unit usaha produk asal hewan; pengambilan dan pengujian sampel produk asal hewan; Sosialisasi higienis dan sanitasi kepada pedagang pasar; sosialisasi penyembelihan hewan kurban; Pemantauan Penyembelihan Hewan Qurban; pendampingan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti masih adanya wabah pandemi *covid-19*, terbatasnya anggaran setelah *refocussing*, terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai untuk protokol kesehatan, pemberlakuan pembatasan jam kerja / jam operasional serta pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat.

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan Program Pengembangan Pertanian :

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian
2. Adanya OPT hama dan penyakit tanaman

Upaya yang akan dilakukan :

1. Adanya insentif dan disinsentif terkait penggunaan lahan pertanian
2. Perlunya penggunaan teknologi dalam budidaya pertanian

Permasalahan pada Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM peternakan dan kesehatan hewan
2. Berkurangnya lahan pengembangan peternakan akibat alih fungsi lahan
3. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha peternakan
4. Belum adanya kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan

Upaya yang akan dilakukan

1. Peningkatan kapasitas dan jumlah SDM peternakan dan kesehatan hewan

2. Peningkatan / penerapan teknologi budidaya peternakan, insentif dan disinsentif
3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha peternakan
4. Pembentukan kelembagaan Pusat Kesehatan Hewan

3.1.3.4 Perdagangan

A. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tabel 3.1.3.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar						
Program Pengendalian Dan Pengembangan perdagangan		921.406.000	121.060.000	13,14%	Terjadinya pengalihan anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 Dan adanya kegiatan DID pada APBD Perubahan yang tidak dapat dilaksanakan akibat batal lelang oleh tim Pokja	Adanya perubahan perencanaan kegiatan pada perubahan anggaran dalam APBD-P 2020.
	Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar	50,00%	60,00%	120,00%	-	-
	Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan	75,00%	181,00%	241,33%	-	-
Operasional TPID (Tim Inflasi)		2.426.000	2.426.000	100%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19	Melanjutkan kegiatan pada perencanaan program kegiatan tahun 2021
	Terlaksananya Pengendalian Inflasi Daerah	0 Komoditas	0 Komoditas	0%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	Melanjutkan kegiatan pada perencanaan program kegiatan tahun 2021

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Edukasi Perlindungan Konsumen		46.155.000	46.155.000	100%		
	Terlaksananya Hari Konsumen Nasional	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	Melanjutkan kegiatan pada perencanaan program kegiatan tahun 2021
	Terlaksananya Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya	5 Pengawasan	0 Pengawasan	0%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pekerjaan baru tahap persiapan	Melanjutkan kegiatan pada perencanaan program kegiatan tahun 2021
Stabilisasi Harga Barang Pokok		2.215.000	2.215.000	100,00%		
	Terlaksananya Pemantauan Harga Barang Pokok dan Barang Penting melalui Sistem Harga Online	0 Pasar	0 Pasar	0 %	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	Melanjutkan kegiatan pada perencanaan program kegiatan tahun 2021
Media Center Tera Menuju Pasar Tradisional Kota Cilegon Tertib Ukur		38.060.000	37.714.000	99,09%		
	Terselenggaranya Sidang Tera Ulang di 3 pasar Kota Cilegon	300 Pedagang	500 Pedagang	166,67%	Dari 500 Pedagang terdapat 496 UTTP yang telah dilakukan sidang tera dan ada 4 UTTP yang batal dikarenakan alat UTTP tersebut tidak dapat direparasi	-
Bazar Murah		32.550.000	32.550.000	100%		
	Terlaksananya Kegiatan Bazar Murah	8 Kecamatan	0 Kecamatan	%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pada proses pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan terjadi Batal lelang oleh tim Pokja, dan waktu pelaksanaan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					untuk lelang ulang tidak mencukupi.	
	Terlaksananya Kegiatan Pameran HUT Kota Cilegon	1 Kegiatan	0 Kegiatan	%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pada proses pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan terjadi Batal lelang oleh tim Pokja, dan waktu pelaksanaan untuk lelang ulang tidak mencukupi.	
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada seksi Stabilitas Harga (DID Tambahan)		800.000.000	0	0%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pada proses pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan terjadi Batal lelang oleh tim Pokja, dan waktu pelaksanaan untuk lelang ulang tidak mencukupi.	Melaksanakan kegiatan tersebut di APBD Reguler atau di awal waktu, sehingga waktu untuk melakukan lelang memadai
	Terselenggaranya Bazar Murah	8.600 Paket	0	0%	"	"
Program Pembinaan Dan Pengelolaan pasar		3.899.702.078	2.181.491.348	55,94		
	Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar	5,00	25%	500%		Dari 8 Pasar yang ada di Kota Cilegon, baru 2 pasar yang dinilai memiliki kepuasan pengunjung pasar yaitu Pasar Blok F dan Pasar Wisata Cigading $2/8 = 25\%$
	Realisasi pendapatan daerah dari pengelolaan pasar	5,00	134%	2680%		Capaian Rata-rata Realisasi Pendapatan telah melebihi target yang ditetapkan atau di atas angka 100%
	Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon	87,50	100,00	114,29%		Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Cilegon sudah tercapai semenja tahun 2018

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						sudah terdapat 8 Pasar dari 8 Jumlah kecamatan.
	Rasio jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi terhadap total jumlah pasar rakyat	100,00	62,50	62,50%	Terjadinya penundaan kegiatan revitalisasi di awal tahun dan adanya Refocusing atau realokasi anggaran.	Merencanakan kegiatan revitalisasi pada tahun berikutnya
Revitalisasi dan Penataan Pasar Rakyat (Prioritas Daerah)		1.965.965.000	590.373.000	30,03%	Adanya refocusing dan pengalihan anggaran.	Merencanakan kegiatan revitalisasi pada tahun berikutnya
	tersedianya petugas kebersihan pasar blok f dan pasar baru merak	20 org	20,00	100%	-	-
	tersedianya petugas keamanan pasar baru kota cilegon	30 org	-	%	terjadi gagal lelang dan tidak dapat dilaksanakan	
	Terbangunnya Lahan Pasar Grogol	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Terbangunnya Tempat Parkir Terbuka Permanen Pasar Kec. Grogol	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Terbangunnya Tempat Parkir Terbuka Permanen Pasar Baru Kota Cilegon	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Tutup Saluran Pasar Baru Kota Cilegon	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Terlaksananya Normalisasi Saluran Pasar Baru Kota Cilegon	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Pemasangan Jalusi Pasar Wisata Cigading	1 paket	-	%	Rasionalisasi	
	Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Kecamatan Citangkil	1 Paket		%	Rasionalisasi	
	Terpeliharanya Saluran Dalam Pasar Blok F Kota Cilegon	1 Pasar		%	Rasionalisasi	
	Terbangunnya Saluran Air Kotor Pasar Kec Cibeber	1 paket	-	%	Tidak Cukup Waktu	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terpeliharanya Hanggar Pasar Baru Kota Cilegon	1 Paket		%	Tidak Cukup Waktu	
Intensifikasi Pendapatan Pasar		34.359.078	34.359.078	100%		
	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Pasar	3 bulan	3 bulan	100 %		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi Sarana dan Prasarana Pasar (DID Tambahan)		304.000.000	300.142.000	98,73%		
	Tersedianya Masker	8 Pasar	8 Pasar	100 %		
	Tersedianya Cator Penyemprotan	3 unit	3 unit	100 %		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Pada UPT Pasar (DID Tambahan)		200.000.000	73.251.000	36,63%	Terkendala Perwal Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 13. (Rp. 120.000.000,- Alat penunjang DARING harus dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik)	Kordinasi dengan Dinas Kominfo untuk diusulkan pada kegiatan tahun berikutnya.
	Sosialisasi Belanja Daring	150 Orang	150 Orang	100 %		
	Jumlah Meja untuk Pedagang	35 Meja	35 Meja	100 %		
	Jumlah Prasarana Belanja Daring : - Komputer 2 Unit - Server 1 Unit - Switch Hub 1 Unit - Wireles Acces Point 4 Unit - LCD Projector 1 Unit - TV 55' 1 Unit - Printer 2 Unit - Monitor IKM 2 Unit - Router 1 Unit - Headphone 2 Unit - Braket 1 Buah	18,00	0,00	0,00%	Terkendala Perwal Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 13. (Rp. 120.000.000,- Alat penunjang DARING harus dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statistik)	Kordinasi dengan Dinas Kominfo untuk diusulkan pada kegiatan tahun berikutnya.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pendayagunaan Pasar untuk Pemulihan Ekonomi Terdampak Covid-19 (DID Tambahan)		1.395.378.000	1.183.366.270	84,81%		
	Launching Pasar Rakyat	3 Pasar	1 Pasar	33,33%	3 Target Launching Pasar yang rencana akan dilaksanakan namun hanya 1 yang terlaksana yaitu Pasar Cikerei, sedangkan Pasar Grogol dan Tegal bunder tidak jadi karena masih dalam masa Pandemi covid-19.	Diusahakan untuk melaunching 2 pasar pada tahun berikutnya.
	Terbantunya Sarana dan Prasarana pedagang Pasar Rakyat	8 Pasar	6 Pasar	75%	dari sarana yang di bantuan berupa meja lipat, payung dan timbangan di 8 pasar hanya 6 pasar yang terealisasi, 2 pasar lainnya karena belum adanya pedagang yang berjualan di pasar tersebut	
	Terlaksananya Sekolah Pasar	3 Pasar	3 Pasar	100%		
	Aplikasi Belanja On Line Yuk (BOY)	3 Pasar	3 Pasar	100%		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		4.168.494.860	3.964.720.171	95,11%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	85,71 %	85,71%	Belum lengkapnya data sektoral dikarenakan banyaknya kegiatan reguler pada tahun 2020 yang tidak terlaksana akibat rasionalisasi	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	99,91%	99,91%		
	Tingkat disiplin aparatur	100%	93,57%	93,57%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100%	99,35 %	99,35 %		

Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan arah kebijakan Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar. Dalam menjalankan tugas dan arah pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon melakukan tugas nya melalui program dengan indicator pembangunan sebagai sasaran yang akan dicapai, berikut penjelasan indicator pembangunan tahun 2020 pada masing-masing program:

1. Program Pengendalian Dan Pengembangan Perdagangan

Program Pengendalian Dan Pengembangan Perdagangan adalah Program yang membidangi urusan pemerintah tentang perdagangan, dimana perdagangan ini untuk menggerakkan perekonomian daerah. Tujuan dari program ini adalah dalam rangka peningkatan sistem distribusi dan pengawasan peredaran barang/jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta penguatan sektor ekspor impor. Adapun sasarannya adalah meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta ekspor impor dan meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha. Dari tujuan tersebut bahwa sebagai upaya perlindungan dan pengawasan peredaran barang/jasa sebagai indikasi ketercapaian pembangunan dengan indicator pembangunan program yaitu :

1) Persentase Penurunan Barang Tidak Layak Edar

Capaian kinerja tahun 2020 pada indicator ini yaitu bahwa Jumlah barang tidak layak edar sebanyak 2 barang tidak layak edar (barang expire dan kemasan rusak) di dua toko modern dari 164 pemantauan/toko atau 1,2% barang yang tidak layak edar yang ditemukan. Sehingga Hasil yang dicapai Persentase penurunan barang layak tidak edar tahun 2019-2020 yaitu sebesar 60% dari target 50%, yang mana barang layak tidak edar tahun 2019 sebanyak 5 barang. Artinya bahwa pada tahun 2020 barang tidak layak edar menurun 60% dari tahun 2019

Jenis Toko Modern Di Kota Cilegon

NO	Pusat Perbelanjaan/Mall	Supermarket	Dept. Store	Minimarket
1	Citimall	Lion Superindo (CCM)	Edi Toserba	Indomaret
2	Ramayana	Lion Superindo (Citimall)	matahari (CCM)	Alfamart
3	Cilegon Center Mall (CCM)	Giant	Matahari (Citimall)	Alfamidi
4	Transmart	Robinson	Ramayana Dept Store	Dan-Dan
5	Terminal Eksekutif Merak	Hypermart	Ria Busana	Ceriamart
6	Artha Bangunan	Bintang Swalayan		
7		Ace Hardware		
8		Informa		

Sumber data : Data DISPERINDAG

Jumlah Toko Swalayan (Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Store Dan Minimarket)

No	JENIS	2017	2018	2019	2020
1	Mall/Pusat Perbelanjaan	2	2	3	6
2	Supermarket	5	5	6	8
3	Dept. Store	3	3	4	5
4	Minimarket	131	148	158	160
JUMLAH		141	158	171	179

Sumber data : Data DISPERINDAG

2) Tingkat pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan

Tingkat Pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan di hitung Banyaknya varian komoditi barang yang dipantau terkait ketersediaan harga & pasokan pangan, pemantauan yang dilakukan pada komoditi sebanyak 38 varian komoditi terhadap 21 varian komoditi (Perpres Presiden Nomor 71 tahun 2015) dengan hasil 181%. Aritunya bahwa 181 % ketersediaan varian komoditi yang beredar di pedagang pasar di dapati lebih dari 21 varian komoditi. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh 181 % dari 75% atau 241,33%

Table varian komoditi Di Kota Cilegon Tahun 2020

JENIS KOMODITI DAN VARIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.71 TAHUN 2015				KOMODITI DAN VARIAN YANG DISURVEY OLEH INDAG	
KOMODITI		VARIAN		YANG DISURVEY	
1	Beras	1	Premium	1	Premium
		2	Medium	2	Medium
		3	Termurah	3	Termurah
2	Gula Pasir Lokal	4	Gula Pasir Lokal	4	Gula Pasir Lokal
3	Minyak Goreng	5	Kemasan	5	Kemasan
		6	Tanpa Merk/Curah	6	Curah
4	Daging	7	Sapi Murni	7	Sapi Murni
		8	Ayam Broiler	8	Ayam Ras
				9	Ayam Kampung
5	Telur	9	Ayam Broiler	10	Ayam Ras
6	Kedelai	10	Ekspor	11	Impor
		11	Lokal	12	Lokal
7	Tepung Terigu	12	Tepung Terigu	13	Curah
				14	Kemasan
8	Cabe Merah	13	Keriting	15	Keriting
		14	Biasa	16	Besar/TW
				17	Cabe Hijau
9	Cabe Rawit	15	Hijau	18	Hijau
		16	Merah	19	Merah
10	Bawang	17	Merah	20	Merah
		18	Putih	21	Putih
				22	Kating
11	Ikan Segar	19	Tongkol/Tuna/Cakalang	23	Teri Asin Medan

JENIS KOMODITI DAN VARIAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NO.71 TAHUN 2015				KOMODITI DAN VARIAN YANG DISURVEY OLEH INDAG	
		20	Bandeng	24	Bandeng
		21	Kembung	25	Kembung
				26	Mas
				27	Bawal
				28	Garam : Bata Beryodium
				29	Halus Beryodium
				30	Kacang Tanah
				31	Kacang Ijo
				32	Ubi Kayu
				33	Ubi Jalar
				34	Tomat
				35	Wortel
				36	Kentang
				37	Kol
				38	Jagung Pipil

Program pembinaan dan pengelolaan pasar merupakan program yang mengelola pasar rakyat atau tradisional pada aset pemerintah Kota Cilegon. Peranan bagi pemerintah adalah sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun kegunaan pasar bagi ekonomi masyarakat adalah Merupakan tempat menjual hasil produksi yang dihasilkan masyarakat, menjadi tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung, menjadi tempat transaksi jual beli barang atau jasa, membantu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Pembangunan program pengembangan dan pengelolaan pasar

Pembangunan program pengembangan dan pengelolaan pasar yang telah dicapai yang dijadikan empat indikasi keberhasilan atau ketercapaian pembangunan. Capaian Indikasi pembangunan berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tingkat Kepuasan Pengunjung Pasar

Pada Tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 25% hasil ini didapat mengingat jumlah pasar rakyat yang ada di Kota Cilegon sebanyak 8 Pasar, dari 8 Rakyat hanya terdapat 2 Pasar Rakyat yaitu Pasar Blok F dan Pasar Cigading yang dinilai memiliki Kepuasan Terhadap Pengunjung Pasar, namun untuk 6 Pasar Rakyat belum memiliki Nilai Kepuasan Terhadap Pengunjung Pasar dikarenakan masih kurang tertata secara keseluruhan dan masih perlu dilakukan Revitalisasi di beberapa Sarana dan Prasarana Pasar.

2) Realisasi Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Pasar

Jumlah realisasi pendapatan pasar sebesar Rp. 2.378.419.568,- sedangkan target pendapatan pasar sebesar Rp. 1.769.856.600,- atau 134,38%, tingginya pendapatan pasar pada angsuran kios, sewa lahan pemakaian kekayaan daerah dan retribusi pelayanan pasar. Capaian kinerja sebesar 2.680% dari target RPJMD sebesar 5%, meningkatnya capaian kinerja diakibatkan adanya perubahan Perwal Pendapatan Pasar No.8 Tahun 2017 tentang Jenis komponen pendapatan pasar berupa retribusi pelayanan pasar, retribusi kekayaan daerah, lain-lain PAD yang SAH, MCK Umum.

3) Rasio jumlah pasar rakyat terhadap jumlah kebutuhan pasar rakyat di Kota Cilegon.

Sampai dengan tahun 2020 ini, terdapat 8 (delapan) Pasar Rakyat Kota Cilegon yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan yaitu Pasar Baru Cilegon (Kecamatan Jombang), Pasar Blok F (Kecamatan Cilegon), Pasar Tegal Bunder (Kecamatan Purwakarta), dan Pasar Merak (Kecamatan Pulomerak), Pasar Cibeber (Kecamatan Cibeber) Pasar Citangkil (Kecamatan Citangkil) dan Pasar Ciwandan (Kecamatan Ciwandan) serta Pasar Grogol Kecamatan Grogol.

4) Rasio Jumlah Pasar Rakyat yang di Revitalisasi terhadap Total jumlah Pasar Rakyat.

Tahun 2020 pasar yang direvitalisasi sebanyak 5 pasar dari 8 pasar, capaian kinerja yang diperoleh 62,5% dari target capaian 100%. Tidak tercapainya capaian tersebut dikarenakan terjadinya penundaan kegiatan revitalisasi di awal tahun dan adanya Refocusing atau realokasi anggaran, terjadinya gagal lelang dan tidak cukup waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kegiatan prioritas daerah (Revitalisasi Pasar) terdapat Rasionalisasi anggaran yang membuat perubahan pada beberapa indikator yang semula penyediaan menjadi perencanaan, dan ada pula kegiatan yang mengalami kendala pada proses pelaksanaan lelang “gagal lelang” dan tidak cukup waktu pelaksanaan kegiatan karena adanya intruksi penundaan kegiatan fisik pada awal tahun sehingga dapat dilaksanakan.

Berdasarkan tabel program dan kegiatan di atas bahwa serapan anggaran tidak optimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Adanya pengalihan anggaran atau refocusing ke dalam program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga mempengaruhi capaian program yang didukung oleh beberapa kegiatan tersebut.

- Adanya kegiatan DID di Bidang Perdagangan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Bazar Murah di 8 Kecamatan, karena batal lelang oleh tim Pokja dan Sedikit waktu untuk pelaksanaan lelang ulang.
- Dari 3 Target Launching Pasar yang rencana akan dilaksanakan namun hanya 1 yang terlaksana yaitu Pasar Cikerei, sedangkan Pasar Grogol dan Tegal bunder tidak jadi karena masih dalam masa Pandemi covid-19.
- Adanya kendala pada Kegiatan DID di UPT Pasar Blok F mengenai penyediaan alat DARING yang tidak boleh dilaksanakan. Terkendala Perwal Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, khususnya pada Pasal 10 dan Pasal 13. (Rp. 120.000.000,- Alat penunjang DARING harus dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan Statisik).

Permasalahan dan solusi

Permasalahan

1. Belum adanya PERWAL turunan dari PERDA tentang retribusi pelayanan TERA/TERA ulang.
2. Kurang tenaga fungsional tertentu (penera)
3. Belum adanya tenaga reparatur timbangan di kota cilegon
4. Belum terintegrasinya System Informasi Harga Cilegon (SHAGON) dengan layanan media informasi.
5. Belum memiliki gedung standar pelayanan metrology.
6. Belum memiliki laborotorium meter air dan laboratorium meter listrik dalam rangka meningkatkan PAD.
7. Belum maksimalnya fasilitasi terhadap peningkatan ekspor bagi pelaku usaha
8. Belum memadainya sarana prasarna pasar rakyat grogol (akses masuk pasar dan saluran akses jalan) , belum memiliki akses jalan masuk pasar purwakarta dan cibeber (TPT dan saluran air kotor dalam pasar).
9. Kapasitas pedagang pasar baru cilegon sudah melebihi daya tampung, dan luasan yang melebihi dari pasar tradisional Type A yang luasannya minimal 3.000 m2 sebagaimana yang tertuang dalam Permendag No 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman dan Pengeolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
10. Belum optimalnya penataan pedagang formal rakyat Kota Cilegon pada tempatnya yang telah disediakan.

Solusi

1. Pengesahan PERWAL turunan dari PERDA tentang retribusi pelayanan TERA/TERA ulang
2. Penambahan fungsional tertentu (Panera) sebanyak 4 orang

3. Pelatihan bagi tenaga reparatur timbangan di Kota cilegon
4. Pemutahiran SHAGON
5. Penyediaan lahan pembangunan gedung pelayanan standar metrology, yang pembangunannya di anggarkan APBN
6. Penyediaan sarana dan prasarana laborotarium air dan listrik
7. Bimtek bagi pelaku usaha yang sudah atau belum melakukan kegiatan ekspor
8. Pengadaan dan pembangun Akses pasar grogol, Pengadaan lahan akses masuk pasar Kecamatan Purwakarta, pembangunan TPT dan saluran air kotor dan penampungan Limbah domestic Pasar Cibeber
9. Perencanaan dan pengembangan menjadi pasar kecamatan menjadi pasar regional
10. Penataan pedagang formal pasar rakyat Kota Cilegon.

3.1.3.5 Perindustrian

A. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tabel 3.1.3.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perindustrian

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar					(diisi permasalahan dalam pelaksanaan arah kebijakan)	(diisi hal-hal yang dilakukan di sepanjang tahun anggaran untuk menangani permasalahan tsb)
Program Pengembangan Kemitraan Industri		1.586.182.000	1.443.425.100	91,00		
	Pertumbuhan jumlah industri kecil	> 3,6 %	6,86%	191%		
	Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi	86%	78,26%	91%	Adanya refocusing atau realokasi anggaran sehingga adanya kelompok yang belum mendapatkan pembinaan	Mengusulkan kelompok yang belum mendapatkan pembinaan
	Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	76%	84,07%	111%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	76%	44,41%	58,43%	Adanya kegiatan penunjang yang mengalami refocusing atau realokasi anggaran.	Mengusulkan IKM yang belum mendapatkan pembinaan dan peralatan produksi.
Penunjang kegiatan dan Pengembangan Dekranasda Kota Cilegon		391.862.000	298.058.100	76,06%	Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena masih terkendala Pandemi Covid-19	
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Produksi Batik	20 orang	20 orang	100%		
	Terciptanya Produk Cinderamata Kota Cilegon	2 Jenis/Produk	2	100%		
	Meningkatkan Kualitas Produksi Batik	8 IKM	8	100%		
	Pameran Tk. Provinsi dan Tk. Nasional	2 Kegiatan	0 kegiatan	0 %	Tidak dapat dilaksanakan karena masih terkendala masa pandemi covid-19	
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kerajinan	20 orang	20 orang	100%		
Penumbuhan Sentra Industri Kecil Sandang, Aneka dan Kerajinan		3.915.000	3.915.000	100%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	
	Terlaksananya Kemitraan Industri	40 orang/hari	0,00 orang/hari	0%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	
	Terlaksananya pelatihan sarung tangan	10 orang	0,00 orang	0%	Refocusing dan realokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19, sehingga target kinerja belum terlaksana, pelaksanaan pekerjaan baru tahap persiapan	
Penyusunan RAPERDA RIPIK		51.442.000	49.327.000	95,89%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)	60 orang/hari	60 orang/hari	100%		
	Terumuskannya Draft Dokumen RPIK Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Penumbuhan Industri Kecil Menengah Berbasis Logam dan Kimia		113.426.000	113.426.000	100%		
	Terlaksananya sosialisasi kepada pelaku industri kecil	60 IKM	60 IKM	100%		
	Alat bermesin pembuatan kerajinan logam	1 set	1 set	100%		
	Alat manual pembuatan kerajinan logam	1 set	1 set	100%		
Bimbingan Teknis Bidang Industri Pangan, Barang dari kayu dan furniture		92.537.000,0	92.537.000,0	100%		
	Terlaksananya Bimtek Pengolahan Pangan	50 IKM	50 IKM	100%		
	Tersertifikasinya produk IKM	15 sertifikat/IKM	15 sertifikat/IKM	100%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi industri pangan, barang dari kayu dan furniture (DID Tambahan)		88.000.000	87.480.000	99,41%		
	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan Kegiatan Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi industri pangan, barang dari kayu dan furniture (DID Tambahan)	20 IKM	20,00	100%		
	Jumlah mesin Pengupas Kulit Ari Kedelai	4 Unit	4,00 Unit	100%		
	Jumlah Rak fermentasi Tempe	4 Unit	4,00 Unit	100%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi industri sandang, aneka dan kerajinan (DID Tambahan)		150.000.000	114.182.000	76,12%	Efisiensi kegiatan pada bahan percontohan dan jumlah hari pelaksanaan.	Menganggarkan anggran belanja pelatihan sarung tangan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pelatihan Industri Kecil Sarung Tangan	25 IKM	25,00	100%		
	Fasilitasi Bahan Percontohan	2 paket	1,00	50%		
	Stiker / Spanduk Papan Informasi Industri Kecil Majun	4 unit	4,00	100%		
Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid 19 pada Seksi industri logam, mesin, kimia, elektronika dan alat angkut (DID Tambahan)		695.000.000	684.500.000	98,49%		
	Jumlah IKM yang mengikuti Pelatihan kewirausahaan	100 IKM	100 IKM	100%		
	Jumlah Mesin Cator Las Keliling	8 Unit	8 Unit	100%		
	Jumlah Washtafel Portabel	50 Unit	50 Unit	100%		
	Jumlah Mesin Cetak Batubata	8 unit	8 unit	100%		
	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek Kemitraan	100 IKM	100 IKM	100%		

Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan arah kebijakan Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar. Dalam menjalankan tugas dan arah pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon melakukan tugas nya melalui program dengan indicator pembangunan sebagai sasaran yang akan dicapai, berikut penjelasan indicator pembangunan tahun 2020 pada masing-masing program :

1. Program Pengembangan Kemitraan Industri

Program Pengembangan Kemitraan Industri merupakan program pembangunan pada industri usaha masyarakat agar usaha yang dibidangi oleh masyarakat menjadi meningkat pada produksi, kualitas, dan jaringan usaha. Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha yang mengolah bahan baku sampai dengan produksi serta pemasaran (Industri Kecil / IK).

Indikator ini menunjukkan sebagai indikasi pembangunan pada industry kecil yang di lakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cilegon, yaitu :

1) Pertumbuhan jumlah industri kecil

Program Pengembangan Kemitraan Industri memiliki tujuan mewujudkan sentra-sentra industry potensial dan meningkatnya unit usaha IKM yang produktif dengan produk IKM yang inovatif. Sedangkan sasaran yang ingin dituju adalah terwujudnya pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah

Capaian tahun 2020 bahwa jumlah IKM sebanyak 1.043 IKM, pada tahun 2019 sebanyak 976 IKM, jadi pertumbuhan Jumlah industry kecil dan menengah sebesar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar 6,86%.Capaian tersebut melebihi target yang disebabkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga menumbuhkan wirausaha industry kecil dari kelompok Industri Kecil Sandang dan Kerajinan, Industri kecil Pangan, Industri kecil Logam dan Kimia. Dan adanya kegiatan monitoring internal ke IKM yang ada di Kota Cilegon.

Table Pertumbuhan IKM Th 2018-2020

Tahun	Jumlah IKM	Pertumbuhan
2018	956	
2019	976	2,09%
2020	1043	6,86%

REKAP INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA CILEGON TAHUN 2020									
KECAMATAN	PURWAKARTA	CIBEBER	CITANGKIL	CIWANDAN	CILEGON	GROGOL	JOMBANG	PULOMERAK	JUMLAH
PANGAN	46	61	50	27	60	39	42	23	348
BARANG DARI KAYU	22	19	20	17	18	13	42	11	162
FURNITURE	1	1					4		6
SANDANG	21	15	5	11	55	14	17	5	143
ANEKA	2					18	1	1	22
KERAJINAN	7	7	7		5	3	7	2	38
LOGAM	6	13	15	9	17	5	31	4	100
MESIN	12	3			6	2	24	9	56

REKAP INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA CILEGON TAHUN 2020									
KECAMATAN	PURWAKARTA	CIBEBER	CITANGKIL	CIWANDAN	CILEGON	GROGOL	JOMBANG	PULOMERAK	JUMLAH
KIMIA	1	86	27	26	24		4		168
ELEKTONIKA									
ALAT ANGKUT									
JUMLAH	118	205	124	90	185	94	172	55	1043

2) Proporsi industri kecil dan menengah yang sesuai dengan tata kelola dan regulasi

Capaian realiasi tahun 2020 pada jumlah kelompok IKM yang mendapat bantuan binaan Pemda sebanyak 18 kelompok dari jumlah keseluruhan sebanyak 23 kelompok IKM, atau 78,26% kelompok IKM yang mendapatkan bantuan binaan PEMDA. Capaian realisasi tersebut masih dibawah target yang diharapkan sebesar 86% (20 kelompok). Ketidaktercapaian tersebut dikarenakan Adanya kegiatan penunjang yang mengalami refocusing atau realokasi anggaran sehingga adanya kelompok yang belum mendapatkan pembinaan.

No	Nama Kelompok/ Sentra / Klaster IKM	Lokasi
1	Sentra Kasur	Link. Palas Kel. Bendungan Kec. Cilegon
2	Batik	Cibeber
3	Majun Gerem	Gerem Kec. Grogol
4	Majun Grogol	Grogol Kec. Grogol
5	Sarung Tangan	Gerem Kec. Grogol
6	Kerajinan	Kota Cilegon
7	Emping	Link. Ketileng Kec. Cilegon
8	Tempe	Link. Sambilawang Kec. Cibeber
9	Keripik Pisang	Pulomerak
10	Logam las	Kecamatan grogol
11	Logam las	Kecamatan pulomerak
12	Logam las	Kecamatan Purwakarta
13	Logam las	Kecamatan Cilegon
14	Logam las	Kecamatan Citangkil

No	Nama Kelompok/ Sentra / Klaster IKM	Lokasi
15	Logam las	Kecamatan Ciwandan
16	Logam las	Kecamatan jombang
17	Logam las	Kecamatan Cibeber
18	Bata & Genteng	Kelurahan Karang Asem Kec. Cibeber
19	Bata & Genteng	Kelurahan Kalitimbang Kec. Cibeber
20	Bata & Genteng	Kelurahan Lebak Denok Kec. Citangkil
21	Bata & Genteng	Kelurahan Bendungan Kec. Cilegon
22	Bata & Genteng	Kelurahan Bulakan Kec. Cilegon
23	Conblok	Jln. Temu Putih, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon

3) Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Capaian Realisasi tahun 2020 pada jumlah IKM yang berkembang berdasarkan peningkatan kualitas, kapasitas produksi dan pemasaran sebanyak 248 IKM terhadap 295 IKM yang telah dibina atau 84,07% IKM yang meningkatkan kualitas kapasitas usaha dari target yang dicapai sebesar 76% sehingga capaian kinerja sebesar 111%, ketercapaian ini dikarenakan Adanya DID tambahan program dukungan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

4) Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah

Capaian realisasi tahun 2020 pada jumlah IKM yang berkembang berdasarkan peningkatan IPTEK sebanyak 131 IKM terhadap 295 IKM yang telah di bina atau 54,1% IKM yang berkembang dengan peningkatan IPTEK, dengan target yang akan dicapai sebesar 76% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 58% ketidaktercapaian ini dikarenakan belum semua IKM menerapkan IPTEK dalam proses produksi

Berdasarkan tabel program dan kegiatan diatas adanya serapan dan keluaran kegiatan yang tidak terserap/tidak terlaksana dikarenakan beberapa hal, sebagai berikut :

- Adanya pengalihan anggaran atau refocusing ke dalam program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
- Pada kegiatan Pameran Dekranasda tidak dapat dilaksanakan karena masih terkendala kondisi pandemi covid-19 sepanjang Tahun 2020.
- Adanya permasalahan PMK 87 Tahun 2020 berkaitan honor narasumber pada kegiatan DID sehingga waktu pelaksanaan agak sedikit terlambat dikarenakan butuhnya koordinasi dan konsultasi yang memakan waktu.
- Adanya pengalihan anggaran atau refocusing ke dalam program pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga mempengaruhi capaian program yang didukung oleh beberapa kegiatan tersebut.



Permasalahan dan Solusi

Permasalahan.

1. Belum memiliki perlengkapan pemasaran produk IKM.
2. Keterampilan IKM belum memadai dalam penggunaan teknologi.
3. Belum memiliki sentra IKM terpadu.
4. Belum optimalnya kepemilikan legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual dan legalitas produk IKM.
5. Belum adanya regulasi tentang perlindungan IKM dalam keikutsertaan kegiatan industry besar.
6. Belum adanya regulasi tentang PKL.
7. Belum adanya ruang untuk usaha bagi PKL

Solusi

1. Penyediaan perlengkapan pemasaran produk IKM (offline dan online).
2. Pelatihan/pendampingan IKM dalam penggunaan teknologi.
3. Pembangunan sentra IKM terpadu.
4. Fasilitasi pembuatan legalitas dan usaha produk IKM.
5. Regulasi peran industry besar terhadap IKM.
6. Regulasi tentang PKL.
7. Penyediaan ruang usaha bagi PKL.

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

3.1.4.1 Administrasi Pemerintahan

A. SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Pemerintahan

Tabel 3.1.4.1a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan		1,685,816,436.00	1,446,153,961.00	85.78%		
	Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.00	3.75	124.91%		
APEKSI		125,000,000.00	57,200,000.00	45.76%	Sudah digunakan anggaran untuk pelaksanaan mamin rapat dan pembelian seragam kegiatan Apeksi	
	Terjalannya Kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Cilegon dengan sesama	2 Agenda	0 Agenda	0	2 (dua) agenda Apeksi tidak dapat dilaksanakan; Muskowil III dan Munas VI disebabkan karena Pandemi covid-19.	Berkoordinasi dgn Sekretariat Komwil II maupun Pusat terkait Surat Penundaan Muskomwil III dan Munas VI. Surat No 20/III/Komwil

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemerintah Kota di Seluruh Indonesia dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat					III/2020 dan Surat No. 71/Apeksi/IV/2020
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		175,000,000.00	149,450,000.00	85.40%		
	Meningkatnya Status Nilai Kinerja LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN		46,500,000.00	45,525,000.00	97.90%		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN	1 Laporan	1 Laporan	100%		
Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon		1,208,516,436.00	1,081,926,961.00	89.53%		
	Tersusunnya Dokumen Pembinaan Kewilayahan Kota Cilegon	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		
Fasilitasi Kerjasama Daerah		70,000,000.00	61,912,000.00	88.45%		
	Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Kerjasama Daerah dan Terfasilitasinya Kerjasama Daerah	6 Dokumen	17 Dokumen	283,39%	Uraian indikator kinerja seharusnya tersusun naskah kerjasama Daerah dan terfasilitasinya kerjasama daerah	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas		30,000,000.00	25,200,000.00	84.00%		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum, Trantibum dan Linmas	4 Laporan	4 Laporan	100%		
Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		30,800,000.00	24,940,000.00	80.97%		
	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		

Program peningkatan pelayanan pemerintahan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP), dengan anggaran sebesar Rp. 1,685,816,436.00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,446,153,961.00 atau 85.78%. Indikator capaian kinerja program peningkatan pelayanan pemerintahan adalah Nilai Kinerja Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), dengan target 3,00% realisasi 3,75% capaian 124,91%.

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Pemerintahan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Kegiatan Apeksi hanya tercapai sebesar 40%, Hal ini dikarenakan dari 2 agenda apeksi yang ditargetkan tidak dapat diikuti yaitu pada bulan April 2020 kegiatan Muskomwil III dan bulan Juli 2020 kegiatan Munas VI disebabkan karena pandemi Covid-19
2. Adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19 di daerah Kota Cilegon sesuai dengan SE Walikota Cilegon Nomor 900/957.BPKAD/2020 tentang pemindahan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

2. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Tabel 3.1.4.1b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Organisasi dan RB)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah		1,142,660,000.00	965,561,500.00	84.50%		
	Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota	75.00	79.7	106.23%	Nilai merupakan rata-rata dari 40 Unit Kerja (kecamatan, puskesmas, UPT dan 9 Perangkat Daerah) Dengan responden masing-masing unit 12	Kedepan proses survey akan menambah jumlah sampel responden agar mampu menggambarkan situasi yang lebih nyata
	Proporsi SKPD yang memiliki SOP (standard operating procedure) yang komprehensif	60.00	67,57	96,52%	Ada penyesuaian terhadap perwal 2 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan SOP	Monitoring dan evaluasi SOP perangkat daerah
	Nilai Integritas Organisasi	4.00	3,13	78,25%	Nilai Integritas Kota Cilegon masih dibawah nilai ideal (3,6) yang tertuang dalam PermenPAN RB 52 Tahun 2014. Aspek yang mendapatkan nilai terendah adalah pada aspek Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi, yaitu 2,88. Survey dilaksanakan oleh KemenPAN RB terhadap 200 orang ASN Kota Cilegon	Pemerintah Kota Cilegon melalui bagian organisasi terus mengevaluasi kondisi integritas jabatan dan integritas organisasi yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cilegon dengan melaksanakan survey kapasitas organisasi secara mandiri. Tahun 2020 dari target 200 Responden telah terjaring sekitar 975 Responden yang merupakan ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon. Adapun untuk hasil Survey tersebut saat ini tengah

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						dilakukan proses supervise oleh pendamping dari KemenPAN RB. Terkait Pembinaan Per Aspek, dilaksanakan secara sistematis dan menjadi target kinerja Tim Reformasi Birokrasi Kota Cilegon, salah satunya dengan mengenalkan Budaya Kerja Cilegon secara substantive kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
	Persentase ketersesuaian pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan	100.00	100.00	100.00%	adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit	Dijadwalkan pelaksanaan penyusunan SKJ pada Tw 4, namun sehubungan dengan adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit maka proses penyusunan SKJ menyesuaikan dengan penjadwalan tersebut
	Nilai rata-rata Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	3.50	3.14	89,7%	Tingkat kepatuhan UPP dalam menindaklanjuti rekomendasi relative rendah	Melakukan supervise kepada UPP agar konsisten dalam menindaklanjuti rekomendasi
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	70 (BB)	64,93 (B)	92,75%	Tidak tercapainya target penilaian SAKIP, sehubungan terdapat beberapa rekomendasi yang belum terpenuhi, dan sangat membutuhkan komitmen Bersama untuk mewujudkan seluruh rekomendasi.	Dari kondisi 14 rekomendasi pada LHE SAKIP 2019, saat ini tersisa 4 Rekomendasi. Proses yang telah dilaksanakan adalah secara konsisten mengenalkan pengukuran kinerja yang terintegrasi system kepada seluruh ASN Kota Cilegon. Tantangannya, pada tahun

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						2021 terjadi perubahan system secara nasional oleh kemendagri. Sehingga dalam hal ini aspek terintegrasi menjadi kendala
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	60 (B)	72,68 (BB)	121,13%	Nilai RB tahun 2020 belum final, sehubungan masih berlangsungnya proses evaluasi di KemenPAN RB	Koordinasi secara simultan kepada KemenPAN RB
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		53,410,000.00	53,160,000.00	99.53%		
	Standar Kompetensi Jabatan	37 OPD	37 OPD	100%	adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit	Dijadwalkan pelaksanaan penyusunan SKJ pada Tw 4, namun sehubungan dengan adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit maka proses penyusunan SKJ menyesuaikan dengan penjadwalan tersebut
Penyusunan Evaluasi Jabatan		53,500,000.00	50,750,000.00	94.86%		
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan	37 OPD	37 OPD	100%	adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit	Dijadwalkan pelaksanaan penyusunan Evjab pada Tw 3, namun sehubungan dengan adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit maka proses penyusunan Evjab menyesuaikan dengan penjadwalan tersebut
Penyusunan ABK (Analisis Beban Kerja)		53,410,000.00	53,160,000.00	99.53%		
	Tersusunnya Analisis Beban Kerja	37 OPD	37 OPD	100%		
Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)		53,500,000.00	53,250,000.00	99.53%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan	37 OPD	37 OPD	100%		
Penyusunan Regulasi Kelembagaan Perangkat Daerah		48,000,000.00	48,000,000.00	100.00%		
	Raperda dan Raperwal	8 Raperda/Raperwal	9 Raperda/Raperwal	112,5%		
Survey Kepuasan Masyarakat kota Cilegon		91,500,000.00	86,850,000.00	94.92%		
	Tersusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Kompetisi Pelayanan Publik		192,500,000.00	128,800,000.00	66.91%		
	Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Tersusunnya Dokumen Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Penyediaan Produk Ketatalaksanaan		207,550,000.00	179,171,500.00	86.33%		
	Tersusunnya Dokumen Peta Bisnis Proses	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Tersusunnya Dokumen Monev Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Tersusunnya Dokumen SOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Optimalisasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		208,500,000.00	176,430,000.00	84.62%	Proses pendampingan atau konsultasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan pandemic covid 19, sehingga serapan honor narasumber tidak diserap	Proses konsultasi dan pendampingan dilakukan secara daring, dan pihak KemenPAN RB telah melakukan sosialisasi secara massif melalui akun media sosial. Disamping itu juga Pokja SAKIP melaksanakan hal serupa untuk konsultasi dari perangkat daerah

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Tersedianya dokumen budaya kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
	Telaksananya diseminasi Budaya Kerja	0	0	0	Sudah dihapus, pertemuan terkait diseminasi budaya kerja tidak dapat dilaksanakan sehubungan pandemic covid, sehingga output dialihkan kepada penyusunan roadmap RB	Diseminasi dilaksanakan melalui alat peraga (banner) yang sudah dibuat dan didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah
	Tersedianya Video Promosi Budaya Kerja	0	0	0	Sudah dihapus, pembiayaan output dialihkan kepada penyusunan roadmap RB dan dialihkan untuk kebijakan refocusing.	Video budaya kerja, tetap diproduksi oleh Pokja Kreatif Tim RB Kota Cilegon secara swadaya. Output dapat dilihat pada kanal youtube ARB
	Penetapan Roadmap RB 2020-2024	1 Perwal	1 Perwal	100%	Tambahan Output seiring diterbitkannya Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020	Belanja Diseminasi dan video dialihkan untuk proses penyusunan Roadmap RB Kota Cilegon 2020-2021 yang telah ditetapkan melalui Perwal 52 Tahun 2020
Pelaksanaan Survey Kapasitas Organisasi		50,790,000.00	34,310,000.00	67.55%	Sehubungan dengan Pandemi Covid 19, Proses survey secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan, sehingga belanja ceta kuesioner tidak diserap	Untuk tetap menghasilkan output karena dibutuhkan dalam penghitungan indicator program, maka proses survey dilakukan secara daring dengan google form. Adapun proses sosialisasi dilakukan secara terbatas terhadap PIC Program, dan juga dibuatkan video panduan untuk pengisian kuesioner.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Dalam hal ini dari target 200 responden, jangkauannya menjadi 975 responden karena dilaksanakan secara daring
	Telaksananya kegiatan Survey Kapasitas Organisasi	37 OPD	37 OPD	100%		
	Jumlah Responden SKO	200 Responden	975 Responden	488%		
Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Kota Tahun N		130,000,000.00	101,680,000.00	78.22%	Proses pendampingan atau konsultasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan pandemic covid 19, sehingga serapan honor narasumber tidak diserap	Proses konsultasi dan pendampingan dilakukan secara daring, dan pihak KemenPAN RB telah melakukan sosialisasi secara massif melalui akun media sosial. Disamping itu juga Pokja SAKIP melaksanakan hal serupa untuk konsultasi dari perangkat daerah
	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%		
	Terlaksananya Desk Lakip	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00%		

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah diselenggarakan dalam rangka Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1,142.660.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 965.561.500,00 atau capaian 84.50%. Indikator capaian kinerja program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah adalah :

1. Nilai mutu pelayanan kepuasan masyarakat tingkat kota dengan target 75,00%, terealisasi 79,7% dengan capaian kinerjanya 106,23%
2. Proporsi SKPD yang memiliki SOP (Standard Operating Procedure) yang komprehensif dengan target 60,00% terealisasi 67,57% dengan capaian kinerjanya 96,52%
3. Nilai integritas organisasi dengan target 4,00% terealisasi 3,13% dengan capaian kinerjanya 78,25%

4. Presentase ketersediaan pengisian jabatan terhadap syarat dan kompetensi jabatan dengan target 3,50% terealisasi 3,14% dengan capaian kinerjanya 89,7%
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan target 70 (BB) terealisasi 64,93 (B) dengan capaian kinerjanya 92,75%
6. Nilai evaluasi reformasi birokrasi dengan target 60 (B) terealisasi 72,68 (BB) dengan capaian kinerjanya 121,13%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

3. Adanya edaran KemenPAN RB terkait percepatan penyusunan peta jabatan dan penilaian system merit, sehingga terjadinya penjadwalan pelaksanaan penyusunan SKJ pada TW. 4 dan penyusunan Evjab pada Tw 3.
4. Adanya pandemi Covid 19 dan kebijakan refocusing sehingga kegiatan mengalami perubahan output

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 3.1.4.1c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental						
Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan		2,096,454,068.00	975,873,100.00	46.55%	Ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena: 1. Adanya recofusing dari covid 19 maka ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga di lakukan penggeseran anggaran.	1. Koordinasi Terhadap Pimpinan dalam hal Ini Walikota dan Wakil walikota Cilegon. 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait dengan kegiatan masing-masing. 3. Dianggarkan kembali pada tahun 2021.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					2. Dampak Dari Covid 19 yang berpanjangan dan bahkan kota Cilegon beberapa kali mengalami Zona Merah ini mengakibatkan kegiatan seperti PHBI dan Istigosah, Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan SDM, Survey, Verifikasi dan Monitoring Bantuan Hibah Sosial Keagamaan tidak dapat dilaksanakan 3. Dampak Covid 19 dan upaya efisiensi anggaran ini terjadi pada kegiatan Penyelenggaraan MTQ 4. Ada Beberapa Kegiatan yang kita geser / tidak dilakukan karena ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 1441 H / 2020 M dan kegiatan Pembinaan SDM Penerima Hibah	
	Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama	100.00%	100 %	100 %		
	Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan	100.00%	19 Lembaga dari 20 yang di usulkan untuk diberikan bantuan Hibah	97.30%	1. Terdapat Lembaga yang satu yayasan mengajukan 2 proposal sehingga yang di proses lebih hanya 1 proposal. 2. Terdapat kegiatan yang bertentangan dengan covid 19 sehingga tidak dilakukan penyerapan	1. Dilakukan koordinasi terhadap yayasan tersebut 2. di lakukan recopucing terhadap kegiatan yg bertentangan dengan covid 19. 3. Dilakukan koordinasi terhadap lembaga Baznas Kota Cilegon

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					3. Lembaga MUI kota Cilegon Tidak mengajukan pencairan yang ke 2	4. Dilakukan koordinasi dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon.
Pendukung Penyelenggaraan Ibadah Haji		986,100,000.00	0	0	Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 1441 H / 2020 M	1. Dilakukan Koordinasi terhadap Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon tentang pelaksanaan ibadah haji. 2. Dilakukannya rapat koordinasi terhadap seluruh KBIH, Kasie Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Cilegon.
	Jumlah Jamaah Haji yang Terasilitasi	940 Jamaah	0	0	Tidak ada jamaah Asal Kota Cilegon Yang di berangkatkan menunaikan Ibadah Haji TA 2020	3. Melakukan Sosialisasi Keputusan menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M 4. Dianggarkan kembali pada tahun 2021
Penyelenggaraan MTQ		1,078,729,068.00	561,457,000.00	52.05%	Sehubungan pelaksanaan MTQ Ditengah Wabah Pandemi covid 19 maka 1. Pelsanaan Kegiatan MTQk Kota Cilegon scara sederhana dan minimalis. Sehingga kegiatan banyak yang tidak dilaksanakan antar lain: a. Tidak ada Pawai taaruf b. Tidak ada Panggung Utama, Tidak ada Tenda, dan dekorasi Panggung c. Pembukaan & Penutupan dilaksanakan virtual sehingga berdampak tidak adanya snak pembukaan dan penutupan 2. Pelaksanaan MTQ TK Povinsi Banten Di laksanakan semula Di	1. Dilakukan Koordinasi terhadap LPTQ Provinsi, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov banten, LPTQ Kota Cilegon. 2. Sehubungan MTQ Tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan November 2020 maka MTQ Provinsi dan MTQ Kota Cilegon harus dilaksanakan sebelum bulan November walau di tengah wabah covid 19 dan dilakukan dengan sangat sederhana.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Kota Tangerang Selatan Dipindah Ke Kawasan Masjid Raya Al Bantany Kota Serang dan dilakuan secara sederhana dan minimalis, dan ada beberapa kegiatan yang tidak biasa dilaksanakan antara lain: - Tidak ada Pawai taaruf - Jumlah Kafilah (Pembina dan Official) di kurangi. 3. Pelaksanaan kegiatan MTQ Nasional di Kota Padang dilaksanakan dengan model minimalis namun Anggaran tidak dilakukan penyerapan karena Pelaksanaan Peninjauan Kegiatan tersebut berasal dari dana Hibah LPTQ	
	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan MTQ	3 Event	3 Event	100 %		
Kegiatan PHBI dan Istighosah		310,052,000.00	24,170,000.00	7.80 %	Kegiatan PHBI dan Istighosah ini dilakukan dengan sangat sederhana antara lain: - Kegiatan Nujulul Qur'an - Kegiatan Idul adha - Kegiatan Istighosah dalam Rangka hari Jadi Kota Cilegon di Masjid Nurul Iman Pemkot Cilegon Sementara Kegiatan PHBI dan Istighosah yang tidak dapat dilaksanakan antara lain: - Isro Mi'raj - Idul Fitri - Halal Bi halal - Tahun Baru Islam 1 Muharram - Maulid Nabi Muhammad SAW	Dilakukan Koordinasi dan mohon arahan bapak Walikota Cilegon tentang pelaksanaan PHBI dan Istighosah Dianggarkan kembali pada tahun 2021

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					6. Istighosah dalam rangka HUT RI 75 7. Hari Santri Nasional Sementara kegiatan- kegiatan tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 di kota Cilegon Berdasarkan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020 Prihal Penundaan Kegiatan TA 2020 Terkait Pandemi Covid 19 kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang untuk tidak dilaksanakan	
	Jumlah Acara Peringatan Hari- hari Besar Islam dan Istighosah	9 Acara	3 Acara	33.3 %	Berdasarkan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020 Prihal Penundaan Kegiatan TA 2020 Terkait Pandemi Covid 19	Dianggarkan kembali pada tahun 2021
Pembinaan Keagamaan dan SDM		467,233,000.00	194,299,300.00	41.59%	Kegiatan Pembinaan dan SDM ini meliputi kegiatan pengajian rutin terhadap 2 lembaga yaitu : 1. Pengajian Ulama Umaro 2. Pengajian Majelis ta'lim Dari dua Lembaga tersebut dianggarkan -Pengajian Ulama Umaro sebanyak 6 Kali selama satu tahun - Pengajian Majelis Ta'lim dianggarkan sebanyak 12 Kali dalam 1 tahun yang baru dilaksanakan 2 kali	1. Dilakukannya Koordinasi kepada lembaga MUI Kota Cilegon, Majelis Taklim Kota Cilegon terkait tidak dilaksanakan kegiatan oleh karena Covid 19. Anggaran yang ada di lakukan pergeseran dan Dilakukannya penganggaran ulang di tahun 2021

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Dari kegiatan- kegiatan tersebut Pengajian Ulama dan Umaro baru dilaksanakan sebanyak 2 kali sementara pengajian Majelis ta'lim juga baru dilaksanakan 2 kali Sementara kegiatan- kegiatan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena pada bulan Maret terjadi menularnya wabah covid 19 di kota Cilegon Berdasarkan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020 Prihal Penundaan Kegiatan TA 2020 Terkait Pandemi Covid 19 kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang untuk tidak dilaksanakan	
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Keagamaan	2 Lembaga Agama	2 Lembaga Agama	100 %		
Sosialisasi Hibah Online Lembaga Keagamaan		79,000,000.00	75,390,000.00	95.43%		
	Tersosialisasinya E - Hibah Online Lembaga Keagamaan terhadap lembaga Keagamaan	300 Orang	300 Orang	100 %		
Peningkatan Lembaga Keagamaan dan SDM		101,440,000.00	94,041,800.00	92.71%		
	Tersusunnya Juklak Pembinaan Manajemen Masjid	1 Dokumen	0	0	Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan Lembaga Keagamaan dan SDM ini yaitu Pembinaan Guru RA Kota Cilegon sebanyak 2 kali kegiatan Sementara kegiatan yang lain belum dapat dilaksanakan oleh karena dampak dari adanya covid	1. Di lakukan koordinasi kepada lembaga keagamaan seperti Kepala kantor Kementerian Agama, DMI Kota Cilegon, dan lembaga masjid yang lain.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					19 di kota cilegon ini didasarkan kepada Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/957/BPKAD/2020 Prihal Penundaan Kegiatan TA 2020 Terkait Pandemi Covid 19 kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang untuk tidak dilaksanakan Dilakukan Pergeseran anggaran ke bagian Umum Setda Kota Cilegon	
	Jumlah Peserta Pembinaan DKM	75 Orang	0	0	Anggaran karena tidak dapat dilaksanakan akibat / Dampak Covid 19	Anggaran yang ada di lakukan pergeseran dan Dilakukannya penganggaran ulang di tahun 2021
Survey, Verifikasi dan Monitoring Bantuan Hibah Sosial Keagamaan		60,000,000.00	26,515,000.00	44.19%	Target kinerja terlaksana lebih dari 100 % namun realisasi anggaran hanya 44.19 % di karenakan 1. Kegiatan Survey dan verifikasi ini di berikan waktu hanya 10 hari kerja dari tanggal 21 April s/d 05 Mei 2020 sehingga dengan waktu yang sangat sedikit tidak dapat menyerap anggaran walaupun target kinerja terlampaui. Ini adalah penyerapan Makan dan Minum di lapangan 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini semula kita agendakan di bulan oktober, November tahun 2020 namun sampai dengan bulan November bantuan yang diberikan hanya 5 lembaga, untuk yang lain BPKAD memproses pemberian Hibah	1. Pelaksanaan Survey dan Monitoring kita lakukan seluruh yang mengajukan bantuan hibah adri target semula sebanyak 30 lembaga sementyara yang tersurvey sebanyak 38 Lembaga ini artinya sebanyak 123 %. 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dari target 20 Lembaga penerima Bantuan untuk keseluruhan kita lakukan monitoring dan Evaluasi.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					pada saat bulan Desember akhir, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat kita lakukan Yang tidak bias di lakukan proses kinerja keuangan ini antara lain Belanja makan dan Minum Karena proses pencairannya akhir Desember 2020	
	Tersurveynya pengajuan proposal	30 Lembaga	37 Lembaga	123 %	Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di hususkan yang berhubungan dengan penangan Covid 19 sesuai dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/113/BPKAD/2020	1. Dilakukannya survey terhadap 37 Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal untuk bantuan hibah TA 2021. 2. Seluruh Pengajuan Proposal bantuan Hibah dari lembaga keagamaan dilakukan Survey
	Termonitoringnya penerima hibah	20 Lembaga	20 Lembaga	100 %	Kegiatan Pembinaan SDM Penerima Hibah ini di maksudkan untuk dapat terbinanya penerima hibah dan pembuatan laporan bantuan hibah 1. Pencairan Hibah yang tidak kunjung di cairkan oleh BPKAD Kota Cilegon maka sampai saat perubahan anggaran baru 5 Lembaga yg dapat diproses. 2. Penggunaan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di hususkan yang berhubungan dengan penangan Covid 19 sesuai dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/113/BPKAD/2020 Dalam rangka efektifitas kegiatan maka kegiatan Pembinaan	1. Dilakukan Monitoring Bantaun Hibah TA 2020 yang telah melakukan pencairan terhadap 20 Lembaga. 2. Pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring terhadap Lembaga Penerima hibah Di lakukan Bintek pembuatan laporan Penggunaan Dana Hibah
Pembinaan SDM Penerima Hibah		35,000,000.00	0	0	Dan Bantuan Sosial di hususkan yang berhubungan dengan penangan Covid 19 sesuai dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/113/BPKAD/2020 Dalam rangka efektifitas kegiatan maka kegiatan Pembinaan	Di lakukan Bintek pembuatan laporan Penggunaan Dana Hibah langsung ke lokasi Penerima Hibah pada saat kegiatan Monitoring Bantuan Hibah lembaga Keagamaan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					penerima hibah di usulkan untuk di tiadakan	
	Terbinanya sistem kelengkapan administrasi dan pembuatan pelaporan hibah lembaga keagamaan	60 Orang	0	0	Penggunaan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di hususkan yang berhubungan dengan penanganan Covid 19 sesuai dengan Surat Edaran Walikota Cilegon Nomor 900/113/BPKAD/2020	Di lakukan BinteK pembuatan laporan Penggunaan Dana Hibah langsung ke lokasi Penerima Hibah pada saat kegiatan Monitoring Bantuan Hibah lembaga Keagamaan.

Program peningkatan kualitas mental dan pengamalan nilai-nilai keagamaan diselenggarakan dalam rangka Peningkatan fungsi koordinasi sectoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistic, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental dengan anggaran sebesar Rp. 2.096.454.068,00 terealisasi sebesar Rp. 975.873.100,00 atau capaian 46.55%. Indikator capaian kinerja program peningkatan kualitas mental dan pengamalan nilai-nilai keagamaan adalah:

1. Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat beragama dengan target 100,00%, terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%
2. Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan bansos bidang keagamaan dengan target 100,00% terealisasi 19 lembaga dari 20 yang diusulkan untuk diberikan bantuan hibah

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Adanya pandemic covid-19 sehingga terjadinya refocusing anggaran dan berakibat kepada kegiatan yang mengalami pergeseran
2. Dampak dari covid-19 yang berkepanjangan dan bahkan Kota Cilegon beberapa kali mengalami zona merah, ini mengakibatkan kegiatan-kegiatan seperti PHBI dan Istighosah, kegiatan pembinaan keagamaan dan SDM, survey, verifikasi dan monitoring bantuan hibah social keagamaan tidak dapat dilaksanakan
3. Dampak covid-19 dan upaya efisiensi anggaran ini terjadi pada kegiatan penyelenggaraan MTQ
4. Ada beberapa kegiatan yang kita geser/tidak dilakukan karena ada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan pemberangkatan jema'ah haji Tahun 1441 H/2020 M dan kegiatan pembinaan SDM penerima hibah.

4. Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Tabel 3.1.4.1d Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Perekonomian dan Pembangunan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD)					Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massadiinstruksikan untuk dikurangi.	Kegiatan koordinasi, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan sesuai dengan proses yang berlaku dengan mengurangi jumlah peserta rapat, mengurangi jumlah hari atau waktu yang telah direncanakan.
Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		537,662,000.00	301,841,000.00	56.14%	- Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massadiinstruksikan untuk dikurangi. - Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada berkurangnya pelaksanaan evaluasi terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 Kota Cilegon	Kegiatan koordinasi, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tetap dilaksanakan sesuai dengan proses yang berlaku dengan mengurangi jumlah peserta rapat, mengurangi jumlah hari atau waktu yang telah direncanakan.
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan	100.00%	100.00 %	100.00 %		
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan	100.00%	90.00 %	90.00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdag	100.00%	54.54 %	54.54 %	Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massa diinstruksikan untuk dikurangi.	Kegiatan tatap muka tetap berjalan akan tetapi jumlah peserta rapat dibatasi dan jumlah hari /waktu dikurangi
Fasilitasi, koordinasi/konsultasi, monitoring dan evaluasi kinerja urusan koperasi UKM, INDAG dan pertanian		65,235,000.00	50,480,000.00	77.38%	Karena adanya pandemic Covid-19, sehingga perlu menerapkan Prokes pada setiap Kegiatan	Mengurangi jumlah peserta rapat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Koperasi UKM, Indag dan Pertanian	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00 %		
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Urusan Koperasi UKM, Indag dan Pertanian	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00 %		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Urusan Koperasi UKM, Indag dan Pertanian	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00 %		
Fasilitasi, koordinasi/konsultasi, monitoring dan evaluasi kinerja urusan PM, PTSP, Perhubungan, BUMD, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		272,427,000.00	137,077,000.00	50.32%	Adanya pandemi Covid-19, pada saat pelaksanaan kegiatan moderator dari biro perekonomian tidak bisa hadir, pelaksanaan rapat dikurangi jumlah hari dan pesertanya	Peserta rapat dikurangi, untuk honor moderator tidak diserap dan biaya akomodasi tidak diserap seluruhnya
	Tersedianya rancangan peraturan di bidang perhubungan dan BUMD	0.00 Dokumen	0.	0	Kegiatan ini ditiadakan mengingat di tahun 2020 kementrian dalam negeri tidak mengeluarkan produk hukum berkaitan dengan tata kelola BUMD	
	Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi antara bagian perekonomian dan pembangunan dengan mitra OPD dan BUMD	0.00 Dokumen	0	0	Kegiatan ini ditiadakan karena adanya pandemi Covid -19	
	Terlaksananya pemantauan dalam rangka mengamati dan mengetahui perkembangan, kemajuan permasalahan serta	4.00 Laporan	3.00 Laporan	75.00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	upaya pencegahan pelaksanaan program atau kegiatan pada OPD dan BUMD					
	Terlaksananya Rapat koordinasi / Rakoor BUMD Milik Pemerintah Kota Cilegon	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00 %		
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang BUMD	0.00 Laporan	0	0	Kegiatan ini ditiadakan mengingat di tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri tidak mengeluarkan produk hukum berkaitan dengan tata kelola BUMD	
	Terlaksananya Pembinaan Terhadap BUMD dan Mitra Kerja Perangkat Daerah	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
	Tersedianya Rancangan Produk Hukum Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan NSPK dibidang PMPTSP, Perhubungan, BUMD dan Nakertrans	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
	Terlaksananya Koordinasi di Bidang PMPTSP, Perhubungan, BUMD dan Nakertrans	40.00 Kegiatan	20.00 Kegiatan	50.00 %	Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massa diinstruksikan untuk dikurangi.	Mengurangi jumlah peserta rapat
Satgas Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 Kota Cilegon		200,000,000.00	114,284,000.00	57.14%	Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada berkurangnya pelaksanaan evaluasi terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 Kota Cilegon	Melaksanakan kegiatan sesuai evaluasi terhadap OPD dengan OPD yang melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Dampak COVID-19 Kota Cilegon dengan batas waktu yang ada.
Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan		61,970,000.00	53,810,000.00	86.83%		
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian,	90.00%	100.00 %	111,11 %	Karena target kinerja pada TA. 2020 semuanya terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini berdampak pada pencapaian kinerja yang	Kedepan akan merencanakan dan menetapkan target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permuk				melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra OPD.	
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permuki	90.00%	100.00 %	111,11 %	Karena target kinerja pada TA. 2020 semuanya terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini berdampak pada pencapaian kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra OPD.	Kedepan akan merencanakan dan menetapkan target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan per	90.00%	100.00 %	111,11 %	Karena target kinerja pada TA. 2020 semuanya terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga hal ini berdampak pada pencapaian kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam Renstra OPD.	Kedepan akan merencanakan dan menetapkan target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Fasilitasi, koordinasi/konsultasi, monitoring dan evaluasi kinerja urusan PUPTR, Perkim dan LH		61,970,000.00	53,810,000.00	86.83%		
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan PUTR, Perkim dan LH	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100 %		
	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Urusan PUTR, Perkim dan LH	24.00 Kegiatan	24 Kegiatan	100 %		
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Urusan PUTR, Perkim dan LH	12.00 Kegiatan	12 Kegiatan	100 %		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Kegiatan Prioritas Daerah dibawah Lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan	0.00 Kegiatan	0	0	Kegiatan ini dirasionalisasikan pada APBD-P 2020, hal ini disebabkan karena kegiatan ini akan melibatkan banyak peserta yang tidak diperkenankan sesuai dengan Perwal Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	Kedepan perencanaan kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.

Bagian Perekonomian dan Pembangunan memiliki Program peningkatan perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Program peningkatan infrastruktur dan kewilayan. Kedua program tersebut diselenggarakan dalam rangka Peningkatan fungsi koordinasi sectoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, industry, perdagangan, perhubungan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan anggaran Program peningkatan perekonomian dan sumber daya alam sebesar Rp. 537.662.000,00 terealisasi sebesar Rp. 301.841.000,00 atau capaian 56,14% dan anggaran Program peningkatan infrastruktur dan kewilayahan sebesar Rp. 61.970.000,00 terealisasi sebesar Rp. 53.810.000,00 atau capaian 86,83%. Indikator capaian kinerja program peningkatan perekonomian dan sumber daya alam adalah :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan dengan target 100,00%, terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan dengan target 100,00% terealisasi 90,00% dengan capaian kinerjanya 90,00%
3. Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan dengan target 100,00% terealisasi 54,54% dengan capaian kinerjanya 54,54%

Sedangkan indicator capaian kinerja program peningkatan infrastruktur dan kewilayah adalah :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukaan dengan target 90,00% terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 111,11%
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukaan dengan target 90,00% terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 111,11%
3. Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukaan dengan target 90,00% terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 111,11%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Wabah Covid-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massal di instruksikan untuk dikurangi
2. Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga berdampak pada berkurangnya pelaksanaan evaluasi terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 Kota Cilegon.

5. Bagian Sosial Kemasyarakatan

Tabel 3.1.4.1e Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Sosial Kemasyarakatan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah					Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massa diinstruksikan untuk dikurangi.	Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan dengan membatasi peserta sesuai dengan protocol kesehatan, mengganti koordinasi secara tatap muka dengan virtual meeting, melakukan koordinasi dengan media komunikasi yang ada (email, sosial media, dan telephon).
Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat		512,626,455.00	295,898,000.00	57.72%	Wabah COVID-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka, sehingga kegiatan yang melibatkan massa diinstruksikan untuk dikurangi.	Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan dengan membatasi peserta sesuai dengan protocol kesehatan, mengganti koordinasi secara tatap muka dengan virtual meeting, melakukan koordinasi dengan media komunikasi yang ada (email, sosial media, dan telephon).
	Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan	70.00%	80.55%	115.08%	Pada tahun anggaran 2020 koordinasi dengan SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan sudah berjalan dengan baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga hal ini menunjang efektifitas kegiatan fasilitasi.	
	Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan	90.00%	90.00%	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan					
	Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan	90.00%	90.00%	100,00%		
Koordinasi/Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo		145,000,000.00	78,865,000.00	54.39%	Pelaksanaan kegiatan terkendala oleh pandemi COVID-19 diharuskan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, sehingga kegiatan (rapat koordinasi) yang melibatkan massa tidak dapat dilenggarakan sehingga hal ini berpengaruh dalam penyerapan anggaran (target keuangan).	kegiatan Koordinasi/Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta dan memperhatikan protocol kesehatan.
	Jumlah laporan hasil koordinasi urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	3 Laporan	3 Laporan	100,00%		
	Tersusunnya produk kebijakan urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	Tidak adanya usulan penerbitan produk hukum / produk kebijakan urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo.	Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang membidangi urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo.
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi urusan Sosial, Dukcapil dan Kominfo	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Koordinasi/Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB		147,000,000.00	95,500,000.00	64.97%	Pelaksanaan kegiatan terkendala oleh pandemi COVID-19 diharuskan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, sehingga kegiatan yang melibatkan massa tidak dapat dilenggarakan sehingga hal ini berpengaruh dalam penyerapan anggaran (target keuangan).	Kegiatan Koordinasi/Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta dan memperhatikan protocol kesehatan.
	Jumlah laporan koordinasi urusan kesehatan, RSUD dan DP3AKB	3.00 Laporan	3.00 Laporan	100,00%		
	Tersusunnya produk kebijakan urusan Kesehatan, RSUD dan DP3AKB	3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	100,00%		
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi urusan Kesehatan, RSUD, dan DP3AKB	4.00 Laporan	4.00 Laporan	100,00%		
Koordinasi/Konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pemuda dan Olahraga		220,626,455.00	121,533,000.00	55.09%	Adanya pembatasan kegiatan yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi capaian anggaran yang tidak dapat direalisasikan secara maksimal	tetap melaksanakan Koordinasi/konsultasi, Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi urusan pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip daerah, Pemuda dan Olah raga dengan melaksanakan protokol kesehatan
	Jumlah laporan hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Daerah, Pemuda dan Olah Raga					
	Tersusunnya produk kebijakan urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pemuda dan Olah Raga	4.00 Dokumen	3 Dokumen	75.00%		
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi urusan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pemuda dan Olah Raga	4.00 Dokumen	4 Laporan	100%		

Bagian Sosial Kemasyarakatan memiliki Program peningkatan social dan kesejahteraan rakyat diselenggarakan dalam rangka Peningkatan fungsi koordinasi sectoral di bidang social, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 512.626.455,00 terealisasi sebesar Rp. 295.898.000,00 atau capaian 57,72%. Indikator capaian kinerja program peningkatan social dan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD lingkup bidang social, pemberdayaan masyarakat, Kesehatan, Pendidikan, budaya, pariwisata, arsip dan daerah dengan target 70,00%, terealisasi 80,55% dengan capaian kinerjanya 115,08%
2. Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD lingkup bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan dengan target 90,00% terealisasi 90,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%
3. Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah koordinasi bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan dengan target 90,00% terealisasi 90,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Sosial Kemasyarakatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan Pandemi covid-19 diharuskan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa, sehingga kegiatan (rapat koordinasi) yang melibatkan massa tidak dapat diselenggarakan sehingga hal ini berpengaruh dalam penyerapan anggaran.

6. Bagian Program dan Keuangan

Tabel 3.1.4.1f Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Program dan Keuangan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah						
Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		258,915,000.00	250,868,500.00	96.89%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85.00%	100%	118%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	85.00%	100%	118%		
Penatausahaan Keuangan SKPD		123,200,000.00	123,120,000.00	99.94%		
	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Setda Kota Cilegon	800 Dokumen	800 Dokumen	100%		
Penyusunan Laporan Kinerja		14,725,000.00	14,716,000.00	99.94%		
	Terlaksananya Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
Penyusunan Laporan Keuangan		32,275,000.00	29,742,000.00	92.15%		
	Terlaksananya Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Semester	16 Dokumen	16 Dokumen	100%		
Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda		29,240,000.00	27,536,000.00	94.17%		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Visualisasi Capaian Realisasi Kinerja Keuangan Setda Kota Cilegon	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		
Peningkatan Pengelola Administrasi Keuangan di Lingkungan Setda		6,660,000.00	5,958,000.00	89.46%		
	Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Pengelola Administrasi Keuangan Kota Cilegon	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
Kompilasi RKA dan DPA Setda		13,485,000.00	13,407,000.00	99.42%		
	Jumlah Dokumen RKAP 2020, DPPA 2020 dan RKA 2021, DPA 2021 Setda Kota Cilegon	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	Dokumen DPA 2021 sampai dengan akhir Desember 2020 belum selesai. Hal ini	Peningkatan koordinasi lintas OPD

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dikarenakan dengan masih penyempurnaan penggunaan SIPD	
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD		21,925,000.00	19,706,000.00	89.88%		
	Jumlah Buku Rencana Kerja Setda Kota Cilegon	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
Pengendalian dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah		17,405,000.00	16,683,500.00	95.85%		
	Jumlah Rapat Koordinasi yang Terselenggara	3 Dokumen	4 Dokumen	133%		

Bagian Program dan Keuangan memiliki Program perencanaan dan pengelolaan keuangan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan asset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah dan anggarannya sebesar Rp. 258.915.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.868.500,00 atau capaian 96,89%. Indikator capaian kinerja program perencanaan dan pengelolaan keuangan adalah :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral dengan target 85,00%, terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 118,00%
2. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) dengan target 85,00% terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 118,00%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Program dan Keuangan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Wabah Covid-19 memberikan dampak pada pembatasan penyelenggaraan kegiatan secara tatap muka
2. Dokumen DPA 2021 sampai dengan akhir Desember 2020 belum selesai, hal ini dikarenakan dengan masih penyempurnaan penggunaan SIPD
3. Adanya kegiatan yang dialihkan karena bagian progam dan keuangan tidak mempunyai fungsi lintas koordinasi teknis OPD

7. Bagian Hukum dan HAM

Tabel 3.1.4.1g Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Hukum dan HAM)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum						
Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah		611,155,000.00	597,911,081.00	97.83%		
	Proporsi jumlah Raperda yang disahkan menjadi perda	70.00%	36%	70,00 %	Belum tercapainya target penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah disebabkan adanya Perubahan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat dan adanya Rancangan Peraturan Daerah yang membutuhkan waktu pembahasan yang lebih lama	Mengoptimalkan proses perencanaan penyusunan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah dengan dibuatnya Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2020, upaya ini diharapkan akan mewujudkan tersedianya instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis serta menjamin kualitas substansi Peraturan Daerah
	Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal)	100.00%	96,00%	96,00 %	Belum optimalnya proses perencanaan pembentukan Peraturan Wali Kota pada Perangkat Daerah, yaitu belum optimalnya proses analisis kebutuhan Peraturan Wali Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan Rencana Pembangunan Daerah	Melibatkan peran tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dalam Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum		276,090,000.00	268,545,000.00	97.27%		
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan penyuluhan hukum	160 Orang	0 Orang	0%	Sosialisasi Penyuluhan Hukum tidak bisa dilaksanakan karena Covid 19	Menganggarkan kembali Sosialisasi Penyuluhan Hukum pada TA.2021
Pemberian Bantuan Hukum		20,100,000.00	20,100,000.00	100.00%		
	Jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada aparat	1 Perkara	1 Perkara	100.00%		
Pembinaan dan Penyuluhan Rencana Aksi HAM		34,500,000.00	0	0 %	Sehubungan dengan adanya wabah Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan banyak orang dan bertatap muka langsung. Sehingga anggaran dilakukan refocusing dan realokasi untuk anggaran penanganan Covid-19.	Kegiatan dimaksimalkan dengan melakukan komunikasi melalui surat menyurat.
	Jumlah orang yang memperoleh pembinaan dan penyuluhan Rencana Aksi HAM dan Kota Peduli HAM	50 Orang	0	0 %		
Dokumentasi Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah		76,950,000.00	74,073,081.00	96.26%		
	Jumlah Produk Hukum yang disebarluaskan	100 Dokumen	100 Dokumen	100.00%		
Penataan Administrasi Produk Hukum		238,015,000.00	235,193,000.00	98.81%	Adanya Perubahan rencana Prolegda tahun 2020, sehingga Naskah Akademis yang diperlukan masuk Raperda juga di kurangi	Menganggarkan kembali penyusunan naskah Akademik pada TA.2021
	Jumlah dokumen Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%		
	Jumlah Raperda/Raperwal yang disosialisasikan	6 Tayang	6 Tayang	100.00%		

Bagian Hukum dan HAM memiliki Program penataan dan pengembangan produk hukum daerah diselenggarakan dalam rangka Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi dan penyuluhan hukum dan anggarannya sebesar Rp. 611.155.000,00 terealisasi sebesar Rp. 597.911.081,00 atau capaian 97,83%. Indikator capaian kinerja program penataan dan pengembangan produk hukum daerah adalah :

1. Proporsi jumlah raperda yang disahkan menjadi Perda dengan target 70,00%, terealisasi 36,00% dengan capaian kinerjanya 70,00%.
Indikator ini belum tercapai karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan adanya rancangan peraturan daerah yang membutuhkan waktu pembahasan yang lebih lama
2. Proporsi jumlah perwal yang ditetapkan terhadap raperwal (usulan perwal) dengan target 100,00% terealisasi 96,00% dengan capaian kinerjanya 90,00%.
Indikator ini belum tercapai dikarenakan belum optimalnya proses analisis kebutuhan peraturan walikota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Adanya pandemic Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan banyak orang dan bertatap muka langsung, sehingga anggaran dilakukan refocusing dan realokasi untuk anggaran penanganan covid-19
2. Adanya perubahan rencana prolegda tahun 2020, sehingga naskah akademis yang diperlukan masuk Raperda juga dikurangi.

8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 3.1.4.1h Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		1,172,994,870.00	924,119,152.00	78.78%		
	Tingkat Pelaksanaan Operasional LPSE dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100.00%	100.00%	100.00%		
	Tingkat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	4.71%	4.71%	100%		
Sosialisasi pengadaan barang dan jasa		69,350,000.00	21,265,850.00	30.66%	Anggaran yang sudah diserap merupakan anggaran untuk persiapan acara kegiatan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa yang di rencanakan pada tanggal 17 Maret 2020 sesuai dengan Surat Undangan Nomor 027/777/Barjas Tanggal 11 Maret 2020, sebelum adanya Instruksi Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tanggal 16 Maret 2020.	
	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%		
Pengembangan e-katalog lokal		2,400,000.00	1,500,000.00	62.50%	Karena sulitnya koordinasi secara langsung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, maka anggaran ini di refofusing untuk penanganan Covid-19. Penyerapan anggaran yang dilakukan untuk belanja Alat Tulis Kantor.	
	Terselenggaranya Kontrak Payung Pengadaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Bimbingan teknis /workshop sistem pengadaan secara elektronik		107,565,000.00	56,998,260.00	52.99%	Karena adanya efisiensi belanja jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/p	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Bimbingan Teknis/workshop sistem Pengadaan sera elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	embicara khusus dan pendukungnya yang semula Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Jakarta, menjadi tim internal dari Bagian Pegadaan Barang dan Jasa	
Penyusunan Sistem Mutu Manajemen ISO		77,565,000.00	72,941,500.00	94.04%		
	Tersedianya Sertifikat ISO	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%		
Optimalisasi Dukungan Pelayanan Barang dan Jasa		101,744,870.00	97,653,642.00	95.98%		
	Terselenggaranya Pengadaan ATK	100.00%	75.00%	75.00%		
	Terselenggaranya Pengadaan Cetak dan Penggandaan	100.00%	0%	0%	Anggaran belanja cetak dan penggandaan di recofusing untuk penanganan Covid 19	
	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	100.00%	0%	0%	Anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah di recofusing untuk penanganan Covid 19	
Optimalisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik		481,100,000.00	409,401,400.00	85.10%		
	Tersedianya Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan	100.00%		
Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa		318,270,000.00	249,752,500.00	78.47%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Ahli K3	16 Orang	16 Orang	100.00%		
	Tersedianya SOP UKPBJ	1 Dokumen SOP UKPBJ	1 Dokumen SOP UKPBJ	100.00%		
Operasional Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa		15,000,000.00	14,606,000.00	97.37%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Penilaian Jabatan Fungsional Pengadaan barang/jasa	17 Orang	17 Orang	100%		
Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa						
Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		384,305,000.00	272,051,500.00	70.79%	Ada beberapa kegiatan, seperti Penyusunan Laporan pelaksanaan e-procurement Kota Cilegon dan kegiatan Perumpunan Paket Pengadaan Untuk Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di recofusing untuk penanganan Covid 19 dan ada beberapa kegiatan yang Anggaran di rasionalisasi dampak Covid-19	
	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan barang dan jasa	100.00%	100.00%	100.00%		
Pendampingan penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa		190,275,000.00	177,912,500.00	93.50%		
	Terlaksananya Pendampingan pengadaan barang/jasa	8 laporan pendampingan	1 Laporan pendampingan	125.00%	Ada Penambahan Pendampingan di Anggaran Perubahan	
Penyusunan Laporan pelaksanaan e-procurement kota cilegon		152,655,000.00	94,139,000.00	61.67%	Tidak dilaksanakannya penyerapan anggaran makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan. Karena Anggaran di recofusing untuk penanganan Covid 19	
	Penyusunan Laporan Monitoring Pengadaan Barang/jasa (Progress OPD)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan e-Procurement	2 Semester	2 Semester	100.00%		
	Studi Komparasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Perumpunan Paket Pengadaan Untuk Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa		41,375,000.00	0	0	Berdasarkan Instruksi Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), sehingga kegiatan Perumpunan paket Pengadaan Untuk Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diagendakan bersama OPD ditiadakan	
	Terlaksananya Sosialisasi Perumpunan Paket Pengadaan untuk sosialisasi Pengadaan barang dan Jasa	1.00 Kegiatan	0	0		

Bagian Pengadaan barang dan jasa memiliki Program peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa diselenggarakan dalam rangka Optimalisasi dan peningkatan kualitas system layanan pengadaan barang dan jasa dan anggarannya sebesar Rp. 1.172.994.870,00 terealisasi sebesar Rp. 924.119.152,00 atau capaian 78,78%. Dan Program layanan data dan informasi pengadaan barang dan jasa memiliki anggaran sebesar Rp. 384.305.000,0 terealisasi 272.051.500 atau capaian 70,79%. Indikator capaian kinerja program peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa adalah :

1. Tingkat pelaksanaan operasional LPSE dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dengan target 100,00%, terealisasi 100,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%
2. Tingkat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan target 4,71% terealisasi 4,71% dengan capaian kinerjanya 100,00%

Sedangkan program layanan data dan informasi pengadaan barang dan jasa adalah Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dengan target 100,00% terelaisai sebesar 100,00 atau 100,00%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan :

1. Adanya pandemic Covid-19, sehingga anggarannya diarahkan untuk pencegahan penyebaran covid-19
2. Sulitnya koordinasi secara langsung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta,

9. Bagian Umum

Tabel 3.1.4.1i Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Bagian Umum)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		31,184,561,167.00	26,256,158,636.00	84.20%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Bag. Umum)Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	85.00%	78%	91,76%		
	Tingkat disiplin aparatur (Bag. Umum)	95.00%	95.00%	100.00%		
Penyediaan jasa surat menyurat		15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%		
	Jumlah perangko dan materai yang tersedia	3,000.00 Lembar	3,000.00 Lembar	100.00%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		3,177,350,000.00	2,465,966,351.00	77.61%		
	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%		
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor		4,187,500,000.00	4,133,305,750.00	98.71%		
	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Kebersihan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Penyediaan Jasa Pegawai Keamanan Kantor	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
	Jumlah Penyediaan Jasa Pembantu Rumah Tangga	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Penyediaan alat tulis kantor		670,000,000.00	587,019,730.00	87.61%		
	Terlaksananya Jumlah Item alat tulis kantor yang tersedia	89.00 Item	89.00 Item	100.00%		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		565,000,000.00	490,569,200.00	86.83%		
	Terlaksananya Jumlah item cetakan yang tersedia	24.00 Item	24.00 Item	100.00%		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		197.325.000,00	186.41.310,00	94,48%		
	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	34.00 Item	34.00 Item	100.00%		
Penyediaan peralatan rumah tangga		275,515,000.00	242,817,400.00	88.13%		
	Jumlah item peralatan rumah tangga yang tersedia	3.00 Item	3.00 Item	100.00%		
Penyediaan makanan dan minuman		3,338,828,253.00	3,148,320,180.00	94.29%		
	Jumlah Jenis makanan dan minuman yang tersedia	3.00 Item	3.00 Item	100.00%		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		2,407,201,999.00	2,058,452,606.00	85.51%		
	Jumlah jenis rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah yang terlayani	2.00 Jenis	2.00 Jenis	100.00%		
Pengadaan komputer		1,084,560,000.00	453,362,000.00	41.80%		
	Jumlah Komputer yang tersedia	15.00 Unit	5.00 Unit	33,3%	Adanya alih tugas dari pejabat barjas sehingga batal lelang	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		602,800,000.00	247,202,000.00	41.01%		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	42.00 Unit	25.00 Unit	59,52%	Terdapat perubahan penataan kawasan perkantoran yang menyebabkan item pengadaan tidak	



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dapat terserap	
Pengadaan meubeleir		300,000,000.00	295,725,000.00	98.58%		
	Jumlah Meubeleir yang tersedia	39.00 Unit	39.00 Unit	100.00%		
Pengadaan alat-alat studio		399,085,843.00	381,375,000.00	95.56%		
	Jumlah alat-alat studia yang tersedia	3.00 Unit	3.00 Unit	100.00%		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		598,940,500.00	425,186,200.00	71.30%		
	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5,000.00 M ²	5,000.00 M ²	100.00%		
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		2,561,150,000.00	2,039,417,830.00	79.63%		
	Jumlah jenis kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	3.00 Jenis	3.00 Jenis	100.00%		
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir		20,000,000.00	8,700,000.00	43.50%	Serapan anggaran disesuaikan dengan kondisi barang yang rusak atau perlu perbaikan	
	Jumlah jenis meubeleir yang terpelihara	3.00 Item	3.00 Item	100.00%		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		352,985,000.00	285,299,400.00	80.82%		
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	7.00 Jenis	7.00 Jenis	100.00%		
Pemeliharaan rutin/berkala komputer		188,123,400.00	172,044,400.00	91.45%		
	Jumlah jenis komputer dan printer yang terpelihara	2.00 Jenis	2.00 Jenis	100.00%		
Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan		398,182,856.00	296,991,184.00	74.59%	Capaian di bawah 75% karena disesuaikan dengan tagihan BPJS yang ada	
	Jumlah pegawai Non PNS yang menjadi peserta BPJS	65.00 Orang	74.00 Orang	113.85%	Capaian diatas 100% karena adanya penambahan Peserta BPJS di ABT	
Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		543,592,500.00	424,386,800.00	78.07%		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	250.00 Stel	250.00 Stel	100.00%		
Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		250,000,000.00	197,926,000.00	79.17%		
	Jumlah pejabat dan Staf Subag Sarpras	35.00 Stel	35.00 Stel	100.00%		
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio		181,920,000.00	143,595,600.00	78.93%		
	Jumlah jenis alat-alat studio yang dipelihara	2.00 Jenis	2.00 Jenis	100.00%		
Penyediaan sewa gedung/rumah		460,000,000.00	157,655,408.00	34.27%	Penyerapan disesuaikan dengan permohonan yang diajukan dan disesuaikan dengan pemberlakuan instruksi wali kota terkait psbb pandemic covid 19	
	Terlaksananya Jumlah gedung/rumah yang disewa	2.00 Jenis	2.00 Jenis	100.00%		
Penyediaan sewa sarana mobilitas darat		18,000,000.00	0	0	Karena adanya pandemi covid-19 kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan anggarannya difocusing untuk kegiatan lainnya	
	Jumlah mobil/bus yang disewa	4.00 Unit	0	0		
Penyediaan sewa perlengkapan dan peralatan kantor		2,483,240,826.00	2,055,091,380.00	82.76%		
	Jumlah item perlengkapan dan peralatan kantor yang disewa	4.00 Item	4.00 Item	100.00%		
Pengadaan peralatan rumah tangga		437,500,000.00	313,700,020.00	71.70%	Ada item yg tidak diserap, karena ada biaya lainnya yg tidak dicover	
	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	44.00 Unit	42.00 Unit	85.71%		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		326,554,990.00	322,296,187.00	98.70%		
	Jumlah Rumah Jabatan Yang Terpelihara	11.00 Kegiatan	11.00 Kegiatan	100.00%		
Pembuatan naskah pidato/sambutan walikota		201,305,000.00	158,305,000.00	78.64%		
	Jumlah naskah pidato/sambutan walikota yang disusun	200.00 Naskah	100.00 Naskah	50.00%	Karena pandemi covid 19 dimana tidak boleh melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan masa sehingga jumlah pembuatan naskah disesuaikan dengan acara yang ada	
Dokumentasi kegiatan		25,750,000.00	22,338,000.00	86.75%		
	Jumlah dokumen kegiatan kepala daerah yang disusun	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	100.00%		
Pendampingan kegiatan kepala daerah dalam kota cilegon		121,305,000.00	68,430,000.00	56.41%		
	Jumlah kegiatan kepala daerah dalam daerah kota cilegon	240.00 Kegiatan	120.00 Kegiatan	50.00%	Karena pandemi covid 19 dan peberapan PSBB sehingga kegiatan keluar daerah atau diluar kantor (dalam daerah) dikurangi	Pertemuan pertemuan diadakan melalui video conference
Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon		216,185,000.00	149,557,500.00	69.18%	Anggaran yang tidak terserap adalah anggaran makan minum pelaksanaan kegiatan karena kegiatan tidak boleh mengundang orang banyak	
	Jumlah dokumen juklak PHBN dan Hari Jadi Kota Cilegon	9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	100.00%		
Penyediaan jasa pegawai non PNS		4,094,100,000.00	3,950,697,500.00	96.50%		
	Jumlah Penyediaan Jasa TTK	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
	Jumlah Penyediaan Jasa THL	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		150,000,000.00	148,873,700.00	99.25%		
	Jumlah jenis bacaan koran yang tersedia	15.00 Jenis	13.00 Jenis	86.67%		
Pameran Hari Jadi		10,460,000.00	10,460,000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah dokumen pelaksanaan pameran pembangunan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Pengadaan alat rapid temperatur screening system		230,000,000.00	199,650,000.00	86.80%		
	Jumlah alat pengecekan suhu	1 unit	1 unit	100 %		

Bagian Umum memiliki Program dukungan pelayanan pemerintahan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan tata Kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP) dan anggarannya sebesar Rp. 31.184.561.167,00 terealisasi sebesar Rp. 26.256.158.636,00 atau capaian 84,20%. Indikator capaian kinerja program dukungan pelayanan pemerintahan adalah :

1. Presentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (bag. Umum) proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan target 85,00%, terealisasi 78,00% dengan capaian kinerjanya 91,76%
2. Tingkat disiplin aparatur (bag. Umum) dengan target 95,00% terealisasi 95,00% dengan capaian kinerjanya 100,00%

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bagian Umum Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai dikarenakan adanya refocusing anggaran penanganan pandemic Covid-19 sebagaimana surah edaran Walikota Cilegon No. 900/957BPKAD/2020 tanggal 16 April 2020 perihal surat edaran penundaan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, sebagai tindak lanjut Permendagri No. 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Inmendagri No. 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah, serta memperhatikan peraturan pemerintah pengganti undang-undangan No. 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan peraturan presiden No. 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dan keputusan Bersama mendagri dan Menteri keuangan No. 119/2183/SJ No. 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI SETDA

Permasalahan pada secretariat daerah adalah :

1. Faktor personal, yakni memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan/diklat terkait tugas masing-masing bagian, sehingga memiliki komitmen yang tinggi dan dapat melaksanakan program/kegiatan dengan maksimal.
2. Faktor kepemimpinan, yakni arahan, motivasi dan bimbingan kepada pegawai dalam setiap kesempatan.
3. Faktor tim, yakni semua pegawai lingkup setda diwajibkan saling mendukung satu sama lain, sehingga tercipta koordinasi yang maksimal demi mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Faktor sistem, yakni pemberlakuan tata tertib sehingga tercipta kedisiplinan seluruh pegawai yang merupakan faktor pendukung capaian kinerja yang optimal.

Solusi pada sekretariat daerah adalah :

- a. Membangun Pusat Pemerintahan yang menggabungkan seluruh instansi pemerintah dalam satu area
- b. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel berbasis E-Government, khususnya pada Bidang Perencanaan, Penganggaran dan layanan publik
- c. Melaksanakan Remunerasi Pegawai
- d. Optimalisasi Pelayanan Publik pada seluruh strata pemerintahan (Kota, Kecamatan dan Kelurahan)
- e. Membangun Integrated City Control dengan memanfaatkan Wireless Sensor Network yang mampu memantau seluruh wilayah Kota Cilegon, termasuk di dalamnya mengakomodir implementasi electronic government dalam hubungannya dengan Government to Government, Government to Business, dan Government to Citizen.

B. SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota Cilegon yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kota Cilegon dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota Cilegon melalui Sekretaris Daerah Kota Cilegon. Sekretariat DPRD Kota Cilegon merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon. Terbentuknya Sekretariat DPRD Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Cilegon termasuk tipologi (*tipe*) B yang merupakan unsur staf pendukung DPRD Kota Cilegon. Sekretariat DPRD Kota Cilegon mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan dukungan yang optimal. Adapun Sekretariat DPRD

Kota Cilegon dalam menyelenggarakan fungsinya untuk penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Sekretariat DPRD pada Asisten Sekda sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) Kota Cilegon.

Sehingga Sekretariat DPRD Kota Cilegon dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan mendukung terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon dengan melaksanakan 3 (*tiga*) Program meliputi; Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah. Adapun untuk mengetahui ketercapaian realisasi kinerja indikator program, realisasi kinerja keuangan/anggaran kegiatan dan realisasi kinerja keluaran (*output*) kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.4.1j Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
SEKRETARIAT DPRD KOTA CILEGON		58.279.991.407	49.204.482.312	84,43 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		32.644.889.159	28.145.641.448	86,22 %		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Sekretariat DPRD)	100,00 %	92 %	92 %		
	Tingkat disiplin aparatur (Sekretariat DPRD)	100,00 %	91 %	91 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah						
Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		1.715.597.784	1.552.513.750	90,49 %		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Sekretariat DPRD)	85 %	100 %	117,65 %		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Sekretariat DPRD	85 %	72,61 %	85,42 %		
Penyediaan jasa pegawai non PNS		1.353.844.000	1.290.840.500	95,35 %		
	Tersedianya Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS (TKK 17 Orang, THL 10 Orang)	27 Ob	27 Ob	100,00 %		
Penatausahaan Keuangan SKPD		51.397.000	44.700.000	86,97 %		
	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Penyusunan Laporan Keuangan		46.100.000	34.779.200	75,49 %		
	Terlaksananya Laporan Keuangan	25 Buku	25 Buku	100,00 %		
Penyusunan LAKIP		19.100.000	19.100.000	100,00 %		
	Terlaksananya Penyusunan Lakip	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD		31.910.000	31.910.000	100,00 %		
	Terlaksananya Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan Sekretariat DPRD	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
Penyusunan laporan pajak penghasilan		29.505.000	28.464.200	96,47 %		
	Terlaksananya Laporan Pajak Penghasilan	2 Semester	2 Semester	100,00 %		
Penetapan Kinerja OPD		41.778.450	20.777.000	49,73 %	Adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai.	Diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk cetak Buku Penetapan Kinerja OPD agar disesuaikan kebutuhan di masa mendatang.
	Terlaksananya Laporan/Dokumen Penetapan Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD		69.667.000	37.160.000	53,34 %	Adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai.	Diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk dokumen perencanaan OPD terkait kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data dan kegiatan penyajian data di masa mendatang.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Dokumen Perencanaan OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %		
Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD		57.086.334	32.552.850	57,02 %	Adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai.	Diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk dokumen penganggaran OPD terkait kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan perubahan data RKA di masa mendatang.
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
Penyusunan LPPD OPD		15.210.000	12.210.000	80,28 %		
	Terlaksananya Penyusunan LPPD OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah						
Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah		23.919.504.464	19.506.327.114	81,55 %		
	Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %		
	Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran	100 %	85 %	85 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		20.889.000	20.294.000	97,15 %		
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Kajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD		100.000.000	0.00	0,00 %	Adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk uraian belanja kegiatan penyusunan naskah akademis dan draft Perda Inisiatif disebabkan adanya pandemi Covid 19.	Diperlukan adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan adanya rasionalisasi anggaran. Dikarenakan hanya menyiapkan kajian Raperda Inisiatif DPRD sesuai Prolegda Tahun 2021 dan ada 2 Raperda Inisiatif yang ditetapkan di akhir tahun tetapi belum dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak memungkinkan.
	Terlaksananya Pengkajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Cilegon	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %		
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan		1.232.760.000	1.152.384.000	93,48 %		
	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
Rapat-Rapat Paripurna DPRD		131.161.500	99.550.000	75,90 %		
	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna DPRD	50 Kegiatan	50 Kegiatan	100,00 %		
Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah Untuk Pansus DPRD		2.791.420.000	2.768.864.000	99,19 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah Untuk Pansus DPRD	12 Pansus	11 Pansus	91,67 %		
Rapat Pembahasan LKPJ oleh Pansus		13.860.000	4.725.000	34,09 %	Adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap dikarenakan pencairan anggaran hanya untuk belanja cetak foto album, fotocopy materi dan cetak spanduk digital printing disesuaikan dengan kebutuhan.	Diberlakukannya pembatasan kegiatan bekerja di Tempat Kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19.
	Terlaksananya Rapat Pembahasan LKPJ Oleh Pansus	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Rapat Kajian dan Pembahasan Prolegda dan LKPJ		920.050.000	804.838.800	87,48 %		
	Terlaksananya Rapat Pembahasan/Ekspose Hasil Kajian Terhadap Prolegda dan LKPJ	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
Rapat Kajian dan Pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD		3.427.885.100	2.953.460.000	86,16 %		
	Terkajinya dan Terbahasnya Dokumen-Dokumen Anggaran	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pembahasan Dokumen Anggaran	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %		
Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Baperdakot DPRD		1.234.364.714	1.214.089.714	98,36 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kunjungan Kerja BAPEMBERDA DPRD Kota Cilegon	7 Kunjungan	7 Kunjungan	100,00 %		
Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Badan Anggaran DPRD		2.769.707.000	2.446.957.000	88,35 %		
	Kunjungan Kerja DPRD (Study Banding) Alat Kelengkapan Badan Anggaran	6 Kunjungan	6 Kunjungan	100,00 %		
Kegiatan reses DPRD		2.600.833.000	63.182.000	2,43 %	Pelaksanaan Reses dilaksanakan secara mandiri disebabkan adanya wabah Covid 19. Selain itu juga, penunjang Reses berupa makanan dan minuman pelaksanaan tidak terserap baik untuk Reses I, II dan III. Begitu pula sewa perlengkapan kantor lainnya.	Diberlakukannya pembatasan sosial sesuai peraturan yang melarang adanya kerumunan masa.
	Terlaksananya Kegiatan reses DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
Dokumentasi dan pendukung kegiatan perundang-undangan DPRD Kota Cilegon		72.258.550	0.00	0,00 %	Terkendala waktu yang tidak memungkinkan sehingga belum terpenuhinya mencetak Buku Himpunan-Himpunan DPRD, cetak Rekomendasi DPRD Kota Cilegon atas LKPJ	Diperlukan penganalisaan yang cermat dalam penetapan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dokumentasi dan kegiatan perundang-Undang.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Walikota dan buku Perundang-undangan.	
	Terlaksananya penyediaan Dokumentasi dan pendukung Kegiatan Perundang-Undangan DPRD Kota Cilegon	70 Dokumen	0 Dokumen	0,00 %		
Rapat kerja komisi pembahasan RKA SKPD		1.783.010.000	1.744.123.000	97,82 %		
	Terlaksananya Rapat Kerja Komisi pembahasan RKA SKPD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Kunjungan kerja DPRD (Studi banding) Badan Kehormatan dan Komisi DPRD Kota Cilegon		6.821.305.600	6.233.859.600	91,39 %		
	Terlaksananya Kunker AKD DPRD Kota Cilegon	35 Kunjungan	35 Kunjungan	100,00 %		

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dalam melaksanakan kegiatan teknis maupun non teknis memiliki 3 (*tiga*) program yaitu :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan. Program tersebut, merupakan bagian dari perencanaan kerja yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah guna mendukung kegiatan generik (*program non teknis*) dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Cilegon mempunyai 4 (*empat*) indikator kinerja program yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program dengan mengakumulasikan *jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi baik dibagi jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang ada dikali seratus persen*. Maka unit sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang tercatat dan terdaftar pada kartu inventaris barang dan aset untuk jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi *Baik (B)* sebanyak 1.714 Unit dibagi jumlah total keseluruhan sarana dan prasarana perkantoran yang ada sebanyak 1.873 Unit. Sehingga diperoleh nilai rata-rata sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang dalam kondisi baik mencapai 92%. Oleh karena itu, maka nilai persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi *Baik (B)* realisasi kinerjanya mencapai 92% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 92%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, meningkatnya ketercapaian persentase sarana dan prasarana dalam kondisi *Baik (B)* dibandingkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang termasuk inventaris barang yang dalam kondisi *Rusak Ringan (RR)* sebanyak 17 Unit dan yang *Rusak Berat (RB)* sebanyak 142 Unit. Maka jumlah total inventaris barang sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB) sebanyak 159 Unit dibagi jumlah total keseluruhan sarana dan prasarana perkantoran yang ada sebanyak 1.873 Unit. Sehingga diperoleh nilai rata-rata sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang dalam kondisi rusak ringan ataupun rusak berat mencapai 8%. Adapun daftar nama barang yang dalam Kondisi Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel

**Daftar Nama Barang Inventaris yang dalam Kondisi Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berat (RB)
Sekretariat DPRD Kota Cilegon Tahun 2020**

No	Nama Barang	Kondisi	
		Rusak Berat (RB)	Rusak Ringan (RR)
1	Kursi Putar High Back	22	6
2	Kursi Lipat	5	
3	Meja Kerja Staf	2	
4	Kursi Lipat	1	
5	Televisi	7	
6	Ac Split	10	2
7	Cpu (Peralatan Mini Komputer)	2	
8	Exhaust Fan	1	
9	Jam Dinding	1	
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2	
11	Meja Rapat	2	
12	Mic Conference	2	
13	Monitor	6	
14	P.C Unit	5	
15	Pesawat Telephone	2	
16	White Board	1	1
17	Filing Cabinet Besi	2	1
18	Jam Mekanis	3	1
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	1
20	Alat Penghancur Kertas	1	
21	Pompa Air	2	
22	Unit Power Supply	2	
23	Ac Unit		1
24	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	
25	Stabilisator	3	1

No	Nama Barang	Kondisi	
		Rusak Berat (RB)	Rusak Ringan (RR)
26	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	6	
27	Camera Video	1	
28	Lemari Kaca	1	
29	Lemari Pakaian	1	
30	Meja Kerja / Meja Biro	2	
31	Meja Komputer	2	
32	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	
33	Sound System	1	
34	Sound System (Speaker Monitor)	1	
35	Sound System (Stabilizer)	1	
36	Sumersible Pump	1	
37	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	
38	Alat Dapur Lain-Lain	1	
39	Camera Video	1	
40	Facsimile	1	
41	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	1
42	Coffee Maker	1	
43	Laptop	6	1
44	Pompa Air	1	
45	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2	
46	Mesin Absensi	2	
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	
48	Mouse Optic	2	
49	Voice Recorder		1
50	Mesin Hitung Uang	1	

No	Nama Barang	Kondisi	
		Rusak Berat (RB)	Rusak Ringan (RR)
51	Netware Interface External	2	
Jumlah Total (Unit)		142	17

Sehingga berdasarkan ketercapaian tersebut diatas, maka meningkatnya sarana dan prasarana yang kondisi baik karena adanya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer dan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio. Sehingga dengan adanya pemeliharaan secara rutin/berkala dengan penggantian suku cadang secara berkala akan meminimalisir kerusakan inventaris barang yang berdampak pada banyaknya sarana dan prasarana yang dalam kondisi layak pakai dan memadai. Adapun sarana dan prasarana inventaris barang yang dalam kondisi Rusak Ringan (RR) tetapi masih bisa dipakai sebagai penunjang aktifitas kerja dan untuk kondisi Rusak Berat (RB) agar melaksanakan penghapusan barang/aset dan diusulkan kembali pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dimasa mendatang yang disesuaikan dengan kebutuhan Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon.

2) Tingkat disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program dengan mengakumulasi kehadiran pegawai dalam 1 (*satu*) tahun yang dinilai berdasarkan komponen kinerja dan kedisiplinan kehadiran pegawai, kepatuhan tepat waktu atau kehadiran pelaksanaan apel pagi. Maka Sekretariat DPRD Kota Cilegon mempunyai aparatur sebanyak 74 Pegawai PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan jumlah hari kerja pegawai selama 1 (*satu*) tahun *sebanyak (5 hari kerja x 4 Minggu x 12 Bulan) 240 hari kerja/tahun*. Kemudian untuk mengetahui nilai persentase masuk kerja/kehadiran pegawai dengan mengakumulasi *nilai hari masuk kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun dibagi hari kerja dalam 1 tahun dikali seratus persen*. Sehingga jumlah total keseluruhan persentase capaian masuk kerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 dengan capaian 1.093% dibagi 12 (*dua belas*) Bulan. Maka nilai rata-rata tingkat disiplin masuk kerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon dalam 1 tahun mencapai 91% atau pegawai yang hadir sebanyak 66 Orang. Sehingga nilai persentase tingkat disiplin aparatur realisasi kinerjanya mencapai 91% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 91%. Sedangkan untuk mengetahui nilai persentase tidak masuk kerja/ketidakhadiran pegawai dengan mengakumulasi *nilai hari tidak masuk kerja pegawai selama 1 (satu) tahun yang diperoleh dari (jumlah hari kerja pegawai yang datang terlambat, pulang cepat, ijin, cuti, sakit, dinas luar dan tanpa keterangan) dibagi hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikali seratus persen*. Sehingga diperoleh nilai tingkat disiplin tidak masuk kerja

pegawai/ketidakhadiran Sekretariat DPRD Kota Cilegon dalam 1 tahun mencapai 8% atau pegawai yang tidak hadir sebanyak 8 Orang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka meningkatnya nilai persentase tingkat disiplin aparaturnya Sekretariat DPRD Kota Cilegon dikarenakan banyaknya pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang masuk kerja/hadir tepat waktu antara jam masuk kerja dan jam pulang kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Disamping itu juga, sebagian masih ditemukannya pegawai yang datang terlambat, tanpa keterangan, cuti dan ijin dikarenakan dengan berbagai hal keperluan/kepentingan. Oleh karena itu, maka Kedisiplinan merupakan kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagaimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di dalam pasal 14 *Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 angka 9, pasal 9 angka 11 dan pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan*. Maka dengan adanya hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran agar yang bersangkutan mempunyai sikap penyesalan dan berusaha untuk tidak mengulangi dan memperbaiki diri dimasa yang akan datang supaya terwujudnya pegawai yang handal, profesional, dan bermoral demi menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong pegawai untuk lebih produktif yang berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.

2. Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan. Program tersebut, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan administrasi Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Cilegon. Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai 2 (*dua*) indikator kinerja program yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program dengan mengakumulasikan *jumlah ketersediaan data dan informasi sektoral dibagi jumlah permintaan data dan informasi sektoral dikali seratus persen*. Maka jumlah ketersediaan data dan informasi sektoral yang dimiliki pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon sebanyak 3 (*tiga*) Dokumen yaitu; Dokumen SPM, LPPD dan LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2020 terhadap jumlah permintaan data dan informasi sektoral sebanyak 3 (*tiga*) Dokumen yaitu; Dokumen SPM, LPPD dan LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2020. Sehingga diperoleh nilai rata-rata ketersediaan data dan informasi sektoral mencapai 100%. Oleh karena itu, maka nilai

persentase ketersediaan data dan informasi sektoral realisasi kinerjanya mencapai 85% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 117,65%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, meningkatnya ketercapaian ketersediaan data dan informasi sektoral dikarenakan tersedianya data dan informasi sektoral secara berkala. Sehingga data dan informasi yang tersajikan secara obyektif dan terbaru (*up to date*) berkelanjutan di masa mendatang dan dapat digunakan dengan berbagai kepentingan bagi pemangku kebijakan pemerintah daerah Kota Cilegon.

2) Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*)

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program dengan mengakumulasi *proses pencairan pendanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas dengan jumlah realisasi cash budget (anggaran kas) Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV dalam (persentase) dibagi 4 Triwulan*. Adapun untuk mengetahui kesesuaian realisasi keuangan dengan menjumlahkan anggaran kas pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Cilegon pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Ketersesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Anggaran Kas (*Cash Budget*)
Pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020

Anggaran Kas	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Triwulan I	26.678.911.050,-	9.923.046.107,-	37,19
Triwulan II	14.317.139.647,-	7.625.562.702,-	53,26
Triwulan III	6.884.341.542,-	11.609.746.981,-	100,00
Triwulan IV	10.399.599.168,-	20.046.126.522,-	100,00
Jumlah Total (Rp.)	58.279.991.407,-	49.204.482.312,-	72,61

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah anggaran kas pada Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan target triwulan I Rp. 26.678.911.050,- dan realisasi anggarannya Rp. 9.923.046.107,- maka diperoleh

kesesuaian anggaran kas triwulan I mencapai 37,19%. Untuk target triwulan II Rp. 14.317.139.647,- dan realisasi anggarannya Rp. 7.625.562.702,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan II mencapai 53,26%. Kemudian untuk target triwulan III Rp. 6.884.341.542,- dan realisasi anggarannya Rp. 11.609.746.981,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan III mencapai 100,00%. Selanjutnya untuk target triwulan IV Rp. 10.399.599.168,- dan realisasi anggarannya Rp. 20.046.126.522,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan IV mencapai 100,00%.

Sehingga untuk cash budget (*anggaran kas*) Sekretariat DPRD Kota Cilegon selama 1 tahun dengan jumlah total capaian anggaran kas dari triwulan I, II, III dan triwulan IV dibagi 4 Triwulan dengan capaian 290,46% dibagi 4. Oleh karena itu, diperoleh nilai rata-rata kesesuaian realisasi keuangan yang berdasarkan cash budget (*anggaran kas*) dengan capaian 72,61%. Maka nilai persentase kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*) realisasi kinerjanya mencapai 72,61% dari yang ditargetkan 85%, maka capaiannya 85,42%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan untuk penyerapan pagu anggaran kas pada triwulan I dan II belum optimal sesuai target anggaran kas dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun pada triwulan III dan IV disebabkan adanya rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran kegiatan sebagai dampak pandemi Covid 19. Walaupun demikian terlaksananya program dan kegiatan teknis ataupun kegiatan non teknis agar terwujudnya tata kelola administrasi keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel.

3. Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah. Program tersebut, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperoleh alokasi anggaran dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kota Cilegon serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota Cilegon. Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah mempunyai 2 (*dua*) indikator kinerja program yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti

Reses merupakan komunikasi 2 (*dua*) arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen Daerah Pemilihan secara rutin pada setiap masa Reses. Sebagaimana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 161 mengamanatkan *Setiap anggota DPRD harus melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat secara berkala melalui kegiatan reses pada setiap masa persidangan*. Oleh karena itu, Masa Reses adalah kegiatan-kegiatan di luar masa sidang yang digunakan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (*dapil*) anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon. Adapun tujuannya untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen pada daerah pemilihan (*dapil*) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Maka untuk mengetahui Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti dengan mengakumulasi *jumlah hasil pelaporan Reses yang dibahas DPRD dibagi jumlah hasil pelaporan Reses yang ditindaklanjuti dikali 100 (seratus) persen*. Sehingga berhubung dengan adanya Pandemi Covid 19 kegiatan Reses dilakukan secara mandiri untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Adapun DPRD Kota Cilegon melaksanakan 3 kali kegiatan Reses dalam 1 tahun yaitu; Reses I, II dan III dengan sebanyak 40 Anggota DPRD Kota Cilegon, maka hasil pelaporan kegiatan Reses selama 1 tahun sebanyak 120 laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Sehingga jumlah usulan hasil pelaporan Reses yang dibahas DPRD Kota Cilegon sebanyak 3 dokumen hasil pelaporan Reses I, II dan III dan hasil pelaporan Reses yang ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 3 dokumen hasil pelaporan Reses I, II dan III dengan realisasi kinerjanya mencapai 100%. Dengan demikian untuk Proporsi hasil reses yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%. Maka dapat disimpulkan ketercapaiannya meningkat dikarenakan untuk pengukuran hasil reses yang dapat diukur hanya capaian laporan hasil reses yang kemudian dibentuk dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD Terhadap RKPD Tahun Anggaran 2020 dan disampaikan pada saat kegiatan MUSRENBANG Kota Cilegon Tahun 2020 agar ditindaklanjuti terkait usulan aspirasi masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang diharapkan masyarakatnya.

- 2) Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran
 Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran merupakan nilai persentase ketercapaian indikator kinerja program untuk mengukur jumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (*Raperda*) yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran untuk dijadikan Peraturan Daerah (*Perda*). Maka Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Walikota. Sehingga Peraturan Daerah (*Perda*) merupakan produk hukum yang bersifat mengatur secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah DPRD Kota Cilegon dan Walikota Cilegon melalui prosedur yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembentukan Peraturan Daerah (*Perda*) mencakup tahapan yaitu; perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Adapun tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah (*Perda*) ditetapkan dengan Program Legislasi Daerah atau Program Pembentukan Peraturan Daerah (*Propemperda*).
 Maka untuk mengetahui Proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran dengan mengakumulasi *jumlah usulan Raperda yang diajukan berdasarkan Program legislasi daerah (Prolegda) dibagi jumlah*

Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran dikali 100 (seratus) persen. Maka jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas dan disahkan DPRD Kota Cilegon dalam satu tahun anggaran sebanyak 12 Raperda yang terdiri dari 5 Raperda yang sedang dalam proses fasilitasi di Gubernur Provinsi Banten yang meliputi : (1). Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; (2). Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik; (3). Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri; (4). Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan; (5). Raperda Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19. Sedangkan 2 Raperda yang sedang dalam proses evaluasi di Gubernur Provinsi Banten yang meliputi : (1). Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan (2). Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Cilegon Bagian Wilayah Perencanaan Ciwandan dan Citangkil Tahun 2020-2040. Adapun 5 Raperda yang sudah diparipurnakan disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 5 Perda yang meliputi : (1). Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040; (2). Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (3). Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019; (4). Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (5). Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, untuk usulan Raperda yang diajukan berdasarkan Program legislasi daerah (*Prolegda*) sebanyak 14 Raperda yang meliputi : (1). Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah; (2). Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; (3). Raperda Kawasan Bebas Rokok; (4). Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik; (5). Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Cilegon Mandiri; (6). Raperda Rencana Induk Cilegon Kota Cerdas; (7). Raperda Pembentukan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon; (8). Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan; (9). Raperda Revisi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; (10). Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019; (11). Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; (12). Raperda APBD Tahun Anggaran 2021; (13). Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (14). Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Cilegon Bagian Wilayah Perencanaan Ciwandan dan Citangkil Tahun 2020-2040; (15). Raperda Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 19; dan 1 Raperda tidak masuk usulan Prolegda tahun 2020 yaitu; Raperda tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Maka untuk usulan Raperda yang diajukan berdasarkan Program legislasi daerah (*Prolegda*) sebanyak 14 Raperda terhadap jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran sebanyak 12 Raperda maka diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 85%. Sehingga untuk proporsi jumlah usulan raperda yang dibahas dan disahkan dalam satu tahun anggaran realisasi kinerjanya mencapai 85% dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 85%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, meningkatnya ketercapaian dikarenakan banyaknya usulan raperda yang dibahas dan disahkan dengan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas agar memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat/aparatur dengan memberikan rasa keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat/aparatur. Sehingga terciptanya kondisi daerah yang aman, tentram, tertib dan teratur. Walaupun terdapat Raperda yang tidak dibahas hal ini dikarenakan Walikota tidak menyampaikan draft Revisi sebanyak 4 Raperda yang meliputi : (1). Raperda Kawasan Bebas Rokok (*dimasukan kembali pada Propemperda 2021*); (2). Raperda Rencana Induk Cilegon Kota Cerdas (Surat Kepala Dinas Kominfo No. 027/138/PTIK, perihal Pencabutan Usulan Raperda. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal akan diatur dengan peraturan Walikota); (3). Raperda Pembentukan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mandiri Kota Cilegon (Surat Kepala Dinas Kominfo No. 100/483/Sekret, perihal Tanggapan Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020. Bahwa Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan LPPL Radio Mandiri Kota Cilegon masih relevan); dan (4). Raperda Revisi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Pembahasan tidak dilanjutkan).

Adapun beberapa kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75%, diantaranya meliputi :

1. Kegiatan Lokakarya/seminar DPRD tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
2. Kegiatan Pameran Hari Jadi tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19. Sebagaimana dengan diterbitkannya Perwal No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka pembiayaan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid 19)* di Kota Cilegon melalui mekanisme penganggaran dalam *Belanja Tidak Terduga (BTT)* yang dibebankan pada APBD dengan pembiayaan *refocusing* yang dilakukan terhadap pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Sehingga penghapusan kegiatan karena dampak pandemi Covid-19.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan surat menyurat berupa materai. Adapun realisasi kinerja 2 Jenis dari yang ditargetkan 2 Jenis dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 27,60%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pemakaian materai yang terbatas disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Sehingga Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon melaksanakan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi internet dan listrik Gedung Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 68,35%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan anggaran untuk pemakaian telepon, air PDAM, listrik dan internet speedy disesuaikan kebutuhan kerja. Sehingga Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon melaksanakan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19. Adapun sebagian sisa anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan tarif daya listrik, telepon, air PDAM dan internet;
5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun realisasi kinerja 1 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,81%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan anggaran untuk belanja dan pemakaian Alat Tulis Kantor (*ATK*) disesuaikan kebutuhan kerja. Hal tersebut disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran/rasionalisasi anggaran dan diberlakukannya pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19. Sehingga penyediaan kebutuhan alat tulis kantor tercukupi dengan adanya pembatasan aktifitas kegiatan yang disesuaikan kebutuhan kerja;
6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum rapat untuk anggota DPRD Kota Cilegon, pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon dan masyarakat. Adapun realisasi kinerja 1 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 52,33%. Kurang optimalnya penyerapan sebagian pagu anggaran dikarenakan adanya pencairan anggaran untuk belanja Makanan dan Minuman (*Mamin*) disesuaikan kebutuhan rapat tamu undangan. Sehingga Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon melaksanakan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19;
7. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Studio. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audio visual ruangan rapat paripurna. Adapun realisasi kinerja 0 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserap pagu anggaran tersebut, dikarenakan adanya ketidaksesuaian harga antara pagu anggaran yang tersedia dengan harga audio visual yang akan dibelanjakan sehingga tidak memenuhi spesifikasi barang sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran dengan uraian belanja barang pengadaan alat-alat studio.
8. Kegiatan Pengadaan Sewa Gedung/Rumah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sewa gedung kantor dalam menyelenggarakan kegiatan acara rapat/pertemuan diluar gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 0 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserap pagu anggaran

tersebut, dikarenakan tidak ada acara kegiatan yang diselenggarakan diluar gedung Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon maka pagu anggaran tidak terserap. Sehingga Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon melaksanakan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19;

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk perbaikan mesin pompa, suku cadang alat pendingin AC, pemeliharaan meubeleir dan perbaikan peralatan kantor lainnya. Adapun realisasi kinerja 1 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 62,05%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan pagu anggaran untuk belanja suku cadang disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. Sehingga minimnya barang elektronik ataupun meubeleir yang mengalami kerusakan untuk penggantian suku cadang dikarenakan masih dalam kondisi memadai dan layak pakai;
10. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan pegawai melalui medical check up untuk anggota DPRD Kota Cilegon dan pegawai non ASN Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 0 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 17,27%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya petugas kesehatan pada saat ini yang masih terfokus pada penanganan Covid-19. Jadi, untuk jasa jaminan kesehatan tahun ini tidak terpakai. Sehingga diperlukan meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pihak pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan petugas layanan kesehatan BPJS agar mengoptimalkan jaminan /pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dan pegawai Non ASN pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Sebagaimana di dalam UU No. 36 Tahun Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam pasal 4 dan 5 bahwa mengamanatkan *setiap orang berhak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.*
11. Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan pakaian sipil harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian dan pakaian adat anggota DPRD Kota Cilegon beserta atribut perlengkapannya. Adapun realisasi kinerja 40 Stell dari yang ditargetkan 40 Stell dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 34,67%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan anggaran hanya untuk belanja Pakaian Adat anggota DPRD sebanyak 40 Stell. Sehingga diperlukan evaluasi dalam penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya karena terkendala waktu pengerjaan pakaian dinas yang tidak memungkinkan dicairkan untuk Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD, Pakaian Dinas Lapangan (PSR) Anggota DPRD dan Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD disebabkan adanya pandemi Covid 19;

12. Kegiatan Penyediaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk memenuhi kebutuhan sewa kursi, sewa generator, sound sistem, dekorasi indoor dan sewa tanaman hias. Adapun realisasi kinerja 5 Item dari yang ditargetkan 5 Item dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 39,52%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan anggaran sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk sewa kursi VIP, generator, sound sytem, dekorasi indoor dan sewa tanaman hias disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga dengan adanya Covid 19 diberlakukannya pembatasan kegiatan aktifitas kerja untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19. Sebagaimana dengan diterbitkannya Perwal No. 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan diterbitkannya Perwal No. 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Banten. Maka untuk setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana dengan diterbitkannya Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
13. Kegiatan Pengadaan Taman, Tanaman, Penerangan Jalan dan Rambu-Rambu. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan taman dan tanaman hias untuk halaman Kantor Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan menyediakan pengadaan bibit tanaman. Adapun realisasi kinerja 1 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 60,32%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pencairan anggaran Pengadaan taman, tanaman, penerangan jalan dan rambu-rambu untuk belanja bibit tanaman disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran dengan uraian belanja barang pengadaan bibit tanaman untuk taman halaman gedung DPRD Kota Cilegon;
14. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBI) dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Adapun realisasi kinerja 0 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan tidak dilaksanakan dan tidak terserapnya pagu anggaran kegiatan tersebut, sehingga adanya pembatasan kegiatan di tempat kerja sebagai dampak pandemi Covid 19, dengan diberlakukannya pembatasan sosial dengan tidak melaksanakan kegiatan yang dapat mengundang/berkerumun banyak orang sebagai upaya untuk pencegahan, penyebaran dan penularan wabah Covid 19. Sebagaimana diterbitkannya Perwal No. 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan diterbitkannya Perwal No. 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Banten. Selain itu juga agar setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diterbitkannya Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan teknis pada setiap perangkat

daerah agar mencegah dan menghindari penyebaran Covid 19 dengan menerapkan pertemuan secara daring, bekerja dari rumah (*work from home*), membatasi interaksi sosial dengan menjaga jarak (*social distancing*)/menjaga jarak interaksi dengan orang lain (*physical distancing*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;

15. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya jasa jaminan Barang untuk jasa asuransi kendaraan. Adapun realisasi kinerja 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggaran mencapai 66,17%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pencairan jasa asuransi disesuaikan dengan kebutuhan jumlah kendaraan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Cilegon. Sehingga diperlukan penyesuaian pagu anggaran secara cermat terkait target kegiatan anggaran sesuai dengan kebutuhan jasa asuransi untuk kendaraan dinas kantor DPRD Kota Cilegon;
16. Kegiatan Jasa Penunjang Paripurna DPRD Kota Cilegon. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan Paripurna DPRD Kota Cilegon dengan menyediakan tenaga kerja untuk pemandu sumpah, pembaca do'a, dirijen, panis, rohaniawan, pembaca ayat suci Al-Qur'an dan jasa tim paduan suara. Adapun realisasi kinerja 3 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 3,02%. Kurang optimalnya dikarenakan adanya beberapa kegiatan rapat paripurna Hari Jadi Kota Cilegon (27 April 2020) dan Hut RI Ke 75 (17 Agustus 2020) tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya pandemi Covid 19. Sehingga diberlakukannya pembatasan sosial dengan tidak melaksanakan kegiatan yang dapat mengundang berkerumun banyak orang sebagai upaya untuk mengurangi pencegahan, penyebaran dan penularan wabah Covid 19. Sebagaimana diterbitkannya Perwal No. 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan diterbitkannya Perwal No. 43 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Banten, maka Kantor Pemerintahan termasuk pembatasan kegiatan bekerja di Tempat Kerja. Selain itu juga, maka untuk setiap orang wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana diterbitkannya Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan teknis pada setiap perangkat daerah untuk mencegah dan menghindari penyebaran Covid 19 dengan menerapkan pertemuan secara daring, bekerja dari rumah (*work from home*), membatasi interaksi sosial dengan menjaga jarak (*social distancing*)/menjaga jarak interaksi dengan orang lain (*physical distancing*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tetap mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;
17. Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Media Cetak DPRD. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan media cetak berupa artikel dan buletin DPRD Kota Cilegon dan buletin kegiatan DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 3 Jenis dari yang ditargetkan

3 Jenis dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 56,65%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya keterlambatan jadwal lelang yang disebabkan Pandemi Covid 19, dimana seharusnya dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020 digeser ke Bulan Oktober 2020. Sehingga disesuaikan dengan kondisi untuk penetapan jadwal lelang diharapkan di awal tahun kegiatan sehubungan dengan adanya pandemi Covid 19;

18. Kegiatan Penyediaan e-Pustaka Perundang-undangan dan Pengelolaan Website. Kegiatan ini bertujuan untuk pengelolaan website DPRD Kota Cilegon untuk menerapkan aplikasi Internet SIMPER JDIH Sekretariat DPRD Kota Cilegon terkait aplikasi bidang fasilitasi legislasi, bidang keuangan, bidang umum dan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan dalam android/tablet phone. Adapun realisasi kinerja 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 38,23%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan terkendala waktu yang tidak memungkinkan sehingga belum teraplikasinya JDIH DPRD dan Website SIMPER. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat dalam penetapan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penyediaan e-pustaka perundang-undangan dan pengelolaan website;
19. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan menyediakan akomodasi halfday kegiatan orientasi dan pendalaman tugas tenaga ahli fraksi. Kurang optimalnya penyerapan pagu anggaran dikarenakan adanya pengurangan dan pengalihan pagu anggaran (*rasionalisasi*) kegiatan untuk penanganan pembiayaan Covid 19. Adapun realisasi kinerja 2 Kegiatan dari yang ditargetkan 2 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,49%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk uraian belanja kegiatan disebabkan adanya pandemi Covid 19. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan adanya rasionalisasi anggaran;
20. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD. Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya laporan kinerja Pimpinan DPRD dengan menyediakan cetak buku laporan kinerja pimpinan DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 56 Dokumen dari yang ditargetkan 56 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 56,03%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan untuk cetak Buku Laporan Kinerja Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk uraian belanja cetak Buku Laporan Kinerja Pimpinan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan;
21. Kegiatan Penetapan Kinerja OPD. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen penetapan kinerja OPD. Adapun realisasi kinerja 1 Dokumen dari yang ditargetkan 1 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 49,73%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka

efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk cetak Buku Penetapan Kinerja OPD agar disesuaikan kebutuhan di masa mendatang;

22. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dan tersedianya dokumen perencanaan OPD. Adapun realisasi kinerja 3 Dokumen dari yang ditargetkan 3 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 53,34%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk dokumen perencanaan OPD terkait kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data dan kegiatan penyajian data di masa mendatang;
23. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan dan tersedianya dokumen penganggaran OPD. Adapun realisasi kinerja 2 Dokumen dari yang ditargetkan 2 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 57,02%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana awal tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran karena secara outcome dan output kegiatan secara keseluruhan dapat tercapai. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat terkait target kegiatan anggaran untuk dokumen penganggaran OPD terkait kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan perubahan data RKA di masa mendatang;
24. Kegiatan Kajian Produk Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD. Kegiatan ini bertujuan agar terfasilitasinya pengkajian produk penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kota Cilegon untuk penyusunan naskah akademis dalam bentuk draft Perda Inisiatif. Adapun realisasi kinerja 0 Dokumen dari yang ditargetkan 4 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut, dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk uraian belanja kegiatan penyusunan naskah akademis dan draft Perda Inisiatif disebabkan adanya pandemi Covid 19. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan adanya rasionalisasi anggaran. Dikarenakan hanya menyiapkan kajian Raperda Inisiatif DPRD sesuai Prolegda Tahun 2021 dan ada 2 Raperda Inisiatif yang ditetapkan di akhir tahun tetapi belum dapat dilaksanakan karena waktu yang tidak memungkinkan;
25. Kegiatan Rapat Pembahasan LKPJ oleh Pansus. Kegiatan ini bertujuan agar terfasilitasinya rapat pembahasan LKPJ oleh Pansus. Adapun realisasi kinerja 0 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 34,09%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap dikarenakan pencairan anggaran hanya untuk belanja cetak foto album, fotocopy materi dan cetak spanduk digital printing disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga

diberlakukannya pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja dikarenakan adanya pandemi Covid 19 sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;

26. Kegiatan Reses DPRD. Kegiatan ini bertujuan agar terfasilitasinya kegiatan Reses DPRD Kota Cilegon. Adapun realisasi kinerja 0 Kegiatan dari yang ditargetkan 3 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 2,43%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pelaksanaan Reses dilaksanakan secara mandiri disebabkan adanya wabah Covid 19. Selain itu juga, penunjang Reses berupa makanan dan minuman pelaksanaan tidak terserap baik untuk Reses I, II dan III. Begitu pula sewa perlengkapan kantor lainnya. Sehingga diberlakukannya pembatasan sosial sesuai peraturan yang melarang adanya kerumunan masa;
27. Kegiatan Dokumentasi dan Pendukung Kegiatan Perundang-undangan DPRD Kota Cilegon. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumentasi dan kegiatan perundang-undangan dalam bentuk cetak buku himpunan-himpunan DPRD. Adapun realisasi kinerja 0 Dokumen dari yang ditargetkan 70 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak dilaksanakannya kegiatan tersebut, dikarenakan terkendala waktu yang tidak memungkinkan sehingga belum terpenuhinya mencetak Buku Himpunan-Himpunan DPRD, cetak Rekomendasi DPRD Kota Cilegon atas LKPJ Walikota dan buku Perundang-undangan. Sehingga diperlukan penganalisaan yang cermat dalam penetapan jadwal yang tepat untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dokumentasi dan kegiatan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk penyerapan realisasi kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Cilegon pada Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah nilai rata-rata realisasi kinerjanya mencapai 75,57%, adapun untuk penyerapan realisasi anggarannya mencapai 84,43%. Sehingga dapat disimpulkan ketercapaian realisasi anggaran terserap secara optimal tetapi realisasi kinerja belum sepenuhnya optimal dikarenakan terdapat beberapa Raperda yang sedang dalam proses fasilitasi dan evaluasi di Gubernur Provinsi Banten dan terdapat beberapa Raperda yang tidak dibahas hal ini dikarenakan Walikota tidak menyampaikan draft Revisi. Selain itu juga, adanya penyerapan pagu anggaran kas belum sesuai target anggaran kas per triwulan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun pada triwulan III dan IV disebabkan adanya rasionalisasi dan refocusing pagu anggaran kegiatan sebagai dampak pandemi Covid 19. Walaupun demikian meningkatnya kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang handal dengan didukung anggaran yang proporsional dan sarana dan prasarana yang memadai agar terselenggaranya fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Kota Cilegon.

B.8. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.8a Permasalahan Sekretariat DPRD Cilegon sebagai berikut :

1. Adanya bencana Wabah/Pandemi Covid 19, sehingga terkendala beberapa kegiatan teknis Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang akan dilaksanakan;
2. Terdapat pagu anggaran kegiatan yang dirasionalisasikan dan difocusing (*pengurangan atau pengalihan pagu anggaran*) untuk pembiayaan dan penanganan Covid 19;
3. Adanya ketidaksesuaian target realisasi anggaran dengan kebutuhan uraian belanja yang tidak memenuhi spesifikasi belanja barang yang diharapkan;
4. Adanya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk anggota DPRD dan pegawai Non PNS yang tidak sepenuhnya terserap;
5. Belum memadainya kecukupan, keterbaharuan dan pengelolaan data, informasi dan literatur di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Aspirasi Masyarakat;
6. Terdapat beberapa kontrak pekerjaan kegiatan yang gagal lelang.

B.8b Solusi Sekretariat DPRD Kota Cilegon sebagai berikut :

1. Dilaksanakannya pembatasan sosial dan interaksi sosial sebagaimana diterbitkannya Perwal No. 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Selain itu juga, diterbitkannya Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon melaksanakan aktifitas kegiatan kerja dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dan melaksanakan gerakan 5M (*Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi*), melakukan pertemuan rapat kegiatan secara daring/pembatasan peserta rapat dengan menjaga jarak, bekerja dari rumah (*work from home*) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk tetap mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;
2. Diperlukan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar perangkat daerah lintas sektoral terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid 19 dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara terpadu;
3. Diperlukan penganalisaan perencanaan secara cermat terkait target anggaran dengan uraian kebutuhan belanja barang dan jasa/belanja modal;
4. Diperlukan meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pihak pegawai Sekretariat DPRD Kota Cilegon dengan petugas layanan kesehatan BPJS agar mengoptimalkan jaminan /pemeliharaan kesehatan anggota DPRD dan pegawai Non ASN pada Sekretariat DPRD

Kota Cilegon. Sebagaimana di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di dalam pasal 4 dan 5 bahwa mengamanatkan *setiap orang berhak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;*

5. Diperlukan meningkatkan ketersediaan data dan informasi pengolahan data capaian indikator program dan kegiatan;
6. Diperlukan adanya penetapan penjadwalan yang konsisten untuk pengadaan barang jasa/belanja modal agar dilaksanakan di awal tahun anggaran.

C. KECAMATAN CILEGON

Tabel 3.1.4.1k Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Cilegon)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KECAMATAN CILEGON		2.518.057.888	2.436.823.313	96,77 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.126.801.614	2.068.924.698	97,28 %		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Cilegon)	86 %	100 %	116,28 %		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Cilegon)	86 %	84,92 %	98,74 %		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Cilegon)	96 %	86 %	89,58 %		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Kecamatan Cilegon	85 %	85,63 %	100,74 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		391.256.274	367.898.615	94,03 %		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Cilegon)	93 %	99,99 %	107,52 %		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Cilegon)	93 %	100 %	107,53 %		
Penyusunan Profil Kecamatan		4.000.000	4.000.000	100,00 %		
	Tersedianya Dokumen Profil Kecamatan	1 Buku	1 Buku	100,00 %		
Pembinaan Administrasi Kelurahan		5.000.000	5.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan		7.760.000	7.760.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		17.380.000	17.380.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		12.100.000	12.100.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon		13.100.000	13.100.000	100,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pelaksanaan Musrenbangcam		40.000.000	39.993.100	99,98 %		
	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbangcam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		30.000.000	22.200.000	74,00 %	Honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak terserap akibat dampak pandemi Covid19.	Diberlakukannya pembatasan sosial pada peserta kegiatan dengan menjaga jarak membatasi tatap muka secara langsung terutama kegiatan monitoring sebagai upaya untuk pencegahan agar meminimalisir /mengurangi penyebaran wabah Covid 19.
	Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pengajian Rutin		24.165.000	24.108.000	99,76 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pengajian Rutin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50.000.000	49.970.000	99,94 %		
	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan Sarpraswil DPWkel (Monitoring DPWkel)		1.614.274	1.575.000	97,57 %		
	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Lomba Kelurahan		10.000.000	10.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)		2.100.000	1.950.000	92,86 %		
	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)		19.200.000	19.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan		5.535.000	5.535.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek		9.302.000	9.302.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40.000.000	40.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan KORWASDAL Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)		100.000.000	84.725.515	84,73 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

1. KELURAHAN CIWADUK

Tabel 3.1.4.1k.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ciwaduk)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN CIWADUK		1.671.323.122	1.639.396.780	98,09 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		455.932.500	447.124.521	98,07 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.215.390.622	1.192.272.259	98,10 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		85.000.000	83.170.000	97,85 %		
	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		5.375.000	5.375.000	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan 10 program PKK	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622	168.215.600	100,00 %		
	Pembangunan Paving Block, Pembangunan Drainase	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		381.555.000	380.475.000	99,72 %		
	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		6.400.000	6.400.000	100,00 %		
	Terlaksananya Simpul Paten	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		8.300.000	8.300.000	100,00 %		
	Tersusunnya data profile kelurahan	1 Buku	1 Buku	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		44.150.000	41.900.000	94,90 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan PHBI	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya STQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		2.000.000	2.000.000	100,00 %		
	Dukungan pelaksanaan kebersihan lingkungan	7 Bulan	7 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya penanaman pohon	72 Buah	72 Buah	100,00 %		
	Edukasi tentang kebersihan lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Lomba futsal	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		2.000.000	2.000.000	100,00 %		
	Penyuluhan dan pendampingan perlindungan anak terpadu	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Edukasi perlindungan anak terpadu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan		20.600.000	19.065.000	92,55 %		
	Terlaksananya pemutakhiran data UMKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya pemantauan teknologi tepat guna	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		32.525.000	32.100.000	98,69 %		
	Peningkatan Gerakan Pencapaian kelurahan sehat	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan gertak DBD	4 Triwulan	4 Triwulan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan germas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan screening kesehatan lansia	120 Ok	120 Ok	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan kampanye keluarga sehat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan ketuk pintu TB Paru	6 Bulan	6 Bulan	100,00 %		
Facilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25.675.000	25.675.000	100,00 %		
	Tersedianya honorarium	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya koordinasi antar mitra pemerintah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya seragam LPM	10 Stell	10 Stell	100,00 %		
Facilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		17.595.000	17.583.000	99,93 %		
	Terlaksananya kegiatan pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	107.575.000	93,54 %		
	Pelatihan tenaga satlinmas kelurahan ciwaduk	30 Orang	30 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan tenaga sukarelawan bencana	30 Orang	30 Orang	100,00 %		
	Tercapainya edukasi proteksi kebencanaan bagi masyarakat	100 Orang	100 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.320.000	98,95 %		
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	70 Orang	70 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	30 Orang	30 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terbangunnya Sarana & Prasarana Wilayah	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.703.000	99,65 %		
	Pelatihan Kewirausahaan	60 Orang	60 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	60 Orang	60 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	42.415.659	84,83 %		
	Jumlah titik pemasangan wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Ciwaduk telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	RT06/03	1	PKT	1	PKT	130.000.000
III	REHAB MUSHOLA	LINK. TEMU PUTIH RW 002	1	PKT	1	PKT	12.983.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Ciwaduk pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 Pekerjaan yang terdiri atas 1 Paket Pembangunan Posyandu yang dilaksanakan selama 3 termin dan rehab mushola pada termin 3, Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 142.983.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Ciwaduk juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
		LUAS	SAT	VOL	SAT	
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
		LUAS	SAT	VOL	SAT	
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Blok E RT.10 RW.05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Ciwaduk sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

2. KELURAHAN BENDUNGAN

Tabel 3.1.4.1k.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bendungan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN BENDUNGAN		1.737.572.622	1.694.332.826	97,51 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		508.923.000	492.773.287	96,83 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.228.649.622	1.201.559.539	97,80 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		106.600.000	106.600.000	100,00 %		
	Terlaksananya monitoring berkala di lingkungan Kelurahan Bendungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622	168.214.022	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		312.410.000	304.833.800	97,57 %		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Kelembagaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		6.300.000	6.300.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		79.067.000	69.925.000	88,44 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin Melalui Majelis Taklim	7 Kegiatan	6 Kegiatan	85,71 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	49.988.000	99,98 %		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		17.357.000	17.357.000	100,00 %		
	Terfasilitasinya Program Kerja PKK Kelurahan Bendungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000	19.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Kelembagaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000	24.925.000	99,70 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		28.500.000	28.500.000	100,00 %		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Pra RAB dan RAB)	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Mitra Kelembagaan Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen Pra RAB dan RAB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.831.800	99,85 %		
	Meningkatnya Kualitas Dan Kompensasi Petugas Ketentraman Dan Ketertiban	80 %	80 %	100,00 %		
	Meningkatnya Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	80 %	80 %	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.820.000	99,72 %		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	26 Orang	26 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.670.000	99,62 %		
	Pelatihan Usaha	60 Orang	60 Orang	100,00 %		
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	60 Orang	60 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	40.394.917	80,79 %		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM Yang Mandiri	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Bendungan telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	LINK. RAJAWALI RT 010/005	22,54	M3	26,3	M3	32.470.000
I	GAPURA MERAH PUTIH	LINK. BBS RT 007/006	1	PKT	1	PKT	25.000.000
II	DRAINASE	LINK. BUKIT TINGGI RT 008/006	14,28	M3	15,82	M3	21.410.000
II	POS KAMLING	LINK. BUKIT TINGGI RT 008/006	1	PKT	1	PKT	10.000.000
II	POS KAMLING	RT 009/005	1	PKT	1	PKT	10.000.000
III	DRAINASE	LINK. NAKULA RT 19/03	21,42	M3	31,44	M3	30.960.000
III	POS KAMLING	LINK. RT 010/005	1	PKT	1	PKT	10.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Bendungan pada tahun 2020 adalah sebanyak 7 Pekerjaan yang terdiri atas pembangunan drainase pada termin 1 sampai 3 dengan total volume 73,56 M3, Pembangunan Gapura Merah Putih pada termin 1 dan pembangunan Pos Kamling pada termin 2 sebanyak 2 paket dan pada termin 3 sebanyak 1 paket, Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 139.840.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Bendungan juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Bima RT.009 RW.005	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Bendungan sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

3. KELURAHAN BAGENDUNG

Tabel 3.1.4.1k.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bagendung)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN BAGENDUNG		1.441.349.254	1.380.701.041	95,79 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		408.437.632	380.200.036	93,09 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.032.911.622	1.000.501.005	96,86 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		63.400.000	63.399.750	100,00 %		
	Tersedianya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.212.622	168.151.991	99,96 %		
	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		183.150.000	183.150.000	100,00 %		
	Tersedianya Honor RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Tersedianya Seragam Foker C	17 Stel	17 Stel	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.274.000	2.274.000	100,00 %		
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		45.980.000	35.980.000	78,25 %		
	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan	7 Kegiatan	6 Kegiatan	85,71 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		5.300.000	5.300.000	100,00 %		
	Tersedianya Dukungan Program Kampung Iklim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	49.500.000	99,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pemantauan Jentik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Screening Kesehatan Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kampanye Keluarga Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Intervensi Lanjutan Keluarga Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		4.990.000	4.990.000	100,00 %		
	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya Seragam PKK Kelurahan	39 Stel	0 Stel	0,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		36.005.000	35.893.820	99,69 %		
	Terlaksananya Pelatihan Pengelasan	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Tersedianya Dokumen Pelaporan Pelatihan Pengelasan dan Otomotif	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %		
	Tersedianya Materi Pelatihan Pengelasan dan Otomotif	10 Buku	10 Buku	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		24.600.000	21.200.000	86,18 %		
	Tersedianya Honor LPM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya Seragam LPM	10 Stel	10 Stel	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	13.980.000	69,90 %	Rasionalisasi pagu anggaran dan pembatasan kehadiran peserta kegiatan sebagai dampak adanya pandemi Covid 19.	Diberlakukannya pembatasan sosial pada kehadiran peserta kegiatan dengan menjaga jarak dan membatasi tatap muka secara langsung.
	Terlaksananya Pelatihan TTG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kegiatan Pelatihan TTG	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	12.964.000	99,72 %		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.393.400	99,47 %		
	Pelatihan tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 Orang	100 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.648.300	99,46 %		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	97.975.000	97,98 %		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.975.000	99,97 %		
	Terlaksananya Pelatihan Tata Rias	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Motorik Anak	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Menjahit	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	40.725.744	81,45 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10 Titik Lokasi	10 Titik Lokasi	100,00 %		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Bagendung telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK CURUG KEPUH RT 05/02	120	M2	125,2	M2	20.180.000
I	PAVING BLOCK	LINK LEBAK GEBANG RT 10/05	206	M2	214,4	M2	30.790.000
II,III	TPT	LINK CURUG KATIMAHA RT 01/01	99,79	M3	115	M3	92.010.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Bagendung pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 jenis Pekerjaan yang terdiri atas pembangunan paving blok sebanyak 2 pekerjaan dengan total realisasi seluas 339,6 M2 yang dilaksanakan seluruhnya di termin I dan pembangunan TPT dengan volume 115 M3 yang dilaksanakan di termin II dan III, Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 142.980.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Bagendung juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.katimaha RT 01 RW 01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Curug pamenting RT.06/03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Curug sekolah RT.04/02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Curug pamenting RT.06/03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Curug kepuh RT.05/02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Curug kepuh RT.05/02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Curug kepuh RT.05/02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Curug sekolah RT.03/02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Curug sekolah RT.03/02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Curug kepuh RT.05/02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link lebag gebang RT.10/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Bagendung sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

4. KELURAHAN KETILENG

Tabel 3.1.4.1k.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ketileng)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN KETILENG		1.590.803.622	1.526.732.518	95,97 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		486.007.000	458.312.605	94,30 %		
Penyediaan jasa surat menyurat		2.000.000	1.980.000	99,00 %		
	Tersedianya Komponen Dasar Surat Menyurat Di Kelurahan Ketileng	416 Lembar/ 2 Jenis	416 Lembar/ 2 Jenis	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		46.314.612	39.072.605	84,36 %		
	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor		221.900.000	221.900.000	100,00 %		
	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	14 Bulan	14 Bulan	100,00 %		
Penyediaan jasa promosi dan propaganda		10.000.000	10.000.000	100,00 %		
	Tersedianya promosi dan propaganda	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Penyediaan alat tulis kantor		10.000.000	10.000.000	100,00 %		
	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	8 Jenis	8 Jenis	100,00 %		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		9.000.000	9.000.000	100,00 %		
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100,00 %		
Penyediaan peralatan rumah tangga		1.500.000	1.500.000	100,00 %		
	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8 Jenis	8 Jenis	100,00 %		
Penyediaan makanan dan minuman		7.955.000	7.395.000	92,96 %		
	Tersedianya makanan dan minuman harian kantor	6 Jenis	5 Jenis	83,33 %		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		29.989.000	29.989.000	100,00 %		
	Tersedianya alat Infocus, Layar Infocus, Alat	5 Unit	5 Unit	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penghancur Kertas, Meja Kerja dan Kursi kerja Pejabat					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		29.840.000	29.840.000	100,00 %		
	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Tersedianya Rehab Atap Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Tersedianya Walpaper Dinding Ruangan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		44.505.000	36.708.000	82,48 %		
	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	7 Unit	7 Unit	100,00 %		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		3.930.000	3.930.000	100,00 %		
	Tersedianya pemeliharaan Air Conditioner (AC) Kantor	16 Unit	16 Unit	100,00 %		
Pemeliharaan rutin/berkala komputer		2.684.000	2.684.000	100,00 %		
	Tersedianya pemeliharaan Komputer dan printer	14 Unit	14 Unit	100,00 %		
Penyediaan pakaian olahraga		14.784.000	14.784.000	100,00 %		
	Tersedianya pakaian olahraga	16 Stel	16 Stel	100,00 %		
Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan		12.075.388	0.00	0,00 %	Hal ini dikarenakan tidak terakomodirnya pelayanan dari BPJS sehingga anggaran BPJS tidak dapat terserap.	Pada tahun selanjutnya, diupayakan koordinasi yang baik antara pihak Kelurahan Ketileng dengan pihak BPJS terkait proses pendaftaran, pembayaran ataupun penagihan.
	Tersedianya jaminan kesehatan Pegawai Non ASN	7 Orang	0 Orang	0,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu		8.100.000	8.100.000	100,00 %		
	Tersedianya pakaian batik tradisional dan Baju Muslim	18 Stel	18 Stel	100,00 %		
Pelaksanaan Musrenbangkel (n+1)		15.000.000	15.000.000	100,00 %		
	Tersedianya kegiatan Musrenbangkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.280.000	5.280.000	100,00 %		
	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar/majalah	528 Eksemplar	528 Eksemplar	100,00 %		
Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah		1.150.000	1.150.000	100,00 %		
	Tersedianya Dokumen Penganggaran Kelurahan Ketileng	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100,00 %		
Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)		10.000.000	10.000.000	100,00 %		
	Tersedianya Kegiatan Pra Musrenbangkel	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.104.796.622	1.068.419.913	96,71 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		70.600.000	67.720.000	95,92 %		
	Tersedianya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		171.596.622	171.596.622	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		229.200.000	229.200.000	100,00 %		
	Tersedianya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		1.480.000	1.480.000	100,00 %		
	Tersedianya peningkatan kualitas layanan publik (simpul paten)	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		51.045.000	50.287.000	98,52 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		26.500.000	26.500.000	100,00 %		
	Tersedianya Sosialisasi Bank Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya Pelatihan Pengolahan Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		36.625.000	36.425.000	99,45 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantau Jentik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Germas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		8.375.000	8.375.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan 10 Program PKK	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		45.500.000	45.121.385	99,17 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pelatihan Pengelasan	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		24.200.000	24.200.000	100,00 %		
	Tersedianya Honorarium	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi Antar Mitra Pemerintah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya Seragam LPM	10 Stel	10 Stel	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	15.000.000	75,00 %	Rasionalisasi pagu anggaran dan pembatasan kehadiran peserta kegiatan sebagai dampak adanya pandemi Covid 19.	Diberlakukannya pembatasan sosial pada kehadiran peserta kegiatan dengan menjaga jarak dan membatasi tatap muka secara langsung.
	Terlaksananya Pemantauan dan Supervisi Terhadap Seluruh Sasaran Yang Dibina Oleh Perangkat Daerah di Masing-masing Kelurahan	100 Ok	100 Ok	100,00 %		
	Terlaksananya Pemutakhiran data Usaha Mikro Kecil (UMK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		3.675.000	3.000.000	81,63 %		
	Tersedianya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	108.313.900	94,19 %		
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.286.500	98,90 %		
	Pelatihan kader kesehatan masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Pembuatan Sumur Resapan Di Wilayah Kelurahan Ketileng	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.456.000	99,37 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	31.458.506	62,92 %	untuk pemasangan jaringan titik Wifi internet harga pemasangan dan pemeliharaannya jauh lebih ekonomis harganya. Sehingga target anggaran tidak sepenuhnya terserap.	Penyerapan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi).
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Ketileng telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK. KETILENG TIMUR RT04/01	242	M2	262	M2	38.590.000
I	RUTILAHU	LINK. PAGEBANGAN RT 09/03	1	PKT	1	PKT	16.500.000
II	RUTILAHU	LINK. KETILENG BARAT RT 06/02	1	PKT	1	PKT	16.500.000
II	RUTILAHU	LINK. KETILENG BARAT RT 06/02	1	PKT	1	PKT	16.500.000
III	RUTILAHU	LINK. KETILENG TIMUR RT 05/01	1	PKT	1	PKT	16.500.000
III	PAVING BLOCK	LINK. KETILENG TIMUR RT 05/01	75	M2	101	M2	15.150.000
III	DRAINASE	LINK. KETILENG TIMUR RT 03/01	15	M3	17,6	M3	26.117.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Ketileng pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 jenis Pekerjaan yang terdiri atas pembangunan paving blok sebanyak 2 pekerjaan dengan total realisasi seluas 363 M2 yang dilaksanakan di termin I dan III dan pembangunan Rutilahu sebanyak 4 Paket yang dilaksanakan sebanyak 1 unit di termin 1, 2 unit di termin 2 dan 1 unit di termin 3, dan terakhir drainase di termin 3 dengan volume 17,6 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 145.857.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Ketileng juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Ketileng Timur RT 05/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Ketileng Timur RT 01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Ketileng Timur RT 01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Ketileng Timur RT 06/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pagebangan RT 12/03	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pagebangan RT 12/03	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Ketileng sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

5. KELURAHAN CIWEDUS

Tabel 3.1.4.1k.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ciwedus)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN CIWEDUS		1.798.503.622	1.755.469.070	97,61 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		441.264.000	427.483.398	96,88 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.357.239.622	1.327.985.672	97,84 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		9.750.000	9.750.000	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		169.715.622	169.715.440	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	5 Titik/Lokasi	5 Titik/Lokasi	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		461.800.000	461.773.600	99,99 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	44 Orang	44 Orang	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		8.000.000	8.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		2.000.000	2.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		61.684.000	61.684.000	100,00 %		
	Terlaksananya PHBI & PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		7.200.000	7.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Jumsih	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi bank sampah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan pelatihan pengolahan sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		1.500.000	1.500.000	100,00 %		
	Terlaksananya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		43.390.000	31.790.000	73,27 %	Adanya ketidaksesuaian kode rekening pada belanja bahan laboratorium/reagent sehingga sebagian pagu	Pada tahun berikutnya, Diperlukan penganalisaan dalam penginputan kode rekening secara cermat agar tidak

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					anggaran tidak dapat direalisasikan.	terulang kembali kesalahan kode rekening.
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantau Jentik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Peserta Sosialisasi Penanganan Pasien ODGJ Pada Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penangan dan Pembekalan Kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Screeneng Kesehatan Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000	29.199.000	100,00 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.000.000	20.000.000	90,91 %		
	Terlaksananya Pemantauan dan Supervisi Terhadap Seluruh Sasaran Yang dibina oleh Perangkat Daerah di masing-masing Kelurahan	100 Ok	100 Ok	100,00 %		
	Terlaksananya pemutahiran data usaha mikro kecil (UMK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		25.000.000	25.000.000	0,00 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Bidang	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan					
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.342.000	99,43 %		
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 Orang	100 Orang	100,00 %		
	Penguatan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga keamanan /ketertiban kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	62.498.000	96,15 %		
	Pelatihan Kader Kesehatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Masyarakat Bidang Ekonomi Pembangunan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	83.797.000	97,44 %		
	Pelatihan Sablon	20 Orang	20 Orang	100,00 %		
	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	20 Orang	20 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	39.736.632	79,47 %		
	Jumlah Titik Pemasangan WIFI	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Ciwedus telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	LINK CIWEDUS RT 10 RW 02	17,64	M3	23,31	M3	26.050.000
I	DRAINASE	LINK CIWEDUS BARU RT 01 RW 02	28,7	M3	34,98	M3	33.430.000
II	DRAINASE	LINK KEDUNG BULUS RT 02/01	32,62	M3	47,32	M3	46.290.000
III	TPT	LINK PAKUNCEN RT 04/03	19,88	M3	20,61	M3	20.990.000
III	PAVING BLOCK	LINK PAKUNCEN RW 03	95	M3	142,67	M3	17.498.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Ciwedus pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 jenis Pekerjaan yang terdiri atas pembangunan drainase sebanyak 3 pekerjaan dengan total realisasi volume 105,61M3 yang dilaksanakan di termin I dan II dan pembangunan TPT dengan volume 20,61 M3 di termin 3 serta paving blok seluas 142,67 M2 di termin 3, dan terakhir drainase di termin 3 dengan volume 17,6 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 144.258.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Ciwedus juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI KEUANGAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Bumi Rakata Asri RW 07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Ciwedus sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 95% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Cilegon Kota Cilegon rata-rata sebesar 86%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Cilegon dalam melaksanakan kegiatan teknis maupun non teknis memiliki 2 (*dua*) program yaitu :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada Kecamatan Cilegon, terdapat 4 (*empat*) indikator kinerja yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral
Jumlah ketersediaan data dan informasi sektoral yang dimiliki Kecamatan Cilegon sebanyak 2 dokumen yaitu; dokumen Buku Profil Kecamatan Cilegon dan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cilegon Sehingga diperoleh nilai rata-rata ketersediaan data dan informasi sektoral mencapai 100%. Oleh karena itu, maka nilai persentase ketersediaan data dan informasi sektoral realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 86%, maka capaiannya 116,28%.
 - 2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
Unit sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Cilegon yang terdaftar pada kartu inventaris barang dan aset untuk jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi Baik (B) sebanyak 107 Unit dibagi jumlah total keseluruhan sarana dan prasarana perkantoran yang ada sebanyak 126 Unit. Sehingga diperoleh nilai rata-rata sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Cilegon yang dalam kondisi baik mencapai 84,92%. Oleh karena itu, maka nilai persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik realisasi kinerjanya mencapai 84,92% dari yang ditargetkan 86%, maka capaiannya 98,74%.

3) Tingkat disiplin aparatur

Jumlah total keseluruhan nilai persentase capaian masuk kerja pegawai Kecamatan Cilegon dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 dengan memperoleh capaian 86% atau dengan jumlah pegawai yang hadir sebanyak 116 Orang. Oleh karena itu, maka tingkat disiplin aparatur realisasi kinerjanya mencapai 86% dari yang ditargetkan 96%, maka capaiannya 89,58%. Sedangkan untuk mengetahui nilai persentase tidak masuk kerja/ketidakhadiran pegawai dengan mengakumulasi nilai *hari tidak masuk kerja pegawai selama 1 (satu) tahun yang diperoleh dari (jumlah hari kerja pegawai yang datang terlambat, pulang cepat, ijin, cuti, sakit, dinas luar dan tanpa keterangan) dibagi hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikali seratus persen*. Sehingga diperoleh jumlah total keseluruhan nilai persentase capaian tidak masuk kerja/ketidakhadiran pegawai Kecamatan Cilegon dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 dengan memperoleh capaian 14% atau dengan jumlah pegawai yang tidak hadir sebanyak 19 Orang.

4) Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*)

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program dengan mengakumulasi *proses pencairan pendanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran kas dengan jumlah realisasi cash budget (anggaran kas) Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV dalam (persentase) dibagi 4 Triwulan*. Adapun untuk mengetahui kesesuaian realisasi keuangan dengan menjumlahkan anggaran kas Kecamatan Cilegon pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Ketersesuaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Anggaran Kas (Cash Budget)
Pada Kecamatan Cilegon Tahun Anggaran 2020

Anggaran Kas	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Triwulan I	792.915.000,-	482.215.682,-	60,82
Triwulan II	752.727.274,-	615.013.126,-	81,70

Triwulan III	502.256.000,-	545.638.058,-	100,00
Triwulan IV	470.159.614,-	793.956.447,-	100,00
Jumlah Total (Rp.)	2.518.057.888,-	2.436.823.313,-	85,63

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jumlah anggaran kas Kecamatan Cilegon dengan target triwulan I Rp. 792.915.000,- dan realisasi anggarannya Rp. 482.215.682,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan I mencapai 60,82%. Untuk target triwulan II Rp. 752.727.274,- dan realisasi anggarannya Rp. 615.013.126,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan II mencapai 81,70%. Kemudian untuk target triwulan III Rp. 502.256.000,- dan realisasi anggarannya Rp. 545.638.058,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan III mencapai 100,00%. Selanjutnya untuk target triwulan IV Rp. 470.159.614,- dan realisasi anggarannya Rp. 793.956.447,- maka diperoleh kesesuaian anggaran kas triwulan IV mencapai 100,00%.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Cilegon, terdapat 2 (*dua*) indikator kinerja yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*)

Untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) pada seluruh Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon dengan mengakumulasikan *jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi anggaran DPWKel dikali 100% (seratus persen)*. Adapun jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terserap/terrealisasi pada Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon sebesar Rp. 845.893.675,- dibagi jumlah total pagu anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon sebesar Rp. 845.956.110,- dikali 100% (*seratus persen*). Sehingga diperoleh Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) dengan realisasi kinerjanya mencapai 99,99% dari yang ditargetkan 93%, maka capaiannya 107,52%. Adapun tabel realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) sebagai berikut :

Tabel

Realisasi Anggaran DPWKel Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon

Tahun Anggaran 2020

No.	Kelurahan	Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rp).	Realisasi Kinerja Anggaran/Keuangan (Rp).	Capaian (%)
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			
1.	Ciwaduk	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.215.622,-	168.215.600,-	100,00
2.	Bendungan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.215.622,-	168.214.022,-	100,00
3.	Bagendung	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.212.622,-	168.151.991,-	99,96
4.	Ketileng	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	171.596.622,-	171.596.622,-	100,00
5.	Ciwedus	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	169.715.622,-	169.715.440,-	100,00
Jumlah Total Realisasi Anggaran DPWKel (Rp).			845.956.110,-	845.893.675,-	99,99

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka meningkatnya penyerapan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) Se-Kecamatan Cilegon untuk pembangunan fisik di wilayah Kelurahan dengan terealisasinya beberapa pembangunan terutama terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana peningkatan jalan lingkungan dengan adanya kerjasama yang baik diantara anggota Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan di lingkungannya yang meliputi : Pembangunan Drainase, Paving Blok, Tembok Penahan Tanah (*TPT*), Rumah Tidak Layak Huni (*Rutilahu*), Posyandu, Rehab Musholla, Gapura Merah Putih dan Pos Kamling/Ronda. Sehingga dengan adanya pembangunan yang telah terwujud diharapkan masyarakat di lingkungannya agar dapat menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah terbangun dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk kepentingan umum.

2) Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan

Untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Cilegon dengan mengakumulasikan *jumlah pelayanan yang memiliki SOP dibagi jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan dikali 100% (seratus persen)*. Adapun 2 (*dua*) jenis pelayanan yang terdapat pada Kecamatan Cilegon yaitu; (1). Pelayanan Perizinan; dan (2). Pelayanan Non Perizinan. Sehingga dari beberapa jenis pelayanan yang ada pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Cilegon yang sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) dengan mengakumulasikan jumlah pelayanan yang memiliki SOP sebanyak 31 Standar Operasional Prosedur (*SOP*) Pelayanan dibagi jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan sebanyak 31 Pelayanan dikali 100% (seratus persen), maka diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 100%. Terdapat beberapa jenis Pelayanan Perizinan yang sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (*SOP*) sebanyak 18 SOP Pelayanan yang meliputi :

- 1) *SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);*
- 2) *SOP Pelayanan Administrasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);*
- 3) *SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan Hinder Ordonantie (HO);*
- 4) *SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian;*
- 5) *SOP Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Ijin Menara Telekomunikasi;*
- 6) *SOP Pelayanan Perluasan Izin Tempat Usaha (SITU);*
- 7) *SOP Pelayanan Perluasan Izin Gangguan (HO);*
- 8) *SOP Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);*
- 9) *SOP Pelayanan Balik Nama Ijin Tempat Usaha (SITU);*
- 10) *SOP Pelayanan Daftar Ulang Izin Gangguan (HO);*
- 11) *SOP Pelayanan Balik Nama Izin Gangguan (HO);*
- 12) *SOP Pelayanan Pemberian Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling;*
- 13) *SOP Pelayanan Daftar Ulang Izin Tempat Usaha (SITU);*
- 14) *SOP Pelayanan Pemberian Izin Gangguan (HO) Terhadap Usaha Intensitas Gangguan Kecil;*
- 15) *SOP Pelayanan Pemberian Izin Pemasangan Reklame;*
- 16) *SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Pendidikan Dasar dan Menengah yang diselenggarakan Masyarakat;*

- 17) *SOP Pelayanan Rekomendasi Ijin Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat; dan*
- 18) *SOP Pelayanan Pemberian Ijin Tempat Usaha Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).*

Sedangkan untuk jenis Pelayanan Non Perizinan yang sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 13 SOP Pelayanan yang meliputi :

- 1) *SOP Administrasi Surat Keluar;*
- 2) *SOP Pelayanan Administrasi Legalisasi Surat-Surat;*
- 3) *SOP Administrasi Surat Masuk;*
- 4) *SOP Pelayanan Keterangan Ahli Waris;*
- 5) *SOP Pelayanan Administrasi Surat Pengantar SKCK;*
- 6) *SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI/WNA Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kota Cilegon;*
- 7) *SOP Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI/WNA Antar Kecamatan Dalam Wilayah Kota Cilegon;*
- 8) *SOP Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);*
- 9) *SOP Pelayanan Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);*
- 10) *SOP Pelayanan Pengantar Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK);*
- 11) *SOP Pelayanan Situ Bebas Gangguan Tidak Berbadan Hukum;*
- 12) *SOP Pelayanan Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan*
- 13) *SOP Pelayanan Surat Peralihan Hak Atas Tanah/Bangunan.*

Sehingga diperoleh nilai Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Cilegon realisasi kinerjanya mencapai 100% dari yang ditargetkan 93%, maka capaiannya 107,53%.

Adapun beberapa kegiatan pada Kecamatan Cilegon yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75%, diantaranya meliputi :

1. Kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

2. Kegiatan Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
3. Kegiatan Penataan Lingkungan Kecamatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
4. Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
5. Kegiatan Sosialisasi Narkoba dan Miras tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
6. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
7. Kegiatan Dukungan Operasional Kessos Berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
8. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

9. Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan. Adapun realisasi kinerjanya 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya honorarium tim pelaksana kegiatan yang tidak terserap akibat dampak pandemi Covid 19. Sehingga diberlakukannya pembatasan sosial pada peserta kegiatan dengan menjaga jarak dan membatasi tatap muka secara langsung terutama kegiatan monitoring sebagai upaya untuk pencegahan agar meminimalisir/mengurangi penyebaran wabah Covid 19.

Adapun beberapa kegiatan pada Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75%, diantaranya meliputi :

1. Kelurahan Ciwaduk, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

- 2) Kegiatan Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi kinerja 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,99%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan pemakaian listrik dan internet disesuaikan dengan kebutuhan kerja.

2. Kelurahan Bendungan, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWkel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten) tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 5) Kegiatan Dukungan Program Kampung Iklim tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 6) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 7) Kegiatan Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

- 8) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi kinerja 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 66,76%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan pemakaian listrik dan internet disesuaikan dengan kebutuhan kerja.

3. Kelurahan Bagendung, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Penyediaan Pakaian Olahraga tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWkel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 4) Kegiatan Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 5) Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 6) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 7) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi kinerja 12 Bulan dari yang ditargetkan 12 Bulan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 52,94%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan pemakaian listrik, internet dan TV Kabel disesuaikan dengan kebutuhan kerja.
 - 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Promosi dan Propaganda. Adapun realisasi kinerja 0 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserapnya anggaran tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk penyediaan berupa media cetak.
 - 10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Adapun realisasi kinerja 0 Item dari yang ditargetkan 2 Item dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserapnya anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk penyediaan bahan baku bangunan.
 - 11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%. Adapun realisasi kinerja 0 Unit dari yang ditargetkan 11 Unit dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserapnya anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk service AC dan penambahan Freon.
 - 12) Kegiatan Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan. Adapun realisasi kinerja 5 Dokumen dari yang ditargetkan 5 Dokumen dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 69,90%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran dan pembatasan kehadiran peserta kegiatan sebagai dampak adanya pandemi Covid 19. Sehingga diberlakukannya pembatasan sosial pada kehadiran peserta kegiatan dengan menjaga jarak dan membatasi tatap muka secara langsung.
4. Kelurahan Ketileng, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 3) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

- 4) Kegiatan Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan. Adapun realisasi kinerja 0 Orang dari yang ditargetkan 7 Orang dan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Hal ini dikarenakan tidak terakomodirnya pelayanan dari BPJS sehingga anggaran BPJS tidak dapat terserap.;
- 6) Kegiatan Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan. Adapun realisasi kinerja 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 75,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran dan pembatasan kehadiran peserta kegiatan sebagai dampak adanya pandemi Covid 19.
- 7) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (*DID Tambahan*). Adapun realisasi kinerja 10 Titik Pemasangan Wifi dari yang ditargetkan 10 Titik Pemasangan Wifi dan realisasi kinerja 2 Kali Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM dari yang ditargetkan 2 Kali Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 62,92%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan untuk pemasangan jaringan titik Wifi internet harga pemasangan dan pemeliharaannya jauh lebih ekonomis harganya. Sehingga target anggaran tidak sepenuhnya terserap (efisiensi).
5. Kelurahan Ciwedus, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Studio tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 3) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 4) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

- 5) Kegiatan Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 6) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kegiatan Kepemudaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 7) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan. Adapun realisasi kinerja 0 Orang dari yang ditargetkan 2 Orang dan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Hal ini dikarenakan tidak terakomodirnya pelayanan dari BPJS sehingga anggaran BPJS tidak dapat terserap.
- 9) Kegiatan Penyediaan jasa promosi dan propaganda. Adapun realisasi kinerja 0 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 58,33%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk penyediaan berupa media cetak. Sehingga harus menunggu perubahan anggaran;
- 10) Kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat. Adapun realisasi kinerja 6 Kegiatan Ketuk Pintu dari yang ditargetkan 6 Kegiatan, terealisasinya kinerja 4 Kegiatan Pemantau Jentik Nyamuk dari yang ditargetkan 4 Kegiatan, terealisasinya kinerja 1 Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari yang ditargetkan 1 Kegiatan, terealisasinya 1 Kegiatan Sosialisasi Penanganan Pasien ODGJ Pada Keluarga dari yang ditargetkan 1, terealisasinya kinerja 1 Kegiatan Sosialisasi Penanganan dan Pembekalan Kader dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan 1 Kegiatan Screening Kesehatan Lansia dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dengan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 73,27%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya ketidaksesuaian kode rekening pada belanja bahan laboratorium/reagent sehingga sebagian penggunaan pagu anggaran tidak direalisasikan dan perlu penganalisaan dalam penginputan kode rekening secara cermat agar tidak terulang kembali kesalahan kode rekening.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk penyerapan realisasi kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Cilegon pada Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan nilai rata-rata realisasi kinerjanya

mencapai 100% dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 96,77%. Sedangkan untuk penyerapan realisasi anggaran Kelurahan Se-Kecamatan Cilegon pada Program Dukungan Pelayanan Kelurahan dan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan memperoleh nilai rata-rata penyerapan realisasi anggarannya mencapai 96,99%. Sehingga dapat disimpulkan meningkatnya ketercapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja tersebut dikarenakan optimalnya kinerja pegawai aparatur Kecamatan Cilegon dan Kelurahan dalam menjalankan program dan kegiatan secara professional, berkompeten dan akuntabel dengan berbagai aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Sehingga meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (*PATEN*) Cilegon dan Kelurahan dengan didukung terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

B.10. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.10a Permasalahan:

1. Adanya bencana Wabah/Pandemi Covid 19, sehingga terkendala beberapa kegiatan teknis Kecamatan dan Kelurahan yang akan dilaksanakan;
2. Terdapat pagu anggaran kegiatan yang dirasionalisasikan dan difocusing (*pengurangan atau pengalihan pagu anggaran*) Kegiatan untuk pembiayaan dan penanganan Covid 19;
3. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan keterkaitan dengan uraian kebutuhan belanja;
4. Terdapat uraian belanja kegiatan yang melebihi harga satuan pada Satuan Standar Harga (*SSH*);
5. Adanya keterlambatan tagihan premi asuransi dari BPJS dan menunggak pada saat pembayaran premi BPJS;
6. Adanya beberapa pegawai dalam keikutsertaan keanggotaan BPJS masih terdata ganda keanggotaan BPJS;
7. Belum memadainya kecukupan, keterbauran dan pengelolaan data, informasi ketercapaian indikator program dan kegiatan.

B.10b Solusi:

1. Dilaksanakannya pembatasan sosial, menjaga interaksi sosial dengan mematuhi Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga pegawai Kecamatan Cilegon dan Kelurahan melaksanakan aktifitas kegiatan kerja dengan

melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan gerakan 5M (*Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi*) dan melaksanakan pertemuan rapat kegiatan secara daring/pembatasan peserta rapat dengan menjaga jarak, bekerja dari rumah (*work from home*) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tetap mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19.

2. Perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasi antar perangkat daerah lintas sektoral terkait Belanja Tidak Terduga (*BTT*) untuk penanganan Covid 19 dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara terpadu;
3. Supaya ditingkatkan dengan menganalisa perencanaan secara cermat terkait kebutuhan belanja;
4. Uraian belanja kegiatan disesuaikan sebagaimana yang terdapat pada pedoman Satuan Standar Harga (*SSH*);
5. Perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi pihak Kelurahan dengan pihak BPJS terkait pembayaran jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan premi BPJS;
6. Perlu adanya koordinasi terkait keanggotaan BPJS agar tidak terjadi keanggotaan ganda pada BPJS;
7. Perlu ditingkatkan ketersediaan data dan informasi pengolahan data capaian indikator program dan kegiatan.

D. KECAMATAN CIWANDAN

Tabel 3.1.4.11 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Ciwandan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1,633,940,165.00	1,572,726,670.00	96.25%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Ciwandan)	100	84.00	84.00%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Ciwandan)	100	84.00	84.00%		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Ciwandan)	100	88.00	88.00%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Kecamatan Ciwandan	100	83.00	83.00%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		706,100,792.00	652,406,274.00	92.40%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Ciwandan)	100.00	99,38	99,38%		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Ciwandan)	100.00	95.00	95.00%		
Penyusunan Profil Kecamatan		6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%		
	Adanya Profil Kecamatan	5 Buku	5 Buku	100.00%		
Pembinaan Administrasi Kelurahan		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan Se-Kecamatan Ciwandan	75 Orang	75 Orang	100.00%		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%		
	Adanya peran PKK kecamatan Ciwandan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pelaksanaan Musrenbangcam		70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		44,000,000.00	43,990,000.00	99.98%		
	Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan Ciwandan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%		
Penyelenggaraan Paten		76,100,792.00	75,604,750.00	99.35%		
	Adanya Penyelenggaraan Paten	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50,000,000.00	49,346,400.00	98.69%		
	Terlaksananya kegiatan MTQ	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan Sarpraswil DPWkel (Monitoring DPWkel)		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%		
	Tersusunnya pengawasan melekat (waskat) se- kecamatan Citangkil	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%		
Lomba Kelurahan		10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya lomba kelurahan di kelurahan se- kecamatan Ciwandan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100.00%		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)		30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%		
	Adanya dukungan kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOPIMKA)	12 Bulan	12 Bulan	100.00%		
Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%		
	Meningkatkan pemberdayaan organisasi/ lembaga kepemudaan dilingkungan Kecamatan Ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup		50,000,000.00	44,000,000.00	88.00%		
	Meningkatkan Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek		60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%		
	Untuk meningkatkan Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek di Lingkungan Kecamatan Ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%		
	Untuk meningkatkan KORWASDAL Penanggulangan Bencana dilingkungan Kecamatan Ciwandan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		50,000,000.00	49,567,500.00	99.14%		
	Untuk meningkatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)		100,000,000.00	53,897,624.00	53.90%	1. Kendala Pelaksanaan 2 bulan 2. Anggaran Pendamping tidak boleh di serap 3. Pemasangan Wifi dilaksanakan November imbasnya serapan tidak maksimal	Waktu Pelaksanaan di Triwulan I . sd III

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 84,75% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- a. Tingkat disiplin aparatur;
Capaian kinerja pada Tingkat disiplin pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 , persentase capaian kinerjanya adalah 88,00% dari yang ditargetkan sebesar 100%.
- b. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas);
Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 83,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020
- c. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral.
Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 84,00% dari yang ditargetkan sebesar 100,00%.
- d. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Ciwandan)

Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 84,00% dari yang ditargetkan sebesar 100,00%.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 97,19% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- a. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan;
Capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Ciwandan pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 95,00% dari yang ditargetkan sebesar 100%.
- b. Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel).
Capaian kinerja pada Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 99,38% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

Secara umum, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, tidak ada permasalahan yang signifikan, hampir seluruh kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada tahun 2020 disebabkan oleh merebaknya Pandemi COVID-19, yang mengharuskan refocusing anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi, serta pada kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka harus dialihkan menjadi virtual atau daring ataupun juga melakukan pembatasan peserta, sehingga anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalisasikan.

1. KELURAHAN RANDAKARI

Tabel 3.1.4.11.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Randakari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		444,382,000.00	424,092,919.00	95.43%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.221.444.622.00	1.176.066.694.00	96.28%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		90.400.000.00	89.400.000.00	98.89%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		176.273.622.00	176.248.623,00	99.99%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	5.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		345.415.000.00	344.665.000.00	99.78%		
	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		1.800.000.00	1.800.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		4.530.000.00	4.530.000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		19.825.000.00	19.825.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan	7.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		40.000.000.00	40.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya kegiatan jum'at bersih	11.00 Bulan	11.00 Bulan	100.00%		
	Tersedianya bibit tanaman pucuk merah	150.00 Batang	150.00 Batang	100.00%		
	Tersedianya bak sampah	40.00 Unit	40.00 Unit	100.00%		
	Pengadaan Sarpras Kebersihan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000.00	49.750.000.00	99.50%		
	Terfasilitasi Kegiatan Koordinasi Kelurahan Sehat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Asuhan Mandiri Tanaman Obat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pemantauan Jentik Nyamuk Secara Berkala	12.00 Kegiatan	12.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Penyuluhan GERMAS	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		6.226.000.00	6.226.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000.00	28.825.000.00	98.72%		
	Tersedianya Honorarium LPM Kelurahan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Seragam LPM Kelurahan	10.00 Stel	10.00 Stel	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000.00	24.950.000.00	99.80%		
	Terlaksananya Pemantauan dan Super Visi terhadap seluruh sasaran yang dibina oleh perangkat daerah di masing2 kelurahan	100.00 Ok	100.00 Ok	100.00%		
	terlaksananya pemutakhiran Data Usaha Mikro Kecil	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	terlaksananya pelatihan TTG	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		16.775.000.00	8.775.000.00	52.31%	Terbatasnya kegiatan pendampingan, akibat adanya PSBB Covid 19	Anggaran di rasionalisasi
	Tersedianya Dokumen Pra RAB	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%		
	Tersedianya Dokumen RAB	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	95.685.000.00	83.20%		
	Terlaksananya kegiatan Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/trantib kelurahan	50.00 %	50.00 %	100.00%		
	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	50.00 %	50.00 %	100.00%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000.00	60.600.400.00	93.23%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan kegiatan pelayanan masyarakat	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	100.000.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	84.755.600.00	98.55%		
	Pelatihan Pembuatan Kue	60.00 %	60.00 %	100.00%		
	Pengembangan Bidang Pendidikan & Kebudayaan	60.00 %	60.00 %	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	40.031.071.00	80.06%		
	Meningkatnya Perekonomian Bagi Masyarakat Kelurahan	100.00%	100.00%	100.00%		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Randakari telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAGAR MAKAM	Link. Serang Ilir RT/RW. 07/02	1	Paket	1	Paket	50.000.000
I	JAMBA KELUARGA	Link. Cirubuh RT/RW. 06/03	1	UNIT	1	UNIT	5.000.000
I	JAMBA KELUARGA	Link. Cirubuh RT/RW. 06/03	1	UNIT	1	UNIT	5.000.000
II	Rehab Masjid	Link. Serang Ilir RT.01 RW. 02	1	UNIT	1	UNIT	25.000.000
II	TPT	Link. Penyurungan RT. 03 RW.01	26	M1	26	M1	19.600.000
III	RTLH	Link. Cirubuh RT.06 RW.03	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
III	Rehab Masjid	Link. Gelereng RT.05 RW.02	2	UNIT	1	UNIT	25.000.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Randakari pada tahun 2020 adalah sebanyak 7 Pekerjaan yang terdiri atas 1 Paket Pembangunan Pagar Makam, 2 Unit Pembangunan Jamban Keluarga yang dilaksanakan pada Termin I, serta Rehabilitasi Masjid sebanyak 1 unit dan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) seluas 19,225 M3, melebihi target prakiraan seluas 18,46 M3. Sedangkan pada Termin III, paket pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1 unit dan Rehab Masjid sebanyak 1 unit, Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 146.100.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Randakari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sukasari RT.01 RW. 01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sukasari RT.02 RW. 01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Penyurungan RT.02 RW.01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Penyurungan RT.02 RW.01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Penyurungan RT.02 RW.01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Penyurungan RT.02 RW.01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Gelereng RT.04 RW.02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Gelereng RT.04 RW.02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Serang Ilir RT.02 RW. 02	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Gelereng RT.05 RW.02	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Gelereng RT.05 RW.02	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Randakari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Randakari tidak terdapat kendala.

2. KELURAHAN KEPUH

Tabel 3.1.4.11.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kepuh)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		422,904,000.00	394,357,714.00	93.25%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.132.541.538.00	1.074.230.952.00	94.85%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		85.000.000.00	74.650.000.00	87.82%		
	Tersedianya Honor BABINKAMTIBMAS, Honor LINMAS dan Honor Monitoring	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		192.476.538.00	191.426.538,00	99.45%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		282.750.000.00	282.075.000.00	99.76%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
	Tersedianya Honorarium RT/RW	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
	Tersedianya Pakaian RT/RW	27.00 Stel	27.00 Stel	100.00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		540.000.00	540.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		31.500.000.00	31.500.000.00	100.00%		
	Tercapainya Kegiatan PHBI/PHBN	18.00 Kegiatan	18.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan program kampung iklim		6.750.000.00	6.750.000.00	100.00%		
	Tersedianya Dukungan program kampung iklim	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000.00	30.715.000.00	61.43%	Kegiatan terhenti karena ada PSBB dampak Pandemi Covid 19	Anggaran di rasionalisasi
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	11.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	63.63%	Kegiatan terhenti karena ada PSBB dampak Pandemi Covid 19	Anggaran di rasionalisasi
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		6.725.000.00	6.725.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25.800.000.00	28.825.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.000.000.00	22.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000.00	13.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	109.330.000.00	95.07%		
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ketertiban Kelurahan	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000.00	60.833.500.00	93.59%		
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
	Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	98.925.000.00	98.92%		
	Terbangunnya sarana dan prasarana wilayah kelurahan	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	82.181.000.00	95.56%		
	Pelatihan Service AC	10.00 Orang	10.00 Orang	100.00%		
	Pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	40,329,914.00	80.66%		
	Jumlah titik pemasangan WIFI	10.00 Titik Lokasi	10.00 Titik Lokasi	100.00%		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2.00 Kali	1.00 Kali	50.00%	Kegiatan dilaksanakan hanya sekali karena di masa pandemi tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa	

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kepuh telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	Link. Umbul Jabar RT/RW. 04/01	25	M1	10,9	M3	11.660.000
I	PAVING BLOCK	Link. Jintung RT/RW. 22/04	121	M2	149	M2	22.910.000

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	Link. Ciwandan RT/RW. 02/01	70	M2	93	M2	14.300.000
I	PAVING BLOCK	Link. Kaserangan RT/RW. 20/02	105	M2	121	M2	19.140.000
II	TPT	Link. Cikendat RT 14 / 04	45	M1	45	M1	52.840.000
III	PAVING BLOCK	Link. Combong Karet RT/RW. 09/02	276	M2	276	M2	43.270.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Kepuh pada tahun 2020 adalah sebanyak 6 Pekerjaan yang terdiri atas 4 pekerjaan yang dilaksanakan pada Termin I dengan rincian Pembangunan Drainase terealisasi 10,9 M3 melebihi prakiraan target 8,14M3, Pembangunan Paving Block di 3 lokasi dengan total realisasi luas 363 M2 dari prakiraan target 297 M2, dilanjutkan dengan pelaksanaan 1 pekerjaan pembangunan TPT dengan realisasi 59,6 M3 pada Termin II dan terakhir di Termin III pembangunan Paving Blok seluas 302 M2 Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 164.120.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kepuh juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	KEL. Kepuh	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	KEL. Kepuh	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Gunung Asem RT 13/04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK		1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cikendat RT 14/04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cikendat RT 14/04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cikendat RT 14/04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikendat RT 14/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikendat RT 14/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Umbul Jabar RT 04/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Umbul Jabar RT 04/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kepuh sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Kepuh tidak terdapat kendala.

3. KELURAHAN GUNUNG SUGIH

Tabel 3.1.4.11.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gunung Sugih)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		422,904,000.00	394,357,714.00	93.25%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.123.905.622.00	1.044.523.728.00	92.94%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		77.800.000.00	75.750.000.00	97.37%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		174.965.622.00	172.440.622,00	98.56%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	3.00 Kegiatan/Tahun	3.00 Kegiatan/Tahun	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		261.400.000.00	260.050.000.00	99.48%		
	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		1.890.000.00	1.890.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	100.00%	100.00%	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		76.225.000.00	46.250.000.00	60.68%	Jumlah pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena di masa pandemi Covid 19 tidak boleh melaksanakan kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan	Anggaran dirasionalisasi penanganan Covid 19

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan	4.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	75.00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		6.375.000.00	6.375.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	11.00 Bulan	11.00 Bulan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		53.000.000.00	32.180.000.00	60.72%	Jumlah pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena di masa pandemi Covid 19 tidak boleh melaksanakan kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan	Anggaran dirasionalisasi untuk pencegahan dan penanganan covid 19
	Tersedianya Dukungan Kelurahan Sehat	13.00 Kegiatan	6.00 Kegiatan	46.15%	Jumlah pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai target karena di masa pandemi Covid 19 tidak boleh melaksanakan kegiatan yang berpotensi membuat kerumunan	Anggaran dirasionalisasi untuk pencegahan dan penanganan covid 19
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		3.150.000.00	3.150.000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	4.00 Bulan	4.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		20.100.000.00	20.100.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4.00 Kali	4.00 Kali	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000.00	18.875.000.00	94.38%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1.00 Dokumen	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000.00	10.800.000.00	83.08%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	108.829.500.00	94.63%		
	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	50.00 Orang	50.00 Orang	94.63%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000.00	64.041.500.00	98.53%		
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
	Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	100.000.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	80.00%	80.00%	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	84.224.700.00	97.94%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)	25.00 Orang	25.00 Orang	97.94%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	39.567.406.00	79.13%		
	Jumlah titik pemasangan WIFI	10.00 Titik Lokasi	10.00 Titik Lokasi	100.00%		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Gunung Sugih telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	GERBANG MERAH PUTIH	Link. Kopo Masjid RT.02 RW.01	1	Paket	1	Paket	55.000.000
II	PAVING BLOCK	Link. Kopo Masjid RT.02 RW. 01	250,8	M2	250,8,65	M2	44.020.000
III	Rehab Mushola	Link. Kopo Kldul RT. 06 RW.02	1	Unit	1	Unit	15.000.000
III	Drainase	Link. Kopo Landoh RT. 08 RW. 02	162	M1	162	M1	32.974.060

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Gunung Sugih pada tahun 2020 adalah sebanyak 4 Pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan pada Termin I yaitu pembangunan Gerbang Merah Putih di 1 lokasi, pada Termin II dilaksanakan pembangunan Paving Blok

seluas 286,65 M2, melebihi target seluas 250,8 M2, Pada Termin III dilaksanakan 2 paket pekerjaan yaitu Rehab Mushola sebanyak 1 unit. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 146.994.060.

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Gunung Sugih juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pengabuan RT. 09 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pengabuan RT. 09 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Gambiran RT.12 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Gambiran RT.12 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Gambiran RT.12 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Gambiran RT.12 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kopo Masjid RT.02 RW. 01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kopo Masjid RT.02 RW. 01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kopo Nagrek RT. 13 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kopo Nagrek RT. 13 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kopo Nagrek RT. 13 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Gunung Sugih sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Gunung Sugih terdapat kendala yaitu :

1. kelambatan kedatangan material
2. material sudah pecah buis
3. berat tutupnya tidak bisa diangkat 2 -3 orang harus dibantu alat angkut

4. KELURAHAN BANJARNEGARA

Tabel 3.1.4.11.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Banjarnegara)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		652,461,800.00	602.771,928.00	92.38%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.103.526.222.00	1.041.663.072.00	94.40%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		67.000.000.00	60.377.000.00	90.12%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		180.465.622.00	177.987.593,00	98.63%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		243.325.000.00	243.325.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		2.750.000.00	2.750.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		3.800.000.00	3.800.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan		56.054.000.00	40.054.000.00	71.46%	Terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya pandemic covid 19	Angaran dirasionalisasi
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan	4.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	75.00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		3.805.000.00	3.805.000.00	100.00%		
	Tersedianya Dukungan Program Kampung Iklim	90.00 %	90.00 %	100.00%		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		10.526.000.00	10.526.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000.00	41.900.000.00	83.80%		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	10.00 Kegiatan	10.00 Kegiatan	83.80%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		8.110.000.00	8.110.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		24.950.000.00	24.950.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		23.000.000.00	22,960,000.00	99.83%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	100.00 Ok	100.00 Ok	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.740.000.00	13.740.600.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	112.072.200.00	97.45%		
	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	150.00 Orang	150.00 Orang	100.00%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000.00	64.130.400.00	98.66%		
	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan	100.00 Orang	100.00 Orang	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	97.975.000.00	97.98%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	10.00 Titik Lokasi	10.00 Titik Lokasi	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	84.524.000.00	98.28%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)	150.00 Orang	150.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	40.156.079.00	80.31%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)	10.00 Titik Lokasi	10.00 Titik Lokasi	100.00%		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Banjarnegara telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II	DRAINASE	LINK CIGEBLAK RT 18/04	84,14	M3	84,14	M3	115.890.000
III	PAVING BLOCK	Link. Karang Jetak RT 005/002	190	M2	190	M2	34.540.000

Total Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Banjarnegara pada tahun 2020 adalah hanya sebanyak 2 Pekerjaan, cukup sedikitnya pelaksanaan pembangunan sarpraswil kelurahan ini salah satunya disebabkan rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Pelaksanaan pekerjaan pada Termin I dan II yaitu Pembangunan Drainase dengan volume 99,57 M3 dari target prakiraan 84,14 M3, dan terakhir pada Termin III pembangunan Paving Blok seluas 255,61 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 150.430.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Banjarnegara juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK KARANG JETAK RT 06 RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK KARANG JETAK RT 06 RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK KARANG JETAK RT 06 RW 02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK DUKUH RT 08 RW03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK DUKUH RT 08 RW03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK DUKUH RT 08 RW03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEMUGIRING RT02 RW01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEMUGIRING RT02 RW01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEMUGIRING RT02 RW01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEMUGIRING RT01 RW01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEMUGIRING RT01 RW01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Banjarnegara sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Banjarnegara tidak terdapat kendala dan kegiatan terlaksana dengan baik.

5. KELURAHAN TEGAL RATU

Tabel 3.1.4.11.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tegal Ratu)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		652,461,800.00	602.771,928.00	92.38%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.165.670.622.00	1.103.306.995.00	94.65%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		94.000.000.00	94.000.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	35.00 Orang	35.00 Orang	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		169.590.622.00	169.564.063,00	99.98%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	3.00 Kegiatan/Tahun	3.00 Kegiatan/Tahun	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		305.500.000.00	295.175.000.00	96.92%		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		1.980.000.00	1.980.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan		38.000.000.00	38.000.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan	7.00 Kegiatan	7.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		25.000.000.00	23.299.000.00	93.20%		
	Tersedianya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000.00	29.150.000.00	58.30%	Pembatasan kegiatan, karena adanya PSBB Pandemi Covid 19	Anggaran dirasionalisasi
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	25.00 Orang	25.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Ketuk Pintu TB Paru	6.00 Bulan	3.00 Bulan	50.00%	Pembatasan kegiatan, karena adanya PSBB Pandemi Covid 19	Anggaran dirasionalisasi
	Terlaksananya Legiatan Pemantauan Jentik	4.00 Triwulan	2.00 Triwulan	50.00%	Pembatasan kegiatan, karena adanya PSBB Pandemi Covid 19	Anggaran dirasionalisasi
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	5.00 Orang	5.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Intervensi Lanjutan Keluarga Sehat	12.00 Bulan	9.00 Bulan	75.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		27.575.000.00	27.575.000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000.00	20.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000.00	4.390.000.00	33.77%	Kegiatan dilaksanakan secara minimalis karena jumlah peserta yang sedikit karena adanya Pembatasan PSBB akibat Pandemi Covid 19, berimbas tidak terserapnya anggaran makan minum	Anggaran dirasionalisasi
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Kegiatan/Tahun	1.00 Kegiatan/Tahun	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	112.420.000.00	97.76%		
	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/trantib Kelurahan	50.00%	50.00%	100.00%		
	Meningkatnya kesadaran ran kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	50.00%	50.00%	100.00%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.083.000.00	62.130.400.00	95.51%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	50.00%	50.00%	100.00%		
	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50.00%	50.00%	100.00%		
	Meningkatnya Kualitas dan kopetensi kader kesehatan	50.00%	50.00%	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	97.850.000.00	97.85%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	80.00%	80.00%	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	83.970.000.00	97.64%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)	40.00 Orang	40.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	38.825.932.00	77.65%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)	10.00 Titik	10.00 Titik	100.00%		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Tegal Ratu telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	Link.Cigading Rt.01 Rw.01	355	M2	355	M2	63.595.625
II	PAVING BLOCK	Link. Kubang Saron Rt.04 Rw. 02	304,5	M2	304,5	M2	47.696.719

III	PAVING BLOCK	Link. KubangLumbra Rt.12/06	141,5	M2	141,5	M2	26.360.000

Total Seluruh Kegiatan Pembangunan Sarpraswil DPWkel tahun 2020 di Kelurahan Tegal Ratu dialokasikan seluruhnya untuk Pembangunan Paving Blok yang dilaksanakan di 3 lokasi berbeda setiap Terminnya seperti dapat dilihat pada tabel di atas. Total Realisasi Paving Blok yang terbangun dari Termin I sampai dengan III yaitu seluas 921,3 m2 dari target prakiraan 783 m2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 137.652.344

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Tegal Ratu juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Lijajar RT.019 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lijajar RT.019 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lijajar RT.019 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lijajar RT.019 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lijajar RT.013 RW.06	1	UNIT	1	UNIT	

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Tegal Ratu sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWkel di Kelurahan Tegal Ratu tidak terdapat kendala, semua berjalan kondusif.

6. KELURAHAN KUBANGSARI

Tabel 3.1.4.11.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kubangsari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		652,461,800.00	602.771,928.00	92.38%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.104.154.622.00	1.072.525.962.00	97.14%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		85.000.000.00	79.000.000.00	92.94%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		174.090.622.00	173.519.000,00	99.67%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		195.003.000.00	195.003.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)		4.026.000.00	4.026.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan		68.475.000.00	68.475.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan Kelurahan	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan		12.825.000.00	12.825.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		26.000.000.00	26.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya Dukungan Program Kampung Iklim	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		1.675.000.00	1.675.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000.00	43.250.000.00	86.50%		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	6.00 Kegiatan	6.00 Kegiatan.00	100.00%		
Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan		7.860.000.00	7.860.000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000.00	29.200.000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		21.000.000.00	18.425.000.00	87.74%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	87.74%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000.00	13.000.000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000.00	113.291.600.00	98.51%		
	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000.00	64.303.400.00	98.93%		
	Peningkatan Pelayanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000.00	99.125.000.00	99.12%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000.00	84.775.000.00	98.58%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000.00	38.773.362.00	77.55%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)	10.00 Titik Lokasi	10.00 Titik Lokasi	100.00%		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kubangsari telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK CIGADING PASR RT 01/02	60	M2	130,67	M2	11.340.000
I	PAVING BLOCK	LINK KEBANJIRAN RT 02/02	100	M2	106,89	M2	17.230.000
II	TPT	LINK KEBANJIRAN RT 02/02	55,16	M3	57,48	M3	85.380.000
III	DRAINASE	LINK KUBANG WELUT RT 03/04	13,27	M3	29,72	M3	33.610.000

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarpraswil Kelurahan Kubangsari pada tahun 2020 dialokasikan untuk 3 output yaitu Pembuatan Paving Blok, TPT dan Drainase. Pelaksanaan pada Termin I berupa pembangunan Paving Blok di 2 Lokasi dengan total volume terealisasi 237,56 Km², dilanjutkan dengan Pembuatan TPT di Termin II dengan Total realisasi 57,48 M³, dan yang terakhir pelaksanaan pada Termin III berupa pembuatan drainase dengan volume realisasi 29,72 M³. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 147.560.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kubangsari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pagebangan RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. PAGEBANGAN RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. PAGEBANGAN RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. PAGEBANGAN RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kubangsari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Kubangsari tidak terdapat kendala dan berjalan dengan kondusif.

E. KECAMATAN CIBEBER

Tabel 3.1.4.1m Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Cibebber)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KECAMATAN CIBEBER		2.875.380.331	2.737.612.329	95,21 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.149.547.502	2.072.494.911	96,42 %		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Cibebber)	86 %	94,44 %	109,81 %		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Cibebber)	86 %	75,11 %	87,34 %		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Cibebber)	86 %	95,64 %	111,21 %		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Kecamatan Cibebber	85 %	91,89 %	108,11 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		725.832.829	665.117.418	91,64 %		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) (Kecamatan Cibebber)	93 %	99 %	106,45 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Cibeber)	93 %	100 %	107,53 %		
Penyusunan Profil Kecamatan		11.000.000	11.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan		22.470.000	22.470.000	100,00 %		
	Terlaksananya Jumat Bersih	11 Lokasi	11 Lokasi	100,00 %		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		63.040.329	55.938.000	88,73 %		
	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	100,00 %		
Pelaksanaan Musrenbangcam		33.665.000	31.464.600	93,46 %		
	Terlaksananya musrenbangcam	150 Orang	150 Orang	100,00 %		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		34.440.000	31.116.000	90,35 %		
	Terlaksananya penindakan pelanggaran perda dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pengajian Rutin		37.350.000	37.350.000	100,00 %		
	Terlaksananya Pengajian Rutin	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN		74.875.000	63.240.100	84,46 %		
	Terlaksananya PHBI, PHBN & PHBD	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00 %		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		138.670.000	120.670.000	87,02 %		
	Terlaksananya Kegiatan MTQ Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pembinaan Kewilayahan Kecamatan		19.800.000	19.800.000	100,00 %		
	Terbinanya wilayah kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00 %		
Lomba Kelurahan		15.950.000	15.950.000	100,00 %		
	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)		10.200.000	10.200.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)		57.450.000	57.450.000	100,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi dengan Muspika	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00 %		
Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan		4.500.000	4.500.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peran serta Pemuda terhadap pembangunan kewilayahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup		4.500.000	4.500.000	100,00 %		
	Terselenggaranya pendampingan Capaian dari Hasil Peran LPMK, STQ Kelurahan dan DPWKEK PROKLIM, Kelurahan Sehat, GPATBM	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek		7.922.500	7.922.500	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan UMKM, Pendataan UMKM, Pemasyarakatan TTG, Pelatihan Tenaga kerja	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40.000.000	39.900.000	99,75 %		
	Terlaksananya Pendampingan Kecamatan dan Ekspose Progresi Analisa Potensi Dampak Kebencanaan Lokal	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		50.000.000	49.230.000	98,46 %		
	Terwujudnya Ruang Layak Anak Dalam Rangka Kota Layak Anak dan disabilitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)		100.000.000	82.416.218	82,42 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya fasilitasi pendataan, inkubating, marketing, konsultasi kepada usaha kecil dan usaha mikro masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

1. KELURAHAN KEDALEMAN

Tabel 3.1.4.1m.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kedaleman)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN KEDALEMAN		1.787.387.672	1.716.118.917	96,01 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		521.000.050	501.279.236	96,21 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.266.387.622	1.214.839.681	95,93 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		82.400.000	82.400.000	100,00 %		
	Tersalurkannya honor Babinsa dan Bhabinkamtibmas	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Tersalurkannya honor Satlinmas	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya monitoring trantib lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya kaos dan rompi Satlinmas	35 Stel	35 Stel	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		170.015.622	170.014.781	100,00 %		
	Drainase	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Paving block	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	TPT	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Normalisasi drainase	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Pembangunan Posyandu	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Pembangunan Poskamling	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
	Pembangunan taman bermain anak	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		426.700.000	422.895.000	99,11 %		
	Tersalurkannya honor RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya pembinaan RT/RW	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya pakaian seragam RT/RW	41 Stel	41 Stel	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.462.000	2.462.000	100,00 %		
	Terlaksananya pengelolaan layanan publik	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		6.910.000	6.910.000	100,00 %		
	Tersedianya profil Kelurahan	10 Buku	10 Buku	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		60.700.000	60.700.000	100,00 %		
	Terlaksananya PHBI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya PHBD & PHBN	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	45.500.000	91,00 %		
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembekalan kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan Kampanye keluarga sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan Ketuk pintu TB	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan mengantar dahak	25 Hari	25 Hari	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan pemantauan jentik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan screening kesehatan lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya senam sehat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		5.700.000	5.700.000	100,00 %		
	Terfasilitasinya program kerja PKK	3 Bulan	3 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25.500.000	25.500.000	100,00 %		
	Tersalurkannya honor LPM	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya koordinasi LPM dengan kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Tersedianya pakaian seragam pengurus LPM	10 Stel	10 Stel	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	6.000.000	30,00 %	Adanya rasionalisasi Anggaran kegiatan untuk penanganan covid 19	Anggaran dialihkan refocusing untuk pencegahan dan penangan covid Kota Cilegon
	Terlaksananya pemantauan dan supervisi UMK	60 UMKM	60 UMKM	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan TTG	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %		
	Tersedianya data UMK yang terbaru (up date)	60 UMKM	60 UMKM	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	109.623.000	95,32 %		
	Terlaksananya pelatihan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga trantibum Kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya pelatihan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	62.800.900	96,62 %		
	Terlaksananya pelatihan kader kesehatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	99.950.000	99,95 %		
	Terlaksananya peningkatan sarpraswil Kelurahan Kedalaman	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	83.592.000	97,20 %		
	Terlaksananya pelatihan sablon	10 Orang	10 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan pengelolaan UMN	20 Orang	20 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya peningkatan literasi	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pembinaan PAUD	40 Orang	40 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya peningkatan sarpras dikbud	40 Orang	40 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	30.792.000	61,58 %	Harga satuan pemasangan dan pemeliharaan titik wifi lebih ekonomis dari yang diperkirakan	realisasi disesuaikan dengan kebutuhan secara tepat (efisiensi).
	Jumlah titik pemasangan Wi-Fi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi bagi pelaku UMK	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kedaleman telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE PLAT DEKER	LINK.KADIPATEN RT 04 RW 02	25,023	M3	27,2	M3	57.805.200,00
II	DRAINASE PLAT DEKER	LINK.KADIPATEN RT 04 RW 02	8,997	M3	10,4	M3	20.604.800,00
II	DRAINASE PLAT DEKER	LINK.KADIPATEN RT 02 RW 02	10,684	M3	10,8	M3	24.870.436,00
III	DRAINASE PLAT DEKER	LINK.KADIPATEN RT 02 RW 02	17,71	M3	20,77	M3	20.604.800,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Kedaleman pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 jenis Pekerjaan yang terdiri atas Pembangunan Drainase dengan total realisasi volume 69,17 M3 yang dilaksanakan pada termin I untuk 1 pekerjaan, termin II untuk 2 pekerjaan dan termin III untuk 1 pekerjaan . Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPW Kel ini adalah sebesar Rp. 123.885.236

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kedaleman juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kadipaten 001/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kadipaten 001/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.PCI 003/007	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.PCI 003/007	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.PCI 003/005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. PCI 003/005	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kalang Anyar RT.006/001	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kalang Anyar RT.006/001	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Halaman Kelurahan Kedaleman	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Halaman Kelurahan Kedaleman	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Halaman Kelurahan Kedaleman	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kedaleman sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

2. KELURAHAN KALITIMBANG

Tabel 3.1.4.1m.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kalitimbang)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN KALITIMBANG		1.600.241.558	1.563.898.088	97,73 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		497.745.936	475.663.727	95,56 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.102.495.622	1.088.234.361	98,71 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		68.800.000	68.296.000	99,27 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622	168.029.840	99,89 %		
	TPT, Paving Block, Drainase, Kampung Merah Putih, Normalisasi Saluran Air	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		265.050.000	264.846.000	99,92 %		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		8.000.000	8.000.000	100,00 %		
	Tersedianya Pelayanan Administrasi Terpadu Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		43.875.000	43.875.000	100,00 %		
	Terlaksananya PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya PHBD, PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	48.500.000	97,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Mengantar Dahak	25 Hari	25 Hari	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		10.375.000	10.375.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Rutin TP. PKK Kelurahan Kalitimbang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000	19.200.000	100,00 %		
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		29.000.000	27.570.000	95,07 %		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		23.980.000	23.980.000	100,00 %		
	Tersedianya Dokumen Pra RAB dan RAB	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen Pra RAB dan RAB	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Meningkatnya dokumen perencanaan infrastruktur	100 %	100 %	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	111.221.000	96,71 %		
	Pelatihan tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 Orang	100 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.903.000	99,85 %		
	Pembinaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah dan Sumur Injeksi/Resapan	12 Paket	12 Paket	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.577.000	99,51 %		
	Pelatihan tata boga	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	43.861.521	87,72 %		
	Jumlah titik pemasangan Wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kalitimbang telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	Link.Ciberko RT 02/03	62	M2	77,25	M2	12.000.000,00
I	PAVING BLOCK	Link.Ciberko RT 01/03	295	M2	343	M2	47.780.000,00
II	PAVING BLOCK	Link.Ciberko RT 04/03	202,5	M2	268	M2	47.941.500,00
III	PAVING BLOCK	Link Ciberko RT 004/004	281	M2	379	M2	37.691.452,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Kalitimbang pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 jenis Pekerjaan paving blok yang direalisasikan seluas 1067,25 M2 yang dilaksanakan pada termin 1 sebanyak 2 pekerjaan dan masing-masing 1 pekerjaan di termin 2 dan 3. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 145.412.952

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kalitimbang juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Ciberko RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Krotek RT 002/002	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Ciberko RT 004/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kedung Baya RT 004/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kedung Baya RT 004/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kalitimbang sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

3. KELURAHAN KARANGASEM

Tabel 3.1.4.1m.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Karangasem)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN KARANGASEM		1.567.504.268	1.506.463.708	96,11 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		375.383.446	352.834.808	93,99 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.192.120.822	1.153.628.900	96,77 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		101.200.000	101.200.000	100,00 %		
	Terbinanya SATLINMAS Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622	158.391.000	94,16 %		
	Terpenuhinya aspirasi masyarakat kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		357.951.200	357.818.600	99,96 %		
	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.000.000	2.000.000	100,00 %		
	Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		1.344.000	1.344.000	100,00 %		
	Tercapainya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		25.040.000	24.640.000	98,40 %		
	Terlaksananya PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		5.895.000	5.895.000	100,00 %		
	Tersedianya Dukungan Program Kampung Iklim	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan		300.000	300.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terfasilitasinya program kerja karang taruna	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		2.850.000	2.850.000	100,00 %		
	Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kasus kekerasan anak	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan kualitas tenaga kerja		1.450.000	1.450.000	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan pengelasan	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pelatihan otomotif	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pembekalan kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan kampanye keluarga sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan ketuk pintu TB	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan mengantar dahak	25 Hari	25 Hari	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan pemantauan jentik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan screening kesehatan lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		5.375.000	5.375.000	100,00 %		
	Terfasilitasinya program kerja PKK	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		21.500.000	21.500.000	100,00 %		
	Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	19.925.000	99,63 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	11.740.000	90,31 %		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	111.600.000	97,04 %		
	Terlaksananya kegiatan petugas trantib	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.022.300	98,50 %		
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	81.904.000	95,24 %		
	Terlaksananya kegiatan Pelatihan service AC	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan pembinaan pendidikan dan budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	31.674.000	63,35 %	Harga pemasangan dan pemeliharaan titik wifi lebih ekonomis.	Direalisasikan sesuai dengan kebutuhan (efisiensi).

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terwujudnya transformasi digital UMKM yang mandiri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Karangasem telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II	TPT	LINK. JERANG ILIR RT.003/003	79,56	M3	81,49	M3	69.520.000
II	PAVING BLOCK	LINK. JERANG BARAT RT.005/001	150	M2	222,66	M2	25.670.000
III	DRAINASE	JERANG BARAT RT.003/001	28,14	M3	35,42	M3	40.300.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Karangasem pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 jenis Pekerjaan yaitu TPT yang dilaksanakan pada termin I dan II dengan volume 81,49 M3, Paving Blok seluas 222,66 M2 pada termin II dan Drainase dengan volume 35,42 M3 pada termin III. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 135.490.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Karangasem juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Jerang Barat RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikerut RT.003/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikerut RT.003/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikerut RT.003/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikerut RT.004/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cikerut RT.004/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Karangasem sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

4. KELURAHAN CIKERAI

Tabel 3.1.4.1m.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Cikerai)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN CIKERAI		1.421.247.772	1.329.934.023	93,58 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		379.632.150	366.246.705	96,47 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.041.615.622	963.687.318	92,52 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		61.600.000	61.600.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622	167.860.000	99,79 %		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		171.300.000	161.700.000	94,40 %		
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		1.500.000	1.500.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		1.350.000	1.350.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		38.490.000	38.490.000	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan PHBI/PHBN dan STQ	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		16.550.000	9.550.000	57,70 %	rasionalisasi pagu anggaran untuk belanja peralatan dan kebersihan dan belanja bahan/bibit tanaman.	
	Terlaksananya kegiatan Jumat Bersih dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah/Bank Sampah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	48.750.000	97,50 %		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		6.110.000	6.110.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		39.050.000	39.050.000	100,00 %		
	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja (Las dan Otomotif)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000	29.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		17.300.000	16.225.000	93,79 %		
	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		24.950.000	24.950.000	100,00 %		
	Terlaksananya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	85.558.500	74,40 %	Adanya pembatasan peserta kegiatan dengan diberlakukannya PSBB	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dan memberlakukan protokol kesehatan
	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 Orang	80 Orang	80,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan		65.000.000	58.107.500	89,40 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)						
	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	99.500.000	99,50 %		
	Drainase Vertikal/ Sumur Resapan	11 Unit	11 Unit	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	75.058.280	87,28 %		
	Pelatihan mencukur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Pengelolaan pembinaan seni dan budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	39.128.038	78,26 %		
	Terwujudnya transformasi digital UMKM yang mandiri	100 %	100 %	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Cikerei telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	144.550.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Cikerei pada tahun 2020 hanya dilaksanakan untuk 1 output yaitu pembangunan 1 unit Posyandu yang dilaksanakan dari termin I sampai dengan Termin III. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 144.550.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Cikerei juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Panakodan RT. 09 RW. 04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pasir Angin RT. 08 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	8.500.000

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Cikerei sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

5. KELURAHAN BULAKAN

Tabel 3.1.4.1m.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Bulakan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN BULAKAN		1.715.419.622	1.679.802.167	97,92 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		620.368.500	610.394.522	98,39 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.095.051.122	1.069.407.645	97,66 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		61.600.000	61.600.000	100,00 %		
	Terbinanya SATLINMAS Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		187.913.122	187.913.122	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		249.850.000	249.740.000	99,96 %		
	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.938.000	2.938.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		57.450.000	57.450.000	100,00 %		
	Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya PHBD /PHBN	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya kegiatan Pengajian rutin Majelis Taklim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		2.250.000	2.250.000	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Jum'at Bersih di Lingkungan Kelurahan Bulakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	40.500.000	81,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan intervensi lanjutan keluarga sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan senam bersama masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		3.900.000	3.900.000	100,00 %		
	Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader PKK Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000	29.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Pembayaran Honorarium LPM Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LPM Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.950.000	16.123.000	76,96 %		
	Terlaksananya Kegiatan Survey Ekonomi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan TTG	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.882.000	99,90 %		
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	30 Orang	30 Orang	100,00 %		
	Penguatan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	62.853.000	96,70 %		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Peningkatan Kapasitas Layanan Masyarakat Kelurahan	50 %	50 %	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.775.000	99,74 %		
	Pelatihan Sablon	30 Orang	30 Orang	100,00 %		
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	41.283.523	82,57 %		
	Jumlah Titik pemasangan WIFI 10 titik	10 Lokasi	10 Lokasi	100,00 %		
	Sosialisasi bagi Pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Bulakan telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	TPT	Link. Gunung Ipik RT 03/03	86	m3	87.87	m3	63.243.000
II	TPT	Link. Gunung Ipik RT 03/03	64	m3	64.5	m3	63.243.000
III	TPT	Link. Gunung Ipik RT 03/03	56	m3	72,14	m3	49.347.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Bulakan pada tahun 2020 hanya dilaksanakan untuk 1 output yaitu pembangunan TPT dengan total realisasi volume 224,51 M3 yang dilaksanakan pada Termin I s.d. Termin III. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 175.833.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Bulakan juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bentola Rt.07/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lebak Kayang Rt.03/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Bulakan sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

6. KELURAHAN CIBEBER

Tabel 3.1.4.1m.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Cibeber)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN CIBEBER		2.140.703.908	2.121.683.647	99,11 %		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		470.762.286	465.577.412	98,90 %		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.669.941.622	1.656.106.235	99,17 %		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		92.200.000	92.200.000	100,00 %		
	Tersedianya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00 %		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan		171.486.622	171.486.622	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1 Paket	1 Paket	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		779.100.000	778.725.000	99,95 %		
	Tersalurkannya Honor RT/RW	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		3.200.000	3.200.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		43.375.000	43.375.000	100,00 %		
	Terlaksananya PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya PHBD, PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		19.380.000	19.380.000	100,00 %		
	Terciptanya Kondisi Kebersihan Sekitar Kantor Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		25.000.000	25.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	49.750.000	99,50 %		
	Terlaksananya Kegiatan Pembekalan Kader	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan intervensi lanjutan keluarga sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan senam bersama masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		8.000.000	8.000.000	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000	29.200.000	100,00 %		
	Terkoordinirnya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	19.975.000	99,88 %		
	Terlaksananya pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya pemutakhiran data Usaha Mikro Kecil (UMK)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	12.999.000	99,99 %		
	Terlaksananya Penyusunan RAB dan PRA RAB	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	110.769.000	96,32 %		
	Pembuatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pembuatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	100 Orang	100 Orang	100,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.872.000	99,80 %		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00 %		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah	1 Paket	1 Paket	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.984.000	99,98 %		
	Pelatihan Service AC	5 Orang	5 Orang	100,00 %		
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	60 Orang	60 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	41.190.613	82,38 %		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi bagi Pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100,00 %		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Cibeber telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK SAMBIRATA RT 01/03	77	M2	88,2	M2	15.763.639
I,II,III	POSYANDU	LINK CIBEER BEDENG RT 08/01	1	UNIT	1	UNIT	130.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Cibeber pada tahun 2020 dilaksanakan untuk 2 output yaitu Paving Blok seluas 88,2 M2 pada termin I dan pembangunan 1 unit posyandu yang dilaksanakan dari termin I s.d. Termin III. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 145.763.369

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Cibeber juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Griya Praja Mandiri RT 003/012	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Griya Praja Mandiri RT 003/012	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Griya Praja Mandiri RT 003/012	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Griya Praja Mandiri RT 003/012	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cibeber Barat RT 003/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cibeber Barat RT 003/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cibeber Bedeng RT 008/001	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cibeber Timur RT 007/001	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cibeber Timur RT 007/001	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Sambirata RW 003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Sambirata RW 003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Cibeber sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 90% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sebesar 86%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan Cibeber dalam melaksanakan kegiatan teknis maupun non teknis memiliki 2 (*dua*) program yaitu :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan pada Kecamatan Cibeber, terdapat 4 (*empat*) indikator kinerja yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

Jumlah ketersediaan data dan informasi sektoral yang dimiliki Kecamatan Cibeber sebanyak 2 dokumen yaitu; dokumen Buku Profil Kecamatan Cibeber dan dokumen Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cibeber dengan didukung sebanyak 18 data. Sehingga diperoleh nilai rata-rata ketersediaan data dan informasi sektoral mencapai 94,44%. Oleh karena itu, maka nilai persentase ketersediaan data dan informasi sektoral realisasi kinerjanya mencapai 94,44% dari yang ditargetkan 86%, maka capaiannya 109,81%.

2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

Unit sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Cibeber yang terdaftar pada kartu inventaris barang dan aset untuk jumlah sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi Baik (B) sebanyak 522 Unit dibagi jumlah total keseluruhan sarana dan prasarana perkantoran yang ada sebanyak 695 Unit. Sehingga diperoleh nilai rata-rata sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan Cibeber yang dalam kondisi baik mencapai 75,11%. Oleh karena itu, maka nilai persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik realisasi kinerjanya mencapai 75,11% dari yang ditargetkan 86%, maka capaiannya 87,34%.

3) Tingkat disiplin aparatur

Capaian kinerja pada Tingkat disiplin pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar 95,64%, persentase capaian kinerjanya adalah 111,21% dari yang ditargetkan sebesar 86%.

4) Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*)

Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (*anggaran kas*) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, terealisasi sebesar 91,89% persentase capaian kinerjanya adalah 108,11% dari yang ditargetkan sebesar 85%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020

2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Cibeber, terdapat 2 (*dua*) indikator kinerja yang meliputi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*)

Untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) pada seluruh Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber dengan mengakumulasikan jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi anggaran

DPWKel dikali 100% (*seratus persen*). Adapun jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terserap/terrealisasi pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 1.023.695.365,- dibagi jumlah total pagu anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber sebesar Rp. 1.034.062.232,- dikali 100% (*seratus persen*). Sehingga diperoleh Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) dengan realisasi kinerjanya mencapai 99% dari yang ditargetkan 93%, maka capaiannya 106,45%. Adapun tabel realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) sebagai berikut :

**Tabel Realisasi Anggaran DPWKel Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber
Tahun Anggaran 2020**

No.	Kelurahan	Program/Kegiatan	Target Anggaran (Rp).	Realisasi Kinerja Anggaran/Keuangan (RP.)	Capaian (%)
		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			
1.	Kedaleman	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	170.015.622,-	170.014.781,-	100,00
2.	Kalitimbang	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.215.622,-	168.029.840,-	99,89
3.	Karangasem	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.215.622,-	158.391.000,-	94,16
4.	Cikera	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	168.215.622,-	167.860.000,-	99,79
5.	Bulakan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	187.913.122,-	187.913.122,-	100,00
6.	Cibeber	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	171.486.622,-	171.486.622,-	100,00
Jumlah Total Realisasi Anggaran DPWKel (Rp).			1.034.062.232,-	1.023.695.365,-	99,00

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka meningkatnya penyerapan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (*DPWKel*) Se-Kecamatan Cibeber untuk pembangunan fisik di wilayah Kelurahan dengan terealisasinya beberapa pembangunan terutama terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana peningkatan jalan lingkungan dengan adanya kerjasama yang baik diantara anggota Kelompok Masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan di lingkungannya yang meliputi : Pembangunan Drainase, Paving Blok, Tembok Penahan Tanah (*TPT*), Drainase, Drainase Plat Deker dan Posyandu. Sehingga dengan adanya pembangunan yang telah terwujud diharapkan masyarakat di lingkungannya agar dapat menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah terbangun dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk kepentingan umum.

2) Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan

Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Cibeber yang sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (*SOP*). Capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Cibeber pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 sebesar 100%, persentase capaian kinerjanya adalah 107,53% dari yang ditargetkan sebesar 93%.

Adapun beberapa kegiatan pada Kecamatan Cibeber yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75%, diantaranya meliputi :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
2. Kegiatan Dialog/audiensi dengan Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
4. Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan Sarpraswil DPWKel (Monitoring DPWKel) tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

5. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW) tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan untuk dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.
6. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. Adapun realisasi kinerjanya 1 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 57,33%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pembatasan kedatangan dari luar daerah ataupun kunjungan ke luar daerah. Sehingga diberlakukannya pembatasan sosial dengan menjaga jarak dan menjaga tatap muka secara langsung terutama kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebagai upaya untuk pencegahan penularan penyebaran wabah Covid 19.

Adapun beberapa kegiatan pada Kelurahan Se-Kecamatan Cibeber yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75%, diantaranya meliputi :

- A. Kelurahan Kedaleman, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 2) Kegiatan Dukungan Program Kampung Iklim tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 6) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Promosi dan Propaganda realisasi kinerja 0 Paket dari yang ditargetkan 1 Paket dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk penyediaan berupa media cetak dan online;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. realisasi kinerja 1 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 66,17%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan pemakaian listrik dan internet disesuaikan dengan kebutuhan kerja.
 - 9) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan. Adapun realisasi kinerja 60 UMKM dari yang ditargetkan 60 UMKM dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 30,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk belanja transportasi dan akomodasi tenaga ahli/narasumber disebabkan adanya wabah Covid-19.
 - 10) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan *(DID Tambahkan)*. Adapun realisasi kinerja 10 Titik Pemasangan Wifi dari yang ditargetkan 10 Titik Pemasangan Wifi dan realisasi kinerja 2 Kali Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM dari yang ditargetkan 2 Kali Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 61,58%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan pada saat pelaksanaan terdapat efisiensi biaya pemasangan titik wifi.
- B. Kelurahan Kalitimbang, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 4) Kegiatan Dukungan Program Kampung Iklim tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
 - 6) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

- 7) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) untuk penanganan Covid 19.

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik. Adapun realisasi kinerja 2 Jenis dari yang ditargetkan 2 Jenis dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 54,12%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya sebagian pagu anggaran tidak terserap disebabkan pemakaian listrik dan internet disesuaikan dengan kebutuhan kerja.

C. Kelurahan Karangasem, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Pakaian Olahraga tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Pengadaan Awning tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan pegawai Non ASN yang bekerja di Kelurahan Karangasem melalui pendaftaran pada BPJS. Adapun realisasi kinerja 0 Orang dari yang ditargetkan 8 Orang Hal ini dikarenakan tidak terakomodirnya pelayanan dari BPJS sehingga anggaran BPJS tidak dapat terserap;
- 4) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (*DID Tambahan*). Adapun realisasi kinerja 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 63,35%. Hal ini disebabkan penetapan pagu anggaran kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pemasangan jaringan titik Wifi internet harga pemasangan dan pemeliharaannya jauh lebih ekonomis dari prakiraan harga. Sehingga target anggaran tidak sepenuhnya terserap.

D. Kelurahan Cikerei, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19.

- 4) Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. Adapun realisasi kinerjanya 0 Tahun dari yang ditargetkan 1 Tahun dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserapnya pagu anggaran dikarenakan adanya pembatasan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi untuk kedatangan dari luar daerah ataupun kunjungan ke luar daerah sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer. Adapun realisasi kinerja 1 Jenis dari yang ditargetkan 2 Jenis dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 55,00%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk honorarium upah tenaga kerja komputer dan printer;
- 6) Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah. Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah. Adapun realisasi kinerjanya 0 Kegiatan dari yang ditargetkan 1 Kegiatan dengan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 0,00%. Tidak terserapnya pagu anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran untuk belanja alat tulis kantor dan belanja cetak dan penggandaan. Sehingga perlu adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dengan adanya rasionalisasi anggaran;
- 7) Kegiatan Dukungan Program Kampung Iklim. Adapun realisasi kinerja 1 Kegiatan dari yang ditargetkan 2 Kegiatan dan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 57,70%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi pagu anggaran belanja peralatan dan kebersihan untuk belanja bahan/bibit tanaman.

- 8) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (*DAU Kelurahan*). Adapun realisasi kinerja 50 Orang dari yang ditargetkan 50 Orang untuk penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban kelurahan dan realisasi kinerja 80 Orang dari yang ditargetkan 100 Orang untuk penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan dengan penyerapan realisasi anggarannya mencapai 74,40%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya pembatasan peserta kegiatan dengan diberlakukannya pembatasan sosial dengan menjaga jarak dan menjaga tatap muka secara langsung sebagai upaya untuk pencegahan penularan penyebaran wabah Covid 19.

E. Kelurahan Bulakan, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 4) Kegiatan Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 5) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19. Sebagaimana dengan diterbitkannya Perwal No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka pembiayaan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid 19)* di Kota Cilegon melalui mekanisme penganggaran dalam *Belanja Tidak Terduga (BTT)* yang dibebankan pada APBD dengan pembiayaan refocusing yang dilakukan terhadap pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

F. Kelurahan Cibeber, untuk kegiatan yang capaian realisasi kinerja dan anggarannya dibawah 75% sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan DPWKel tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%;
- 4) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dengan capaian 0,00%.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan tidak dilaksanakan/tidak direalisasikan dikarenakan dialihkannya anggaran kegiatan dengan adanya penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) supaya dapat membiayai kegiatan penanganan Covid 19. Sebagaimana dengan diterbitkannya Perwal No. 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, maka pembiayaan penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid 19)* di Kota Cilegon melalui mekanisme penganggaran dalam *Belanja Tidak Terduga (BTT)* yang dibebankan pada APBD dengan pembiayaan refocusing yang dilakukan terhadap pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

B.10. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

B.10a Permasalahan:

1. Adanya bencana Wabah/Pandemi Covid 19, sehingga terkendala beberapa kegiatan teknis Kecamatan dan Kelurahan yang akan dilaksanakan;
2. Kurangnya sumberdaya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Terdapat pagu anggaran kegiatan yang dirasionalisasikan dan direfocusing (*pengurangan atau pengalihan pagu anggaran*) Kegiatan untuk pembiayaan dan penanganan Covid 19;
4. Adanya keterlambatan tagihan premi asuransi dari BPJS dan menunggak pada saat pembayaran premi BPJS;
5. Belum memadainya kecukupan, keterbaharuan dan pengelolaan data, informasi ketercapaian indikator program dan kegiatan.

B.10b Solusi:

1. Dilaksanakannya pembatasan sosial, menjaga interaksi sosial dengan mematuhi Perwal No. 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga pegawai Kecamatan Cilegon dan Kelurahan melaksanakan aktifitas kegiatan kerja dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan gerakan 5M (*Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi*) dan melaksanakan pertemuan rapat kegiatan secara daring/pembatasan peserta rapat dengan menjaga jarak, bekerja dari rumah (*work from home*) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tetap mematuhi penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19;
2. Diharapkan dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bagiannya;
3. Diperlukan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi antar perangkat daerah lintas sektoral terkait Belanja Tidak Terduga (*BTT*) untuk penanganan Covid 19 dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara terpadu;
4. Diperlukan meningkatkan koordinasi dan konsultasi pihak Kelurahan dengan pihak BPJS terkait pembayaran jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan premi BPJS;
5. Diperlukan meningkatkan ketersediaan data dan informasi pengolahan data capaian indikator program dan kegiatan.

F. KECAMATAN GROGOL

Tabel 3.1.4.1n Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Grogol)

4.3.1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian. sarana dan prasarana perkantoran. pengelolaan keuangan. serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.834.754.446,00	1.714.347.072,00	93,44%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Grogol)	88,00	100,00	113,64 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Grogol)	87,00	74,00	85,06 %		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Grogol)	90,00	98,95	109,94 %		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	91,00	84,39	92,74 %		

4.3.2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		391.125.898,00	234.644.515,00	59,99%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	100 %	99,11 %	99,11 %		
	Persentase Penerapan SOP Terhadap Pelayanan Yang Ada di Kecamatan	90 %	75,00 %	83,33 %		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		46.229.273,-	33.800.000,-	73,11 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
	Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	12 Bulan	9 Bulan	75,00 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
Pelaksanaan Musrenbangcam		16.465.000,-	16.454.000,-	99,93 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pelaksanaan Musrenbangcam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		7.200.000,-	4.050.000,-	56,25 %	Kegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak Babinkamtimas Kelurahan.	
	Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	12 Kegiatan	6 Kegiatan	50,00 %	Kegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya koordinasi dengan pihak Babinkamtimas Kelurahan.	
Pengajian Rutin		15.000.000,-	7.500.000,-	50,00 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
	Terlaksananya Pengajian Rutin	12 Bulan	6 Bulan	50,00 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
Pelaksanaan Jumat Bersih		8.000.000,-	7.980.000,-	98,44 %		
	Terlaksananya Pelaksanaan Jumat Bersih	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN		36.306.625,-	0,00	0,00 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	7 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan adanya Pandemi COVID-19	
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50.000.000,-	49.640.000,-	99,28 %		
	Terlaksananya Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		11.000.000,-	9.470.000,-	86,09 %		
	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00 %		
Lomba Kelurahan		11.000.000,-	9.400.000,-	85,45 %		
	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)		11.800.000,-	11.800.000,-	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00 %		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)		30.000.000,-	24.600.000,-	82,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)	12 Bulan	8 Bulan	66,67 %		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40.000.000,-	0,00	0,00 %	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya perencanaan dan terbatasnya waktu pelaksanaan.	Kedepan akan melakukan perencanaan dengan target yang telah ditentukan.
	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Bencana	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00 %	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya perencanaan dan terbatasnya waktu pelaksanaan.	Kedepan akan melakukan perencanaan dengan target yang telah ditentukan.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		8.125.000,-	8.125.000,00	100,00 %		
	Tersedianya Update SIMAPAN	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00 %		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek (DID) Tambahan		100.000.000,-	51.825.515,-	51,83 %	Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidaksesuaiannya kode rekening pada DPA yang ada.	Kedepan akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Terlaksananya pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek	6 Kegiatan	3 Kegiatan	50,00 %	Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidaksesuaiannya kode rekening pada DPA yang ada.	Kedepan akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Kecamatan Grogol Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 84,39% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebesar 100%.

Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan :

a. Tingkat disiplin aparatur;

Capaian kinerja pada Tingkat disiplin Aparatur pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 , realisasi capaian kinerjanya adalah 98,95% dari yang ditargetkan sebesar 90 %, dengan persentase capaian kinerja 109,94%.

b. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas);

Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 84,39 % dari yang ditargetkan sebesar 91 %. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Kecamatan Grogol Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020.

c. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral.

Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 100,00% dari yang ditargetkan sebesar 88,00%.

d. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 74,00% dari yang ditargetkan sebesar 87,00 %.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan . Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 100% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Grogol Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

a. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan;

Capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 75,00% dari yang ditargetkan sebesar 90,00%.

- b. Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel).
Capaian kinerja pada Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 99,11% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

1. KELURAHAN KOTASARI

Tabel 3.1.4.1n.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kotasari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian. sarana dan prasarana perkantoran. pengelolaan keuangan. serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		416.442.500,00	414.443.515,00	99,52%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.226.205.622,00	1.203.921.196,00	98,18%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		85.000.000,-	85.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622,-	168.145.000,-	99,96 %		
	Pembangunan Paving Blok Lingkungan	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00 %		
	Pembangunan Pagar Makam	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00 %		
	Pembangunan Pagar Makam	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00 %		
	Pembangunan Jamban Keluarga	4 Lokasi	4 Lokasi	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)		372.400.000,-	361.382.000,-	97,04 %		
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		7.025.000,-	7.025.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik Simpul Paten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		10.750.000,-	10.750.000,-	100,00 %		
	Tersedianya Kualitas Data Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		43.125.000,-	43.125.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		1.340.000,-	1.340.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,-	50.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Peranan PKK Kelurahan		375.000,-	375.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000,-	29.150.000,-	99,83 %		
	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000,-	21.500.000,-	86,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		17.775.000,-	17.775.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,-	112.906.000,-	98,18%		
	Penguatan kapasitas dan kapasitas masyarakat kelurahan bidang pemerintahan dan trantibum	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,-	64.517.500,-	99,26 %		
	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
	Terlaksananya kegiatan kelembagaan kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,-	100.000.000,-	100 ,00 %		
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	11 Titik	11 Titik	100 ,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,-	85.634.000,-	99,57 %		
	Terlaksananya pelatihan services AC	10 Orang	10 Orang	100 ,00 %		
	Terlaksananya pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,-	45.296.096,-	90,59 %		
	Jumlah titik yang terpasang wifi	10 Titik	10 Titik	100 ,00 %		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 Kali	2 Kali	100 ,00 %		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Kotasari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 99,52% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Kotasari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,18% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kotasari telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAGAR MAKAM	Link. Gunung Watu 004/001	1	unit	1	unit	50.000.000
I	Jamban Keluarga	Link.Ciora Gede 002/001	1	unit	1	unit	5.000.000
I	Jamban Keluarga	Link.Ciora Gede 002/001	1	unit	1	unit	5.000.000
2	PAVING BLOCK	LINK CIORA WETAN RT.003 RW 002	126	M2	169,77	M2	21.790.000
2	REHAB MASJID	LINK CIORA WETAN RT.003 RW 002	1	UNIT	1	UNIT	50.000.000
3	REHAB MASJID	PURI CILEGON HIJAU RT.003 RW 005	1	UNIT	1	UNIT	25.000.000
3	JAMBANISASI	LINK CIORA GEDE RT.002 RW 002	1	UNIT	1	UNIT	5.000.000
3	JAMBANISASI	LINK CIORA WETAN RT.003 RW 002	1	UNIT	1	UNIT	5.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Kotasari pada tahun 2020 dilaksanakan untuk 4 jenis pekerjaan yaitu pagar makam pada termin I, jambanisasi pada termin I dan III sebanyak 4 unit, Paving blok seluas 169,77 M2 yang dilaksanakan pada termin II, dan rehab masjid sebanyak 2 unit yang dilaksanakan masing-masing pada termin II dan III. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 166.790.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kotasari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	PERUMAHAN ARG A BAJA PURA	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	PERUMAHAN ARG A BAJA PURA	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK. CIORA WASEH RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK. CIORA WASEH RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK. CIORA WASEH RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. MASIGIT RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. MASIGIT RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. MASIGIT RT.003/001	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Puri Krakatau Hijau 004/007	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Puri Krakatau Hijau 001/007	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciora Wetan 003/002	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kotasari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

2. KELURAHAN GROGOL

Tabel 3.1.4.1n.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Grogol)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kenierja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian. sarana dan prasarana perkantoran. pengelolaan keuangan. serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		416.221.826,00	381.864.210,00	91,75%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		993.095.622,00	876.549.446,00	88,26%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		61.600.000,-	45.195.000,-	73,37 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, sehingga hanya terserap pada rapat persiapannya saja. Hal inilah yang	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					menyebabkan serapan anggaran kurang dari 75%.	
	Terlaksananya Monitoring Ketentrangan dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		168.215.622,-	160.360.000,-	95,33 %		
	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok Lingkungan	3 Lokasi	3 Lokasi	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan drainase	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)		183.000.000,-	178.628.000,-	97,61 %		
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		9.350.000,-	9.350.000,-	100,00 %		
	Tersedianya Kualitas Data Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		38.830.000,-	38.830.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,-	14.400.000,-	28,80 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran kurang dari 75%.	
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33 %		
Peningkatan Peranan PKK Kelurahan		13.900.000,-	5.800.000,-	41,73 %		
	Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	12 Bulan	4 Bulan		Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengumpulkan banyak orang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan yang tidak	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					diperbolehkan sesuai dengan Perwal Kota Cilegon Nomor 40 Tahun 2020.	
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,-	19.200.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat					
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000,-	13.325.000,-	66,62 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 66.62% atau kurang dari 75%.	
	Terlaksananya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000,-	8.000.000,-	61,54 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran kurang dari 75%.	
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,-	104.320.000,-	90,71 %		
	Penguatan kapasitas dan kapasitas masyarakat kelurahan bidang pemerintahan dan trantibum	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,-	63.535.000,-	97,75 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
	Terlaksananya kegiatan kelembagaan kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,-	100.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	11 Titik	11 Titik	100 ,00 %		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,-	81.173.000,-	94,39 %		
	Terlaksananya pelatihan services AC	10 Orang	10 Orang	100 ,00 %		
	Terlaksananya pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	50 Orang	50 Orang	100 ,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,-	34.433.446,-	68,87 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, kurang dari 75%.	
	Jumlah titik yang terpasang wifi	10 Titik				
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 Kali				

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Grogol berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 91,75% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Grogol berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 88,26%, Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Grogol telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	Link Ciora Jaya Rt.001 Rw.001	144,8	M2	197	M2	33.030.000
I	DRAINASE	Link Sumur kair Rt.002 Rw.004	16,38	M3	21,06	M3	24.350.000
2	PAVING BLOCK	LINK KUBANG KORU RT.001/003	50	M2	51,13	M2	10.930.000
2	PAVING BLOCK	LINK CIKABEL BAWAH RT.002/002	158	M2	168,17	M2	29.150.000
3	DRAINASE	LINK CIORA KWISTA RT.003 RW 004	28,14	M3	38,76	M3	40.230.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Grogol pada tahun 2020 dilaksanakan untuk 2 jenis pekerjaan paving blok seluas 416,3 M2 yang dilaksanakan pada termin I s.d. II dan pembangunan drainase dengan total realisasi volume 59,82 M3. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 137.690.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Grogol juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Cipinang Hilir 04/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciora Kwista 03/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciora Kwista 03/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Ciora Wetan 02/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Ciora Wetan 02/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Sumur Khair 02/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Grogol sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

3. KELURAHAN RAWA ARUM

Tabel 3.1.4.1n.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Rawa Arum)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian. sarana dan prasarana perkantoran. pengelolaan keuangan. serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		336.351.000,00	315.759.159,00	93,88%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.273.235.622,00	1.084.554.898,00	85,18%		
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		116.400.000,-	116.400.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Fungsi dan Peran PKK		8.130.000,-	7.330.000,-	90,16 %		
	Terlaksananya Fungsi dan Peran PKK	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		171.965.622,-	170.517.340,-	99,16 %		
	Terlaksananya Pembangunan Paving Blok	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00 %		
	Terlaksananya Pembangunan Drainase Lingkungan	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)		398.400.000,-	358.200.000,-	89,91 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		3.940.000,-	2.857.000,-	72,51 %	karena adanya pandemi Covid 19 dan adanya rasionalisasi anggaran pada hampir semua kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak optimal dilaksanakan.	Untuk sementara memanfaatkan anggaran yang tersedia, dan diusulkan lagi di anggaran tahun berikutnya.
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik Simpul Paten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		300.000,-	0,00	0,00 %		
	Tersedianya Kualitas Data Kewilayahan	1 Kegiatan	0,00	0,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan		7.451.000,-	6.186.000,-	83,02 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kelurahan					
Dukungan Program Kampung Iklim		3.749.000,-	3.749.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Dukungan Program Kampung Iklim	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan		2.550.000,-	2.550.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan					
Dukungan Kelurahan Sehat		39.765.000,-	17.400.000,-	43,76 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, sehingga hanya terserap pada rapat persiapannya saja.	
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	3 Kegiatan				
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000,-	24.200.000,-	82,88 %		
	Terlaksananya Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000,-	15.000.000,-	75,00 %	dikarenakan adanya wabah covid 19, sehingga hanya	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					terserap pada rapat persiapannya saja.	
	Terlaksananya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		14.300.000,-	9.300.000,-	65,03 %	dikarenakan terkendala waktu pengajuan diakhir Desember,	
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan					
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,-	114.319.100,-	99,41 %		
	Terlaksananya Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum					
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,-	64.140.000,-	98,68		
	Terlaksananya Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,-	100.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wilayah					
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,-	84.274.600,-	97,99		
	Terlaksananya Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,-	41.401.458,-	82,80 %		
	Terlaksananya Peningkatan					

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perekonomian Masyarakat Kelurahan					

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Rawaarum berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 93,88% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Rawaarum berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 85,18% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Rawa Arum telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK TEGALWANGI KRUWUK RT 04/07	450	M2	451,86	M2	52.294.536
II	PAVING BLOCK	LINK KESERANGAN RT 01/04	300	M2	323,15	M2	37.010.000
III	DRAINASE	LINK BUJANGGADUNG KULON RT 02/03	23,1	M3	4,72	M3	33.430.000
III	DRAINASE	LINK KRUWUK RT05/07	15,26	M3	15,35	M3	22.830.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Rawa Arum pada tahun 2020 dilaksanakan untuk 2 jenis pekerjaan yaitu Pembangunan Paving Blok seluas 775,01 M2 yang dilaksanakan di termin I dan II, serta Pembangunan Drainase dengan volume 20,07 M3. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 145.564.536

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Rawa Arum juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
		LUAS	SAT	VOL	SAT		
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Keserangan RT 003/004	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Keserangan RT 003/004	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Keserangan RT 03/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Keserangan RT 03/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Tegal Wangi Solor RT02/06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Tegal Wangi Solor RT02/06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEGALWANGI SOLOR RT 02 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEGALWANGI SOLOR RT 02 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK ASEMGEbang RT 03 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK ASEM GEBANG RT 03 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK TEGALWANGI SOLOR RT 02 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Rawa Arum sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

4. KELURAHAN GEREM

Tabel 3.1.4.1n.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gerem)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		442.023.779,00	408.621.909,00	92,44%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						
Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan		127.509.500,-	127.150.000,-	99,72 %		
	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	54 Orang	54 Orang	100,00 %		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan		155.232.343,-	155.176.625,-	99,96 %		
	Terlaksananya Pembangunan Posyandu	1 Buah	1 Buah	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)		524.700.000,-	518.350.000,-	98,79 %		
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RTRW)	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
	Tersedianya Pakaian Seragam Pengurus Kelembagaan (RT/RW)	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		3.402.000,-	3.402.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik Simpul Paten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan		26.210.000,-	26.210.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBN	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan STQ Tingkat Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Program Kampung Iklim		6.750.000,-	6.750.000,-	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pembinaan Bank Sampah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebersihan Lingkungan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
	Terlaksananya Kegiatan JUMSIH	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00 %		
	Tersedianya Mesin Potong Kayu/Chain Saw	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,-	50.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Peranan PKK Kelurahan		5.780.000,-	5.780.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00 %		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		27.148.000,-	27.148.000,-	100,00 %		
	Tersedianya Seragam Pengurus LPM	10 Buah	10 Buah	100,00 %		
	Tersedianya Honorarium Pengurus LPM	12 Orang	12 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		23.000.000,-	23.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		8.000.000,-	8.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00 %		
Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,-	106.804.000,-	92,87 %		
	Terlaksananya Kapasitas Dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)	50 Orang	50 Orang	100,00 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Keuangan/ Target Kinerja	Realisasi Keuangan/ Realisasi Kinerja	% Keuangan % Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,-	64.140.000,-	98,68 %		
	Pelatihan Kader Kesehatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50 Orang	50 Orang	100,00 %		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,-	100.000.000,-	100,00 %		
	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)					
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,-	84.274.600,-	97,99 %		
	Terlaksananya pelatihan services AC	10 Orang	10 Orang	100,00 %		
	Terlaksananya pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	60 Orang	60 Orang	100,00 %		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,-	30.356.852,-	60,71 %	Wifi Terpasang Bulan November 2020 sebanyak 8 Titik dan selesai di akhir Tahun pemasangan 10 Titik tagihan wifi tidak sesuai dengan pemasangan	Melaksanakan realisasi sesuai dengan output kegiatan yang tercapai
	Jumlah titik yang terpasang wifi	10 Titik	10 Titik	100,00 %		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00 %		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Gerem berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 92,44% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Gerem berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 85,18% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Gerem telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI	
			VOL	SAT	VOL	SAT
I,II,III	POSYANDU	LINK KAGUNGAN RT 02 / 06	1	UNIT	1	UNIT

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Kelurahan di Kelurahan Gerem pada tahun 2020 dilaksanakan untuk pembangunan 1 unit Posyandu yang dilaksanakan dari awal Termin I sampai dengan Termin III.

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Gerem juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
		LUAS	SAT	VOL	SAT		
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Gerem Raya RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Gerem sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

G. KECAMATAN PULOMERAK

Tabel 3.1.4.1o Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Pulomerak)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1,977,110,518.00	1,895,123,059.00	95.85%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Pulomerak)	85.00	83,00	97,64%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Pulomerak)	90.00	96,00	106%		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Pulomerak)	100.00	96,00	96,00%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Kecamatan Pulomerak	100.00	99,00	99,00%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		479,278,890.00	442,714,715.00	92.37%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Pulomerak)	100.00	100	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Pulomerak)	90.00	96,00	106		
Pembinaan Administrasi Kelurahan		4,520,000.00	4,520,000.00	100.00%		
	Tersedianya Pembinaan Administrasi Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		12,466,250.00	12,466,250.00	100.00%		
	Tersedianya Peningkatan Peranan PKK Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%		
Pelaksanaan Musrenbangcam		23,339,200.00	23,339,200.00	100.00%		
	Tersedianya Pelaksanaan Musrenbangcam	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		12,261,674.00	12,232,400.00	99.76%		
	Tersedianya Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00%		
Penyelenggaraan Paten		8,856,150.00	8,856,150.00	100.00%		
	Tersedianya Penyelenggaraan Paten	1 Tahun	1 Tahun	100.00%		
Pengajian Rutin		7,570,000.00	7,570,000.00	100.00%		
	Tersedianya Pengajian Rutin	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%		
Pelaksanaan Jumat Bersih		12,605,616.00	12,590,000.00	99.88%		
	Tersedianya Pelaksanaan Jumat Bersih	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50,000,000.00	43,820,000.00	87.64%		
	Terlaksananya Pengiriman peserta MTQ Tk. Kota Cilegon	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Monitoring Kewilayahan Kecamatan		4,075,000.00	4,075,000.00	100.00%		
	Tersedianya Monitoring Kewilayahan Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100.00%		
Lomba Kelurahan		7,180,000.00	7,180,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Lomba Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)		30,000,000.00	29,410,000.00	98.03%		
	Tersedianya Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup		50,000,000.00	47,500,000.00	95.00%		
	Tersedianya Kegiatan Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup	1 Tahun	1 Tahun	100.00%		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek		40,000,000.00	37,650,000.00	94.13%		
	Tersedianya Kegiatan Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40,000,000.00	39,500,000.00	98.75%		
	Terselenggaranya Kegiatan KORWASDAL Penanggulangan Bencana	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		50,000,000.00	47,885,000.00	95.77%		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)		100,000,000.00	77,715,715.00	77.72%		
	Tersedianya Sosialisasi dan Daya Minat Usaha Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		
	Tersedianya Fasilitas Pendataan, Inkubasing, Marketing, Konsultasi Kepada Usaha Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%		

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 98,91% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- a. Tingkat disiplin aparatur;
Capaian kinerja pada Tingkat disiplin pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 , realisasi capaian kinerjanya adalah 96,00% dari yang ditargetkan sebesar 100%.
- b. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas);
Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 99,00 % dari yang ditargetkan sebesar 100%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- c. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral.
Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 83,00% dari yang ditargetkan sebesar 85,00%.
- d. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.
Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 96,00% dari yang ditargetkan sebesar 90,00%.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan. Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 100% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- c. Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan;
Capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 96,00% dari yang ditargetkan sebesar 90,00%.
- d. Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel).
Capaian kinerja pada Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%.

1. KELURAHAN LEBAK GEDE

Tabel 3.1.4.10.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Lebak Gede)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		476,321,500.00	467,287,738.00	98.10%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85.00	83,00	97,64		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90.00	98,09	108,9		
	Tingkat disiplin aparatur	100.00	98,09	98,09		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100.00	98,26	98,26		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1,433,035,622.00	1,408,899,340.00	98.32%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Pulomerak)	100.00	99,95	99,95		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	90.00	98,32	109		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		94,000,000.00	92,200,000.00	98.09%		
	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan di kelurahan	3.00 Kegiatan	3 Kegiatan	100%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168,215,622.00	168,125,622.00	99.95%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarpraswil Kelurahan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		561,600,000.00	552,000,000.00	98.29%		
	Teralokasikannya Honorarium untuk RT/RW se-kelurahan lebakgede	12.00 Bulan	12 Bulan	100%		
	Terlaksananya Keg. Peningkatan kualitas dan Kapasitas Kelembagaan	1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
	Tersedianya Pakaian Seragam RT/RW	54.00 Orang	54 Orang	100%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		3,990,000.00	3,990,000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Pakaian batik Paten	5.00 Stell	5.00 Stell	100.00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan		51,900,000.00	51,900,000.00	100.00%		
	Terlaksananya PHBI	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya PHBD & PHBN	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		2,705,000.00	2,705,000.00	100.00%		
	Terlaksananya fasilitasi gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		40,000,000.00	39,874,000.00	99.69%		
	Terpenuhinya kegiatan dukungan kelurahan sehat	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		16,900,000.00	16,900,000.00	100.00%		
	Terlaksananya fasilitasi peningkatan peran dan fungsi pkk kelurahan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Pelatihan Pengelasan	5.00 Orang	5.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif	5.00 Orang	5.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		36,650,000.00	36,650,000.00	100.00%		
	Terlaksananya fasilitasi koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25,000,000.00	24,875,000.00	99.50%		
	Terlaksananya fasilitasi pendamping perekonomian kelurahan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		15,075,000.00	15,075,000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Dokumen Pra RAB dan LRA Sarpras Kelurahan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115,000,000.00	113,892,125.00	99.04%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65,000,000.00	61,449,600.00	94.54%		
	Terlaksananya Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100,000,000.00	99,975,000.00	99.98%		
	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86,000,000.00	85,325,000.00	99.22%		
	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50,000,000.00	42,962,993.00	85.93%		
	Tersedianya Fasilitas Internet Hotspot di wilayah Permukiman Penduduk	10.00 Titik lokasi	10 Titik lokasi	100%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman

operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Lebak Gede berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98.10%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Lebak Gede berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98.32% . Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Lebak Gede telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	LINK. Kampung Baru 1	1	UNIT	1	UNIT	120.000.000
III	PAVING BLOCK	Link. Baru 2 RT.02/06	67	M1	68,69	M1	12.983.279

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarpraswil Kelurahan Lebak Gede pada tahun 2020 dialokasikan hanya untuk 2 output yaitu Pembuatan Posyandu dan Paving Blok. Pembangunan Posyandu dilaksanakan selama 3 Termin sepanjang tahun 2020, mengingat pembangunannya memerlukan konstruksi yang lebih rumit dibandingkan Paving Blok serta terkendala pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembangunannya sempat tertunda. Sedangkan untuk Paving Blok baru dilaksanakan pada Termin III dengan realisasi 68,69 M, melebihi prakiraan target 67 M. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 132.983.279.

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Lebak Gede juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Wilulang RT.04/09	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Wilulang RT.04/09	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumur Bambu RT.04/07	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumur Bambu RT.04/07	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumur Bambu RT.04/07	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumur Bambu RT.04/07	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cerema RT.05/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cerema RT.05/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lebak Gede RT.03/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lebak Gede RT.03/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Lebak Gede RT.03/03	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Lebak Gede sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%).

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Lebak Gede terdapat kendala yaitu adanya warga yang terpapar Covid 19 secara bergantian disekitar lokasi pembangunan Paving Blok dan Posyandu, sehingga mengharuskan adanya penundaan pekerjaan selama 7-14 hari. Setelah proses isolasi mandiri dan dinyatakan negatif, maka proses pembangunan dilanjutkan kembali seperti biasa.

2. KELURAHAN TAMAN SARI

Tabel 3.1.4.10.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Taman Sari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		635,498,800.00	610,702,204.00	96.10%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85.00	83,00	97,64		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90.00	95,67	106,3		
	Tingkat disiplin aparatur	100.00	95,67	95,67		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100.00	96,86	96,86		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1,293,320,622.00	1,259,473,109.00	97.38%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	100.00	100	100,00%		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	90.00	97,38	108		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		121,000,000.00	117,000,000.00	96.69%		
	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	12.00 Bulan	12 Bulan	100%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168,215,622.00	168,214,513.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Kewilayahan Kelurahan	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		419,800,000.00	414,600,000.00	98.76%		
	Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12.00 Bulan	12 Bulan	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		1,280,000.00	1,280,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik	100.00 Kegiatan	100.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		29,925,000.00	29,925,000.00	100.00%		
	Terlaksananya PHBI	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBN	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya STQ	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan		13,500,000.00	13,500,000.00	100.00%		
	Pembinaan kerohanian dan pembinaan mental (Sosialisasi dampak pergaulan bebas)	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Turnamen Olahraga	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	25.00 Orang	25.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	6.00 Bulan	6.00 Bulan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	4.00 Triwulan	4.00 Triwulan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lensia	5.00 Orang	5.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Intervensi Lanjutan Keluarga Sehat	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%		
	Tersedianya Honorarium 12 Bulan	12.00 Bulan	12.00 Bulan	100.00%		
	Terlaksananya Koordinasi antar mitra pemerintah	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100.00%		
	Tersedianya Seragam LPM	10.00 Stell	10.00 Stell	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25,000,000.00	22,500,000.00	90.00%		
	Terlaksananya pemantauan dan supervisi terhadap seluruh sasaran yang dibina oleh Perangkat Daerah di masing-masing kelurahan	100.00 ok	100.00 ok	100.00%		
	Terlaksananya pemutakhiran data Usaha Mikro Kecil (UMK)	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		19,400,000.00	19,400,000.00	100.00%		
	Tersedianya Dokumen Pra RAB dan RAB	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115,000,000.00	104,649,726.00	91.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Linmas	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan Kesiapsiagaan Kebencanaan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65,000,000.00	62,820,000.00	96.65%		
	Terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan	50.00 Orang	50.00 Orang	100%		
	Terlaksananya Pelatihan/Pembinaan Kursus Seni Budaya	50.00 Orang	50.00 Orang	100%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100,000,000.00	100,000,000.00	100%		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86,000,000.00	84,730,000.00	98.52%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		
Facilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50,000,000.00	41,653,870.00	83.31%		
	Jumlah titik yang terpasang wifi	10.00 Titik	10.00 Titik	100%		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2.00 Kali	2.00 Kali	100%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Taman Sari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 95,67%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Taman Sari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 97,38.%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Tamansari telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	LINK LANGON INDAH RT 05/06	28	M3	37,12	M3	40.320.000
I	PAVING BLOCK	LINK SUKA SENANG RT 01/02	92	M2	174,74	M2	20.163.000

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
II	RTLH	LINK SUKA SENANG RT 03/01	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
II	RTLH	LINK BABAKAN TURI RT 03/02	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
III	RTLH	LINK BABAKAN TURI RT 05/02	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
III	RTLH	LINK SAWAH RT 05/04	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
III	RTLH	LINK BARU RT 06/04	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000

Pembangunan Sarpraswil DPWkel Kelurahan Tamansari pada tahun 2020 dialokasikan lebih banyak untuk output pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5 unit, yang dilaksanakan pada Termin II sebanyak 2 unit yang terbangun, dan dilanjutkan pembangunan 3 unit lainnya pada Termin III, sedangkan pelaksanaan Termin I direalisasikan untuk Pembangunan Drainase dengan volume 37,12 M3 dan pembangunan paving blok seluas 174,74 M2, jauh melebihi target prakiraan 92 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 142.983.000.

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Tamansari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 07 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 07 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 07 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Baru RT 07 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.sumur jaya RT 04 RW 06	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Baru RT.07/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Baru RT 01 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Baru RT 02	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Baru RT 02 RW 04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Tamansari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWkel di Kelurahan Tamansari terdapat kendala mengingat topografi Kelurahan Tamansari terdapat wilayah dataran tinggi dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di wilayah dataran tinggi dan wilayah dataran rendah, sehingga untuk mobilisasi untuk kegiatan yang dilaksanakan di wilayah dataran tinggi memerlukan anggaran yang lebih dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah dataran rendah.

3. KELURAHAN MEKARSARI

Tabel 3.1.4.1o.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Mekarsari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		491,311,000.00	481,180,405.00	97.94%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85.00	83,00	97,64		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90.00	97,94	108,8		
	Tingkat disiplin aparatur	100.00	97,94	97,94		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100.00	98,71	98,71		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1,287,200,622.00	1,274,407,745.00	99.01%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	100.00	100	100,00		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	90.00	99,01	110		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		121,000,000.00	121,000,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Trantibum Kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Linmas Kelurahan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168,215,622.00	168,215,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	9.00 Lokasi	9.00 Lokasi	100.00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		411,375,000.00	411,180,000.00	99.95%		
	Terlaksananya Koordinasi Kelembagaan Masyarakat	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		55,320,000.00	55,320,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBD/PHBN	0 Kegiatan	0	0%	Kegiatan tidak bisa dilakukan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19	
	Terlaksananya Seleksi Tilawatil Qur'an	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pengajian Rutin	3.00 Bulan	3.00 Bulan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemandian Jenazah	0 Kegiatan	0	0%	Kegiatan tidak bisa dilakukan karena anggarannya	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dialihkan untuk penanganan Covid-19	
Dukungan Kelurahan Sehat		50,000,000.00	49,780,000.00	99.56%		
	Terlaksananya Sosialisasi Pembekalan Kader	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Penyuluhan Germas	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kampanye Keluarga Sehat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Ketuk Pintu TB Paru	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantau Jentik	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Screening Kesehatan Lansia	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pendampingan Intervensi Lanjutan Keluarga Sehat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Tersedianya Obat Pendukung Kegiatan Kader	2.00 Jenis	2.00 Jenis	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		23,090,000.00	23,090,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29,200,000.00	29,200,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	10.00 Orang	10.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13,000,000.00	13,000,000.00	100.00%		
	Tersedianya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115,000,000.00	113,500,000.00	98.70%		
	Pelatihan Trantibum Umum	100.00 Orang	100.00 Orang	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65,000,000.00	64,100,000.00	98.62%		
	Pelatihan Kader	100.00 Orang	100.00 Orang	100.00%		
	Pelatihan / Pembinaan Anggota LKK	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
	Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86,000,000.00	84,730,000.00	98.52%		
	Pelatihan Service AC	10.00 Orang	10.00 Orang	100.00%		
	Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	50.00 Orang	50.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50,000,000.00	41,095,445.00	83.31%		
	Tersedianya Fasilitas Internet Hotspot di Wilayah Permukiman Penduduk	10.00 Titik	10 Titik	100%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Mekarsari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 97,94%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Mekarsari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 99,01% . Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Mekarsari telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK MEKARJAYA RT.001 RW.007	69	M2	160,45	M2	39.851.000
I	DRAINASE U-40	LINK SUKA MULYA RT.003 RW 007	29,2	M3	32,38	M3	14.830.000
I	PAVING BLOCK	LINK SUKARELA RT.006 RW.001	20	M2	35,07	M2	5.870.000
II	PAVING BLOCK	LINK MEDAKSA Rt.001/001	55	M2	71,06	M2	9.990.000
II	PAVING BLOCK	LINK GAMBLANG RT.004/001	110,04	M2	120,1	M2	16.520.000
II	DRAINASE	LINK LANGON 2 RT.003/005		M3	13,44	M3	19.000.000
III	PAVING BLOCK	LINK LANGON 3 RT.001 RW 005	56	M2	77,51	M2	11.940.000
III	TPT (TEMBOK PENAHAN TANAH)	LINK LANGON 3 RT.001 RW 005	4,97	M3	6,26	M3	9.840.000
III	REHAB MOSHOLLA	LINK MEDAKSA RT.001 RW.001	1	UNIT	1	UNIT	15.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Mekarsari pada termin I dilaksanakan pembangunan drainase dan paving blok dengan realisasi output drainase 32,38 M3, dan paving blok 195,52 M2; dilanjutkan pada termin II juga dengan pembangunan paving blok seluas 191,16 M2 dan drainase 13,44 M3, selanjutnya pada Termin III dilaksanakan kembali pembangunan paving blok 77,51 M2 dan pembangunan TPT 6,26 M3 serta rehab musholla sebanyak 1 unit. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 142.900.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Mekarsari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gamblang RT 04 / 01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gamblang RT 04 / 01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Gamblang RT 04 / 01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sukabela RT 06/ 01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sukabela	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sukabela	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Langon	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Langon	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Langon	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Halaman Kelurahan	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Halaman Kelurahan	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Mekarsari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Mekarsari terdapat kendala diantaranya :

- Lokasi kegiatan berada di daerah perbukitan dan pegunungan serta posisi jalan menanjak, dianggarkan mobilisasi tidak sesuai. Sehingga dalam mengangkut barang seperti Paving Block dan material lain harus diangkut dua kali.
- Kurangnya sumber air dalam pengerjaan kegiatan bagi daerah pegunungan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air harus beli.
- Dalam pembangunan draenase vertikal pembelian barang harus ke Bogor, dan pengiriman barang bisa memakan waktu lama, barang dari pabrik kadang masih belum kering, namun bisa terselesaikan diakhir tahun baik pembangunannya maupun pengadministrasian pelaporannya.

4. KELURAHAN SURALAYA

Tabel 3.1.4.10.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Suralaya)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		465,700,500.00	457,047,280.00	98.14%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85.00	83,00	97,64		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	90.00	98,14	109		
	Tingkat disiplin aparatur	100.00	98,14	109		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100.00	98,68	98,68		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1,061,995,622.00	1,050,407,005.00	98.91%		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)	100.00	100	100,00		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan	90.00	98,91	109		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		110,200,000.00	110,200,000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Dukungan pencapaian kota sehat		17,550,000.00	17,550,000.00	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Kompanye Keluarga Sehat	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Mengantar Dahak	25.00 Hari	25.00 Hari	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	4.00 Kegiatan	4.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kegiatan screening Kesehatan Lensia	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168,215,622.00	168,214,841.00	100.00%		
	Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		232,325,000.00	232,215,000.00	99.95%		
	Tersedianya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		36,575,000.00	35,675,000.00	97.54%		
	Terlaksananya PHBI	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya PHBD & PHBN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya STQ	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%		
	Terlaksana Dukungan Program Kampung Iklim	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		4,980,000.00	4,980,000.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25,150,000.00	25,150,000.00	100.00%		
	Tersedianya Honorarium 12 Bulan	10.00 Orang	10.00 Orang	100.00%		
	Terlaksananya Koordinasi antar Mitra Pemerintah	3.00 Kegiatan	3.00 Kegiatan	100.00%		
	Tersedianya Seragam LPM	1.00 Stell	1.00 Stell	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25,000,000.00	24,990,000.00	99.96%		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Perekonomian Kelurahan	2.00 Kegiatan	2.00 Kegiatan	100.00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%		
	Tersedianya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1.00 Tahun	1.00 Tahun	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115,000,000.00	114,513,000.00	99.58%		
	Terlaksananya Satuan Linmas	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65,000,000.00	64,949,600.00	99.92%		
	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
	Terlaksananya Pembinaan LKK	1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	100.00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
	Terlaksananya jaringan Air bersih	1.00 Paket	1.00 Paket	100.00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86,000,000.00	84,730,000.00	98.52%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pelatihan Service AC	10.00 Orang	10.00 Orang	100.00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50,000,000.00	39,969,564.00	79,94%		
	Jumlah Titik Pemasangan WIFI	10.00 Titik	10 Titik	100%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Suralaya berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,14%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Suralaya berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,91%. Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Suralaya telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI	PERMASALAHN YANG DIHADAPI
			VOL	SAT	VOL	SAT		
I	TPT	CISALAK RT 02 RW 05	39,6	M3	42,4	M3	36.930.000	TIDAK ADA
I & II	TPT	CISALAK RT 02 RW 05	80	M3	80,1	M3	70.890.000	TIDAK ADA
III	PAVING	LINK KEMBANG KUNING RT 02 RW 04	192	M2	207	M2	35.163.279	TIDAK ADA
TOTAL ANGGARAN							142.983.279	

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Suralaya memiliki 2 output yaitu TPT dan Paving Blok, Pembangunan TPT dilaksanakan pada Termin I sampai dengan III 122,5 M3 dan Paving Blok dilaksanakan pada Termin III dengan realisasi seluas 207 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 142.983.279

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Suralaya juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK. KUBANG KEPUH RT.001 RW.002	5	Unit	5	Unit	SESUAI	37.797.000
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	LINK. KUBANG KEPUH RT.001 RW.002	1	Unit	1	Unit	SESUAI	23.703.000
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. KUBANG KEPUH RT.002 RW.002	2	Unit	2	Unit	SESUAI	
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	LINK. KUBANG KEPUH RT.004 RW.002	3	Unit	3	Unit	SESUAI	23.500.000
TOTAL ANGGARAN								85.000.000

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Suralaya sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Dalam proses pelaksanaan DPWKel di Kelurahan Suralaya tidak terdapat kendala dan kegiatan berjalan dengan lancar.

H. KECAMATAN JOMBANG

Tabel 3.1.4.1p Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Jombang)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.555.014.638	2.428.513.963	95		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Jombang)	84,00	100,00	119,05		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Jombang)	87,00	98,22	112,90		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Jombang)	94,00	98,83	105,14		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) (Kec. Jombang)	85,00	93,51	110,01		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		441.020.299	347.805.734	79		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) (Kecamatan Jombang)	93	98,02	105,40		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Jombang)	93	100	107,53		
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan		12.290.000	12.010.000	98		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	6	6	100		
Pembinaan Administrasi Kelurahan		12.394.274	12.394.000	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kelurahan	1	1	100		
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan		14.950.000	14.950.000	100		
	Tersedianya Pelaksanaan Jum'at Bersih Kecamatan	6	6	100		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		60.762.000	57.212.000	94		
	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	12	12	100		
Pelaksanaan Musrenbangcam		23.960.000	23.860.000	100		
	Terlaksananya Musrenbangcam	1	1	100		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		18.200.000	18.200.000	100		
	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Pelanggaran PERDA dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan	6	6	100		
Penyelenggaraan Paten		20.000.000	20.000.000	100		
	Tersedianya Peralatan Education	5	5	100		
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN		6.364.025	6.364.025	100		
	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI/PHBN	4	2	50		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50.000.000	47.800.000	96		
	Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Cilegon	103	103	100		
Pengelolaan Bank Sampah		11.950.000	11.950.000	100		
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Bank Sampah	100	100	100		
Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Kecamatan		27.400.000	27.400.000	100		
	Terlaksananya Seleksi Tilawah Qur'an Tingkat Kecamatan	1	1	100		
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		7.750.000	-	-	adanya rasionalisasi anggaran akibat wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 0% .	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Serta pelarangan kerumunan masa berdasarkan surat edaran walikota	
	Tersedianya Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	1	-	-		
Pembinaan dan Monitoring Linmas		15.000.000	7.650.000	51	Belanja jasa upah tenaga kerja tidak sempat terserap	
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Linmas	1	-	-		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM)		30.000.000	29.960.000	100		
	Terlaksananya Rakor pimpinan lingkup kecamatan dalam upaya trantibum	2	2	100		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		30.000.000	-	-	adanya rasionalisasi anggaran akibat wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 0% . Serta pelarangan kerumunan masa berdasarkan surat edaran walikota	
	Terlaksananya KORWASDAL Penanggulangan Bencana Kecamatan Jombang	2	-	-		
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)		100.000.000	58.055.709	58	Kegiatan baru muncul diperubahan anggaran, ditambah dengan hambatan pandemi covid 19, serta ada kesalahan kode rekening	Akan dievaluasi dan direncanakan dengan lebih baik kedepannya dengan mempertimbangkan situasi pandemi

1. KELURAHAN JOMBANG WETAN

Tabel 3.1.4.1p.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Jombang Wetan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta						



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		590.500.394	563.778.616	95		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.682.465.622	1.536.656.324	91,334		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		166.000.000	162.625.000	97,97		
	Terlaksananya Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	-	-		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		172.965.622	172.142.341	99,52		
	Terlaksananya Sarana Prasarana Kewilayahan Kelurahan	1	-	-		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		765.700.000	765.335.000	99,95		
	Terlaksananya Peningkatan Kordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW/LPM)	12	-	-		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		3.875.000	3.875.000	100,00		
	Tersedianya Pakaian Petugas PATEN	2	-	-		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		45.350.000	45.350.000	100,00		
	Terlaksananya Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN	5	-	-		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00		
	Tersedianya Dukungan Kelurahan Sehat	5	5	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		10.600.000	10.600.000	100,00		
	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	4	4	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		20.100.000	20.100.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	4	4	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		18.875.000	18.875.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Terlaksananya pendampingan bidang ekonomi dan pembangunan kelurahan	2	2	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	-	-	adanya rasionalisasi anggaran akibat wabah covid 19, dan karena kegiatan ini berpotensi terjadi pengumpulan masa.	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan	50	-	-		
	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana	100	-	-		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.100.000	98,62		
	Pelatihan Kader Kesehatan	50	-	-		
	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50	-	-		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	99.375.000	99,38		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Pelatihan Tata Rias Pengantin, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengembangan Motorik Anak PAUD	5	5	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	5	5	100,00		
Facilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	25.278.983	50,56	dikarenakan WIFI untuk masyarakat sebagian tidak dapat digunakan akibat dari kendala dalam teknis pemasangan.	Memaksimalkan dalam perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
	1. Jumlah titik pemasangan wifi	10	-	-		
	2. Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2	-	-		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Jombang Wetan telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	LINK.JOMBANG WETAN RT 05 RW 05	1	UNIT	1	UNIT	130.000.000
III	PAVING BLOCK	LINK. GUDANG RT 002 RW 003	58,5	M2	75,2	M2	17.020.779

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Jombang Wetan dilaksanakan untuk 2 output yaitu pembangunan 1 unit Posyandu pada termin I s.d. Termin III dan pembangunan Paving Blok pada Termin III seluas 75,2 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 147.020.779

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Jombang Wetan juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Barokah RT.004 RW.0013	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Barokah RT.004 RW.0013	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Barokah RT.004 RW.0013	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kp. Telu RT. 005 RW. 004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kp. Telu RT. 005 RW. 004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kp. Telu RT. 005 RW. 004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Barokah Rt. 004/013	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Barokah Rt. 004/013	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Barokah Rt. 004/013	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kp. Telu RT. 005 RW. 004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kp. Telu RT. 005 RW. 004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Jombang Wetan sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Pada pelaksanaan pembangunan sarpraswil DPWkel di Kelurahan Jombang Wetan, kendala yang ditemui yaitu Tidak terserapnya anggaran, terbentur rasionalisasi UP. DAU anggaran 100 juta, realisasi 99.375.000 (99,38%), tidak terserap 625.000 (0,62%). APBD anggaran 172.965.622, realisasi 172.142.341 (99,52%), tidak terserap 823.281 (0,48%).

2. KELURAHAN MASIGIT

Tabel 3.1.4.1p.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Masigit)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN MASIGIT						
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		532.577.466	506.139.440	95,04		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.386.045.000	1.360.816.167	98,180		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		160.600.000	160.600.000	100,00		
	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1	1	100,00		
	Terlaksananya Honor Linmas	12	12	100,00		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		9.500.000	9.500.000	100,00		
	Rapat pkk kelurahan	3	3	100,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		165.200.000	165.000.000	99,88		
	Pekerjaan Posyandu	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		482.600.000	473.221.800	98,06		
	Tersedianya Honor RT/RW	1.776	1.776	100,00		
	Tersedianya Seragam RT/RW	46	46	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		36.200.000	36.200.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI/PHBN	4	4	100,00		
	Terlaksananya Pengajian Rutin Bulanan	12	12	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan STQ	1	1	100,00		
Dukungan Program Kampung Iklim		13.745.000	13.745.000	100,00		
	Dukungan pelaksanaan kebersihan lingkungan	12	12	100,00		
	Terlaksananya penanaman pohon	200	200	100,00		
	Edukasi tentang kebersihan lingkungan	1	1	100,00		
Dukungan pencapaian kota sehat		50.000.000	49.750.000	99,50		
	Dukungan Kelurahan Sehat	1	1	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000	19.200.000	100,00		
	Tersedianya Honor LPM	120	120	100,00		
	Tersedianya Seragam LPM	10	10	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Terlaksananya pemantauan dan supervisi terhadap seluruh sasaran yang dibina oleh perangkat daerah masing masing kelurahan	100	100	100,00		
	Terlaksananya pemutakhiran data UKM	1	1	100,00		
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan TGT	1	1	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Tersedianya dokumen Pra RAB dan RAB	2	2	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	112.161.000	97,53		
	Terlaksananya Pelatihan trantibum dan Kesiapsiagaan Bencana	2	2	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	61.800.000	95,08		
	Terlaksananya Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		
	Terbangunnya sarana dan prasarana wilayah	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Pelatihan Tata Rias ,Pelatihan Menjahit,Pelatihan Pengembangan Motorik Anak PAUD	1	1	100,00		
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	40.638.367	81,28		
	1. Jumlah titik pemasangan wifi	10	10	100,00		
	2. Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Masigit telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	LINK.TERATE UDIK RT 001/RW 002	1	UNIT	1	UNIT	130.000.000
III	PAVING BLOCK	LINK. JOMBANG KALI RT 001 RW 009	49	M ²	74	M ²	10.420.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Masigit dilaksanakan untuk 2 output yaitu pembangunan 1 unit Posyandu pada termin I s.d. Termin III dan pembangunan Paving Blok pada Termin III seluas 74 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 140.420.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Masigit juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Jombang Kali RT 03/09	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Jombang Kali RT 02/09	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Jombang Kali RT 02/09	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Jombang Kali RT 03/09	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Jombang Kali RT 03/09	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kenanga RT 05/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kenanga RT 05/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Metro Garden RT 01/10	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kavling Blok C RT 05/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kavling Bok C RT 05/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kavling Bok C RT 05/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Masigit sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Pada pelaksanaan pembangunan sarpraswil DPWkel di Kelurahan Masigit, kendala yang ditemui yaitu Untuk pengadaan material drainase vertical, harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menghambat waktu pembangunan, tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu Memperbanyak supplier material drainase vertical yang berkualitas baik.

3. KELURAHAN SUKMAJAYA

Tabel 3.1.4.1p.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Sukmajaya)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN SUKMAJAYA						
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		465.038.532	452.388.496	97		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.176.796.490	1.159.157.659	98,501		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		103.000.000	103.000.000	100,00		
	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12	12	100,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.533.122	168.318.966	99,87		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah Kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		262.325.000	262.200.000	99,95		
	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	80	80	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		62.755.000	62.755.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	3	3	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00		
	Terlaksana nya Dukungan Kelurahan Sehat	7	7	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		3.400.000	3.400.000	100,00		
	Terlaksana nya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12	12	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		42.000.000	42.000.000	100,00		
	Terlaksana nya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja	2	2	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		35.333.368	35.333.000	100,00		
	Tersedianya Honorarium 12 Bulan	12	12	100,00		
	Terlaksana nya Koordinasi Antar Mitra Pemerintah	4	4	100,00		
	Tersedianya Seragam LPM	10	-	-		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Terlaksana nya Pemantauan dan Supervisi Terhadap Seluruh Sasaran Yang Dibina Oleh Perangkat Daerah di Masing-Masing Kelurahan	100	100	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksana Nya Pemutakhiran Data Usaha Mikro Kecil (UMK)	1	1	100,00		
	Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.450.000	13.450.000	100,00		
	Terlaksana nya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	100	100	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	110.162.400	95,79		
	Terlaksananya Pelatihan Anggota Linmas	40	40	100,00		
	Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana pada Masyarakat	100	100	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	61.846.300	95,15		
	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	35	35	100,00		
	Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	60	60	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	99.400.000	99,40		
	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	85.297.700	99,18		
	Terlaksananya Pelatihan Servis Ac	10	10	100,00		
	Terlaksananya Pelatihan Menjahit	5	5	100,00		
	Terlaksananya Motorik Anak	5	5	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	41.994.293	83,99		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10	10	100,00		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Sukmajaya telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

KELURAHAN	TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
				VOL	SAT	VOL	SAT	
SUKMAJAYA	I	DRAINASE	SENEJA RT 03 RW 01	90	M3	79	M3	57.301.261
SUKMAJAYA	II	DRAINASE	SENEJA RT 03 RW 02	67,5	M3	79	M3	42.975.946
SUKMAJAYA	III	DRAINASE	NYIKAMBANG RT 02 RW 03	67,5	M3	79	M3	42.975.946

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Sukmajaya dilaksanakan untuk 1 output yaitu pembangunan drainase yang dilaksanakan sebanyak 1 pekerjaan di masing-masing termin 1 s.d. 3 dengan total realisasi volume 237 M2 dari target total 225 M2. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 143.253.153

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Sukmajaya juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Seneja Jambu RT. 001/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Seneja RT. 003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Seneja RT. 003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Seneja RT. 003/001	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sawah RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Sawah RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Sawah RT.001/002	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Nyikambang RT.002/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kranggut RT.003/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Priuk RT.005/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Nyikambang 002/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Sukmajaya sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Pada pelaksanaan pembangunan sarpraswil DPWkel di Kelurahan Sukmajaya, kendala yang ditemui yaitu Untuk Drainase di Seneja sudah terbangun (full) sehingga pembangunan drainase dialihkan ke Nyikambang.

4. KELURAHAN PANGGUNRAWI

Tabel 3.1.4.1p.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Panggungrawi)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN PANGGUN RAWI						
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		544.956.000	534.202.940	98		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.291.205.622	1.259.498.932	97,544		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		95.800.000	95.700.000	99,90		
	Terlaksananya Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12	12	100,00		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		18.885.000	18.885.000	100,00		
	Terlaksananya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	12	12	100,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.215.622	156.829.000	93,23		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		438.600.000	438.390.000	99,95		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	42	42	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.300.000	2.300.000	100,00		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12	12	100,00		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		1.670.000	1.670.000	100,00		
	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	-	-	#DIV/0!		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		38.000.000	38.000.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan		2.835.000	2.835.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	1	1	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	49.750.000	99,50		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	12	12	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25.900.000	25.900.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	10	10	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3	3	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	107.502.500	93,48		
	Jumlah Kegiatan	2	2	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	60.400.000	92,92		
	Jumlah Kegiatan	2	2	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	jumlah lokasi Sarpras	2	2	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masy. Di bidang Pelatihan	3	3	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	42.337.432	84,67		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10	10	100,00		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Panggungrawi telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	Link. Kependilan RT 04/01	1	Unit	1	Unit	144.550.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Panggungrawi dilaksanakan hanya untuk 1 output yaitu pembangunan 1 unit Posyandu pada termin I s.d. Termin III. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 144.550.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Panggungrawi juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Pal Asem RT 01/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sukadamai RT 02/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sukadamai RT 02/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Pal Asem RT 01/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sukadama RT 02/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sukadama RT 02/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pal Asem RT 01/07	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pal Asem RT 01/07	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kependilan RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kependilan RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kependilan RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Panggungrawi sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

5. KELURAHAN GEDONG DALEM

Tabel 3.1.4.1p.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Gedong Dalem)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
KELURAHAN GEDONG DALEM						
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		512.357.000	497.049.272	97		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.174.910.622	1.154.724.316	98,282		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		90.400.000	90.400.000	100,00		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	Tersediannya ketentraman dan ketertiban lingkungan	12	12	100,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		175.250.622	168.305.060	96,04		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Tersediannya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		333.335.000	332.954.900	99,89		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	Tersediannya Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	2	2	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		4.500.000	4.500.000	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	Tersediannya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12	12	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		40.725.000	40.725.000	100,00		
	Terlaksananya Peringatan Hari Besar PHBI/PHBN , Pelaksanaan Tilawatil Quran,	4	4	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		44.000.000	42.800.000	97,27		
	terlaksananya krg ketuk pintu TB paru, Pemberantasan sarang nyamuk, Kesehatan lansia, pendampingan keluarga sehat	12	12	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		15.500.000	15.500.000	100,00		
	Tersediannya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12	12	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		22.200.000	22.200.000	100,00		
	Tersediannya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12	12	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Terlaksananya Pemantauan dan Supervisi, Evaluasi UMKM, Pemutahiran	3	-	-		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	data UMKM, Terlaksanannya Pelatihan TTG					
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan pembangunan Kelurahan	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	110.510.000	96,10		
	-Terlaksanannya Peningkatan Kapsitas dan Kapabilitas Kesiap siagaan bencana di masyarakat	2	2	100,00		
	-Pengolahan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan keamanan Lingkungan Masyarakat	1	1	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.575.000	99,35		
	-Pengeolahan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2	2	100,00		
	-Pengolahan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	#DIV/0!		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		
	Terlaksanannya Sarana Prasarana Kewilayahan Kelurahan	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Terlaksanannya Peningkatan Kapsitas dan Kapabilitas Masyarkat di bidang Pelatihan	3	3	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	43.254.356	86,51		
	terwujudnya transformasi digital UMKM yang mandiri	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Gedogn Dalem telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	LINK KEDUNG RT 01 RW 04	33,18	M3	37	M3	46.840.000
I	DRAINASE	LINK CIGECEH RT 03 RW 01	7,7	M3	10,15	M3	12.420.000
II	TPT	LINK.PECEK RT 02 RW 03	42,6	M3	44,5	M3	40.380.000
III	TPT	LINK.PECEK RT 03 RW 03	42,6	M3	49,7	M3	40.380.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Gedong Dalem dilaksanakan untuk 2 output yaitu pembangunan drainase pada termin I dengan total realisasi volume 47,15 M3 dan dilanjutkan dengan pembangunan TPT pada termin II dan III dengan total realisasi volume 94,2 M3. Total Realisasi keuangan untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 140.020.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Gedong Dalem juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Metro Villa RT.001 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Metro Villa RT.002 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Metro Villa RT.002 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Metro Villa RT.002 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Metro Villa RT.002 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Metro Villa RT.003 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Gedong Dalem sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

Pada pelaksanaan pembangunan sarpraswil DPWKel di Kelurahan Gedong Dalem, kendala yang ditemui yaitu Minimnya pengetahuan dan peran serta masyarakat serta belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan DPWKel, tindak lanjut yang dilaksanakan yaitu Mengoptimalkan sosialisasi, pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta mengoptimalkan perencanaan pra musrenbang tentang DPWKel.

ANALISIS KETERCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dukungan pelayanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Program dukungan pelayanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Program dukungan pelayanan pemerintahan memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral;
2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
3. Tingkat disiplin aparatur; dan
4. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas).

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral, perhitungannya diperoleh dari : jumlah pemenuhan data SPM, LPPD, LKPJ dibagi jumlah data SPM, LPPD, LKPJ yang harus ada dikali 100%. Pada tahun 2020, target kinerja indikator persentase ketersediaan data dan informasi sektoral sebesar 84 % dan realisasi 100% sehingga capaian mencapai 119,05%. Ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan dan berhasil dalam meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah pada aspek pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Capaian tersebut

didukung oleh kegiatan-kegiatan : Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah, Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, perhitungannya diperoleh dari : jumlah asset OPD dalam kondisi baik dibagi jumlah keseluruhan asset OPD yang tercatat di BPKAD dikali 100%. Berdasarkan laporan asset pengurus barang tahun 2020, Jumlah Aset Kecamatan Jombang yang tercatat di Bagian Aset BPKAD adalah sebesar Rp 9.185.348.792,27 dengan rincian asset dalam kondisi baik sebesar Rp 9.021.717.313,70 (atau 98,22% dari total asset) dan asset dengan kondisi rusak berat sebesar Rp 163.631.478,57 (atau 1,78% dari total asset . Terkait dengan asset yang dalam kondisi rusak beberapa sudah diusulkan penghapusan di Gudang BPKAD.

Pada tahun 2020 target kinerja indikator persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik sebesar 87 % dan realisasi 98,22% sehingga capaian mencapai 112,90%. Ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan dan berhasil dalam meningkatkan meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah pada aspek sarana dan prasarana perkantoran dengan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dikarenakan rencana program pengadaan dan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan kantor. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer. Pengadaan Awning.

Pada Tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya anggaran yang dirasionalisasikan akibat Pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleir, Pengadaan Komputer dan Pengadaan Meubeleir.

Target kinerja indikator tingkat disiplin aparatur sebesar 94 % dan realisasi 98,83% sehingga capaian mencapai 105,14%. Ketercapaian tersebut, kurang dari yang ditargetkan dan belum berhasil dalam meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah pada kepegawaian. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran dari pegawai akan pentingnya kehadiran. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan pembinaan dapat meningkatkan kesadaran pegawai Kecamatan Jombang. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan : Penyediaan Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Promosi Propaganda, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rata-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, Penyediaan Pakaian Olah Raga, Penyediaan Jasa Jaminan/ Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada Tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya anggaran yang dirasionalisasikan akibat Pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Pameran Hari Jadi.

Pada tahun 2020, target kinerja indikator kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) sebesar 85% dan realisasi 93,51% sehingga capaian mencapai 110,01%. Ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan dan berhasil dalam meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah pada aspek pengelolaan keuangan dengan didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini dikarenakan

rencana program sesuai dengan kebutuhan. Capaian tersebut didukung oleh semua kegiatan yang terdapat dalam 2 program yang telah ditetapkan meliputi 21 kegiatan pada program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dan 16 kegiatan pada program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintah kecamatan dan kelurahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga tercapainya masyarakat cilegon yang sejahtera.

Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

1. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel); dan
2. Persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan.

Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur proporsi ketercapaian pelaksanaan realisasi anggaran Dana Pembangunan Wilayah (DPW Kel) dengan target anggaran Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) yang dana penggunaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana lokal di lingkungan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) realisasi kinerjanya mencapai 98,02%, dari yang ditargetkan 93%, maka capaiannya 105,40%. Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis pada indikator tersebut diperoleh gambaran bahwa Kecamatan Jombang Kota Cilegon berhasil mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Hal ini dikarenakan rencana program pembangunan di lingkungan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selain itu juga adanya koordinasi yang baik antara aparat Kecamatan dan Kelurahan yang terus memantau dan mengawasi perkembangan pembangunan agar sesuai dengan Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikerjakan secara swakelola oleh Anggota Tim Kelompok Masyarakat (Pokmas). Adapun beberapa jenis pekerjaan pembangunan diantaranya; Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok, Pembangunan Drainase, Pembangunan Pemagaran Makam, Normalisasi Saluran Air Drainase dan Pembangunan Posyandu. Sehingga hasil dari pembangunan yang sudah dihibahkan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon, agar dijaga dan dimanfaatkan masyarakat sekitar lingkungan Kelurahan dengan sebaik-baiknya agar terjalin keberlangsungan pembangunan selanjutnya secara bertahap pada tahun yang akan datang. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan : Pelaksanaan Pra Musrenbangkel, Pelaksanaan Musrenbangkel, Pelaksanaan Musrenbangcam, Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Keluraha, Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan).

Anggaran Pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) terdiri dari 2 yaitu Anggaran APBD dan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk anggaran dari APBD besar anggaran DPW Kel se-Kecamatan Jombang sebesar Rp 850.164.988,00 dan terealisasi sebesar Rp



830.595.367,00, dengan capaian 97,70%. Dan untuk anggaran dari DAU sebesar Rp 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 498.775.000,00 dengan capaian 99,76%.

Berikut disajikan ketercapaian pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW Kel) untuk masing-masing kelurahan di Kecamatan Jombang :

1. Kelurahan Jombang Wetan

APBD

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Posyandu	Jl. Ahmad Yani No. 1 Rt/Rw. 5/3	Rp 130.000.000,00
Paving Blok	Link. Gudang Rt/Rw. 02/03	Rp 17.020.779,00
Biaya Operasional		Rp 17.296.562,00
Total Anggaran		Rp 164.317.341,00

DAU Tambahan

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Drainase Vertikal		Rp 85.000.000,00
Biaya Operasional		Rp 10.000.000,00
Total Anggaran		Rp 95.000.000,00

2. Kelurahan Masigit

Anggaran APBD

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran



Posyandu	Link.Terate Udik Rt/Rw. 01/02	Rp 130.000.000,00
Paving Blok	Link. Jombang Kali Rt. 01/09	Rp 10.420.000,00
Biaya Operasional		Rp 16.520.000,00
Total Anggaran		Rp 156.940.000,00

Anggaran DAU Tambahan :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Drainase Vertikal 11 Unit		Rp 85.000.000,00
Biaya Operasional		Rp 10.000.000,00
Total Anggaran		Rp 95.000.000,00

3. Kelurahan Sukmajaya

Anggaran APBD :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Drainase	Link. Seneja Rt/Rw. 03/01	Rp 143.253.153 ,00
Biaya Operasional		Rp 16.853.213 ,00
Total Anggaran		Rp 160.106.466,00



Anggaran DAU Tambahan :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Sumur Resapan	Link. Seneja Jambu Rt/Rw. 01/01 Link. Seneja Rt/Rw. 03/01 Link. Sawah Rt/Rw. 01/02	Rp 84.000.000,00
Biaya Operasional		Rp 11.000.000,00
Total Anggaran		Rp 95.000.000,00

4. Kelurahan Panggung Rawi

Anggaran APBD :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Posyandu	Link. Kependilan Baru Rt/Rw. 04/01	Rp 130.000.000,00
Biaya Operasional		Rp 16.800.000,00
Total Anggaran		Rp 146.800.000,00

Anggaran DAU Tambahan :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Sumur Resapan	Link. Kependilan Rt/Rw. 02/01	Rp 85.000.000,00



	Link.Sukadamai Rt/Rw. 03/07	
Biaya Operasional		Rp 10.000.000,00
Total Anggaran		Rp 95.000.000,00

5. Kelurahan Gedong Dalem
Anggaran APBD :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Drainase	Link. Cigiceh Rt/Rw. 03/01 Link Kedung Rt. 01/04	Rp 140.020.000,00
TPT	Link. Pecek Rt/Rw. 02/03 Link. Pecek Rt/Rw. 03/03	
Biaya Operasional		Rp 17.525.060,00
Total Anggaran		Rp 157.545.060,00

Anggaran DAU Tambahan :

Jenis Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Alokasi Anggaran
Drainase Vertikal 11 Titik	Link. Metro Villa	Rp 86.000.000,00
Biaya Operasional		Rp 10.000.000,00
Total Anggaran		Rp 96.000.000,00

Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang yang telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat dijadikan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas perangkat daerah, yang berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh aparatur untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas pekerjaannya. Sehingga dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah keharusan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selain itu juga, dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ini bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat berjalan secara tertib, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang, diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah pelayanan yang memiliki SOP dibagi per jumlah pelayanan yang ada di Kecamatan dikali 100% (seratus) persen. Kecamatan Jombang memiliki 2 (dua) jenis pelayanan yaitu; Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan. Maka kedua Jenis Pelayanan tersebut yang memiliki SOP sebanyak 16 SOP dari 16 Pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jombang dengan capaiannya 100%.

Ke-16 produk pelayanan tersebut adalah :

PRODUK PELAYANAN PERIJINAN	
1)	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah/ Ruko/ Kantor Baik Baru, Perubahan Maupun Pemutihan dengan Kriteria Luas Lebih Kecil atau Sama Dengan 150m ² , Dikecualikan Bangunan Yang Dibangun Oleh Pengembang (Developer)
2)	Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
3)	Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
4)	Izin Penyelenggaraan Hiburan Keliling (Sirkus/Komidi Putar/ Pasar Malam dan Sejenisnya)
5)	Pemberian Izin Pemasangan Rekmale (Spanduk, Umbul-umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol)
6)	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
7)	Surat Rekomendasi Izin Keramaian

PRODUK PELAYANAN PERIJINAN	
8)	Surat Pengantar Untuk Penerbitan Rekomendasi Izin Menara Telekomunikasi Sebagai Sarana Prasarana Telekomunikasi
PRODUK PELAYANAN NON PERIJINAN	
1)	Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI/WNA antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Cilegon
2)	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI/WNA antar Kecamatan dalam Wilayah Kota Cilegon
3)	Pengantar Permohonan Pembuatan KTP
4)	Pengantar Permohonan Pembuatan KK
5)	Surat Keterangan Tidak Sengketa
6)	Surat Peralihan Hak Atas Tanah/ Bangunan
7)	Surat Pengantar SKCK
8)	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Maka Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Jombang diperoleh realisasi kinerjanya mencapai 100%, dari yang ditargetkan 93%, maka capaiannya 107,53%. Sehingga ketercapaian tersebut, melebihi dari yang ditargetkan Kecamatan Jombang Berhasil dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis pelayanan yang ada pada unit kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Jombang secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur agar terciptanya lingkungan pelayanan yang efektif, efisien, tertib dan teratur.

Capaian tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan : Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan Administrasi Kelurahan, Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan, Peningkatan Peranan PKK Kecamatan, Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan, Penyelenggaraan PATEN, Dukungan Penyelenggaraan PHBI/ PHBN, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon, Pengelolaan Bank Sampah, Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan, Pembinaan Monitoring Linmas, Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan, Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan, Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW), Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul PATEN), Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan, Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Pemasarakatan Kelurahan, Dukungan Program Kampung Iklim, Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM), Dukungan Kelurahan Sehat, Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja , Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi pendampingan Perekonomian Kelurahan, Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan, Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan), Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kessos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan), Peningkatan Kapasitas dan

Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan), Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan), Pendampingan Ketenagakerjaan Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek (DID Tambahan)

Pada Tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya anggaran yang dirasionalisasikan akibat Pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan tersebut seperti : Dialog/ Audensi dengan Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Tokoh Masyarakat, Penyusunan Profil Kecamatan, Pembinaan dan Monitoring Penerapan Teknologi Tepat Guna, Peningkatan Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (Tomaliga), Fasilitas Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja, Pemberdayaan Organisasi/ Lembaga Kepemudaan, Dukungan Operasional Kessos Berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup, Pendampingan Ketenagakerjaan Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pemasangan Plang Nama Jalan Lingkungan Kelurahan, Pembangunan Tugu Selamat Datang Kelurahan.

I. KECAMATAN CITANGKIL

Tabel 3.1.4.1q Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Citangkil)

4.3.1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.723.868.362,00	2.622.013.569,00	96,26%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Citangkil)	95%	96,00	91,00		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran	100,00	96,00	96,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	dalam kondisi baik (Kec. Citangkil)					
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Citangkil)	95,00	96,00	85,00		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) (Kec. Citangkil)	100,00	96,00	91,00		

4.3.2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						
	"Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Citangkil)"	95,00%	98,00	100,00 %		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Citangkil)	93,00%	93,00	100,00%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan		23.932.000	22.572.000	94.32%		
	Tersedianya kegiatan kemasyarakatan	1 keg	00,0	0,00%		
Penyusunan Profil Kecamatan		0,00	0,00	0,00%	Adanya rasionalisasi Anggaran kegiatan untuk penanganan covid 19	
	Adanya profil kecamatan	10,00 buku	0,00	0,00%		

4.3.2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						
	"Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Citangkil)"	95,00%	98,00	100,00 %		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Citangkil)	93,00%	93,00	100,00%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan						
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Kepada Organisasi Kemasyarakatan		23.932.000	22.572.000	94,32%		
	Tersedianya kegiatan kemasyarakatan	1 keg	1 keg	100,00%		
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan	Terlaksananya kegiatan jum'at bersih di lingkungan kecamatan citangkil	27.950.000	21.090.000	75,46%	Dikarenakan ada kebijakan sosial distancing (PSBB) dikota Cilegon	
	Terlaksananya kegiatan jum'at bersih di lingkungan kecamatan citangkil	12,00 bln	12,00 bln	100,00%		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		52.505.000	50.795.000	96,74%		
	Adanya peran PKK kecamatan Citangkil	12,00 bln	12,00 bln	100,00%		
Pelaksanaan Musrenbangcam		25.420.000	21.520.000	84,66%		
	Terlaksananya kegiatan Musrenbangcam	1.keg	1,00 keg	100,00%		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		26.504.000,00	26.504.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan penegakan perundang-undangan dan keamanan lingkungan kecamatan citangkil	12,00 bln	12,00 bln	100,00%		
Pengajian Rutin		7.100.000,00	7.100.000,00	100,00%		
	Terlaksananya pengajian rutin di kecamatan Citangkil	11,00 bln	11,00 bln	100,00%		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50.000.000,00	47.500.000,00	95,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan MTQ	1,00 keg	1,00 keg	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan		5.690.000,00	5.690.000,00	100,00%		
	Adanya kegiatan dukungan kepemudaaan	1,00 keg	1,00 keg	100,00%		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)		60.340.000,00	60.337.000,00	100,00%		
	Adanya dukungan kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOPIMKA)	12,00 bln	12,00 bln	100,00%		
Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup		7.150.000,00	7.150.000,00	100,00%		
	Meningkatkan Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup	1,00 keg	1,00 keg	100,00%		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%		
	Untuk meningkatkan KORWASDAL Penanggulangan Bencana dilingkungan Kecamatan Citangkil	1,00 keg	1,00 Keg	100,00%		
Pembangunan Gedung serba guna dan Posyandu		350.000.000,00	0,00	0,00%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya perencanaan dan terbatasnya waktu pelaksanaan.	Kedepan akan melakukan perencanaan dengan target yang telah ditentukan
	Terlaksananya Pembangunan Gedung Posyandu	1,00 gedung	0,00	0,00%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya perencanaan dan terbatasnya waktu pelaksanaan.	Kedepan akan melakukan perencanaan dengan target yang telah ditentukan
Pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat		100.000.000,00	63.990.206,00	63,99%	Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan	Kedepan akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
dan Posyantek (DID Tambahan)					ketidaksiannya kode rekening pada DPA yang ada.	

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Kecamatan Citangkil Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Program Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat agar terciptanya tatakelola pemerintah kecamatan dan kelurahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, santun dan berwibawa sehingga diharapkan masyarakat Cilegon sejahtera.

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 98,00% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- Tingkat disiplin aparatur;
Capaian kinerja pada Tingkat disiplin pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 85,00%.
- Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 91,00 %. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020.
- Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral
Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 91,00%
- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.
Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 96,00%.

Indikator keberhasilan program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan yaitu proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) dan persentase penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di kecamatan . Rata-rata realisasi kinerja capaiannya 100% dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon sebesar 100%. Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan :

- Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan;
Capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100,00%.
- Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel).
Capaian kinerja pada Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%.

1. KELURAHAN CITANGKIL

Tabel 3.1.4.1q.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Citangkil)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		412.510.000,00	402.494.175,00	97,57%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.427.382.122,00	1.394.172.413,00	97,67%		
Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)		1.409.360.622,00	1.381.288.022,00	98,01%		
		1	1	100%		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		148.000.000,00	147.669.000,00	99,78%		
		50,00 anggota	50,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		171.915.622,00	171.915.622,00	100,00%		
	Terlaksananya Pembangunan sarana Prasarana wilayah Kelurahan	1,00 paket	1,00 paket	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		466.450.000,00	466.423.600,00	99,99%		
	Terlaksananya Peningkatan RT/RW Kelurahan	44,00 rt/rw	44,00 rt/rw	100,00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%		
	Terciptanya Pelayanan Publik yang tertib	6.00 keg	6.00	100,00%		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya peningkatan Data	1,00 paket	1,00 paket	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		49.975.000,00	49.975.000,00	100,00%		
	terlaksananya Kualitas Kehidupan Pemasyarakatan	8.00 keg	8.00	100,00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		15.700.000,00	15.700.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Program iklim	5,00 keg	5,00 keg	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	46.990.000,00	93,98%		
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Kota Sehat	3,00 keg	3,00 keg	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		9.800.000,00	9.800.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Fungsi dan peran PKK	20,00 org	20,00 org	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%		
	Honor Pengurus LPM	10,00 anggota	100,00 anggota	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.500.000,00	22.400.000,00	99,56%		
	Terciptanya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	100,00 org	100,00 org	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		23.820.000,00	23.820.000,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersediannya Dokumen perencanaan (Pra RAB dan RAB)	2,00 keg	2,00	100,00%		
	Meningkatnya Kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi bencana	80,00%	80,00	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	63.622.000,00	97,88%		
	Pelatihan Kesehatan	75,00 org	75,00 org	100,00%		
	Pembinaan LKK	60,00 org	60,00 org	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%		
	Terbangunya sarana prasarana Wilayah	90,00	90,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	82.774.000,00	96,25%		
	Pelatihan Service AC	10,00 org	10,00%	100,00%		
	Pengembangan bidang Pendidikan dan kebudayaan PAUD	60,00 org	60,00 org	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	41.547.793,00	83,10%		
	jumlah Titik pemasangan WIFI	10,00 titik	10,00 titik	100,00%		
	Sosialisai bagi pelaku UMKM	2,00 kali	2,00 kali	100,00%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Citangkil berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 97,65% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 99,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan

Kotasari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 97,67%, Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 98,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 maka anggaran pada kegiatan tersebut tidak terserap semuanya, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	PAVING BLOCK	Link. Rawa Gondang RT/RW. 02/06	186	M2	308,42	M2	34.020.000
I	PAVING BLOCK	Link. Tegal Cabe RT/RW. 03/02	156,5	M2	179,76	M2	26.050.000
II	PAVING BLOCK	Link. Sambimanis RT/RW. 02/05	111	M2	170,1	M2	20.040.000
II	PAVING BLOCK	Link. Masigit RT/RW. 03/08	118	M2	118,9	M2	22.800.000
III	PAVING BLOCK	Link. Ramanuju Tegal RT/RW. 02/11	39	M2	76,16	M2	9.270.000
III	PAVING BLOCK	Link. Ramanuju Baru RT/RW. 03/09	159	M2	196,29	M2	20.980.000
III	DRAINASE	Link. Ramanuju Baru RT/RW. 04/09	3,66	M3	3,7	M3	6.570.000
III	DRAINASE	Link. Ramanuju RT/RW. 01/04	4,3	M3	4,34	M3	7.330.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Citangkil pada tahun 2020 hanya membangun 2 output mengingat kegiatan ini terkena rasionalisasi untuk penanganan pandemi COVID-19, pada Termin I dilaksanakan pembangunan Paving Blok dengan total realisasi volume 488,18 , Termin II dilaksanakannya pembangunan Paving Blok dengan total realisasi volume 135,91 M2, dan pada Termin III dilaksanakannya pembangunan Paving Blok dan Drainase dengan total realisasi volume masing-masing 272,45 M2 dan 8,04 M3 .Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 147.060.000,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Citangkil juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Perum LBS 06/01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Perum LBS 06/01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		KETERANGAN	ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT		
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Citangkil 02/01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Citangkil 02/01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sambi Manis 01/05	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sambi Manis 01/05	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ramanuju 05/04	3	Unit	3	Unit	SESUAI	22.687.812
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Perum LBS Citangkil 06/01	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ramanuju 05/04	1	UNIT	1	UNIT	SESUAI	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Citangkil pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 1 unit dan pada Termin III sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Citangkil sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

2. KELURAHAN KEBONSARI

Tabel 3.1.4.1q.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kebonsari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		408.483.300,00	391.389.004,00	95,82%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan		1.270.118.022,00	1.106.107.948,00	87,09%		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		131.800.000,00	128.600.000,00	97,57%		
	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bln	12 bln	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.215.622,00	168.215.622,00	100,00%		
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kewilayahan	1 keg	1 keg	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		385.697.400,00	385.697.400,00	100,00%		
	Terlaksananya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW)	12,00	12,00	100,00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		4.400.000,00	4.400.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kualitas pelayanan publik (simpul Paten)	12 bln	12 bln	100,00%		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		2.130.000,00	2.130.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan penyusunan data kewilayahan	1 keg	1 keg	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan		31.119.000,00	31.119.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI	2 keg	2 keg	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBN	2Keg	2,00	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an Tingkat Kelurahan	1 Keg	1,00	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Dukungan Program Kampung Iklim		5.730.000,00	5.130.000,00	89,53%		
	Terlaksananya program dukungan iklim	6 keg	6 keg	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	21.300.000,00	42,60%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	1 keg	1 keg	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	1 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu Tb	6 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Mengantar Dahak	25 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	4 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	1 keg	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		11.425.000,00	11.425.000,00	100,00%		
	Terlaksananya agenda 10 program PKK	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%		
	Terlaksananya fasilitasi koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.776.000,00	11.866.000,00	52,10%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengumpulkan banyak orang sehingga	Kedepan kegiatan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan	
	Terlaksananya pendampingan perekonomian masyarakat	12 bln	6 bln	52,10%	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengumpulkan banyak orang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan	Kedepan kegiatan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		21.625.000,00	21.625.000,00	100,00%		
	Terlaksananya pendampingan bidang ekonomi dan pembangunan (Ekbang)	1 keg	1 keg	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	33.971.000,00	29,54%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Kelurahan	56,00	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	50,00	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Pelatihan Relawan Siaga Bencana	28,00	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	46.702.000,00	71,85%		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50 org	50,00	100,00%		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50 org	50,00	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah	1 paket	1 paket	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	83.170.175,00	96,71%		
	Terlaksananya Pelatihan Servis AC	10 org	10 org	100,00%		
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas PAUD Tingkat Kelurahan	25 org	25 org	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	31.556.751,00	63,11%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Pemasangan Wifi	10 titik	10 titik	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	
	Sosialisasi bagi Pelaku UMKM	2 kali	0,00	0,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan aturan protokol kesehatan	

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Kebonsari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 95,82% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 97,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Kebonsari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 87,09% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan aturan protocol kesehatan, maka anggaran pada kegiatan tersebut tidak terserap secara maksimal. Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK DELINGSENG RT 02/01	205	M2	235,97	M2	33.030.000
I	PAVING BLOCK	LINK KAMPUNG BARU RT 04/03	90,8	M2	119,72	M2	14.280.000
I	PAVING BLOCK	LINK LUWUNG SAWO RT 02/07	89	M2	120,89	M2	14.000.000
II	PAVING BLOCK	LINK TEGAL TONG RT 04/05	114	M2	122,26	M2	19.350.000
II	PAVING BLOCK	LINK SUKAJAYA RT 01/06	40	M2	40,76	M2	7.253.279
II	PAVING BLOCK	LINK SUKAJAYA RT 03/06	55	M2	57,65	M2	9.950.000
III	PAVING BLOCK	LINK CIMERAK RT 02/03	259	M2	301,32	M2	45.120.000

Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Kebonsari pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan Paving Blok. Pelaksanaan pada termin I adalah pembangunan Paving Blok di 3 lokasi dengan luas total 476,58 M2, kemudian pada Termin II pembangunan paving blok di 2 lokasi dengan luas total 220,67 M2 dan Termin III pembangunan paving blok di 1 lokasi. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 142.983.279,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kebonsari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 2 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kebon Sari	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kebon Sari	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Tegal Tong RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Tegal Tong RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Tegal Tong RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Tegal Tong RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Tegal Tong RT.03/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Kebonsari pada Termin I sebanyak 2 unit, pada Termin II sebanyak 2 unit dan pada Termin 3 sebanyak 3 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kebonsari sebanyak 7 unit, dari keseluruhan target 7 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

3. KELURAHAN WARNASARI

Tabel 3.1.4.1q.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Warnasari)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		475.821.500,00	445.060.992,00	93,54%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.409.360.622,00	1.381.288.022,00	98,01%		
Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)		-	-	-		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		148.000.000,00	147.669.000,00	99,78%		
	Terlaksanya Kelurahan yang tentram	50,00	50,00	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		171.915.622,00	171.915.622,00	100,00%		
	Terlaksananya Pembangunan sarana Prasarana wilayah Kelurahan	1,00	1,00	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		466.450.000,00	466.423.600,00	99,99%		
	Terlaksanya Peningkatan RT/RW Kelurahan	44,00	44,00	100,00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terciptanya Pelayanan Publik yang tertib	6,00	6,00	100,00%		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		
	Terlaksanya peningkatan Data	1,00	1,00	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakatan kelurahan		49.975.000,00	49.975.000,00	100,00%		
	terlaksananya Kualitas Kehidupan Masyarakatan	8,00	8,00	100,00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		15.700.000,00	15.700.000,00	100,00%		
	Terlaksanya Program iklim	5,00	5,00	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	46.990.000,00	93,98%		
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Kota Sehat	3,00	3,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		9.800.000,00	9.800.000,00	100,00%		
	Terlaksanya Fungsi dan peran PKK	20,00	20,00	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%		
	Honor Pengurus LPM	10,00	10,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.500.000,00	22.400.000,00	99,56%		
	Terciptanya Pendampingan Perekonomian Kelurahan	100,00	100,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		23.820.000,00	23.820.000,00	100,00%		
	Tersediannya Dokumen perencanaan (Pra RAB dan RAB)	2,00	2,00	100,00%		
	Terlaksanannya Rpat Koordinasi Mitra kelembagaan Kelurahan	3,00	3,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen Pra RAB dan RAB	1,00	1,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	113.244.800,00	98,47%		
	Meningkatnya kualitas dan kompetensi petugas ketentraman dan ketertiban dan	2,00	2,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya Kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi bencana					
	Meningkatnya Kesadaran dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi bencana	80,00	80,00	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	63.622.000,00	97,88%		
	Pelatihan Kesehatan	75,00	75,00	100,00%		
	Pembinaan LKK	60,00	60,00	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%		
	Terbangunya sarana prasarana Wilayah	90,00	90,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	82.774.000,00	96,25%		
	Pelatihan Service AC	10,00	10,00	100,00%		
	Pengembangan bidang Pendidikan dan kebudayaan PAUD	60,00	60,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	31.754.000,00	63,51%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan	
	jumlah Titik pemasangan WIFI	10,00	5,00	63,51%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan	
	Sosialisai bagi pelaku UMKM	2,00	1,00	50,00%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan	

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh

pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Warnasari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 93,54% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Warnasari berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,01% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 97,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalisasikan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK MAKAM TAMAN BAHAGIA RT 05/07	80	M2	88,55	M2	13.220.000
I	PAGAR MAKAM	LINK KUBANG MENYAWAK RT 02/01	40,1	M2	40,1	M2	50.000.000
II	PAVING BLOCK	LINK KALENGTEMU RT 04/02	150	M2	233,74	M2	32.098.278
III	REHAB MASJID	WARNASARI RT.002/007	1	Unit	1	Unit	25.000.000
IIII	REHAB MASJID	WARNASARI RT.001/005	1	Unit	1	Unit	25.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Warnasari pada tahun 2020 hanya membangun 3 output mengingat kegiatan ini terkena rasionalisasi untuk penanganan pandemi COVID-19, pada Termin I dilaksanakan pembangunan Paving Blok dan Pagar Makam,pada Termin II dilaksanakan pembangunan Paving Blok saja , dan pada Termin III dilaksanakan pembangunan Rehab Masjid. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 145.318.278,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Warnasari juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kubang Menyawak RT.02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kubang Menyawak, RT.02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Komplek TWI RT.01/05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Komplek TWI RT.01/05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Komplek TWI RT.01/05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Komplek TWI RT.01/05	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Prum TWI 06/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Prum TWI 06/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Prum TWI 06/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Prum TWI 06/06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	TWI 04/07	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Warnasari pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Warnasari sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

4. KELURAHAN SAMANGRAYA

Tabel 3.1.4.1q.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Samangraya)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		360.166.000,00	348.290.700,00	96,70%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.199.983.122,00	1.171.041.063,00	97,59%		
Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)		1.199.983.122,00	1.171.041.063,00	97,59%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		119.200.000,00	118.800.000,00	99,66%		
	Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Tersampainya Honor Linmas	12 bln	12 bln	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		173.213.122,00	173.113.812,00	99,94%		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1 paket	1 paket	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		354.200.000,00	354.029.600,00	99,95%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		5.750.000,00	5.750.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelayanan administrasi terpadu kelurahan	1 keg	1 keg	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		24.350.000,00	24.350.000,00	100,00%		
	terlaksananya kegiatan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan	6 keg	6 keg	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	48.650.000,00	97,30%		
	Terlaksananya kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat	2 keg	2 keg	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		5.070.000,00	5.070.000,00	100,00%		
	Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,00	12.800.000,00	66,67%	Dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1 keg	1 keg	66,67%	Dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan	
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pendampingan perekonomian kelurahan	1 keg	1 keg	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%		
	terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1 tahun	1 tahun	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	112.929.800,00	98,20%		
	Terlaksananya Peningkatan kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan bidang Pemerintahan dan Trantibum	1 keg	1 keg	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	64.750.000,00	99,62%		
	Terlaksananya Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat	8 Kegiatan	8 kegiatan	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	99.500.000,00	99,50%		
	Meningkatnya Sarpras wilayah kelurahan	8 Titik	8 titik	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	84.459.000,00	98,21%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	terselenggaranya Pelatihan AC	5 org	5 org	100,00%		
	Terselenggaranya Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	60 org	60,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	33.838.851,00	67,68%	Dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan	
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10 titik	10 titik	63,51%	Dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan	
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 kali	2 kali	63,51%	Dikarenakan adanya pemberlakuan protokol kesehatan	

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Samangraya berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 93,54% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Samangraya berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,01% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalisasikan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE	Link. Pintu Air RT/RW. 04/04	49,69	M3	50,109	M3	60.649.000

II	DRAINASE	Link. Pintu Air RT/RW. 04/04	33,37	M3	41,96	M3	11.175.000
II	PAVING BLOCK	Link. Ciri Tegal RT/RW. 02/06	130	M2	153,6	M2	24.420.000
II,III	PAGAR MAKAM	Link. Ciri RT/RW. 02/03	1	pkt	1	pkt	49.421.885

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Samangraya pada tahun 2020 membangun 3 output yaitu Paving Blok, Pagar Makam dan Drainase, pada Termin I dilaksanakan pembangunan Drainase di 1 lokasi dengan realisasi luas total 50,109 M3, dan pada Termin II dilaksanakan pembangunan Drainase dan Paving Blok dengan realisasi luas total masing-masing 41,96 M3 dan 153,6 M2 dan pada Termin III dilaksanakan pembangunan Pagar Makam dengan realisasi luas 1 pkt. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 145.665.885,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Samangraya juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Mes Sankiu 02/04	1	Unit	1	Unit	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kubang Welut 02/04	2	Unit	2	Unit	15.729.526
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Belekbek 02/03	2	Unit	2	Unit	15.729.526
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumpung 01/01	1	Unit	1	Unit	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kubang Welut 02/04	1	Unit	1	Unit	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Timur 02/05	2	Unit	2	Unit	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Timur 04/05	1	Unit	1	Unit	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Barat 05/01	1	Unit	1	Unit	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Timur 02/05	2	Unit	2	Unit	8.600.000
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Timur 04/05	1	Unit	1	Unit	8.600.000
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kalentemu Barat 05/01	1	Unit	1	Unit	8.600.000

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Samangraya pada Termin I sebanyak 3 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 5 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Samangraya sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

5. KELURAHAN LEBAK DENOK

Tabel 3.1.4.1q.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Lebak Denok)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		357.152.000,00	351.617.206,00	98,45		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.101.617.122,00	1.082.469.035,00	98,26%		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		81.400.000,00	81.400.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 bln	12 bln	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.215.622,00	168.215.622,00	100,00%		
	Terlaksananya Pemasangan Paving Blok Wilayah Kelurahan Lebak Denok	7 lokasi	7 lokasi	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pemasangan TPT Wilayah Kelurahan Lebak Denok	1 lokasi	1 lokasi	100,00%		
	Terlaksananya Pemasangan Drainase Wilayah Kelurahan Lebak Denok	9 lokasi	9 lokasi	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		244.235.000,00	244.235.000,00	100,00%		
	Tersedianya Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12 bln	12 bln	100,00%		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.075.000,00	2.075.000,00	100,00%		
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		47.573.500,00	47.573.500,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelaksanaan PHBI/PHBN dan Kesosialan	8 keg	8 keg	100,00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		23.455.000,00	23.455.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Program Dukungan Iklim	6 keg	6 keg	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya dukungan kelurahan sehat	2 keg	2 keg	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		7.658.000,00	7.658.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Agenda 10 program PKK	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		20.085.000,00	20.085.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya pendampingan perekonomian masyarakat	12 bln	12 bln	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		20.920.000,00	20.920.000,00	100,00%		
	Tersedianya Dokumen Pra RAB dan RAB	2 dok	2 dok	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	113.121.000,00	98,37%		
	Terselenggaranya Pembinaan Tanggap Bencana	50 org	50 org	100,00%		
	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan Relawan Bencana	20 org	20 org	100,00%		
	Terselenggaranya Pendidikan dan Latihan SATLINMAS	30 org	30 org	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	63.685.000,00	97,98%		
	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	50 og	50 org	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan LKK	50 org	50 org	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	1 paket	1 paket	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	85.531.500,00	99,46%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Service AC	10 org	10 org	100,00%		
	Terlaksananya Pembinaan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini	25 org	25 org	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	34.514.413,00	69,03%	Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidaksesuaiannya kode rekening pada DPA yang ada	Kedepan akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Jumlah titik pemasangan WiFi	10 titi lokasi	10 titik lokasi	100,00%		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2 kali	2 kali	100,00%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh

pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Lebakdenok berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,45% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 97,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Lebakdenok berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 98,26% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 97,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalisasikan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK KUBANGMENYAWAK RT 12/02	144	M2	184,66	M2	23.720.000
I	PAVING BLOCK	LINK JERUK NIPIS RT 06/03	195	M2	219,47	M2	32.620.000
II	PAVING BLOCK	Link. Linggar Jati RT.02/01	280	M2	345,78	M2	43.760.000
III	PAVING BLOCK	LINK KAPUDENOK MASJID RT 01/01	250	M2	481,75	M2	42.883.000

Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Lebak Denok pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan Paving Blok. Pelaksanaan pada termin I adalah pembangunan Paving Blok di 2 lokasi dengan luas total 404,13 M2, kemudian pada Termin II pembangunan paving blok di 1 lokasi dengan luas total 345,78 M2 dan Termin III pembangunan paving blok di 1 lokasi dengan luas total 481,75 M2 . Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 142.983.000,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Lebak Denok juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut :

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kantor Kelurahan	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kantor Kelurahan	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kantor Kelurahan	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	SMPN 11 Cilegon	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Lebak Denok	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Lebak Denok	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kapudenok Masjid	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Kapudenok Masjid	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Linggar Jati RT.02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Grand Sutra RT18	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Grand Sutra RT 20	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Lebak Denok pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Lebak Denok sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

6. KELURAHAN TAMANBARU

Tabel 3.1.4.1q.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tamanbaru)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		349.116.500,00	326.926.166,00	93,64%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.316.055.622,00	1.267.024.900,00	96,27%		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		119.200.000,00	117.450.000,00	98,53%		
	Tersedianya Kegiatan Monitoring Ketertiban dan Ketertiban Kelurahan Tamanbaru	11,00	11,00	100,00%		
	Tersedianya Honor satlinmas Kelurahan Tamanbaru	12,00	12,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Satlinmas Trantibum Kelurahan Tamanbaru	1,00	1,00	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		175.915.622,00	174.940.600,00	99,45%		
	Pembangunan TPT	3,00	3,00	100,00%		
	Pembangunan Paving Blok	1,00	1,00	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		406.410.000,00	402.010.000,00	98,92%		
	Tersedianya Honor Ketua RT,RW dan LPM	12,00	12,00	100,00%		
	Tersedianya Seragam RT/RW	38,00	38,00	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		48.125.000,00	48.125.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI	4,00	4,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan PHBN	2,00	2,00	100,00%		
	Terlaksananya STQ	1,00	1,00	100,00%		
Dukungan Program Kampung Iklim		13.225.000,00	13.225.000,00	100,00%		
	Dukungan pelaksanaan kebersihan lingkungan	12,00	12,00	100,00%		
	Terlaksananya Penanaman Pohon	200,00	200,00	100,00%		
	Edukasi tentang kebersihan lingkungan	1,00	1,00	100,00%		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	47.500.000,00	95,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	25,00	25,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	6,00	6,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	4,00	4,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	5,00	5,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	50,00	50,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Intervensi Lnjutan Keluarga Sehat	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		9.875.000,00	9.875.000,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan 10 program PKK	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		25.200.000,00	25.200.000,00	100,00%		
	Tersedianya Honorarium 12 bulan	12,00	12,00	100,00%		
	Terlaksananya koordinasi antar mitra pemerintah	3,00	3,00	100,00%		
	Tersedianya Seragam LPM	10,00	10,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000,00	21.900.000,00	87,60%		
	Terlaksananya pemantauan dan supervisi terhadap seluruh sasaran yang dibina oleh Perangkat Daerah di masing-masing kelurahan;	100,00	100,00	100,00%		
	Terlaksananya pemutakhiran data Usaha Mikro Kecil (UMK)	1,00	1,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna	1,00	1,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		23.105.000,00	23.105.000,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Dokumen Perencanaan (Pra RAB dan RAB)	2,00	2,00	100,00%		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi mitra Kelembagaan Kelurahan	3,00	3,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Dokumen Pra RAB dan RAB	1,00	1,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	104.346.000,00	90,74%		
	Terlaksananya Pembinaan Satuan Linmas	60,00	60,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Peltihan Kesiapsiagaan Bencana	50,00	50,00	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	58.558.000,00	90,09%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1,00	1,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Peltihan Lembaga Kemasyarakatan	1,00	1,00	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	99.400.000,00	99,40%		
	Terlaksananya pembuatan sumur serapan	1,00	1,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	85.216.300,00	99,09%		
	Terlaksananya Pelatihan Service AC	10,00	10,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	45,00	45,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	32.174.000,00	64,35%	Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidaksesuaiannya kode rekening pada DPA yang ada	Kedepan akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
	Tersedianya internet di Lingkungan Kelurahan Tamanbaru	10,00	10,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2,00	2,00	100,00%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Tamanbaru berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 93,64% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Tamanbaru berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 96,27% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan pemberlakuan protocol kesehatan maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalisasikan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	TPT	Link. Kubang Lesung Berangbang RT/RW. 02/05	35,5	M3	36,16	M3	34.690.000
1	TPT	Link. Pabuaran RT/RW. 02/03	42,2	M3	47,392	M3	40.820.000
2	TPT	Link. Kubang Lesung Kulon RW. 04	33,37	M3	41,96	M3	32.770.000
3	PAVING BLOCK	Link. Sondol RT/RW. 02/02	245	M2	330,1	M2	38.619.000

Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Taman Baru pada tahun 2020 menghasilkan 2 output yaitu Pembangunan TPT dan Paving Blok, pelaksanaan pada termin I adalah pembangunan TPT di 2 lokasi dengan total relisasi volume 83,552 M3, sedangkan pada termin II dilaksanakan pembangunan TPT dengan realisasi volume 41,96 M3 dan Termin III dilaksanakan pembangunan Paving Blok dengan realisasi volume 330,1 M2. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 146.899.000,-

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Taman Baru juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kedawung 01/07	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kavling Blok C 01/09	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kavling Blok C 01/09	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kavling Blok C 01/09	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kavling Blok C 01/09	2	UNIT	2	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kavling Blok C 01/09	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Taman Baru pada Termin I sebanyak 1 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Taman Baru sebanyak 6 unit, dari keseluruhan target 6 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

7. KELURAHAN DRINGO

Tabel 3.1.4.1q.7 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Dringo)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		358.593.000,00	348.134.642,00	97,08%		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.392.788.122,00	1.327.872.775,00	95,34%		
Pelaksanaan Pra Musrenbangkel (n+2)						
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		103.000.000,00	102.775.000,00	99,78%		
	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat	12,00	12,00	100,00%		
	Terlaksananya kegiatan Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1,00	1,00	100,00%		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		190.893.122,00	190.892.264,00	100,00%		
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kewilayahan	2,00	2,00	100,00%		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		486.700.000,00	463.815.800,00	95,30%		
	Terlaksananya fasilitasi koordinasi kelembagaan masyarakat (RT/RW)	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		39.450.000,00	39.450.000,00	100,00%		
	Telaksananya Kegiatan Ta'aruf MTQ	1,00	1,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pawai Pembangunan HUT	1,00	1,00	100,00%		
	Teraksananya Kegiatan Halal Bihalal	1,00	1,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan STQ	1,00	1,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pengajian Rutin Bulanan	12,00	12,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Buka Puasa Bersama	1,00	1,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000,00	28.704.000,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan pembekalan Kader	1,00	1,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1,00	1,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	1,00	1,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB	6,00	6,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Mengantar Dahak	24,00	24,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Pamantauan Jentik	4,00	4,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
	Terlaksananya Kegiatan Screening Kesehatan Lansia	1,00	1,00	57,41%	Dikarenakan adanya wabah covid 19 dan penerapan protocol kesehatan	
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		1.625.000,00	1.625.000,00	100,00%		
	Terlaksananya agenda 10 program PKK	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tenaga Kerja		30.920.000,00	30.920.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Las	5,00	5,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Otomotif	5,00	5,00	100,00%		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya fasilitasi koordinasi lembaga pemberdayaan masyarakat	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000,00	22.000.000,00	88,00%		
	Terlaksananya pendampingan perekonomian masyarakat	12,00	12,00	100,00%		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%		
	Terlaksananya pendampingan bidang ekonomi dan pembangunan (Ekbang)	2,00	2,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000,00	112.450.000,00	97,78%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petugas Trantib	100,00	100,00	100,00%		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petugas Kesiapsiagaan Bencana	120,00	120,00	100,00%		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000,00	62.887.000,00	96,75%		
	Terlaksananya Pelatihan Kader Kesehatan	50,00	50,00	100,00%		
	Terlaksananya Pelatihan Rampak bedug	50,00	50,00	100,00%		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%		
	Terbangunya sarana prasarana Wilayah	90,00	90,00	100,00%		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000,00	84.945.250,00	98,77%		
	Pelatihan Service AC	10,00	10,00	100,00%		
	Pengembangan bidang Pendidikan dan kebudayaan PAUD	60,00	60,00	100,00%		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000,00	38.208.461,00	76,42%		
	Jumlah Titik pemasangan WIFI	10,00	10,00	100,00%		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2,00	2,00	100,00%		

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan “Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)” dengan program Dukungan Pelayanan Pemerintahan, Kelurahan Deringo berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 97,08% Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Adapun untuk mewujudkan arah kebijakan “Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan” dengan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kelurahan Deringo berhasil melaksanakan kegiatan dengan serapan anggaran sebesar 95,34% , Yang mana setiap indikator programnya memiliki capaian diatas 95,00%.

Terdapat juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah covid 19 dan penerapan protokoler kesehatan maka anggaran pada kegiatan tersebut dirasionalkan, Adapun tindak lanjutnya adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	LINK. WARNASARI RT	1	PKT	1	PKT	130.000.000
III	RUTILAHU	RT 015/001	1	PKT	1	PKT	16.500.000

Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Deringo pada tahun 2020 menghasilkan 2 output yaitu Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Posyandu, pelaksanaan pada termin I dan II adalah pembangunan 1 unit POSYANDU dengan volume 1 PK, sedangkan pada termin III dilaksanakan pembangunan 2 unit yaitu Posyandu dan Rutilahu di 2 lokasi dengan total realisasi volume 2 PK. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 146.500.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Deringo juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Deringo Landoh 014/006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pekalongan RT.01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pekalongan RT.01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kelurahan Deringo	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kelurahan Deringo	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Kelurahan Deringo	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Deringo pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 2 unit dan pada Termin 3 sebanyak 3 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Deringo sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

J. KECAMATAN PURWAKARTA

Tabel 3.1.4.1r Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan Purwakarta)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.167.571.110	2.148.788.704	99,13		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral (Kec. Purwakarta)	100	100	100,00		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Kec. Purwakarta)	93	84	90,32		
	Tingkat disiplin aparatur (Kec. Purwakarta)	93	94	101,54		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget	100	97	97,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	(anggaran kas) Kecamatan Purwakarta					
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		601.561.373	575.256.881	95,63		
	Proporsi realisasi pelaksanaan dana pembangunan wilayah kelurahan (DPWkel) (Kecamatan Purwakarta)	93	100	107,53		
	Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan (Kecamatan Purwakarta)	100	94	94		
Penyusunan Profil Kecamatan		10.000.000	10.000.000	100		
	Tersedianya dokumen profil Kecamatan Purwakarta	1	1	100		
Pembinaan Administrasi Kelurahan		11.304.366	10.084.366	89,20770966		
	Terbinanya administrasi kelurahan	6	6	100		
Pelaksanaan Jumat Bersih Kecamatan		10.000.000	10.000.000	100		
	Pelaksanaan Jum'at Bersih	12	12	100		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan		50.000.000	50.000.000	100		
	Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Cilegon	1	1	100		
Peningkatan Peranan PKK Kecamatan		50.010.000	50.010.000	100		
	Terlaksananya Pembinaan Anggota TP PKK Kecamatan	12	12	100		
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		11.425.000	11.425.000	100		
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100		
Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Cilegon		12.350.000	12.350.000	100		
	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Purwakarta	6	6	100		
Pelaksanaan Musrenbangcam		23.110.000	23.110.000	100		
	Pelaksanaan Musrenbangcam	1	1	100		
Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-undangan Lingkungan Kecamatan		10.232.000	10.232.000	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perundang-Undangan Lingkungan Kecamatan	4	4	100		
Penyelenggaraan Paten		3.600.000	3.600.000	100		
	Penyelenggaraan Pedoman Administrasi Terpadu Kecamatan	1	1	100		
Pengajian Rutin		7.300.000	7.300.000	100		
	Terlaksananya Pengajian Rutin Kecamatan	12	12	100		
Dukungan Penyelenggaraan PHBI dan PHBN		10.600.000	10.600.000	100		
	Terselenggaranya Kegiatan PHBI dan PHBN	1	1	100		
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Cilegon		50.000.000	50.000.000	100		
	Terlaksananya MTQ Tingkat Kota Cilegon	1	1	100		
Monitoring Kewilayahan Kecamatan		16.000.000	16.000.000	100		
	Monitoring Kewilayahan Kecamatan	1	1	100		
Pembinaan Linmas		15.000.000	15.000.000	100		
	Pembinaan Linmas	1	1	100		
Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban		14.170.000	14.170.000	100		
	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	100		
Lomba Kelurahan		10.430.000	10.430.000	100		
	Lomba Kelurahan	1	1	100		
Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOIMCAM)		30.000.000	30.000.000	100		
	Terlaksananya kegiatan forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOIMCAM)	4	-	0		
Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Kepemudaan		17.625.000	17.625.000	100		
	Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan	1	-	0		
Dukungan operasional Kessos berbasis Sosial, Keagamaan, Budaya dan Lingkungan Hidup		50.000.000	50.000.000	100		
	Terlaksananya kegiatan dukungan operasional kessos berbasis sosial, keagamaan, budaya, dan lingkungan hidup	5		0		
Pendampingan Ketenagakerjaan, Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek		48.405.007	44.595.000	92,13		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terselenggaranya kegiatan pendampingan ketenagakerjaan, kewirausahaan masyarakat dan posyantek	3		0		
KORWASDAL Penanggulangan Bencana		40.000.000	40.000.000	100		
	Terselenggaranya kegiatan KORWASDAL Penanggulangan bencana	1	1	100		

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Capaian kinerja pada Tingkat Disiplin adalah 94.44% dari nilai yang ditargetkan sebesar 93% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102% atau melebihi dari yang diperjanjikan tahun 2020.

Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 84.46% dari yang ditargetkan sebesar 93%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah :

Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah :

Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada tahun anggaran 2020, persentase capaian kinerjanya adalah 96.97% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 20.408.342.371,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 21.045.344.988 atau persentase 96.97% dari total pagu anggaran OPD Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.

Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan merupakan nilai persentase ketercapaian indikator program untuk mengukur tingkat persentase dari beberapa jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat dijadikan sebagai serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas perangkat daerah, yang berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh aparatur untuk melaksanakan/menyelenggarakan tugas pekerjaannya.

Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon mempunyai 2 (dua) jenis pelayanan yaitu Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan, maka pelayanan yang ada di Kecamatan Purwakarta yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 26 SOP, dari 26 pelayanan yang ada pada Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, sehingga capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan adalah 100% dari nilai yang ditargetkan sebesar 93% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108% atau melebihi dari yang diperjanjikan tahun 2020.

SOP yang dilayani oleh Kecamatan Purwakarta:

1. Pelayanan surat keterangan pindah pergi
2. Pelayanan surat keterangan pindah dating
3. Pelayanan administrasi surat pengantar SKCK
4. Pelayanan administrasi pengantar permohonan pembuatan KK
5. Pelayanan pengantar permohonan pembuatan KTP
6. Pelayanan surat peralihan hak atas tanah/bangunan
7. Pelayanan administrasi ijin mendirikan bangunan (IMB)
8. Rekomendasi terhadap permohonan izin tempat usaha (IUMK)
9. Pelayanan surat pengantar rekomendasi ijin Menara telekomunikasi
10. Pelayanan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
11. Pelayanan administrasi legalisasi surat-surat
12. Pelayanan pemberian ijin penyelenggaraan hiburan keliling
13. Pelayanan pemberian ijin tempat usaha pedagang kaki lima (PKL)
14. Pelayanan rekomendasi ijin keramaian
15. Pelayanan pemberian Ijin pemasangan reklame
16. Rekomendasi Permohonan Izin Pendidikan/Yayasan/Lembaga
17. Pelayanan pengaduan melalui media radio
18. Pengarsipan dan publikasi pengaduan
19. Pelayanan pengaduan melalui kotak pengaduan
20. Pelayanan pengaduan dering
21. Pelayanan pengaduan melalui SMS
22. Pelayanan pengaduan langsung

23. Pelayanan tamu
24. Musrenbangkec
25. Pelayanan PATEN
26. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

Untuk mengetahui Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) pada Kelurahan Se-Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan maka diperlukan perumusan atau perhitungannya yaitu; jumlah realisasi anggaran DPWKel dibagi per anggaran DPWKel dikali 100% (seratus) persen. Maka jumlah total pagu anggaran DPWKel yang terealisasi Pada Kelurahan Se-Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebesar Rp. 1.013.828.639,- dibagi jumlah total pagu per anggaran DPWKel pada Kelurahan Se-Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sebesar Rp. 1.022.823.732,- dikali 100% (seratus) persen, maka capaiannya 99,12%. Sehingga Proporsi realisasi pelaksanaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) realisasi kinerjanya mencapai 99,12%, dari yang ditargetkan 100%, maka capaiannya 99.12%. Ketercapaian tersebut, dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum ataupun pembangunan infrastruktur/peningkatan jalan lingkungan. Hal ini dikarenakan terjalinnya kerjasama yang baik kelompok masyarakat dalam melaksanakan pembangunan seperti; Drainase, Paving Blok/Conblok, Normalisasi Saluran Air/Gorong-Gorong, Gardu Ronda, Gapura, Posyandu, sumur resapan, Rehabilitasi Musholla/Masjid, Rutilahu, Pemagaran Makam/Kuburan. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Cilegon secara bersama-sama dapat menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan yang telah terbangun Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk kepentingan umum.

Secara Umum, permasalahan pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Purwakarta dan Kelurahan yaitu pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka tidak bisa dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 ini, dikarenakan pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring serta anggaran untuk kegiatan tersebut dirasionalisasikan.

**Data Capaian DPWKel
OPD Kecamatan Purwakarta
Kota Cilegon TA. 2020**

Uraian	Indikaor Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan								

Uraian	Indikaor Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
KELURAHAN RAMANUJU								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	- Drainase vertical (sumur resapan)	Kegiatan	4	4	97.54	168.215.622	164.069.800	97.54
	link.sumampir rt 01/01,link.simpang tiga rt.04/02 dan link.kenanga rt.03/01							
	-Pagar Mushola link.simpang tiga rt.5/02							
	-Gardu ronda link.simpang tiga rt.5/02							
	-Gapura link.sumampir rt.01/01							
KELURAHAN TEGALBUNDER								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	-Posyandu .Ling.Blacu Rt.3 Rw.4	Kegiatan	3	3	100	174.785.622	174.785.622	100
	-RTLH Panasepan							
	-Sumur serapan 10 titik							
KELURAHAN PURWAKARTA								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	-Pembangunan paving blok link.kaligandu	Kegiatan	4	4	99.99	172.048.122	172.028.216	99.99
	BB rt.014/06							
	- Pembangunan paving blok link.kubang							
	welingi rw.03							
	- Drainase link celentrang rt.002/01							
	- Drainase link.kubang lele rt.003/002							
KELURAHAN PABEAN								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Pemagaran makam	Kegiatan	3	3	100	168,215,622.00	168.215.622	100
	Drainase							
	Drainase							
KELURAHAN KEBONDALEM								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	-Pembangunan paving blok link.daliran	Kegiatan	4	4	97.15	169.465.622	164.642.340	97.15
	rt.01/02							
	- Pembangunan paving blok link.sumampir timur rt.03/04							

Uraian	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Drainase link.bebulak timur rt.01/11							
	- Drainase link.kroweng rt.02/02							
KELURAHAN KOTABUMI								
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	Drainase rt.06/08	Kegiatan	5	5	100	170.093.122	170.087.039	100
	Drainase rt.05/08							
	Drainase rt.04/09							
	Rutilahu rt.03/09							
	Rutilahu rt.04/09							
Total						1.022.823.732	1.013.828.639	99.12

1. KELURAHAN RAMANUJU

Tabel 3.1.4.1r.1 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Ramanuju)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		363.068.500	337.304.760	92,90		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		915.425.622	848.472.276	92,69		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		63.400.000	49.115.000	77,47		
	Terlaksananya kegiatan monitoring di link. kelurahan	12	12	100		
	Tersedianya Laporan hasil pengawasan berkala trantib	12	12	100		
Dukungan pencapaian kota sehat		6.025.000	6.025.000	100		
	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jentik	1	1	100		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		6.385.000	6.385.000	100		
	Terlaksananya Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan	1	1	100		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.215.622	164.069.800	97,54		
	Pembangunan Sarpras Lingkungan	1	1	100		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		168.700.000	163.225.000	96,755		
	Tersedianya Peningkatan Koordinasi Kelembagaan (RT/RW/LPM)	25	25	100		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.050.000	2.050.000	100		
	Tersedianya layanan public berbasis teknologi (aplikasi simpul paten);	1	1	100		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		32.500.000	29.800.000	91,69		
	Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an	1	1	100		
Dukungan Program Kampung Iklim		9.950.000	9.950.000	100		
	Pelaksanaan Jumsih	1	1	100		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		29.200.000	25.375.000	86,90		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Fasilitas Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	10	10	100		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	8.000.000	61,54	dikarenakan terkendala waktu pengajuan diakhir Desember, sehingga hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran sebesar 61.54% atau kurang dari 75%.	Untuk mengatasi permasalahan kegiatan tersebut adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan merealisasikan sesuai anggaran kas yang ada
	Tersedianya Fasilitas Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1	1	100		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	112.165.000	97,53		
	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan	50	50	100		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	100	100	100		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	61.110.000	94,02		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50	50	100		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50	50	100		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	99.500.000	99,5		
	Terbangunnya Sarana & Prasarana Wilayah	1	1	100		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	81.460.000	94,72		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelatihan Hantaran Pengantin	50	50	100		
	Pengembangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	50	50	100		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	30.242.476	60,48	Pada Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan) serapan anggaran 60,48%, dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 60,48%.	
	Terlaksananya Sosialisasi dan daya minat usaha kecil dan usaha mikro masyarakat	1	1	100		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan, Inkubasing, Marketing, Konsulting kepada usaha kecil dan usaha mikro masyarakat	1	1	100		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Ramanuju telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	SUMUR RESAPAN	Link.Simpang Tiga RT 04/02	6	UNIT	6	UNIT	114.069.800
II	REHAB MUSHOLA	Link.Simpang Tiga RT 05/03	1	UNIT	1	UNIT	15.000.000
III	GAPURA MERAH PUTIH	Link.Sumampir RT 01//01	1	UNIT	1	UNIT	25.000.000
III	GARDU RONDA	Link.Simpang Tiga RT 05/02	1	UNIT	1	UNIT	10.000.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Ramanuju pada termin I yaitu pembangunan sumur resapan sebanyak 6 unit, pada Termin II dilaksanakan Rehab Mushola sebanyak 1 unit, dan pada Termin III dilaksanakan pembangunan Gapura Merah Putih dan Gardu Ronda sebanyak masing-masing 1 unit. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 164.069.800

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Ramanuju juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kenanga RT 03/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kenanga RT 03/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kenanga RT 03/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sumampir RT 01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sumampir RT 01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Sumampir RT 01/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Simpang Tiga RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Simpang Tiga RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Simpang Tiga RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Simpang Tiga RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Simpang Tiga RT 02/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Ramanuju pada Terrmin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Ramanuju sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

2. KELURAHAN KEBONDALEM

Tabel 3.1.4.1r.2 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kebondalem)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran,						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		370.384.936	351.701.138	94,96		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.542.647.622	1.488.956.153	96,520		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		131.800.000	124.105.000	94,1616085		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	1	1	100		
	tersedianya honor linmas	56	56	100		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		14.220.000	14.220.000	100		
	Terlaksananya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	12	12	100		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		169.465.622	164.642.340	97,15382864		
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	4	4	100		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		615.700.000	613.900.000	99,71		
	Tersedianya fasilitasi kelembagaan masyarakat (RT/RW)	12	12	100		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		5.000.000	5.000.000	100		
	Terlaksananya kualitas layanan publik	12	12	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		15.960.000	15.960.000	100		
	Terlaksananya peningkatan kualitas data kewilayahan	12	12	100		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		51.712.000	51.712.000	100		
	terfasilitasinya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan	1	1	100		
Dukungan Program Kampung Iklim		11.590.000	2.950.000	25,45	dikarenakan terkendala waktu pengajuan diakhir Desember, sehingga hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran sebesar 25.45% atau kurang dari 75%..	Untuk mengatasi permasalahan kegiatan tersebut adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan merealisasikan sesuai anggaran kas yang ada
	Dukungan pelaksanaan kebersihan lingkungan	1	1	100		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	43.400.000	86,8		
	Tersedianya kelurahan sehat	1	1	100		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		26.200.000	24.400.000	93,13		
	terfasilitasinya lembaga pemberdayaan Masyarakat	1	1	100		
	Tersedianya Seragam LPM	10	10	100		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		22.000.000	18.550.000	84,32		
	Terfasilitasinya pendampingan perekonomian kelurahan	1	1	100		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100		
	Tersedianya Dokumen Pra RAB dan RAB Kegiatan Sarpraswil	2	2	100		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	105.990.000	92,17		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan	50	50	100		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	100	100	100		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.700.000	99,53846154		
	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	50	50	100		
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	50	50	100		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100		
	Terbangunnya Sarpras Wilayah Kelurahan	11	-	0		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	84.810.000	98,62		
	Penguatan Sekolah PUAD TK. Kelurahan	50	50	100		
	Pelatihan Service AC	10	10	100		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	41.616.813	83,23		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10	10	100		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2	2	100		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kebondalem telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK DALIRAN RT 01 RW 02	454,8	M2	495	M2	64.396.936,00

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK.SUMAMPIR RT 03 RW 04	300,5	M2	316,5	M2	48.320.000,00
II	DRAINASE	Link. Bebulak Timur RT 001/011	8,54	M3	8,6	M3	13.760.000,00
III	DRAINASE	Link. Kroweng RT 021/002	8,82	M3	9	M3	14.130.000,00

Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Kebondalem pada tahun 2020 difokuskan pada 2 output yaitu pembangunan paving blok dan drainase, pelaksanaan pada termin I adalah pembangunan Paving Blok di 2 lokasi dengan luas total 811,5 M2, kemudian pada Termin II dan Termin III dilaksanakan pembangunan drainase dengan total luas 17,6 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 140.606.936

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kebondalem juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumampir Timur RT.03 RW.04	289,5	M2	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumampir Timur RT.03 RW.04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumampir Timur RT.03 RW.04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Sumampir Timur RT.04 RW.04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Baru RT.01 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Daliran RT 01/02	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bebulak Barat RT. 04 RW. 03	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Bebulak Timur RT. 04 RW. 11	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Rama Baru RT. 01 RW. 06	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Baru RT 001/003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Sumampir Timur RT 004/004	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Kebondalem pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kebondalem sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

3. KELURAHAN KOTABUMI

Tabel 3.1.4.1r.3 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Kotabumi)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		395.096.000	383.946.124	97,18		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.405.753.122	1.327.082.330	94,404		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		95.800.000	95.800.000	100,00		
	Terciptanya Lingkungan Kelurahan Yang Tertib dan Aman	12	12	100,00		
	Meningkatnya Kesejahteraan LINMAS Kelurahan	38	38	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		170.093.122	170.087.039	100,00		
	Pembangunan Drainase RT 06/08	65	65	100,00		
	Pembangunan Drainase RT 05/08	63	63	100,00		
	Pembangunan Drainase RT 04/09	68	68	100,00		
	Pembangunan RUTILAHU RT 03/09	1	1	100,00		
	Pembangunan RUTILAHU RT 04/09	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		515.870.000	475.190.000	92,11		
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	48	48	100,00		
	Terpenuhinya Kesejahteraan Upah RT/RW	48	48	100,00		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi RT/RW	48	48	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.700.000	2.700.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	12	12	100,00		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Paten di Kelurahan	4	4	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		58.700.000	53.700.000	91,48		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI (Seleksi Tilawatil Qur'an) Tingkat Kelurahan	5	5	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan PHBI Tahun Baru Hijriyah	1	1	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	1	1	100,00		
Dukungan Program Kampung Iklim		6.575.000	6.575.000	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih Bersama Masyarakat Kelurahan	12	12	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Menjadi Kerajinan Tangan	1	1	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan		17.840.000	17.840.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kegiatan Kepemudaaan	2	2	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaaan	1	1	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Rohani Remaja Islam Masjid (RISMA)	4	4	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	31.300.000	62,60	Pada Kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat serapan anggaran 62.60%, dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 62.60% atau kurang dari 75%.	
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Kelurahan Sehat	7	7	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		16.000.000	16.000.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan PKK Kelurahan	6	6	100,00		
	Terpenuhinya Seragam Pakaian Pengurus Dan Anggota PKK kelurahan	25	25	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		23.175.000	23.175.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1	1	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pengurus LPM Kelurahan	12	12	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	15.250.000	76,25		
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan	12	12	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Dan Pendataan (Survey) UMKM Kelurahan	4	4	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UMKM Kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Terlaksananya Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2	2	100,00		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Mitra Kelembagaan Kelurahan	2	2	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	113.556.600	98,74		
	Meningkatnya Kualitas Dan Kompensasi Petugas Ketentraman Dan Ketertiban	50	50	100,00		
	Meningkatnya Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	100	100	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	63.640.000	97,91		
	Pelatihan Kader Kelurahan	50	50	100,00		
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50	50	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatnya Sarpras Wilayah Kelurahan	80	80	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Sekolah PAUD Tingkat Kelurahan	1	1	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Service AC	1	1	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	43.268.691	86,54		
	Terwujudnya Tranformasi Digital UMKM yang Mandiri	2	2	100,00		
	Menunjang Kegiatan Dalam Jaringan (DARING)	3	3	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Kotabumi telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	RUTILAHU	LINK LEUWEUNG SAWO RT 03 RW 09	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
I	RUTILAHU	LINK LEUWEUNG SAWO RT 04 RW 09	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000
I	DRAINASE	LINK.PENGAIIRAN RT 06 RW 08	17,5	M3	17,5	M3	27.000.000
II	DRAINASE	LINK LEUWUNG SAWO RT 04 RW 09	18,34	M3	20,3	M3	45.460.000,00
III	DRAINASE	LINK PENGAIIRAN RT 05 RW 08	17,78	M3	18	M3	35.540.000,00

Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Kotabumi pada tahun 2020 menghasilkan 2 output yaitu Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Drainase, pelaksanaan pada termin I adalah pembangunan 2 unit Rutilahu dan drainase dengan volume 17,5 M3, sedangkan pada termin

II dan III dilaksanakan pembangunan drainase di 2 lokasi dengan total realisasi volume 38,3 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 141.000.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Kotabumi juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		ANGGARAN
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Pengairan Baru RT 06/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Pengairan Baru RT 06/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kubang Wates RT 01/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kubang Wates RT 01/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Kubang Wates RT 01/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link.Pengairan Baru RT 03/08	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pengairan Baru RT 03/08	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pengairan Baru RT 06/08	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Serdag RT 04/08	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Pengairan Baru RT 03/08	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link.Serdag RT 04/08	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Kotabumi pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Kotabumi sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

4. KELURAHAN PABEAN

Tabel 3.1.4.1r.4 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Pabean)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		524.780.986	519.134.211	98,92		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.008.840.622	986.561.622	97,792		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		61.600.000	61.600.000	100,00		
	Terlaksananya kegiatan monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan	1	-	0,00		
	Tersedianya honor LINMAS	17	-	0,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		168.215.622	168.215.622	100,00		
	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana wilayah kelurahan	1	-	0,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		178.800.000	178.800.000	100,00		
	Tersedianya honor RT/RW	12	-	0,00		
	Tersedianya seragam ketua RT/RW	16	-	0,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		7.000.000	7.000.000	100,00		
	Meningkatnya kualitas layanan publik (simpul paten)	1	-	0,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		56.900.000	56.900.000	100,00		
	kegiatan pengajian rutin	3	-	0,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan selaksi tilawatil qur'an (STQ)	1	-	0,00		
Dukungan Program Kampung Iklim		10.965.000	10.965.000	100,00		
	Terlaksananya Dukungan Program Kampung Iklim	3	3	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan	1	1	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00		
	Terlaksananya Dukungan Kelurahan Sehat	1	1	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan		7.160.000	7.160.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PKK Kelurahan	3	3	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		19.200.000	19.200.000	100,00		
	Tersedianya honor LPM	1	1	100,00		
	Tersedianya seragam LPM	10	10	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	2	2	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		13.000.000	13.000.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	2	2	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.366.000	99,45		
	Kegiatan Pembinaan LINMAS	1	1	100,00		
	Kegiatan kesiapsiagaan bencana	1	1	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.250.000	98,85		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kegiatan mengurus jenazah	1	1	100,00		
	Pelatihan kader kesehatan	1	1	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		
	Sumur resapan	11	11	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	83.029.900	96,55		
	Pelatihan Service AC	10	10	100,00		
	kegiatan pendidikan dan kebudayaan	5	5	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	32.075.100	64,15	Pada Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan) serapan anggaran 64.15%, dikarenakan adanya wabah covid 19, hal inilah yang menyebabkan serapan anggaran 64.15% atau kurang dari 75%.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah akan melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
	Terwujudnya transformasi digital UMKM yang mandiri	100	60	60,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Pabean telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAGAR MAKAM	Link. Pabean RT 01/01	1	Paket	1	Paket	50.000.000
II	DRAINASE	LINK.KARANG TENGAH RT 12 RW 01	27,86	M3	34,68	M3	39.860.000
III	DRAINASE	LINK GEMPOL WETAN RT 041 RW 02	37,66	M3	38	M3	53.100.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Pabean pada tahun 2020 membangun sebanyak 3 output dengan 1 output pembangunan yang dilaksanakan di tiap termin, pelaksanaan pada Termin I yaitu pembangunan Pagar Makam dengan lokasi 1 paket, sedangkan untuk termin II dan III dilaksanakan pembangunan drainase dengan realisasi total 72,68 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 142.960.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Pabean juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
1	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Pabean RT.001/001 (SDN Pecinan)	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciputat RT.010/004 (MTs. Al-Khairiyah)	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciputat RT.010/004 (MTs. Al-Khairiyah)	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciputat karang Tengah RT.10/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Ciputat karang Tengah RT.10/04	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Pabean pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Pabean sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

5. KELURAHAN TEGAL BUNDER

Tabel 3.1.4.1r.5 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Tegal Bunder)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		426.282.000	423.413.038	99,33		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.104.967.722	1.092.891.722	98,907		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		65.200.000	65.200.000	100,00		
	Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	12	12	100,00		
	Honor Linmas	12	12	100,00		
	Seragam Linmas	6	6	100,00		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		8.912.350	8.912.350	100,00		
	Tersedianya Peningkatan Fungsi dan Peran PKK Kelurahan	25	25	100,00		
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		174.785.622	174.785.622	100,00		
	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1	1	100,00		
	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1	1	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		230.298.800	230.298.800	100,00		
	Honor RT/RW	12	12	100,00		
	Seragam RT/RW	21	21	100,00		
	Koordinasi RT/RW	4	4	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		1.290.000	1.290.000	100,00		
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	1	1	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kelurahan		68.755.950	68.755.950	100,00		
	STQ	1	1	100,00		
	Pengajian Rutin	12	12	100,00		
	PHBI/PHBN	3	3	100,00		
Dukungan Program Kampung Iklim		25.330.000	25.330.000	100,00		
	Jum'at Bersih	12	12	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00		
	Senam	12	12	100,00		
	Ketuk Pintu	2	2	100,00		
	Kamantik	4	4	100,00		
	Gerakan Masyarakat Sehat	2	2	100,00		
	Screening Lansia	1	1	100,00		
	Pendampingan Intervensi Kelurahan sehat	12	12	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		24.700.000	24.700.000	100,00		
	Honor LPM	12	12	100,00		
	Koordinasi LPM	4	4	100,00		
	Seragam LPM	10	10	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		20.000.000	20.000.000	100,00		
	Pembinaan UMKM	60	60	100,00		
	Pendampingan Ekonomi	6	6	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		19.695.000	19.695.000	100,00		
	Dokumen Penyusunan RKA	1	1	100,00		
	Dokumen Perencanaan RAB	1	1	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	115.000.000	100,00		
	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Kelurahan	30	30	100,00		
	Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	100	100	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	65.000.000	100,00		
	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	50	50	100,00		
	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	50	50	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		
	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	86.000.000	100,00		
	Pelatihan Service AC	10	10	100,00		
	Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	45	45	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	37.924.000	75,85		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10	10	100,00		
	Sosialisasi Bagi Pelaku UMKM	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Tegal Bunder telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I,II,III	POSYANDU	LINK BLACU RT 003 RW 002	1	UNIT	1	UNIT	132.067.779
III	RUTILAHU	LINK PANESAPAN RT 06/03	1	UNIT	1	UNIT	16.500.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWkel di Kelurahan Pabean pada tahun 2020 hanya membangun 2 output mengingat kegiatan ini terkena rasionalisasi untuk penanganan pandemi COVID-19, pada Termin I sampai dengan III dilaksanakan pembangunan 1unit Posyandu serta pembangunan 1 unit RTLH di termin III. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWkel ini adalah sebesar Rp. 148.567.779

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Tegal Bunder juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pasar Bunder	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Pasar Bunder	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Duku Malang	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Duku Malang RT.07/04	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Kubang Lampit	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link Blacu Masjid RT.003/002	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kedawung RT 15/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kedawung RT 15/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
II	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kedawung RT.015/05	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kubang Lampit RT 10/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
III	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link Kubang Lampit RT 10/01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Tegal Bunder pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Tegal Bunder sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

6. KELURAHAN PURWAKARTA

Tabel 3.1.4.1r.6 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Kelurahan Purwakarta)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		400.232.250	397.096.670	99,22		
Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan						
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		1.116.367.122	1.105.246.161	99,004		
Monitoring ketentraman dan ketertiban lingkungan		70.600.000	70.600.000	100,00		
	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungn Masyarakat	12	12	100,00		
Peningkatan fungsi dan peran PKK Kelurahan		10.025.000	10.025.000	100,00		
	Terlaksananya Program Kerja PKK	2	2	100,00		
Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan		172.048.122	172.028.216	99,99		
	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah kelurahan	1	1	100,00		
Fasilitasi koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)		258.020.000	258.020.000	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Kelembagaan Masyarakat (RT/RW)	12	12	100,00		
Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)		2.575.000	2.575.000	100,00		
	Tersedianya Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Simpul Paten)	2	2	100,00		
Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan		1.400.000	1.400.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kewilayahan	1	1	100,00		
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kelurahan		60.459.000	60.459.000	100,00		
	Terlaksananya peringatan hari besar Islam (PHBI)	1	1	100,00		
Dukungan Program Kampung Iklim		5.725.000	5.725.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Jumat Bersih	2	2	100,00		
Dukungan Kelurahan Sehat		50.000.000	50.000.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Kader	25	25	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Ketuk Pintu TB Paru	4	4	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Gerakan masyarakat Sehat	75	75	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan pemantauan Jentik	4	4	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Screening kesehatan Lansia	5	5	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Keluarga Sehat	50	50	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Intervensi Lanjutan Keluarga Sehat	2	2	100,00		
Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		26.145.000	26.145.000	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya Honorarium 12 Bulan	12	12	100,00		
	Terlaksananya koordinasi antar mitra pemerintah	3	3	100,00		
	Tersedianya Seragam LPM	10	10	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Perekonomian Kelurahan		25.000.000	25.000.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan UMKM	1	1	100,00		
	Terlaksananya Pemutakhiran data Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1	1	100,00		
Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan		18.370.000	18.370.000	100,00		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Pemerintahan dan Trantibum (DAU Kelurahan)		115.000.000	114.100.000	99,22		
	Pelatihan tenaga keamanan/ketertiban kelurahan	30	30	100,00		
	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	50	50	100,00		
Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Kelurahan Bidang Kesos dan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Kelurahan)		65.000.000	64.950.000	99,92		
	Pelatihan Kader Kesehatan	50	50	100,00		
	Pembinaan Bidang LKK	50	50	100,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah (DAU Kelurahan)		100.000.000	100.000.000	100,00		
	Terbangunnya Sarana & Prasarana Wilayah	1	1	100,00		
Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat Kelurahan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (DAU Kelurahan)		86.000.000	84.000.000	97,67		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pelatihan UMKM	35	35	100,00		
	Pelatihan Pendidikan dan Kebudayaan	30	30	100,00		
Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan (DID Tambahan)		50.000.000	41.848.945	83,70		
	Jumlah Titik Pemasangan Wifi	10	10	100,00		
	Sosialisasi bagi pelaku UMKM	2	2	100,00		

Untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan Kelurahan, pada tahun 2020, Kelurahan Purwakarta telah melaksanakan Pembangunan Sarpraswil sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			VOL	SAT	VOL	SAT	
I	PAVING BLOCK	LINK. KUBANG WELINGI RW 003	120	M2	155	M2	21.030.000
I	PAVING BLOCK	LINK. KALIGANDU BUJANG BOROS RT 014/006	227	M2	413	M2	39.380.000
II	DRAINASE	LINK. CILENTRANG RT 002/001	22,12	M3	36,6	M3	31.910.000
III	DRAINASE	LINK. KUBANG LELE RT 003/002	29,68	M3	31,3	M3	53.850.000

Pelaksanaan Pembangunan Sarpraswil DPWKel di Kelurahan Purwakarta pada tahun 2020 membangun 2 output yaitu Paving Blok dan Drainase, pada Termin I dilaksanakan pembangunan Paving Blok di 2 lokasi dengan realisasi luas 568 M2, dan pada Termin II dan III dilaksanakan drainase 67,9 M3. Total Realisasi untuk seluruh progres pembangunan Sarpraswil DPWKel ini adalah sebesar Rp. 146.170.000

Selain bersumber dari APBD, Pembangunan Sarpraswil Kewilayahan di Kelurahan Purwakarta juga bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan yang dialokasikan untuk Pembangunan Drainase Vertikal (Sumur Resapan) yang tersebar di 11 titik/lokasi sebagai berikut:

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.014 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.015 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763

TERMIN	PEKERJAAN	LOKASI	RENCANA		REALISASI		REALISASI
			LUAS	SAT	VOL	SAT	
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu RT.010 RW.004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.015 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu RT.010 RW.004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
I	DRAINASE VERTIKAL BUIS PLASTIK	Link. Kaligandu RT.010 RW.004	1	UNIT	1	UNIT	7.864.763
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.014 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kubang Welingi RT. 007 RW. 003	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
2	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.016 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Kaligandu Bujang Boros RT.014 RW.006	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604
3	DRAINASE VERTIKAL BUIS BETON	Link. Cilentrang RT.01 RW.01	1	UNIT	1	UNIT	7.562.604

Pembangunan Drainase vertikal di Kelurahan Purwakarta pada Termin I sebanyak 6 unit, pada Termin II sebanyak 3 unit dan pada Termin 3 sebanyak 2 unit. Total Drainase Vertikal/ Sumur Resapan yang terbangun di Kelurahan Purwakarta sebanyak 11 unit, dari keseluruhan target 11 unit, sehingga untuk kegiatan ini terealisasi sepenuhnya (100%)

K. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel 3.1.4.1s Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (Badan Kesbangpol)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.004.979.705	909.463.451	90,50		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100	100	100,00		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100	80	80,00		
	Tingkat disiplin aparatur	100	85	85,00		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	100	93	93,00		
Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah						
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan		-	-	#DIV/0!	Kegiatan tidak teralokasi anggaran dikarenakan mengalami refocusing (penyelenggaraan social distancing)	Pada tahun 2021 dan seterusnya penyelenggaraan akan disesuaikan dengan kebijakan protokol kesehatan dan melaksanakan pengurangan/ pembatasan jumlah peserta
	Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di Kota Cilegon	65	65	100,00		
	Indeks demokrasi Kota Cilegon	85	85	100,00		
	Cakupan pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	75	75	100,00		
	Cakupan penerapan bela negara	80	80	100,00		
Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah						
Program Peningkatan LSM dan ORMAS		4.867.010.000	4.617.374.475	94,87		
	Tingkat Kondusifitas Kota melalui KOMINDA	80	80	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Proporsi lembaga di bidang kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan	100	100	100,00		
	Cakupan pendataan dan pembinaan ormas dan LSM	100	200	200,00		
	Tingkat fasilitasi penanganan konflik sosial	100	200	200,00		
	Tingkat pendidikan politik masyarakat	100	-	0,00		
	Cakupan fasilitasi perkembangan politik di daerah	100	-	0,00		
	Cakupan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya serta fasilitasi kerukunan umat beragama	100	-	0,00		
Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		71.045.000	71.045.000	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Sweeping Narkoba	4	4	100,00		
	Terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tingkat Kota Cilegon	1	1	100,00		
Koordinasi Unsur Pengamanan Wilayah di Kota Cilegon		3.636.965.000	3.624.195.250	99,65		
	Terlaksananya keselarasan kegiatan pengamanan wilayah di Kota Cilegon	100	100	100,00		
Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan politik di daerah		2.850.000	2.850.000	100,00		
	Terlaksananya sistem pelaporan situasi politik di daerah	-	-	#DIV/0!		
	Terlaksananya Evaluasi situasi politik di daerah	-	-	#DIV/0!		
Fasilitasi Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik, dan Pemilu		342.200.000	314.121.725	91,79		
	Terlaksananya Desk Pilkada Kota Cilegon	3	3	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pemantauan Tenaga Kerja Asing dan Pemberi Kerja di Kota Cilegon		92.800.000	32.200.000	34,70	Ketidaksesuaian pada kode rekening Honorarium Tim Pemantauan tenaga kerja asing (telah di sampaikan usulan perubahan kode rekening pada awal tahun 2020)	Akan lebih memperhatikan penyesuaian kode rekening untuk rencana kerja selanjutnya
	Terlaksananya Pemantauan Tenaga Kerja Asing, Warga Negara Asing dan Lembaga Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon	100	50	50,00		
Fasilitasi, Pembinaan, dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan		136.100.000	136.100.000	100,00		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	35	35	100,00		
	Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	400	-	0,00	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena Pandemi Covid-19.	
Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Cilegon		150.000.000	106.356.000	70,90		
	Peningkatan Kapasitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Cilegon	60	60	100,00		
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Ketentraman dan Keterlibatan dalam Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial	4	4	100,00		
Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		130.050.000	43.325.000	33,31	Sehubungan dengan Pandemi Covid 19, kegiatan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan	Pada tahun 2021 kegiatan akan direncanakan kembali dan direalisasikan secara optimal
	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota	4	4	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar Bagi ASN di Kota Cilegon	1	-	0,00	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena Pandemi Covid-19.	
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan	4	-	0,00	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena Pandemi Covid-19.	
	Terlaksananya Kegiatan Kewaspadaan Dini Pegawai Organisasi Perangkat Daerah	1	-	0,00	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena Pandemi Covid-19.	
Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi		155.000.000	141.540.000	91,32		
	Terselenggaranya Penyelenggaraan dan Pengembangan Demokrasi di Kota Cilegon	100	100	100,00		
	Terselenggaranya Pendidikan dan Budaya Politik Bagi Pemilih Muda	210	210	100,00		
	Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Pembahasan Perhitungan Angka IDI Tahun 2019	100	100	100,00		
Diseminasi dan Monitoring Pelaksanaan Pilkada Kota Cilegon		150.000.000	137.201.500	91,47		
	Terlaksananya Diseminasi dan Monitoring Pelaksanaan Pilkada Kota Cilegon	3	3	100,00		

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral menjadi salah satu indikator yang terdapat pada Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan. Indikator ini memiliki target yang terdiri dari ketersediaan data dan informasi sektoral yang ada. Target yang dimaksud tersebut dikategorikan pada sejumlah data sebagai berikut:

- Data perencanaan (Renstra dan Renja);
- Data keuangan (Laporan Aset dan Keuangan);
- Data kepegawaian (Data kepegawaian);
- Data sektoral (Ormas yang terdaftar).

Masing-masing kategori data tersebut memiliki persentase keterpenuhan sebesar 25%. Target yang dicapai Badan Kesbangpol Kota Cilegon pada indikator Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral sebesar 100%.

Sepanjang tahun anggaran 2020 berjalan, Badan Kesbangpol Kota Cilegon telah melengkapi data yang dibutuhkan untuk mengisi indikator program ini. Data yang dimaksud sebagai berikut:

- Data Perencanaan (Renstra Tahun 2016-2021 dan Renja Tahun 2020);
- Data keuangan (Laporan Aset Tahun 2020 dan Laporan Keuangan Tahun 2020);
- Data Kepegawaian (Rekap Absensi Kepegawaian 2020 dan DUK Tahun 2020);
- Data Sektoral (Daftar Ormas yang terdaftar sampai dengan akhir tahun 2020).

Masing-masing kategori data tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi dan mencapai target sebesar 100%.

Indikator program Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dipenuhi berdasarkan laporan aset tahun 2020 yang berisi pengukuran aset kantor selama satu tahun berjalan yang terdiri dari kategori aset yang terdapat pada KIB A sampai dengan KIB F. Berdasarkan laporan tersebut, Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik mencapai 75%.

Pencapaian yang tidak memenuhi target tersebut, memiliki catatan yang harus diperbaiki, antara lain:

- Perawatan peralatan dan perlengkapan kantor tidak dapat berjalan optimal karena aset gedung kantor yang masih berada pada aset gedung kantor Dinas Satpol PP;
- Penghapusan aset yang masih belum berjalan optimal sehingga aset yang masuk kategori rusak dan rusak berat belum bisa ditindaklanjuti;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta kantor yang baru belum bisa dilaksanakan karena terkendala penghapusan aset dan aset gedung yang masih menempati aset gedung dinas lain.

Persentase kehadiran pegawai Badan Kesbangpol Kota Cilegon pada tahun 2020 mengalami persentase yang dinamis. Bulan Januari menjadi bulanyang memiliki angka tertinggi sebanyak 95,00% dan bulan Maret menjadi bulan dengan persentase tingkat kehadiran pegawai terendah yaitu 80,00%.

Adapun perhitungan tingkat kedisiplinan diperoleh dari menghitung kehadiran pegawai per-bulan. Setelah didapat nilai kehadiran per-pegawai, kemudian rata-rata tingkat kedisiplinan seluruh pegawai.

Target indikator Tingkat Disiplin Aparatur yaitu 90%. Capaian indikator ini dilihat dari tingkat kehadiran pegawai sepanjang tahun 2020 yang mencapai 85,92%. Capaian tersebut tidak memenuhi target yang sebelumnya direncanakan yaitu sebesar 90%. Tingkat kedisiplinan pegawai masih sangat rendah dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun telah diberlakukannya potongan bagi pegawai yang tidak disiplin tapi kesadaran pegawai masih kurang.

Dinamisnya tingkat kehadiran pegawai tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kehadiran pegawai dalam situasi Covid-19 yang mengharuskan sistem WFH (Work Form Home) diterapkan. Kategori pegawai yang tidak hadir yaitu pegawai yang tidak masuk dengan keterangan sakit dan cuti,

selain itu pegawai yang tidak memberikan keterangan juga termasuk dalam kategori pegawai yang tidak hadir. Pegawai yang tidak hadir dalam kategori sakit banyak diisi oleh pegawai yang menjalankan isolasi mandiri.

Realisasi keuangan berdasarkan cash budget atau anggaran kas ini belum memenuhi target yang ditentukan sebelumnya yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kurang optimal dan efektifnya perencanaan oleh masing-masing PPTK dan rasionalisasi yang terjadi belum sesuai dengan kebutuhan. Capaian indikator ini mencapai 92,65% dan dapat dikatakan baik. Dengan capaian tersebut demikian di tahun berikutnya penyusunan anggaran kas atau cash budget akan lebih diperhatikan sesuai dengan perencanaan kegiatannya.

Tingkat pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, ideologi Negara, toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kota Cilegon ini merupakan indikator dari sasaran Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat. Indikator ini menjadi ukuran Pemerintahan Kota Cilegon yang direpresentasikan oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon dalam merawat dan meningkatkan ketentraman, ketertiban, serta perlindungan masyarakat. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolak ukur masyarakat Kota Cilegon dalam memahami wawasan kebangsaan, ideologi negara, dan toleransi antar umat beragama. Indikator ini dipenuhi berdasarkan lingkungan Kampung Merah Putih yang telah memenuhi indikator dan terverifikasi oleh pejabat terkait dalam Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon.

Indikator Forum Pembauran Kebangsaan merupakan salah satu indikator dari dua indikator yang terdapat pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Indikator ini menjadi salah satu indikator yang terdampak akibat rasionalisasi kegiatan yang terjadi akibat penanganan Covid-19. Karena seluruh kegiatan pendukung keterisian indikator ini pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan mengalami rasionalisasi sebanyak 100%. Sehingga, tidak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tak ada data yang dapat dipenuhi pada indikator ini. Target indikator ini sebanyak 85% dengan capaian 0%.

Indikator program ini dapat disebut juga sebagai Pokja Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) merupakan indikator yang berasal dari kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dan pemberdayaan dan pembinaan forum-forum kebangsaan. Masyarakat Kota Cilegon yang sangat heterogen yang terdiri dari berbagai macam ras, agama dan suku daerah, membutuhkan sebuah wadah atau sarana/prasarana serta forum-forum kebangsaan yang berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan pembauran kebangsaan. Pada indikator ini, program atau kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih dan Kegiatan Lomba Kampung Merah Putih yang merupakan Program Inovasi Daerah/OPD sebagai suatu wadah dan/atau sarana komunikasi dalam rangka pemeliharaan persatuan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Kota Cilegon.

Program Kampung Merah Putih dapat terwujud bilamana di suatu lingkungan RT/RW/Kelurahan telah memiliki Gerbang atau Gapura Kampung Merah Putih dan menyediakan dan/atau memiliki Poskamling aktif sebagai Sarang Merpati Watu dengan melibatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat langsung sebagai suatu wadah refleksi dan aktualisasi nilai-nilai kebangsaan NKRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara bertanggungjawab.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pembangunan atau rehabilitasi aspek prasarana/sarana Pendidikan Wawasan Kebangsaan di masyarakat berupa Bangunan Gapura dan Bangunan Poskamling sebagai Sarana Kebangsaan untuk Memelihara Persatuan, Keamanan dan Ketertiban demi Warga Bersatu (Sarang Merpati Watu). Sarang Merpati Watu yang berbentuk bangunan Poskamling atau Pos Ronda, yang dapat dijadikan sebagai wadah refleksi dan pusat kegiatan kebangsaan warga masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara persatuan, keamanan dan ketertiban kampung atau lingkungannya masing-masing.

Sejak dilaunching secara resmi oleh Bapak Plt. Walikota Cilegon sebagai Pilot Project Program Kampung Merah Putih (KMP) pada Desember 2017, sampai dengan Tahun 2020 ini, Badan Kesbangpol Kota Cilegon baru (telah) membentuk sebanyak 14 (empat belas) Kampung Merah Putih (KMP) yang sebelumnya telah berjumlah 8 (delapan) Lokasi KMP di Tahun 2018 dan 6 (enam) Lokasi KMP di Tahun 2019. Sumber dana kegiatan tersebut dari APBD Kota Cilegon yang terdiri dari Kegiatan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel) dan Anggaran Badan Kesbangpol Kota Cilegon sebagai OPD Penggagas/Innovator.

Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Merah Putih Tahun Anggaran 2020 memiliki target/sasaran berupa terlaksananya Pembangunan Gapura Kampung Merah Putih sebanyak 43 (empat puluh tiga) kelurahan/unit dan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Poskamling sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) Lokasi/RT di setiap Lingkungan/RW/KMP sebagai Sarang Merpati Watu (Sarana Kebangsaan untuk Memelihara Persatuan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat demi Warga Bersatu)". Namun seluruh kegiatan tersebut tak dapat dilanjutkan pada tahun 2020 akibat rasionalisasi kegiatan sebanyak 100%.

Indikator ini merupakan salah satu indikator dari dua indikator yang terdapat pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan. Indikator ini menjadi salah satu indikator yang terdampak akibat rasionalisasi kegiatan yang terjadi akibat penanganan Covid-19. Karena seluruh kegiatan pendukung keterisian indikator ini pada Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan mengalami rasionalisasi sebanyak 100%. Sehingga, tak ada kegiatan yang dapat dilaksanakan dan tak ada data yang dapat dipenuhi pada indikator ini. Target indikator ini sebanyak 85% dengan capaian 0%.

Indikator Cakupan Penerapan Bela Negara meliputi cakupan diklatsar Bela Negara dan pemberdayaan kader Bela Negara. Untuk meningkatkan pembinaan karakter bangsa dan pemeliharaan semangat bela Negara masyarakat dan ASN di Kota Cilegon, Badan Kesbangpol telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan Kader Bela Negara yang sudah ada dan membentuk kader Bela Negara yang baru melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Bela Negara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Target utama indikator setiap tahunnya yaitu sebanyak 48 Kader/Orang (80%) dari target tambahan yaitu 60 kader Bela Negara (100%). Realisasi target pada

Tahun Anggaran 2019 yaitu 51 kader Bela Negara (85.55%). Secara kuantitas, kader Bela Negara sudah berjumlah 138 orang tersebut dinilai masih sangat minim dari target total sebanyak 500 orang pada tahun 2021. Apalagi pada TA. 2020 kegiatan Diklatsar Bela Negara tidak terakomodir usulan anggarannya untuk dilaksanakan. Namun demikian, target Tahun 2019 dinilai sangat baik karena dipengaruhi oleh adanya minat dan respon yang tinggi ASN/PNS Kota Cilegon dalam mengikuti Diklatsar Bela Negara. Dimana kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum di seluruh Kecamatan/Kelurahan se Kota Cilegon sebagai ujung tombak pemeliharaan kondisi Kamtrantibmas di wilayah Kota Cilegon.

Indikator Tingkat Kondusifitas Kota Melalui KOMINDA ini merupakan indikator program yang terdapat pada Program LSM dan Ormas. Indikator ini didapat berdasarkan jumlah proposional Sweeping Narkoba dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Sweeping Narkoba yang dilaksanakan yaitu giat gabungan bersama stake holder yang terkait seperti BNNK Cilegon, Polres Cilegon, dan Kodim Cilegon.

Target Proposional Sweeping Narkoba

Realisasi Sweeping Narkoba Satu Tahun

4 Kali (100%)

4 Sweeping Narkoba (100%)

= 100%

Target yang direncanakan pada indikator ini yaitu 100% setiap tahunnya. Indikator ini menjadi indikator P4GN yang diterapkan di Kota Cilegon. Capaian indikator ini mencapai 100%. Sehingga, indikator ini menjadi indikator Pemkot Cilegon yang direpresentasikan oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon dalam menerapkan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Indikator Proporsi lembaga di bidang kesadaran masyarakat ini terdapat dalam Program Peningkatan LSM dan Ormas dan masuk ke dalam Sasaran I Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Indikator ini didapat berdasarkan partai politik pemenang Pemilu Tahun 2019 yang ada di Kota Cilegon yang melaporkan laporan keuangannya dan terfasilitasi pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Dari sembilan partai (Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PPP) yang harus melaporkan laporan keuangannya, keseluruhan partai melaporkannya kepada Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Berikut partai dengan besaran suara yang difasilitasi bantuan keuangan parpol yang tertera pada Keputusan Walikota Cilegon Nomor 900/Kep.69-Kesbangpol/2020.

Cakupan pendataan dan pembinaan ormas dan LSM

Indikator ini menjadi indikator program tentang fasilitasi pelaporan Ormas di Kota Cilegon yang melapor dan telah diverifikasi oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Berikut daftar Ormas yang melapor dan telah terverifikasi memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar):

1. Laskar Merah Putih melapor tanggal 16 September 2020 (Terverifikasi)
2. DPC Perkumpulan Pemuda Batak Bersatu (DPC PBB) 24 September 2020 (Terverifikasi)
3. Generasi Sosial Peduli Indonesia (DPC GSPI) melapor tanggal 24 November 2020 (Terverifikasi)

4. Generasi Sosial Peduli Indonesia (DPC GSPI) melapor tanggal 4 Desember 2020 (Terverifikasi)
5. LSM Gerakan Pemuda Cilegon (GPC) melapor tanggal 17 November 2020 (Terverifikasi)
6. DPC Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara Kota Cilegon melapor tanggal 29 Desember 2020 (Terverifikasi)

Dari keenam Ormas yang telah melapor, laporan akan diverifikasi berdasarkan SOP yang berlaku oleh pejabat terkait pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon.

Indikator Indeks Demokrasi Kota Cilegon ini menjadi indikator tentang tingkat demokrasi yang terdapat di Kota Cilegon. Indikator ini merupakan satu-satunya indikator yang tidak berdiri sendiri dan tidak langsung diisi oleh Badan Kesbangpol Kota Cilegon. Indikator ini mengikuti poin dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten yang dihitung oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Banten pada Juni setiap tahunnya. Maka, indikator ini belum dapat diisi dan akan diperbarui ketika nilai IDI Provinsi Banten telah dipublikasikan. Target pada indikator ini yaitu 80 Point.

L. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 3.1.4.1t Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Administrasi Pemerintahan (BPBD)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana						
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		593.728.070,00	348.534.453,00	58,70%		
	Persentase Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	100%	85,71%	85,71%	Refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga dari target 7 kelompok hanya dapat direalisasikan sebanyak 4 kelompok	
	Persentase meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana daerah	100%	57,14%	57,14%		
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Kebencanaan		171.525.617,00	0	0%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersedianya peralatan pendukung kebencanaan untuk melengkapi gedung BPBD Kota Cilegon (Tower Triangle)	1 Jenis	0	0%	Kegiatan ini tertunda karena membutuhkan proses perijinan yang cukup Panjang hingga saat ini.	Diusulkan untuk dianggarkan tahun berikutnya.
Apel Siaga Bencana		40.500.000,00	40.500.000,00	100%		
	Terlaksananya Apel Siaga Bencana	1 kegiatan	0	0%	Dikarenakan adanya <i>refocussing</i> anggaran akibat pandemi <i>covid-19</i> sehingga tidak dapat dilaksanakan. Hanya pengadaan kaos dan topi yang terserap (kontrak) krn pengadaan sebelum adanya <i>refocussing</i> .	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana		152.660.000,00	152.660.000,00	100%		
	Telaksananya sosialisasi informasi kebencanaan melalui radio, media cetak/elektronik dan edukasi rawan bencana	2 kegiatan	2 kegiatan	100%		
Drill Penanggulangan Kebencanaan		147.874.453,00	147.874.453,00	100%		
	Terlaksananya kegiatan drill penanggulangan kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Pengamanan Hari Raya (Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional)		73.668.000,00	0	0%		
	Terlaksananya pengamanan hari raya (hari besar islam dan hari besar nasional)	2 kegiatan	0	0%	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19	
Pelatihan SDM Kesiapsiagaan Aparatur		7.500.000,00	7.500.000,00	100%		
	Terlaksananya pelatihan SDM kesiapsiagaan	1 kegiatan	0	0%	Dikarenakan adanya <i>refocussing</i> anggaran akibat pandemi <i>covid-19</i> sehingga tidak dapat dilaksanakan (hanya ATK dan rapat yang terserap di TW 1 sbm adanya <i>refocussing</i> anggaran <i>covid-19</i>)	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana						
Program Kedaruratan dan Logistik		506.545.000,00	363.505.000,00	71,76%	Dikarenakan disesuaikan dengan jumlah kejadian dan kebutuhan tim tanggap darurat dan logistik sehingga tidak dapat diserap seluruhnya	
	Persentase distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana	100%	100%	100%		
	Persentase Penanganan bencana	100%	100%	100%		
Operasional Tanggap Darurat		262.395.000,00	190.074.000,00	72,44%		
	Terlaksananya pelayanan tanggap darurat bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Operasional Pendistribusian Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan		121.735.000,00	54.720.000,00	44,95%	Hanya dapat diserap sesuai dengan jumlah kejadian dan kebutuhan logistik	
	Terlaksananya Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Penyediaan Dukungan Logistik dan Peralatan Kebencanaan		122.415.000,00	118.711.000,00	96,97%		
	Tersedianya Logistik Kebencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%		
Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana						
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		29.936.000,00	15.366.000,00	51,33%	Kegiatan-kegiatan dalam program ini hanya dapat dilaksanakan setelah terjadi bencana	
	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	90%	77,78%	86,42%	Kegiatan-kegiatan dalam program ini hanya dapat dilaksanakan setelah terjadi bencana	

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment)		26.936.000,00	15.366.000,00	57,05%	Pandemi Covid-19 menyebabkan rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan	
	Tersusunnya Baseline DALA	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	Dikarenakan pandemi covid-19 yang terlaksana hanya yang berbentuk survei sedangkan rapat-rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.	
Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga		3.000.000,00	0	0%	Bentuk kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi dikarenakan masa pandemi covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan / diserap anggarannya.	
	Terselenggaranya Komunikasi Bencana Lintas Lembaga Pasca Bencana	1 kegiatan	0	0%	Bentuk kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi dikarenakan masa pandemi covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan / diserap anggarannya.	
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		2.063.199.630,00	1.916.845.986,00	92,91%		
	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral	95%	85%	89%		
	Tingkat Disiplin Aparatur	95%	90%	95%		
	Presentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	95%	90%	85%		
	Presentase Kesesuaian Cash Budget	90%	90%	100%		

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Salah satu indikator keberhasilan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah meningkatnya usaha pencegahan bencana dimana meningkatnya usaha pencegahan bencana dihitung dari prosentase aparatur pemerintah dan masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana serta meningkatnya peralatan kesiapsiagaan bencana yang dihitung berdasarkan prosentase jumlah peralatan kesiapsiagaan bencana yang tersedia.

Pada tahun 2020 usaha pencegahan bencana yang ditargetkan untuk pelatihan kelompok masyarakat dalam penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocussing* anggaran akibat pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, sampai dengan tahun 2020 jumlah kelompok masyarakat yang ditargetkan terlatih dalam penanggulangan bencana sebanyak 7 kelompok, baru tercapai sebanyak 6 kelompok masyarakat, atau terpenuhi 85,71%. Adapun kelompok masyarakat yang belum mendapatkan pelatihan upaya pencegahan bencana adalah Kelompok Buruh dan Karyawan, sedangkan kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan upaya pencegahan bencana dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Wanita (Tahun anggaran 2016)
2. Kelompok Guru (Tahun anggaran 2016)
3. Kelompok RT/RW (Tahun anggaran 2017)
4. Kelompok Pemuda; (Tahun Anggaran 2018)
5. Kelompok Pelajar/Mahasiswa (Tahun Anggaran 2018)
6. Kelompok Aparatur (PNS/Non PNS) (Tahun Anggaran 2019)

Pada Kegiatan kesiapsiagaan Tahun 2020, melalui Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Kebencanaan target pengadaan alat pendukung untuk komunikasi (*Tower Triangle*) belum dapat terpenuhi dikarenakan membutuhkan proses perijinan yang cukup panjang, sehingga diusulkan dianggarkan lagi tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2020, target ketersediaan 7 peralatan, baru terpenuhi sebanyak 4 peralatan, atau terealisasi sebesar 57,14 %. Adapun 7 peralatan pendukung kebencanaan yang ditargetkan tersedia adalah sebagai berikut:

1. Analisa Bencana/Aloha (Tahun anggaran 2016)
2. Alat Pelindung Diri (Tahun anggaran 2016)
3. CCTV Zona Kota (Tahun anggaran 2017)
4. Rambu Evakuasi (Tahun Anggaran 2018)
5. Sirine Tsunami (belum terpenuhi)
6. Rambu Bencana (belum terpenuhi)
7. CCTV Zona Industri (belum terpenuhi)

Adapun kegiatan yang mendukung Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendukung kebencanaan, Apel siaga bencana, Pelatihan pencegahan bencana, Pengurangan risiko bencana, Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Drill Penanggulangan bencana, Pengamanan Hari Raya, Pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan Penyusunan rencana kontijensi.

Anggaran Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang semula sebesar Rp 873.282.070, pada APBD-P TA. 2020 mengalami refocusing sebesar 32,01% menjadi Rp 593.728.070. Perubahan anggaran terdapat hampir di semua kegiatan bahkan anggaran di beberapa kegiatan menjadi nihil akibat pandemi *covid-19*. Adapun anggaran kegiatan yang dinihikan tersebut adalah Kegiatan Pelatihan Pencegahan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, Pembinaan Kelurahan Tangguh Bencana dan Penyusunan Rencana Kontijensi. Capaian Realisasi anggaran kegiatan pada program Pencegahan dan Kesiapsiagaan tercapai sebesar 58,70%. Kegiatan yang capaiannya dibawah 80% yaitu Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendukung kebencanaan dan Pengamanan Hari Raya, dimana serapan anggaran pada kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendukung kebencanaan sebesar 0%, dikarenakan pengadaan *Tower Triangle* membutuhkan proses perijinan yang cukup panjang. Begitu juga serapan anggaran kegiatan Capaian Pengamanan Hari Raya sebesar 0% dikarenakan masih pandemi *covid-19* serta adanya larangan untuk keluar kota dari pemerintah sehingga kegiatan tersebut dianggap tidak perlu dilaksanakan.

Program Kedaruratan dan Logistik

Salah satu indikator keberhasilan Program Kedaruratan dan Logistik yaitu terpenuhinya distribusi logistik terhadap kawasan rawan bencana serta capaian penanganan kedaruratan bencana.

Kejadian Bencana di Kota Cilegon selama Tahun 2020 yang berjumlah **56 kejadian** dengan rincian sebagai berikut :

1. Bencana banjir sebanyak 10 kejadian
2. Bencana Longsor sebanyak 11 kejadian
3. Bencana Kegagalan Teknologi sebanyak 1 kejadian
4. Bencana angin puting beliung sebanyak 28 kejadian
5. Kebakaran Lahan sebanyak 6 kejadian

Seluruh kejadian bencana tersebut dapat ditangani dengan baik, sehingga indikator capaian penanganan kedaruratan bencana tercapai 100%. Dalam pelaksanaan tugas penanganan bencana, BPBD Kota Cilegon dibantu oleh Unsur OPD Terkait, TNI/Polri, Pihak kecamatan dan kelurahan, Unsur Relawan dari PMI, Tagana, Kelurahan tangguh Bencana, unsur akademisi dan masyarakat yang peduli dengan kebencanaan. Sedangkan indikator

prosentase distribusi logistic pada Kawasan rawan bencana tercapai 100% dimana distribusi bantuan pengiriman logistik diberikan di 22 titik daerah yang terdampak bencana di Kota Cilegon.

Alokasi anggaran untuk Program Kedaruratan dan Logistik pada APBD-P Tahun 2020 adalah sebesar Rp 506.545.000 (Lima Ratus Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dimana dari anggaran semula Rp. 543.839.758 mengalami refocusing anggaran sebesar 6,86% akibat dari pandemi *covid-19*. Adapun capaian realisasi anggaran kegiatan pada program Kedaruratan dan Logistik tercapai 71,76% . Kegiatan-kegiatan pada program ini adalah Penyediaan Dukungan Logistik Kebencanaan, Operasional Tanggap Darurat dan Operasional Pendistribusian logistik dan Peralatan Pendukung Kebencanaan. Capaian serapan anggaran yang rendah terdapat pada kegiatan Operasional Pendistribusian logistik sebesar 44,95%. Hal ini karena disesuaikan dengan jumlah kejadian bencana dan kebutuhan personil yang terlibat dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat bencana yang terjadi di Kota Cilegon pada tahun 2020, sehingga anggaran yang tersedia dalam DPA tidak dapat diserap seluruhnya.

Pada anggaran APBD-P terdapat 1 kegiatan yang dinihilkan yaitu Kegiatan Pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana Kota Cilegon, Kegiatan ini dinihilkan dikarenakan adanya *refocussing* akibat pandemi *covid-19*.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Salah satu indikator keberhasilan Program Rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu tercapainya penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Capaian kinerja Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama Tahun 2020 tercapai sebesar 86,42%, dimana seharusnya kegiatan sampai Tahun 2020 terlaksana 18 kegiatan akan tetapi hanya 14 kegiatan yang terlaksana. Tahun 2020 Pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki 2 Kegiatan yaitu Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment), dan Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga.

Anggaran pada APBD-P TA. 2020 pada Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp. 29.936.000 dari anggaran semula sebesar Rp. 47.173.000 atau perubahan sebesar 36,54% akibat adanya *refocussing* pandemi *covid-19*

Sedangkan serapan anggaran yang dibawah 80% adalah Penyusunan Baseline DALA (Damage And Loss Assesment), dan Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga. Realisasi anggaran Kegiatan Penyusunan Base Line DALA sebesar 57,05% dikarenakan Kegiatan ini dilakukan setelah terjadi bencana (Berupa Survei dan Rapat Koordinasi) serta akibat pandemi *covid-19* , kegiatan yang terlaksana hanya yang berupa survei sedangkan rapat-rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan. Realisasi anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Bencana Lintas Lembaga sebesar 0% dikarenakan masa pandemi *covid-19* sehingga disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan



Terdapat 4 indikator program pada program dukungan pelayanan pemerintahan yaitu Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral, Presentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik, Tingkat Disiplin Aparatur dan Presentase Kesesuaian Cash Budget. Capaian indikator kinerja pada Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan ini dapat tercapai diatas 80%.

Anggaran pada APBD-P TA. 2020 pada Program ini sebesar Rp. 2.063.199.630 dari anggaran semula sebesar Rp. 3.042.807.589 atau perubahan sebesar 36,19% akibat adanya *refocussing* anggaran untuk pandemi *covid-19*.

Ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya dibawah 80% yaitu

- Penyediaan jasa surat menyurat,
- Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik, serta
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor.

Akan tetapi keseluruhan kegiatan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan berarti, akan tetapi akibat refocusing anggaran akibat dampak pandemik covid 19 ada beberapa kegiatan yang dinihilkan khususnya yang terkait pengadaan seperti kegiatan pengadaan meubeler, komputer, peralatan dan perlengkapan serta pengadaan alat komunikasi. Sehingga mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana di OPD.

Permasalahan

1. Masih banyak indicator-indikator dalam indeks risiko bencana yang belum tercapai, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan manajemen pengelolaan kebencanaan yang kuat dan di dukung oleh SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang lengkap.

Solusi

1. Memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pemerintahan dan manajemen pengelolaan kebencanaan melibatkan multi stakeholder yang disesuaikan dengan risiko bencana di Kota Cilegon, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam penurunan indeks risiko bencana.

3.1.4.2 Pengawasan

A. INSPEKTORAT DAERAH

Tabel 3.1.4.2a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pengawasan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja (%) / Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (%) (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1.161.507.950,00	1.136.275.296,00	97,83%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	85,00	85,00	100,00%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	85,00	85,00	100,00%		
	Tingkat disiplin aparatur	100,00	95,00	95,00%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	85,00	85,00	100,00%		
Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah						
Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah		3.779.116.533,00	3.518.899.433,00	93,11%		
	Tingkat penurunan kasus temuan administratif	5,00	5,00	100,00%		
	Proporsi SKPD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan penyimpanan material/ administrasi	30,00	30,00	100,00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja (%) / Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (%) (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Rasio temuan BPK/RI yang ditindaklanjuti	80,00	80,00	100,00%		
	Proporsi SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tingkat maturitas level berkembang atau lebih baik	90,00	100,00	111,11%		
	Rata-rata nilai laporan akuntabilitas kinerja SKPD	80,00	80,00	100,00%		
Rapat Koordinasi Pengawasan		73.850.000,00	73.850.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan	100,00	100,00	100,00%		
Peningkatan kualitas aparatur pengawas internal pemerintah		49.500.000,00	36.500.000,00	73,74%	anggaran penginapan narasumber dan mamin kegiatan tidak terserap karena kegiatan dilaksanakan secara daring	Pelaksanaan kegiatan secara daring dan menerapkan protocol kesehatan.
	Terlaksananya kegiatan Bintek APIP	100,00	100,00	100,00%		
Bintek sistem pengendalian intern		2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Bintek SPIP	0,00	0,00	#DIV/0!		
Penyusunan PKPT Inspektorat		5.907.000,00	5.907.000,00	100,00%		
	Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan	100,00	100,00	100,00%		
Evaluasi roadmap reformasi birokrasi		9.913.000,00	9.912.500,00	99,99%		
	Terlaksananya Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi	100,00	100,00	100,00%		
Evaluasi Maturitas SPIP		100.000.000,00	53.889.600,00	53,89%	rapat persiapan pelaksanaan tidak dilaksanakan berakibat tidak terserapnya anggaran mamin dan honor narsum, namu	kegiatan dilaksanakan tanpa adanya rapat persiapan untuk seluruh OPD

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja (%) / Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (%) (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					kegiatan teteap dilaksanakan	
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP	100,00	100,00	100,00%		
Peningkatan Level Kapabilitas APIP		26.000.000,00	13.680.000,00	52,62%	anggaran penginapan narasumber dan mamin kegiatan tidak terserap karena kegiatan dilaksanakan secara daring	konsultasi terkait dengan level kapabilitas dilaksanakan secara online
	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP	100,00	100,00	100,00%		
Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon		3.475.096.533,00	3.286.310.333,00	94,57%		
	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Daerah Kota Cilegon	100,00	100,00	100,00%		
Dukungan Operasional Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Saber Pungli		36.750.000,00	36.750.000,00	100,00%		
	Terlaksananya Dukungan Operasional Unit Pengendalian Gratifikasi dan Satuan Tugas Saber Pungli	100,00	100,00	100,00%		

Program dukungan layanan pemerintahan merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh OPD Inspektorat Daerah Kota Cilegon. Program dukungan layanan pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan kerja yang terdiri dari kumpulan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tata kelola internal Organisasi Perangkat Daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh Pedoman Operasi Standart (SOP).

Indikator keberhasilan dukungan layanan pemerintahan yaitu persentase ketersediaan data informasi sektoral, persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik, tingkat disiplin aparatur serta kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas), rata-rata realisasi kinerja capaiannya diatas 97,83%dari yang ditargetkan di Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah kota Cilegon sebesar 100%.

Berikut penjelasan capaian realisasi kinerja indikator Program Dukunga Pelayanan Pemerintahan :

a. Tingkat disiplin aparatur;

Capaian kinerja pada Tingkat disiplin pada per 31 Desember tahun anggaran 2020 , realisasi capaian kinerjanya adalah 95,00% dari yang ditargetkan sebesar 100 %.

b. Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas);

Capaian kinerja pada Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 100 % dari yang ditargetkan sebesar 85,00 %. Data penunjang capaian kinerja tersebut adalah data yang ada di LRA Inpektorat Kota Cilegon per 31 Desember Tahun Anggaran 2020.

c. Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral.

Capaian kinerja pada Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 100,00% dari yang ditargetkan sebesar 85,00%.

d. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

Capaian kinerja pada Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik pada per 31 Desember tahun anggaran 2020, realisasi capaian kinerjanya adalah 100% dari yang ditargetkan sebesar 85,00 %.

Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah merupakan salah satu program yang terdiri dari beberapa kegiatan dalam meningkatkan perencanaan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sekaligus pengawal dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mengembangkan dan menerapkan tertib administrasi melalui system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam upaya mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan dan hambatan dalam mencapai tujuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terselenggaranya tata kelola pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) . Salah satu indikator keberhasilan Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan adalah meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan – aturan yang berlaku sehingga meningkatnya kualitas kinerja OPD di Kota Cilegon.

Sebagai tolok ukur pencapaian Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah pada Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 di lihat dari beberapa indikator Program yaitu :

1. Tingkat Penurunan Kasus Temuan Administratif dengan realisasi kinerja sejumlah 5 % dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah 5 %,
2. Proporsi SKPD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/ administrasi dengan realisasi kinerja mencapai 30 % dari target sejumlah 30 % dari seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon.
3. Rasio temuan BPK/RI yang ditindaklanjuti dengan realisasi kinerja mencapai 80% dari target 80% yang ditetapkan.
4. Proporsi SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tingkat maturitas level berkembang atau lebih baik dengan realisasi kinerja 100% dari target 90 %.
5. Rata rata nilai akuntabilitas kinerja SKPD nilai CC dengan target 80 % dan capaian kinerja 80 %.

Untuk kegiatan yang mendukung indikator program tersebut telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 meliputi kegiatan dibawah ini :

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengawasan dengan anggaran Rp. 73.850.000,- menargetkan realisasi kinerja 100% dan pada akhir tahun 2020 tercapai 100 % sehingga tercapai kinerja yang baik.
- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas aparatur pengawas internal pemerintah dengan anggaran Rp. 49.500.000,- dengan target kinerja 100% dan pada akhir tahun 2020 tercapai 100 % sehingga tercapai kinerja yang baik.
- c. Kegiatan Bintek Sistem Pengendalian Intern menganggarkan sejumlah Rp. 2.100.000 tapi ini adalah anggaran yang sudah terserap dari total anggaran awal yang pada akhirnya dilakukan refocusing pada kegiatan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan ini hanya pada serapan ATK saja sehingga tidak mengisi target kinerja.
- d. Kegiatan Penyusunan PKPT Inspektorat dengan anggaran sejumlah Rp. 5.907.000,- dan target kinerja 100 % dapat tercapai dengan baik dilihat dari realisasi kinerja mencapai 100 %.
- e. Kegiatan Evaluasi Roadmap birokrasi dengan anggaran Rp. 9.912.500,- yang kinerja ditargetkan 100% dapat dilaksanakan dengan baik dengan realisasi kinerja mencapai 100%.
- f. Kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP yang mempunyai anggaran Rp. 100.000.000,- dengan target kinerja 100% dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan tanpa adanya pengumpulan orang dalam jumlah besar melalui rapat persiapan yang melibatkan seluruh OPD, tetapi kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan realisasi kinerja mencapai 100 %.
- g. Kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan anggaran Rp. 26.000.000,- dapat dilaksanakan dengan baik yang mencapai realisasi kinerja sejumlah 100 % dari target sejumlah 100 %.



- h. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Kota Cilegon dengan anggaran Rp. 3.475.096.535,- pada tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik, target yang ditetapkan sejumlah 100 % pengawasan dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan capaian realisasi 100 %.
- i. Survey Penilaian Integritas yang seharusnya dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cilegon, pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena adanya edaran dari KPK berkaitan dengan kondisi wabah covid ini maka seluruh kegiatan Survey Penilaian Integritas di Indonesia tidak dapat dilaksanakan, sehingga anggaran dialihkan untuk kegiatan yang lain.
- j. Kegiatan Dukungan Operasional Unit Pengendali Gratifikasi dan Satuan Tugas Saber Pungli yang dianggarkan Rp. 36.750.000,- ditargetkan 100 % telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sehingga realisasi kinerja dapat dicapai sejumlah 100%.

3.1.4.3 Perencanaan

A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1.4.3a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		4.997.489.266	4.285.177.633	85,75		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	95	88	92,67		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	95	93	97,54		
	Tingkat disiplin aparatur	85	84	98,25		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	95	89	94,00		
Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan,						
Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi		3.613.178.700	3.235.961.175	89,56		
	Tingkat tata kelola proses/tahapan/mechanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal	100	92	91,67		
	Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat propinsi dan tingkat nasional (pusat)	80	76	95,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPd (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran)	50	46	92,00		
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Cilegon		280.000.000	269.123.250	96,12		
	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon Tahun 2019	1	1	100,00		
	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) AMJ Walikota Cilegon Tahun 2016-2021	1	1	100,00		
Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Daerah		450.000.000	438.877.500	97,53		
	Tersedianya Laporan Triwulanan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPd	4	4	100,00		
	Tersedianya Laporan Triwulanan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari TP, DAK dan Bankeu	4	4	100,00		
	Jumlah peserta bimbingan teknis pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah pada lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan	37	37	100,00		
Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Musrenbangcam/Musrenbangkel)		43.578.700	43.578.700	100,00		
	Jumlah Kecamatan yang dilakukan monitoring musrenbangcam	8	8	100,00		
	Jumlah Kelurahan yang dilakukan monitoring musrenbangkel	43	43	100,00		
	Jumlah Peserta Pembekalan Musrenbangcam/kel	-	-	0,00	Tidak dilaksanakan karena menimbulkan kerumunan masa demi mencegah penyebaran covid 19, dan sesuai dengan perwal	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
Penyusunan Juknis DPW Kel (Tahun n+1)		75.000.000	74.352.500	99,14		
	Dokumen Petunjuk teknis	1	1	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Bimbingan Teknis Pengelolaan data, Perencanaan dan Pengendalian dan Pembangunan Daerah		100.000.000	98.087.500	98,09		
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan data, Perencanaan dan Pengendalian dan Pembangunan Daerah	1	1	100,00		
Penyajian Data Kinerja Pembangunan Daerah		100.000.000	87.326.000	87,33		
	Tersedianya Dokumen Penyajian Data	1	1	100,00		
Pemutakhiran Data Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018		260.000.000	182.831.500	70,32	Kegiatan Pemutakhiran Data Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 Capaian kinerja keuangannya hanya 70,32%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
	Tersedinya Dokumen Sistem Data Pembangunan Daerah (SIPD)	2	2	100,00		
Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah		375.000.000	372.972.600	99,46		
	Tersedianya Dokumen Pengendalian RKPD Tahun n+1	1	1	100,00		
	Tersedianya Dokumen Pengendalian RKPD perubahan tahun n	1	1	100,00		
	Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cilegon	1	1	100,00		
	Jumlah peserta diseminasi tata kelola perencanaan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah	37	37	100,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kota Cilegon		610.000.000	504.478.000	82,70		
	Tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2021 (1)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 (2)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 (3)	1	1	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tersusunnya Dokumen Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2024 (4)	1	1	100,00		
Penyusunan Dokumen Penganggaran Kota Cilegon		375.000.000	334.255.000	89,13		
	Tersusunnya Dokumen KUA Reguler Tahun 2021 (1)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen PPAS Reguler Tahun 2021 (2)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen KUA Perubahan Tahun 2020 (3)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2020 (4)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah Tahun 2021 (5)	1	1	100,00		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah Tahun 2020 (6)	1	1	100,00		
Dukungan Operasional Sistem Perencanaan Pembangunan		75.000.000	46.113.000	61,48	Kegiatan Dukungan Operasional Sistem Perencanaan Pembangunan Capaian kinerja keuangannya hanya 61,48%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
	Terlaksananya dukungan operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan Reguler Tahun 2021 (1)	3	3	100,00		
	Terlaksananya dukungan operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan Perubahan Tahun 2020 (2)	1	1	100,00		
	Terlaksananya Dukungan Operasional Pengusulan dukungan pencapaian kegiatan prioritas nasional (3)	1	1	100,00		
Publikasi dan Sosialisasi Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan		200.000.000	163.169.125	81,58		
	Terpublikasinya Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan	1	1	100,00		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Sosialisasi Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan	1	1	100,00		
Forum Data Pembangunan Daerah		100.000.000	86.775.000	86,78		
	Terlaksanya forum data pembangunan daerah	4	4	100,00		
Operasional Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel)		569.600.000	534.021.500	93,75		
	Pedum DPWKel Award	1	1	100,00		
Operasional Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel)	Terlaksananya Sekber DPWKel	12	12	100,00		
	Pedum Pagu DPWKel N+2	1	1	100,00		
Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya						
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan		1.187.100.000	1.146.196.800	96,55		
	Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan	90	85	94,33		
	Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan	90	83	91,67		
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPd		117.000.000	116.335.000	99,43		
	Terlaksananya Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPd	1	1	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pembangunan Manusia		341.000.000	318.929.400	93,53		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub.Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Capaian Indikator RPJMD Tahun 2016-2021 Sub Bidang Pembangunan Manusia	1	1	100,00		
	Terlaksananya Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Perencanaan OPD	4	4	100,00		
Evaluasi Kinerja Pembangunan (Tahun n-1)		120.000.000	118.215.000	98,51		
	Tersusunya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2019	1	1	100,00		



Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Sosial		239.600.000	226.627.400	94,59		
	Terlaksananya Rakor Perencanaan Kegiatan bersumber dana dari APBD Kota APBD Prov/APBN	6	6	100,00		
	Terlaksananya Fasilitas Program lintas sektoral Sub. Sosial	2	2	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Pemerintahan		263.000.000	261.590.000	99,46		
	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas sub bidang pemerintahan	6	6	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Rapat Pembahasan AMJ Walikota Sub Bidang Pemerintahan	1	1	100,00		
	Terlaksananya Kegiatan Rapat Pembahasan RPJMD Ternokratik Sub Bidang Pemerintahan	1	1	100,00		
Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan		106.500.000	104.500.000	98,12		
	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4	4	100,00		
	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	4	4	100,00		
Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur						
Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan		804.237.500	659.272.000	81,97		
	Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti	90	87	96,67		
	Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi	90	86	95,33		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan					
	Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	90	88,5	98,33		
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD		2.485.000	2.485.000	100,00	Kegiatan terkena rasionalisasi namun sudah mengalami rapat persiapan sebelum ditetapkannya darurat covid 19	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
	Perangkat daerah mitra bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan	-	-	0,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah		45.465.000	25.194.500	55,42	Kegiatan Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah Capaian kinerja keuangannya hanya 55,42%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	Rapat koordinasi perencanaan Anggaran	4	4	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	Rapat Koordinasi kinerja program pembangunan	4	4	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	Rapat Pembahasan RPJMD	4	4	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	Rapat koordinasi pembahasan hasil pembangunan	1	1	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		59.995.000	49.745.000	82,92		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi mitra kerja sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1	1	100,00		
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan		27.790.000	8.610.000	30,98	Kegiatan Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan Capaian kinerja keuangannya hanya 30,98%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan	Terlaksananya rapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas sub bidang LH, SDA dan kebencanaan	10	10	100,00		
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan		69.437.500	66.745.000	96,12		
Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen kinerja dan evaluasi pembangunan	1	1	100,00		
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon		18.000.000	11.400.000	63,33	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon Capaian kinerja keuangannya hanya 63,33%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Impelemtasi Kebijakan Pengembangan SPAM dan Sanitasi Kota Cilegon	1	1	100,00		
Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan		45.230.000	27.825.000	61,52	Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Capaian kinerja keuangannya hanya 61,52%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	menyesuaikan protokol kesehatan
Rapat Koordinasi Teknis Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Verifikasi dokumen perencanaan	4	4	100,00		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		211.822.500	208.605.000	98,48		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tercapai Penyusunan kebijakan strategis sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1	2	200,00		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	tercapai Riview Rencana aksi penataan jalan lingkar utara	1	1	100,00		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan		218.432.500	155.745.000	71,30	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan Capaian kinerja keuangannya hanya 71,30%. Hal ini mengingat pandemi covid-19 yang semakin meluas sehingga terbatas dalam melaksanakan rapat dan penyerapan maminnya.	Kegiatan akan dijalankan kedepannya dengan menyesuaikan protokol kesehatan
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang LH, SDA dan Kebencanaan	Terlaksananya penyusunan kebijakan strategis sub bidang LH, SDA dan kebencanaan (teknokratik RPJMD)	1	1	100,00		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah		105.580.000	102.917.500	97,48		
Penyusunan Kebijakan Strategis Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	dokumen kebijakan strategis mitra koordinasi Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Daerah	1	1	100,00		

Urusan Perencanaan secara umum sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan untuk urusan Perencanaan pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi;
2. Program perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan;
3. Program perencanaan pembangunan perekonomian, sda infrastruktur, dan kewilayahan;
4. Program dukungan pelayanan pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi diselenggarakan dalam rangka Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dengan anggaran sebesar Rp 3.613.178.700 dan terealisasi Rp 3.235.961.175 atau 89,56% capaian serapan anggarannya selama tahun 2020. Indikator capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- A. Tingkat tata kelola proses/tahapan/mechanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi jangka panjang, menengah dan tahunan yang komprehensif, partisipatif, handal. Target 100% Realisasi 92% Capaian 91,67%.
- B. Persentase kesesuaian antara muatan perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi dan tingkat nasional (pusat). Target 80% Realisasi 76% Capaian 95%.
- C. Persentase jumlah usulan musrenbangkel yang diakomodir dalam RKPD (Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang yang tercakup dalam dokumen penganggaran. Target 50% Realisasi 46% Capaian 92%.

Program perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya, dengan anggaran sebesar Rp 1.187.100.000,- dan terealisasi Rp 1.146.196.800,- atau 96,55% capaian serapan anggarannya selama tahun 2020. Indikator capaian kinerja Program perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Sosial Pemerintahan Target 90% Realisasi 85% Capaian 94,33%.
- b. Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang Sosial Pemerintahan Target 90% Realisasi 83% Capaian 91,67%.

Program perencanaan pembangunan perekonomian, sda infrastruktur, dan kewilayahan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur. dengan anggaran sebesar Rp 804.237.500,- dan terealisasi Rp 659.272.000,- atau 81,97% capaian serapan anggarannya selama tahun 2020. Indikator capaian kinerja Program perencanaan pembangunan perekonomian, sda infrastruktur, dan kewilayahan adalah sebagai berikut:

- Persentase substansi dokumen Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti Target 90% Realisasi 87% Capaian 96,67%.
- Tingkat efektifitas koordinasi perencanaan dan evaluasi program pada SKPD di bawah koordinasi Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Target 90% Realisasi 86% Capaian 95,33%.
- Tingkat ketersediaan analisis data sektoral di bawah koordinasi bidang perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan Target 90% Realisasi 88,5% Capaian 98,33%.

Program dukungan pelayanan pemerintahan diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP). dengan anggaran sebesar Rp 4.997.489.266,- dan terealisasi Rp 4.285.177.633,- atau 85,75% capaian serapan anggarannya selama tahun 2020. Indikator capaian kinerja Program dukungan pelayanan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral Target 95% Realisasi 88% Capaian 92,67%.
- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Target 95% Realisasi 93% Capaian 97,54%.
- Tingkat disiplin aparatur Target 85% Realisasi 84% Capaian 98,25%.
- Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas) Target 95% Realisasi 89% Capaian 94%.

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2020 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program.
- Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran.
- Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan Kota Cilegon sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan.
- Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen pengolah data.
- Peraturan Perundang-undangan yang sangat dinamis terkait pemutakhiran dan kebijakan penaggulangan Covid - 19



Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang intensif dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang kegiatan, pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan yang diharapkan. Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

- Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar
- Disarankan pada semua pegawai Bappeda Kota Cilegon agar bekerja secara optimal demi terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya.
- Untuk memaksimalkan kinerja Bappeda Kota Cilegon, diharapkan secara bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan azas manfaat.

3.1.4.4 Keuangan

A. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, UPTD PAJAK WILAYAH I-IV

Tabel 3.1.4.4a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Keuangan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah						
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah		1.374.857.748	1.073.697.000	78,10%		
	Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	100 %	100%	100%		
rekonsiliasi akuntansi penerimaan		73.334.000	41.442.000,00	56,51%	Kurang terealisasi dikarenakan pandemi covid-19, sehingga volume transaksi pada sebagian jenis penerimaan pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode tahun 2020 sehingga mempengaruhi kebutuhan belanja	Mengatur jadwal dengan pembatasan peserta
	Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Penerimaan	11 OPD Penghasil	11 OPD Penghasil	100%		
penyusunan data akuntansi penerimaan		24.886.873	23.329.000	93,74%		
	Tersusunnya Data Akuntansi Penerimaan	4 Triwulan	4 Triwulan	100%		
penyusunan data akuntansi pengeluaran		14.235.000	13.499.000	94,83%		
	Tersusunnya Data Akuntansi Pengeluaran	50 OPD/Sub Unit	50 OPD/Sub Unit	100%		
rekonsiliasi data akuntansi pengeluaran		124.335.000	74.799.000	60,16%	Kurang terealisasi dikarenakan pandemi covid-19, sehingga volume transaksi pada	Mengatur jadwal dengan pembatasan peserta

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					sebagian jenis penerimaan pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode tahun 2020 sehingga mempengaruhi kebutuhan belanja	
	Terlaksananya Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran	50 OPD/Sub Unit	50 OPD/Sub Unit	100%		
evaluasi dan analisa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran		120.415.000	55.589.000	46,16%	sebagian kegiatan Evaluasi dan analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada masa pandemi COVID 19 dilakukan tanpa tatap muka dan/atau menggunakan dokumen dalam format softcopy/hardcopy.	Mengatur jadwal dengan pembatasan peserta
	Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	50 OPD/Sub Unit	50 OPD/Sub Unit	100%		
evaluasi laporan keuangan SKPD		143.900.000	120.360.000	83,64%		
	Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan SKPD/OPD	40 SKPD/OPD	40 SKPD/OPD	100%		
pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota Cilegon		336.485.000	294.234.000	87,44%		
	Terselenggaranya Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon	1 dokumen	1 dokumen	100%		
penyusunan laporan intern realisasi anggaran		213.976.875	161.032.000	75,26%		
	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Intern Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah		183.570.000	158.103.000	86,13%		
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota cilegon		139.720.000	131.310.000	93,98%		
	Penyusunan Raperda dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon	1 Raperda dan 1 Perda	1 Raperda dan 1 Perda	100%		
	Penyusunan Raperwal dan Perwal Pertanggungjawaban APBD Kota Cilegon	1 Raperwal dan 1 Perwal	1 Raperwal dan 1 Perwal	100%		
Program Peningkatan Pajak Daerah		2.797.050.407	2.159.529.780	77,21%		
	Proporsi peningkatan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah	5 %	15,43%	308,53%		
	Realisasi pendapatan pajak	100 %	135,81%	135,81%		
	Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu	80 %	94,34%	118%		
pemberian penghargaan bagi WP daerah yang lunas pajak		334.369.000	211.534.000	63,26%	Kegiatan ceremonial tidak dilaksanakan karena terkait kondisi pandemi covid-19 di Kota Cilegon.	Kegiatan pemberian penghargaan kepada ajib pajak tetap dilaksanakan dengan dihadiri WP yang terbatas dan menggunakan protokol covid-19. Penghargaan tetap diberikan simbolis oleh Walikota kepada 10 WP potensial dan 4 PPAT/PPATS.
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada WP daerah yang lunas pajak	150 Wajib Pajak	150 Wajib Pajak	100%		
bulan panutan pajak bumi dan bangunan		320.750.000	301.502.000	94,00%		
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada WP potensial PBB sebelum Jatuh Tempo Tahun 2019	100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	100%		
sistem pengendalian dan pengawasan pengenaan pajak daerah		491.900.000	380.810.000	77,42%	Kendala pemeliharaan alat tapping yang targetnya 3 bulan akan	Perencanaan penganggaran (tahun anggaran regular) untuk pemeliharaan secara lengkap

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					tetapi pelaksanaannya hanya 2 bulan	
	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengenaan Pajak Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100 %		
pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah		141.750.680	122.124.680	86,15%		
	Terlaksananya pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah	4 kegiatan (16 Wajib Pajak)	4 Kegiatan (18 Wajib Pajak)	100%		
pendataan dan penilaian individual objek PBB		127.190.000	48.517.600	38,15%	Serapan anggaran yang baru terserap untuk penilaian ZNT dengan pelaksanaan sebelum covid 19	Menganggarkan di tahun berikutnya untuk pendataan individual objek PBB
	Terlaksananya Pendataan dan Penilaian Individual Objek PBB	12 Dokumen	-	0%	Karena adanya pandemi covid19, perusahaan-perusahaan banyak yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan terdapat perusahaan yang tidak mengembalikan formulir SPOP (Surat pemberitahuan objek pajak) untuk bumi/ tanah dan LSPOP (lembar surat pemberitahuan objek pajak) untuk bangunan	Mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengisi SPOP dan LSPOP dan menerapkan pengisian SPOP dan LSPOP secara online
pengolahan, pemutakhiran dan pemeliharaan SIMPAD, SIM PBB dan BPHTB	Penilaian ZNT	1 Paket 265.910.000	1 Paket 262.020.000	100% 98,54%		
	Terpeliharanya Pengolahan, Pemutakhiran, dan Pemeliharaan SIMPAD, SIM PBB dan BPHTB	3 Sistem	3 Sistem	100%		
pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah		45.648.000	45.378.000	99,41%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	terlaksananya Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak Daerah	8.100 Objek dan Subjek	10.433 Objek dan Subjek	129%		
sosialisasi pajak daerah		615.550.000	390.845.400	63,50%	Efisiensi anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan pemberitaan	Menyesuaikan kebutuhan media pemberitaan
	Tersosialisasinya pajak daerah melalui mas media elektronik dan cetak	12 media elektronik dan cetak	12 media elektronik dan cetak	100%		
rekonsiliasi BPHTB dan PBB		28.825.000	22.365.800	77,59%	Adanya pandemic covid-19 tidak memungkinkan untuk tatap muka secara langsung dengan PPAT & PPATS serta dengan pihak BJB	Melakukan rekonsiliasi data melalui system management BPHTB online cilegon (SIMBOCIL) dan laporan pembayaran dari BJB
	Terlaksananya Rekonsiliasi BPHTB dan PBB	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		
penagihan langsung pajak daerah		32.300.000	16.800.000	52,01%	Pemberlakuan PSBB karena Situasi pandemic covid-19 menyebabkan WP banyak yang tidak beroperasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar pajak	Memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi baik sanksi berupa kenaikan maupun denda.
	Tertagihnya piutang pajak daerah	10 jenis pajak daerah	6 jenis pajak daerah	60%	Banyak tempat usaha yang tutup operasi, lokasi perusahaan diluar kota cilegon, pembatasan PSBB karena kondisi covid 19 menyebabkan tempat usaha berkurang jam operasionalnya, sehingga banyak WP merasa keberatan untuk membayar piutang pajak	Memberikan insentif penghapusan sanksi administrasi baik sanksi berupa kenaikan maupun denda.
peningkatan berkala sistem manajemen mutu ISO		159.920.000	139.810.000	87,42%		
	Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2015	1 sertifikat	1 sertifikat	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya audit SMM ISO 9001:2015	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%		
cetak massal SPPT PBB		182.937.727	170.037.300	92,95%		
	Terlaksananya cetak massal SPPT PBB P2	160.000 OP	160.000 OP	100%		
Kajian Potensi Pajak Daerah Non PBB (DID)		50.000.000	47.785.000	95,57%		
	Potensi Pajak Daerah	8 Objek Pajak	8 Objek Pajak	100%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I		327.838.052	315.225.000,00	96,15%		
Program Peningkatan Pajak Daerah		327.838.052,00	315.225.000,00	96,15%		
penyampaian SPPT PBB		175.000.000	165.625.000	94,64%		
	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB	34.400 Wajib Pajak	34.400 Wajib Pajak	100%		
penyuluhan pajak daerah		152.838.052	149.600.000	97,88%		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	200 Wajib Pajak	200 Wajib Pajak	100%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II		354.435.239,00	352.090.000,00	99,34%		
Program Peningkatan Pajak Daerah		354.435.239,00	352.090.000,00	99,34%		
penyampaian SPPT PBB		170.050.000	170.050.000	100%		
	Terlaksananya penyampaian SPPT PBB TA. 2020	33.510 Wajib Pajak	33.510 Wajib Pajak	100%		
penyuluhan pajak daerah		184.385.239	182.040.000	98,73%		
	Tercapainya Penyuluhan Pajak Daerah UPT Wilayah II	240 Wajib Pajak	240 Wajib Pajak	100%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III		356.400.000,00	351.905.000,00	98,74%		
Program Peningkatan Pajak Daerah		356.400.000,00	351.905.000,00	98,74%		
penyampaian SPPT PBB		276.400.000	273.805.000	99,06%		
	Terlaksananya penyampaian SPPT PBB Th 2020	28.800 lembar	28.800 lembar	100%		
penyuluhan pajak daerah		80.000.000	78.100.000	97,63%		
	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak pada Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	200 wajib pajak	200 wajib pajak	100%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV		329.444.271	324.062.500	98,37%		
Program Peningkatan Pajak Daerah		329.444.271	324.062.500	98,37%		
penyampaian SPPT PBB		150.500.000	150.500.000	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2020	27.263 lembar	27.263 lembar	100%		
penyuluhan pajak daerah		178.944.271	173.562.500	96,99%		
	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah	250 Wajib Pajak	250 Wajib Pajak	100%		
Program Perbendaharaan Keuangan Daerah		551.181.300	478.514.500	86,82%		
	Persentase proses pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100%	100%		
	Persentase proses pencairan anggaran belanja dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100%	100%		
	Tingkat pelayanan kas daerah	100 %	100%	100%		
	Tingkat ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)	100 %	100%	100%		
aplikasi sim gaji pemerintah kota cilegon		101.625.000	99.430.000	97,84%		
	Terlaksananya SIM Gaji Pemerintah Kota Cilegon	12 Bulan	12 Bulan	100%		
	Terlaksananya Pelaksanaan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14	56 OPD	56 OPD	100%		
penyelesaian SP2D		105.525.000	103.770.000	98,34%		
	Terselenggaranya Penerbitan SP2D untuk masing-masing OPD	56 OPD	56 OPD	100%		
	Tersusunnya Buku Register SP2D	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		
penentuan uang persediaan		42.050.000	40.546.000	96,42%		
	Tersedianya Uang Persediaan pada masing-masing OPD	56 OPD	56 OPD	100 %		
penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah		13.050.000	13.050.000	100,00%		
	Terlaksananya Penyusunan Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah	2 Bulan	2 Bulan	100 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
laporan pajak yang bersumber dari SP2D		35.335.000	29.400.000	83,20%		
	Tersedianya buku Laporan pajak yang bersumber dari SP2D	12 bulan	12 bulan	100 %		
monitoring evaluasi pengendalian dana perimbangan		12.590.000	10.995.000	87,33%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan	4 Triwulan	4 Triwulan	100 %		
pelaksanaan pengumpulan data dana perimbangan		25.000.000	19.250.000	77,00%		
	Terlaksananya Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Dana Perimbangan	4 Triwulan				
Penyusunan SP2D belanja tidak langsung		88.765.000	82.550.000	93,00%		
	Terselenggaranya Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung untuk masing-masing OPD	56 OPD	56 OPD	100%		
	Tersusunnya Buku Register SP2D Belanja Tidak Langsung	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		
Penyusunan Cash Budget dan Surat Penyediaan Dana		117.941.300	72.323.500	61,32%		
	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Cash Budget dan Surat Penyediaan Dana	4 Triwulan	4 Triwulan	%		
Monitoring dan evaluasi implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kota Cilegon		9.300.000	7.200.000	77,42%		
	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Kota Cilegon	4 Triwulan	4 Triwulan	%		
Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan		4.494.142.865	3.722.770.200	82,84%		
	Tingkat Realisasi Belanja APBD	95 %	87,45%	92,05%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Realisasi pendapatan daerah terhadap target APBD	100 %	107,10%	107,10%		
	Laju realisasi pendapatan daerah	5 %	-0,3%	-0,6%		
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan anggaran	100 %	100%	100%		
verifikasi dan penelitian RKA - DPA dan RKAP - DPPA		1.240.475.165	808.359.000	65,17%	Honorarium Pelaksana Kegiatan tidak dapat di realisasikan karena kegiatan Verifikasi DPA tidak bisa dilaksanakan pada akhir tahun terkendala kegiatan menggunakan sistem SIPD sesuai jadwal yang sudah ditentukan kegiatan Honorarium yang tidak terealisasi sebesar Rp. 432.057.497,-	
	Terlaksananya Verifikasi dan Penelitian RKA - DPA Perubahan APBD TA. 2020 dan RKA - DPA 2021 serta Tersedianya DPPA dan DPA yang sah	4 kegiatan	4 kegiatan	100%		
Penyusunan perubahan APBD (Tahun n) dan APBD (Tahun n+1)		608.830.000	556.970.000	91,48%		
	Terlaksananya penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021	2 kegiatan	2 kegiatan	100%		
pembahasan raperda APBD kota cilegon		725.712.000	695.980.000	95,90%		
	Terlaksananya kegiatan Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggara 2020 dan Pembahasan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Raperda APBD Tahun Anggaran 2021					
bintek penganggaran keuangan		163.960.000	131.105.000	79,96%		
	Terlaksananya bintek tentang penganggaran keuangan Daerah & TAPD	375 orang	375 orang	100%		
pembahasan perencanaan anggaran		722.751.500	709.700.000	98,19%		
	Terlaksananya Pembahasan Perencanaan Anggaran	2 kegiatan				
penyusunan pedoman analisis standar belanja		133.055.000	99.659.000	74,90%	Serapan tidak optimal dikarenakan adanya kebijakan pusat terkait aturan mengenai perubahan penyusunan anggaran yang mengacu pada permendagri 90 th 2019 yang mana pola penyusunan ASB tidak lagi kepada nama kegiatan tetapi pada sub kegiatan	Kedepanya akan menyesuaikan kebijakan pusat terkait pola penyusunan ASB
	Terlaksananya Penyusunan Pedoman ASB	1 Dokumen	0 dokumen	0%	pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman ASB terlaksana sampai dengan Draf pedoman ASB	
pedoman penyusunan RKA SKPD/PPKD		59.260.000	14.377.000	24,26%	Adanya kebijakan pusat terkait aturan mengenai perubahan penyusunan anggaran yang mengacu pada permendagri 90 th 2019 yang mana terdapat perubahan kode rekening yang masih harus disesuaikan dan diselaraskan (pemutahiran) berdasarkan	Akan menyesuaikan dengan sistem SIPD

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					KEPMENDAGRI No 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nonmenklatur perencanaan dan pembangunann keuangan daerah.	
	Terlaksananya Penyusunan Pedoman RKA APBD	1 Dokumen	0 dokumen	0%	pelaksanaan kegiatan penyusunan pedoman ASB terlaksana sampai dengan Draf Pedoman RKA APBD	
penyusunan pedoman pelaksanaan DPA APBD kota cilegon		59.260.000	52.852.000	89,19%		
	Terlaksananya Penyusunan Pedoman DPA APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
penyusunan standar biaya dan standar satuan harga (SSH)		277.284.200	254.469.200	91,77%		
	Terlaksananya Penyusunan Standar Biaya dan SSH	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		
monitoring dan evaluasi pendapatan daerah		283.045.000	220.735.000	77,99%		
	Terlaksananya Monitoring Penerimaan sektor pendapatan asli daerah pada OPD Penghasil	20 Objek	20 Objek	100%		
	Terlaksananya Evaluasi Penerimaan PAD per periodik	4 Rapat	-	0%	Tidak cukupnya waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan focus ke persiapan system web retribusi untuk ta. 2021	Akan menyesuaikan anggaran di tahun kedepan
	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pembayaran Online E-Retribusi Daerah	1 sistem	1 sistem	100%		
verifikasi dan proyeksi pendapatan daerah		80.700.000	73.900.000	91,57%		
	Terlaksananya Rapat Penyusunan Proyeksi Pendapatan pada APBD	2 Rapat	2 rapat	100%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Perubahan dan APBD Reguler					
Perporasi benda berharga retribusi daerah		25.760.000	25.634.000	99,51%		
	Terlaksananya Pengawasan Peredaran atas Benda Berharga yang dikelola OPD Penghasil Pendapatan	4 Rapat Triwulan	4 Rapat Triwulan	100%		
Konseling teknis pemungutan pendapatan asli daerah		61.300.000	26.370.000	43,02%		
	Terlaksananya Bimbingan/Pendampingan dan Pemecahan Permasalahan atas Pemungutan PAD	2 Rapat	2 Rapat	100%		
	Terlaksananya Penyusunan Daftar Resiko Pemungutan dan Rencana Aksi Pemungutan	2 Rapat	-	0%	Tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan Penyusunan daftar resiko pemungutan pajak & retribusi daerah mengingat adanya aturan/surat edaran walikota terkait tidak diperbolehkannya adanya kerumunan yang menimbulkan meningkatnya covid 19 di kota cilegon	Akan menyesuaikan Anggaran di DPA sesuai dengan Standar Anggaran Biaya yang berlaku
Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan asli daerah		52.750.000	52.660.000	99,83%		
	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi terkait Teknis Pendapatan Asli Daerah	4 Rapat	4 Rapat	100%		
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah		4.877.969.000	3.801.257.980	77,93%		
	Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dengan baik	100 %	100	100%		
	Tingkat pengelolaan barang aset daerah	100 %	100%	100		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
penyedia jasa jaminan barang milik daerah		1.431.450.000	1.129.425.550	78,90%	Anggaran asuransi roda 4 tahap II tidak dapat dilaksanakan karena batas polis asuransi di akhir tahun sehingga proses lelang tidak di mungkin	Melaksanakan asuransi kendaraan pada awal tahun
	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan asuransi kendaraan dinas dan bangunan gedung pemerintah Kota Cilegon	3 Jenis Asuransi	3 Jenis Asuransi	100%		
penyusunan standar barang dan standar kebutuhan		50.000.000	48.770.000	97,54%		
	Terlaksananya penyusunan perencanaan barang milik daerah	150 Orang	150 Orang	100 %		
penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah		245.900.000	231.464.000	94,13%		
	Terlaksananya penyusunan perencanaan barang milik daerah	150 orang	150 orang	100 %		
pengamanan aset tetap kota cilegon		772.480.000	555.799.380	71,95%	Efisiensi anggaran dan PNPB permohonan hak yang belum terbayar karena peta bidang belum keluar	Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Cilegon
	Terlaksananya pengamanan aset daerah secara administrasi kepemilikan hukum dan fisik aset tetap Kota Cilegon	30 Sertifikat	8 sertifikat	27 %	8 sertifikat yang terbit pada tahun 2020, selebihnya terbit pada Januari 2021 hal ini dikarenakan adanya PSBB pandemic covid 19 di Kantor Pertanahan Kota Cilegon	Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Cilegon
pemanfaatan barang milik daerah		200.000.000	142.074.650	71,04%	- Honor Panitia Pelaksana Kegiatan : Honor ini tidak terserap karena kegiatannya berkaitan dengan pengumpulan	- Pelaksanaan melalui mekanisme zoom meeting dan penerapan standar protocol kesehatan.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					orang dalam sosialisasi pemanfaatan yang berjumlah banyak tidak boleh karena adanya peraturan Covid-19. - Honor Jasa Tenaga Ahli : Sisa Anggaran dikarenakan Satuan Nilai Honor yang diperuntukan Jasa Tenaga Ahli menyesuaikan dengan Satuan Standar Biaya yang ada dan kegiatannya tertunda terkait Pandemi Covid-19.	- Penyesuaian kembali satuan nilainya sesuai dengan Standar Biaya.
	terfasilitasi usulan pemanfaatan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %		
pemindahtanganan barang milik daerah		100.000.000	54.943.950	54,94%	- Honor PPHP tidak dapat diserap karena tidak ada dalam regulasi standar biaya tahun 2020. - Belanja Jasa Angkut, Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas Darat dll tidak dapat terserap karena kegiatannya terkendala dengan Pandemi Covid-19	- Daftar perencanaan anggaran (DPA) disesuaikan dalam Standar Biaya. - Memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan BMD dan penerapan standar protocol kesehatan.
	terfasilitasi usulan pemindahtanganan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
penghapusan barang - barang inventaris dan barang lainnya		350.000.000	247.831.200	70,81%	- Belanja Jasa Angkut, Penggandaan, Sewa Sarana Mobilitas Darat dll tidak dapat terserap karena kegiatannya terkendala dengan Pandemi Covid-19	- Memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengangkutan BMD dan penerapan standar protocol kesehatan.
	terfasilitasinya usulan penghapusan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %		
pembinaan dan monitoring penatausahaan aset		126.739.000	27.285.000	21,53%	Adanya pandemi COVID 19 tidak diperkenankan untuk mengadakan even bimtek secara langsung maka dilakukan efisiensi anggaran	Bimtek melalui daring
	Terlaksananya Bimtek Labelisasi BMD	0 Orang		%	Adanya pandemi COVID 19 tidak diperkenankan untuk mengadakan even bimtek secara langsung maka dilakukan efisiensi anggaran	Bimtek melalui daring
	Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Persediaan	0 Orang		%	Adanya pandemi COVID 19 tidak diperkenankan untuk mengadakan even bimtek secara langsung maka dilakukan efisiensi anggaran	Bimtek melalui daring
	Terlaksananya Monitoring Penatausahaan BMD	125 OPD/UPB	125 OPD/UPB	100%	Adanya pandemi COVID 19 mengurangi intensitas waktu untuk diskusi dan mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan aset	Monitoring melalui daring

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
inventarisasi dan pelaporan aset/ BMD kota cilegon		1.400.000.000	1.230.360.500	87,88%		
	Tersedianya data aset daerah yang akuntabel	6 KIB	6 KIB	100%		
	Meningkatnya kinerja pengurus barang barang se-Kota Cilegon	275 OPD/UPB	275 OPD/UPB	100%		
Validasi data tanah pemerintah kota cilegon		201.400.000	133.303.750	66,19%	Efisiensi anggaran anggaran pembiayaan PNPB pengukuran	Anggaran efesiensi untuk meningkatkan target tahun yang akan datang
	Terlaksananya validasi tanah milik Pemerintah Kota Cilegon	30 peta bidang	71 peta bidang	237%		
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan (BPKAD)		14.997.777.515	11.786.830.329	78,59%		
	Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral	100%	100%	100%		
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	80%	71,47%	89,33%		
	Tingkat disiplin aparatur	90%	99,07	110,07		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)	85%	71,77%	84,44		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		261.733.165	170.561.378	65,17%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		170.084.083	156.765.720	92,17		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		315.855.680	293.596.859	92,95%		
UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		235.905.510	197.220.960	83,60%		

Dari tabel di atas dapat disampaikan penjelasan indikator program yang sebagai target pembangunan / Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset (BPKAD) Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah dimaksudkan membuat pelaporan keuangan berdasarkan tatakelola pelaporan keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah sebagai informasi yang diperlukan bagi pihak dalam dan luar entitas dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomisnya.

Suatu keberhasilan program dapat dinyatakan tercapai pelaksanaan program dengan adanya indikator pembangunan, indikator pembangunan Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

Tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi capaian indikator ini sebesar 100% yang mana tujuh penyediaan laporan akutansi yang dilaporkan dari tujuh laporan yang ditetapkan.

Jenis Laporan Keuangan Yang Wajib
Di Laporan sebagai Penilaian

No	Jenis Laporan Akuntansi
1	Laporan Realisasi Anggaran
2	Laporan Neraca,
3	Laporan Perubahan Ekuitas
4	Laporan Operasional

No	Jenis Laporan Akuntansi
5	Laporan Arus Kas,
6	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
7	Catatan Atas Laporan Keuangan

Dari ketujuh laporan akuntansi tersebut sebagai penilaian Pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengukuran Capaian opini tersebut merupakan hasil terbaik yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon. Tentunya tingkat keoptimalan penyediaan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon sudah memadai.

Capaian serapan anggaran program sebesar 78,10 % yang dikarenakan adanya di masa pandemi Covid 19 (pengurangan pertemuan/rapat) pada pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran, namun tetap dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan, Permasalahan secara umum masih terjadi adalah belum terintegrasinya sistem pembayaran dengan system keuangan daerah dan Masih adanya OPD yang terlambat dalam melaporkan keuangan bulanan. Solusinya Mengintegrasikan system pembayaran dengan system keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi dengan bidang perbendaharaan.

2. Program Peningkatan Pajak Daerah

Program peningkatan pajak daerah dimaksudkan untuk mengelola pendapatan daerah, yang mana sebagai pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber pajak. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD. Sebagai kinerja capaian program ini adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Proporsi realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 308,53%. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pada tahun 2020 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Dari 10 jenis pajak yang dikelola oleh Kota Cilegon, terdapat 7 (tujuh) jenis pajak yang mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019, diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Kinerjal Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Akan tetapi terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang mengalami kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu Pajak Pajak Penernagan Jalan, BPHTB dan PBB. Penurunan realisasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp.23.627.691.210,- atau menurun sebesar 4,83%. Akan tetapi peningkatan realisasi juga terjadi pada tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi 2019 yaitu sebesar Rp.99.004.449.479,- atau meningkat sebesar 20,26%. Jika secara keseluruhan target pajak daerah pada tahun 2020 yang telah ditetapkan, seluruh jenis pajak daerah yang dikelola telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Penurunan realisasi didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, hal ini merupakan dampak dari adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* sehingga mempengaruhi pendapatan dari beberapa sektor dimaksud.

$$\frac{\text{Realisasi pajak daerah tahun (n) - tahun n-1} \times 100\%}{\text{Tahun n-1}}$$

$$\frac{564.110.450.808 - 488.718.178.869 \times 100\%}{488.718.178.869} = \mathbf{15,43\%}$$

Capaian kinerja :

$$\frac{\text{Realisasi capaian} \times 100\%}{\text{Target kinerja}}$$

$$\frac{15,43\% \times 100\%}{5\%} = \mathbf{308,53\%}$$

2. Realisasi pendapatan pajak daerah
Berikut ini realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah pada tahun 2020

NO	JENIS PAJAK	2020		PROSENTASE
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	HOTEL	4.500.000.000	6.610.328.358	146,90
2	RESTORAN	20.000.000.000	21.725.555.744	108,63
3	HIBURAN	1.800.000.000	1.951.493.825	108,42
4	REKLAME	1.400.000.000	1.710.746.253	122,20
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	160.000.000.000	211.311.964.438	132,07
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	4.500.000.000	4.958.311.800	110,18
7	PAJAK PARKIR	1.500.000.000	1.508.824.767	100,59
8	PAJAK AIR TANAH	1.300.000.000	1.507.580.869	115,97
9	BPHTB	140.361.651.000	217.009.512.295	154,61
10	PBB	80.000.000.000	95.816132.459	119,77
TOTAL		415.361.651.000	564.110.450.808	135,81

Realisasi pendapatan dari sektor pajak daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar 135,81 % dari target yang diberikan yaitu sebesar 100%. Realisasi tersebut didapatkan dari realisasi pajak daerah tahun 2020 sebesar Rp.564.110.450.808,- dibagi target pajak daerah yaitu sebesar Rp.415.361.651.000,-

3. Proporsi wajib pajak yang membayar pajak

Proporsi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 118%. Data tersebut didapatkan dari jumlah wajib pajak yang membayar pajak daerah (SSPD yang terbit) yaitu sebesar 109.976 SSPD dibagi dengan jumlah wajib pajak dan objek pajak sebesar 115.348 WP/OP.

Pada tahun 2020 dari target sebesar Rp.415.361.651.000,- terealisasi sebesar Rp.564.110.450.808,-. Berikut ini rincian pendapatan dari sektor Pajak Daerah :

NO	JENIS PAJAK	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	PROSENTASE	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100$	6	7	$8=7/6 \times 100$
1	HOTEL	10,425,000,000	11,251,118,434	107.92	4.500.000.000	6.610.328.358	146,90
2	RESTORAN	24,876,000,000	32,119,241,400	129.12	20.000.000.000	21.725.555.744	108,63
3	HIBURAN	5,423,000,000	6,395,835,058	117.94	1.800.000.000	1.951.493.825	108,42
4	REKLAME	1,260,000,000	1,891,936,109	150.15	1.400.000.000	1.710.746.253	122,20
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	209,000,000,000	209,190,428,545	100.09	160.000.000.000	211.311.964.438	132,07
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN	9,300,000,000	8,144,706,900	87.58	4.500.000.000	4.958.311.800	110,18
7	PAJAK PARKIR	1,700,000,000	2,222,628,156	130.74	1.500.000.000	1.508.824.767	100,59
8	PAJAK A IR TANAH	1,500,000,000	1,575,066,769	105.00	1.300.000.000	1.507.580.869	115,97
9	BPHTB	188,869,611,122	129,473,718,426	68.55	140.361.651.000	217.009.512.295	154,61
10	PBB	88,072,000,000	86,453,499,072	98.16	80.000.000.000	95.816132.459	119,77
TOTAL		540,425,611,122	488,718,178,869	90.43	415.361.651.000	564.110.450.808	135,81

Dari data tersebut di atas bahwa seluruh jenis pajak daerah yang dikelola telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa jenis pajak daerah tersebut dipengaruhi oleh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan, berikut ini beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah :

❖ Pelaksanaan Intensifikasi

Pelaksanaan intensifikasi pajak daerah dilakukan terhadap objek pajak yang sudah menjadi wajib pajak daerah.

1. Pajak Hotel

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hotel dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hotel.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hotel.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hotel yang menunggak.

- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hotel.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
2. Pajak Restoran
Pelaksanaan intensifikasi dari pajak restoran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak restoran.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak restoran.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak restoran yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak restoran.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 3. Pajak Hiburan
Pelaksanaan intensifikasi dari pajak hiburan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak hiburan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak hiburan.
 - Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak hiburan yang menunggak.
 - Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak hiburan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 4. Pajak Reklame
Melakukan penagihan pada media-media reklame yang telah masuk jatuh tempo.
 5. Pajak Penerangan Jalan
Pelaksanaan intensifikasi dari pajak penerangan jalan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :
 - Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak penerangan jalan.
 - Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak penerangan jalan.
 - Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunggak.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

7. Pajak Parkir

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak parkir dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak parkir.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak parkir.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak parkir yang menunggak.
- Melakukan pemeriksaan pajak daerah pada beberapa wajib pajak parkir.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

8. Pajak Air Tanah

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak air tanah dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak air tanah.
- Melakukan pengendalian terhadap wajib pajak air tanah.
- Melakukan penagihan langsung pada wajib pajak air tanah yang menunggak.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak daerah tepat pada waktunya.

9. BPHTB

BPKAD Kota Cilegon memberikan informasi pada perusahaan-perusahaan yang akan mengalami peralihan kepemilikan hak.

10. PBB

Pelaksanaan intensifikasi dari pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu :

- Melakukan penagihan aktif pada para wajib pajak yang menunggak
- Melakukan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak.

- Memberikan penghargaan pada wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo melalui kegiatan bulan panutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Melakukan pelayanan PBB keliling di tingkat Kelurahan.
- Melakukan penyesuaian NJOP

❖ Pelaksanaan Ekstensifikasi

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan terhadap objek pajak yang belum menjadi wajib pajak.

1. Pajak Hotel

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak hotel yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak hotel dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

2. Pajak Restoran

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak restoran yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak restoran dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

3. Pajak Hiburan

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak hiburan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak hiburan dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

4. Pajak Reklame

Melakukan pendataan reklame indoor terhadap objek-objek media reklame yang berada di Kota Cilegon.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak penerangan jalan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak penerangan jalan dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak mineral bukan logam dan batuan dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

7. Pajak Parkir

Pelaksanaan ekstensifikasi dari pajak parkir yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak parkir dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

8. Pajak Air Tanah

Pelaksanaan ekstensifikasi dari Pajak Air Tanah yaitu dengan melakukan pendataan pada objek-objek pajak air tanah dan melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

9. BPHTB

Mencari informasi pada pihak lain terkait potensi peralihan hak yang terjadi di Kota Cilegon.

10. PBB

Updating data PBB-P2 sehingga apabila terjadi mutasi sebagian atas suatu bidang tanah, maka akan menambah jumlah wajib pajak PBB-P2.

Capaian serapan anggaran sebesar 77,21 % dikarenakan pelaksanaan kegiatan masa pandemic covid 19 yang secara seremonial dan tatap muka namun dilakukan secara terbatas dengan mengundang perwakilan wajib pajak potensial dan sebagian pelaksanaan pemberian penghargaan di lakukan secara pengantaran ke penerima wajib pajak. Pada penilaian individual tidak dapat dilaksanakan dikarenakan aturan pada wajib pajak potensial (perusahaan) yang menerapkan protokol kesehatan dan PSBB dengan melampirkan bukti bebas Covid 19 dari Rapid Test. Pelaksanaan sosialisasi

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun yang sulit bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dampak dari adanya *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* yang melanda seluruh dunia. Begitupun di Kota Cilegon mengalami dampak dari adanya Covid-19, hal ini mempengaruhi perekonomian di Kota Cilegon. Sektor perdagangan dan jasa mengalami dampak dari adanya virus tersebut. Tidak sedikit wajib pajak pada sektor tersebut mengalami penurunan omset bahkan sampai tutup usahanya. Jika melihat trend penerimaan dari jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, jenis-jenis pajak tersebut mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan target yang dibebankan telah tercapai bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terbantu dengan meningkatnya pendapatan dari sektor Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB.

2. Belum adanya integrasi system yang menghubungkan antara pendapatan dengan keuangan daerah
3. Belum adanya aplikasi pendaftaran online berbasis android untuk WP daerah yang terintegrasi dengan system pajak daerah
4. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung untuk aplikasi pendaftaran online berbasis android untuk WP daerah yang terintegrasi dengan system pajak daerah
5. Belum memadai server untuk aplikasi di bidang perpajakan daerah
6. Belum memadainya kendaraan operasional di bidang pajak untuk penagihan, pemeriksaan pajak daerah
7. Belum maksimalnya jaringan kemitraan pembayaran pendapatan daerah

SOLUSI

Solusi yang telah dilaksanakan :

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Kami melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. - Memberikan relaksasi pajak berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik berupa kenaikan maupun bunga bagi wajib pajak yang mengajukan.
 - Memberikan relaksasi pajak berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk yang Buku I.
 - Memberikan stimulus berupa Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Cilegon Tahun 2020.
 2. Melakukan pemutakhiran system pajak yang terintegrasi antara pendapatan dengan keuangan daerah
 3. Penyediaan aplikasi pendaftaran online berbasis android untuk WP daerah yang terintegrasi dengan system pajak daerah
 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk aplikasi pendaftaran online berbasis android untuk WP daerah yang terintegrasi dengan system pajak daerah
 5. Penambahan server untuk aplikasi di bidang perpajakan daerah
 6. Penambahan kendaraan operasional di bidang pajak untuk penagihan, pemeriksaan pajak daerah
 7. Penambahan jaringan kemitraan dengan platform ecommers pembayaran pendapatan daerah secara online
3. Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

Program Perbendaharaan Keuangan Daerah merupakan program tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan

dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD. Capaian kinerja pada program ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase proses pelayanan pembiayaan dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan

Jumlah SPM dan SP2D

Bulan	SPM	SP2D
(1)	(2)	(3)
Januari	497	497
Februari	2.014	2.014
Maret	2.409	2.409
April	1.945	1.945
Mei	993	993
Juni	1.214	1.214
Juli	2.214	2.214
Agustus	1.648	1.648
September	1.986	1.986
Oktober	1.737	1.737
November	3.085	3.085
Desember	1.499	1.499
Jumlah	21.241	21.241

Capaian realisasi:

$$\frac{\text{Penerbitan SPM}}{\text{Penerbitan SP2D}} \times 100 = \frac{21.241}{21.241} \times 100 = 100$$

2. Persentase proses pencairan anggaran belanja dengan durasi sesuai dengan peraturan perundangan

Jumlah SP2D yang diposting

Bulan	SP2D	POSTING
(1)	(2)	(3)
Januari	497	497
Februari	2.014	2.014
Maret	2.409	2.409
April	1.945	1.945
Mei	993	993
Juni	1.214	1.214
Juli	2.214	2.214
Agustus	1.648	1.648
September	1.986	1.986
Oktober	1.737	1.737
November	3.085	3.085
Desember	1.499	1.499
Jumlah	21.241	21.241

Capaian realisasi:

$$\frac{\text{Penerbitan SP2D}}{\text{Posting}} \times 100 = \frac{21.241}{21.241} \times 100 = 100$$



3. Tingkat Pelayanan Kas Daerah

Jumlah SP2d dan STS yang diposting

Bulan	SP2D	STS
(1)	(2)	(3)
Januari	497	629
Februari	2.014	675
Maret	2.409	695
April	1.945	650
Mei	993	484
Juni	1.214	763
Juli	2.214	744
Agustus	1.648	686
September	1.986	681
Oktober	1.737	616
November	3.085	760
Desember	1.499	823
Jumlah	21.241	8.206

Capaian Realisasi:

SP2D yang Diterima + STS yang Diterima

SP2D yang Diposting + STS yang Diterima X 100 =

21.241+8206 X 100 = 29.447 X 100 = 100

21.241+8206 29.447

4. Tingkat Ketersediaan dokumen penyusunan cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD)

Dokumen yang tersedia adalah sebanyak 7 dokumen terdiri dari Anggaran cash rutin, Anggaran cash perubahan, serta Surat Penyediaan Dana Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, Triwulan IV dan SPD Perubahan.

3.1.4.5 Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan

1. Tingkat Realisasi Belanja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target persentase untuk realisasi Belanja sebesar 95,%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi target kinerja yang ditetapkan tidak dapat tercapai karena realisasi belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran unaudited sebesar 87,45%. Berarti capaiannya sebesar 92,05%.Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan capaian realisasi target adalah:

Data Realisasi belanja diatas masih bersifat unaudited. Realisasi Belanja Daerah tahun 2020 terdiri dari serapan Belanja Langsung dengan realisasi 88,87% atau sebesar Rp. 773.003.563.617,00 dari anggaran Rp. 869.827.918.809,00 dan Belanja Tidak Langsung dengan serapan mencapai 86,10% dengan realisasi Rp.784.536.496.094,00 dari anggaran Rp.911.184.639.782,00

Cara Perhitungan realisasi:

Realisasi Belanja X100 = Persentase Realisasi Belanja

Target Belanja

$\frac{1.557.540.059.711,00}{1.781.012.558.591,00} \times 100 = 87,45$

Berdasarkan data realisasi belanja tahun 2020 diatas maka dapat dilakukan pengukuran persentase capaian kinerja realisasi belanja sbb:

Cara Perhitungan Capaian Kinerja:

Persentase realisasi belanja X100

= Persentase Capaian Realisasi Belanja/Persentase Target belanja

$$(87,45\% / 95\%) \times 100 = 92,05\%$$

Untuk mengetahui anggaran belanja yang belum baik realisasinya, maka perlu diuraikan mengenai komponen belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun 2019.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2019 (unaudited), didapatkan target dan realisasi anggaran belanja per komponen belanja sebagai berikut:

Tabel 3.1.4.10
Data Belanja Per Komponen Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	911,184,639,782.00	784.536.496.094,00	87,45
	- Belanja Pegawai	728,890,800,204.00	654,501,082,358.00	89.79
	- Belanja Hibah	98,598,993,668.00	86,465,528,308.00	87.69
	- Belanja bantuan social	5,519,446,000.00		73,77
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol	1,103,397,376.00	4,071,757,500.00 1,103,397,376.00	100,00
	- Belanja tak terduga	77,072,002,534.00	38,394,730,552.00	49,82

NO	KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA LANGSUNG	869,827,918,809.00	773,003,563,617.00	88,87
	Belanja Pegawai	152,289,630,066.00	144,935,109,100.00	95,17
	- Belanja Barang dan Jasa	484,748,914,161.00	426,771,874,114.00	88,044
	- Belanja Modal	232,789,374,582.00	201,296,580,403.00	86,47
3	JUMLAH BELANJA	1,781,012,558,591.	1,557,540,059,711.	87,45

Sumber: LRA Kota Cilegon Tahun 2020 BPKAD unaudited

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat pada struktur belanja Pemerintah Kota Cilegon, Keseluruhan komponen belanja baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja langsung terserap diatas 80 % kecuali pada belanja Bantuan social yang terserap hanya 43,17 % ,dan Belanja Tidak Terduga sebesar 49,82%

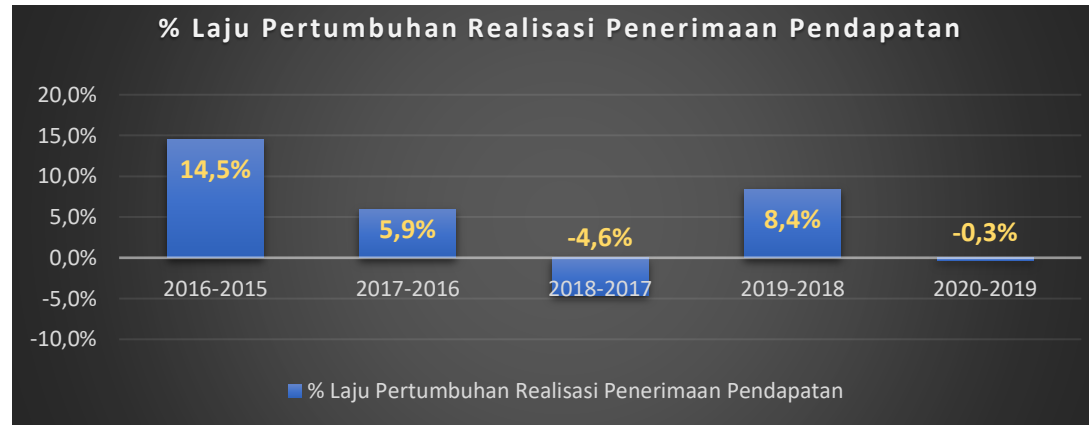
2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah (Tahun 2016 – 2020)

Berdasarkan undang-undang Pendapatan Daerah bersumber dari Komponen :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- Dana Perimbangan, dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Laju Pertumbuhan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 terhadap pendapatan daerah tahun 2019, pendapatan daerah tahun 2020 Rp.1.761.187.240.860 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.766.963.880.139 dengan capaian -0,3% dengan capaian kinerja -0,6% dari target sebesar 5%., tidak tercapainya target tersebut dikarenakan beberapa komponen penerimaan Pendapatan Daerah baik yang dikelola Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah mengalami penurunan omset penerimaan yang diakibatkan adanya pandemi covid 19. Akan tetapi dari segi pencapaian penerimaan tahun anggaran 2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan.



Tabel. 1.1 Tabel % Laju Pertumbuhan Realisasi Tahunan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian Indikator Laju Realisasi = $\frac{\text{Realisasi Laju Realisasi (2020-2019)}}{\text{target indikator Laju Realisasi}}$

Capaian Indikator Bidang (laju Realisasi) = $\frac{-0,3\%}{5\%} = -6\%$

3. Realisasi Pendapatan Daerah 2020

Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.644.437.995.416,- dengan realisasi sebelum audit oleh BPK-RI sebesar Rp. 1.761.187.240.860,- atau mencapai 107,10%, dengan over target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 116.749.245.444,-. Dalam target indikator bidang anggaran menetapkan tercapai 100% namun capaian realisasi 2020 telah mencapai 107,10%.

capaian indikator sebesar **107,1%** didapat dari : $\frac{\text{Persentase Capaian realisasi tahun anggaran 2020}}{\text{target indikator persen capaian realisasi tahun anggaran 2020}}$

Capain indikator = $\frac{107,10\%}{100\%} = 107,1\%$

Hal tersebut dipengaruhi dari pencapaian penerimaan sektor Pendapatan Asli Daerah dengan capaian sebesar 124,75% terlampaui sebesar Rp. 142.322.969.929,-, sektor Dana Perimbangan dengan capaian mencapai 98,41% tidak terlampaui sebesar (Rp. 13.584.500.423,-), dan Sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan capaian mencapai 94,42% tidak terlampaui sebesar (Rp. 11.989.224.062,-).

4. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Anggaran

Terdapat 13 dokumen perencanaan anggaran:

1. SK TPP
2. SK Hibah Bansos
3. SK Bansos
4. SK Tim ASB
5. SK Tim SSH
6. SK Tim SB
7. SK Tim Domlak RKA
8. SK Tim Domlak DPA
9. Perwal ASB
10. Perwal SB
11. Perwal Domlak RKA
12. Perwal Domlak DPA
13. SK SSH

Permasalahan :

- 1) Pada Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun yang sulit bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dampak dari adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid19) yang melanda seluruh dunia. Begitupun di Kota Cilegon mengalami dampak dari adanya Covid-19, hal ini mempengaruhi perekonomian di Kota Cilegon. Sektor perdagangan dan jasa mengalami dampak dari adanya virus tersebut. Tidak sedikit wajib pajak pada sektor tersebut mengalami penurunan omset bahkan sampai tutup usahanya. Jika melihat trend penerimaan dari jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, jenis-jenis pajak tersebut mengalami penurunan realisasi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan target yang dibebankan telah tercapai bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terbantu dengan meningkatnya pendapatan dari sektor Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB.

- 2) Penurunan beberapa omset penerimaan Retribusi Daerah yang diakibatkan dengan adanya Pandemi Covid 19, dan perlu adanya penyesuaian tarif pemungutan retribusi daerah. namun dari capaian penerimaan retribusi telah mencapai target mengingat adanya optimalisasi pelaksanaan intensifikasi dari beberapa sektor, terjadinya penerimaan potensial dari sektor retribusi yang cukup tinggi sebagai pendukung penerimaan retribusi.
- 3) Penurunan jumlah kunjungan pasien pada RSUD Kota Cilegon baik pada instalasi rawat jalan maupun rawat inap yang diakibatkan oleh Pandemi Covid 19, Terjadinya musibah banjir yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan Radiologi (CT scan dan alat rontgen thorak), dan Adanya regulasi rujukan berjenjang untuk pasien BPJS.
- 4) Terdapat salah satu BUMD Kota Cilegon masih dalam status pengawasan intensif keuangan yakni PT. BPRS CM.
- 5) Adanya perubahan PMK yang semula PMK No 36/07/2020 menjadi PMK No. 113/07/2020 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar DBH tahun 2020.
- 6) Adanya perubahan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten terkait Perubahan alokasi Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Daerah. Yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19.
- 7) Adanya regulasi pemerintah pusat terkait perencanaan penganggaran yang tidak selaras dengan kebijakan regulasi daerah yang sudah/ belum ditetapkan.
Jawab : menyesuaikan arah kebijakan pemerintah pusat.

Solusi / upaya :

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah telah berupaya untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan registrasi dan administrasi berbasis IT;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai. Termasuk penyesuaian tarif pemungutan sektro Retribusi Daerah.
- d. Perlu advokasi dari tim kesehatan Kota Cilegon bersama BPJS untuk memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan rujukan berjenjang.
- e. Memperbaiki kinerja pengelolaan piutang pasien covid 19 agar tidak tersendat dalam penagihan klaimnya, dan mengupayakan berfungsinya kembali alat CT Scan dan alat rontgen thorak.

- f. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah dan penyehatan keuangan BUMD khususnya PT. BPRS CM.
 - g. Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Perubahan Alokasi Dana Transfer Pusat dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2020.
5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

1. Proporsi OPD yang Menerapkan Tata Kelola Aset Secara Baku dengan Baik .

Target Kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola aset secara baku dan sesuai aturan/regulasi sebanyak 40 OPD dibagi jumlah seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon sebanyak 40 OPD dikali 100 sama dengan 100%

2. Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Target Kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi pada tahun 2020 sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah aset dan barang milik daerah yang tercatat sebanyak 999.506 unit dibagi jumlah aset dan barang milik daerah (yang tercatat dan belum tercatat) sebanyak 999.506 unit atau 100%.

Jumlah Aset yang Tercatat dan Belum Tercatat Tahun 2020

No	Golongan Jenis Barang	Satuan	Jumlah Aset Daerah	Tercatat	Belum Tercatat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	bidang	1.102	1.102	0
2	Peralatan dan Mesin	unit	294.596	294.596	0
3	Gedung dan Bangunan	unit	2.070	2.070	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	unit	5.190	5.190	0
5	Aset Tetap Lainnya	buah	696.346	696.346	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	unit	202	202	0
	Jumlah		999.506	999.506	0

Sumber : BPKAD UNAUDITED

Perbandingan Jumlah Aset Tahun 2019 dan 2020

No	Golongan Jenis Barang	Satuan	Jumlah	
			2019	2020
1	Tanah	bidang	1.103	1.102
2	Peralatan dan Mesin	unit	280.457	294.688
3	Gedung	unit	2.036	2.070
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	unit	5.178	5.190
5	Aset Tetap lainnya	buah	688.845	696.346
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	unit	175	202
Jumlah			796.204	999.598

Sumber : BPKAD UNAUDITED

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Belum terintegrasinya system pengelolaan barang milik daerah dengan system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah.
2. Belum optimalnya kesadaran OPD terkait pengelolaan aset di antaranya:
 - Laporan bulanan dan semesteran yang belum optimal terkait kondisi aset;
 - Regulasi tentang pengelolaan aset daerah yang dinamis;
 - Sering bergantinya pengurus barang pengguna di OPD.

Solusi

1. Koordinasi dengan pihak Kemendagri;
2. Sosialisasi/pembinaan dan monitoring.

3.1.4.5 Kepegawaian

A. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UPTD DATA DAN INFORMASI PEGAWAI

Tabel 3.1.4.5a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		1,934,734,300.00	1,832,132,466.00	94.70%	Target program bisa dilaksanakan dengan baik, dilihat dari realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditentukan dan anggaran yang terserap bisa optimal dan efektif.	
	Prosentase ketersediaan data dan informasi	100.00	100.00	100.00%		
	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90.00	89.94	99.93%		
	Tingkat disiplin aparatur	95.00	99.39	104.62%		
	Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget	75.00	76.17	101.56%		

Meningkatnya daya Dukung pelaksanaan kegiatan BKPP Dengan capaian realisasi 91.37% dari target RPJMD 95%, capaian ini terukur melalui 4 indikator pendukung, yaitu:

1. **Prosentase ketersediaan data dan informasi**, Dengan realisasi capaian sebesar 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur dari jumlah data dan informasi sektoral yang telah tersedia yaitu LKj-LKPJ-LPPD, terhadap jumlah data dan informasi sektoral yang direncanakan untuk disediakan, yaitu 3.

2. **Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**, Dengan realisasi capaian sebesar 89,94% dari target RPJMD 90%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 99,93%. Indikator ini terukur dari jumlah aset dalam kondisi baik yaitu 876, terhadap jumlah seluruh aset di BKPP kota Cilegon yaitu sebanyak 974 aset.
3. **Tingkat disiplin aparatur**, Dengan realisasi capaian sebesar 99,39% dari target RPJMD 95%, sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 104,62%. Indikator tingkat disiplin aparatur terukur dari jumlah persentase presensi pegawai tiap bulan yaitu 11,86 poin terhadap jumlah bulan dalam 1 tahun yaitu 12 bulan.
4. **Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget**, Dengan realisasi capaian sebesar 76,17% dari target RPJMD 75%, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 101,56%. Indikator ini terukur dari total realisasi keuangan yang telah sesuai cash budget yaitu Rp 10.346.835.590,- terhadap total seluruh anggaran yang direncanakan dicairkan sesuai cash budget yaitu Rp 13.583.872.378,-

Tabel 3.1.4.5b Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara; Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA))

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai						
Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara		1,281,539,000.00	984,178,270.00	76.80%	Pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, walaupun dalam pencapaian target kinerja belum bisa maksimal, dikarenakan beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan karna adanya pandemi sehingga harus menerapkan protokol kesehatan.	Merubah beberapa pola pelaksanaan kegiatan yang tidak melanggar protokol kesehatan dikarenakan oleh pandemi.
	Proporsi jabatan ASN yang sesuai standar kompetensi	100	99.94	99.94%		
	Tingkat penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi	95	86.67	91.23%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Cakupan pelayanan mutasi dan promosi kepegawaian	100	81.1	81.10%		
Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)		688,000.00	688,000.00	100.00%		
	Terkelolanya administrasi kenaikan gaji berkala pegawai	1350	1444	106.96%		
Peningkatan Administrasi Kepegawaian (KP PNS)		129,296,000.00	100,446,000.00	77.69%		
	Terlaksananya peningkatan administrasi kepegawaian (KP PNS)	1,500	1,024	68.27%	Target SK Kenaikan Pangkat yang dilayani tidak tercapai karena regulasi kepegawaian yang mengatur batas atas pangkat tertinggi dan hubungan kepegawaian antara atasan dan bawahan	Meninjau kembali target SK Kenaikan Pangkat dengan mensinkronkan data kepegawaian pada SIMAK
Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS		-	-	0.00%	Anggaran kegiatan tidak terserap dikarenakan kebijakan <i>refocussing</i> anggaran untuk penanganan pandemi COVID19.	
	Terkelolanya penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu	1,500	1,018	67.87%	Target SK Kenaikan Pangkat yang diserahkan tidak tercapai karena regulasi kepegawaian yang mengatur batas atas pangkat tertinggi dan hubungan kepegawaian antara atasan dan bawahan	Meninjau kembali target SK Kenaikan Pangkat dengan mensinkronkan data kepegawaian pada SIMAK
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jabatan Fungsional		4,170,000.00	4,170,000.00	100.00%		
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan jabatan fungsional	100	-	0.00%	Kegiatan sosialisasi tidak terlaksana karena kondisi pandemi COVID19. Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi atau dikarenakan kebijakan <i>refocussing</i> anggaran untuk penanganan pandemi COVID19.	Menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada tahap pelaksanaan kegiatan dimasa depan, mempertimbangkan opsi pelaksanaan kegiatan secara virtual dan mendiskusikannya dengan pimpinan
Peningkatan Karir Aparatur Berdasarkan Kompetensi (BAPERJAKAT)		224,190,000.00	183,338,000.00	81.78%		
	Terisinya jabatan ASN sesuai kompetensi	2	2	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		919,935,000.00	692,276,270.00	75.25%	Belanja disesuaikan dengan kebutuhan/jumlah peserta seleksi	
	Terpilihnya jabatan pimpinan tinggi	4	4	100.00%		
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional		3,260,000.00	3,260,000.00	100.00%		
	Terisinya jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi	6	-	0.00%	Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tidak terlaksana karena kondisi sedang pandemi COVID19. Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi dikarenakan kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi COVID19.	Menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada tahap pelaksanaan kegiatan dimasa depan
Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu						
Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)		1,470,270,630.00	1,249,939,901.00	85.01%	Capaian Kinerja dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun beberapa kinerja belum dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan adanya pandemi covid-19.	
	Tingkat pembinaan terhadap pegawai pemerintah kota cilegon	85	86.36	102%		
	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100	90.97	91%		
	Prosentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon	95	0	0%	Pelaksanaan seleksi di laksanakan di tahun 2020 namun penetapan dan pemberian NIP dilaksanakan di tahun 2021	Berkoordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan penetapan dan pemberian NIP bagi CPNS
	Tingkat Kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	100	100	100%		
	Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan bantuan pendidikan	100	0	0%	Anggaran Pemberian bantuan tugas belajar tidak bisa dilaksanakan dikarenakan mengalami <i>refocussing</i> anggaran.	Menyusun kembali daftar pegawai penerima bantuan pendidikan dan memberikan komponen bantuan yang benar-benar dibutuhkan atau yang nilainya bisa memenuhi

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						kebutuhan pegawai yang sedang tugas belajar / izin belajar
Pengolahan Administrasi Pemberhentian Pegawai (pensiun)		5,130,500.00	5,130,500.00	100.00%		
	Terlaksananya pelayanan pensiun	110	177	161%	Target yang di rencanakan sudah sesuai dengan BUP, namun seiring berjalannya waktu ada beberapa ASN yang meninggal dan mengundurkan diri sehingga jumlah realisasi SK bertambah melebihi target yang direncanakan.	Meningkatkan kinerja untuk menghadapi lonjakan pelayanan pemberhentian pegawai
Pengelolaan Identitas Pegawai		350,000.00	350,000.00	100.00%		
	Terlaksananya pemberian identitas pegawai	150	68	45%	Target pengelolaan identitas tidak tercapai karena anggaran kegiatan dialihkan untuk pandemi COVID19.	Berkoordinasi kembali dengan pimpinan terkait alokasi anggaran untuk pelayanan identitas pegawai
Pengambilan Sumpah dan Janji PNS		19,279,500.00	19,279,500.00	100.00%		
	Terlaksananya pengambilan sumpah dan janji PNS	215	0	0%	Pengambilan sumpah janji tidak bisa dilaksanakan, karena penetapan dan pemberian NIP dilakukan di tahun 2021.	Berkoordinasi kembali dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan penetapan dan pemberian NIP
Persiapan dan Pelaksanaan CASND Kota Cilegon		1,361,973,000.00	1,151,682,271.00	84.56%		Pembinaan CPNS Baru
	Terselenggaranya pelaksanaan CASND Formasi Tahun 2020	300	0	0%	Pelaksanaan seleksi di laksanakan di tahun 2020 namun penetapan dan pemberian NIP dilaksanakan di tahun 2021.	Berkoordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan penetapan dan pemberian NIP bagi CPNS
Sosialisasi Penyusunan Bezzeting dan Formasi		8,005,000.00	8,005,000.00	100.00%		
	Terlaksananya sosialisasi penyusunan bezzeting dan formasi	150	0	0%	Sosialisasi ini tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya pandemi. Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi dikarenakan kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.	Menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada tahap pelaksanaan kegiatan dimasa depan, atau mempertimbangkan opsi pelaksanaan kegiatan secara virtual dan mendiskusikannya dengan pimpinan
Penegakan Disiplin Aparatur		18,628,880.00	18,628,880.00	100.00%		
	Terlaksananya penegakan disiplin aparatur dan	12	4	33%	Penanganan kasus indisipliner tidak mencapai target karena kondisi pandemi COVID19.	Memprioritaskan anggaran untuk penanganan kasus-kasus disiplin

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	penanganan kasus-kasus disiplin				Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi dikarenakan kebijakan refocussing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.	
	Terlaksananya sosialisasi pembinaan disiplin PNS	-	-	0.00%	Sosialisasi ini tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya pandemi	Menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada tahap pelaksanaan kegiatan dimasa depan, atau mempertimbangkan opsi pelaksanaan kegiatan secara virtual dan mendiskusikannya dengan pimpinan
Pengelolaan LHKPN		0	0	0%		
	Terlaksananya pengelolaan LHKPN	61.00	61.00	100.00%	Pada Tahun 2020, pelaksanaan LHKPN dilaksanakan walaupun tidak berbasis anggaran.	Karena terkait dengan tugas pengawasan, pelaksanaan LHKPN akan diambil alih oleh APIP
Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya		41,500,000.00	31,460,000.00	76%	Anggaran yang tidak terserap adalah honorarium, hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum berupa Surat Keputusan terkait kepanitiaan dari Setkab (Sekretariat Kabinet) sehingga anggaran honorarium kepanitiaan tidak bisa dicairkan	Meningkatkan koordinasi dengan Setkab terkait pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan satya lancana karya satya
	Terlaksananya pemberian penghargaan satya lancana karya satya	300.00	200.00	66.67%	Target tidak tercapai karena pelayanan medali satya lancana dikerjakan sesuai usulan yang masuk, yaitu 200	Mensinkronkan target pelayanan satya lancana dengan data kepegawaian pada aplikasi SIMAK
Bantuan Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan S1, S2 dan S3		2,700,000.00	2,700,000.00	100%		
	Terlaksananya pemberian bantuan tugas/ijin belajar dan bantuan pendidikan S1 dan S2	21.00	-	0.00%	Tidak ada penerima bantuan pendidikan karena anggaran bantuan pendidikan dialihkan untuk penanganan pandemic COVID19	Menyusun kembali daftar pegawai penerima bantuan pendidikan dan memberikan komponen bantuan yang benar-benar dibutuhkan atau yang nilainya bisa memenuhi kebutuhan pegawai yang sedang tugas belajar / izin belajar
Rekonsiliasi dan Pencocokan data kehadiran pegawai		12,703,750.00	12,703,750.00	100%		
	Terlaksananya rekonsiliasi dan pencocokan data kehadiran pegawai	38.00	38.00	100.00%		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu						
Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA)		17,560,000.00	17,560,000.00	100.00%		
Pengelolaan Updating E-Mapsincil		10,130,000.00	10,130,000.00	100.00%		
	Terbentuknya update aplikasi dalam E-Mapsincil	4947	4861	98%		
Pengelolaan Data, Arsip Elektronik Pegawai dan Penataan Dokumen Pegawai		5,930,000.00	5,930,000.00	100.00%		
	Terlaksananya pengelolaan data, arsip elektronik dan penataan dokumen pegawai	4947	4861	98%		
Manajemen aplikasi absensi finger print		1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		
	Terlaksananya manajemen aplikasi absensi finger print	40	40	100%		

Adapun ketercapaian indikator Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020:

1. Proporsi jabatan ASN yang sesuai standar kompetensi

Dengan capaian realisasi 99.94% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah jabatan (struktural dan fungsional) yang terisi yaitu sebanyak 901 jabatan, terhadap jumlah total seluruh jabatan (struktural dan fungsional) yaitu sebanyak 902 jabatan.

2. Tingkat penempatan SDM ASN sesuai formasi dan kompetensi

Dengan capaian realisasi 86.67% dari target RPJMD 95%, capaian ini terukur melalui jumlah penempatan pegawai sesuai formasi dan kompetensi yaitu sebanyak 52 aparatur, terhadap jumlah kebutuhan aparatur yaitu sebanyak 60 aparatur.

3. Cakupan pelayanan mutasi dan promosi kepegawaian

Dengan capaian realisasi 81.1% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui persentase pelayanan mutasi dan promosi yang terdiri dari pelayanan KGB sebesar 107%, pelayanan KP PNS sebesar 68% dan pelayanan penyerahan SK KP PNS sebesar 68%, terhadap jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Bidang Mutasi dan Promosi ASN yaitu sebanyak 3 kegiatan. Adapun presentasi pelayanan KGB sebesar 107% terukur melalui jumlah SK KGB terealisasi sebanyak 1444 SK terhadap jumlah target SK KGB sebanyak 1350

SK. Selanjutnya presentasi pelayanan KP PNS sebesar 68% terukur melalui jumlah SK KP PNS yang dilayani sebanyak 1027 SK terhadap jumlah target SK KP PNS sebanyak 1500 SK. Dan presentasi penyerahan SK KP PNS sebesar 68% terukur melalui jumlah SK KP PNS yang diserahkan sebanyak 1018 SK KP PNS terhadap jumlah target SK KP PNS sebanyak 1500 SK.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara, adapun alokasi pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.1,281,539,000.00 dengan serapan anggaran Rp.984,178,270.00 dan capaian persentasi 76.80% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan penunjang yang serapan anggarannya tidak optimal dan tidak bisa terlaksanakan dikarenakan adanya kendala dalam proses pelaksanaanya.

Sedangkan ketercapaian indikator Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) pada tahun 2020:

1. Tingkat pembinaan terhadap pegawai pemerintah kota cilegon

Dengan capaian realisasi 86.36% dari target RPJMD 85%, capaian ini terukur melalui jumlah persentase penanganan kasus-kasus disiplin sebesar 73% dan persentase kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100% terhadap jumlah unsur perhitungan indikator yaitu 2 unsur. Unsur pertama, yaitu persentase penanganan kasus-kasus disiplin sebesar 73%, terukur dari jumlah putusan yaitu sebanyak 16 putusan terhadap jumlah kasus yang ditangani yaitu sebanyak 22 kasus. Sedangkan unsur kedua, yaitu persentase kepatuhan pelaporan LHKPN sebesar 100%, terukur melalui jumlah aparatur yang sudah melaporkan LHKPN yaitu sebanyak 61 aparatur terhadap jumlah target wajib lapor LHKPN.

2. Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian

Dengan capaian realisasi 90.97% dari target RPJMD 100%%, capaian ini terukur melalui presentase pelayanan kartu identitas pegawai (KIP) sebesar 45%, pelayanan satya lencana karya satya sebesar 67%, dan pelayanan pensiun sebesar 161% terhadap jumlah unsur perhitungan indikator yaitu 3 unsur. Unsur pertama, yaitu presentase pelayanan kartu indentitas pegawai (KIP) sebesar 45% terukur dari jumlah kartu identitas pegawai yang di cetak sebanyak 68 KIP terhadap jumlah target pelayanan pembuatan kartu indentitaspegawai sebanyak 150 KIP. Kemudian unsur kedua, yaitu presentase pemberian penghargaan satya lencana karya satya sebesar 67% terukur dari pemberian penghargaan satya lencana sebanyak 200 terhadap jumlah target pemberian sebanyak 300 penghargaan satya lencana karya satya bagi PNS yang memenuhi kategori sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan unsur ketiga, yaitu presentase

pelayanan bagi PNS yang memasuki masa pensiun yaitu sebesar 161% terukur dari jumlah SK Pensiun yang terealisasi sebanyak 177 SK terhadap jumlah target SK Pensiun sebanyak 110 SK.

3. **Prosentase ketersediaan ASN Pemerintah Kota Cilegon**

Dengan capaian realisasi 0% dari target RPJMD 95%, capaian ini terukur melalui jumlah pelamar yang lulus sejumlah 0 orang terhadap jumlah formasi sebanyak 300 orang.

4. **Cakupan pemberian bantuan pendidikan bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar dan bantuan pendidikan**

Dengan capaian realisasi 0% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah aparatur yang telah memperoleh bantuan pendidikan sejumlah 0 aparatur terhadap jumlah target aparatur yang direncanakan menerima bantuan pendidikan yaitu sebanyak 21 aparatur.

5. **Tingkat Kelengkapan Dalam Penyajian Data dan Informasi**

Dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah data dan informasi yang tersaji secara akurat sebanyak 16 jenis terhadap jumlah data dan informasi yang direncanakan tersaji secara akurat sebanyak 16 jenis.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA), adapun alokasi pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.1,470,270,630.00 dengan serapan anggaran Rp.1,249,439,901.00 dan capaian persentasi 85.01% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat belum terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan penunjang yang serapan anggarannya tidak optimal dan tidak bisa terlaksanakan dikarenakan adanya kendala dalam proses pelaksanaanya.

Pada tahun 2020 alokasi anggaran pada Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp.1,281,539,000.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.984,178,270.00 dan capaian persentasi 76.80%, dimana serapan pagu anggaran pada program ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara yang secara serapan anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. **Peningkatan Administrasi Kepegawaian (KP PNS)**

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya peningkatan administrasi kepegawaian (KP PNS), dengan target RPJMD 1,500 SK dan realisasi 1,024 SK. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.100,446,000.00 dari target sebesar Rp.129,296,000.00 dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 77.69%. Dalam kaitannya dengan capaian realisasi kinerja yang tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan

dalam pelayanan peningkatan administrasi kepegawaian/ kenaikan pangkat tidak sesuai dengan usulan, yang disebabkan oleh adanya pegawai yang tidak bisa naik pangkat karena tidak bisa melebihi pangkat atasannya langsung, kemudian adanya pegawai yang tidak bisa naik pangkat oleh karena ketentuan batas pangkat tertinggi yang dipengaruhi oleh jabatan dan/atau jenjang pendidikan. Dalam kaitannya dengan tidak terserapnya anggaran, hal ini dikarenakan belanja untuk makan dan minum serta penginapan/hotel bagi perwakilan dari BKN tidak terserap disebabkan pandemi covid 19 sehingga perwakilan BKN tidak dapat melaksanakan dinas ke kota Cilegon dalam kaitannya menyelesaikan proses kenaikan pangkat di kota Cilegon.

2. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Output dari kegiatan ini adalah Terpilihnya jabatan pimpinan tinggi, dengan target RPJMD 4 Jabatan dan realisasi 4 Jabatan. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.692,276,270.00 dari target sebesar Rp.919,935,000.00 dengan presentasi capaian serapan anggaran sebesar 75.25%. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu pada tahun 2020 meskipun secara kinerja realisasi telah memenuhi target, namun secara anggaran belum terserap sepenuhnya dikarenakan jumlah partisipan atau peserta dalam mengikuti kompetensi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedikit. Untuk diketahui di tahun 2020 terdapat 2 seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah yang diikuti sebanyak 5 orang yang diselenggarakan di LAN, Kab. Sumedang dan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk jabatan Kepala OPD yang diikuti sebanyak 16 orang yang diselenggarakan di BKD Kota Semarang. Faktor yang kedua yang mempengaruhi tidak terserapnya anggaran adalah terkait belanja pers, dikarenakan adanya 1 (satu) tahapan seleksi diantara beberapa tahapan seleksi yang ada tidak di umumkan lewat media.

Adapun beberapa kegiatan yang belum atau tidak terserap seraca optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS

Output dari kegiatan ini adalah Terkelolanya penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu, dengan target RPJMD 1500 SK dan realisasi 0 SK. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

2. Pembinaan Jabatan Fungsional tertentu

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional tertentu, dengan target RPJMD 100 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

3. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, dengan target RPJMD 150 Orang dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Seluruh kegiatan tersebut tidak bisa terlaksanakan dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

Sedangkan alokasi anggaran pada Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) Rp.1,470,270,630.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1,249,439,901.00 dan capaian persentasi 84.98%, dimana serapan pagu anggaran pada program ini tidak dapat terrealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) yang secara serapan anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pemberian penghargaan satya lancana karya satya, dengan target RPJMD 300 Medali dan realisasi 300 Medali. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.31,460,000.00 dari target sebesar Rp.41,500,000.00 dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 76%. Anggaran yang tidak terserap adalah honorarium, hal ini disebabkan tidak adanya dasar hukum berupa Surat Keputusan terkait kepanitiaan dari Setkab (Sekretariat Kabinet).

Adapun beberapa kegiatan yang belum terserap seraca optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Pengelolaan LHKPN

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengelolaan LHKPN, dengan target RPJMD 61 Aparatur dan realisasi 61 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Seluruh kegiatan tersebut tidak bisa terlaksanakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

B. SEKRETARIAT KORPRI

Tabel 3.1.4.5c Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Kepegawaian (Sekretariat KORPRI)

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara						

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP)						
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan		827,933,325.00	790,035,445.00	95.42%	Pada tahun 2020 ada beberapa capaian output kegiatan yang tidak tercapai sebagai mana yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang sekiranya mendukung ketercapaian indikator program tersebut.	Dalam hal ini Sekretariat KORPRI sudah berkoodinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan adanya kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan, adapun beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan beberapa kegiatan yang hanya dilaksanakan beberapa kali saja.
Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai						
Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN		1,181,345,000.00	750,292,906.00	63.51%	Pada tahun 2020 ada beberapa capaian indikator program yang tidak tercapai sebagai mana yang sudah ditentukan, hal ini dikarenakan adanya kendala terkait pelaksanaan kegiatan yang sekiranya mendukung ketercapaian indikator program tersebut.	Dalam hal ini Sekretariat KORPRI sudah berkoodinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan adanya kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan, adapun beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan beberapa kegiatan yang hanya dilaksanakan beberapa kali saja.
Peringatan Hari Kesadaran Nasional		188,550,000.00	106,166,000.00	56.31%	Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan	Upaya yang dilakukan dengan cara menginformasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) melalui surat edaran terkait dengan di tiadaknya upacara peringatan hari kesadaran nasional yang di selenggarakan tanggal 17 pada setiap bulannya, namun tetap menggunakan seragam/pakaian Korpri lengkap

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan upacara peringatan hari kesadaran nasional	8	2	25%	Dari target yang sudah ditentukan yaitu sebanyak 8 kali hanya terrealisasi sebanyak 2 kali	Adapun sisa 5 kali pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat terlaksanakan
Penyelenggaraan Rapat Kerja KORPRI Kota Cilegon		8,030,000.00	-	0.00%	Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.	
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja korpri	65	0	0%	Dari target sebanyak 65 Orang rapat kerja KORPRI yang sudah di agendakan tidak ada yang terrealisasi.	
Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon		278,800,000.00	-	0.00%	Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.	Kegiatan ini di usulkan kembali di tahun berikutnya dikarenakan kegiatan tersebut sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dalam rangka Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon.
	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan HUT Korpri Kota Cilegon	7	0	0%		
Pelatihan kewirausahaan bagi anggota korpri pra purnabhakti		331,885,000.00	324,820,000.00	97.87%		
	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi anggota korpri pra purnabhakti	80	80	100%		
Bantuan Hukum dan Konsultasi Bagi Anggota KORPRI		154,080,000.00	148,856,906.00	96.61%		
	Terlaksananya kegiatan Bantuan hukum dan konsultasi bagi anggota Korpri	2	2	100%		
Pembinaan Kode Etik jiwa Korsa		220,000,000.00	170,450,000.00	77.48%		
	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pembinaan kode etik dan jiwa korsa	1600	1400	88%	Dari target 8 kecamatan(200 Orang x 8 Kecamatan) hanya 7 Kecamatan (200 Orang x 7 Kecamatan) yang bisa mengikuti kegiatan Pembinaan Kode Etik Jiwa Korsa, Hal ini dikarenakan dampak dari	Upaya yang dilakukan dalam hal ini Sekretariat KORPRI tidak melaksanakan Kegiatan ini pada Kecamatan Cibeber dikarenakan Kecamatan tersebut sudah masuk kedalam zona merah.

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) pada Kecamatan Cibeber sudah dalam zona merah sehingga mempengaruhi jumlah output dari kegiatan tersebut	

Adapun ketercapaian indikator Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN pada tahun 2020:

1. Prosentase purna ASN yang telah mendapatkan pembekalan

Dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah Aparatur Sipil Negara yang sudah di target untuk mengikuti pembekalan sebanyak 80 orang terhadap jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti dan mendapatkan pembekalan sebanyak 80 orang.

2. Prosentase ASN yang memahami kode etik KORPRI

Dengan capaian realisasi 88% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah Kecamatan x 200 peserta/orang sebanyak 8 Kecamatan terhadap jumlah Kecamatan yang di monitoring sebanyak 7 Kecamatan.

3. Prosentase kasus terkait ASN yang difasilitasi

Dengan capaian realisasi 100% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah kasus yang di targetkan sebanyak 2 kasus terhadap jumlah kasus yang terselesaikan sebanyak 2 kasus.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN, adapun alokasi pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.1,181,345,000.00,- dengan serapan anggaran Rp.750,292,906.00,- dan capaian persentasi 63,51% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat belum terrealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan penunjang yang serapan anggarannya tidak optimal dan tidak bisa terlaksanakan dikarenakan adanya kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2020 alokasi anggaran pada Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN sebesar Rp.1,181,345,000.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.750,292,906.00 dan capaian persentasi 63,51%, dimana serapan pagu anggaran pada program ini tidak dapat terrealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN yang secara serapan anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Peringatan Hari Kesadaran Nasional

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan pelaksanaan upacara peringatan hari kesadaran nasional, dengan target RPJMD 8 kali dan realisasi 2 kali. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.106,166,000,- dari target sebesar Rp.188,550,000,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 56,31%. Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

2. Pembinaan Kode Etik Jiwa Korsa

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pembinaan kode etik dan jiwa korsa, dengan target RPJMD 1.600 orang dan realisasi 1.400 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.170,450,000,- dari target sebesar Rp.220,000,000,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 77,48%. Dari target 8 kecamatan(200 Orang x 8 Kecamatan) hanya 7 Kecamatan (200 Orang x 7 Kecamatan) yang bisa mengikuti kegiatan Pembinaan Kode Etik Jiwa Korsa, Hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada Kecamatan Cibeber sudah dalam zona merah sehingga mempengaruhi jumlah output dari kegiatan tersebut.

Adapun beberapa kegiatan yang belum terserap seraca optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Kerja KORPRI Kota Cilegon

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan rapat kerja korpri, dengan target RPJMD 65 orang dan realisasi 0 orang. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.8,030,000,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

2. Penyelenggaraan HUT Korpri Kota Cilegon

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelaksanaan kegiatan HUT Korpri Kota Cilegon, dengan target RPJMD 7 kali dan realisasi 0 kali. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target Rp.278,800,000,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%.

3.1.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

A. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tabel 3.1.4.6a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan					Beberapa kegiatan mengalami recofussing anggaran dan juga pelaksanaan diklat masih belum dilaksanakan diakibatkan pandemi covid-19	Memilih berbagai alternatif dalam pelaksanaan diklat.
Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara		1,614,450,000.00	1,523,445,000.00	94.36%		
	Tingkat keikutsertaan aparatur dalam diklat teknis fungsional, struktural dan pengembangan kompetensi lainnya.	100%	54.17%	54.17%		
Pengiriman Diklat Pim Tingkat IV		1,344,390,000.00	1,264,410,000.00	94.05%		
	Terlaksananya pengiriman DiklatPIM Tk.IV	52	52	100.00%		
Pengiriman Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu		36,950,000.00	36,950,000.00	100.00%	Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi dikarenakan kebijakan <i>refocussing</i> anggaran untuk penanganan pandemi COVID19.	Berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya
	Terlaksananya pengiriman penjenjangan jabatan fungsional tertentu	20	5	25.00%	Target kegiatan tidak tercapai karena anggaran kegiatan dialihkan	Berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya
Pengiriman Aparatur dalam Bintek, Diklat, Workshop dll		73,175,000.00	73,175,000.00	100.00%		
	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam bintek, diklat, workshop dll	70	53	75.71%	Target kegiatan tidak tercapai karena anggaran kegiatan dialihkan	Berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Diklat Manajemen ASN		635,000.00	635,000.00	100.00%	Anggaran kegiatan mengalami rasionalisasi dikarenakan kebijakan <i>refocussing</i> anggaran untuk penanganan pandemi COVID19.	Berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya
	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Diklat Manajemen ASN	30	0	0.00%	Kegiatan tidak dilaksanakan karena kondisi sedang pandemi COVID19	Berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya
Diklat Manajemen PPTK		159,300,000.00	159,300,000.00	100.00%		
	Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Diklat manajemen PPTK	24	24	100.00%		

Adapun ketercapaian indikator Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020:

1. Tingkat keikutsertaan aparatur dalam diklat teknis fungsional, struktural dan pengembangan kompetensi lainnya.

Dengan capaian realisasi 54.17% dari target RPJMD 100%, capaian ini terukur melalui jumlah nilai total dari ketiga indikator yaitu sebesar 162.51% terhadap jumlah indikator yang ada yaitu 3 indikator. Adapun ketiga indikator tersebut adalah yang pertama presentase pelaksanaan diklat, bimtek, workshop dan sosialisasi bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya sebesar 100% diperoleh dari realisasi 37 aparatur yang mengikuti diklat teknis terhadap jumlah aparatur yang direncanakan mengikuti diklat teknis sebanyak 37 aparatur. Indikator yang kedua adalah rasio keikutsertaan aparatur dalam diklat struktural sebesar 62.51% diperoleh dari jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural sebanyak 57 aparatur terhadap jumlah aparatur yang direncanakan mengikuti diklat struktural yaitu sebanyak 92 aparatur. Sedangkan indikator yang ketiga adalah rasio keikutsertaan aparatur dalam evaluasi dan pengembangan kompetensi sebesar 0% terukur dari jumlah aparatur yang mengikuti evaluasi dan pengembangan kompetensi sebanyak 0 aparatur terhadap jumlah aparatur yang direncanakan mengikuti kegiatan evaluasi dan pengembangan kompetensi yaitu sebanyak 130 aparatur.

Keberhasilan tersebut didukung dengan beberapa kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara, adapun alokasi pagu anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.1,614,450,000.00 dengan serapan anggaran Rp.1,523,445,000.00 dan capaian persentasi 94.36%% dimana serapan pagu anggaran pada program ini dapat belum terrealisasi secara

optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan penunjang yang serapan anggarannya tidak optimal dan tidak bisa terlaksanakan dikarenakan adanya kendala dalam proses pelaksanaannya.

Pada tahun 2020 alokasi anggaran pada Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara sebesar Rp.1,614,450,000.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1,523,445,000.00 dan capaian persentasi 94.36%, dimana serapan pagu anggaran pada program ini tidak dapat terealisasi secara optimal, hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan penunjang yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan penunjang indikator Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang secara serapan anggarannya masih belum optimal diantaranya sebagai berikut :

1. Pengiriman Diklatpim Tingkat II

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman DiklatPIM Tk.II, dengan target RPJMD 3 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

2. Pengiriman Diklat Pim Tingkat III

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman Diklat PIM Tk.III, dengan target RPJMD 11 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

3. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengiriman Aparatur Dalam Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dengan target RPJMD 30 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

4. Diklat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman aparatur dalam diklat pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan target RPJMD 30 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

5. Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan target RPJMD 30 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,-

dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

6. Pengiriman Aparatur dalam Seminar, Magang dan Kursus

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Seminar, Magang dan Kursus, dengan target RPJMD 10 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

7. Tes Kompetensi Jabatan

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Diklat Manajemen ASN dengan target RPJMD 30 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

8. Pengiriman Latsar CPNS

Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pengiriman latsar CPNS, dengan target RPJMD 183 Aparatur dan realisasi 0 Aparatur. Adapun serapan anggaran sebesar Rp.0,- dari target sebesar Rp.0,- dengan persentasi capaian serapan anggaran sebesar 0%. Hal ini dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic COVID19.

3.1.4.7 Penelitian dan Pengembangan

A. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 3.1.4.7a Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Penelitian dan Pengembangan

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya						
Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah		1.724.243.000	1.669.467.000	96,82		
	Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang)	80	80	100,00		
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang)	50	50	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan		465.500.000	464.950.000	99,88		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Kajian Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan yang dihasilkan	3	3	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Policy Brief yang dihasilkan	4	4	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan		434.750.000	434.388.000	99,92		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Kajian Subid Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang dihasilkan	3	3	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Policy Brief yang dihasilkan	4	4	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah		323.993.000	323.993.000	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tahapan Perancangan Desain Inovasi	1	1	100,00		
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Terlaksananya Seminar Inovasi dan Teknologi Pelayanan Publik	1	1	100,00		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kota Cilegon (DID)		500.000.000	446.136.000	89,23		

Arah Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Uraian Indikator Kinerja	Target Kinerja/ Target Keuangan)	Realisasi Kinerja (Realisasi Keuangan)	% Kinerja (% Keu)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kota Cilegon (DID)	Penghargaan Inovasi	100	100	100,00		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kota Cilegon (DID)	Tersedianya Dokumen Inovasi	1	1	100,00		
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Kota Cilegon (DID)	Terlaksananya Kegiatan In House Training	100	100	100,00		

Program penelitian pengembangan kebijakan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya. dengan anggaran sebesar Rp 1.724.243.000,- dan terealisasi Rp 1.669.467.000,- atau 96,82% capaian serapan anggarannya selama tahun 2020. Indikator capaian kinerja Program penelitian pengembangan kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- Persentase cakupan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah (litbang) Target 80% Realisasi 80% Capaian 100%.
- Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti (litbang) Target 50% Realisasi 50% Capaian 100%.

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kota Cilegon selama Tahun Anggaran 2020 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Terbatasnya kemampuan tenaga dalam melaksanakan masing-masing program.
- Kurangnya bimbingan dan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral terkait manajemen program ataupun pengelola keuangan dan anggaran.
- Terbatasnya data yang berada di Dinas-dinas teknis dilingkungan Pemerintahan Kota Cilegon sehingga kesulitan dalam penyusunan perencanaan.
- Masih kurangnya tenaga Perencana baik kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak pada pencapaian outcome (dampak) yang dibawah target.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan khususnya komponen pengolah data.
- Peraturan Perundang-undangan yang sangat dinamis terkait pemutakhiran dan kebijakan penanggulangan Covid - 19

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi yang intensif dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang kegiatan, pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan yang diharapkan. Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

- Hendaknya dapat menambahkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan akan kegiatan sehingga kegiatan program jadi lancar
- Disarankan pada semua pegawai Bappeda Kota Cilegon agar bekerja secara optimal demi terlaksananya program sesuai dengan prosedur yang semestinya.
- Untuk memaksimalkan kinerja Bappeda Kota Cilegon, diharapkan secara bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan azas manfaat.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Berikut adalah kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota maupun keputusan atau tindakan Wali Kota Cilegon dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis sepanjang tahun anggaran 2020 :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.	Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jaminan Persalinan	a. meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
2.	Optimalisasi penyelenggaraan penanganan orang atau jenazah terlantar.	Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Penanganan Orang Terlantar	a. memberikan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan mengantar ke daerah asal terhadap orang terlantar dalam perjalanan atau dalam kondisi sakit; dan b. memberikan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman terhadap jenazah terlantar.
3.	Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern.	Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penataan Pusat	a. memberikan kepastian hukum berusaha bagi pusat perbelanjaan dan toko modern;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Perbelanjaan dan Toko Swalayan	b. memberikan perlindungan keberlangsungan usaha pasar rakyat dan usaha mikro kecil; c. terciptanya ketertiban, keseimbangan dan keadilan penyelenggaraan usaha perdagangan.
4.	Membangun Pemerintahan dan masyarakat yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.	Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Kota Cilegon	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter antikorupsi yang meliputi tenaga pendidik, peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, dan masyarakat.
5.	Pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan.	Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
6.	Pemenuhan hak anak usia dini untuk memperoleh pendidikan yang membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.	Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini dengan usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Cilegon; b. menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini untuk Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
7.	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon	a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tentang gratifikasi; b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri terhadap ketentuan gratifikasi;

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; d. membangun integritas Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan pada Pemerintah Daerah.
8.	Pencegahan dan Penanganan intensif Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Nomor 360/kep.180-BPBD/2020 tentang Keadaan Darurat Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Cilegon	Mengintensifkan dan mempercepat kegiatan serta pembiayaan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
9.	Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Nomor 360/Kep.313-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon	Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon
10.	Penanganan dampak kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial terhadap pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon	Pedoman kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
11.	Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19; b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19; dan c. kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
12.	Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Peraturan Wali Kota Nomor 51 tentang Pembatasan Kegiatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan /atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19 serta meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19
13.	Penanganan dampak ekonomi dari pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 520/kep.320-DKPP/2020 tentang Pemberian Bantuan Ekonomi untuk Petani dan Nelayan di Kota Cilegon	Meringankan beban ekonomi bagi masyarakat Kota Cilegon yang berprofesi sebagai petani dan nelayan dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
14.	Penanganan dampak ekonomi dari pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor:510/Kep. 321-Disperindag/2020 tentang Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha Industri Kecil	Meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya untuk industri kecil menengah dan pedagang kaki lima dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Menengah dan Pedagang Kaki Lima	
15.	Penanganan dampak ekonomi dari pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor:500/Kep. 322-Diskop/2020 tentang Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di Kota Cilegon	Meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya yang merupakan usaha mikro dan kecil dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
16.	Penanganan dampak ekonomi dari pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor:500/Kep. 323-Diskop/2020 tentang Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha Mitra Binaan Dana Bergulir	meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya yang merupakan mitra binaan dana bergulir dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
17.	Penanganan dampak ekonomi dari pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor:550/Kep. 330-Dishub/2020 tentang Pemberian Bantuan Ekonomi untuk Pengemudi Ojek Pangkalan, Ojek Daring dan Supir Angkutan Perkotaan di Kota Cilegon	meringankan beban ekonomi masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan, ojek daring dan supir angkutan perkotaan dari dampak pandemi Corona Virus Disease 2019
18.	Penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin	Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor:460/Kep. 266-Dinsos/2020 Pemberian Bantuan Uang	penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan uang tunai dan bahan pokok untuk masyarakat miskin terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Tunai dan Bahan Pokok Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kota Cilegon	
19.	Penanganan Kesehatan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Nomor:440/kep. 206-Dinkes/2020 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon	Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kota Cilegon
20.	Penanganan Kesehatan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Cilegon.	Keputusan Wali Kota Nomor:440/kep. 207-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) di Kota Cilegon	mendorong keterlibatan seluruh Rumah Sakit di Kota Cilegon yang mampu memberikan pelayanan COVID-19 agar pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 dapat optimal

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1	Capaian Makro Pembangunan :		
1.1	DPRD Kota Cilegon mendorong pemerintah Kota cilegon untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui berbagai strategi dan arah kebijakan yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat secara inklusif serta memperluas akses pendidikan di antaranya adalah pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin , pembebasan biaya untuk SD dan SMP negeri, serta pemenuhan SD dan smp ber-standar nasional melalui perwujudan sekolah mantap sebagai prioritas daerah dalam RPJMD Kota Cilegon tahun 2016-2021.	Pemerataan pendidikan merupakan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya peningkatan dan perwujudan pendidikan yang inklusi. Hal ini dilakukan melalui pemerataan sarana pendidikan dasar, program-program bantuan pendidikan untuk siswa miskin (beasiswa miskin) ataupun program bantuan sosial berbasis keluarra antara lain Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM). Selain itu sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah telah melakukan pembebasan dana sumbangan pendidikan dan sumbangan pembiayaan pendidikan (DSP dan SPP) untuk pendidikan dasar dan membangun sekolah mantap di beberapa sekolah negeri di tingkat SD dan SMP. Dengan diberlakukannya kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru, implementasi pendidikan inklusi juga diwujudkan melalui pemerataan sarana pendidikan di seluruh zonasi, antara lain dengan membangun unit sekolah baru SMPN 12 di Kecamatan Purwakarta serta membangun ruang kelas baru di sekolah-sekolah di wilayah perbatasan.	Perluasan cakupan dan hak masyarakat atas pelayanan dasar di bidang pendidikan
1.2	DPRD Kota Cilegon berharap strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Cilegon adalah mempertahankan peningkatan angka harapan hidup masyarakat, melalui pemberdayaan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dan seluruh puskesmas, peningkatan kesehatan lingkungan , serta mendukung pemenuhan kecukupan gizi dan kalori masyarakat namun perlu adanya peningkatan pelayanan bagi petugas kesehatan yang baik dan ramah tanpa membedakan	- Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis selalu berupaya melaksanakan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien tanpa membeda - bedakan masyarakat yang mampu dan tidak mampu. Hal ini turut didukung fakta bahwa pada saat ini sebagian besar pasien Puskesmas dan RSUD adalah peserta BPJS sehingga tidak ada perbedaan status mampu atau tidak mampu. - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pasien RSUD Kota Cilegon mempunyai tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kota Cilegon. Secara keseluruhan RSUD Kota Cilegon memiliki penilaian persepsi	- Peningkatan aksesibilitas pelayanan Kesehatan tanpa membedakan status sosial - Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Kota Cilegon

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang mampu.	atas layanan oleh pengguna layanan RSUD Kota Cilegon dengan nilai 78,22%	
1.3	DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Kota Cilegon dapat terus berinovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap capaian IPM Kota Cilegon yang bisa lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sepanjang tahun 2020 telah melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Penganekaragaman konsumsi pangan 2. Diversifikasi Pangan (DID Tambahan) melalui kegiatan pemberdayaan KWT untuk pemulihan ekonomi 3. Peningkatan ketersediaan energi dan protein melalui bimtek pengembangan ketersediaan pangan bagi masyarakat (KWT dan poktan) 4. Pengembangan dan pengelolaan perikanan budidaya melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 5. Peningkatan produksi hortikultura melalui pengadaan bibit tanaman buah tahunan dan perkebunan dengan cara pengembangan komoditas cabai, kacang panjang, kacang mentimun, terong untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19 6. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura (DID Tambahan) dengan cara menyediakan sarana produksi pengembangan jagung untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19 Pengembangan dan pengelolaan pembibitan dan produksi peternakan melalui inseminasi buatan dan terlaksananya Asuransi Hewan Ternak.	Untuk memenuhi pangan bagi masyarakat di Kota Cilegon melalui upaya peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat Kota Cilegon dan menekan tingkat inflasi.
1.4	DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Kota Cilegon melakukan upaya strategis untuk menarik lebih banyak investor baru dengan memperbaiki ekosistem investasi dan mereformasi regulasi terkait kualitas	Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan secara berkala pada Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon (SIPECI), serta melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.	Mempermudah proses operasional pelayanan perizinan secara elektronik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	pelayanan perizinan yang berbasis teknologi informasi		atau online baik bagi pemohon maupun petugas pelayanan.
1.5	Mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah usaha mikro kecil dan menengah sebagai pendukung industri besar di Kota Cilegon yang memberikan akses modal, pembinaan dan pemberdayaan bagi kegiatan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal yang berperan lebih signifikan dalam peran aktif terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota Cilegon	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Cilegon hingga tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan dan intervensi sebagai berikut : 1. Pendataan UMK, penyusunan database UMK, pemetaan data potensi dan permasalahan UMK di Kota Cilegon. 2. Pendampingan UMK di wilayah kelurahan tempat pelaku usaha UMK tinggal atas potensi dan permasalahan dimasing-masing pelaku usaha UMK melalui bimbingan, pelayanan konsultasi, advokasi dan rujukan ke Klinik UMK yang dilakukan oleh Tenaga pendamping UMK di 43 kelurahan. Adapun pendampingan kepada pelaku usaha Mikro difokuskan pada 8 modul dasar UMK yaitu Modul Kewirausahaan, Modul Perencanaan Usaha/Bussiness Plane, Modul Legalitas Usaha/Perijinan, Modul Kemasan dan Label Produk, Modul Standarisasi/Sertifikasi Produk, Modul Akses Permodalan/ Pembiayaan Usaha, Modul Pemasaran, Modul Pengelolaan Administrasi & Keuangan Usaha. 3. Penerimaan rujukan dari pendamping UMK kelurahan untuk diberikan pelayanan/fasiltasi UMK di klinik UMK Dinas koperasi & UMK Kota Cilegon dengan difasilitasi sbb : a. Pembuatan dan penerbitan NIB & IUMK melalui OSS dengan kerjasama dengan OPD DPMPTSP; b. Persiapan mengikuti PKP (Fasilitasi PKP) utk PIRT; c. Pengajuan sertifikat halal dan memfasilitasi Penerbitan dan audit produk halal. 4. Fasilitasi UMK dengan Koperasi, Retail Modern dan Perusahaan. 5. Fasilitasi UMK dalam promosi dan pemasaran melalui pojok UMK Kecamatan dan pameran.	Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha. - Mengetahui sebaran pelaku UMK di 43 kelurahan sekota Cilegon, pelaku UMK terigistrasi dalam database UMK Kota Cilegon, potensi dan permasalahan UMK dapat dipetakan untuk dasar pelaksanaan kegiatan agar lebih efisien dan efektif. - Memberikan pelayanan pendampingan terdekat yang dapat dijangkau diseluruh wilayah pada 43 kelurahan, sehingga pemerataan pendampingan, peningkatan produktivitas, kemandirian dan daya saing UMK dapat terlaksana di 43 kelurahan. - Pelaku UMK bisa berdaya saing dengan para UMK yang ada baik di tingkat lokal, propinsi, nasional, bahkan internasional.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		6. Fasilitasi pelatihan bagi pelaku UMK dalam rangka meningkatkan SDM pelaku UMK dan daya saing produk , seperti pelatihan kemasan, label, perlindungan produk, pemasaran online dan offline, keuangan usaha dan pembukuan. 7. Fasilitasi peningkatan SDM pengurus koperasi melalui pelatihan pemasaran online, pelatihan akuntansi dan laporan keuangan usaha. 8. Fasilitasi daya saing UMK dalam Enterprener Award. 9. Penumbuhan wirausaha baru melalui bimbingan teknis kewirausahaan. 10. Fasilitasi UMK mendapatkan bantuan modal usaha, antara lain melalui Bantuan Perguliran Modal Usaha dari UPT PDB Kota Cilegon, Bantuan stimulus modal usaha terdampak covid-19 (anggaran BTT, Bantuan dari Provinsi dan Bantuan Presiden).	
1.6	Dalam aspek ketenagakerjaan, Kota Cilegon sebagai kota industri dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,68 % merupakan angka yang masih tinggi untuk itu DPRD Kota Cilegon mendorong pemerintah kota cilegon untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang adaptif terhadap kebutuhan industri bagi masyarakat Kota Cilegon, Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan inovasi inovasi melalui program yang strategis untuk penajaman agar jelas dan terukur dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah kota cilegon dengan pihak industri dan perguruan tinggi negeri yang bersifat mengikat.	Dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, upaya yang dilakukan Pemerintah pada aspek ketenagakerjaan : 1. Meningkatkan pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan yang berbasis skill dan bersertifikasi serta menindaklanjuti melalui pemagangan industri; 2. Meningkatkan upaya-upaya penempatan kerja melalui komunikasi yang lebih intens dengan pihak industri baik terkait informasi lowongan ketenagakerjaan, informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja, maupun layanan ketenagakerjaan yang berbasis sistem informasi; 3. Meningkatkan vocational training teknisi kimia, yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Industri dan Perguruan tinggi, antara lain program beasiswa D1 Kimia P3TIK yang merupakan kolaborasi (perjanjian kerjasama) antara Pemda dengan AMC/CMA.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
2	Pengelolaan Keuangan Daerah :		
2.1	Dengan kurang optimalnya sektor Pendapatan Asli Daerah, DPRD Kota Cilegon merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk : - Mendata wajib pajak baru. - Melakukan pemeriksaan pajak BPHTB pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami peralihan kepemilikan hak serta memonitor perusahaan yang memiliki potensi peralihan hak atas tanah dan bangunan. - Perluasan objek dan intensifikasi pemungutan pajak melalui sosialisasi dan pengawasan pajak yang efektif.	- Demi meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah, BPKAD terus menggali potensi dengan cara melakukan ekstensifikasi pajak daerah melalui kegiatan pendataan wajib pajak baru secara berkesinambungan. - BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi primadona di Kota Cilegon. BPKAD terus mencari informasi terkait perusahaan-perusahaan yang akan maupun telah terjadi peralihan hak. Namun karena kondisi pandemi Covid-19 yang memberlakukan PSBB dan WFH, perusahaan perusahaan memberlakukan Protokol Kesehatan yang ketat, BPKAD akan terus menggali potensi terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi terjadi peralihan hak. - Sosialisasi Pajak Daerah terus dilakukan secara berkelanjutan, sosialisasi dilakukan melalui Televisi lokal, radio, media masa, tabloid dan media online. Sosialisasi juga dilakukan secara langsung terhadap wajib pajak daerah. Untuk pengawasan BPKAD melakukan beberapa hal sbb : - Dengan melakukan pengendalian dan pengawasan pajak pengenaan pajak daerah secara rutin terhadap wajib pajak daerah. - Pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah. - Monitoring pembayaran terhadap wajib pajak daerah secara real time terhadap wajib pajak daerah yang telah terpasang Tapping Box maupun Portable Data Terminal.	- Penambahan wajib pajak baru yang dapat menambah pendapatan dari sektor Pajak Daerah, pada tahun 2020 terdapat penambahan 5795 wajib pajak dan objek pajak baru. - Potensi penambahan pendapatan dari kegiatan dimaksud, dengan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para PPAT dan PPATS di wilayah Kota Cilegon. - Memberikan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak daerah tentang perpajakan daerah juga dapat meminimalisir terjadinya kebocoran atau kecurangan melalui kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan monitoring pembayaran.
2.2	Terkait retribusi, DPRD Kota Cilegon merekomendasikan kepada pemerintah Kota Cilegon untuk melakukan upaya-upaya optimalisasi dan implementasi regulasi yang mengatur kebijakan teknis potensi retribusi dan pemakaian kekayaan daerah dengan tertib administrasi yang efektif	- Penyusunan dan Perubahan Peraturan Daerah : - Terlaksananya evaluasi/ revisi atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. - Menyusun peraturan terkait retribusi tera/tera ulang	- Berdasarkan upaya yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum dan wajib retribusi,

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		sebagai komponen retribusi yang dikelola Pemerintah Kota Cilegon, di tahun 2019 telah disusun serta diundangkannya Peraturan Daerah dengan nomor 7 Tahun 2019 Tentang Retribusi Tera/Tera Ulang. - Penyusunan dan Perubahan Peraturan Walikota : - o Perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal. Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota nomor 14 tahun 2020. - o Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020. - Penyesuaian atas perubahan kebijakan Pemerintah Pusat perihal pengelolaan Pendapatan: - o Pelimpahan pemungutan retribusi tera/tera ulang dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah. Sehingga penyesuaian atas fasilitas pendukung pemungutan retribusi tera / tera ulang. - o Pelaksanaan monitoring dan pendampingan terkait Pemungutan Retribusi IMTA, dan pengawasan jumlah Tenaga Kerja Asing di wilayah Kota Cilegon. - o Di tahun 2020 melaksanakan kebijakan penanganan pandemi covid 19, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Dari Segi Mutu Pelayanan, dan Mekanisme Pemungutan Retribusi: - o Senantiasa meningkatkan mutu pelayanan pemungutan	penyesuaian tarif pemungutan berdasarkan kondisi terkini, serta permasalahan yang kerap timbul perlahan dapat terselesaikan. Namun masih terdapat permasalahan yang belum dapat terpecahkan secara langsung oleh Pemerintah Kota Cilegon sehingga perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait. Sehingga Optimalisasi dari komponen retribusi dapat dirasakan dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pencatatan penerimaan retribusi daerah dapat diakses secara real time, dan terlaksananya pencapaian mutu pelayanan dengan prinsip good governance di Kota Cilegon.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		retribusi daerah, - o Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mempercepat pelayanan kepada wajib retribusi. - o Meningkatkan akreditasi salah satu Puskesmas di Kota Cilegon. - o Penetapan SKRD berbasis Sistem Informatika yang telah dilaksanakan oleh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan - o Perencanaan pembayaran Retribusi berbasis Online system di akhir tahun 2020. - o Mengoptimalksan sarana dan prasaran penunjang pemungutan retribusi. - o Meningkatkan pemahaman SDM Pemungut dan Pemeriksa dengan Bimtek dan Diklat.	
3	Bidang Pendidikan :		
3.1	Pemerintah kota cilegon agar memperkuat pengawasan pembangunan infrastruktur sekolah baik spesifikasi, kualitas serta tepat waktu penyelesaian pekerjaan.	1. Menjalin MOU/Kerjasama dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dan Apip (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal supervisi pembangunan infrastruktur sekolah 2. Melakukan mitigasi risiko kontrak konstruksi pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pendidikan	Pengawasan pembangunan infrastuktur sekolah
3.2	Mengoptimalkan fungsi dan kinerja penilik dan PKBM dalam pendataan masyarakat tidak sekolah serta memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah sampai dengan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.	1. Memberikan kenaikan honor tutor PKBM untuk pendataan masyarakat tidak sekolah 2. Penambahan jumlah tutor dalam pendidikan kesetaraan	Optimalisasi pendataan masyarakat tidak sekolah dan memaksimalkan fungsi pendidikan kesetaraan bagi masyarakat putus sekolah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		3. Mendorong tugas dan fungsi penilik dalam sebuah petunjuk teknis dalam hal pendataan masyarakat tidak sekolah 4. Melakukan pengawasan terhadap berjalannya program kesetaraan di LAPAS Kelas II Kota Cilegon	
3.3	Mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk Memberikan Beasiswa Kepada Lulusan SMA Sederajat/D1 bagi masyarakat cilegon dalam bentuk peningkatan skill/keahlian yang dibutuhkan dunia usaha.	Pemerintah Kota Cilegon telah menjalin kerjasama dengan Untirta dan Industri kimia (AMC/CMA) melalui pelatihan <i>vocational training</i> setingkat D-1 pada program Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Industri Kimia (P3TIK), yang mana hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 80% telah diterima bekerja. Di tahun 2020 jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 80 orang yang saat ini masih dalam proses pendidikan.	1. Menyiapkan SDM yang memiliki skill yang dibutuhkan oleh dunia industry 2. Mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon
4	Bidang Kesehatan :		
4.1	Dalam meningkatkan kecepatan layanan rumah sakit dan meningkatkan mutu pelayanan agar mengutamakan pemenuhan alat perlindungan diri, alat kesehatan dan keperawatan yang baru, mengingat bencana wabah virus yang melanda semua wilayah.	Dinkes: Pengadaan APD dan bahan habis pakai yang digunakan yang diperlukan untuk menangani covid19 melalui dana BTT 2020. Selain itu juga terdapat keterlibatan masyarakat dan dunia industry dalam pemenuhan kebutuhan APD dan alat kesehatan habis pakai melalui hibah dan CSR RSUD: Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD), Alat Kesehatan dan Alat Keperawatan RS menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan, khususnya di masa pandemi covid, sebagaimana terlihat pada realiasi anggaran sebagaimana pada tabel di atas, terutama dari sumber dana APBD dan BUN (Hibah dari APBN).	Dinkes: Dukungan logistik dan peralatan dalam penanganan pandemic Covid 19. RSUD: Meminimalkan risiko infeksi pada seluruh pegawai dan pengunjung RS.
4.2	Melakukan pengawasan terhadap distribusi obat dan apd secara berkala.	Pengawasan obat dan bahan Medis Habis Pakai dan Pangan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Cilegon bekerjasama dengan Balai POM Banten sesuai kewenangannya. Pengawasan dilakukan terhadap Rumah Sakit, apotek, klinik, toko obat dan toko retail.	Perlindungan bagi masyarakat terhadap obat dan pangan berbahaya yang beredar.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Selama tahun 2020 telah dilakukan pengawasan terhadap 25 sarana.	
4.3	Pembangunan medical centre di setiap kelurahan sebagai pusat promosi dan edukasi kesehatan masyarakat.	Untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pelayanan dasar dan fungsi promotif dan preventif kesehatan, selain Puskesmas, telah disediakan <i>medical centre</i> ataupun Puskesmas pembantu di setiap Kelurahan. Upaya promotif dan preventif ini mengoptimalkan peran Promotor Kesehatan yang ada di masing masing puskesmas.	Meningkatkan kesadaran dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan
4.4	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.	Anggaran Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang dibiayai Pemerintah atau PBI pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu dari anggaran Rp 7.369.788.000,0 (APBD) dan Rp. 2.000.000.000,0 (DID) atau total sebesar Rp 9.369.788.000 pada tahun 2019 menjadi Rp. 10.414.134.000 pada tahun 2020 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 10,03%. Realisasi pembayaran iuran BPJS PBI pun mengalami kenaikan dari 7.645.400.000 pada tahun 2019 menjadi Rp 9.166.105.000 pada tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 16,59%	Dengan meningkatkan cakupan penjaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS Pemerintah Kota Cilegon meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga mendapat jaminan kesehatan yang layak
5	Bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :		
5.1	Mendorong percepatan pembangunan JLU yang berbasis kesejahteraan masyarakat	Pembangunan konstruksi JLU yang telah dilaksanakan pada TA. 2020 adalah pematangan lahan di lokasi STA 12+385 s/d 12+664 yang berada di Kelurahan Gerem dan Kelurahan Grogol dan Pembentukan Badan Jalan JLU STA 1+700 s/d 2+400 yang berlokasi di Kelurahan Panggung Rawi.	Mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Cilegon Utara.
5.2	Terwujudnya perencanaan pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu pemerintah kota cilegon.	Pada TA. 2020 pembangunan kantor pemerintahan terpadu yaitu Pembangunan Gedung 6 lantai telah dialokasi dan anggaran penyelesaian sehingga target tahun 2020 gedung tersebut sudah dapat digunakan.	Penganggaran penyelesaian Gedung 6 lantai pada TA. 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
5.3	Pembangunan rusun yang belum selesai untuk dievaluasi serta penataan lingkungan dan revitalisasi kawasan kumuh.	Pembangunan Rusun belum dapat dilaksanakan karena belum matangnya lahan untuk Pembangunan Rumah Susun. Pemerintah Kota Cilegon telah mengusulkan Pembangunan Rumah Susun melalui dana APBN dan telah melampirkan readiness criteria dalam usulan tersebut. Namun dalam perjalanannya terkendala lahan yang belum siap/matang. Solusinya adalah dengan mengusulkan kembali melalui sumber anggaran APBN atau APBD Provinsi.	Pembangunan rusun sebagai salah satu pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah tinggal layak
5.4	Pengentasan banjir melalui normalisasi sungai di seluruh titik wilayah rawan banjir di setiap kecamatan se-kota cilegon, dan optimalisasi pembangunan tandon-tandon di setiap wilayah kecamatan se kota cilegon.	Pada TA. 2020 terdapat 3 lokasi yang dilakukan kegiatan pembangunan tandon yaitu tandon Sukmajaya, Tandon Cibuntu dan Tandon Bulakan. Tandon Sukmajaya sudah dapat berfungsi walaupun belum optimal. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tandon Cibuntu adalah Pembangunan Jalan Akses. Sedangkan kegiatan pada Tandon Bulakan adalah Pematangan Jalan Akses dan Pembangunan Fisik Tandon (DAM)	Fokus pelaksanaan pembangunan tandon untuk mengurangi potensi banjir di Kec. Jombang, Kec. Cibeber dan Kec. Ciwandan
5.5	Pembangunan kolam retensi dan normalisasi saluran- saluran drainase.	Pembangunan Kolam Retensi difokuskan pada pembangunan tandon sedangkan Normalisasi saluran melalui kegiatan pemeliharaan saluran/drainase dan Normalisasi Saluran. Pada Pemeliharaan saluran telah ditangani 34 lokasi dengan Panjang 9 km dan Normalisasi saluran/drainase pada lokasi Saluran PGRI dan Sungai Kedungingas	Untuk mengurangi potensi banjir di beberapa titik melalui kegiatan pemeliharaan saluran/drainase dan normalisasi saluran/drainase
6	Bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman :		
6.1	Mendorong terlaksananya pembangunan hutan kota.	Dalam hal mendorong terlaksananya pembangunan hutan kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengadaan hutan kota pada tahun 2018 di Kelurahan Tegal Ratu. Perlu diketahui bahwa hutan kota di Cilegon seluruhnya berada di Kecamatan Cibeber, berupa jalur hijau di Blok F Jl. Belibis dan Jl. Garuda Perumahan Bumi Cibeber Kencana seluas 0,45 Ha, Jalan Industri (depan Kantor ADB PT. Krakatau Steel) seluas 5,8 Ha, Belakang Perumahan Sumampir Barat seluas 2 Ha, Sejajar Jl. Jend Sudirman	Pembangunan hutan kota bertujuan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, dan estetika sehingga terjaganya iklim mikro pada kawasan permukiman dan industri.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		seluas 3,65 Ha, depan kampus Untirta Jl Jend Sudirman seluas 0,6 Ha, Belakang Kantor Pemerintah Kota Cilegon seluas 2,1 Ha, Jl Raya Anyer mulai dari ex PT. IMPI s/d Pasar Wisata Cigading seluas 8,85 Ha.	
6.2	Perlunya peninjauan kembali adanya industri ditengah pemukiman warga masyarakat.	Peninjauan kembali adanya industri di tengah permukiman harus melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder agar penegakan peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon dapat diterapkan.	Penegakan Aturan Tata Ruang Wilayah
6.3	Penataan estetika kota antara pembangunan publik, taman-taman, taman tematik, penataan jalan-jalan protokol, penataan dan pengendalian reklame.	Penataan estetika kota terus ditingkatkan terutama pada taman-taman yang sudah dibangun seperti Alun-alun kota, taman layak anak, taman simpang dan median jalan di jalan protokol dan Jalan Lingkar Selatan	Menambah estetika kota dan mempercantik wajah Kota Cilegon
6.4	Pengembangan kawasan industri kecil.	Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040, Pengembangan Kawasan Industri kecil telah direncanakan di kawasan JLU yaitu di Kecamatan Purwakarta 8,1 ha dan Kecamatan Jombang seluas 61,28 ha	Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Cilegon Utara.
6.5	Peningkatan luas areal kawasan ruang terbuka hijau	Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kab yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Luas ruang terbuka hijau yang sudah dipelihara adalah seluas 27,63 ha.	Untuk memenuhi standar RTH Publik seluas 20 % dari luas wilayah kota
6.6	Pembangunan sanitasi kota.	Sanitasi kota terdiri diantaranya dari pengelolaan limbah domestik (lumpur tinja, limbah cair rumah tangga, dan sampah). Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sudah ada sejak 2015 yang dibangun menggunakan anggaran Kementerian PU Dirjen Cipta Karya, dan Pemerintah Kota Cilegon telah memiliki 1 unit kendaraan lumpur tinja. Namun hingga saat ini pengelolaan IPLT ini masih terkendala kelembagaan (belum ditetapkan pengelolanya). Pemerintah Kota Cilegon sudah memiliki TPSA (tempat pemrosesan sampah akhir) seluas 10 hektar yang hingga saat ini operasional sampah masih terus ditingkatkan.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
7	Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		
7.1	Penyediaan sarana prasarana utama pencegahan dan penanggulangan kebakaran terutama alat pencegah dan penanggulangan kebakaran (kendaraan pemadam/fire hydrant/mini damkar/apar);	Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana utama pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sepanjang tahun 2020 telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung 2. Pengadaan Peralatan Damkar melalui pemasangan hidrant kota (1 titik di Jl. KH TB Ismail, 2 titik di JLS, 1 titik di lingk. Sumur Menjangan) 3. Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Damkar dan Rescue 4. Drill Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Untuk dapat mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.
7.2	Penindakan pelanggaran peraturan daerah dan/atau perundang-undangan agar dilaksanakan secara rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satpol pp	Dilaksanakannya penguatan koordinasi pelaksanaan dengan pihak kepolisian di Kecamatan sampai dengan level kelurahan dengan lebih memberadayakan Linmas serta menyertakan pihak Kejaksaan dalam pengeksekusian terhadap pelanggaran Tipiring.	Agar tercipta pra dan pasca kegiatan yang berkelanjutan guna terciptanya konsistensi penerapan penindakan terhadap pelanggar perda/per-UU-an.
7.3	Peningkatan fungsi dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam mendukung tugas dan fungsi satpol pp.	Menindaklanjuti dengan membuat rencana aksi/road map dimana awal pelaksanaan menghitung jumlah PPNS yang ada serta menghitung kebutuhan berdasarkan perhitungan rasio jumlah penduduk dengan jumlah PPNS, sehingga didapat jumlah PPNS yang ideal bagi Kota Cilegon.	Ratio kebutuhan yang sesuai dengan permasalahan dilihat geografi dan monografi daerah.
8	Bidang urusan sosial :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
8.1	Pemutakhiran database keluarga penerima manfaat maupun database penerima jaminan sosial, agar dilakukan secara intensif serta melibatkan unsur ketua RT/RW di tiap kelurahan.	- o Melakukan verifikasi dan validasi setiap tahun - o Melakukan Musyawarah kelurahan data yang melibatkan kecamatan, RT/RW, kelurahan dan tokoh masyarakat Untuk data penerima jaminan sosial diverifikasi ulang oleh pendamping program baik PKH, Jamsosratu, dan JSCM agar tidak terjadi double penerima dari ke tiga program tersebut.	Agar mendapatkan data yang valid dan akurat serta update
8.2	Peningkatan fungsi dan peran panti rehabilitasi sosial secara terpadu.	- o Nomenklatur tempat rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial adalah rumah singgah/pondok sosial karena panti merupakan kewenangan provinsi. - o Pelayanan klien di rumah singgah - o Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran pondok sosial, semua pembinaan kapasitas dan keterampilan bagi PMKS di lakukan di pondok sosial. - o Membuat usulan DED tahun 2021 untuk pemagaran	- o Rumah singgah merupakan bagian standar pelayanan minimal bidang sosial - o Pondok sosial menjadi pusat pendidikan dan keterampilan bagi PMKS Pengamanan aset pondok sosial.
8.3	Perluasan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.	- Tahun 2020 adanya perluasan penerima manfaat PKH dari pusat 5.384 KK. - Adanya Jaminan sosial dari provinsi (Jamsosratu) sejumlah 1.411 KK dan JSCM 1.760 KK sehingga ada penambahan sebesar 237 KK.	Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui program jaminan sosial baik bersumber dari APBN, APBD I dan APBD Kota .
8.4	Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pelatihan keterampilan.	- Dilakukan pembentukan KUBE bagi fakir miskin sebanyak 7 Kelompok - Peningkatan kapasitas anggota KUBE untuk meningkatkan pengembangan usaha sebanyak 162 orang Pada tahun 2021 terdapat Pelatihan keterampilan bagi PMKS di Puskesmas sebanyak 30 Orang.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
9	Bidang urusan tenaga kerja :		
9.1	Untuk menekan angka pengangguran, kepada pemerintah kota cilegon dalam hal ini disnaker agar memperkuat pengawasan dalam perekrutan tenaga kerja di kota cilegon, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak provinsi.	Dinas tenaga kerja terus meningkatkan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan kepada seluruh industri, sehingga hampir seluruh lowongan kerja dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Koordinasi dengan pihak Provinsi terus dijalin, khususnya terkait pengawasan ketenagakerjaan, yang dalam hal ini merupakan kewenangan Provinsi.	Info lowongan kerja menjadi upaya penting untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja di Kota Cilegon. Secara regulasi, hal ini diatur pada Perda Provinsi Banten no 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan diantaranya terkait wajib lapor lowongan.
9.2	Pemerintah kota cilegon membuat program unggulan serta mensosialisasikannya melalui media sosial bagi tenaga kerja lokal yang terkena phk.	Pada masa pandemi covid-19 Pemerintah meningkatkan kuantitas pelatihan, baik bersumber dana anggaran daerah maupun pusat, khususnya bagi tenaga kerja yang terkena dampak covid, baik berupa PHK ataupun dirumahkan sementara. Pasca pelatihan, peserta pelatihan diberikan bantuan alat, sehingga mereka dapat melanjutkan sebagai wirausaha mandiri.	Pelatihan skill berbasis wirausaha mandiri merupakan upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka yang cenderung meningkat di masa pandemi covid-19 ini.
9.3	Perlu adanya solusi terkait banyaknya industri yang melakukan phk.	Untuk meminimalisir pengurangan tenaga kerja oleh Pihak Industri, selain kebijakan pengurangan pajak, Pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak/retribusi. Selain itu, upaya mediasi terus ditingkatkan, agar seluruh perselisihan PHK dapat terselesaikan sehingga pekerja mendapatkan haknya.	
9.4	Perlu adanya sosialisasi dan informasi terkait program pemerintah dalam hal sertifikasi keahlian, mekanisme dan pembiayaannya.	Pemerintah menginformasikan secara terbuka terkait informasi pelatihan ketenagakerjaan, baik melalui webiste, facebook maupun media elektronik. Untuk menjamin kualitas kompetensi, dilakukan juga sertifikasi keahlian oleh lembaga independent.	Hasil dari kegiatan sertifikasi ini yaitu masyarakat kota cilegon khususnya peserta pelatihan mendapat bekal guna bisa bersaing di dunia kerja.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pada Tahun 2019 dan 2020 sudah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sertifikasi operator forklift dengan kuota peserta sebanyak 80 orang.	
9.5	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja yang bekerjasama dengan pihak industri dan perguruan tinggi negeri dan pemerintah kota cilegon.	Disnaker Kota Cilegon melakukan / menjalin Perjanjian Kerjasama dengan Untirta untuk pemberian beasiswa program Pendidikan dan pelatihan teknisi industry kimia (D1 AMC) dan mulai dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021.	Program ini menyiapkan 40 siswa yang memiliki kompetensi teknisi industry sebanyak 40 pencari kerja.
9.6	Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah.	Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Menyiapkan para pencari kerja dengan dilatih agar memiliki skill dan kompetensi agar bisa bersaing di pasar kerja.	Hasil dari kegiatan ini yaitu para pencari kerja memiliki bekal kompetensi / skill yang bisa digunakan oleh para pencari kerja untuk berwirausaha dan atau mendapatkan pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
9.7	Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta mendorong produktivitas.	Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Menyiapkan para pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha dan dilatih beberapa jenis pelatihan yang berbasis kewirausahaan.	Hasil dari kegiatan ini yaitu para pencari kerja memiliki bekal kompetensi / skill yang bisa digunakan oleh para pencari kerja untuk berwirausaha dan atau mendapatkan pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
10.	Bidang urusan lingkungan hidup :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
10.1	Sinergitas industri yang berpihak terhadap lingkungan.	Dalam upaya meningkatkan sinergitas industri yang berpihak terhadap lingkungan, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2020 telah melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Komulatif 2. Pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 Evaluasi dan sosialisasi pengelolaan limbah B3	Upaya tersebut dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
10.2	Terwujudnya kajian penelitian dampak dari polusi industri terhadap kesehatan masyarakat	Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pencegahan polusi industri kesehatan masyarakat melalui : 1. Penyusunan kelas badan air penerima 2. Penyusunan daya dukung daya tampung lingkungan hidup Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup	Upaya tersebut dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
10.3	Mewujudkan bank sampah di seluruh wilayah Kecamatan se-Kota Cilegon.	Dalam upaya mewujudkan bank sampah di seluruh wilayah Kecamatan se-Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon sepanjang tahun 2020 telah melakukan kegiatan sebagai berikut : Bank sampah hingga tahun 2020 telah dibentuk dan dibina oleh masyarakat dan swasta sebanyak 12 unit, oleh pemerintah dan sekolah sebanyak 23 unit.	Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai upaya pengurangan sampah.
10.4	Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan	Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Institusi / Komulatif	Upaya tersebut dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
10.5	Pengelolaan sampah terpadu di seluruh wilayah kota cilegon.	Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengelolaan sampah terpadu di seluruh wilayah Kota Cilegon melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Melalui pengelolaan sampah di TPA, pengadaan lahan dan pemeliharaan TPA 2. Pembentukan dan pembinaan TPS3R sebanyak 4 unit	Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan sampah.
11	Bidang urusan perhubungan :		
11.1	Penataan izin trayek angkutan umum yang terintegrasi.	Kajian Terkait Penataan Integrasi Trayek Angkutan Umum	Untuk optimalkan trayek angkutan umum yang terintegrasi agar seluruh Kota cilegon dilayani oleh angkutan umum
11.2	Pengelolaan dan pendataan juru parkir di tepi jalan umum Kota Cilegon.	Pendataan juru parkir sudah dilakukan di jalan umum untuk meningkatkan pengelolaan perparkiran di Kota Cilegon	• Untuk Meminimalisasi adanya pungli dan meningkatkan potensi retribusi parkir
11.3	Tindaklanjut terkait trans mandiri/ sarana angkutan umum massal (saum) yang saat ini sudah tidak berfungsi dengan semestinya.	• Sudah dilakukan pembahasan dengan pihak operator bis (DAMRI) untuk mengelola dan mengoperasikan SAUM di Kota Cilegon	Untuk meningkatkan pelayanan transportasi di Kota Cilegon
11.4	Manajemen rekayasa lalu lintas dan parkir yang tertib, aman dan lancar.	• Sudah dilakukan evaluasi terhadap tingkat pelayanan jaringan jalan dan traffic management terhadap jaringan jalan di kota cilegon • Pengembangan parkir off street	• Mengembalikan fungsi dan kapasitas jalan sebagai tempat lalu lintas kendaraan Mengurangi kemacetan lalu lintas
12	Bidang urusan komunikasi dan informatika :		

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
12.1	Optimalisasi smart city yang berbasis keterbukaan informasi publik serta Membangun integrated city control yang mampu memantau seluruh wilayah kota cilegon yang mengakomodir layanan elektronik government dalam hubungan government to government, government to bussines, goverment to citizen	Optimalisasi Smart City sudah dilakukan dengan kegiatan pendukung antara lain Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan SPBE, Pengembangan Sistem Pemantauan Terintegrasi berbasis teknologi informasi dan Pengelolaan Panggilan Darurat Terpadu (Call center 112)	Untuk Mempercepat dan mengoptimisasi pelayanan kepada masyarakat diseluruh Kota Cilegon
13	Bidang urusan penanaman modal :		
13.1	DPTMPTSP agar menyajikan perijinan yang cepat dan mudah sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dengan penyempurnaan regulasi dan perizinan yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembahasan perubahan regulasi baik peraturan perundang-undangan maupun regulasi turunannya	Proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan regulasi yang ada baik peraturan perundang-undangan maupun regulasi turunannya.
13.2	Melakukan pengembangan peta potensi dan peluang investasi	Tahun 2020 dilaksanakan identifikasi potensi investasi dan tahun 2021 akan dilaksanakan pembuatan peta potensi investasi kota cilegon	Membuat perencanaan identifikasi serta peta potensi investasi kota cilegon
13.3	Promosi investasi dan sosialisasi pelayanan perizinan diberbagai media	Pada tahun anggaran 2020 dpmptsp ikut serta dalam promosi investasi tingkat nasional dan melakukan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan di media cetak, radio dan website	Membuat perencanaan kembali tentang promosi investasi dan informasi pelayanan perizinan yang mengalami reconfusing Anggaran
14	Bidang urusan kebudayaan		
14.1	Mendorong bebasan banten sebagai kurikulum muatan lokal, menggali potensi dan pengembangan kesenian tradisional, serta pemberian dukungan	Dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait implementasi bebasan banten menjadi muatan lokal sekolah di Kota Cilegon	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	untuk pelaku seni untuk mengaktualisasi apresiasi seni dalam pembinaan seni	Dukungan untuk para pelaku seni dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada sanggar seni, agar pelaku seni dapat mengaktualisasikan potensinya khususnya dalam pengembangan kesenian tradisional	
15	Bidang Pariwisata :		
15.1	Mendorong pemerintah kota cilegon menjadikan pulau merak kecil menjadi obyek wisata laut, serta melakukan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di Kota Cilegon	Sebagai OPD teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah berupaya dalam menjadikan Pulau Merak Kecil sebagai objek wisata laut/bahari, dimana upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan terhadap komunitas lingkungan dan masyarakat disekitar Pulau Merak kecil; serta sudah dan sedang berupaya dalam hal pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, dimana upaya yang sudah dilakukan yaitu seperti penataan pada ODTW Situ Rawa Arum dalam bentuk penyediaan gazebo, auning paving block dan sebagainya	Penataan pada ODTW Pulau Merak Kecil secara fisik tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon melalui OPD teknis karena terkendala HPL dan zonasi sebagai kawasan konservasi; Pengembangan sarana dan prasarana perlu dilakukan secara simultan dengan dukungan anggaran yang memadai agar tidak mengalami kendala dalam realisasi pelaksanaannya
16	Bidang urusan perdagangan :		
16.1	Optimalisasi penataan pasar keranggot dan pasar merak.	Pada Tahun Anggaran 2020 kami sudah merencanakan Penataan Pasar dengan beberapa kegiatan seperti Di Pasar Kranggot meliputi kegiatan : • Pembangunan Tempat Parkir Terbuka Permanen; • Pembangunan Lanjutan Tutup Saluran; • Normalisasi Saluran;	Meningkatkan tata kelola dan pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Pemeliharaan Hanggar. <u>Namun kegiatan tersebut mengalami Refocusing atau pengalihan anggaran kedalam Program Pemulihan Ekonomi</u> Meskipun demikian, di 2020 Pemkot Cilegon mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) tambahan di pertengahan tahun yang dimanfaatkan untuk penataan dan peningkatan sarpras perdagangan dan kelengkapan pedagang di pasar Blok F dan juga pasar cikerai. Kemudian di Pasar Merak sudah disediakan petugas kebersihan sebanyak 20 Orang untuk meningkatkan kebersihan pasar.	
16.2	Mendorong terwujudnya pasar grogol.	Dalam rangka mendorong terwujudnya Pasar Grogol Disperind Kota Cilegon melalui Bidang Pasar telah merencanakan - Pembangunan Tempat Parkir Terbuka; - Pembangunan Lahan Pasar yaitu akses jalan masuk ke dalam Pasar Grogol. Namun Kegiatan tersebut juga mengalami Refocusing Anggaran.	Meningkatkan tata kelola pasar tradisional
16.3	Menumbuhkembangkan industri padat karya	Menumbuh kembangkan Industri Padat Karya melalui beberapa Program dan Kegiatan yang ada di Bidang Perindustrian seperti : - Kegiatan Pembinaan IKM Pembuatan Batu Bata; - Pemanfaatan limbah logam melalui kegiatan Pelatihan Pembuatan Golok Cilegon dan Peralatan Lainnya yang berbahan logam; Mengadakan Bimbingan Teknis kepada Tukang Las dan memberikan bantuan berupa Kendaraan Cator untuk Las Keliling.	Menumbuhkembangkan industri padat karya melalui para pelaku IKM di Kota Cilegon

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
16.4	Penguatan pemberdayaan ekonomi lokal	Strategi yang dijalankan dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Lokal yaitu melalui serangkaian kegiatan di Bidang Perindustrian, salah satu contoh dengan - Kegiatan Pemanfaatan limbah logam melalui kegiatan Pelatihan Pembuatan Golok Cilegon dan Peralatan Lainnya yang berbahan logam; - Kegiatan Pembinaan IKM Pembuatan Batu Bata;	Berupaya menjalankan perekonomian lokal dengan memberdayakan para pelaku IKM di Kota Cilegon
16.5	Pengelolaan pasar tradisional yang sehat dan bersih	Sebagian besar anggaran pengembangan pasar tradisional <i>direfocussing</i> , namun di pertengahan 2020 melalui Dana Insentif Daerah (DID) tambahan, dilakukan penataan dan peningkatan sarpras perdagangan di pasar Blok F. Dan penambahan sarpras perdagangan di pasar cikerai yang diresmikan dan sudah beroperasi sejak akhir 2020.	Meningkatkan tata kelola pasar tradisional
16.6	Penerapan konsep one village one product dalam pengembangan umkm.	Program OVOP merupakan salah satu Program atau Kegiatan yang berasal dari Kementrian Perindustrian RI, sedangkan Program ini dilaksanakan 2 Tahun sekali dan yang terakhir pada Tahun Anggaran 2019 oleh Disperindag Provinsi Banten.	Membuat perencanaan kegiatan OVOP pada tahun berikutnya.
17	Bidang urusan administrasi pemerintahan		
17.1	Agar pemerintah Kota Cilegon melakukan transparansi data penerima hibah/bantuan sosial	Data obyek penerima hibah bansos sudah menjadi bagian dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2021 dan kedepannya, yang setiap tahun di <i>upload</i> /dipublikasikan melalui laman resmi Bappeda Kota Cilegon (bappeda.cilegon.go.id)	Terciptanya transparansi informasi bagi masyarakat.
17.2	Pemanfaatan JDIH perlu ditingkatkan terutama dalam rangka inventarisasi dan kodifikasi aturan hukum yang berlaku dan yang sudah dicabut. Tidak hanya dalam bentuk cd ataupun buku, sehingga dalam mencari informasi keterkaitan ketentuan hukum yang berlaku masyarakat (termasuk	Peningkatan JDIH sudah dilakukan dengan adanya JDIH berbasis website (jdih.cilegon.go.id), sehingga dapat diakses dengan mudah melalui mobile atau internet. Informasi yang disediakan juga termasuk status hukum dari produk hukum yaitu peraturan	Terciptanya target pemanfaatan JDIH yang logis yang disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	masyarakat kurang mampu) atau lembaga/instansi lain di dalam dan luar pemerintah kota cilegon dapat mengaksesnya dengan mudah;	daerah (perda), peraturan wali kota (perwal) dan surat keputusan wali kota).	yang ada serta anggaran yang ada.
17.3	Mendorong pemerintah kota cilegon dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan secara sistematis pada bagian organisasi dan reformasi birokrasi terutama dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang pelayanan publik;	Setiap tahun Bagian Organisasi melakukan proses pembinaan pada Unit Pelayanan Publik (UPP) yang kemudian dirangkaikan dengan proses Kompetisi Pelayanan Publik pada level UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Harapannya hasil evaluasi yang juga dijadikan dasar penilaian dalam Kompetisi Pelayanan Publik, menjadi bahan bagi UPP dan juga stakeholder lainnya untuk mendukung UPP berbenah diri dan memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Peningkatan kepuasan masyarakat dibidang pelayanan publik.
17.4	Dalam pelaksanaan pelayanan publik hendaknya memberikan etika pelayanan yang baik agar masyarakat merasa benar-benar terlayani kebutuhannya;	Kompetensi petugas layanan menjadi salah satu fokus dalam evaluasi UPP, karena hal tersebut juga menjadi salah satu komponen dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik dan juga Indeks Kepuasan Masyarakat. Tindak lanjut yang sudah dilakukan adalah pembinaan pemahaman mengenai aspek regulasi dari pelayanan publik. Direncanakan petugas layanan akan dilakukan pembinaan secara teknis terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melibatkan narasumber dari praktisi pelayanan yang profesional	Terciptanya etika pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai etika/estetika pelayanan publik.
17.5	Mendorong pemerintah kota cilegon untuk melakukan upaya-upaya pengelolaan mitigasi bencana yang optimal.	Untuk mendorong Pemerintah Kota Cilegon dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan mitigasi bencana yang optimal, Pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Penanganan tematik kawasan bencana melalui Pelayanan Informasi Rawan Bencana 2. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 3. Penguatan kebijakan dan kelembagaan 4. Pengkajian risiko dan perencanaan 5. Drill Penanggulangan Kebencanaan	Untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
17.6	Evaluasi terkait daftar penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan, agar diadakan pemutakhiran data karena setiap tahun yang mendapatkan bantuan adalah orang yang sama dan tidak ada perubahan;	Telah dilaksanakan pemutakhiran data bagi calon/penerima dana bantuan.	Agar terciptanya transparansi dan pemerataan penerima bantuan bagi masyarakat Kota Cilegon.
17.7	Melakukan evaluasi sumber daya manusia pada bagian pengadaan barang dan jasa terhadap proses pengadaan lelang barang dan jasa di kota cilegon	Telah dilakukan evaluasi sumber daya manusia di Bagian Barjas secara berkala setiap tahunnya.	Guna terciptanya SDM Bagian Barjas yang berdedikasi proposional dan professional dalam melaksanakan proses pengadaan lelang barang dan jasa di Kota Cilegon.
17.8	Optimalisasi pelayanan publik pada seluruh strata pemerintahan (kota, kecamatan, kelurahan).	Penerapan pelayanan publik yang optimal dengan memberikan alokasi anggaran dan kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan.	Agar terfasilitasinya implementasi optimalisasi pelayanan publik di Kota khususnya di Kecamatan dan Kelurahan.
18	Bidang urusan perencanaan :		
18.1	Memaksimalkan perencanaan pembangunan yang berbasis hasil reses DPRD.	1. Mengoptimalkan penggunaan SIPD dalam menyusun dokumen perencanaan berbasis hasil Reses DPRD 2. Menyusun mekanisme yang jelas terkait sinkronisasi hasil reses DPRD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Hasil Reses DPRD dengan dokumen perencanaan yang seringkali tidak optimal pengkajian dan pengakomodirannya
18.2	Membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis <i>e-government</i> khususnya pada bidang perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik	1. Sistem yang digunakan pada proses Perencanaan dan Penganggaran saat ini adalah SIPD yang merupakan sistem mandatory dari Kemendagri, maka terkait dengan transparansi dan akuntabilitas mau tidak mau harus dilakukan pengusulan <i>interface</i> atau layanan khusus pada	Belum optimalnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		SIPD ke Kemendari yang memungkinkan aktifitas pada sistem dapat dilihat langsung oleh masyarakat 2. Akan lebih mengoptimalkan software pelayanan public SIMAPAN di Kecamatan dan Kelurahan.	Terciptanya data terstruktur dan sinergis (one data one city) di stara Kelurahan, Kecamatan dan OPD Teknis (seperti : DKCS/Dinsos).
19	Penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum :		
19.1	Mendorong peningkatan kerja sama antara kota cilegon dengan pemerintah daerah lainnya baik dalam ataupun luar negeri dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan terlaksana secara berkesinambungan	Intensitas penerapan kerjasama antara Kota Cilegon dengan Pemerintah Daerah Lainnya secara berkala setiap tahunnya.	Terciptanya harmonisasi dan sinergitas dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan suistanable/berkesinambungan sesuai dengan target yang telah disepakati didalam kerjasama.
19.2	Mengedepankan inovasi daerah yang menyederhanakan jalur birokrasi pelayanan publik dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam rangka mengurangi rentang waktu pelayanan publik yang diselenggarakan.	Pemerintah Pusat melalui KemenPAN RB mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap Kabupaten Kota, di dalam rangka membuat proses pelayanan piblik lebih baik dengan mengintegrasikan semua jenis layanan pada satu tempat, termasuk kerjasama dengan instansi vertikal. Tahun 2021 akan dilakukan proses pengkajian bagaimana format MPP yang sesuai dengan kebutuhan Kota Ciilegon. tentunya bukan sekedar mebangun MPP tapi juga bagaimana bisnis proses yang baik dan juga komitmen semua pihak yang terkait	Terciptanya inovasi yang menyederhanakan jalur birokrasi pelayanan publik
19.3	Dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah Kota Cilegon agar mengoptimalkan seluruh perangkat daerah dalam mendeteksi dini permasalahan/konflik sosial yang berkembang di masyarakat	Ditindaklanjuti dengan melibatkan unsur keamanan lainnya seperti intel Kepolisian dan TNI, guna didapatkan data yang valid dan peta deteksi dini permasalahan/konflik dapat dipetakan sesuai dengan zonasi prioritas penanganannya.	Agar terciptanya penindakan/ pencegahan/preventif /promotif terhadap permasalahan konflik secara efektif, efesien serta sesuai sasaran prioritas yang telah termapping (terprioritaskan).

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
20	Rekomendasi lainnya :		
20.1	Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan warnasari serta pengamanan aset-aset BUMD sesuai aturan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pentingnya tenaga-tenaga profesional yang dapat mengoptimalkan pendapatan dalam pengelolaan BUMD yang dimiliki oleh Kota Cilegon.	Berkenaan dengan Pembangunan Pelabuhan Warnasari, Pemerintah Kota Cilegon Akan melakukan pengkajian kembali terhadap Proposal Kerjasama Operasional dari calon investor. Pada tahap ini akan dikaji kembali seberapa besar nilai ekonomis dan besaran potensi maksimal yang bisa tergali dari aset Pemerintah Daerah berupa lahan warnasari seluas 45 Ha. Yang akan dikerjasamakan secara operasional dengan investor, akan dikaji juga resiko-resiko bisnis yang mungkin terjadi di kemudian hari disamping juga kajian secara yuridis baik itu berkenaan dengan regulasi pengelolaan BUMD, Regulasi Kepelabuhanan, Regulasi Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta regulasi lainnya yang mengikat. Bila dinyatakan "Clean & Clear" dan menguntungkan kedua belah pihak, tentunya progress pembangunan Pelabuhan Warnasari akan bergerak ke arah yang lebih cepat.	Terciptanya target yang terukur guna terakselasasinya progress kebutuhan perencanaan yang diharapkan.
20.2	Perlu adanya evaluasi laporan rugi laba BUMD melalui pejabat atau perangkat daerah yang berwenang dalam tugas dan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap BUMD.	Secara prinsip Evaluasi Kinerja BUMD dilakukan dengan menilai kinerja atas 4 aspek. Diantaranya; Aspek Keuangan, Aspek Pelayanan, Aspek Operasional dan Aspek Administratif. Evaluasi laporan atas rugi laba merupakan salah satu indikator penilaian pada aspek keuangan dengan sub Aspek Profitabilitas. Bagian Perekonomian dan Pembangunan selaku Pembina Teknis secara rutin telah melakukan evaluasi atas aspek tersebut melalui penilaian atas indikator kunci Return on Investment (ROI), Return on Asset (ROA) atau Return on Equity (ROE). Penilaian-penilaian tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Modul Penilaian Kinerja BUMD yang telah disusun oleh Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun untuk	Optimalisasi kinerja BUMD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2019 (N-1)	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		BUMD PDAM Cilegon Mandiri, dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk PT. BPRS Cilegon Mandiri dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/29/DPbS Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah. Kedepannya Indikator, Evaluasi dan Penilaian Kinerja ini akan dibuatkan Regulasinya dalam bentuk Peraturan Walikota Cilegon sebagai Tools untuk mengendalikan, mengevaluasi dan menilai Kinerja BUMD Milik Kota Cilegon secara utuh setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar Perjanjian Kinerja Direksi dengan Walikota Cilegon di setiap periode kepengurusan	
20.3	Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar tidak lagi terjadi gagal lelang perlu skema proses lelang yang efektif dan efisien.	Akan dilaksanakan skema awal verifikasi setiap awal tahun dalam tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh OPD (sudah dimulai di akhir 2020 dan awal 2021)	Guna terciptanya data yang valid dan <i>up to date</i> sesuai eskalasi kebutuhan dan arahan kebijakan, sehingga kegagalan lelang dapat diminimalisir.

Bab 4 : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan & Penugasan

Pengalokasian dana tugas pembantuan dan penugasan dilaksanakan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN dengan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, serta dipandang apabila sebagian tugas-tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah tersebut akan lebih efektif dan efisien.

Salah satu contoh Tugas Pembantuan dan Penugasan adalah pelimpahan tugas dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pada tahun 2020, Kota Cilegon tidak memperoleh Tugas Pembantuan & Penugasan dari Pemerintah Pusat, sehingga pada Sub Bab ini tidak akan dijabarkan lebih jauh terkait dengan Tugas Pembantuan dan Penugasan.

Bab 5 : Penutup

Tahun 2020 merupakan tahun yang spesial, disamping merupakan tahun terakhir sebelum tahun transisi menuju periode RPJMD Kota Cilegon yang baru, juga merupakan tahun yang penuh dengan tantangan dan dinamika dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan juga Kota Cilegon. Pandemi covid-19 yang ditetapkan sebagai darurat bencana non alam nasional memberikan pukulan telak dan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Target pendapatan daerah diubah secara radikal dan masif, untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan pajak daerah akibat penurunan aktivitas pelaku bisnis dan ekonomi, yang tentu saja berdampak pada alokasi belanja yang juga harus direduksi sekaligus dialihkan untuk membiayai penanganan dampak covid-19 pada aspek kesehatan, pemenuhan jaringan pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi. Implikasi dari kondisi tersebut berakibat berbagai target-target pembangunan harus dilakukan penyesuaian, atau bahkan ditunda (*reschedule*) pelaksanaannya.

Pun demikian, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di sepanjang tahun 2020 secara terlaksana dengan cukup baik, meskipun pandemi covid-19 memberikan dampak hampir di seluruh aspek kinerja pembangunan. Dari aspek kinerja makro pembangunan serta kinerja program dan kegiatan, pencapaian di tahun anggaran 2020 cukup baik meskipun ada beberapa indikator pembangunan yang terpengaruh pandemi covid-19 di sepanjang tahun 2020, seperti tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

Dari aspek tolok ukur pencapaian kinerja indikator makro pembangunan, sampai dengan Tahun 2020 Kota Cilegon memperoleh capaian yang baik pada aspek pertumbuhan ekonomi (laju PDRB dan investasi) dan berbagai aspek kesejahteraan sosial seperti indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan. Pun demikian, pada aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sedikit meningkat dalam dua tahun terakhir (2019-2020), diakibatkan resesi industri di Kota Cilegon yang mengakibatkan terjadinya pemutusan tenaga kerja secara masif di pertengahan tahun 2019, serta penurunan aktivitas perekonomian di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 yang juga terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2020 tentunya merupakan wujud tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI) Wali Kota Cilegon tahun sebelumnya (2019 dan 2018).

Berbagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut sebagian besar sudah dijadikan acuan dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pencapaian kinerja program dan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2020, dan juga sebagai salah satu instrumen atau acuan dalam menyusun kebijakan dokumen perencanaan tahun 2021 (yang disusun di tahun anggaran 2020).

Dari aspek program dan kegiatan, pencapaian hingga tahun 2020 juga sebagian besar menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Pada aspek keselarasan pembangunan, kebijakan implementasi program dan kegiatan Pemerintah Kota Cilegon selalu fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran masyarakat secara inklusif demi mencapai target-target pembangunan dan tentunya juga berkontribusi pada pencapaian target pembangunan Provinsi Banten dan nasional. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Cilegon mengembangkan konsep pembangunan kewilayahan (dana pembangunan wilayah kelurahan) yang mendorong pembangunan di berbagai sektor strategis melalui pendekatan-pendekatan mikroskopis, namun diduplikasi secara masif di seluruh wilayah Kota Cilegon, yaitu di 43 kelurahan. Penerapan program DPWKel ini turut membantu pencapaian berbagai target pembangunan sektoral di Kota Cilegon.

Berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan serta capaian yang diraih oleh Pemerintah Kota Cilegon turut menghasilkan penilaian atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Cilegon dengan berbagai sudut pandangan instrumen penilaian yang rata-rata tercapai dengan kriteria Baik dan/atau sangat tinggi. Hal tersebut merupakan buah kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Cilegon, unsur legislatif (DPRD), *stakeholders* dan masyarakat sebagai suatu bentuk kolaborasi yang harus terus dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti pada tahun-tahun mendatang. Kebijakan dan program yang telah dan akan dilaksanakan harus tetap berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan entitas-entitas yang mendukungnya, serta meningkatkan integrasi secara sinergis dari seluruh unit di Pemerintahan Kota Cilegon guna mencapai kinerja yang optimal.

Pemerintah Kota Cilegon secara terbuka menerima masukan dan rekomendasi terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertuang dalam dokumen LKPJ Wali Kota Cilegon Tahun 2020 ini. Adapun hasil rekomendasi terhadap LKPJ ini secara khusus akan kami jadikan salah satu input penting demi meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara inklusif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Sebagai penutup, dengan disusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Cilegon Tahun 2020 ini, diharapkan seluruh proses dan *outcome* pelaksanaan pembangunan Kota Cilegon sepanjang Tahun Anggaran 2020 dapat tergambarkan dengan baik, sebagai salah satu instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Kota Cilegon ke depannya, khususnya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara inklusif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Cilegon, Maret 2021

WALI KOTA CILEGON

ttd.

H. HELLDY AGUSTIAN, SE., SH., MH.